



Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor : 11 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah.

CaLK menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah memengaruhi penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang sehingga CaLK membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan CaLK adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magelang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah daerah. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang No 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati (Perbub) Magelang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
15. Peraturan Bupati (Perbub) Magelang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika CaLK adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Strategi Pencapaian
- 2.4 Rencana Program Prioritas yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan Kewenangan
- 2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Pendapatan
- 3.2 Belanja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Prinsip Akuntansi Desentralisasi
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2 Penjelasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3 Penjelasan Neraca
 - 5.4 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.7 Informasi Penting Lainnya
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
- 6.1 Domisili Entitas
 - 6.2 Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
 - 6.3 Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang
- Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang selama Tahun 2023 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04%, menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yang sebesar 5,46%, sedangkan inflasi selama Tahun 2023 adalah sebesar 0,55%, turun bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 1,18%. Menurut perhitungan, pada Tahun 2023 penduduk Kabupaten Magelang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebesar 28,53 juta rupiah. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2023 adalah sebagai berikut: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan sebesar Rp7.913,20 milyar (19,45%), sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp1.656,05 milyar (4,07%), sektor industri pengolahan sebesar Rp9.632,97 milyar (23,68%), sektor pengadaan listrik dan gas menyumbangkan sebesar Rp18,35 milyar (0,05%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah sebesar Rp31,70 milyar (0,08%), sektor konstruksi sebesar Rp3.961,49 milyar (9,74%), sektor perdagangan besar eceran dan reparasi sebesar Rp5.381,88 milyar (13,23%), sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp1.688,14 milyar (4,15%), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp1.820,34 (4,47%), sektor informasi dan komunikasi sebesar Rp1.626,27 milyar (4,00%), sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp1.144,08 milyar (2,81%), sektor *real estate* sebesar Rp711.05 milyar (1,75%), sektor jasa perusahaan sebesar Rp109,46 milyar (0,27%), sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp1.237,90 (3,04%), sektor jasa pendidikan sebesar Rp2.353,42 milyar (5,79%), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar sebesar Rp352,97 milyar (0,87%), sektor jasa lainnya sebesar sebesar Rp1.041,13 milyar (2,56%).

Data tingkat kemiskinan, angka pengangguran, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Gini Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

1. Data tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2021	11,91	
2	2022	11,09	Turun 0,82% dari tahun sebelumnya
3	2023	10,96	Turun 0,13% dari tahun sebelumnya

2. Data angka pengangguran di Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.2 Angka Pengangguran di Kabupaten Magelang Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2021	5,03	
2	2022	4,97	Turun 0,06% dari tahun sebelumnya
3	2023	4,42	Turun 0,55% dari tahun sebelumnya



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. IPM Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Magelang Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2021	70,12	
2	2022	70,85	Naik 0,73% dari tahun sebelumnya
3	2023	71,56	Naik 0,71% dari tahun sebelumnya

4. Gini Rasio Kabupaten Magelang selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Gini Rasio di Kabupaten Magelang Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Persentase (%)	Keterangan
1	2021	0,384	
2	2022	0,362	Turun 0,022 dari tahun sebelumnya
3	2023	0,358	Turun 0,004 dari tahun sebelumnya

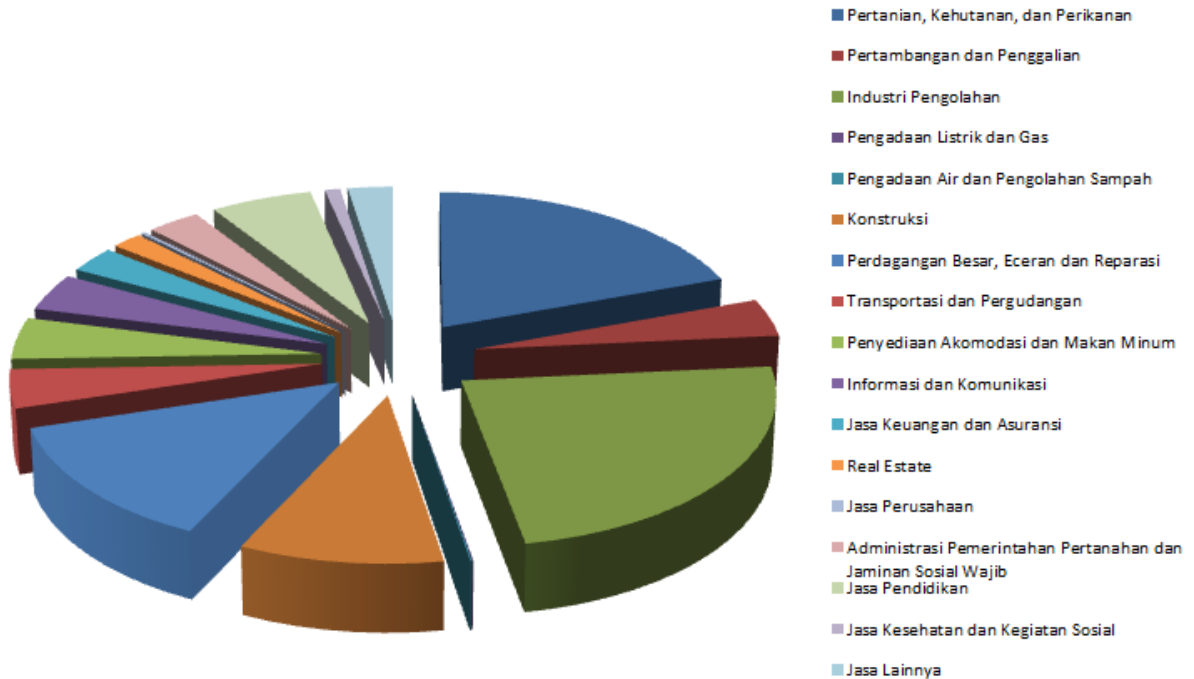
Mandatory Spending Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. *Mandatory Spending* Kabupaten Magelang Tahun 2023

No	Uraian <i>Mandatory Spending</i>	Seharusnya (%)	Penetapan 2023 (%)	Perubahan 2023 (%)	Dasar Hukum	Keterangan
1	Belanja Pegawai	30,00	35,50	30,73	UU No 1 Tahun 2022 dan Permendagri No 84 Tahun 2022	Diupayakan adanya penyesuaian s/d 5 tahun
2	Fungsi Pendidikan	20,00	34,80	31,89	Permendagri No 84 Tahun 2022	
3	Fungsi Kesehatan	10,00	22,69	24,13	Permendagri No 84 Tahun 2022	
4	Belanja Infrastruktur	40,00	21,10	26,00	Permendagri No 84 Tahun 2022	
5	ADD	10,00	20,59	21,20	Permendagri No 84 Tahun 2022	

Sampai dengan saat ini, *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur di Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi minimal 40% sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, penganggaran harus dibagi ke dalam berbagai urusan dan bidang urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Kabupaten Magelang terus berupaya untuk memenuhi alokasi *Mandatory Spending* bidang infrastruktur sampai dengan Tahun 2027.



Gambar 2.1 Kontribusi Masing-Masing Sektor pada PDRB

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 disusun mengacu pada kebutuhan daerah sebagaimana terdapat dalam Perbup Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023. Selain itu, KUA TA 2023 juga disusun dengan memedomani Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023.

KUA TA 2023 telah dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang dan disepakati dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang Nomor: 0019.5/26/23/2022 dan Nomor: 180/659/02/2022 tanggal 13 Agustus 2022. Untuk Perubahan KUA TA 2023 mengacu pada Perbup Magelang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023. Selain itu, Perubahan KUA TA 2023 juga disusun dengan memedomani Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023.

Perubahan KUA TA 2023 telah dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang dan disepakati dengan Nota Kesepakatan antara Pemkab Magelang dengan DPRD



Kabupaten Magelang Nomor : 0019.5/30/23/2023 dan Nomor: 170/754/02/2023 tanggal 11 September 2023.

2.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- lain PAD Yang Sah. Selanjutnya dalam penganggaran PAD akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 1) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Pajak Daerah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi baik sosialisasi maupun pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dari penilaian Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang merupakan bagi hasil laba perusda Tahun 2022.
 - c. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, BLUD dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa), dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengacu pada pagu definitif *release* resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) sesuai Surat DJPK Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2023. Sedangkan Bantuan Keuangan dari Provinsi SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/13 Tahun 2023 Tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Hibah sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Nomor: PHD/06/MK.7/DTK.03/UPLAND/2021 Tanggal 24 Maret 2021.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya ke depan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain serta pihak lain untuk optimalisasi Pendapatan Daerah;
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan



perbaikan/update teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi);

- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pengawasan dengan penggunaan alat perekam data transaksi usaha Wajib Pajak (Tapping Box);
- e. Penegakan aturan terhadap Wajib Pajak;
- f. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal dengan mendasari Kajian Investasi terlebih dahulu;
- g. Kajian Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Magelang dengan manajemen BUMD agar penerimaan pendapatan lebih optimal;
- h. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- i. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- j. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti NJOP PBB, NJOP BPHTB;
- l. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- m. Meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- n. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD yang Sah;

Pendapatan daerah dirinci menurut utusan Pemerintah Daerah bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan daerah.

2.2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan



kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD TA 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa sesuai Tabel 2.5.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan



rancangan peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

2.2.1.2.1 Arah kebijakan Belanja Operasi untuk TA 2023

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya dan telah memperhitungkan pegawai yang pensiun,
 - b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021,2022 dan 2023. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK,
 - c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya,
 - d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,
 - e. Anggaran tunjangan keluarga, tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - f. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan serta 50% tambahan penghasilan per bulan untuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai ASN. Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
 - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya,
 - h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya,
 - i. Memperhitungkan Belanja Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR),
 - j. Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran



Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- k. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera.
 - l. Menganggarkan belanja pegawai BLUD.
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut:

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa:

- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai,
 - b. Belanja Jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaanlayanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN,
 - c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya,
 - d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri,
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.
3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk



menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Selain itu juga menganggarkan Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Magelang dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk kepentingan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024.

4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2023 memedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2.2 Arah Kebijakan Belanja Modal untuk TA 2023

Belanja Modal ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

2.2.1.2.3 Arah Belanja Tidak Terduga untuk TA 2023

Belanja Tak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.1.2.4 Arah Belanja Transfer untuk TA 2023

Belanja transfer terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan Wisata Ketep Pass.



2. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan kepada Desa melalui anggaran Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa, menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

2.2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang dan kewajiban keada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Kebijakan terkait penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang adalah sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. SiLPA

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

SiLPA mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA pada Perubahan APBD 2023 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Tahun 2022 No. 68A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 Tanggal 16 Mei 2023 sebesar Rp286.776.557.722,00

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam



tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Kebijakan pembiayaan TA 2023 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebesar 40% dari total kebutuhan dana yaitu Rp29.131.304.000,00.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah (BUMD), penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Pada tahun 2023 ini, pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat (obligasi).
Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah yang merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman. Pada TA 2023, Kabupaten Magelang belum berencana melakukan pinjaman.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun badan usaha milik daerah.
Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023 tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
6. Penerimaan Piutang Daerah
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2023 tidak terdapat penerimaan piutang daerah.

2.2.1.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening danan cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
Dalam Kebijakan Umum APBD TA 2023 ini dianggarkan pembentukan dana



cadangan untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00.

2. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**
Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta dan/atau Koperasi. Bentuk Penyertaan Modal Daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi, surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
Dalam Kebijakan Umum APBD TA 2023 ini mengalokasikan untuk penyertaan modal (investasi) ke Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebesar Rp7.500.000.000,00.
3. **Pembayaran Pokok Hutang**
Jumlah pembayaran pokok hutang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai yang telah disepakai.TA 2022, Kabupaten Magelang tidak ada pengeluaran pembayaran pokok hutang.
4. **Pemberian Pinjaman Daerah**
Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang TA 2023 mengalokasikan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp6.875.000.000,00.

2.3 Strategi Pencapaian

2.3.1 Strategi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
3. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan



pajak secara *online* (e-SPTPD, e-BPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti *tapping box*;

4. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
5. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
6. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
8. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal; dan
9. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah..

2.3.2 Strategi Belanja Daerah

Strategi Pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, dan kebijakan belanja daerah. Strategi pencapaian belanja Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati); dan
2. Mendukung prioritas lainnya.

Maka rencana langkah konkrit untuk mencapai target pada Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1 Prioritas Kehidupan Beragama dan Berakhlak Mulia

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Implementasi program unggulan ini antara lain melalui:

1. Pembangunan *Islamic Center*
2. Bantuan pembangunan tempat ibadah
3. Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter
4. Peningkatan kesejahteraan guru mengaji

2.3.2.2 Prioritas Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang antara lain terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan antara lain diarahkan pada beasiswa bagi siswa miskin untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;



3. Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swastadan negeri termasuk guru PAUD/TK;
4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui bimbingan teknis dan sertifikasi guru;
5. Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik pendidikan formal maupun non formal;
6. Pencapaian wajib belajar sembilan tahun;
7. Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan presentasi lembaga PAUD yang terakreditasi;
8. Penguatan basis data pendidikan;
9. Penguatan pendidikan karakter;
10. Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi covid-19.

2.3.2.3 Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2023 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada:

1. Bantuan ambulan desa.
2. Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
3. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
4. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
6. Penguatan basis data kesehatan.
7. Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
8. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak berisiko
9. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit zoonosis; surveilans penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
10. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
11. Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

2.3.2.4 Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergisitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



2.3.2.5 Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM

Pada Tahun 2023, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada Tahun 2023, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

1. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
2. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
3. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
4. Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
5. Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumber daya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.

2.3.2.6 Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas sarana dan prasarana publik diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:

1. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan saranaekonomi)
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan.
3. Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan
4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, *guardrail*, marka jalan, *zebra cross* serta pemeliharaan



APILL; dan pengembangan pelayanan angkutan.

2.3.2.7 Lingkungan Hidup

Prioritas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
3. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air
4. Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.
5. Pengendalian Pencemaran lingkungan melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah'
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

2.3.2.8 Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah di mana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Program prioritas ini diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui:

1. *E-Government / Smart Regency* melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
2. Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, Obligasi Daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
3. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
5. Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan) melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);
7. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;
8. Melanjutkan reformasi birokrasi;
9. Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.

2.3.2.9 Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, diantaranya melalui:



1. Peningkatan kondusifitas ketenteraman dan ketertiban;
2. Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).

2.3.2.10 Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2023, pembangunan pada kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

1. Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
2. Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
3. Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
4. Penghargaan atlet berprestasi.

2.4 Rencana Program Prioritas yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan Kewenangan

2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkelanjutan.

2.4.1.1 Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personel peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (PKBM).
2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.



2.4.1.2 Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntillan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan *Post Market* pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.



2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Sumber Daya Air
Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/ Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum.
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.
5. Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman.
6. Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa



konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi.

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RT/RW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.

2. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada Penyusunan/Reviu/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan.

3. Program Peningkatan PSU

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.

2.4.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penertiban yang dilaksanakan.

2. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan



evakuasi korban bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

2.4.1.6 Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Pemberdayaan Sosial;

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

2. Program Rehabilitasi Sosial;

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase

PMKS lainnya di luar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

4. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu sebagai berikut:

2.4.4.1 Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.



Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

2. Program penempatan tenaga kerja;
Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Program hubungan industrial;
Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

2.4.4.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.
2. Program perlindungan perempuan;
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.
4. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.

2.4.4.3 Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi per kapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.
2. Program penanganan kerawanan pangan;
Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini



dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.

3. Program pengawasan keamanan pangan.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

2.4.4.4 Pertanahan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanahan.

2.4.4.5 Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program perencanaan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air.
3. Program pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
4. Program pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
5. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan.
6. Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi.



7. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.
8. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.
9. Program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani.

2.4.4.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP.
2. Program pencatatan sipil;
Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penerbitan akta kelahiran.
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

2.4.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penataan desa;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan.
2. Program peningkatan kerja sama desa;
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerja sama desa dan kawasan perdesaan.
3. Program administrasi pemerintahan desa;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat



dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

2.4.4.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengendalian penduduk;
Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.
2. Program pembinaan keluarga berencana;
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

2.4.4.9 Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

2.4.4.10 Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program informasi dan komunikasi publik;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media massa.
2. Program aplikasi informatika.
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain dan pengelolaan *e-government* dengan indikator capaian Persentase aplikasi Pendamping Desa dan desa yang terfasilitasi dan Persentase Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

2.4.4.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:



1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
2. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.
3. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerja sama antas koperasi dan lembaga lain.
4. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.
5. Program pengembangan UMKM.
Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase peningkatan omzet usaha mikro.

2.4.4.12 Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal;
Program ini diarahkan pada pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.
2. Program promosi penanaman modal;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepedaftaran/pendaftar penanaman modal.
3. Program pelayanan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perizinan.
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

2.4.4.13 Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.
2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;



Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.

3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

2.4.4.14 Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

2.4.4.15 Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

2.4.4.16 Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan kebudayaan;
Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.
2. Program pengembangan kesenian tradisional;
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.
3. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

2.4.4.17 Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

2.4.4.18 Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.



2.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.4.1 Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengelolaan perikanan budi daya;
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudi daya ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budi daya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudi daya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budi daya perikanan air tawar.
2. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.
3. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

2.4.4.2 Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.
2. Program pemasaran pariwisata;
Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
4. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.



2.4.4.3 Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
3. Program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
5. Program perizinan usaha pertanian;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator capaian cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.
6. Program penyuluhan pertanian.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.

2.4.4.4 Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini



dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.

2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.
3. Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.
4. Program pengembangan ekspor;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.
5. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

2.4.4.5 Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

2.4.4.6 Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi.

2.4.4 Unsur Pendukung

2.4.4.1 Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerja sama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.
2. Program perekonomian dan pembangunan.
Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.



3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

2.4.4.2 Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

2.4.5 Unsur Penunjang

2.4.5.1 Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2.4.5.2 Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengelolaan keuangan daerah;
Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.



2. Program pengelolaan barang milik daerah;
Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.
3. Program pengelolaan pendapatan daerah.
Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

2.4.5.3 Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, persentase keterisian jabatan, persentase ASN yang lulus diklat, dan persentase evaluasi kinerja ASN.

2.4.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbang dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.4.6 Unsur Pengawas

2.4.8.1 Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penyelenggaraan pengawasan;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan.
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen SPIPPD yang memadai.

2.4.7 Unsur Kewilayahan

2.4.7.1 Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.



2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
3. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

2.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

2.4.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.



2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan, yaitu:

Tabel 2.6. Indikator Pencapaian Target Kinerja

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
a.	Pendidikan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat
b.	Kesehatan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Mutu Pelayanan FKTP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS yang Terpenuhi
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntian
c.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Cakupan layanan jaringan irigas
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum*
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik*
	Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik
	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan layanan Jasa konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian tata ruang
		Persentase Dokumen Rekomendasi Perizinan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
d.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Pengendalian kawasan permukiman
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase fasilitasi penyediaan rumah bagi MBR
	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengendalian kawasan permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase penanganan PSU Perumahan
e.	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak Kebakaran dalam waktu tanggap
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Perangkat Daerah
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Dan Kepegawaian Perangkat Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan informasi rawan bencana
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi
		Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
f.	Sosial	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan Keuangan perangkat Daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan Keuangan perangkat Daerah
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS)
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti **
		Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang divalidasi
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
a.	Kebudayaan	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
b.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
		dan budaya
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak yang memiliki SDM dan sarpras sesuai standart
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standart
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standart
c.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
	Program Pengendalian Penduduk	Usia Kawin Pertama (UKP)
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase Peningkatan partisipasi ber-KB
		Presentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern (CPR)*
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
		Cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need)*
		Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)*
d.	Tenaga Kerja	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja
		Cakupan Pengembangan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan pengembangan kompetensi, penempatan dan perluasan kesempatan kerja
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dan Produktivitas Pekerja
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja SKPD dan Keuangan Perangkat Daerah
e.	Pangan	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah (%)
		Penguatan Cadangan Pangan (%)
		Ketersediaan energi per kapita (KKal)
		Ketersediaan protein per kapita (gram)
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)
f.	Lingkungan Hidup	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan menaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mah), Kearifan Lokal Dan Hak Mah Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase mata air yang dikonservasi



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang terkelola
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan dan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, PPLH, dan PUU LH yang ditangani
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim
		Persentase sekolah Adiwiyata
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani
g.	Administrasi Kependudukan Dan Cakil	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP
	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan
h.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Kerja sama Desa dan Kawasan Perdesaan
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
i.	Perhubungan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja SKPD dan Keuangan Perangkat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Angkutan Umum Layak Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Masyarakat Sadar Bidang Keselamatan Berlalu Lintas
j.	Statistik	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
k.	Persandian	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
I.	Komunikasi dan Informatika	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan diseminasi informasi melalui media massa
	Program Aplikasi Informatika	Cakupan PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan komunikasi data yang optimal dan stabil
		Persentase layanan domain dan subdomain pemerintah
m.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan umum
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan kerja sama antar koperasi dan lembaga lain
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Cakupan pemberdayaan usaha mikro
		Cakupan pemberdayaan usaha mikro
n.	Penanaman Modal	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pemantauan dan pengendalian investasi
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD dan keuangan perangkat daerah
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan
o.	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pembinaan kepramukaan
p.	Perpustakaan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio judul koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten
		Angka kepuasan pemustaka
		Rasio Pustakawan dan Tenaga Teknis perpustakaan yang mengikuti bimtek sosialisai dan workshop



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
q.	Kearsipan	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip
		Persentase pencipta arsip yang tertib arsip
r.	Perindustrian	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Industri Kecil
s.	Transmigrasi	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Pembinaan Transmigrasi
t.	Pertanian	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah (%)
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah (%)
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Produktivitas Padi (Kw/ha)
		Produktivitas Jagung (Kw/ha)
		Produktivitas Kopi (Kw/ha)
		Produktivitas Cabai (Kw/ha)
		Produktivitas Bawang Putih (Kw/ha)
		Produktivitas Cengkeh (Kw/ha)
		Produktivitas Kelapa Dalam (Kw/ha)
		Produktivitas Salak (Kw/pohon)
		Produktivitas Jeruk (Kw/pohon)
		Produktivitas Kelengkeng (Kw/pohon)
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan (%)
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan perizinan usaha pertanian (%)
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)
u.	Perdagangan	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan sarana prasarana dan pengelolaan yang baik
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Cakupan Pelayanan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	fluktuasi harga bapok (10 komoditas):beras,minyak goreng,gula pasir, cabe merah keriting, cabe rawit merah,daging sapi,daging ayam ras,telur ayam ras,bawang merah,terigu
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP bertanda tera sah
v.	Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan sarana prasarana Daya Tarik Wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik
	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan promosi/ pemasaran pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Kelembagaan, Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	
a.	Kelautan dan Perikanan	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pengelolaan Perikanan Budi daya	Cakupan bina kelompok pembudi daya ikan
		Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan
		Cakupan pengembangan budi daya perikanan
		Cakupan pengembangan kawasan budi daya perikananair tawar
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan peningkatan prasarana peternakan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
IV	Unsur Pendukung	
a.	Administrasi Pemerintahan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
		Penunjang Urusan Pemerintahan
		Persentase ketercapaian penataan organisasi
		Penunjang Urusan Pemerintahan
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah disusun tepat asas
		Persentase Produk Hukum Daerah yang dikaji sesuai asas
		Persentase Permasalahan Hukum yang didampingi
	Program Perumusan Dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD yang berkinerja baik
		Persentase kebijakan perekonomian yang dijalankan
		Persentase peningkatan sumbangan BUMD pada PAD
	Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD tertib administrasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Kinerja layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
		Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja SKPD, dan Keuangan Perangkat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kematangan UKPBJ
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
		Persentase pemenuhan fasilitasi kebijakan anggaran
		Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD
		Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda
		Persentase pemenuhan fasilitasi rekomendasi DPRD
		Persentase pemenuhan fasilitasi tugas DPRD
V	Urusan Penunjang	
a.	Perencanaan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan, sosial, dan budaya
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang ekonomi dan sumber daya alam
		Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang tata ruang pengembangan wilayah dan infrastruktur
b.	Penelitian dan Pengembangan	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
		Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah
c.	Keuangan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD, dan keuangan perangkat daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu
		Persentase serapan APBD
		Persentase penerimaan pendapatan di RKUD
		Penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD tertib administrasi pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Program	Indikator Program
1	2	3
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase kenaikan pajak
		Presentase kenaikan retribusi
		Presentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah
d.	Kepegawaian	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD dan keuangan perangkat daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG
		Persentase keterisian Jabatan Pimpinan Tertinggi, Administrator dan Pengawas
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasinya
		Persentase ASN yang terevaluasi kinerjanya
VI	Unsur Pengawas	
a.	Pengawasan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja SKPD dan keuangan daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Laporan Hasil Pengawasan
VII	Unsur Kewilayahan	
a.	Kewilayahan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
		Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa yang Tertib Administrasi
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi
VIII	Unsur Pemerintahan Umum	
a.	Pemerintahan Umum	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Yang Aktif
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Dalam Kegiatan Wawasan Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Kegiatan Pembinaan Politik
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

3.1 Pendapatan

Realisasi pencapaian kinerja Pendapatan Kabupaten Magelang sebesar Rp2.573.481.690.623,00 dari target sebesar Rp2.576.527.842.333,00 atau tercapai sebesar 99,88% yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	204.052.205.430,00	212.279.851.804,00	104,03	198.104.231.731,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	17.572.619.522,00	16.188.745.583,00	92,12	17.040.402.828,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	700.000.000,00	645.253.798,00	92,18	633.737.900,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	12.800.000,00	11.545.000,00	90,20	13.970.000,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.354.088.746.381,00	2.344.254.821.438,00	99,58	2.342.156.735.631,00
6	Unsur Kewilayahan	101.471.000,00	101.473.000,00	100,00	75.099.000,00
	Jumlah	2.576.527.842.333,00	2.573.481.690.623,00	99,88	2.558.024.177.090,00

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.1.**

3.2 Belanja

Realisasi pencapaian kinerja Belanja Kabupaten Magelang sebesar Rp2.687.824.939.040,00 dari target sebesar Rp2.848.060.704.055,00 atau tercapai sebesar 94,35% yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel berikut: :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang
Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.562.969.599.460,00	1.486.393.311.570,00	95,10	1.329.696.946.739,00
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	267.564.693.836,00	256.885.170.895,00	96,01	253.093.312.437,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	10.027.644.159,00	9.725.828.289,00	96,99	11.880.983.520,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	111.587.568.198,00	104.777.744.432,00	93,90	96.944.481.629,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	796.940.625.043,00	737.433.719.059,00	92,53	820.187.117.082,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12.095.242.745,00	11.194.380.766,00	92,55	5.946.230.111,00
7	Unsur Kewilayahan	47.517.787.484,00	42.965.678.798,00	90,42	46.001.385.052,00
8	Unsur Pemerintahan Umum	39.357.543.130,00	38.449.105.231,00	97,69	6.575.545.107,00
	Jumlah	2.848.060.704.055,00	2.687.824.939.040,00	94,37	2.570.326.001.677,00

Realisasi pencapaian target kinerja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3.2.**



BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang telah menetapkan Perbub Magelang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (*reporting entity*) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang yang terdiri atas 48 entitas akuntansi atau SKPD berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 19 Tahun 2016. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi dari 48 SKPD sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 16 | Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah |
| 2 | Dinas Kesehatan | 17 | Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | RSUD Muntilan | 18 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang | 19 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman | 20 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran | 21 | Sekretariat Daerah |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana
Daerah | 22 | Sekretariat DPRD |
| 8 | Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak | 23 | Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah |
| 9 | Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja | 24 | Badan Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah |
| 10 | Dinas Pertanian dan Pangan | 25 | Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Daerah |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup | 26 | Inspektorat |
| 12 | Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil | 27 | Kecamatan Salaman |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa | 28 | Kecamatan Borobudur |
| 14 | Dinas Perhubungan | 29 | Kecamatan Ngluwar |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 30 | Kecamatan Salam |
| | | 31 | Kecamatan Srumbung |
| | | 32 | Kecamatan Dukun |
| | | 33 | Kecamatan Sawangan |
| | | 34 | Kecamatan Muntilan |



35	Kecamatan Mungkid	42	Kecamatan Pakis
36	Kecamatan Mertoyudan	43	Kecamatan Ngablak
37	Kecamatan Tempuran	44	Kecamatan Grabag
38	Kecamatan Kajoran	45	Kecamatan Tegalrejo
39	Kecamatan Kaliangkrik	46	Kecamatan Secang
40	Kecamatan Bandongan	47	Kecamatan Windusari
41	Kecamatan Candimulyo	48	Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2 Prinsip Akuntansi Desentralisasi

Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari Pemda sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi.

4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam Lampiran I.02, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 5 dan paragraf 7 adalah sebagai berikut:

Paragraf 5 : *“Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual”.*

Paragraf 7 : *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran”.*

Sehingga basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan dan investasi jangka pendek.

2. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya

Adapun rincian penjelasan masing-masing jenis aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah meliputi:

- a. Kas di Kas Daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember;
- c. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember;
- d. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijadikan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.



Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang/sejak jatuh tempo sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah;
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan nilai wajar.

4. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Properti Investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal

Properti Investasi diukur saat pengakuan awal sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

5. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu:

a. Investasi Jangka Pendek

Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu.

b. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi



sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- 2) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih.

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

6. Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca;
- b. Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;
- c. Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- a. Tagihan piutang angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan.
- b. Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.



- d. Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal, seperti sistem informasi/aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- e. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Pengakuan Aset

1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
4. Investasi jangka panjang dicatat sebesar menggunakan metode ekuitas untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%, sedang untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20% menggunakan metode biaya/perolehan.
5. Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
6. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/mesin adalah sama atau lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit.
7. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan pada mebelair atau sejenis yang terbuat dari bahan kayu.
8. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset gedung bangunan adalah sama atau lebih dari Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per unit.
9. Aset tetap peralatan mesin dan gedung bangunan yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang.
10. Pengadaan aset tetap tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap.
11. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 per unit.
12. Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, meliputi:

1. *Goodwill*;
2. Hak Paten atau Hak Cipta;
3. Royalti;
4. *Software*;
5. Lisensi;
6. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
7. Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
8. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

1. Aset Tidak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan surat pernyataan dari Pengguna Barang dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
2. Aset Tidak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang oleh Pengguna Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai Aset Tidak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun masa manfaat.

4.4.2 Hutang

Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Hutang diklasifikasikan:

1. Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek meliputi bagian lancar hutang jangka panjang, hutang kepada pihak ketiga, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga.
2. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.



4.4.3 Ekuitas

Ekuitas adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.4.4 Pendapatan- LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut.

4.4.5 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.6 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang.

4.4.7 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.



Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

4.4.8 Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.9 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
2. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
2. Metode pendekatan Aset
Setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	2.576.527.842.333,00	2.573.481.690.623,00
		2.558.024.177.090,00

Anggaran Pendapatan dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.576.527.842.333,00 dan terealisasi sebesar Rp2.573.481.690.623,00.

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	443.649.294.413,00	465.486.053.517,00	104,92	432.688.035.341,00
2	Pendapatan Transfer	2.111.381.547.920,00	2.089.541.001.808,00	98,97	2.100.710.656.495,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00	85,85	24.625.485.254,00
	Jumlah	2.576.527.842.333,00	2.573.481.690.623,00	99,88	2.558.024.177.090,00

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	443.649.294.413,00	465.486.053.517,00
		432.688.035.341,00

Akun ini menggambarkan realisasi PAD untuk periode TA 2023 dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Daerah	179.322.908.877,00	189.568.476.778,00	105,71	169.682.578.756,00
2	Retribusi Daerah	19.874.479.802,00	18.992.881.583,00	95,56	18.953.321.094,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.664.089.642,00	30.598.215.796,00	103,15	28.082.640.133,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	214.787.816.092,00	226.326.479.360,00	105,37	215.969.495.358,00
	Jumlah	443.649.294.413,00	465.486.053.517,00	104,92	432.688.035.341,00



5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	179.322.908.877,00	189.568.476.778,00	169.682.578.756,00

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Realisasi Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Hotel	17.398.794.444,00	18.296.496.695,00	105,16	15.286.879.681,00
2	Pajak Restoran	27.284.969.787,00	29.917.335.807,00	109,65	24.427.499.187,00
3	Pajak Hiburan	4.648.938.778,00	4.726.606.197,00	101,67	3.880.703.301,00
4	Pajak Reklame	1.197.855.079,00	1.324.830.646,00	110,60	1.195.598.522,00
5	Pajak Penerangan Jalan	44.870.079.024,00	45.655.001.705,00	101,75	42.983.669.080,00
6	Pajak Parkir	1.565.148.392,00	1.672.639.001,00	106,87	1.727.857.470,00
7	Pajak Air Tanah	938.879.760,00	1.013.976.680,00	108,00	926.660.120,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	2.882.000.000,00	3.769.062.835,00	130,78	2.750.014.945,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	42.506.029.431,00	42.975.578.095,00	101,10	42.506.029.431,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.030.214.182,00	40.216.949.117,00	111,62	33.997.667.019,00
	Jumlah	179.322.908.877,00	189.568.476.778,00	105,71	169.682.578.756,00

SKPD pemungut pajak adalah BPPKAD dengan realisasi sebesar Rp189.568.476.778,00. Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan kontribusi wajib kepada daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun 2023 adalah Rp18.296.496.695,00 dari anggaran sebesar Rp17.398.794.444,00 dengan prosentase capaian sebesar 105,16%. Realisasi pendapatan Pajak Hotel Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.009.617.014,00 atau 19,69% dari Tahun 2022 karena bertambahnya alat perekam data transaksi wajib pajak, pemutakhiran wajib pajak dan subjek pajak dengan melakukan pendataan, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak.



2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2023 adalah Rp29.917.335.807,00 dari anggaran sebesar Rp27.284.969.787,00 dengan prosentase capaian sebesar 109,65%. Realisasi pendapatan Pajak Restoran Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.489.836.620,00 atau 22,47% dari Tahun 2022 karena bertambahnya alat perekam data transaksi wajib pajak, pemutakhiran wajib pajak dan subjek pajak dengan melakukan pendataan, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak.

Tabel 5. 4 Realisasi Pajak Restoran

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	14.918.681.182,00	15.533.566.824,00	104,12	14.435.085.198,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.338.170.798,00	2.813.802.495,00	120,34	1.775.642.865,00
3	Pajak Warung dan Sejenisnya	4.657.851.828,00	6.249.332.089,00	134,17	3.293.970.936,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.370.265.979,00	5.320.634.399,00	99,08	4.922.800.188,00
	Jumlah	27.284.969.787,00	29.917.335.807,00	109,65	24.427.499.187,00

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan. Realisasi pajak hiburan untuk rekreasi dan hiburan lainnya pada Tahun 2023 sebesar Rp4.726.606.197,00 dari anggaran sebesar Rp4.648.938.778,00 atau tercapai 101,67%. Realisasi pendapatan Pajak Hiburan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp845.902.896,00 atau 21,80% dari Tahun 2022 karena bertambahnya alat perekam data transaksi wajib pajak, pemutakhiran wajib pajak dan subjek pajak dengan melakukan pendataan, serta melakukan sosialisasi secara masif kepada wajib pajak.

Tabel 5. 5 Realisasi Pajak Hiburan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Tontonan Film	936.698.915,00	1.116.822.694,00	141,08	976.012.797,00
2	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	4.940.000,00	2.360.000,00	100,00	4.940.000,00
3	Pajak Pameran	35.000,00	35.000,00	117,01	842.500,00
4	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	65.323.005,00	68.596.021,00	242,56	71.119.743,00
5	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.327.023.572,00	3.233.548.332,00	102,28	2.799.611.410,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
6	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	314.438.286,00	304.819.150,00	348,82	27.706.851,00
7	Pajak Pertandingan Olahraga	480.000,00	425.000,00	78,33	470.000,00
	Jumlah	4.648.938.778,00	4.726.606.197,00	101,67	3.880.703.301,00

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklame. Pajak Reklame meliputi Reklame papan, *Billboard*, *vidiotron* dan *Megatron*. Pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.324.830.646,00 dari anggaran sebesar Rp1.197.855.079,00 atau tercapai sebesar 110,60%. Realisasi pendapatan Pajak Reklame Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp129.232.124,00 atau 10,81% dari Tahun 2022 karena meningkatnya jumlah wajib pajak reklame baru.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas penggunaan tenaga listrik baik yang di hasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan PLN pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp45.655.001.705,00 dari anggaran sebesar Rp44.870.079.024,00 atau tercapai sebesar 101,75%. Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.671.332.625,00 atau 6,21% dari Tahun 2022 karena adanya pertumbuhan pelanggan listrik baru.

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak Parkir pada Tahun 2023 teralisasi sebesar Rp1.672.639.001,00 dari anggaran sebesar Rp1.565.148.392,00 atau tercapai sebesar 106,87%. Realisasi pendapatan Pajak Parkir Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.218.469,00 atau 3,20% dari Tahun 2022 karena pajak parkir Angkasa Pura Sport (APS) dan artos turun di Tahun 2023.

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pajak Air Tanah pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.013.976.680,00 dari anggaran sebesar Rp938.879.760,00 atau tercapai sebesar 108,00%. Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp87.316.560,00 atau 9,42% dari Tahun 2022 karena adanya pendataan terhadap objek pajak baru.

8. Pajak MBLB

Pajak MBLB adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

di dalam dan/atau permukaan bumi untuk di manfaatkan. Pajak MBLB meliputi pasir, batu kerikil. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terealisasi Rp3.769.062.835,00 dari anggaran sebesar Rp2.882.000.000,00 atau tercapai sebesar 130,78%. Realisasi pendapatan Pajak MBLM Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.047.890,00 atau 37,06% dari Tahun 2022 karena pembukaan pos pemungutan pajak MBLB baru di Jerukagung.

9. PBBP2

PBBP2 adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Realisasi PBBP2 pada Tahun 2023 sebesar Rp42.975.578.095,00 dari anggaran sebesar Rp42.506.029.431,00 atau tercapai sebesar 101,10%. Realisasi pendapatan PBBP2 Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp469.548.664,00 atau 1,10% dari Tahun 2022 karena intensifikasi dan ekstensifikasi kepada wajib pajak.

Realisasi PBBP2 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Realisasi PBBP2

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kec. Salaman	2.008.585.747,00	2.124.227.714,00	105,76	2.108.791.235,00
2	Kec. Borobudur	2.286.869.485,00	2.457.217.643,00	107,45	2.341.819.163,00
3	Kec. Ngluwar	1.252.112.439,00	1.254.600.727,00	100,20	1.259.441.624,00
4	Kec. Salam	2.078.630.101,00	2.374.634.108,00	114,24	2.334.702.891,00
5	Kec. Srumbung	1.732.400.303,00	1.733.026.654,00	100,04	1.743.704.305,00
6	Kec. Dukun	1.619.640.144,00	1.785.496.772,00	110,24	1.790.325.691,00
7	Kec. Sawangan	1.729.705.637,00	1.958.557.079,00	113,23	1.805.906.733,00
8	Kec. Muntilan	2.665.323.021,00	2.806.713.168,00	105,30	2.801.284.239,00
9	Kec. Mungkid	2.412.736.118,00	2.564.399.637,00	106,29	2.398.866.841,00
10	Kec. Mertoyudan	3.754.142.365,00	3.535.099.731,00	94,17	3.604.255.156,00
11	Kec. Tempuran	2.472.770.795,00	2.563.859.992,00	103,68	2.560.015.448,00
12	Kec. Kajoran	1.879.008.824,00	1.909.291.997,00	101,61	1.812.473.837,00
13	Kec. Kaliangkrik	1.395.205.033,00	1.396.614.291,00	100,10	1.411.144.612,00
14	Kec. Bandongan	1.825.189.683,00	1.795.147.766,00	98,35	1.808.528.494,00
15	Kec. Candimulyo	1.895.615.958,00	1.897.271.932,00	100,09	1.897.129.758,00
16	Kec. Pakis	1.770.031.540,00	1.776.861.420,00	100,39	1.733.670.526,00
17	Kec. Ngablak	1.303.886.171,00	1.304.452.719,00	100,04	1.303.340.419,00
18	Kec. Grabag	2.605.147.725,00	2.460.924.179,00	94,46	2.468.628.553,00
19	Kec. Tegalrejo	1.554.057.717,00	1.412.024.282,00	90,86	1.303.595.965,00
20	Kec. Secang	2.835.810.212,00	2.436.352.042,00	85,91	2.584.790.807,00
21	Kec. Windusari	1.429.160.413,00	1.428.804.242,00	99,98	1.433.613.134,00
	Jumlah	42.506.029.431,00	42.975.578.095,00	101,10	42.506.029.431,00

Realisasi pendapatan pajak PBBP2 yang capaiannya dibawah 91,00% dikarenakan:

1. Belum tingginya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBBP2 di Kec. Secang dan Kec. Tegalrejo
2. Wajib pajak potensial/yang memiliki ketetapan pajak tinggi di Kec. Secang diantaranya PT. Industri Sandang Nusantara belum melakukan pembayaran



10. BPHTB

BPHTB adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. BPHTB Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp40.216.949.117,00 dari anggaran sebesar Rp36.030.214.182,00 atau tercapai 111,62%. Realisasi pendapatan BPHTB Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.219.282.098,00 atau 18,29% dari Tahun 2022 karena membaiknya kondisi perekonomian sehingga daya beli masyarakat meningkat dan telah penerapan NJOP PBB-PP yang sudah mendekati harga pasar.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
19.874.479.802,00	18.992.881.583,00	18.953.321.094,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 7 Realisasi Retribusi Daerah

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Retribusi Jasa Umum	10.917.290.802,00	9.238.629.556,00	84,62	12.019.984.944,00
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	761.504.209,00	169,22	406.238.000,00
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.347.500.000,00	1.513.279.731,00	112,30	1.248.224.528,00
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.000.000.000,00	1.000.338.000,00	100,03	955.483.000,00
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	5.290.050.802,00	3.413.895.294,00	64,53	6.845.162.267,00
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.255.990.000,00	847.240.000,00	67,46	1.011.800.000,00
f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	750.000,00	1.390.000,00	185,33	1.460.000,00
g.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150.000.000,00	123.489.000,00	82,33	151.760.500,00
h.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.423.000.000,00	1.577.493.322,00	110,86	1.399.856.649,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	7.665.381.580,00	8.530.038.200,00	111,28	6.291.134.510,00
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.238.634.580,00	1.360.214.180,00	109,82	1.072.787.690,00
b.	Restribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	36.488.000,00	28.002.000,00	76,74	33.242.000,00
c.	Retribusi Terminal	449.590.000,00	389.022.600,00	86,53	381.683.900,00
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.151.660.000,00	1.189.972.000,00	103,33	1.162.749.800,00
e.	Retribusi Rumah Potong Hewan	53.000.000,00	51.461.000,00	97,10	61.624.000,00
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.577.900.000,00	5.367.226.920,00	117,24	3.468.887.120,00
g.	Restribusi Penjualan Produksi Usaha	158.109.000,00	144.139.500,00	91,16	110.160.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Daerah				
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.291.807.420,00	1.224.213.827,00	94,77	642.201.640,00
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.164.232.420,00	1.090.034.627,00	93,63	584.051.640,00
b.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.775.000,00	42.900.000,00	46,24	58.150.000,00
c.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	34.800.000,00	91.279.200,00	262,30	0,00
	Jumlah	19.874.479.802,00	18.992.881.583,00	95,56	18.953.321.094,00

Pemungutan Retribusi Jasa Umum diatur dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sedangkan Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan ke empat atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012, dan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan atas jasa pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lain. Realisasi Restribusi Pelayanan Kesehatan adalah Rp761.504.209,00 dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00 atau sebesar 169,22%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Dinkes. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp355.266.209,00 atau 87,45% dari Tahun 2022 karena ada tambahan pemeriksaan laboratorium calon haji Tahun 2023 yang dilaksanakan di Labkesmas.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan. Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Rp1.513.279.731,00 dengan anggaran Rp1.347.500.000,00 atau tercapai sebesar 112,30%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah DLH. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp265.055.203,00 atau 21,23% dari Tahun 2022 karena adanya penambahan jumlah wajib retribusi serta meningkatnya volume sampah yang disetorkan ke TPS, TPSS maupun TPA.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pendapatan atas jasa penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Rp1.000.338.000,00 dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 atau tercapai sebesar 100,03%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pelayanan



Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dishub. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp44.855.000,00 atau 4,69% dari Tahun 2022 karena terdapat pengelolaan parkir tepi jalan umum yang baru.

4. **Retribusi Pelayanan Pasar**
Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pendapatan atas penyediaan bangunan yang berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar adalah Rp3.413.895.294,00 dengan anggaran Rp5.290.050.802,00 atau tercapai sebesar 64,53%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pelayanan Pasar adalah Disdagkop UKM dan Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.431.266.973,00 atau 50,13% dari Tahun 2022 karena banyaknya los/kios yang tutup dan pembayaran penempatan pertama sudah berkurang.
5. **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 sebesar Rp847.240.000,00 dari anggaran Rp1.255.990.000,00 atau tercapai sebesar 67,46%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dishub. Realisasi pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp164.560.000,00 atau 16,26% dari Tahun 2022 karena beberapa faktor yaitu karena banyaknya kendaraan yang dijual ke luar daerah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menguji kendaraannya, serta tidak adanya penindakan di jalan bagi kendaraan wajib uji yang masa berlakunya telah mati.
6. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun 2023 sebesar Rp1.390.000,00 dari anggaran Rp750.000,00 atau tercapai sebesar 185,33%. SKPD pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah BPPKAD. Realisasi pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp70.000,00 atau 4,79% dari Tahun 2022 karena Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta berkurang.
7. **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Realisasi retribusi pelayanan tera/tera ulang Tahun 2023 sebesar Rp123.489.000,00 dari anggaran Rp150.000.000,00 atau tercapai sebesar 82,33%. SKPD pelaksana pemungut retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah Disdagkop UKM. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp28.271.500,00 atau 18,63% dari Tahun 2022 karena banyaknya pertashop yang tutup.
8. **Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah daerah



sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp1.577.493.322,00 dari anggaran Rp1.423.000.000,00 atau tercapai sebesar 110,86%. SKPD Pelaksana pemungut Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Diskominfo. Realisasi pendapatan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp177.636.673,00 atau 12,69% dari Tahun 2022 karena adanya penambahan jumlah menara telekomunikasi.

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin memanfaatkan barang milik daerah baik yang bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan dan barang daerah lainnya yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa dll. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.360.214.180,00 dari anggaran Rp1.238.634.580,00 atau tercapai sebesar 109,82%. SKPD pemungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah DPU PR, Disperinaker, Distanpangan, Disdagkop UKM, Disparpora, Setda, BPPKAD, Kec. Muntilan, Kec Mungkid, Kec. Mertoyudan dan Kec. Secang. Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp287.426.490,00 atau 26,79% dari Tahun 2022 karena Tahun 2023 banyak event yang diselenggarakan di sekitar borobudur sehingga volume penyewa mess majaksingi meningkat pada Setda, bertambahnya sekolah kejuruan yang memakai alat praktik di BLK pada Disperinaker, ada tambahan pelanggan/penyewa baru pada DPU PR, Distanpangan dan Kec Mungkid.

10. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pungutan atas penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp28.002.000,00 dari anggaran Rp36.488.000,00 atau tercapai sebesar 76,74%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.240.000,00 atau 15,76% dari Tahun 2022 karena jumlah akseptor IB menurun dampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan El Nino, selain itu juga karena kondisi pasar hewan sepi.

11. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal merupakan pungutan atas pemanfaatan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal oleh pemerintah daerah. Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023 sebesar Rp389.022.600,00 dari anggaran Rp449.590.000,00 atau tercapai sebesar 86,53%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Terminal adalah Dishub. Realisasi pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.338.700,00 atau 1,92% dari Tahun 2022 karena semakin banyak angkudes yang masuk ke terminal dan Peningkatan kesadaran penyewa tempat usaha untuk membayar sewa.

12. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan pungutan atas penyediaan tempat khusus parkir oleh pemerintah daerah. Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir



Tahun 2023 sebesar Rp1.189.972.000,00 dari anggaran Rp1.151.660.000,00 atau tercapai sebesar 103,33%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah DLH, Disdukcapil, Disdagkop UKM, Disparpora dan Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp27.222.200,00 atau 2,34% dari Tahun 2022 karena Tingkat kunjungan wisatawan sudah mulai meningkat pasca pandemi Covid-19 dan Tahun 2023 sudah mulai melakukan pelayanan *offline*, sehingga banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk melakukan pelayanan pada Disdukcapil.

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan pungutan atas penyediaan jasa rumah potong hewan oleh pemerintah daerah. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 sebesar Rp51.461.000,00 dengan anggaran Rp53.000.000,00 atau tercapai sebesar 97,10%. SKPD pelaksana Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp10.163.000,00 atau 16,49% dari Tahun 2022 karena Jumlah sapi yang dipotong berkurang imbas terdampaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease (LSD)*.

14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pungutan atas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 sebesar Rp5.367.226.920,00 dari anggaran Rp4.577.900.000,00 atau tercapai sebesar 117,24%. SKPD pelaksana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Disparpora dan Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.898.339.800,00 atau 54,72% dari Tahun 2022 karena adanya spot/atraksi baru pada daya tarik wisata sehingga tingkat kunjungan wisatawan meningkat.

15. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan pungutan atas penjualan hasil produksi pemerintah daerah. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2023 sebesar Rp144.139.500,00 dari anggaran sebesar Rp158.109.000,00 atau tercapai 91,16%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Distanpangan dan Dispeterikan. Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp33.979.500,00 atau 30,85% dari Tahun 2022 karena adanya penjualan bibit anggrek dan bibit padi pada Distanpangan serta bibit ikan pada Dispeterikan.

16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah atas perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp1.090.034.627,00 dari anggaran sebesar Rp1.164.232.420,00 atau tercapai sebesar 93,63%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah DPU PR. Realisasi pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp505.982.987,00 atau 86,63% dari Tahun 2022 karena Pada Tahun 2022 masih dalam tahap penyesuaian regulasi baru, karena baru tahun



pertama penerapan peraturan tentang SIMBG sehingga ada kenaikan pada Tahun 2023.

17. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum merupakan pembayaran atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu di daerah. Realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 sebesar Rp42.900.000,00 dari anggaran Rp92.775.000,00 atau tercapai sebesar 46,24%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum adalah Dishub. Realisasi pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.250.000,00 atau 26,23% dari Tahun 2022 karena banyaknya kendaraan yang tidak memperpanjang izin trayek dan banyaknya kendaraan berusia di atas 25 tahun yang tidak bisa diterbitkan izinnya.
18. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Tenaga Kerja Asing pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (VITAS) dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2023 sebesar Rp91.279.200,00 dari anggaran Rp34.800.000,00 atau tercapai sebesar 262,30%. SKPD pelaksana pemungut Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Disperinaker. Realisasi pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp91.279.200,00 atau 100,00% dari Tahun 2022 karena perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli yang belum bisa disediakan oleh tenaga kerja Indonesia bertambah.

Rincian Retribusi Daerah per jenis retribusi per SKPD Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
29.664.089.642,00	30.598.215.796,00	28.082.640.133,00

Penerimaan PAD yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Perda Provinsi Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, serta perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022 pada tabel di bawah:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				
a.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69	15.307.790.112,00	15.307.790.112,00	100,00	14.566.630.909,00
b.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK)	664.467.506,00	664.467.506,00	100,00	1.007.711.275,00
c.	PD Bank Jawa Tengah	9.341.261.544,00	10.275.387.698,00	110,00	8.773.555.346,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)				
a.	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)	109.627.944,00	109.627.944,00	100,00	98.280.453,00
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				
a.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	4.240.942.536,00	4.240.942.536,00	100,00	3.636.462.150,00
	Jumlah	29.664.089.642,00	30.598.215.796,00	103,15	28.082.640.133,00

Tahun 2023 PRPP Jawa Tengah tidak dapat memberikan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang karena masih menanggung kerugian kumulatif.

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.347.491,00 atau 11,55% dari Tahun 2022. PDAU Tahun 2023 membagi deviden sebesar Rp109.627.944,00.

Hasil keputusan RUPST Bank Jateng tanggal 4 Mei 2023 ada tambahan pembagian deviden pada TW IV sebesar Rp934.126.154,00 sehingga realisasi deviden PD Bank Jateng sebesar Rp10.275.387.698,00 sedangkan ditarget baru tercatat sebesar Rp9.341.261.544,00. sehingga realisasi menjadi sebesar 110,00%.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
214.787.816.092,00	226.326.479.360,00	215.969.495.358,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 yang menampung penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam kategori Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yaitu hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa bank, bunga bank, denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan serta pendapatan dari pengembalian lain-lainnya, pendapatan BLUD dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 9 Realisasi Lain Lain PAD yang Sah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	43.142.000,00	29.642.000,00	68,71	441.322.054,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.322.250.014,00	1.589.887.795,00	120,24	1.277.921.566,00
3	Hasil Kerja sama Daerah	736.985.475,00	874.006.080,00	118,59	899.048.415,00
4	Jasa Giro	2.403.811.390,00	2.368.742.396,00	98,54	2.759.123.642,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
6	Pendapatan Bunga	6.949.172.722,00	9.983.421.017,00	143,66	11.434.862.967,00
7	Penerimaan Komisi , Potongan dan Bentuk Lain	130.609.636,00	133.096.426,00	101,90	8.891.656,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	231.002.578,00	0,00	293.465.850,00
9	Pendapatan Denda Pajak	185.936.797,00	376.450.979,00	202,46	169.026.428,00
10	Pendapatan Denda Retribusi	872.438.720,00	695.696.814,00	79,74	585.627.964,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	641.263.908,00	754.713.837,00	117,69	1.975.453.717,00
12	Pendapatan BLUD	201.502.205.430,00	209.268.637.938,00	103,85	196.121.931.099,00
13	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	21.181.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	214.787.816.092,00	226.326.479.360,00	105,37	215.969.495.358,00

Rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Tabel 5.10 Realisasi Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	334.183.454,00
2.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	29.642.000,00	29.642.000,00	93,28	69.250.000,00
3.	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00	0,00	0,00	4.264.000,00
4.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.624.600,00
	Jumlah	43.142.000,00	29.642.000,00	68,71	441.322.054,00

Realisasi Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada Tahun 2023 sebesar Rp29.642.000,00 dari anggaran sebesar Rp43.142.000,00 atau tercapai sebesar 68,71%. Realisasi Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp411.680.054,00 atau 93,28% dari Tahun 2022.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.11 Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Hasil sewa BMD	1.080.000.000,00	1.347.637.781,00	124,78	1.172.751.400,00
2.	Hasil kerja sama pemanfaatan BMD	242.250.014,00	242.250.014,00	100,00	105.170.166,00
	Jumlah	1.322.250.014,00	1.589.887.795,00	120,24	1.277.921.566,00

Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp1.589.887.795,00 dari anggaran Rp1.322.250.014,00 atau tercapai sebesar 120,24%. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp311.966.229,00 atau 24,41% dari Tahun 2022 karena periode pembayaran sewa BMD tidak sama.

3. Hasil Kerja Sama Daerah

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 sebesar Rp874.006.080,00 dari anggaran sebesar Rp736.985.475,00 atau tercapai sebesar 118,59%. Realisasi pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 seluruhnya berada pada SKPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.042.335,00 atau 2,79% dari Tahun 2022 karena di Tahun 2022 sampai dengan Bulan April masih ada penerimaan dari PDAM Kota Magelang dan PDAM Kabupaten Temanggung, setelah itu kontribusi dari PDAM Kota Magelang dan PDAM Kabupaten Temanggung langsung ke desa yang bersangkutan.

4. Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro adalah jasa giro yang masuk di Kas daerah dan Rekening Dana Cadangan yang dikelola BPPKAD serta jasa giro yang berada pada rekening seluruh bendahara SKPD. Rincian realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.403.811.390,00	2.253.196.705,00	93,73	2.759.123.642,00
2.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	115.545.691,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.403.811.390,00	2.368.742.396,00	98,54	2.759.123.642,00

Realisasi Jasa Giro pada Kas Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp505.926.937,00 atau 18,34% dari Tahun 2022 karena Kas lebih banyak dimanfaatkan untuk penempatan deposito.

Realisasi Jasa Giro pada Kas di Bendahara Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp115.545.691,00 atau 100,00% dari Tahun 2022 karena penerimaan Jasa Giro pada Kas di Bendahara Tahun 2022 tersaji pada Jasa Giro pada Kas Daerah.

5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir pada Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dari



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.820.000,00 atau 100,00% dari Tahun 2022 karena tidak ada setoran dari pengelolaan dana bergulir. Hal ini dikarenakan dana bergulir seluruhnya sudah dikategorikan macet. Sehingga setoran penerimaannya tidak bisa diprediksi.

6. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga adalah bunga deposito yang ditempatkan oleh BPPKAD pada bank. Pendapatan Bunga Tahun 2023 hanya berasal dari rekening deposito Bank Jateng karena Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Realisasi Pendapatan Bunga pada Tahun 2023 sebesar Rp9.983.421.017,00 dari anggaran sebesar Rp6.949.172.722,00 atau tercapai sebesar 143,66%. Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.451.441.950,00 atau 12,69% dari Tahun 2022.

7. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 sejumlah Rp133.096.426,00 dari anggaran sebesar Rp130.609.636,00 atau tercapai 101,90%. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp124.204.770,00 atau 1.396,87% dari Tahun 2022 karena adanya kegiatan operasi pasar pada Disdagkop dan Penghapusan utang jangka pendek lainnya dikarenakan pembayaran kepada pihak ketiga (GAKI) yang tidak diambil pada BPPKAD.

8. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan BPPKAD atas denda yang dikenakan pada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Bidang Pendidikan	0,00	8.455.212,00	0,00	0,00
2	Bidang Kesehatan	0,00	120.961.176,00	0,00	66.141.026,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	0,00	60.684.287,00	0,00	76.074.621,00
4	Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	40.901.903,00	0,00	0,00
5	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	151.250.203,00
	Jumlah	0,00	231.002.578,00	0,00	293.465.850,00

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp62.463.272,00 atau 21,28% dari Tahun 2022 karena banyaknya pekerjaan yang terlambat diselesaikan dari kesepakatan kontrak.

9. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah meliputi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dengan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp185.936.797,00 terealisasi sebesar Rp376.450.979,00 atau tercapai 202,46% dan realisasi untuk Tahun 2022 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp169.026.428,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14 Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.363.231,00	1.543.722,00	113,24	657.754,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	26.860.888,00	40.218.409,00	149,73	20.444.675,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	276.600,00	362.200,00	130,95	1.417.800,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.254.899,00	6.194.496,00	145,59	3.882.302,00
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir	21.912,00	23.792,00	108,58	85.769,00
6	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	926.316,00	1.174.550,00	126,80	1.483.943,00
7	Pendapatan Denda Pajak MBLB	1.404.695,00	1.731.210,00	123,24	1.935.364,00
8	Pendapatan Denda PBBP2	150.828.256,00	325.202.600,00	215,61	139.118.821,00
	Jumlah	185.936.797,00	376.450.979,00	202,46	169.026.428,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp207.424.551,00 atau 122,72% dari Tahun 2022 karena kurang patuhnya wajib pajak untuk membayar tepat waktu.

10. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah meliputi denda atas keterlambatan pembayaran retribusi dengan target Tahun 2023 sebesar Rp872.438.720,00 terealisasi sebesar Rp695.696.814,00 atau tercapai sebesar 79,74% dan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp585.627.964,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum				
a.	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	54.205.616,00	108,41	51.493.000,00
b.	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	814.857.522,00	636.830.000,00	78,15	526.945.000,00
c.	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.410.664,00
2.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha				
a.	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	368,00	368,00	100,00	53.800,00
b.	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.830,00	80.830,00	100,00	171.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
3.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu				
a.	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	7.500.000,00	4.580.000,00	61,07	5.554.000,00
	Jumlah	872.438.720,00	695.696.814,00	79,74	585.627.964,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp110.068.850,00 atau 18,80% dari Tahun 2022 karena kurang patuhnya dalam membayar retribusi tepat waktu.

11. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	235.740.525,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	96.629.043,00	125.116.877,00	129,48	1.654.162.490,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.409.535,00	233.487.901,00	116,51	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.139.658,00	1.139.658,00	100,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.345.124,00	24.345.124,00	100,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	21.196.850,00	21.196.850,00	100,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	35.113.000,00	35.113.000,00	100,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	162.931,00	162.931,00	100,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	26.877.801,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	99.291.966,00	99.291.966,00	100,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	24.839.000,00	24.839.000,00	100,00	0,00
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi	29.659.000,00	29.659.000,00	100,00	0,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	78.761.530,00	0,00	85.550.702,00
	Jumlah	641.263.908,00	754.713.837,00	117,69	1.975.453.717,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan dari Pengembalian pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp754.713.837,00 dari anggaran sebesar Rp641.263.908,00 atau terealisasi sebesar 117,69%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.220.739.880,00 atau 61,80% dari Tahun 2022.

Semua Pendapatan dari Pengembalian melalui rekening RKUD pada BPPKAD.

12. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari BLUD Dinkes dan BLUD RSUD Muntilan. Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Pendapatan BLUD

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Dinkes				
a.	RSUD Merah Putih	65.000.000.000,00	70.534.126.761,00	108,51	44.699.564.211,00
b.	Puskesmas	63.000.000.000,00	62.237.300.805,00	98,79	54.893.934.055,00
2.	RSUD Muntilan	73.502.205.430,00	76.497.210.372,00	104,07	96.528.432.833,00
	Jumlah	201.502.205.430,00	209.268.637.938,00	103,85	196.121.931.099,00

Penerapan BLUD RSUD Merah Putih berdasarkan pada Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/354/KEP/01.04/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/263/KEP/01.04/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelayanan Umum Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp13.146.706.839,00 atau 6,70% dari Tahun 2022.

Rincian pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada **Lampiran 5.2**.

13. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak adalah penerimaan atas hasil penjualan barang yang tidak masuk kategori BMD. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp21.181.500,00 dengan rincian pada SKPD berikut:

1. BPPKAD

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak pada SKPD BPPKAD terealisasi sebesar Rp18.495.000,00, terdiri atas penjualan direksi kit sebesar Rp4.995.000,00 dan penjualan pohon di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah dan Kecamatan Sawangan sebesar Rp13.500.000,00.

2. DPUPR

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak pada SKPD DPUPR merupakan penjualan direksi kit sebesar Rp2.686.500,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2.111.381.547.920,00	2.089.541.001.808,00	2.100.710.656.495,00

Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.089.541.001.808,00 dari anggaran sebesar Rp2.111.381.547.920,00 atau tercapai sebesar 98,97% merupakan realisasi Pendapatan



Transfer periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 dengan rincian:

Tabel 5. 18 Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.518.441.496.920,00	1.514.078.360.890,00	99,71	1.481.150.169.461,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	407.599.290.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.950.587.000,00	211.473.176.918,00	92,37	211.961.197.034,00
	Jumlah	2.111.381.547.920,00	2.089.541.001.808,00	98,97	2.100.710.656.495,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.518.441.496.920,00	1.514.078.360.890,00	1.481.150.169.461,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengelolaan dana transfer pemerintah pusat berpedoman pada Permenkeu Republik Indonesia Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 19 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	45.162.178.236,00	45.162.178.236,00	100,00	45.076.264.055,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.009.264.603.253,00	1.022.451.050.283,00	101,31	970.712.969.712,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.589.643.326,00	102.749.475.887,00	96,40	142.757.134.389,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	357.425.072.105,00	343.715.656.484,00	96,16	322.603.801.305,00
	Jumlah	1.518.441.496.920,00	1.514.078.360.890,00	99,71	1.481.150.169.461,00

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun 2023 adalah Rp45.162.178.236,00 dari anggaran sebesar Rp45.162.178.236,00 atau tercapai sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2022 terealisasi Rp45.076.264.055,00.



5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2023 adalah Rp1.022.451.050.283,00 dari anggaran sebesar Rp1.009.264.603.253,00 atau tercapai sebesar 101,31%

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp102.749.475.887,00 dengan anggaran sebesar Rp106.589.643.326,00 atau tercapai 96,40%, sedangkan untuk Tahun 2022 terealisasi Rp142.757.134.389,00.

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah dengan realisasi sebesar Rp343.715.656.484,00 dengan anggaran sebesar Rp357.425.072.105,00 atau tercapai 96,16%, sedangkan untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp322.603.801.305,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), dan Pendapatan Dana BOS Tahun Anggaran 2023 dilaporkan pada DAK Non Fisik.

Data Transfer Pemerintah Pusat secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.3**.

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

		Tahun 2023	Tahun 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		363.989.464.000,00	407.599.290.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp363.989.464.000,00 sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp407.599.290.000,00 yang merupakan Dana Insentif Daerah dan Penerimaan Dana Desa yang akan disalurkan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Magelang terdiri dari:

Tabel 5. 20 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	14.367.981.000,00
2.	Dana Desa	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	393.231.309.000,00
	Jumlah	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	407.599.290.000,00



5.1.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi DID Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan anggaran Rp0,00, sedangkan untuk Tahun 2022 Rp14.367.981.000,00.

Tabel 5. 21 Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	7.090.761.185,00
2.	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.526.243.575,00
3.	Bidang Penguatan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	1.750.976.240,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	14.367.981.000,00

5.1.1.2.2.2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp363.989.464.000,00 dari anggaran sebesar Rp363.989.464.000,00 atau tercapai 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp393.231.309.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme penyaluran Dana Desa adalah:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
3. Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
4. Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa dan Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
5. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	228.950.587.000,00	211.473.176.918,00	211.961.197.034,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023 berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. 22 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pendapatan Bagi Hasil	214.812.587.000,00	197.843.915.918,00	92,10	192.799.361.034,00
2.	Bantuan Keuangan	14.138.000.000,00	13.629.261.000,00	96,40	19.161.836.000,00
	Jumlah	228.950.587.000,00	211.473.176.918,00	92,37	211.961.197.034,00

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp197.843.915.918,00 dengan anggaran Rp214.812.587.000,00 atau tercapai sebesar 92,10%, sedangkan untuk Tahun 2022 sebesar Rp192.799.361.034,00.

Tabel 5. 23 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	53.929.265.000,00	50.358.962.010,00	93,38	49.160.689.596,00
2	BBNKB	31.675.670.000,00	25.243.192.213,00	79,69	24.551.547.056,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.185.800.000,00	55.177.177.469,00	98,20	49.994.524.572,00
4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	376.196.000,00	391.050.405,00	103,95	396.424.149,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	72.645.656.000,00	66.673.533.821,00	91,78	68.696.175.661,00
	Jumlah	214.812.587.000,00	197.843.915.918,00	92,10	192.799.361.034,00

5.1.1.2.3.2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu. Alokasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang berdasarkan pada DPPA/B.2/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp13.629.261.000,00 dengan anggaran sebesar Rp14.138.000.000,00 atau tercapai sebesar 96,40%, sedangkan untuk Tahun 2022 Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp19.161.836.000,00.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00
		24.625.485.254,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp18.454.635.298,00 dengan anggaran Rp21.497.000.000,00 atau tercapai sebesar 85,85%, sedangkan untuk Tahun 2022 Rp24.625.485.254,00.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mendapatkan hibah dari pemerintah pusat dengan alokasi sebesar Rp21.497.000.000,00.

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Nomor PHD-06/MK.7/DTK.03/UPLAND/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang kegunaannya untuk peningkatan produktifitas pertanian dan pendapatan petani di kawasan dataran tinggi. Realisasi pendapatan hibah UPLAND Tahun 2023 sebesar Rp15.673.635.298,00, Jumlah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang diatur pada pasal 2 dalam perjanjian tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemerintah dengan ini memberikan Dana Hibah kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Setinggi-tingginya Rp73.095.000000,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh lima juta rupiah) yang disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran Dana Hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud nomor 1 bersumber dari pinjaman yang diterushibahkan dan terdiri atas:
 - a. IFAD sebesar setinggi-tingginya Rp19.475.000.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. IsDB dari *Instalment Sale* sebesar setinggi-tingginya Rp45.070.000.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh puluh juta rupiah); dan
 - c. IsDB dari *ISFD Loan* sebesar setinggi-tingginya Rp8.550.000.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)
3. Jumlah Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dapat ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang ditentukan sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
4. Jumlah Dana Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang merupakan realisasi Dana Hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang sebagai pemberian hibah dalam bentuk mata uang Rupiah.

Batas akhir penyaluran Dana Hibah pada Perjanjian Hibah Pusat (PHD) adalah tanggal 31 Desember 2024 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah dan/atau PPLN.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 Hal Penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mendapatkan alokasi hibah air minum perkotaan sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi hibah air minum perkotaan tahun 2023 sebesar Rp2.781.000.000,00.



5.1.2. Belanja

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2.848.060.704.055,00	2.687.824.939.040,00	2.570.326.001.677,00

Belanja Daerah termasuk di dalamnya adalah belanja BLUD RSUD Muntilan, UPTD Puskesmas dan BLUD RSUD Merah Putih pada Dinkes dan belanja BOS pada Disdikbud. Realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSUD Muntilan sebesar Rp99.700.607.625,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari rekening BLUD UPTD Puskesmas dan realisasi BLUD RSUD Merah Putih di Dinkes sebesar Rp134.870.482.087,00 sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp234.571.089.712,00. Sementara belanja BOS Negeri pada Disdikbud sebesar Rp92.037.752.048,00.

Belanja Daerah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.848.060.704.055,00 dan terealisasi sebesar Rp2.687.824.939.040,00 atau tercapai sebesar 94,37%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.570.326.001.677,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 24 Realisasi Belanja

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Operasi	1.834.968.100.071,00	1.711.794.748.890,00	93,29	1.579.734.196.385,00
2	Belanja Modal	333.918.122.609,00	318.001.060.309,00	95,23	304.002.891.493,00
3	Belanja Tak Terduga	23.828.281.026,00	5.106.915.740,00	21,43	3.345.921.800,00
4	Belanja Transfer	655.346.200.349,00	652.922.214.101,00	99,63	683.242.991.999,00
	Jumlah	2.848.060.704.055,00	2.687.824.939.040,00	94,37	2.570.326.001.677,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.834.968.100.071,00	1.711.794.748.890,00	1.579.734.196.385,00

Belanja Operasi Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.834.968.100.071,00 dan terealisasi sebesar Rp1.711.794.748.890,00 atau tercapai 93,29%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.579.734.196.385,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.25 Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Pegawai	1.059.258.801.519,00	979.808.617.479,00	92,50	909.490.218.457,00
2	Belanja Barang dan Jasa	592.039.828.847,00	553.587.132.203,00	93,51	517.021.760.709,00
3	Belanja Hibah	177.208.785.205,00	173.254.489.708,00	97,77	138.442.265.179,00
4	Belanja Bantuan Sosial	6.460.684.500,00	5.144.509.500,00	79,63	14.779.952.040,00
	Jumlah	1.834.968.100.071,00	1.711.794.748.890,00	93,29	1.579.734.196.385,00



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.059.258.801.519,00	979.808.617.479,00	909.490.218.457,00

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.059.258.801.519,00 dan terealisasi sebesar Rp979.808.617.479,00 atau tercapai 92,50%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp909.490.218.457,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 26 Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	678.962.594.766,00	616.013.791.393,00	90,73	584.733.228.041,00
	Belanja Gaji Pokok ASN	496.214.596.073,00	465.034.989.994,00	93,72	444.198.014.522,00
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	46.638.973.108,00	40.431.524.118,00	86,69	38.455.618.109,00
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.660.582.075,00	5.147.113.000,00	90,93	6.425.558.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	44.230.245.558,00	38.722.404.900,00	87,55	31.474.979.230,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.776.781.381,00	4.377.810.400,00	49,88	5.438.171.500,00
	Belanja Tunjangan Beras ASN	29.667.517.829,00	25.566.213.990,00	86,18	23.762.105.163,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.687.834.911,00	4.793.474.155,00	84,28	4.362.107.058,00
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	44.138.160,00	6.306.812,00	14,29	5.737.864,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.108.667.415,00	28.091.949.199,00	80,01	26.947.003.918,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.273.327.446,00	960.507.422,00	75,43	1.260.832.235,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.495.912.749,00	2.881.497.403,00	82,42	2.403.099.942,00
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.164.018.061,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	69.469.403.793,00	65.574.686.567,00	94,39	60.131.230.874,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	196.305.607.999,00	188.178.548.885,00	95,86	176.724.967.140,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.186.556.352,00	8.002.322.991,00	97,75	5.569.533.364,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	796.046.841,00	694.702.372,00	87,27	2.946.356.782,00
	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	177.858.815.257,00	171.393.903.750,00	96,37	159.959.378.200,00
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	268.558.937,00	245.478.500,00	91,41	229.251.600,00
	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.880.125.000,00	4.766.437.375,00	81,06	3.718.928.500,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	879.247.705,00
	Belanja Honorarium	2.403.605.612,00	2.177.700.000,00	90,60	3.012.335.000,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	911.900.000,00	898.003.897,00	98,48	409.935.989,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.067.130.000,00	29.039.229.722,00	99,90	29.052.757.332,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.114.260.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.271.000,00	129.603.600,00	98,73	129.698.100,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	136.439.280,00	132.528.600,00	97,13	157.513.500,00
	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.350.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.615.677.000,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.111.500,00	131.726.700,00	96,78	131.635.350,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	22.472.100,00	15.529.500,00	69,11	15.529.500,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.000.000,00	1.297.142,00	43,24	489.162,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	247.816,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.984.633.304,00	8.982.099.180,00	99,97	8.982.104.220,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.796.000.000,00	100,00	5.785.500.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.177.895.875,00	1.088.733.897,00	92,43	1.197.491.377,00
	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.577.000,00	54.600.000,00	98,24	54.600.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.781.000,00	7.140.000,00	91,76	7.140.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.137.000,00	7.097.160,00	87,22	6.083.280,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.238.078,00	1.616.998,00	30,87	800.126,00
	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	10.000,00	2.040,00	20,40	1.920,00
	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.141.000,00	7.897.023,00	86,39	7.448.400,00
	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	603.000,00	112.320,00	18,63	112.320,00
	Belanja Luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.629.000,00	336.960,00	20,69	336.960,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	903.287.271,00	839.965.305,00	92,99	935.892.636,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	88.212.526,00	71.686.091,00	81,27	86.795.735,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.058.593.000,00	1.058.470.000,00	99,99	997.255.000,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	665.473.000,00	665.350.000,00	99,98	604.135.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	83.217.576.086,00	78.855.157.015,00	94,76	56.653.288.693,00
	Jumlah	1.059.258.801.519,00	979.808.617.479,00	92,50	909.490.218.457,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp70.318.399.022,00 atau 7,73% dari Tahun 2022 karena tambahan jumlah pegawai serta kenaikan realisasi gaji PPPK.

Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.**

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

	Tahun 2023		Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	592.039.828.847,00	553.587.132.203,00	517.021.760.709,00

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, serta Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp592.039.828.847,00 dan terealisasi sebesar Rp553.587.132.203,00 atau tercapai 93,51%, sedangkan realisasi



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun 2022 sebesar Rp517.021.760.709,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 27 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Barang	79.494.552.297,00	73.354.500.351,00	92,28	73.590.646.265,00
	Belanja Barang Pakai Habis	79.494.552.297,00	73.354.500.351,00	92,28	73.590.646.265,00
2	Belanja Jasa	216.410.923.587,00	202.435.574.666,00	93,54	187.311.921.757,00
	Belanja Jasa Kantor	148.856.844.725,00	140.949.822.100,00	94,69	139.874.077.473,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.320.194.470,00	36.917.315.173,00	89,34	29.598.215.116,00
	Belanja Sewa Tanah	505.860.000,00	503.300.000,00	99,49	177.358.100,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.291.373.630,00	2.157.370.293,00	94,15	1.411.495.190,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	467.797.818,00	429.081.000,00	91,72	189.103.250,00
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	194.504.000,00	180.590.000,00	92,85	103.763.000,00
	Belanja Jasa Konsultasi konstruksi	1.013.668.695,00	991.624.424,00	97,83	1.183.604.409,00
	Belanja Jasa Konsultasi non konstruksi	3.888.734.011,00	3.696.718.950,00	95,06	2.546.501.385,00
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	12.470.091,00	300.000,00	2,41	0,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	119.900.000,00	116.800.000,00	97,41	81.600.000,00
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.582.896.000,00	16.343.343.816,00	92,95	12.079.730.430,00
	Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah	156.680.147,00	149.308.910,00	95,30	66.473.404,00
3	Belanja Pemeliharaan	34.690.676.942,00	33.100.489.893,00	95,42	21.435.667.791,00
	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	146.300.000,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.385.738.485,00	12.260.633.013,00	91,59	5.587.274.639,00
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.180.439.806,00	4.111.555.416,00	98,35	3.838.970.432,00
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.639.998.651,00	16.244.809.078,00	97,63	11.863.122.720,00
	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	484.500.000,00	483.492.386,00	99,79	0,00
4	Belanja Perjalanan Dinas-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.415.575.341,00	45.146.545.982,00	81,47	30.769.185.891,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.429.764.375,00	17.217.758.296,00	98,78	19.047.780.751,00
	Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak ketiga /Pihak lain/ Masyarakat	14.608.082.375,00	14.412.612.250,00	98,66	15.882.692.905,00
	Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak ketiga /Pihak lain/	2.821.682.000,00	2.805.146.046,00	99,41	3.165.087.846,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Masyarakat				
6	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	68.025.686.702,00	67.884.590.800,00	99,79	69.493.587.405,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	120.572.649.603,00	114.447.672.215,00	94,92	115.372.970.849,00
	Jumlah	592.039.828.847,00	553.587.132.203,00	93,51	517.021.760.709,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.565.371.494,00 atau 7,07% dari Tahun 2022 karena adanya kenaikan signifikan pada belanja iuran jaminan/asuransi, belanja kursus/pelatihan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.5**.

Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 5.6** dan **5.7**.

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.8**.

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 5.9**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	177.208.785.205,00	173.254.489.708,00
		138.442.265.179,00

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Belanja Hibah Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp177.208.785.205,00 dan terealisasi sebesar Rp173.254.489.708,00 atau tercapai 97,77%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp138.442.265.179,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 28 Realisasi Belanja Hibah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	8.212.530.000,00	8.108.076.600,00	98,73	10.690.959.700,00
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.579.000.000,00	6.579.000.000,00	100,00	6.479.000.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.633.530.000,00	1.529.076.600,00	93,61	4.211.959.700,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	140.181.924.205,00	136.420.036.567,00	97,32	99.635.336.767,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	77.370.567.205,00	75.294.630.864,00	97,32	39.768.188.500,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.252.630.000,00	6.088.545.800,00	97,38	5.927.939.500,00
	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	56.358.727.000,00	54.836.859.903,00	97,30	53.939.208.767,00
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS -Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.514.600.000,00	26.426.645.541,00	99,67	25.816.237.712,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	100,00	2.299.731.000,00
	Jumlah	177.208.785.205,00	173.254.489.708,00	97,77	138.442.265.179,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp34.812.224.529,00 atau 25,15% dari Tahun 2022 karena adanya belanja hibah bantuan keuangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 Kepada BAWASLU Kabupaten Magelang pada SKPD Bakesbangpol.

Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022 per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 29 Realisasi Belanja Hibah per SKPD

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Disdikbud	73.165.349.205,000	70.946.396.405,000	96,97	64.697.766.212,00
2	Dinkes	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	DPU PR	21.498.660.000,00	21.497.300.000,00	99,99	21.076.261.000,00
4	Satpol PP	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00	2.398.416.400,00
5	BPBD	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00	32.500.000,00
6	Dinsos	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	40.217.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
7	Disperinaker	572.100.000,00	431.559.440,00	75,43	651.300.000,00
8	Distanpangan	19.770.578.000,00	18.671.429.263,00	94,44	26.095.169.767,00
9	DLH	94.000.000,00	94.000.000,00	100,00	0,00
10	Dispermades	2.065.000.000,00	1.960.500.000,00	94,94	868.500.000,00
11	Dishub	209.488.000,00	199.488.000,00	95,23	129.500.000,00
12	Disparpora	4.810.065.000,00	4.680.065.000,00	97,30	2.303.960.000,00
13	Dispeterikan	1.489.000.000,00	1.447.900.000,00	97,24	744.550.000,00
14	Setda	19.792.880.000,00	19.708.380.000,00	99,57	15.739.850.000,00
15	BPPKAD	0,00	0,00	0,00	1.164.543.300,00
16	BKPPD	150.000.000,00	128.900.000,00	85,93	0,00
17	Bakesbangpol	33.114.565.000,00	33.011.471.600,00	99,69	2.349.731.000,00
	Jumlah	177.208.785.205,00	173.254.489.708,00	97,77	138.442.265.179,00

Hibah yang belum tersalurkan per 31 Desember 2023 masih disajikan sebagai Persediaan di Neraca.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.10**.

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 30 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	548.334.000,00	548.334.000,00	100,00	548.334.000,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	469.272.000,00	469.272.000,00	100,00	469.272.000,00
3	Partai Gerindra	323.268.000,00	323.268.000,00	100,00	323.268.000,00
4	Partai Golongan Karya	232.701.000,00	232.701.000,00	100,00	232.701.000,00
5	Partai Amanat Nasional	152.430.000,00	152.430.000,00	100,00	152.430.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	215.070.000,00	215.070.000,00	100,00	215.070.000,00
7	Partai Keadilan Sejahtera	175.092.000,00	175.092.000,00	100,00	175.092.000,00
8	Partai Demokrat	91.476.000,00	91.476.000,00	100,00	91.476.000,00
9	Partai Nasional Demokrat	92.088.000,00	92.088.000,00	100,00	92.088.000,00
	Jumlah	2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	100,00	2.299.731.000,00

Untuk Tahun 2023, Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai berdasarkan SK Bupati Nomor 180.182/43/KEP/47/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Magelang Tahun 2023.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.460.684.500,00	5.144.509.500,00
		14.779.952.040,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp6.460.684.500,00 dan terealisasi sebesar Rp5.144.509.500,00 atau tercapai 79,63%, sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp14.779.952.040,00. Rincian realisasi Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.31 Realisasi Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.340.400.000,00	1.604.425.000,00	68,55	3.801.270.440,00
a.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.761.900.000,00	1.135.500.000,00	64,45	3.708.200.000,00
b.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	578.500.000,00	468.925.000,00	81,06	93.070.440,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.477.375.000,00	2.916.175.000,00	83,86	10.737.146.600,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) - Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	642.909.500,00	623.909.500,00	97,04	241.535.000,00
	Jumlah	6.460.684.500,00	5.144.509.500,00	79,63	14.779.952.040,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.635.442.540,00 atau 65,19% dari Tahun 2022 karena Tahun 2023 tidak menganggarkan Bantuan Sosial untuk RTLH pada SKPD DPRKP.

Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 per SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 32 Realisasi Belanja Bantuan Sosial per SKPD

No	SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Disdikbud	946.875.000,00	487.675.000,00	51,50	688.350.000,00
2	Dinkes	2.424.000.000,00	2.322.000.000,00	95,79	367.000.000,00
3	DPRKP	0,00	0,00	0,00	8.955.796.600,00
4	Dinsos	3.015.809.500,00	2.260.834.500,00	74,97	1.544.405.440,00
5	Dishub	0,00	0,00	0,00	245.700.000,00
6	Disdagkop UKM	0,00	0,00	0,00	2.066.850.000,00
7	Dispeterikan	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	911.850.000,00
	Jumlah	6.460.684.500,00	5.144.509.500,00	79,63	14.779.952.040,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per rekening dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi sebesar Rp1.135.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.761.900.000,00 atau tercapai sebesar 64,45%, dengan rincian per SKPD pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinsos	1.726.900.000,00	1.100.500.000,00	63,73	Calon penerima manfaat telah menerima bantuan lain yang bersumber dari anggaran negara dan/atau meninggal
2	Dispeterikan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	
	Jumlah	1.761.900.000,00	1.135.500.000,00	64,45	

2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu terealisasi sebesar Rp468.925.000,00 dari anggaran Rp578.500.000,00 atau tercapai sebesar 81,06%, dengan rincian per SKPD pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinsos	578.500.000,00	468.925.000,00	81,06	Calon penerima manfaat telah menerima bantuan lain yang bersumber dari anggaran negara dan/atau meninggal
	Jumlah	578.500.000,00	468.925.000,00	81,06	

3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp2.916.175.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.477.375.000,00 atau tercapai sebesar 83,86%, dengan rincian per SKPD pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Disdikbud	946.875.000,00	487.675.000,00	51,50	Karena siswa yang diusulkan di proposal awal saat SK terbit sudah banyak yang lulus dan Siswa yang tertera di SK Penerima Bansos ada beberapa yang sudah menerima PIP sehingga tidak dicairkan.
2	Dinkes	2.424.000.000,00	2.322.000.000,00	95,79	Karena ada warga masyarakat yang telah mendapatkan bantuan yang sejenis sehingga membatalkan diri sebagai penerima bansos
3	Dinsos	67.500.000,00	67.500.000,00	100,00	
4	Dispeterikan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	
	Jumlah	3.477.375.000,00	2.916.175.000,00	83,86	

4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) terealisasi sebesar Rp623.909.500,00 dari anggaran sebesar Rp642.909.500,00 atau tercapai sebesar 97,04%, dengan rincian per SKPD pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 36 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya)

No	Nama SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Penjelasan
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Dinsos	642.909.500,00	623.909.500,00	97,04	Terdapat lembaga yang sudah tidak beroperasi
	Jumlah	642.909.500,00	623.909.500,00	97,04	

5.1.2.2. Belanja Modal

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	333.918.122.609,00	318.001.060.309,00
		304.002.891.493,00

Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 37 Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tanah	2.865.059.500,00	837.573.180,00	29,23	29.958.753.449,00
2	Peralatan dan Mesin	115.830.327.374,00	111.034.686.354,00	95,86	125.167.670.997,00
3	Gedung dan Bangunan	129.747.726.531,00	121.599.150.695,00	93,72	49.618.052.297,00
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	68.131.003.708,00	67.330.738.100,00	98,83	89.144.512.113,00
5	Aset Tetap Lainnya	14.086.005.496,00	14.017.171.980,00	99,51	10.113.902.637,00
6	Aset Lainnya (Aset tak berwujud)	3.258.000.000,00	3.181.740.000,00	97,66	0,00
	Jumlah	333.918.122.609,00	318.001.060.309,00	95,23	304.002.891.493,00

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 tersebut termasuk Belanja Modal yang sumber dananya dari BOS, BLUD UPTD Puskesmas dan RSUD Merah Putih pada Dinkes, serta BLUD RSUD Muntilan yang terdiri dari:

Tabel 5. 38 Realisasi Belanja Modal BLUD dan BOS

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	BOS	24.251.414.831,00	24.153.161.248,00	99,59	10.368.127.406,00
2.	UPTD Puskesmas & RSUD Merah Putih	20.209.710.012,00	19.356.651.516,00	95,78	22.679.989.072,00
3.	BLUD RSUD Muntilan	27.028.641.611,00	21.911.608.966,00	81,07	30.749.354.289,00
	Jumlah	71.489.766.454,00	65.421.421.730,00	91,51	63.797.470.767,00

Rincian Belanja Modal per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
2.865.059.500,00	837.573.180,00	29.958.753.449,00

Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 39 Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Modal Tanah Persil - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	865.059.500,00	837.573.180,00	96,82	6.394.643.336,00
2.	Belanja Modal Lapangan - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung (Belanja Modal Lapangan)	0,00	0,00	0,00	23.564.110.113,00
3.	Belanja Modal Tanah BLUD	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.865.059.500,00	837.573.180,00	29,23	29.958.753.449,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.121.180.269,00 atau 97,20% dari Tahun 2022.

Belanja Modal Tanah BLUD pada RSUD Muntilan tidak terealisasi karena pihak RSUD Muntilan belum bisa bertemu langsung dengan pemilik tanah sampai batas waktu anggaran berakhir.

Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.12**

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
115.830.327.374,00	111.034.686.354,00	125.167.670.997,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 40 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Modal Alat Besar	38.437.550,00	37.650.000,00	97,95	23.250.000,00
	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00	9.319.500,00
	Pengadaan Alat-alat Bantu	18.437.550,00	18.050.000,00	97,90	13.930.500,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	9.324.436.380,00	9.041.693.530,00	96,97	7.943.040.515,00
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	9.304.615.500,00	9.022.023.530,00	96,96	7.795.579.315,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	19.820.880,00	19.670.000,00	99,24	147.461.200,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	198.289.250,00	191.385.400,00	96,52	1.063.888.153,00
	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	130.350.000,00	124.550.000,00	95,55	814.846.153,00
	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	67.939.250,00	66.835.400,00	98,38	4.850.000,00
	Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	244.192.000,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	63.413.725,00	62.133.725,00	97,98	91.897.500,00
	Belanja Modal Alat Pengolahan	63.413.725,00	62.133.725,00	97,98	91.897.500,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.108.351.181,00	9.846.038.018,00	81,32	8.220.166.724,00
	Pengadaan Alat Kantor	2.575.025.521,00	2.365.339.707,00	91,86	1.909.407.492,00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.316.000.580,00	7.268.636.311,00	78,02	6.019.582.232,00
	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	217.325.080,00	212.062.000,00	97,58	291.177.000,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.020.735.000,00	1.008.863.750,00	98,84	1.238.452.538,00
	Pengadaan Alat Studio	373.285.000,00	370.120.000,00	99,15	712.827.138,00
	Pengadaan Alat Komunikasi	277.450.000,00	272.743.750,00	98,30	327.611.400,00
	Belanja Modal Peralatan Pemancar	370.000.000,00	366.000.000,00	98,92	198.014.000,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.763.678.397,00	28.437.674.530,00	98,87	24.389.850.110,00
	Pengadaan Alat Kedokteran	24.163.678.397,00	23.838.674.530,00	98,65	7.571.302.560,00
	Pengadaan Alat Kesehatan	4.600.000.000,00	4.599.000.000,00	99,98	16.818.547.550,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.804.852.525,00	7.714.501.110,00	98,84	18.412.810.830,00
	Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	507.750.000,00	498.819.860,00	98,24	352.730.000,00
	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.223.416.025,00	7.142.793.750,00	98,88	17.678.055.070,00
	Belanja modal alat pendeteksi radiasi/Proteksi Lingkungan	1.587.500,00	1.580.000,00	99,53	21.027.500,00
	Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup	69.000.000,00	68.347.500,00	99,05	165.116.560,00
	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.099.000,00	2.960.000,00	95,51	195.881.700,00
9.	Belanja Modal Komputer	7.138.254.470,00	6.919.774.950,00	96,94	7.826.923.865,00
	Belanja Modal Komputer Unit	4.129.801.470,00	4.007.910.950,00	97,05	5.412.465.600,00
	Belanja Modal	3.008.453.000,00	2.911.864.000,00	96,79	2.414.458.265,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
	Peralatan Komputer				
10.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal alat eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.443.200,00	2.443.200,00	100,00	774.658.800,00
	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	190.785.000,00
	Belanja Modal Alat Pelindung	2.443.200,00	2.443.200,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	583.873.800,00
12.	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	327.383.625,00
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	327.383.625,00
13.	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.313.200.000,00	2.313.129.782,00	100,00	3.365.477.640,00
14.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	141.000.000,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD	32.314.412.512,00	30.777.821.358,00	95,24	37.045.388.698,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BOS	14.739.823.184,00	14.681.577.001,00	99,60	14.303.481.999,00
	Jumlah	115.830.327.374,00	111.034.686.354,00	95,86	125.167.670.997,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.132.984.643,00 atau 11,29% dari Tahun 2022.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.13**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
129.747.726.531,00	121.599.150.695,00	49.618.052.297,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 41 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Modal Bangunan Gedung - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	117.534.337.420,00	113.737.360.946,00	96,77	45.394.381.675,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti - - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	133.950.000,00	133.900.625,00	99,96	151.577.625,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	12.079.439.111,00	7.727.889.124,00	63,98	4.072.092.997,00
	Jumlah	129.747.726.531,00	121.599.150.695,00	93,72	49.618.052.297,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.981.098.398,00 atau 145,07% dari Tahun 2022 karena adanya kenaikan Belanja Modal Bangunan Gedung - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja pada SKPD Disdikbud, DPUPR, dan Disparpora.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.14**.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	68.131.003.708,00	67.330.738.100,00
		89.144.512.113,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 42 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.476.544.057,00	58.836.218.269,00	98,92	75.686.019.653,00
	Belanja Modal Jalan	46.771.630.750,00	46.141.618.619,00	98,65	61.014.365.773,00
	Belanja Modal Jembatan	12.704.913.307,00	12.694.599.650,00	99,92	14.671.653.880,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	6.577.529.036,00	6.513.628.831,00	99,03	7.058.820.325,00
	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	5.200.284.028,00	5.178.026.505,00	99,57	7.058.820.325,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	433.633.000,00	433.633.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	943.612.008,00	901.969.326,00	95,59	0,00
3	Belanja Modal Instalasi	2.032.430.615,00	1.946.341.000,00	95,76	6.399.672.135,00
	Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	6.399.672.135,00
	Belanja Modal Instalasi Pengaman	2.032.430.615,00	1.946.341.000,00	95,76	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLUD	44.500.000,00	34.550.000,00	77,64	0,00
	Jumlah	68.131.003.708,00	67.330.738.100,00	98,83	89.144.512.113,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp21.813.774.013,00 atau 24,47% dari Tahun 2022.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.15**.



5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
14.086.005.496,00	14.017.171.980,00	10.113.902.637,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 43 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.820.000,00	48.111.000,00	94,67	221.320.980,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.820.000,00	48.111.000,00	94,67	74.591.880,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	146.729.100,00
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	9.511.591.647,00	9.471.584.247,00	99,58	8.376.507.073,00
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.523.593.849,00	4.497.476.733,00	99,42	1.516.074.584,00
	Jumlah	14.086.005.496,00	14.017.171.980,00	99,51	10.113.902.637,00

Pada TA 2023 Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada SKPD DPRKP dan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD RSUD Merah Putih disajikan pada catatan nomor 5.1.2.2.6 akun Belanja Modal Aset Tak Berwujud.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.903.269.343,00 atau 38,59% dari Tahun 2022 karena adanya kenaikan realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.16**.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
3.258.000.000,00	3.181.740.000,00	0,00

Pada TA 2023, Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebagian besar disajikan pada catatan nomor 5.1.2.2.5 akun Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Rincian Belanja Modal Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2023 dan 2022 secara rinci pada **Lampiran 5.17**.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
23.828.281.026,00	5.106.915.740,00	3.345.921.800,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari s.d. 31



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Desember 2023 sebesar Rp5.106.915.740,00 dari anggaran sebesar Rp23.828.281.026,00 atau tercapai sebesar 21,43%, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	2	3
1	Pengembalian BOP PAUD TA 2022	25.588.000,00
2	Pengembalian Sekolah Penggerak	1,00
3	Pengembalian Sisa Dana BOS Sekolah atas Regrouping TA 2022	1.289.800,00
4	Pengembalian Denda Upland 2022	45.259.296,00
5	BTT Penanganan Karhutla TN. Gn. Merbabu	1.151.139.000,00
6	Pengembalian Sisa Dana BOS Sekolah di Regrouping TA 2023	46.202.843,00
7	Bantuan korban petasan Kaliangkrik (2 Orang)	36.480.000,00
8	Bantuan kerusakan rumah akibat bencana (3 Penerima)	40.700.000,00
9	Bantuan kerusakan rumah akibat bencana (30 Penerima)	144.255.000,00
10	Bantuan biaya rs orang terlantar (5 Penerima)	36.786.000,00
11	Bantuan biaya rs orang terlantar (3 Penerima)	10.336.000,00
12	Bantuan bansos Kesehatan (58 Penerima)	185.771.800,00
13	Bantuan bansos Kesehatan (932 Penerima)	3.135.900.000,00
14	Bantuan Pendidikan (192 Penerima)	247.208.000,00
	Jumlah	5.106.915.740,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	655.346.200.349,00	652.922.214.101,00
		683.242.991.999,00

Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 45 Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Bagi Hasil	20.149.867.136,00	19.923.238.867,00	98,88	18.398.958.004,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	635.196.333.213,00	632.998.975.234,00	99,65	664.844.033.995,00
	Jumlah	655.346.200.349,00	652.922.214.101,00	99,63	683.242.991.999,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	20.149.867.136,00	19.923.238.867,00
		18.398.958.004,00



Belanja Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5. 46 Realisasi Belanja Bagi Hasil

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.158.919.156,00	17.932.290.887,00	98,75	15.469.928.759,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.990.947.980,00	1.990.947.980,00	100,00	2.929.029.245,00
	Jumlah	20.149.867.136,00	19.923.238.867,00	98,88	18.398.958.004,00

1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.932.290.887,00 dari anggaran sebesar Rp18.158.919.156,00 atau 98,75%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 47 Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022(Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	226.628.269,00	0,00	0,00	0,00
a.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	226.628.269,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.932.290.887,00	17.932.290.887,00	100,00	15.469.928.759,00
a.	Kec. Salaman	779.807.965,00	779.807.965,00	100,00	612.830.161,00
b.	Kec. Borobudur	2.253.709.271,00	2.253.709.271,00	100,00	2.565.532.691,00
c.	Kec. Ngluwar	347.950.123,00	347.950.123,00	100,00	304.155.803,00
d.	Kec. Salam	594.363.340,00	594.363.340,00	100,00	558.186.240,00
e.	Kec. Srumbung	622.924.866,00	622.924.866,00	100,00	487.020.149,00
f.	Kec. Dukun	584.950.940,00	584.950.940,00	100,00	479.429.072,00
g.	Kec. Sawangan	601.614.203,00	601.614.203,00	100,00	459.202.179,00
h.	Kec. Muntilan	828.348.242,00	828.348.242,00	100,00	741.934.301,00
i.	Kec. Mungkid	776.396.139,00	776.396.139,00	100,00	681.887.044,00
j.	Kec. Mertoyudan	1.917.351.054,00	1.917.351.054,00	100,00	2.423.463.243,00
k.	Kec. Tempuran	826.261.750,00	826.261.750,00	100,00	799.269.303,00
l.	Kec. Kajoran	979.679.023,00	979.679.023,00	100,00	598.626.834,00
m.	Kec. Kaliangkrik	696.353.361,00	696.353.361,00	100,00	445.245.674,00
n.	Kec. Bandongan	602.540.673,00	602.540.673,00	100,00	502.673.133,00
o.	Kec. Candimulyo	700.331.110,00	700.331.110,00	100,00	521.253.158,00
p.	Kec. Pakis	741.286.156,00	741.286.156,00	100,00	528.949.683,00
q.	Kec. Ngablak	615.822.503,00	615.822.503,00	100,00	440.926.802,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022(Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
r.	Kec. Grabag	1.103.835.243,00	1.103.835.243,00	100,00	745.768.128,00
s.	Kec. Tegalrejo	760.650.255,00	760.650.255,00	100,00	468.126.552,00
t.	Kec. Secang	881.363.324,00	881.363.324,00	100,00	632.113.549,00
u.	Kec. Windusari	716.751.346,00	716.751.346,00	100,00	473.335.060,00
	Jumlah	18.158.919.156,00	17.932.290.887,00	98,75	15.469.928.759,00

Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana **Lampiran 5.18.**

2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 berdasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Bupati Nomor 180.182/147/KEP/13/2023 tentang Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Magelang Tahun 2023.

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.990.947.980,00 dari anggaran sebesar Rp1.990.947.980,00 atau 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 48 Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.990.947.980,00	1.990.947.980,00	100,00	2.929.029.245,00
a.	Kec. Salaman	105.572.700,00	105.572.700,00	100,00	160.392.410,00
b.	Kec. Borobudur	109.543.300,00	109.543.300,00	100,00	175.400.760,00
c.	Kec. Ngluwar	30.922.500,00	30.922.500,00	100,00	48.597.230,00
d.	Kec. Salam	51.475.800,00	51.475.800,00	100,00	77.157.130,00
e.	Kec. Srumbung	60.505.800,00	60.505.800,00	100,00	86.108.730,00
f.	Kec. Dukun	74.213.200,00	74.213.200,00	100,00	111.435.700,00
g.	Kec. Sawangan	196.928.000,00	196.928.000,00	100,00	289.089.670,00
h.	Kec. Muntilan	145.005.600,00	145.005.600,00	100,00	228.716.670,00
i.	Kec. Mungkid	76.651.600,00	76.651.600,00	100,00	113.085.120,00
j.	Kec. Mertoyudan	94.762.200,00	94.762.200,00	100,00	189.770.180,00
k.	Kec. Tempuran	64.498.100,00	64.498.100,00	100,00	110.992.560,00
l.	Kec. Kajoran	101.020.800,00	101.020.800,00	100,00	143.814.500,00
m.	Kec. Kaliangkrik	220.299.880,00	220.299.880,00	100,00	130.436.900,00
n.	Kec. Bandongan	60.469.700,00	60.469.700,00	100,00	99.859.770,00
o.	Kec. Candimulyo	66.770.800,00	66.770.800,00	100,00	98.726.620,00
p.	Kec. Pakis	68.735.800,00	68.735.800,00	100,00	116.552.220,00
q.	Kec. Ngablak	74.229.100,00	74.229.100,00	100,00	113.464.360,00
r.	Kec. Grabag	157.785.500,00	157.785.500,00	100,00	242.031.410,00
s.	Kec. Tegalrejo	79.898.500,00	79.898.500,00	100,00	121.731.230,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
t.	Kec. Secang	79.191.100,00	79.191.100,00	100,00	158.398.280,00
u.	Kec. Windusari	72.468.000,00	72.468.000,00	100,00	113.267.795,00
	Jumlah	1.990.947.980,00	1.990.947.980,00	100,00	2.929.029.245,00

Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dan 2022 sebagaimana **Lampiran 5.19**.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

	Tahun 2023	Tahun 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	635.196.333.213,00	664.844.033.995,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang diberikan ke pemerintahan desa yaitu terdiri dari Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Magelang, Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Pusat tanpa melalui Kas Daerah Kabupaten Magelang, serta Bantuan Keuangan kepada desa/kelurahan penghasil sumber daya air.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 49 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	587.497.193.213,00	586.843.835.234,00	99,89	609.431.717.995,00
a.	Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa)	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	393.231.309.000,00
b.	Bantuan Keuangan (ADD) ke Desa	222.968.979.213,00	222.374.121.213,00	99,73	215.548.988.293,00
c.	Bantuan Keuangan kepada Desa / Kelurahan Penghasil Sumber Daya Air	538.750.000,00	480.250.021,00	89,14	651.420.702,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	47.699.140.000,00	46.155.140.000,00	96,76	55.412.316.000,00
	Jumlah	635.196.333.213,00	632.998.975.234,00	99,65	664.844.033.995,00

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp586.843.835.234,00 dari anggaran sebesar Rp587.497.193.213,00 atau 99,89%, dengan rincian sebagai berikut:



a. Bantuan Keuangan Kepada Desa

Rincian Dana Desa ke Desa per Kecamatan didasarkan pada Perbup Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 50 Realisasi Transfer Dana Desa Ke Desa Per Kecamatan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kec. Salaman	19.869.423.000,00	19.869.423.000,00	100,00	21.460.074.000,00
2	Kec. Borobudur	19.895.378.000,00	19.895.378.000,00	100,00	19.177.666.000,00
3	Kec. Ngluwar	7.357.684.000,00	7.357.684.000,00	100,00	8.129.306.000,00
4	Kec. Salam	11.238.095.000,00	11.238.095.000,00	100,00	13.211.053.000,00
5	Kec. Srumbung	15.502.898.000,00	15.502.898.000,00	100,00	16.091.077.000,00
6	Kec. Dukun	14.255.597.000,00	14.255.597.000,00	100,00	15.239.130.000,00
7	Kec. Sawangan	15.049.772.000,00	15.049.772.000,00	100,00	17.205.304.000,00
8	Kec. Muntilan	14.579.870.000,00	14.579.870.000,00	100,00	14.173.426.000,00
9	Kec. Mungkid	15.095.783.000,00	15.095.783.000,00	100,00	15.072.832.000,00
10	Kec. Mertoyudan	14.704.103.000,00	14.704.103.000,00	100,00	15.086.584.000,00
11	Kec. Tempuran	14.682.299.000,00	14.682.299.000,00	100,00	16.109.027.000,00
12	Kec. Kajoran	25.051.995.000,00	25.051.995.000,00	100,00	29.765.543.000,00
13	Kec. Kaliangkrik	21.991.734.000,00	21.991.734.000,00	100,00	24.049.597.000,00
14	Kec. Bandongan	15.579.220.000,00	15.579.220.000,00	100,00	15.783.422.000,00
15	Kec. Candimulyo	16.364.105.000,00	16.364.105.000,00	100,00	19.158.370.000,00
16	Kec. Pakis	19.461.091.000,00	19.461.091.000,00	100,00	22.321.198.000,00
17	Kec. Ngablak	14.511.676.000,00	14.511.676.000,00	100,00	16.123.031.000,00
18	Kec. Grabag	29.021.093.000,00	29.021.093.000,00	100,00	32.363.939.000,00
19	Kec. Tegalrejo	19.173.944.000,00	19.173.944.000,00	100,00	20.519.737.000,00
20	Kec. Secang	20.039.645.000,00	20.039.645.000,00	100,00	20.346.394.000,00
21	Kec. Windusari	20.564.059.000,00	20.564.059.000,00	100,00	21.844.599.000,00
	Jumlah	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	393.231.309.000,00

Rincian Dana Desa Tahun 2023 dan 2022 per Desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.20.**

b. Bantuan Keuangan (ADD) Ke Desa

Alokasi Dana Desa diatur dalam Perbup Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Magelang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa. Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 51 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Per Kecamatan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kec. Salaman	12.348.787.200,00	12.348.787.200,00	100,00	12.045.806.000,00
2	Kec. Borobudur	11.932.414.200,00	11.932.414.200,00	100,00	11.540.630.000,00
3	Kec. Ngluwar	5.123.368.080,00	5.123.368.080,00	100,00	4.947.330.000,00
4	Kec. Salam	7.375.866.120,00	7.375.866.120,00	100,00	7.161.465.000,00
5	Kec. Srumbung	10.387.537.920,00	10.387.537.920,00	100,00	10.031.442.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
6	Kec. Dukun	9.908.404.400,00	9.908.404.400,00	100,00	9.589.106.000,00
7	Kec. Sawangan	10.487.658.400,00	10.487.658.400,00	100,00	10.116.058.000,00
8	Kec. Muntilan	8.590.592.880,00	8.590.592.880,00	100,00	8.297.664.000,00
9	Kec. Mungkid	9.202.525.640,00	9.202.525.640,00	100,00	8.916.304.000,00
10	Kec. Mertoyudan	8.224.718.120,00	8.224.718.120,00	100,00	7.983.956.000,00
11	Kec. Tempuran	8.825.792.400,00	8.825.792.400,00	100,00	8.510.436.000,00
12	Kec. Kajoran	15.630.934.040,00	15.630.934.040,00	100,00	15.079.463.000,00
13	Kec. Kaliangkrik	11.482.210.200,00	11.482.210.200,00	100,00	11.075.167.000,00
14	Kec. Bandongan	8.865.860.640,00	8.865.860.640,00	100,00	8.595.294.000,00
15	Kec. Candimulyo	11.093.341.440,00	11.093.341.440,00	100,00	10.730.008.000,00
16	Kec. Pakis	12.482.910.200,00	12.482.910.200,00	100,00	12.067.707.000,00
17	Kec. Ngablak	9.122.261.160,00	9.122.261.160,00	100,00	8.802.885.000,00
18	Kec. Grabag	16.750.806.280,00	16.750.806.280,00	100,00	16.215.388.000,00
19	Kec. Tegalrejo	11.971.653.960,00	11.971.653.960,00	100,00	11.572.389.000,00
20	Kec. Secang	11.237.903.440,00	11.237.903.440,00	100,00	11.342.457.000,00
21	Kec. Windusari	11.923.432.493,00	11.328.574.493,00	95,01	10.928.033.293,00
	Jumlah	222.968.979.213,00	222.374.121.213,00	99,73	215.548.988.293,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.21**.

c. Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan Penghasil Sumber Daya Air

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan Penghasil Sumber Daya Air Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp480.250.021,00 dari anggaran sebesar Rp538.750.000,00 atau 89,14%, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan Penghasil Sumber Daya Air Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp171.170.681,00 atau 26,28% dari Tahun 2022.

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Bantuan Keuangan Khusus diatur dalam Perbup Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa dengan rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 52 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Kec. Salaman	4.857.000.000,00	4.632.000.000,00	95,37	3.780.000.000,00
2	Kec. Borobudur	5.889.000.000,00	5.819.000.000,00	98,81	5.253.000.000,00
3	Kec. Ngluwar	1.003.000.000,00	886.000.000,00	88,33	1.211.000.000,00
4	Kec. Salam	1.387.000.000,00	1.359.000.000,00	97,98	1.938.846.000,00
5	Kec. Srumbung	2.064.000.000,00	2.009.000.000,00	97,34	2.364.000.000,00
6	Kec. Dukun	1.888.140.000,00	1.768.140.000,00	93,64	1.921.000.000,00
7	Kec. Sawangan	1.352.000.000,00	1.277.000.000,00	94,45	1.861.000.000,00
8	Kec. Muntilan	1.403.000.000,00	1.293.000.000,00	92,16	1.478.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
9	Kec. Mungkid	2.666.000.000,00	2.611.000.000,00	97,94	1.240.000.000,00
10	Kec. Mertoyudan	1.582.000.000,00	1.503.000.000,00	95,01	2.891.340.000,00
11	Kec. Tempuran	3.452.000.000,00	3.432.000.000,00	99,42	4.031.000.000,00
12	Kec. Kajoran	1.921.000.000,00	1.911.000.000,00	99,48	7.999.000.000,00
13	Kec. Kaliangkrik	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	100,00	2.633.240.000,00
14	Kec. Bandongan	1.391.000.000,00	1.301.000.000,00	93,53	2.216.000.000,00
15	Kec. Candimulyo	542.000.000,00	542.000.000,00	100,00	712.000.000,00
16	Kec. Pakis	2.774.000.000,00	2.614.000.000,00	94,23	2.077.000.000,00
17	Kec. Ngablak	1.783.000.000,00	1.723.000.000,00	96,63	1.810.000.000,00
18	Kec. Grabag	1.443.000.000,00	1.443.000.000,00	100,00	3.087.000.000,00
19	Kec. Tegalrejo	1.897.000.000,00	1.677.000.000,00	88,40	1.477.890.000,00
20	Kec. Secang	2.784.000.000,00	2.784.000.000,00	100,00	1.274.000.000,00
21	Kec. Windusari	3.740.000.000,00	3.690.000.000,00	98,66	4.157.000.000,00
	Jumlah	47.699.140.000,00	46.155.140.000,00	96,76	55.412.316.000,00

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Desa Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.22**

5.1.3. Pembiayaan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
271.532.861.722,00	271.751.861.722,00	299.078.382.309,00

Struktur APBD TA 2023 terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber pembiayaan daerah antara lain:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, transfer dari Dana Cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali Pembayaran Pajak.
2. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke Dana Cadangan, penyertaan modal, pemberian Pinjaman Daerah, dan Pembayaran Pengembalian Pajak.
3. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp315.907.861.722,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp44.375.000.000,00.
4. Adapun Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 untuk Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp315.907.861.722,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp44.156.000.000,00.

Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 5. 53 Realisasi Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	315.907.861.722,00	315.907.861.722,00	100,00	328.578.382.309,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	44.375.000.000,00	44.156.000.000,00	99,51	29.500.000.000,00
	Jumlah	271.532.861.722,00	271.751.861.722,00	100,08	299.078.382.309,00

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
315.907.861.722,00	315.907.861.722,00	328.578.382.309,00

Pada Tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar Rp315.907.861.722,00 dari anggaran sebesar Rp315.907.861.722,00 atau 100%. Penerimaan pembiayaan mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar Rp12.670.520.587,00 atau 3,86% dari Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya terealisasi sebesar Rp286.776.557.722,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp286.776.557.722,00.
2. Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024. Pencairan dana cadangan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp29.131.304.000,00 atau 100,00% dari anggaran Rp29.131.304.000,00.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
44.375.000.000,00	44.156.000.000,00	29.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 54 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	25.000.000.000,00
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda pada BUMD	14.375.000.000,00	14.156.000.000,00	98,48	4.500.000.000,00
	Jumlah	44.375.000.000,00	44.156.000.000,00	99,51	29.500.000.000,00



5.1.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pembentukan Dana Cadangan diperuntukan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang Tahun 2024.

5.1.3.2.2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
14.375.000.000,00	14.156.000.000,00	4.500.000.000,00

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah ke PDAM Tirta Gemilang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, sedangkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah ke PT BPR Bapas diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang penyertaan modal pada PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp14.156.000.000,00 secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 55 Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1.	PDAM Tirta Gemilang	7.500.000.000,00	7.281.000.000,00	97,08	4.500.000.000,00
2.	PT BPR Bank Bapas 69	6.875.000.000,00	6.875.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	14.375.000.000,00	14.156.000.000,00	98,48	4.500.000.000,00

PDAM Tirta Gemilang sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, pada Tahun 2023 mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp4.500.000.000,00 dan sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2023 mendapat hibah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebesar Rp3.000.000.000,00.

Hibah MBR sebesar Rp3.000.000.000,00 yang peruntukannya untuk bantuan pemasangan pipa masyarakat berpenghasilan rendah, yang semula dianggarkan Rp3.000.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp2.781.000.000,00. Kondisi tersebut disebabkan karena usulan 1.000 SR yang lolos verifikasi hanya 927 SR.



5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Tahun 2023		Tahun 2022
Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
0,00	157.408.613.305,00	286.776.557.722,00

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	Realisasi Pendapatan	2.576.527.842.333,00	2.573.481.690.623,00	99,88	2.558.024.177.090,00
2	Realisasi Belanja dan Transfer	2.848.060.704.055,00	2.687.824.939.040,00	94,37	2.570.326.001.677,00
3	Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (1-2)	(271.532.861.722,00)	(114.343.248.417,00)	42,11	(12.301.824.587,00)
4	Realisasi Pembiayaan				
a.	Penerimaan	315.907.861.722,00	315.907.861.722,00	100,00	328.578.382.309,00
b.	Pengeluaran	44.375.000.000,00	44.156.000.000,00	99,51	29.500.000.000,00
c.	Pembiayaan Neto (a – b)	271.532.861.722,00	271.751.861.722,00	100,08	299.078.382.309,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		157.408.613.305,00		286.776.557.722,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp157.408.613.305,00 yang terdiri atas SiLPA mengikat sebesar Rp98.160.882.376,79 dan SiLPA tidak mengikat sebesar Rp59.247.730.928,21. Rincian SiLPA mengikat Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.23**.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Rekening BOS, Rekening BLUD, dan Rekening Kas Lainnya (BOK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Penjelasan Posisi Kas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Uraian	SiLPA Mengikat (Rp)	SiLPA Tidak Mengikat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5=3+4
1	Rekening RKUD	69.402.307.443,79	59.247.730.928,21	128.650.038.372,00
2	Rekening BOS	313.340.796,00	0,00	313.340.796,00
3	Rekening BLUD	26.223.856.108,00	0,00	26.223.856.108,00
4	Rekening Kas Lainnya (BOK)	2.221.378.029,00	0,00	2.221.378.029,00
	JUMLAH	98.160.882.376,79	59.247.730.928,21	157.408.613.305,00



5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan APBD Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Penjelasan Perubahan SAL

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	286.776.557.722,00	328.578.382.309,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	286.776.557.722,00	328.578.382.309,00
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	157.408.613.305,00	286.776.557.722,00
Sub Total	157.408.613.305,00	286.776.557.722,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	157.408.613.305,00	286.776.557.722,00

- 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp286.776.557.722,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp328.578.382.309,00
- 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 sebesar Rp286.776.557.722,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp328.578.382.309,00 merupakan nilai Penggunaan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada tahun berjalan.
- 5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp157.408.613.305,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00.
- 5.2.4. Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun 2023 sebesar Rp157.408.613.305,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp286.776.557.722,00 merupakan Saldo Anggaran Lebih akhir pada tahun berjalan.



5.3. Penjelasan Neraca

5.3.1. Aset Lancar

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
249.895.232.340,77	378.213.389.731,15

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.59 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	128.504.791.904,00	235.054.907.127,00
Kas di Bendahara Penerimaan	144.592.450,00	55.015.709,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	10.803.947,00
Kas di BLUD	26.223.856.108,00	51.532.515.089,00
Kas BOS	335.699.770,00	344.539.160,00
Kas Lainnya	2.221.378.029,00	0,00
Piutang Pajak	37.591.682.015,48	34.908.261.633,48
Piutang Retribusi	3.517.910.652,65	3.707.741.598,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	20.250.624.104,50	14.969.174.690,12
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	6.829.784.343,00	2.692.928.545,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(24.947.862.868,73)	(22.391.682.790,09)
Beban Dibayar Dimuka	77.095.083,33	4.135.356.061,00
Persediaan	49.145.680.749,54	53.193.828.961,64
Jumlah	249.895.232.340,77	378.213.389.731,15

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
128.504.791.904,00	235.054.907.127,00

Kas di Kas Daerah adalah saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah per 31 Desember 2023 pada rekening giro Bank Jateng 1.005.02340.1 sebesar Rp128.054.791.904,00.

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
144.592.450,00	55.015.709,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa pendapatan yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 60 Kas di Bendahara Penerimaan

No	Nomor Rekening	Nama Rekening/SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD
1.	1005008456	Bendahara Penerimaan BPPKAD	12.913.866,00	0,00	2 Januari 2024
	1005008456		0,00	56.309,00	18 Januari 2023
2.	Tunai	Disparpora	101.284.500,00	0,00	2 dan 3 Januari 2024
	Tunai		0,00	49.252.000,00	3 Januari 2023
3.	Tunai	Dishub	935.000,00	0,00	2 Januari 2024
	Tunai		0,00	499.000,00	2 Januari 2023
4.	Tunai	Dispeterikan	0,00	5.208.400,00	2 Januari 2023
5.	Tunai	Dinkes	432.209,00	0,00	2 Januari 2024
6.	Tunai	Disdagkop	1.729.000,00	0,00	2, 4 dan 5 Januari 2024
7.	Tunai	DLH	27.297.875,00	0,00	4 Januari 2024
	Jumlah		144.592.450,00	55.015.709,00	

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.592.450,00 merupakan saldo kas di Bank yang berada di Bendahara Penerimaan BPPKAD, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan serta Dinas Peternakan dan Perikanan.

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023 (<i>Reff</i> Kas di Bendahara Penerimaan-Neraca 2022)	Rp55.015.709,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan	Rp254.211.070.012,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran :	(Rp254.121.493.271,00)
Saldo akhir 31 Des 2023: (<i>Reff</i> Kas di Bendahara Penerimaan-Neraca 2023).	Rp144.592.450,00

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	10.803.947,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Nomor Rekening Nama Rekening	31 Desember 2023		31 Desember 2022 (Rp)	Keterangan
		Bank	Tunai		
1.	Dispermades	0,00	0,00	10.803.947,00	Sisa belanja, setor tgl 9/1/2023
	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	10.803.947,00	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 merupakan saldo Kas di Bank yang berada di Bendahara Pengeluaran. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo awal 1 Jan 2023: (Reff Kas di Bendahara Pengeluaran-Neraca 2022)	Rp10.803.947,00
Mutasi tambah:	
Penerimaan :	Rp146.986.993.241,00
Mutasi kurang:	
Pengeluaran:	(Rp146.997.797.188,00)
Saldo akhir 31 Des 2023: (Reff Kas di Bendahara Pengeluaran-Neraca 2023)	Rp0,00

5.3.1.4. Kas di BLUD

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
26.223.856.108,00	51.532.515.089,00

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang masih ada di BLUD RS Merah Putih, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD Muntilan Tahun 2023 sebesar Rp26.223.856.108,00. Adapun rincian Kas BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Kas di BLUD Dinkes

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
I	RS Merah Putih			
	1.005.01038.8	Bendahara BLUD RSUD Merah Putih	7.168.414.959,00	7.154.716.323,00
		Kas Tunai	32.181.638,00	19.383.150,00
		Utang Pajak	0,00	6.207.207,00
		Jumlah Kas di BLUD RSUD Merah Putih	7.200.596.597,00	7.174.099.473,00
II	Puskesmas di Dinkes			
1.	1.162.00030.2	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salaman I	149.502.909,00	4.588.517,00
2.	1.162.00029.9	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salaman II	893.749,00	48.000.640,00
3.	1.108.00082.8	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Borobudur	110.100.043,00	77.901.170,00
4.	1.165.00028.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Ngluwar	148.789.536,00	126.017.626,00
5.	1.165.00029.2	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Salam	66.207.078,00	96.892.326,00
6.	1.165.00030.3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Srumbung	130.420.712,00	1.630.914,00
7.	1.062.00107.7	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Dukun	77.314.424,00	16.597.033,00
8.	1.062.00108.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sawangan I	3.066.752,00	14.203.254,00
9.	1.062.00109.3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Sawangan II	32.384.179,00	18.549.823,00
10.	1.062.00110.7	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Muntilan I	56.524.396,00	63.935.273,00
11.	1.062.00111.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Muntilan II	7.653.149,00	23.463.854,00
12.	1.062.00112.3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Mungkid	11.470.375,00	403.693.028,00
13.	1.005.00407.8	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Mertoyudan I	80.205.383,00	95.167.695,00
14.	1.005.00402.7	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Mertoyudan II	71.958.289,00	246.390.396,00
15.	1.162.00027.2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	114.287.879,00	56.544.594,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		Puskesmas Tempuran		
16.	1.162.00028.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kajoran I	189.113.210,00	351.025.922,00
17.	1.162.00031.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kajoran II	17.717.741,00	82.440.396,00
18.	1.135.00079.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kaliangkrik	318.760.509,00	215.782.138,00
19.	1.135.00080.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Bandongan	205.050.917,00	284.689.795,00
20.	1.005.00403.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Candimulyo	98.615.768,00	108.595.788,00
21.	1.005.00404.3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Pakis	268.301.344,00	692.539.774,00
22.	1.096.00077.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Ngablak	71.454.786,00	184.530.893,00
23.	1.096.00079.7	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Grabag I	176.943.517,00	986.043.391,00
24.	1.096.00078.9	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Grabag II	63.606.961,00	85.425.375,00
25.	1.005.00405.1	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Tegalrejo	139.066.155,00	46.511.343,00
26.	1.005.00406.0	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Secang I	47.233.158,00	294.693.937,00
27.	1.005.00408.6	RC Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Secang II	40.675.517,00	15.112.683,00
		Tunai	1.157.735,00	0,00
28.	1.135.00081.3	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Windusari	139.633.987,00	245.649.753,00
29.	1.005.00409.4	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Kota Mungkid	47.146.752,00	130.398.431,00
Jumlah Kas BLUD Puskesmas			2.885.256.910,00	5.017.015.762,00
JUMLAH KAS BLUD DINKES			10.085.853.507,00	12.191.115.235,00

Tabel 5.63. Kas Bendahara BLUD RSUD Muntilan

No.	Nomor rekening	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	1.062.00066.6	Bendahara BLUD RSUD Muntilan	16.112.040.013,00	39.314.198.961,00
		Kas Tunai	25.962.588,00	27.200.893,00
Jumlah Kas di BLUD RSUD Muntilan			16.138.002.601,00	39.341.399.854,00

Mutasi Kas Bendahara BLUD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023 (Reff Kas di BLUD-Neraca 2022)		Rp51.532.515.089,00
Mutasi tambah:	Rp209.268.637.938,00	
Penerimaan:		
Mutasi Kurang:		
Pengeluaran:	(Rp234.577.296.919,00)	
Saldo akhir 31 Des 2023 (Reff Kas di BLUD-Neraca 2023)		Rp26.223.856.108,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.5. Kas Lainnya

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

2.221.378.029,00

0,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah saldo kas Bendahara BOK Puskesmas non RKUD yang bersumber dari DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64. Kas Lainnya

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	1590052297	PKM BANDONGAN	48.983.406,00	0,00
2.	1590052377	PKM BOROBUDUR	53.155.956,00	0,00
3.	190052300	PKM CANDIMULYO	258.174.810,00	0,00
4.	1590052344	PKM DUKUN	112.617.200,00	0,00
5.	1590052275	PKM GRABAG I	63.185.157,00	0,00
6.	1590052139	PKM GRABAG II	71.708.620,00	0,00
7.	1590052184	PKM KAJORAN I	17.605.289,00	0,00
8.	1590052140	PKM KAJORAN II	53.657.943,00	0,00
9.	1590052366	PKM KALIANGKRIK	62.190.160,00	0,00
10.	1590052093	PKM KOTA MUNGKID	11.997.555,00	0,00
11.	1590052242	PKM MERTOYUDAN I	167.681.888,00	0,00
12.	1590052128	PKM MERTOYUDAN II	53.204.760,00	0,00
13.	1590052388	PKM MUNGKID	50.489.836,00	0,00
14.	1590052162	PKM MUNTILAN I	52.885.983,00	0,00
15.	1590052173	PKM MUNTILAN II	70.770.054,00	0,00
16.	1590052231	PKM NGABLAH	95.232.496,00	0,00
17.	1590052117	PKM NGLUWAR	17.748.590,00	0,00
18.	1590052195	PKM PAKIS	197.219.230,00	0,00
19.	1590052333	PKM SALAM	5.994.756,00	0,00
20.	1590052264	PKM SALAMAN I	113.900.011,00	0,00
21.	1590052220	PKM SALAMAN II	133.538.499,00	0,00
22.	1590052253	PKM SAWANGAN I	92.852.199,00	0,00
23.	1590052106	PKM SAWANGAN II	25.689.487,00	0,00
24.	1590052311	PKM SECANG I	45.718.102,00	0,00
25.	1590052151	PKM SECANG II	17.055.787,00	0,00
26.	1590052322	PKM SRUMBUNG	112.601.847,00	0,00
27.	1590052286	PKM TEGALREJO	97.701.495,00	0,00
28.	1590052219	PKM TEMPURAN	67.391.586,00	0,00
29.	1590052355	PKM WINDUSARI	50.425.327,00	0,00
			2.221.378.029,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.221.378.029,00.

Saldo awal 1 Jan 2023 (Reff Kas Lainnya-Neraca 2022)		Rp0,00
Mutasi tambah:	Rp28.148.821.000,00	
Penerimaan:		
Mutasi Kurang:		
Pengeluaran:	(Rp25.927.442.971,00)	
Saldo akhir 31 Des 2023 (Reff		Rp2.221.378.029,00



Kas Lainnya-Neraca 2023)

5.3.1.6. Kas BOS

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
335.699.770,00	344.539.160,00

Kas BOS merupakan bagian dari aset lancar yang merupakan sisa penggunaan dana BOS dari 553 SD Negeri dan 59 SMP Negeri yaitu sebesar Rp335.699.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

I Kas BOS Sekolah Negeri terdiri dari:

1. Saldo Rekening Bank BOS Reguler	Rp54.294.275,00
2. Saldo Rekening Bank BOS Kinerja	Rp90.000.000,00
3. Saldo Rekening Bank atas Temuan Inspektorat	Rp53.285.230,00
4. Saldo Rekening Bank atas Gulkin	Rp 350.000,00
5. Saldo Kas Tunai BOS Reguler	Rp91.834.366,00
6. Saldo Kas Tunai BOS Kinerja	Rp20.847.900,00
7. Saldo Kas Tunai atas Temuan Inspektorat	Rp 1.398.000,00
8. Saldo Pajak Tahun 2023 yang belum dibayarkan	<u>Rp 21.354.956,00</u>
Jumlah	Rp333.364.727,00

II Kas BOS Kesetaraan terdiri dari:

1. Saldo Kas Tunai	Rp 1.681.025,00
2. Jasa Giro disetor ke RKUD tanggal 27 Februari 2024	<u>Rp 654.018,00</u>
Jumlah	<u>Rp 2.335.043,00</u>
Jumlah Total	Rp335.699.770,00

Mutasi Kas BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023: (Reff Kas Dana BOS-Neraca 2022)	Rp344.539.160,00
Mutasi tambah	Rp283.732.177.095,00
Mutasi kurang	(Rp283.741.016.485,00)
Saldo akhir 31 Des 2023: (Reff Kas Dana BOS-Neraca 2023)	Rp335.699.770,00

Rincian Kas BOS per sekolah dapat dilihat di **Lampiran 5.24**.

5.3.1.7. Piutang Pajak

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Rp37.591.682.015,48	Rp34.908.261.633,48

Piutang Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.591.682.015,48 dan Rp34.908.261.633,48 atau mengalami kenaikan sebesar 7,69%. Piutang pajak daerah berada di BPPKAD yang terdiri dari :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.65 Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang		Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023
2		3	4	5	6=3+4-5
BPPKAD					
a	Piutang Pajak Hotel	501.382.085,00	17.885.536.687,00	18.296.496.695,00	90.422.077,00
b	Piutang Pajak Restoran	1.763.670.328,00	29.712.085.179,00	30.083.041.399,00	1.392.714.108,00
c	Piutang Pajak Hiburan	31.150.000,00	4.731.821.197,00	4.726.606.197,00	36.365.000,00
d	Piutang Pajak Reklame	473.986.376,48	1.373.229.645,00	1.324.830.646,00	522.385.375,48
e	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.713.061.401,00	46.059.423.288,00	45.655.001.705,00	4.117.482.984,00
f	Piutang Pajak Parkir	22.985.116,00	1.673.444.491,00	1.672.639.001,00	23.790.606,00
g	Piutang Pajak Air Tanah	113.006.309,00	1.046.129.040,00	1.013.976.680,00	145.158.669,00
h	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	677.091.999,00	3.797.497.116,00	3.949.297.466,00	525.291.649,00
i	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.611.928.019,00	46.101.721.623,00	42.975.578.095,00	30.738.071.547,00
j	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	40.216.949.117,00	40.216.949.117,00	0,00
Jumlah		34.908.261.633,48	192.597.837.383,00	189.914.417.001,00	37.591.682.015,48

1) Piutang Pajak Hotel

Piutang pajak hotel adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.422.077,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp501.382.085,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak hotel Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Hotel-LO)	Rp17.885.536.687,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp17.853.864.491,00
	0
Pelunasan atas SKPD s/d 2022	Rp442.632.204,00
Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Hotel-LRA)	Rp18.296.496.695,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp90.422.077,00

2) Piutang Pajak Restoran

Piutang pajak restoran adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak.

Pada Tahun 2023 terdapat penghapusan piutang pajak Restoran Tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp165.705.592,00 dengan SK Bupati nomor 180.186/154/KEP/23/2023.

Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.392.714.108,00 dengan mutasi sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp1.763.670.328,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Restoran Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Restoran-LO)	Rp29.712.085.179,00
Jumlah mutasi tambah	Rp29.712.085.179,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp29.232.908.589,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp684.427.218,00
Penghapusan piutang pajak restoran Tahun 2022	Rp165.526.092,00
Penghapusan piutang pajak restoran Tahun 2021	Rp179.500,00
Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Restoran-LRA)	Rp30.083.041.399,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp1.392.714.108,00

3) Piutang Pajak Hiburan

Piutang pajak hiburan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.365.000,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp31.150.000,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Hiburan Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Hiburan-LO)	Rp4.731.821.197,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp4.726.606.197,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp0,00
Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Hiburan-LRA)	Rp4.726.606.197,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp36.365.000,00

4) Piutang Pajak Reklame

Piutang pajak reklame adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklame yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp522.385.375,48 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp473.986.376,48
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Reklame Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Reklame-LO)	Rp1.373.229.645,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp1.252.579.790,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun	Rp72.250.856,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2022

Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Reklame-LRA)	Rp1.324.830.646,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp522.385.375,48

5) Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang pajak penerangan jalan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.117.482.984,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp3.713.061.401,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO)	Rp46.059.423.288,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp41.941.940.304,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp3.713.061.401,00
Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LRA)	Rp45.655.001.705,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp4.117.482.984,00

6) Piutang Pajak Parkir

Piutang pajak parkir adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang pajak parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.790.606,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp22.985.116,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Parkir Tahun 2023 (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Parkir-LO)	Rp1.673.444.491,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp1.672.094.001,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp545.000,00
Jumlah mutasi kurang (<i>Reff</i> Pendapatan Pajak Parkir-LRA)	Rp1.672.639.001,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp23.790.606,00

7) Piutang Pajak Air Tanah

Piutang pajak air tanah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Saldo piutang



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pajak air tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.158.669,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp113.006.309,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Air Tanah Tahun 2023 (Reff Pendapatan Pajak Air Tanah-LO)	Rp1.046.129.040,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp953.817.760,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp60.158.920,00
Jumlah mutasi kurang (Reff Pendapatan Pajak Air Tanah-LRA)	Rp1.013.976.680,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp145.158.669,00

8) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib pajak. Pada Tahun 2023 terdapat penghapusan piutang pajak MBLB Tahun 2020 sebesar Rp180.234.631,00 dengan SK Bupati nomor 180.186/154/KEP/23/2023.

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp525.291.649,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp677.091.999,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 (Reff Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO)	Rp3.797.497.116,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp3.718.678.339,00
Pelunasan atas SKPD s/d Tahun 2022	Rp50.384.496,00
Penghapusan piutang pajak MBLB Tahun 2020	Rp180.234.631,00
Jumlah mutasi kurang (Reff Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA)	Rp3.949.297.466,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp525.291.649,00

9) Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBBP2)

Piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.738.071.547,00 dengan mutasi sebagai berikut :



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp27.611.928.019,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKPD PBB-P2 Tahun 2023 (Reff PBBP2-LO)	Rp46.101.721.623,00
Jumlah mutasi tambah	Rp46.101.721.623,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKPD Tahun 2023	Rp41.369.470.025,00
Pelunasan piutang atas SKPD sebelum Tahun 2023	Rp1.606.108.070,00
Jumlah mutasi kurang	Rp42.975.578.095,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp30.738.071.547,00

5.3.1.8. Piutang Retribusi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp3.517.910.652,65

Rp3.707.741.598,00

Piutang Retribusi adalah tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan oleh wajib retribusi. Piutang retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.517.910.652,65 dan Rp3.707.741.598,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,12%. Saldo piutang retribusi berada di SKPD berikut ini :

Tabel 5.66 Piutang Retribusi

No	Nama Rekening	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	- DLH	4.137.750,00	45.035.000,00	48.747.750,00	425.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar				
	- Disdagkop, UKM	3.359.105.349,00	901.949.993,00	993.037.490,35	3.268.017.851,65
	- Dispeterikan	26.589.396,00	34.674.400,00	33.948.600,00	27.315.196,00
	Jumlah	3.385.694.745,00	936.624.393,00	1.026.986.090,35	3.295.333.047,65
3	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	- Diskominfo	145.342.703,00	1.446.469.984,00	1.575.865.082,00	15.947.605,00
4	Piutang Retribusi Terminal				
	- Dishub	157.921.400,00	218.356.200,00	255.522.600,00	120.755.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir				
	- Disdagkop, UKM	7.500.000,00	765.978.250,00	689.778.250,00	83.700.000,00
	- Dispeterikan	320.000,00	88.560.000,00	88.880.000,00	0,00
	Jumlah	7.820.000,00	854.538.250,00	778.658.250,00	83.700.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Rekening	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023
6	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	- Dishub	6.825.000,00	37.825.000,00	42.900.000,00	1.750.000,00
	TOTAL	3.707.741.598,00	3.538.848.827,00	3.728.679.772,35	3.517.910.652,65

- 1) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp425.000,00 terdapat di SKPD DLH, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp4.137.750,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada DLH	Rp45.035.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp45.035.000,00
Mutasi kurang	
Pembayaran atas SKRD Tahun 2023 DLH	Rp44.610.000,00
Pembayaran atas SKRD Tahun 2022 DLH	Rp4.137.750,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp48.747.750,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp425.000,00

- 2) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar adalah tagihan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang yang sampai dengan 31 Desember belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.295.333.047,65 terdapat di 2 (dua) SKPD yaitu Disdagkop UKM dan Dispeterikan, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp3.385.694.745,00
Disdagkop UKM	Rp3.359.105.349,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp26.589.396,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Disdagkop UKM	Rp899.949.993,00
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Dispeterikan	Rp34.674.400,00
Penambahan nilai piutang karena koreksi pada Disdagkop UKM	Rp2.000.000,00
Penetapan SKRD Tahun 2023	Rp936.624.393,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Disdagkop UKM	Rp897.186.993,00
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Dispeterikan	Rp32.480.600,00
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022 pada Disdagkop UKM	Rp95.850.497,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022 pada Dispeterikan	Rp1.468.000,00
Pengurangan nilai piutang karena koreksi pada Disdagkop UKM	Rp0,35
Jumlah Mutasi Kurang	Rp1.026.986.090,35
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp3.295.333.047,65
Disdagkop UKM	Rp3.268.017.851,65
Dispeterikan	Rp27.315.196,00

- 3) Piutang Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di daerah sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut yang sampai dengan 31 Desember belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi pada Diskominfo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.947.605,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp145.342.703,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 (Reff Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO)	Rp1.446.469.984,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp1.446.469.984,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023	Rp1.446.469.984,00
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022	Rp129.395.098,00
Jumlah Pelunasan SKRD (Reff Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi -LRA)	Rp1.575.865.082,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp1.575.865.082,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp15.947.605,00

- 4) Piutang Retribusi Terminal adalah tagihan daerah atas pemanfaatan tempat parkir untuk kendaraan, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang sampai dengan 31 Desember belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang retribusi terminal pada Dishub per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.755.000,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp157.921.400,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Dishub	Rp218.356.200,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp218.356.200,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Dishub	Rp214.446.200,00
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun	Rp41.076.400,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2022	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp255.522.600,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp120.755.000,00
5) Piutang retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp83.700.000,00 terdapat di Disdagkop UKM dan Dispeterikan, dengan rincian sebagai berikut :	
Saldo awal 1 Januari 2023	Rp7.820.000
Disdagkop UKM	Rp7.500.000
Dispeterikan	Rp320.000
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Disdagkop UKM	Rp765.978.250
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Dispeterikan	Rp88.560.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp854.538.250
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Disdagkop UKM	Rp687.278.250
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022 pada Disdagkop UKM	Rp2.500.000
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Dispeterikan	Rp88.560.000
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022 pada Dispeterikan	Rp320.000
Jumlah Mutasi Kurang	Rp778.658.250
Saldo akhir 31 Desember 2022	Rp83.700.000
Disdagkop UKM	Rp83.700.000
Dispeterikan	Rp0

- 6) Piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.750.000,00 terdapat di Dishub dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp6.825.000,00
Mutasi tambah	
Penetapan SKRD Tahun 2023 pada Dishub	Rp37.825.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp37.825.000,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas SKRD Tahun 2023 pada Dishub	Rp37.825.000,00
Pelunasan atas SKRD s/d Tahun 2022 pada Dishub	Rp5.075.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp42.900.000,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp1.750.000,00

5.3.1.9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp20.250.624.104,50

Rp14.969.174.690,12

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah tagihan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

yang sampai dengan 31 Desember belum dibayarkan kepada pemerintah daerah. Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp20.250.624.104,50 dan Rp14.969.174.690,12 atau mengalami kenaikan sebesar 35,28%. Piutang Lain-lain PAD yang Sah ada di SKPD berikut ini:

Tabel 5.67 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan Tahun 2023 (Rp)	Pengurangan Tahun 2023 (Rp)	Nilai tagihan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	1.213.755,62	0,00	1.213.755,62	0,00
2.	Piutang Pendapatan BLUD				
A	Dinkes				
	- Puskesmas	56.421.500,00	62.751.934.146,00	62.424.788.774,00	383.566.872,00
	- RSD Merah Putih	3.781.106.415,00	70.962.632.162,00	66.179.144.019,00	8.564.594.558,00
	Jumlah	3.837.527.915,00	133.714.566.308,00	128.603.932.793,00	8.948.161.430,00
b	RSUD Muntilan	11.130.433.019,50	67.497.630.310,00	67.325.600.655,00	11.302.462.674,50
	Jumlah Piutang Pendapatan BLUD	14.967.960.934,50	201.212.196.618,00	195.929.533.448,00	20.250.624.104,50
TOTAL		14.969.174.690,12	201.212.196.618,00	195.930.747.203,62	20.250.624.104,50

- 1) Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)
Treasury Deposit Facility (TDF) menurut PMK Nomor 19 Tahun 2023 adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Piutang remunerasi Dana Bagi Hasil TDF adalah tagihan pendapatan yang berasal dari Remunerasi DBH TDF yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pembayarannya. Piutang Remunerasi DBH TDF per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp1.213.755,62
Mutasi tambah	
Ketetapan Tahun 2023	Rp0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp0,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas ketetapan Tahun 2022 pada BPPKAD	Rp1.213.755,62
Jumlah Mutasi Tambah	Rp1.213.755,62
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp0,00

- 2) Piutang Pendapatan BLUD
Piutang Pendapatan BLUD adalah tagihan pendapatan yang berasal dari BLUD yang sampai dengan 31 Desember belum diterima pembayarannya. Piutang pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.250.624.104,50 ada di SKPD Dinkes dan RSUD Muntilan dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023	Rp14.967.960.934,50
Saldo awal Dinkes	3.837.527.915,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo awal RSUD Muntilan	11.130.433.019,50
Mutasi tambah	
Ketetapan Tahun 2023 Dinkes	Rp122.197.498.526,00
Ketetapan Tahun 2023 RSUD Muntilan	Rp67.071.507.510,00
Koreksi penambahan piutang tahun 2022 pada Dinkes (RS Merah Putih)	Rp4.480.261.606,00
Koreksi penambahan piutang Tahun 2022 pada Dinkes (Puskesmas)	Rp187.487.969,00
Koreksi penambahan piutang Tahun 2023 pada RSUD Muntilan	Rp426.122.800,00
Koreksi penambahan piutang Tahun 2023 pada Dinkes (Puskesmas)	Rp205.401.287,00
Koreksi penambahan piutang Tahun 2023 pada Dinkes (RS Merah Putih)	Rp6.643.916.920,00
Jumlah mutasi tambah	Rp201.212.196.618,00
Mutasi kurang	
Pelunasan atas Ketetapan Tahun 2023 Dinkes	Rp120.414.994.806,00
Pelunasan atas Ketetapan Tahun 2023 RSUD Muntilan	Rp58.810.430.277,00
Pelunasan atas Ketetapan s/d Tahun 2022 Dinkes	Rp3.692.099.951,00
Pelunasan atas Ketetapan s/d Tahun 2022 RSUD Muntilan	Rp8.494.838.683,00
Koreksi pengurangan piutang Tahun 2022 pada Dinkes (RS Merah Putih)	Rp4.191.120.598,00
Koreksi pengurangan piutang Tahun 2023 pada Dinkes (RS Merah Putih)	Rp118.229.469,00
Koreksi pengurangan piutang Tahun 2023 pada Dinkes (Puskesmas)	Rp187.487.969,00
Koreksi pengurangan piutang Tahun 2020 pada RSUD Muntilan	Rp20.331.695,00
Jumlah mutasi kurang	Rp195.929.533.448,00
Saldo akhir 31 Desember 2023	Rp20.250.624.104,50
Dinkes	8.948.161.430,00
RSUD Muntilan	11.302.462.674,50



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.68 Rincian Piutang Pendapatan BLUD

No	NAMA SKPD	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 30 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
A	DINAS KESEHATAN				
-	RSD Merah Putih				
1	Piutang Pasien Umum	582.264.959,00	2.465.169.278,00	1.185.750.099,00	1.861.684.138,00
2	Piutang Pasien Covid	320.932.500,00	1.234.509.500,00	1.496.448.500,00	58.993.500,00
3	Piutang Pasien BPJS	2.831.525.600,00	64.827.695.409,00	61.015.304.089,00	6.643.916.920,00
4	Piutang Pasien BPJS TK	0,00	128.597.820,00	128.597.820,00	0,00
5	Piutang Pasien Jasa Raharja	44.383.356,00	2.228.799.555,00	2.273.182.911,00	0,00
6	Piutang Sewa	2.000.000,00	8.400.000,00	10.400.000,00	0,00
7	Piutang Jampersal	0,00	69.460.600,00	69.460.600,00	0,00
	Jumlah Piutang BLUD di RSD Merah Putih	3.781.106.415,00	70.962.632.162,00	66.179.144.019,00	8.564.594.558,00
-	Puskesmas				
1	PKM Salaman I	40.316.500,00	2.964.897.676,00	2.958.455.426,00	46.758.750,00
2	PKM Salaman II	0,00	1.293.818.476,00	1.291.088.476,00	2.730.000,00
3	PKM Ngluwar	0,00	1.412.781.508,00	1.407.961.508,00	4.820.000,00
4	PKM Sawangan I	5.925.000,00	1.599.581.029,00	1.600.886.029,00	4.620.000,00
5	PKM Sawangan II	0,00	1.538.700.912,00	1.531.815.812,00	6.885.100,00
6	PKM Kajoran II	0,00	1.514.774.296,00	1.499.394.046,00	15.380.250,00
7	PKM Muntilan II	0,00	1.584.281.218,00	1.581.946.218,00	2.335.000,00
8	PKM Ngablak	0,00	2.014.610.962,00	2.005.071.899,00	9.539.063,00
9	PKM Mertoyudan I	0,00	1.652.148.600,00	1.649.973.600,00	2.175.000,00
10	PKM Tempuran	8.640.000,00	2.481.202.112,00	2.489.842.112,00	0,00
11	PKM Secang I	0,00	2.265.541.515,00	2.257.566.131,00	7.975.384,00
12	PKM Bandongan	0,00	3.077.670.906,00	3.065.760.906,00	11.910.000,00
13	PKM Candimulyo	0,00	2.443.218.766,00	2.426.343.766,00	16.875.000,00
14	PKM Pakis	0,00	2.988.569.918,00	2.949.555.668,00	39.014.250,00
15	PKM Tegalrejo	1.540.000,00	2.233.868.327,00	2.235.408.327,00	0,00
16	PKM Secang II	0,00	1.766.681.204,00	1.717.928.704,00	48.752.500,00
17	PKM Borobudur	0,00	3.398.932.322,00	3.333.773.597,00	65.158.725,00
18	PKM Dukun	0,00	2.354.208.723,00	2.338.298.723,00	15.910.000,00
19	PKM Grabag I	0,00	4.243.709.504,00	4.210.859.504,00	32.850.000,00
20	PKM Grabag II	0,00	1.217.699.352,00	1.212.114.352,00	5.585.000,00
21	PKM Kajoran I	0,00	2.176.617.558,00	2.157.705.808,00	18.911.750,00
22	PKM Kaliangkrik	0,00	3.616.101.719,00	3.616.101.719,00	0,00
23	PKM Kota Mungkid	0,00	976.790.974,00	975.130.974,00	1.660.000,00
24	PKM Mertoyudan II	0,00	1.735.261.340,00	1.735.261.340,00	0,00
25	PKM Mungkid	0,00	2.513.282.698,00	2.508.207.698,00	5.075.000,00
26	PKM Muntilan I	0,00	1.480.578.317,00	1.480.578.317,00	0,00
27	PKM Salam	0,00	1.891.569.547,00	1.890.449.547,00	1.120.000,00
28	PKM Windusari	0,00	2.649.487.596,00	2.633.091.496,00	16.396.100,00
29	PKM Srumbung	0,00	1.665.347.071,00	1.664.217.071,00	1.130.000,00
	Jumlah Piutang BLUD di Puskesmas	56.421.500,00	62.751.934.146,00	62.424.788.774,00	383.566.872,00
	Jumlah Piutang BLUD di Dinkes	3.837.527.915,00	133.714.566.308,00	128.603.932.793,00	8.948.161.430,00
B	RSUD MUNTILAN				
1	Pasien Umum	2.827.842.546,50	1.370.560.902,00	765.692.381,00	3.432.711.067,50
2	Pasien BPJS/JKN	8.163.529.473,00	64.592.234.956,00	64.886.762.822,00	7.869.001.607,00
3	Pasien Jamkes Lainnya - Jasa Raharja	0,00	1.523.584.452,00	1.523.584.452,00	0,00
4	Pasien Jamkes Lainnya - Covid-19	127.133.000,00		127.133.000,00	0,00
5	Usaha Lainnya - Sewa Kantin	3.050.000,00	11.250.000,00	13.550.000,00	750.000,00
6	Usaha Lainnya - Pemeriksaan Lab	8.878.000,00		8.878.000,00	0,00
	Jumlah Piutang BLUD di RSUD Muntilan	11.130.433.019,50	67.497.630.310,00	67.325.600.655,00	11.302.462.674,50
Total	Piutang BLUD	14.967.960.934,50	201.212.196.618,00	195.929.533.448,00	20.250.624.104,50



5.3.1.10. Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp6.829.784.343,00

Rp2.692.928.545,00

Piutang Transfer Antar Daerah adalah kurang salur atas pendapatan transfer dari pemerintah lain yang sampai dengan 31 Desember belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Piutang transfer antar daerah Tahun 2022 dilaporkan berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang dan Pemprov Jawa Tengah dengan Nomor 32/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp6.829.784.343,00 dan Rp2.692.928.545,00 atau mengalami kenaikan sebesar 153,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Piutang Transfer Antar Daerah

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.315.263.711,00	1.631.869.921,00	1.315.263.711,00	1.631.869.921,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	727.749.504,00	384.532.910,00	727.749.504,00	384.532.910,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	641.290.108,00	4.796.176.546,00	641.290.108,00	4.796.176.546,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	8.625.222,00	17.204.966,00	8.625.222,00	17.204.966,00
	JUMLAH	2.692.928.545,00	6.829.784.343,00	2.692.928.545,00	6.829.784.343,00

- 1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor adalah kurang salur atas bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.631.869.921,00
- 2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Piutang Bagi Hasil BBNKB adalah kurang salur atas bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Piutang Bagi Hasil BBNKB per 31 Desember 2023 sebesar Rp384.532.910,00.
- 3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah kurang salur atas bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.796.176.548,00.
- 4) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan adalah kurang salur atas pajak air permukaan dari pemerintah provinsi yang sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.204.966,00.

Rincian piutang per tahun dapat dilihat pada **Lampiran 5.25**.



5.3.1.11. Penyisihan Piutang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp24.947.862.868,73)

(Rp22.391.682.790,09)

Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun, SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan.

Saldo piutang di atas merupakan saldo piutang bersih per 31 Desember 2023 yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.70 Penyisihan Piutang

NO.	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	NRV Piutang (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1.	Piutang Pajak Daerah	37.591.682.015,48	19.675.194.970,78	17.916.487.044,70
2.	Piutang Retribusi Daerah	3.517.910.652,65	3.392.915.005,15	124.995.647,50
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.250.624.104,50	1.879.752.892,80	18.370.871.211,70
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	6.829.784.343,00	0,00	6.829.784.343,00
	TOTAL	68.190.001.115,63	24.947.862.868,73	43.242.138.246,90

Rincian penyisihan piutang per SKPD dapat dilihat di **Lampiran 5.26 dan 5.27**

Piutang-piutang di atas dapat dikategorikan menjadi piutang lancar, kurang lancar, diragukan tertagih, dan macet sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.71 Kategori Piutang

No	Jenis Piutang	Nilai tagihan per 31 Desember 2023 (Rp)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan Tertagih	Macet
1.	Piutang Pajak Daerah	37.591.682.015,48	9.658.928.770,00	4.300.354.496,00	10.494.620.255,00	13.137.778.494,48
2.	Piutang Retribusi Daerah	3.517.910.652,65	87.991.800,00	31.910.840,00	58.665.038,00	3.339.342.974,65
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.250.624.104,50	17.200.792.491,00	1.295.081.956,00	527.042.703,00	1.227.706.954,50
4.	Piutang Transfer Antar Daerah	6.829.784.343,00	6.829.784.343,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	68.190.001.115,63	33.777.497.404,00	5.627.347.292,00	11.080.327.996,00	17.704.828.423,63



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.12. Beban Dibayar di Muka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp77.095.083,33

Rp4.135.356.061,00

Beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum aset tersebut digunakan di masa mendatang atau sebelum jatuh tempo. Biaya tersebut tidak dibebankan secara langsung pada periode bersangkutan karena belum menjadi beban untuk periode tersebut. Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp77.095.083,33 dan Rp4.135.356.061,00 atau mengalami penurunan sebesar 98,14%. Rincian beban dibayar dimuka terdiri dari:

Tabel 5.72 Beban Dibayar Dimuka

No	SKPD	Uraian	Periode	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Dinkes	Kelebihan pembayaran iuran PBPU Pemda Kab. Magelang berdasarkan Surat Pemberitahuan Iuran dari BPJS Nomor 166/VI-04/0323 Tanggal 01 Maret 2023		4.026.151.478,00		4.026.151.478,00	0,00
2	DPU PR	Pembayaran sewa tanah periode 2020 sd 2025	5 Tahun	100.371.250,00	0,00	36.855.000,00	63.516.250,00
3	Disdagkop UKM	Pembayaran sewa tanah PKL Bambu Runcing September 2019 sd Agustus 2024	5 Tahun	8.833.333,00	0,33	5.300.000,00	3.533.333,33
4	DLH	Pembayaran sewa tanah PKL Bambu Runcing Agustus 2022 s/d November 2028	6 Tahun 4 Bulan	0,00	10.045.500,00	0,00	10.045.500,00
Jumlah				4.135.356.061,00	10.045.500,33	4.068.306.478,00	77.095.083,33

Rincian perhitungan beban dibayar dimuka per SKPD dapat dilihat di **lampiran 5.28**.

5.3.1.13. Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

49.145.680.749,54

53.193.828.961,64

Saldo Persediaan menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp49.145.680.749,54 dibanding saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.193.828.961,29 atau mengalami penurunan sebesar 7,61%, Saldo persediaan tersebut berasal dari belanja tahun berjalan serta hibah dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak lain. Adapun rincian persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.73 Persediaan

Persediaan Barang Pakai Habis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bahan	762.528.453,00	592.686.963,00
Suku Cadang	561.585.669,18	353.968.660,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	12.843.306.643,09	12.399.156.072,20
Obat-Obatan	17.085.227.254,27	19.256.379.207,31
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	15.340.842.205,00	18.125.009.199,29
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga- Jaga	2.426.874.311,00	2.382.736.949,00
Natura Dan Pakan	125.316.214,00	83.891.910,84
Jumlah	49.145.680.749,54	53.193.828.961,64

Rincian SKPD yang masih mempunyai persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.29**.

Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan metode persediaan *First In First Out* (FIFO)/Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) di Penyimpan Barang SKPD.

1. Bahan

Saldo Bahan sebesar Rp762.528.453,00 s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Bahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp762.528.453,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp592.686.963,00. Saldo Persediaan Bahan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp169.841.490,00 atau sebesar 28,66% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 penambahan Bahan lebih banyak dibandingkan dengan pengurangan yang digunakan pada Tahun 2023.

Perhitungan mutasi Bahan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.74 Mutasi Bahan

No	Bahan	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	367.736.113,00	3.642.563.575,00	3.397.798.328,00	612.501.360,00
2	Bahan Kimia	224.627.850,00	698.663.623,00	780.678.920,00	142.612.553,00
3	Bahan Bakar dan Pelumas	323.000,00	3.947.320.258,00	3.947.643.258,00	0,00
4	Bahan Baku	0,00	244.463.125,00	244.463.125,00	0,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	237.138.511,00	230.688.511,00	6.450.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	233.505.000,00	233.505.000,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	0,00	397.939.780,00	397.897.780,00	42.000,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	65.397.450,00	65.397.450,00	0,00
9	Bahan Lainnya	0,00	15.146.578.578,00	15.145.656.038,00	922.540,00
	Jumlah	592.686.963,00	24.613.569.900,00	24.443.728.410,00	762.528.453,00

Perhitungan lebih rinci mutasi Bahan per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.30 s.d. 5.38**.

2. Suku Cadang

Saldo Suku Cadang sebesar Rp561.585.669,18 s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Suku Cadang per 31 Desember 2023 sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp561.585.669,18 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp353.968.660,00. Saldo Persediaan Suku Cadang Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp207.617.009,18 atau sebesar 58,65% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 penambahan Suku Cadang lebih banyak dibandingkan dengan pengurangan pada Tahun 2023.

Perhitungan mutasi Suku Cadang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Suku Cadang

No	Suku Cadang	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Suku Cadang Alat Angkutan	11.800.000,00	156.532.285,00	153.682.285,00	14.650.000,00
2	Suku Cadang Alat Besar	0,00	535.425.640,00	535.425.640,00	0,00
3	Suku Cadang Alat Kedokteran	84.954.221,00	255.196.400,00	260.535.028,00	79.615.593,00
4	Suku Cadang Alat Laboratorium	257.203.439,00	3.166.209.004,00	2.968.192.366,82	455.220.076,18
5	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00
6	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	34.106.800,00	34.106.800,00	0,00
7	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	3.626.925,00	3.626.925,00	0,00
8	Suku Cadang Lainnya	0,00	573.018.788,00	560.928.788,00	12.090.000,00
Jumlah		353.968.660,00	4.724.125.842,00	4.516.508.832,82	561.585.669,18

Perhitungan lebih rinci mutasi Suku Cadang per SKPD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 5.39** s.d. **5.46**.

3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp12.843.306.643,09 s/d tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Pengadaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor tersebut oleh masing-masing SKPD dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.843.306.643,09 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.399.156.072,20. Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp444.150.570,89 atau sebesar 3,58% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 penambahan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor lebih banyak dibandingkan dengan pengurangan yang digunakan pada Tahun 2023.

Perhitungan mutasi Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021 pada tabel berikut:

Tabel 5.76 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

No	Suku Cadang	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Alat Tulis Kantor	3.216.850.450,50	6.448.944.105,00	6.851.122.330,37	2.814.672.225,13
2	Kertas dan Cover	391.439.109,00	3.142.848.115,00	3.133.349.122,00	400.938.102,00
3	Bahan Cetak	234.025.047,00	7.200.505.370,00	6.856.282.882,00	578.247.535,00
4	Benda Pos	17.734.000,00	174.396.100,00	180.347.600,00	11.782.500,00
5	Bahan Komputer	306.834.370,00	1.929.420.177,00	1.898.919.103,00	337.335.444,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Suku Cadang	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
6	Perabot Kantor	347.447.317,00	2.770.758.543,00	2.788.099.575,00	330.106.285,00
7	Alat Listrik	223.196.465,00	2.052.419.958,00	2.028.232.513,00	247.383.910,00
8	Perlengkapan Dinas	58.129.200,00	3.848.417.033,00	3.807.573.033,00	98.973.200,00
9	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	18.725.805,00	0,00	0,00	18.725.805,00
10	Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.585.250,00	167.093.202,00	151.935.250,00	50.743.202,00
11	Suvenir/Cendera Mata	14.301.800,00	1.025.442.135,00	967.014.635,00	72.729.300,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.534.887.258,70	16.438.627.919,00	16.091.846.042,74	7.881.669.134,96
Jumlah		12.399.156.072,20	45.198.872.657,00	44.754.722.086,11	12.843.306.643,09

Perhitungan lebih rinci mutasi Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.47 s.d. 5.58.**

4. Obat-Obatan

Saldo Obat-Obatan sebesar Rp17.085.227.254,27 s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Obat-Obatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.085.227.254,27 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.256.379.207,31. Saldo Persediaan Obat-Obatan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.171.151.953,04 atau sebesar 11,27% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 pengurangan Obat-Obatan lebih banyak dibandingkan dengan penambahan pada Tahun 2023.

Perhitungan mutasi Obat-Obatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.77 Obat-Obatan

No	Obat-Obatan	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Obat	19.254.450.007,31	36.682.957.718,00	38.861.307.811,04	17.076.099.914,27
2	Obat-obatan Lainnya	1.929.200,00	11.787.254.694,00	11.780.056.554,00	9.127.340,00
Jumlah		19.256.379.207,31	48.470.212.412,00	50.641.364.365,04	17.085.227.254,27

Perhitungan lebih rinci mutasi Obat-Obatan per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.59 dan 5.60.**

5. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp15.340.842.205,00 s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.340.842.205,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.125.009.199,29. Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 2.784.166.994,29 atau sebesar 15,36% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 pengurangan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan lebih banyak dibandingkan dengan penambahan pada Tahun 2023. Perhitungan mutasi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.78 Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan

No	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	15.861.592.799,29	3.629.167.838,00	5.480.355.032,29	14.010.405.605,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.263.416.400,00	1.374.086.600,00	2.307.066.400,00	1.330.436.600,00
	Jumlah	18.125.009.199,29	5.003.254.438,00	7.787.421.432,29	15.340.842.205,00

Perhitungan lebih rinci mutasi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.61 dan 5.62**.

6. Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp2.426.874.311,00 yang s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.426.874.311,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.382.736.949,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,85%.

Perhitungan mutasi Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.79 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga

No	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	2.382.736.949,00	515.099.811,00	470.962.449,00	2.426.874.311,00
	Jumlah	2.382.736.949,00	515.099.811,00	470.962.449,00	2.426.874.311,00

Perhitungan lebih rinci mutasi Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.80 Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Bejaga-jaga Per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	BPBD	1.567.368.849,00	515.099.811,00	392.868.449,00	1.689.600.211,00
2	DINSOS	805.188.100,00	0,00	77.839.000,00	727.349.100,00
3	DISTANPANGAN	10.180.000,00	0,00	255.000,00	9.925.000,00
	Jumlah	2.382.736.949,00	515.099.811,00	470.962.449,00	2.426.874.311,00

7. Natura dan Pakan

Saldo Natura dan Pakan sebesar Rp125.316.214,00 s.d. tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai habis. Saldo Natura dan Pakan per 31 Desember 2023 sebesar Rp125.316.214,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.891.910,84. Saldo Persediaan Natura dan Pakan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp41.424.303,16 atau sebesar 49,38% dari Tahun 2022 karena pada Tahun 2023 penambahan Natura dan Pakan lebih banyak dibandingkan dengan pengurangan yang digunakan pada Tahun 2023.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perhitungan mutasi Natura dan Pakan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Natura dan Pakan

No	Natura dan Pakan	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Natura	83.891.910,84	30.079.970.111,00	30.042.539.107,84	121.322.914,00
2	Pakan	0,00	149.646.800,00	145.653.500,00	3.993.300,00
3	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	88.407.420,00	88.407.420,00	0,00
Jumlah		83.891.910,84	30.318.024.331,00	30.276.600.027,84	125.316.214,00

Rincian Natura per SKPD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.63 s.d 5.65**.

8. Barang Kadaluarsa

Selain persediaan yang telah diungkapkan di atas, terdapat Barang Kadaluarsa yang tidak dicatat sebagai persediaan. Perhitungan mutasi Barang Kadaluarsa per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Barang Kadaluarsa

No	Barang Kadaluarsa	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Obat	682.596.523,16	530.305.058,15	527.330.150,00	685.571.431,31
2	Barang Medis Habis Pakai (BMHP)	0,00	2.415.537,00	0,00	2.415.537,00
3	Bahan Kadaluarsa (Bahan Laboratorium)	90.524.407,00	3.148.855,00	0,00	93.673.262,00
4	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	77.839.000,00	0,00	77.839.000,00
Jumlah		773.120.930,16	613.708.450,15	527.330.150,00	859.499.230,31

8.1 Obat Kadaluarsa

Saldo Obat Kadaluarsa 31 Desember 2023 sebesar Rp685.571.431,31 dan Saldo Obat Kadaluarsa 31 Desember 2022 sebesar Rp682.596.523,16. Saldo Akhir Obat Kadaluarsa 31 Desember 2023 senilai Rp685.571.431,31 berasal dari penambahan Obat Kadaluarsa selama Tahun 2023 dan pengurangan berupa pemusnahan Obat Kadaluarsa Tahun 2023.

Perhitungan mutasi Obat Kadaluarsa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Obat Kadaluarsa per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinkes	660.930.814,16	442.057.583,15	527.330.150,00	575.658.247,31
2	RSUD Muntilan	21.665.709,00	88.247.475,00	0,00	109.913.184,00
Jumlah		682.596.523,16	530.305.058,15	527.330.150,00	685.571.431,31

8.2 Barang Medis Habis Pakai (BMHP)

Saldo Barang Medis Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.415.537,00 sedangkan saldo Barang Medis Habis Pakai per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Barang Medis Habis Pakai dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.415.537,00 atau sebesar 100,00% karena terdapat penambahan Barang



Medis Habis Pakai selama Tahun 2023 pada Dinkes.

8.3 Bahan Kadaluausa

Saldo Bahan Kadaluausa per 31 Desember 2023 sebesar Rp93.673.262,00 sedangkan saldo Bahan Kadaluausa per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.524.407,00. Bahan Kadaluausa dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami peningkatan Rp3.148.855,00 atau sebesar 3,48% karena terdapat penambahan Bahan Kadaluausa selama Tahun 2023 pada DLH.

8.4 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga yang kadaluarsa per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.839.000,00 sedangkan saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga yang kadaluarsa per 31 Desember 2022 Rp0,00. Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga yang kadaluarsa dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami peningkatan Rp77.839.000,00 atau sebesar 100,00% karena terdapat penambahan Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga yang kadaluarsa selama Tahun 2023 pada Dinsos PPKB PPPA.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
325.539.592.690,76	309.177.015.206,48

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

5.3.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2023 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.2.1.1. Investasi Non Permanen Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya beserta penyisihannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.84. Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Distanpangan		
Nilai Pokok Investasi	570.574.000,00	570.574.000,00
Penyisihan Investasi	570.574.000,00	570.574.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
NRV Investasi	0,00	0,00
Dispeterikan		
Nilai Pokok Investasi	2.086.823.000,00	2.086.823.000,00
Penyisihan Investasi	2.086.823.000,00	2.086.823.000,00
NRV Investasi	0,00	0,00
Disdagkop UMKM		
Nilai Pokok Investasi	1.523.661.155,00	1.523.661.155,00
Penyisihan Investasi	1.523.661.155,00	1.523.661.155,00
NRV Investasi	0,00	0,00
Jumlah Nilai Pokok Investasi	4.181.058.155,00	4.181.058.155,00
Jumlah Penyisihan Investasi	4.181.058.155,00	4.181.058.155,00
Jumlah NRV Investasi	0,00	0,00

Nilai tersebut adalah Dana Bergulir yang sudah macet dan berumur lebih dari 5 tahun. Perlakuan atas Dana Bergulir yang sudah disisihkan sebesar 100%, jika terdapat penerimaan kembali diakui sebagai pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan tabel mutasi dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya serta keterangan lebih rinci perihal penyisihan masing –masing Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya serta daftar masing-masing penerima Dana Bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 5.66 dan 5.67**

5.3.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
325.539.592.690,76	309.177.015.206,48

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar Rp325.539.592.690,76 dan Rp309.177.015.206,48.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menjelaskan bahwa:

1. Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (*cost method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di bawah 20%;
2. Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya di atas 20%

Penilaian Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menggunakan metode ekuitas diberlakukan mulai Tahun 2011.

5.3.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
325.539.592.690,76	309.177.015.206,48

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp325.539.592.690,76 dan Rp309.177.015.206,48 dengan rincian sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.85 Penyertaan Modal ke BUMD

Nama BUMD	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Kepemilikan per 31 Des 2023 (%)	Penyertaan Modal 2023 (Rp)	Saldo 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
Investasi Jangka Panjang Permanen dengan Metode Biaya				
Bank Jateng	45.000.000.000,00	1,02	0,00	45.000.000.000,00
BKK Jateng	4.900.000.000,00	1,42	0,00	4.900.000.000,00
PRPP	280.000.000,00	0,37	0,00	280.000.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen dengan Metode Ekuitas				
Bapas 69	162.582.723.697,00	100,00	6.875.000.000,00	170.032.266.083,00
PDAU	3.566.251.510,00	100,00	0,00	3.661.276.752,00
PDAM	78.400.162.315,00	100,00	7.281.000.000,00	86.855.750.974,00
BKK Muntilan	14.447.877.684,48	48,00	0,00	14.810.298.881,76
Jumlah	309.177.015.206,48		14.156.000.000,00	325.539.592.690,76

Untuk penyertaan modal sebesar Rp6.875.000.000,00 belum dimasukkan kedalam modal disetor PT Bapas 69 berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Rincian kertas kerja Penyertaan Modal ke BUMD dapat dilihat pada **Lampiran 5.68**.

5.3.3. Aset Tetap

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

2.972.439.308.400,98

2.910.794.609.807,34

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.972.439.308.400,98 dan Rp2.910.794.609.807,34 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	685.560.820.718,00	683.164.024.140,00
Peralatan Dan Mesin	1.171.542.761.890,00	1.066.984.512.370,00
Gedung Dan Bangunan	1.900.600.631.706,00	1.814.142.616.411,00
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.775.101.534.896,00	1.694.527.483.679,00
Aset Tetap Lainnya	160.465.769.500,00	151.341.675.304,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.775.748.561,00	4.697.274.759,00
Akumulasi Penyusutan	(2.760.607.958.870,02)	(2.504.062.976.855,66)
Jumlah	2.972.439.308.400,98	2.910.794.609.807,34

5.3.3.1. Tanah

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

685.560.820.718,00

683.164.024.140,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp685.560.820.718,00 dan Rp683.164.024.140,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Tanah

Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah Persil	235.818.718.868,00	229.990.655.048,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah Non Persil	92.340.257.665,00	96.256.855.792,00
Lapangan	357.401.844.185,00	356.916.513.300,00
Jumlah	685.560.820.718,00	683.164.024.140,00

Perhitungan mutasi Tanah per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Mutasi Tanah per SKPD

1	SKPD 2	31 Desember 2022 (Rp) 3	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp) 6=3+4-5
			Penambahan (Rp) 4	Pengurangan (Rp) 5	
1	Disdikbud	33.089.529.863,00	0,00	0,00	33.089.529.863,00
2	Dinkes	27.503.894.373,00	0,00	0,00	27.503.894.373,00
3	RSUD Muntilan	4.026.868.415,00	0,00	0,00	4.026.868.415,00
4	DPU PR	301.395.672.680,00	509.393.785,00	0,00	301.905.066.465,00
5	DPRKP	843.594.235,00	0,00	58.651.580,00	784.942.655,00
6	BPBD	1.844.969.084,00	0,00	0,00	1.844.969.084,00
7	Dinsos	66.306.250,00	0,00	0,00	66.306.250,00
8	Disperinnaker	192.550.000,00	0,00	0,00	192.550.000,00
9	Distanpangan	4.558.334.419,00	837.573.180,00	37.600.000,00	5.358.307.599,00
10	DLH	27.846.984.554,00	0,00	0,00	27.846.984.554,00
11	Dishub	3.968.774.370,00	0,00	0,00	3.968.774.370,00
12	Diskominfo	116.250.000,00	0,00	0,00	116.250.000,00
13	Disdagkop UKM	34.128.880.286,00	15.060.355.700,00	0,00	49.189.235.986,00
14	DPMPSTSP	889.914.868,00	0,00	0,00	889.914.868,00
15	Disparpora	34.152.216.803,00	0,00	140.636.300,00	34.011.580.503,00
16	Dispuspa	118.202.550,00	0,00	0,00	118.202.550,00
17	Dispeterikan	3.058.141.200,00	0,00	0,00	3.058.141.200,00
18	Setda	7.152.700.000,00	0,00	591.000.000,00	6.561.700.000,00
19	Set DPRD	115.456.720,00	0,00	0,00	115.456.720,00
20	BPPKAD	50.017.675.613,00	1.306.179.165,00	14.524.414.872,00	36.799.439.906,00
21	Kec. Salaman	687.000.000,00	0,00	0,00	687.000.000,00
22	Kec. Borobudur	8.964.567.045,00	0,00	0,00	8.964.567.045,00
23	Kec. Ngluwar	370.517.900,00	0,00	0,00	370.517.900,00
24	Kec. Salam	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00
25	Kec. Srumbung	213.000.000,00	0,00	0,00	213.000.000,00
26	Kec. Dukun	23.436.000,00	0,00	0,00	23.436.000,00
27	Kec. Sawangan	4.563.287.500,00	0,00	0,00	4.563.287.500,00
28	Kec. Muntilan	14.591.741.903,00	1.555.000,00	0,00	14.593.296.903,00
29	Kec. Mungkid	12.759.177.064,00	1.655.000,00	0,00	12.760.832.064,00
30	Kec. Mertoyudan	30.739.787.990,00	3.287.500,00	0,00	30.743.075.490,00
31	Kec. Tempuran	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00
32	Kec. Kajoran	449.141.800,00	0,00	0,00	449.141.800,00
33	Kec. Kaliangkrik	920.134.910,00	0,00	0,00	920.134.910,00
34	Kec. Bandongan	54.900.000,00	0,00	0,00	54.900.000,00
35	Kec. Candimulyo	1.781.250.000,00	0,00	0,00	1.781.250.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
36	Kec. Pakis	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
37	Kec. Ngablak	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
38	Kec. Grabag	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00
39	Kec. Tegalrejo	137.312.000,00	0,00	0,00	137.312.000,00
40	Kec. Secang	70.893.226.245,00	29.100.000,00	0,00	70.922.326.245,00
41	Kec. Windusari	8.127.500,00	0,00	0,00	8.127.500,00
Jumlah		683.164.024.140,00	17.749.099.330,00	15.352.302.752,00	685.560.820.718,00

Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2022 sebesar Rp683.164.024.140,00 selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp17.749.099.330,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp15.352.302.752,00 sehingga Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.560.820.718,00.

Saldo KIB A (Tanah) per 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp685.560.820.718,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp683.164.024.140,00 terdapat peningkatan sebesar Rp2.396.796.578,00 atau 0,35%.

Perhitungan KIB A (Tanah) per 31 Desember 2023 sebesar Rp685.560.820.718,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023: Rp683.164.024.140,00

(Reff KIB A (Tanah))

Mutasi tambah:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 Rp837.573.180,00

Kapitalisasi Barang dan Jasa (BPPKAD: biaya sertifikasi tanah anggaran 2023 (yang sudah jadi sertifikat) Rp371.335.000,00

Reklasifikasi dari B.Modal Gedung dan Bangunan (BPPKAD dan Kec.Secang) Rp147.800.625,00

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (BPPKAD) Rp 25.855.660,00

Koreksi tambah (hasil temuan barang belum tercatat: Tanah Pasar Mungkid dan Tanah Pasar Borobudur) Rp15.060.355.700,00

Mutasi Barang Masuk antar SKPD Rp790.287.880,00

Koreksi tambah (nilai atribusi biaya sertifikat tanah dan patok tanah SKPD lain) Rp515.891.285,00

Jumlah Rp17.749.099.330,00

Mutasi kurang:

Mutasi Barang Keluar Antar SKPD (Rp790.287.880,00)

Koreksi Kurang (nilai atribusi biaya sertifikat tanah dan patok tanah untuk SKPD lain) (Rp515.891.285,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Reklasifikasi ke Properti Investasi
(BPPKAD dan Distanpangan) (Rp14.046.123.587,00)

Jumlah Rp(15.352.302.752,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023 Rp685.560.820.718,00
(Reff KIB A (Tanah))

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

1.171.542.761.890,00

1.066.984.512.370,00

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.171.542.761.890,00 dan Rp1.066.984.512.370,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.89 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Alat Besar	36.150.601.624,00	35.259.993.924,00
Alat Besar Darat	22.910.018.830,00	22.910.018.830,00
Alat Besar Apung	193.000.000,00	193.000.000,00
Alat Bantu	13.047.582.794,00	12.156.975.094,00
Alat Angkutan	151.598.612.484,00	140.037.720.954,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	147.884.989.716,00	136.876.796.186,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	3.207.036.983,00	2.654.338.983,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	506.585.785,00	506.585.785,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.014.234.943,00	10.463.065.252,00
Alat Bengkel Bermesin	2.597.654.362,00	2.563.834.112,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	1.415.613.829,00	1.327.485.979,00
Alat Ukur	7.000.966.752,00	6.571.745.161,00
Alat Pertanian	3.734.155.945,00	3.712.805.945,00
Alat Pengolahan	3.734.155.945,00	3.712.805.945,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	311.490.984.996,00	287.509.591.459,00
Alat Kantor	84.991.150.939,00	76.468.506.277,00
Alat Rumah Tangga	219.907.834.257,00	204.522.500.675,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.591.999.800,00	6.518.584.507,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	41.662.357.105,00	38.061.543.496,00
Alat Studio	28.681.572.561,00	26.154.945.322,00
Alat Komunikasi	8.158.028.033,00	7.863.461.519,00
Peralatan Pemancar	4.667.586.911,00	3.887.967.055,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	155.169.600,00	155.169.600,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	338.967.353.239,00	296.949.620.066,00
Alat Kedokteran	333.987.014.374,00	294.893.326.633,00
Alat Kesehatan Umum	4.980.338.865,00	2.056.293.433,00
Alat Laboratorium	58.626.303.448,00	56.236.327.002,00
Unit Alat Laboratorium	44.271.398.540,00	42.596.498.365,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	304.002.576,00	89.674.350,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	9.459.559.713,00	9.066.338.049,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.127.224.900,00	1.071.390.100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Peralatan dan Mesin		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	15.319.500,00	15.319.500,00
	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	130.501.178,00	106.180.997,00
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.264.291.280,00	2.247.409.880,00
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	373.029.931,00	367.229.931,00
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	680.975.830,00	676.285.830,00
	Alat Persenjataan	961.776.570,00	946.776.570,00
	Senjata Api	48.352.414,00	33.352.414,00
	Persenjataan Non Senjata Api	912.324.156,00	912.324.156,00
	Senjata Sinar	1.100.000,00	1.100.000,00
	Komputer	209.627.837.546,00	190.791.119.086,00
	Komputer Unit	153.045.378.664,00	138.502.127.751,00
	Peralatan Komputer	56.582.458.882,00	52.288.991.335,00
	Alat Eksplorasi	5.503.500,00	5.503.500,00
	Alat Eksplorasi Geofisika	5.503.500,00	5.503.500,00
	Alat Keselamatan Kerja	371.538.613,00	237.356.313,00
	Alat Pelindung	41.100.125,00	41.100.125,00
	Alat SAR	262.158.188,00	192.296.888,00
	Alat Kerja Penerbangan	68.280.300,00	3.959.300,00
	Alat Peraga	56.097.624,00	56.097.624,00
	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	56.097.624,00	56.097.624,00
	Peralatan Proses/Produksi	127.810.500,00	102.214.500,00
	Unit Peralatan Proses/Produksi	127.810.500,00	102.214.500,00
	Rambu-rambu	6.341.289.043,00	6.041.741.069,00
	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	6.231.535.183,00	5.931.987.209,00
	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	109.753.860,00	109.753.860,00
	Peralatan Olahraga	806.304.710,00	573.035.610,00
	Peralatan Olahraga	806.304.710,00	573.035.610,00
	Jumlah	1.171.542.761.890,00	1.066.984.512.370,00

Perhitungan mutasi Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90 Mutasi Peralatan dan Mesin per SKPD

1	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
2	3	4	5	6=3+4-5	
1	Disdikbud	276.762.144.318,00	28.228.383.112,00	104.432.581,00	304.886.094.849,00
2	Dinkes	302.126.372.645,00	50.460.545.132,00	4.821.006.536,00	347.765.911.241,00
3	RSUD Muntilan	166.165.683.616,00	16.006.535.336,00	242.686.500,00	181.929.532.452,00
4	DPU PR	18.390.186.515,00	1.276.878.476,00	305.408.500,00	19.361.656.491,00
5	DPRKP	4.942.354.267,00	7.640.000,00	0,00	4.949.994.267,00
6	Satpol PP	20.306.757.229,00	3.557.759.416,00	228.900.000,00	23.635.616.645,00
7	BPBD	11.821.757.831,00	333.565.000,00	860.000,00	12.154.462.831,00
8	Dinsos	10.711.925.729,00	1.304.773.860,00	976.781.153,00	11.039.918.436,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1	SKPD 2	31 Desember 2022 (Rp) 3	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp) 6=3+4-5
			Penambahan (Rp) 4	Pengurangan (Rp) 5	
9	Disperinnaker	6.769.404.876,00	812.231.600,00	204.964.700,00	7.376.671.776,00
10	Distanpangan	11.683.114.376,00	69.790.000,00	4.930.000,00	11.747.974.376,00
11	DLH	36.929.779.998,00	1.521.321.750,00	246.889.000,00	38.204.212.748,00
12	Disdukcapil	7.539.501.971,00	732.942.500,00	187.678.200,00	8.084.766.271,00
13	Dispermades	2.479.532.836,00	408.964.700,00	0,00	2.888.497.536,00
14	Dishub	30.636.344.805,00	2.550.425.712,00	995.591.734,00	32.191.178.783,00
15	Diskominfo	25.789.811.402,00	2.149.741.950,00	249.808.200,00	27.689.745.152,00
16	Disdagkop UKM	11.769.230.738,00	586.689.714,00	485.934.005,00	11.869.986.447,00
17	DPMPSTP	3.613.444.908,00	1.653.959.030,00	217.843.250,00	5.049.560.688,00
18	Disparpora	7.959.754.187,00	1.241.452.738,00	248.478.750,00	8.952.728.175,00
19	Dispuspa	5.198.873.772,00	113.250.000,00	0,00	5.312.123.772,00
20	Dispeterikan	5.156.127.133,00	189.793.725,00	13.153.725,00	5.332.767.133,00
21	Setda	27.248.254.595,00	3.966.444.195,00	2.392.182.950,00	28.822.515.840,00
22	Set DPRD	11.376.969.819,00	344.801.500,00	163.975.362,00	11.557.795.957,00
23	Bappelitbangda	4.694.572.973,00	250.327.000,00	1.681.108.868,00	3.263.791.105,00
24	BPPKAD	29.696.673.963,00	3.707.644.632,00	4.841.654.896,00	28.562.663.699,00
25	BKPPD	3.564.068.624,00	643.772.000,00	420.936.000,00	3.786.904.624,00
26	Inspektorat	2.183.443.156,00	1.498.588.450,00	120.000.000,00	3.562.031.606,00
27	Kec. Salaman	957.696.354,00	0,00	0,00	957.696.354,00
28	Kec. Borobudur	1.002.099.948,00	0,00	18.795.160,00	983.304.788,00
29	Kec. Ngluwar	735.329.888,00	27.970.000,00	0,00	763.299.888,00
30	Kec. Salam	828.000.481,00	0,00	0,00	828.000.481,00
31	Kec. Srumbung	741.171.595,00	25.400.000,00	0,00	766.571.595,00
32	Kec. Dukun	836.612.622,00	0,00	25.376.017,00	811.236.605,00
33	Kec. Sawangan	743.551.402,00	0,00	1.433.878,00	742.117.524,00
34	Kec. Muntilan	1.386.134.288,00	7.261.000,00	142.655.937,00	1.250.739.351,00
35	Kec. Mungkid	1.457.943.850,00	53.352.175,00	0,00	1.511.296.025,00
36	Kec. Mertoyudan	1.406.580.775,00	11.060.875,00	89.080.559,00	1.328.561.091,00
37	Kec. Tempuran	1.000.700.610,00	18.000.000,00	0,00	1.018.700.610,00
38	Kec. Kajoran	763.687.870,00	0,00	0,00	763.687.870,00
39	Kec. Kaliangkrik	900.676.616,00	0,00	0,00	900.676.616,00
40	Kec. Bandongan	1.047.441.010,00	0,00	80.082.097,00	967.358.913,00
41	Kec. Candimulyo	987.221.026,00	0,00	0,00	987.221.026,00
42	Kec. Pakis	935.668.273,00	18.000.000,00	0,00	953.668.273,00
43	Kec. Ngablak	776.761.404,00	0,00	0,00	776.761.404,00
44	Kec. Grabag	1.004.737.663,00	0,00	0,00	1.004.737.663,00
45	Kec. Tegalrejo	837.329.746,00	43.500.000,00	0,00	880.829.746,00
46	Kec. Secang	1.231.942.307,00	0,00	0,00	1.231.942.307,00
47	Kec. Windusari	707.968.552,00	14.150.000,00	0,00	722.118.552,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
48	Bakesbangpol	1.179.169.808,00	233.962.500,00	0,00	1.413.132.308,00
Jumlah		1.066.984.512.370,00	124.070.878.078,00	19.512.628.558,00	1.171.542.761.890,00

Saldo KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.066.984.512.370,00 selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp124.070.878.078,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp19.512.628.558,00 sehingga Saldo KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.171.542.761.890,00.

Saldo KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.171.542.761.890,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.066.984.512.370,00 terdapat peningkatan sebesar Rp104.558.249.520,00 atau 9,80 %.

Perhitungan KIB B (Peralatan dan Mesin) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.171.542.761.890,00 dengan mutasi sebagai berikut :

Saldo awal 1 Januari 2023: Rp 1.066.984.512.370,00

(Reff KIB B (Peralatan dan Mesin))

Mutasi tambah:

Realisasi Belanja Modal
Tahun 2023 Rp 111.034.686.354,00

Penerimaan Hibah Barang
(Dinkes, RSUD Muntian,
BPBD, Distanpangan) Rp 596.783.330,00

Kapitalisasi Belanja Pegawai
(BPBD : Honor pengadaan) Rp 400.000,00

Kapitalisasi Belanja Barang
Jasa (DLH dan Disdikbud) Rp 193.450.525,00

Reklasifikasi dari B.Modal
Gedung dan Bangunan
(Disdikbud, Dinkes, DPU PR,
Disdagkop, DPMPTSP,
Disparpora) Rp 2.368.457.548,00

Reklasifikasi dari B.Modal
Jalan Irigasi Jaringan (Setda
dan DPU PR) Rp 208.745.000,00

Reklasifikasi dari B.Modal
Aset Tetap Lainnya
(Disdikbud) Rp 86.505.800,00

Mutasi Barang Masuk antar
SKPD Rp 9.578.854.521,00

Belanja Peralatan dan Mesin
Tahun 2023 yang akan
dibayarkan pada Tahun 2024
(RSUD Muntian: Charger
Tablet) Rp 2.995.000,00

Jumlah Rp 124.070.878.078,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi kurang:

Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (Disdikbud, Dinkes, RSUD Mtl, BPPKAD)	Rp	(5.025.280.198,00)	
Reklasifikasi Ke Aset Tetap Lainnya (Disdikbud : Lukisan)	Rp	(2.250.000,00)	
Masuk ekstrakomptabel (Disdikbud, Dinkes, BPBD, Diskominfo)	Rp	(76.006.419,00)	
Masuk Belanja Persediaan	Rp	(1.234.260.925,00)	
Masuk Belanja Pemeliharaan	Rp	(96.432.234,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Rusak berat)	Rp	(3.435.929.329,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Tidak Ditemukan)	Rp	(45.686.207,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (Software) -RSUD Mtl	Rp	(6.500.000,00)	
Mutasi Barang Keluar Antar SKPD	Rp	(9.578.854.521,00)	
Pembayaran Utang Belanja Modal (Dispeterikan : Pembayaran pembelian peralatan mesin Tahun 2022 yang sudah dicatat sebagai aset (Dispeterikan)	Rp	<u>(11.428.725,00)</u>	
Jumlah			Rp (19.512.628.558,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023 (Reff KIB B (Peralatan dan Mesin)			Rp 1.171.542.761.890,00

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.900.600.631.706,00	1.814.142.616.411,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.900.600.631.706,00 dan Rp1.814.142.616.411,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bangunan Gedung	1.879.552.483.472,00	1.795.511.985.710,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.796.581.365.503,00	1.714.193.783.180,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	82.971.117.969,00	81.318.202.530,00
Monumen	3.541.449.621,00	3.504.779.621,00
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.541.449.621,00	3.504.779.621,00
Bangunan Menara	526.982.335,00	526.982.335,00
Bangunan Menara Perambuan	526.982.335,00	526.982.335,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.979.716.278,00	14.598.868.745,00
Tugu/Tanda Batas	16.979.716.278,00	14.598.868.745,00
Jumlah	1.900.600.631.706,00	1.814.142.616.411,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perhitungan mutasi Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.92 Mutasi Gedung dan Bangunan per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Disdikbud	711.234.387.657,00	38.506.690.271,00	58.401.500,00	749.682.676.428,00
2	Dinkes	299.012.618.227,00	10.090.384.217,00	200.140.500,00	308.902.861.944,00
3	RSUD Muntilan	80.050.261.400,00	6.156.705.130,00	0,00	86.206.966.530,00
4	DPU PR	23.735.249.879,00	19.841.351.351,00	6.932.878.281,00	36.643.722.949,00
5	DPRKP	53.376.363.622,00	1.119.877.105,00	0,00	54.496.240.727,00
6	Satpol PP	2.193.054.222,00	112.400.000,00	0,00	2.305.454.222,00
7	BPBD	5.042.631.120,00	0,00	0,00	5.042.631.120,00
8	Dinsos	9.057.381.655,00	457.797.875,00	1.213.817.800,00	8.301.361.730,00
9	Disperinnaker	13.555.267.024,00	449.225.790,00	0,00	14.004.492.814,00
10	Distanpangan	22.005.893.003,00	49.621.000,00	0,00	22.055.514.003,00
11	DLH	32.129.254.448,00	1.806.141.635,00	0,00	33.935.396.083,00
12	Disdukcapil	2.033.951.299,00	100.898.656,00	0,00	2.134.849.955,00
13	Dispermades	998.409.268,00	0,00	0,00	998.409.268,00
14	Dishub	20.249.243.980,00	791.973.055,00	49.644.505,00	20.991.572.530,00
15	Diskominfo	1.190.226.732,00	199.160.000,00	0,00	1.389.386.732,00
16	Disdagkop UKM	256.812.457.407,00	2.011.149.430,00	443.677.114,00	258.379.929.723,00
17	DPMPSTSP	4.259.990.002,00	4.230.671.040,00	895.595.780,00	7.595.065.262,00
18	Disparpora	82.411.822.324,00	42.939.454.005,00	32.462.187.392,00	92.889.088.937,00
19	Dispuspa	19.656.049.548,00	99.195.000,00	0,00	19.755.244.548,00
20	Dispeterikan	23.730.758.077,00	76.493.000,00	0,00	23.807.251.077,00
21	Setda	17.014.203.847,00	569.053.000,00	237.204.500,00	17.346.052.347,00
22	Set DPRD	9.733.390.742,00	287.881.500,00	0,00	10.021.272.242,00
23	Bappelitbangda	2.074.108.435,00	0,00	0,00	2.074.108.435,00
24	BPPKAD	41.202.505.986,00	1.011.942.050,00	2.736.958.625,00	39.477.489.411,00
25	BKPPD	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	680.695.000,00	189.879.000,00	0,00	870.574.000,00
27	Kec. Salaman	3.923.944.391,00	42.700.000,00	0,00	3.966.644.391,00
28	Kec. Borobudur	5.885.267.516,00	48.999.000,00	0,00	5.934.266.516,00
29	Kec. Ngluwar	1.626.744.420,00	0,00	0,00	1.626.744.420,00
30	Kec. Salam	3.366.325.643,00	0,00	0,00	3.366.325.643,00
31	Kec. Srumbung	512.099.819,00	0,00	0,00	512.099.819,00
32	Kec. Dukun	4.029.737.750,00	0,00	37.484.750,00	3.992.253.000,00
33	Kec. Sawangan	186.360.709,00	0,00	0,00	186.360.709,00
34	Kec. Muntilan	1.771.261.555,00	0,00	0,00	1.771.261.555,00
35	Kec. Mungkid	7.604.596.301,00	553.459.808,00	0,00	8.158.056.109,00
36	Kec. Mertoyudan	6.487.368.358,00	25.365.124,00	0,00	6.512.733.482,00
37	Kec. Tempuran	4.790.973.182,00	0,00	0,00	4.790.973.182,00
38	Kec. Kajoran	2.897.020.600,00	0,00	0,00	2.897.020.600,00
39	Kec. Kaliangkrik	5.424.914.400,00	0,00	0,00	5.424.914.400,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
40	Kec. Bandongan	5.118.541.599,00	0,00	0,00	5.118.541.599,00
41	Kec. Candimulyo	4.793.103.895,00	0,00	0,00	4.793.103.895,00
42	Kec. Pakis	5.144.654.821,00	0,00	0,00	5.144.654.821,00
43	Kec. Ngablak	4.844.068.889,00	0,00	0,00	4.844.068.889,00
44	Kec. Grabag	4.538.624.534,00	0,00	0,00	4.538.624.534,00
45	Kec. Tegalrejo	2.069.617.300,00	0,00	0,00	2.069.617.300,00
46	Kec. Secang	4.277.681.593,00	37.485.000,00	79.947.000,00	4.235.219.593,00
47	Kec. Windusari	513.354.232,00	0,00	0,00	513.354.232,00
48	Bakesbangpol	896.180.000,00	0,00	0,00	896.180.000,00
Jumlah		1.814.142.616.411,00	131.805.953.042,00	45.347.937.747,00	1.900.600.631.706,00

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.814.142.616.411,00 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp131.805.953.042,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp45.347.937.747,00 sehingga Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.900.600.631.706,00.

Saldo KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.900.600.631.706,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.814.142.616.411,00 terdapat peningkatan sebesar Rp86.458.015.295,00 atau 4,77 %.

Perhitungan KIB C (Gedung dan Bangunan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.900.600.631.706,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023: Rp 1.814.142.616.411,00

(Reff KIB C (Gedung dan Bangunan))

Mutasi tambah:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	121.599.150.695,00	
Penerimaan Hibah Barang (Disdikbud : Hibah Komite)	Rp	180.000.000,00	
Kapitalisasi Barang dan Jasa Reklasifikasi dari B.Modal Peralatan dan Mesin (Disdikbud, Dinkes, RSUD Mtl, BPPKAD)	Rp	281.898.656,00	
Reklasifikasi dari B.Modal Jalan Irigasi Jaringan	Rp	5.025.280.198,00	
Reklasifikasi dari B.Modal Aset Tetap Lainnya (Disdikbud : Kanopi)	Rp	299.049.000,00	
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (DPU PR, Koreksi Tambah (Pemeliharaan Gedung SKPD dari DPU PR)	Rp	10.590.000,00	
Mutasi Barang Masuk antar SKPD	Rp	576.712.050,00	
Jumlah	Rp	1.792.832.308,00	
		<u>Rp 2.040.440.135,00</u>	Rp 131.805.953.042,00

Mutasi kurang:

Reklasifikasi ke Tanah Rp (147.800.625,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (Disdikbud, Dinkes, DPUPR, Disdagkop, DPMPTSP, Disparpora)	Rp	(2.368.457.548,00)	
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan (DPU PR)	Rp	(208.958.500,00)	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)-(Dinkes, DPU PR, Dishub, Disdagkop, Disparpora)	Rp	(34.827.605.722,00)	
Reklasifikasi ke Properti Investasi (BPPKAD)	Rp	(2.618.258.000,00)	
Masuk Belanja Pemeliharaan (Disdikbud, Dinkes, Disparpora, Kec.Secang)	Rp	(92.282.359,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Rusak berat) -Dinsos : gedung PKM Kota Mungkid lama, Rumdin Dokter, Rumdin Paramedis)	Rp	(1.213.817.800,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Tidak Ditemukan) -Kec. Dukun	Rp	(37.484.750,00)	
Koreksi Kurang (Pemeliharaan Gedung dari DPU PR)	Rp	(1.792.832.308,00)	
Mutasi Barang Keluar Antar SKPD	Rp	(2.040.440.135,00)	
Jumlah			Rp (45.347.937.747,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023 (Reff KIB C (Gedung dan Bangunan))			Rp 1.900.600.631.706,00

5.3.3.4. Jalan, Jaringan, Irigasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.775.101.534.896,00	1.694.527.483.679,00

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.775.101.534.896,00.dan Rp1.694.527.483.679,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.93 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jalan dan Jembatan	1.252.656.014.222,00	1.181.643.362.340,00
Jalan	927.210.757.795,00	868.892.705.563,00
Jembatan	325.445.256.427,00	312.750.656.777,00
Bangunan Air	480.547.009.322,00	472.492.511.987,00
Bangunan Air Irigasi	317.374.715.322,00	311.901.665.462,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.038.809.477,00	1.038.809.477,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai danPenanggulangan Bencana Alam	103.436.573.460,00	101.478.155.630,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.676.876.273,00	5.216.786.328,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.032.125.116,00	21.997.575.116,00
Bangunan Air Kotor	30.987.909.674,00	30.859.519.974,00
Instalasi	25.933.050.470,00	24.406.598.470,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.151.964.664,00	1.151.964.664,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Instalasi Air Kotor	6.175.386.819,00	6.175.386.819,00
Instalasi Pengolahan Sampah	4.143.537.937,00	4.143.537.937,00
Instalasi Gardu Listrik	8.802.440.051,00	8.802.440.051,00
Instalasi Pertahanan	114.697.000,00	114.697.000,00
Instalasi Gas	27.700.999,00	27.700.999,00
Instalasi Pengaman	5.259.738.118,00	3.733.286.118,00
Instalasi Lain	257.584.882,00	257.584.882,00
Jaringan	15.965.460.882,00	15.985.010.882,00
Jaringan Air Minum	3.594.946.631,00	3.594.946.631,00
Jaringan Listrik	6.707.664.376,00	6.707.664.376,00
Jaringan Telepon	1.565.187.761,00	1.584.737.761,00
Jaringan Gas	4.097.662.114,00	4.097.662.114,00
Jumlah	1.775.101.534.896,00	1.694.527.483.679,00

Perhitungan mutasi Jalan, Jaringan, Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Mutasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Disdikbud	1.921.510.003,00	0,00	0,00	1.921.510.003,00
2	Dinkes	15.561.925.746,00	1.784.641.000,00	223.639.000,00	17.122.927.746,00
3	RSUD Muntilan	5.337.431.566,00	0,00	0,00	5.337.431.566,00
4	DPU PR	1.584.067.369.766,00	75.013.824.617,00	120.237.000,00	1.658.960.957.383,00
5	DPRKP	5.383.881.915,00	0,00	0,00	5.383.881.915,00
6	Dinsos	34.218.963,00	0,00	6.218.963,00	28.000.000,00
7	Distanpangan	7.365.755.548,00	0,00	0,00	7.365.755.548,00
8	DLH	6.073.908.352,00	0,00	0,00	6.073.908.352,00
9	Disdukcapil	14.301.900,00	0,00	0,00	14.301.900,00
10	Dishub	654.097.015,00	0,00	0,00	654.097.015,00
11	Diskominfo	205.663.950,00	0,00	0,00	205.663.950,00
12	Disdagkop UKM	13.399.200.025,00	0,00	0,00	13.399.200.025,00
13	DPMPSTSP	63.840.600,00	0,00	0,00	63.840.600,00
14	Disparpora	9.259.055.305,00	0,00	0,00	9.259.055.305,00
15	Dispuspa	81.726.003,00	0,00	0,00	81.726.003,00
16	Dispeterikan	1.135.500.397,00	0,00	0,00	1.135.500.397,00
17	Setda	3.048.301.307,00	196.250.000,00	196.250.000,00	3.048.301.307,00
18	Set DPRD	359.958.850,00	0,00	19.550.000,00	340.408.850,00
19	BPPKAD	3.985.713.690,00	0,00	0,00	3.985.713.690,00
20	Inspektorat	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
21	Kec. Borobudur	62.137.859,00	0,00	0,00	62.137.859,00
22	Kec. Salam	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
23	Kec. Muntilan	6.024.854.094,00	742.985.736,00	0,00	6.767.839.830,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
24	Kec. Mungkid	12.495.638.864,00	1.465.286.320,00	75.410.000,00	13.885.515.184,00
25	Kec. Mertoyudan	9.817.376.090,00	889.692.627,00	0,00	10.707.068.717,00
26	Kec. Kaliangkrik	12.186.625,00	0,00	0,00	12.186.625,00
27	Kec. Bandongan	24.830.435,00	0,00	0,00	24.830.435,00
28	Kec. Candimulyo	70.322.354,00	0,00	0,00	70.322.354,00
29	Kec. Pakis	28.491.064,00	0,00	0,00	28.491.064,00
30	Kec. Ngablak	381.080.657,00	0,00	0,00	381.080.657,00
31	Kec. Grabag	75.770.685,00	0,00	0,00	75.770.685,00
32	Kec. Tegalrejo	103.690.000,00	0,00	0,00	103.690.000,00
33	Kec. Secang	7.465.344.051,00	1.122.675.880,00	0,00	8.588.019.931,00
Jumlah		1.694.527.483.679,00	81.215.356.180,00	641.304.963,00	1.775.101.534.896,00

Saldo KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.694.527.483.679,00 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp81.215.356.180,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp641.304.963,00 sehingga Saldo KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.775.101.534.896,00.

Saldo KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.694.527.483.679,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.775.101.534.896,00 terdapat peningkatan sebesar Rp80.574.051.217,00 atau 4,75%

Perhitungan KIB D (Jalan, Jaringan dan Irigasi) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.775.101.534.896,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023: Rp 1.694.527.483.679,00
(Reff KIB D (Jalan Jaringan dan Irigasi))

Mutasi tambah:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	67.330.738.100,00	
Penerimaan Hibah Barang (DPU PR: Hibah dari DIRJEN OTDA berupa peningkatan Jalan) Reklasifikasi dari B.Modal Gedung dan Bangunan (DPU PR: Talud dan Sumur Bor) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) - Kec.Secang: Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan	Rp	13.629.807.580,00	
	Rp	208.958.500,00	
	Rp	45.852.000,00	
Jumlah	Rp		81.215.356.180,00

Mutasi kurang:

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp	(208.745.000,00)	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	(299.049.000,00)	
Masuk Belanja Jasa	Rp	(107.742.000,00)	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Pemeliharaan dan Perawatan Irigasi DPU) Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Rusak berat/ Tidak Ditemukan)	Rp	(25.768.963,00)	
Jumlah			Rp (641.304.963,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023 (Reff KIB D (Jalan Jaringan dan Irigasi)			Rp 1.775.101.534.896,00

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
160.465.769.500,00	151.341.675.304,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp160.465.769.500,00 dan Rp151.341.675.304,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.95 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bahan Perpustakaan	139.553.280.797,00	130.718.597.151,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	138.331.203.349,00	129.290.806.903,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	139.522.432,00	139.493.332,00
Kartografi, Naskah dan Lukisan	925.709.673,00	1.131.797.373,00
Musik	66.124.200,00	66.014.600,00
Karya Grafika (Graphic Material)	60.541.523,00	60.541.523,00
Three Dimensional Artifacts and Realita	17.069.820,00	16.833.620,00
Tarscalt	13.109.800,00	13.109.800,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	19.151.522.812,00	18.858.207.262,00
Barang Bercorak Kesenian	12.797.957.648,00	12.507.837.098,00
Alat Bercorak Kebudayaan	5.891.349.114,00	6.350.110.164,00
Tanda Penghargaan	462.216.050,00	260.000,00
Tanaman	1.760.965.891,00	1.764.870.891,00
Tanaman	1.760.965.891,00	1.764.870.891,00
Jumlah	160.465.769.500,00	151.341.675.304,00

Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.96 Mutasi Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Disdikbud	144.668.756.093,00	9.473.834.247,00	114.908.000,00	154.027.682.340,00
2	Dinkes	275.079.441,00	245.300.000,00	245.300.000,00	275.079.441,00
3	DPU PR	68.668.003,00	1.363.210.695,00	1.363.210.695,00	68.668.003,00
4	DPRKP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BPBD	1.400.000,00	104.351.500,00	104.351.500,00	1.400.000,00
7	Dinsos	55.318.051,00	0,00	55.318.051,00	0,00
8	Disperinnaker	0,00	44.936.690,00	39.936.690,00	5.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
9	Distanpangan	1.188.770.710,00	0,00	0,00	1.188.770.710,00
10	DLH	1.506.627.132,00	0,00	0,00	1.506.627.132,00
11	Disdukcapil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dispermades	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dishub	103.890.000,00	0,00	0,00	103.890.000,00
14	Disdagkop UKM	23.650.000,00	0,00	3.905.000,00	19.745.000,00
15	DPMPTSP	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Disparpora	1.308.000.350,00	0,00	0,00	1.308.000.350,00
17	Dispuspa	1.602.581.566,00	29.854.000,00	0,00	1.632.435.566,00
18	Dispeterikan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Setda	171.794.000,00	3.600.000,00	0,00	175.394.000,00
20	Set DPRD	110.975.570,00	0,00	3.475.000,00	107.500.570,00
21	Bappelitbangda	220.245.000,00	279.042.900,00	499.287.900,00	0,00
22	BPPKAD	0,00	2.465.634.948,00	2.465.634.948,00	0,00
23	Inspektorat	1.461.000,00	9.657.000,00	0,00	11.118.000,00
24	Kec. Borobudur	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25	Kec. Salam	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
26	Kec. Dukun	2.134.000,00	0,00	0,00	2.134.000,00
27	Kec. Sawangan	0,00	0,00	0,00	-
28	Kec. Muntilan	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
29	Kec. Mertoyudan	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
30	Kec. Tempuran	12.228.688,00	0,00	0,00	12.228.688,00
31	Kec. Kajoran	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Kec. Kaliangkrik	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Pakis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
34	Kec. Grabag	18.850.700,00	0,00	0,00	18.850.700,00
35	Kec. Secang	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
36	Kec. Windusari	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		151.341.675.304,00	14.019.421.980,00	4.895.327.784,00	160.465.769.500,00

Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.341.675.304,00 selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp14.019.421.980,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp4.895.327.784,00 sehingga Saldo Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.465.769.500,00.

Saldo Saldo KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.465.769.500,00, apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.341.675.304,00 terdapat peningkatan sebesar Rp9.124.094.196,00 atau 6,03%.

Perhitungan KIB E (Aset Tetap Lainnya) per 31 Desember 2023 sebesar Rp160.465.769.500,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023: Rp 151.341.675.304,00
(Reff KIB E (Aset Tetap Lainnya))



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi tambah:

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023	Rp	14.017.171.980,00	
Reklasifikasi dari B.Modal Peralatan dan Mesin (disdikbud : Lukisan)	Rp	2.250.000,00	
Jumlah			Rp 14.019.421.980,00

Mutasi kurang:

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin (Disdikbud)	Rp	(86.505.800,00)	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (Disdikbud : kanopi)	Rp	(10.590.000,00)	
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Rp	(676.055.350,00)	
Reklasifikasi ke Aset lainnya (ATB)	Rp	(3.635.397.383,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Rusak berat) - Dinsos, Bappeda, Set DPRD	Rp	(279.038.051,00)	
Reklasifikasi ke aset lainnya (hasil inventarisasi Tidak Ditemukan) - Disdagkop	Rp	(3.905.000,00)	
Masuk Belanja Jasa (jasa Konsultasi Pembuatan SK Jalan dan Jembatan- DPU PR)	Rp	(198.024.000,00)	
Masuk Belanja Jasa (Biaya Akses Aplikasi SMPN 3 mertoyudan- Disdikbud)	Rp	(500.000,00)	
Masuk Belanja Persediaan (Disdikbud)	Rp	(5.312.200,00)	
Jumlah			Rp (4.895.327.784,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023 (Reff KIB E (Aset Tetap Lainnya))			Rp 160.536.219.500,00

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
39.775.748.561,00	4.697.274.759,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp39.775.748.561,00 dan Rp4.697.274.759,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.97 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	2.887.900.080,00	3.210.870.410,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	36.633.550.072,00	1.186.253.940,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	254.298.409,00	300.150.409,00
Jumlah	39.775.748.561,00	4.697.274.759,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perhitungan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
2	3	4	5	6=3+4-5	
1	Dinkes	313.435.130,00	84.778.000,00	244.613.730,00	153.599.400,00
2	DPU PR	1.364.046.139,00	3.362.190.172,00	254.987.500,00	4.471.248.811,00
3	DPRKP	291.013.310,00	148.740.000,00	70.993.380,00	368.759.930,00
4	BPBD	103.355.520,00	0,00	0,00	103.355.520,00
5	Disperinnaker	6.117.440,00	0,00	6.117.440,00	0,00
6	DLH	99.947.410,00	0,00	0,00	99.947.410,00
7	Dishub	0,00	49.644.505,00	0,00	49.644.505,00
8	Disdagkop UKM	1.059.596.560,00	317.494.900,00	0,00	1.377.091.460,00
9	Disparpora	1.337.975.590,00	31.745.553.495,00	0,00	33.083.529.085,00
10	BPPKAD	25.855.660,00	18.492.440,00	25.855.660,00	18.492.440,00
11	Kec. Secang	45.852.000,00	0,00	45.852.000,00	0,00
12	Bakesbangpol	50.080.000,00	0,00	0,00	50.080.000,00
Jumlah		4.697.274.759,00	35.726.893.512,00	648.419.710,00	39.775.748.561,00

Saldo KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.697.274.759,00 selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp35.726.893.512,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp648.419.710,00 sehingga Saldo KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.775.748.561,00.

Saldo KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.775.748.561,00, apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.697.274.759,00 terdapat kenaikan sebesar Rp35.078.473.802,00 atau 746,78%.

Perhitungan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.775.748.561,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 1 Januari 2023:	Rp	4.697.274.759,00
<i>(Reff KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan))</i>		
Mutasi tambah:		
Kapitalisasi Barang dan Jasa (DPU PR dan BPPKAD)	Rp	74.492.440,00
Reklasifikasi dari B.Modal Gedung dan Bangunan (Dinkes, DPU PR, Dishub, Disdagkop, Disparpora)	Rp	34.827.605.722,00
Reklasifikasi dari B.Modal Aset Tetap Lainnya (DPU PR)	Rp	676.055.350,00
Reklasifikasi dari B.Modal Aset Lainnya (DPRKP-DED kawasan Kumuh)	Rp	<u>148.740.000,00</u>
Jumlah	Rp	35.726.893.512,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi kurang:

Reklasifikasi ke Tanah (BPPKAD - KDP tanah yang sudah jadi sertifikat tanah)	Rp	(25.855.660,00)	
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan (DPUPR, DPRKP, Disperinker, Dinkes)	Rp	(576.712.050,00)	
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan (Kec. Secang - DED Konsultan Perencanaan dan Pengawasan)	Rp	(45.852.000,00)	
Jumlah			Rp (648.419.710,00)
Saldo akhir 31 Desember 2023			Rp 39.775.748.561,00

(Reff KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan))

Dari daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) di atas ada dua KDP yang konstruksinya sudah dibangun tetapi belum selesai yaitu pada Disparpora berupa Bangunan *Sport Centre* (GOR *multievent*) dan DPU PR berupa Tugu Batas *Landmark* Kabupaten. Adapun Rincian Kontrak dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 5.99 Rincian Kontrak

1	Nama Konstruksi	:	BANGUNAN SPORT CENTRE (TAHAP 1) - DISPARPORA
	Rincian Kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian	:	Pembangunan GOR Kegiatan Sarana dan Prasarana Olahraga , tingkat penyelesaian 100 %, jangka waktu penyelesaian 301 hari kalender dan 180 hari kalender masa pemeliharaan
	Nilai Kontrak	:	Rp31.185.530.000,00 (sumber APBD)
	Jumlah biaya yang sudah dikeluarkan	:	Rp31.745.553.495,00 (sesuai Neraca)
	Uang Muka Kerja yang diberikan	:	Rp6.039.000.000,00
	Jumlah Retensi	:	Rp1.559.276.500,00 (di terbitkan oleh Videi General Insurance)
	Biaya Operasional	:	Rp486.692.000 (konsultan pengawasan)
		:	Rp72.331.495 (operasional)
2	Nama Konstruksi	:	TUGU BATAS LANDMARK KABUPATEN – DPU PR
	Rincian Kontrak, tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian	:	Pembangunan Tugu Batas dan Penataan Lingkungan, tingkat penyelesaian 81,00 % dan Jangka waktu penyelesaian 129 hari kalender
	Nilai Kontrak	:	Rp2.814.443.000,00 (sumber APBD)
	Jumlah biaya yang sudah dikeluarkan	:	Rp2.337.718.822,00 (sesuai Neraca)
	Uang Muka Kerja yang diberikan	:	Rp853.242.900,00 (30% dari kontrak)
	Jumlah Retensi	:	Rp0,00 (tidak ada jaminan pemeliharaan karena bangunan belum jadi 100%)
	Biaya Operasional	:	Rp8.459.992 (operasional)
		:	Rp49.560.000 (konsultan pengawasan)

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(2.760.607.958.870,02)	(2.504.062.976.855,66)

Metode penyusutan yang digunakan di Kabupaten Magelang adalah metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset dibagi dengan masa manfaat.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp2.760.607.958.870,02) dan (Rp2.504.062.976.855,66) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.100 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(919.299.652.087,16)	(799.294.932.458,10)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(28.157.651.853,87)	(25.025.073.592,28)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(123.352.238.105,15)	(113.392.061.822,90)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(8.875.956.906,87)	(7.992.498.188,68)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(3.698.984.507,50)	(3.719.690.183,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(256.847.836.933,34)	(230.330.924.651,87)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(32.416.975.347,39)	(29.202.201.236,30)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(247.214.531.366,00)	(198.023.013.808,61)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(40.202.016.787,17)	(35.707.615.843,41)
Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(932.372.570,00)	(924.467.903,33)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(171.262.405.476,25)	(149.394.805.663,25)
Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(2.001.400,00)	(1.451.050,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(269.741.432,00)	(127.718.727,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(11.219.524,80)	(5.609.762,40)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(32.656.750,00)	(16.680.437,50)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(5.496.833.953,58)	(5.137.964.650,90)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(526.229.173,24)	(293.154.936,67)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(488.134.952.628,39)	(449.318.979.839,61)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(483.833.337.598,03)	(445.442.104.858,87)
Akumulasi Penyusutan Monumen	(659.565.822,08)	(580.947.750,46)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(149.416.840,17)	(136.318.039,37)
Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(3.492.632.368,11)	(3.159.609.190,91)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.353.049.703.844,47)	(1.255.449.064.557,95)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(931.126.582.854,96)	(858.003.917.737,95)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(404.240.511.619,00)	(381.242.570.285,19)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(12.360.854.668,41)	(11.361.863.735,27)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.321.754.702,10)	(4.840.712.799,54)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	(123.650.310,00)	
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga	(123.650.310,00)	
Jumlah	(2.760.607.958.870,02)	(2.504.062.976.855,66)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.504.062.976.855,66, selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp267.943.788.543,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp11.398.806.528,64 sehingga saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.760.607.958.870,02.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.760.607.958.870,02, apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.504.062.976.855,66 terdapat peningkatan sebesar Rp256.544.982.014,36 atau 10,25%.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.101 Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Peralatan Dan Mesin	799.294.932.458,10	129.216.059.677,64	9.211.340.048,58	919.299.652.087,16
2	Gedung Dan Bangunan	449.318.979.839,61	40.985.490.305,84	2.169.517.517,06	488.134.952.628,39
3	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.255.449.064.557,95	97.618.588.249,52	17.948.963,00	1.353.049.703.844,47
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	123.650.310,00	0,00	123.650.310,00
Jumlah		2.504.062.976.855,66	267.943.788.543,00	11.398.806.528,64	2.760.607.958.870,02

5.3.4. Dana Cadangan

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
35.868.696.000,00	35.000.000.000,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.868.696.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

Saldo awal 1 Jan 2023: (Reff Dana Cadangan - Neraca 2022)		Rp35.000.000.000,00
Mutasi tambah:		
Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 (Reff LRA)	Rp30.000.000.000,00	
Jumlah		Rp65.000.000.000,00
Mutasi kurang:		
Penerimaan Pembiayaan TA 2023 (Reff LRA)	Rp29.131.304.000,00	
Jumlah		(Rp29.131.304.000,00)
Saldo akhir 31 Des 2023: (Reff Dana Cadangan – Neraca 2023).		Rp35.868.696.000,00

Dana Cadangan tersebut diperuntukan untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024. Dana Cadangan yang dibentuk sebesar Rp65.000.000.000,00 dengan rencana pembentukan sebagai berikut :

1. Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00;
2. Tahap 2 Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.000.000.000,00;
3. Tahap 3 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00.

Pada bulan Nopember 2023, telah dilakukan pencairan Dana Cadangan sebesar



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp29.131.304.000,00 sehingga sampai tanggal 31 Desember 2023 terdapat saldo Dana Cadangan sebesar Rp35.868.696.000,00

5.3.5. Aset Lainnya

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
51.719.539.670,29	51.670.907.867,61

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.719.539.670,29 dan Rp51.670.907.867,61 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.964.640.000,00	1.964.640.000,00
Aset Tidak Berwujud	19.562.639.969,00	12.887.742.586,00
Aset Lain-lain	44.284.294.286,39	43.087.999.600,36
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(13.908.551.585,10)	(11.274.024.554,75)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	2.816.517.000,00	5.004.550.236,00
Jumlah	54.719.539.670,29	51.670.907.867,61

5.3.5.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.964.640.000,00	1.964.640.000,00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau *Build Operating Transfer (BOT)*. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.103 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

Uraian	Dokumen	Nilai per 31 Des 2023 (Rp)	Metode Kemitraan
SPBU Terpadu dan Sarana pendukungnya (Eks Kawedanan Salam) Lus = 7.550 m ²	Akta Notaris Retno Rochmani. SH No. 04 tgl. 11 Februari 2002	1.017.600.000,00	Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bumi Gatra Sejati
Metro Square. Mertoyudan Luas = 2.120 m ²	Perjanjian Kerja sama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	271.360.000,00	Perjanjian Kerja Sama (BOT) dengan PT Graha Persada



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Dokumen	Nilai per 31 Des 2023 (Rp)	Metode Kemitraan
Metro Square. Sumberrejo Luas = 6.560 m ²	Perjanjian Kerja sama No.21 tgl. 28 Nov 2005 No 28 tgl 30 Juni 2006	675.680.000,00	Perjanjian Kerja Sama (BOT) dengan PT Graha Persada
Jumlah		1.964.640.000,00	

5.3.5.2. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

19.562.639.969,00

12.887.742.586,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.562.639.969,00 dan Rp12.887.742.586,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.104 Aset Tidak berwujud

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Software	9.805.793.726,00	6.550.456.476,00
Hasil Kajian/penelitian	9.756.846.243,00	6.337.286.110,00
Jumlah	19.562.639.969,00	12.887.742.586,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.562.639.969,00 apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.887.742.586,00 terdapat penambahan sebesar Rp6.674.897.383,00 atau 51,79%. Penambahan tersebut berasal dari realisasi belanja modal Tahun 2023.

Rincian nilai Aset Tak Berwujud per SKPD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.105 Aset Tak Berwujud per SKPD

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Nilai Perolehan Akumulasi Amortisasi Nilai Buku	Nilai Perolehan Akumulasi Amortisasi Nilai Buku
DISDIKBUD	138.106.000,00	126.106.000,00
	124.106.000,00	95.381.000,00
	14.000.000,00	30.725.000,00
DINKES	6.014.044.894,00	3.040.744.894,00
	3.919.204.894,00	2.743.337.752,75
	2.094.840.000,00	297.407.141,25
RSUD Muntilan	916.940.383,00	910.440.383,00
	912.065.383,00	910.440.383,00
	4.875.000,00	0,00
DPU PR	2.253.108.095,00	1.763.976.750,00
	1.693.137.891,50	1.439.795.510,00
	559.970.203,50	324.181.240,00
DPRKP	444.953.000,00	139.953.000,00
	200.953.000,00	139.953.000,00
	244.000.000,00	0,00
SATPOL PP	99.615.000,00	99.615.000,00
	99.615.000,00	99.615.000,00
	0,00	0,00
BPBD	118.868.339,00	14.516.839,00
	35.387.139,00	14.516.839,00
	83.481.200,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	Nilai Perolehan Akumulasi Amortisasi Nilai Buku	Nilai Perolehan Akumulasi Amortisasi Nilai Buku
DISPERINAHER	118.206.440,00 86.257.088,00 31.949.352,00	78.269.750,00 78.269.750,00 0,00
DLH	257.620.000,00 147.094.000,00 110.526.000,00	257.620.000,00 103.612.000,00 154.008.000,00
DISDUKCAPIL	125.180.000,00 120.230.000,00 4.950.000,00	125.180.000,00 111.530.000,00 13.650.000,00
DISHUB	179.250.060,00 179.250.060,00 0,00	179.250.060,00 179.250.060,00 0,00
DISDAGKOP	203.195.150,00 171.662.075,00 31.533.075,00	203.195.150,00 146.372.750,00 56.822.400,00
DPMPTSP	49.225.000,00 49.225.000,00 0,00	49.225.000,00 49.225.000,00 0,00
DISPARPORA	247.465.000,00 167.901.000,00 79.564.000,00	247.465.000,00 128.297.000,00 119.168.000,00
DISPUSPA	9.887.760,00 9.887.760,00 0,00	9.887.760,00 9.887.760,00 0,00
DISPETERIKAN	30.000.000,00 12.000.000,00 18.000.000,00	30.000.000,00 6.000.000,00 24.000.000,00
SETDA	98.951.090,00 98.951.090,00 0,00	98.951.090,00 98.951.090,00 0,00
SET DPRD	55.406.000,00 55.406.000,00 0,00	55.406.000,00 55.406.000,00 0,00
BAPPELITBANGDA	4.394.511.060,00 3.996.427.465,00 398.083.595,00	4.115.468.160,00 3.641.591.910,00 473.876.250,00
BPPKAD	3.442.971.698,00 1.464.655.739,60 1.978.315.958,40	977.336.750,00 857.456.750,00 119.880.000,00
BKPPD	341.035.000,00 341.035.000,00 0,00	341.035.000,00 341.035.000,00 0,00
INSPEKTORAT	24.100.000,00 24.100.000,00 0,00	24.100.000,00 24.100.000,00 0,00
Jumlah Nilai Perolehan	19.562.639.969,00	12.887.742.586,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	13.908.551.585,10	11.274.024.554,75
Jumlah Nilai Buku	5.654.088.383,90	1.613.718.031,25

Perubahan Nilai Aset Tak Berwujud berasal dari:

1. Penambahan *software* sebesar Rp3.255.337.250,00 berasal dari:
 - Belanja Modal senilai Rp2.728.000.000,00 pada Dinkes (RS Merah Putih)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya senilai Rp520.837.250,00 pada Disdikbud, Dinkes, DPU PR, BPPKAD)
 - Reklasifikasi dari peralatan dan mesin senilai Rp6.500.000,00 pada RSUD Muntilan
2. Penambahan Kajian sebesar Rp3.419.560.133,00 berasal dari:
- Belanja Modal senilai Rp453.740.000,00 pada DPRKP
 - Reklasifikasi dari aset tetap lainnya senilai Rp3.114.560.133,00 pada DPU PR, BPBD, Disperinaker, Bappeda Litbangda dan BPPKAD
 - Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp148.740.000,00 (pengurangan) pada DPRKP

Rincian penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 5.69**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 terdapat penambahan Akumulasi Amortisasi sebesar Rp2.634.527.030,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi	Software (Rp)	Hasil Kajian/penelitian (Rp)
Akumulasi Amortisasi 2022	6.141.876.084,75	5.132.148.470,00
Akumulasi Amortisasi Koreksi	362.861.160,00	0,00
Beban Amortisasi 2023	1.022.610.043,75	1.249.055.826,60
Akumulasi Amortisasi 2023	7.527.347.288,50	6.381.204.296,60
Akumulasi Amortisasi 2023		13.908.551.585,10

5.3.5.3. Aset Lain-lain

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
44.284.294.286,39	43.087.999.600,36

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.284.294.286,39 dan Rp43.087.999.600,36 seluruhnya berupa Aset Rusak Berat/Usang.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.284.294.286,39 berasal dari saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.953.140.024,00 dikurangi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp35.668.845.737,61. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp43.087.999.600,36 berasal dari saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.911.509.924,00 dikurangi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp31.823.510.323,64.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.911.509.924,00 selama Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.041.630.100,00 atau sekitar 6,37%, sehingga Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.953.140.024,00.

Perhitungan mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.107 Mutasi Aset Lain-lain

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Nilai Perolehan Aset Lain-lain	74.911.509.924,00	5.041.630.100,00	0,00	79.953.140.024,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31.823.510.323,64	3.845.335.413,97	0,00	35.668.845.737,61
Jumlah		43.087.999.600,36	1.196.294.686,03	0,00	44.284.294.286,39

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari aset yang rusak berat dan barang hilang yang berada SKPD-SKPD.

Tabel 5.108 Rincian Aset Lain-lain

No	Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan - Reklas Reguler - Reklas dari Inventarisasi Barang Rusak Berat - Reklas dari Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan	Pengurangan (Hapus/ Reklas)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Aset Usang/Rusak Berat	46.363.373.650,00	0,00 4.954.554.143,00 87.075.957,00	0,00 0,00 0,00	51.405.003.750,00
2	Aset Lain-LainLainnya	28.548.136.274,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28.548.136.274,00
Jumlah		74.911.509.924,00	0,00 4.954.554.143,00 87.075.957,00	0,00 0,00 0,00	79.953.140.024,00 0,00

Penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp5.041.630.100,00 berasal dari reklas Aset Tetap sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Aset Lainnya, reklas Aset Tetap yang berasal dari hasil inventarisasi barang rusak berat sebesar Rp4.954.554.143,00 dan tidak ditemukan sebesar Rp87.075.957,00 sesuai dengan berita acara inventarisasi Tahun 2023. Rincian penambahan ini dapat dilihat pada **Lampiran 5.70**.

Rincian Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutannya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.71**.

5.3.5.4. Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2023

31 Desember 2022

(Rp)

(Rp)

(13.908.551.585,10)

(11.274.024.554,75)

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp13.908.551.585,10) dan (11.274.024.554,75).

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.908.551.585,10), apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (11.274.024.554,75) terdapat penambahan sebesar Rp2.634.527.030,35 atau 23,37%.



5.3.5.5. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.816.517.000,00	5.004.550.236,00

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang ke bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mendapatkan TDF dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp5.004.550.236,00. Pencacatan tersebut mendasari surat dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-802/WPB.14/2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Penyampaian Data Saldo dan Remunerasi *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Tahun 2022 dan Surat Edaran dari Direktur Bina Keuangan Daerah nomor 900.1.14.1/7481/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF, kemudian pada Tahun 2023 atas *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2022 senilai Rp5.004.550.236,00 telah diterima ke oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, kemudian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang juga mendapatkan *Treasury Deposit Facility* (TDF) di Tahun 2023 senilai Rp2.816.517.000,00

Tabel 5.109 Rincian Mutasi *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	<i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	5.004.550.236,00	5.004.550.236,00	2.816.517.000,00	2.816.517.000,00
Jumlah		5.004.550.236,00	5.004.550.236,00	2.816.517.000,00	2.816.517.000,00

5.3.6. Properti Investasi

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
15.050.401.387,00	0,00

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp15.050.401.387,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.110 Properti Investasi

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Properti Investasi	0,00	16.664.381.587,00	0,00	16.664.381.587,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(0,00)	(1.613.980.200,00)	(0,00)	(1.613.980.200,00)
	Jumlah	0,00	15.050.401.387,00	0,00	15.050.401.387,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.664.381.587,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.111 Rincian Properti Investasi

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	0,00	14.046.123.587,00	0,00	14.046.123.587,00
2	Bangunan dan Gedung	0,00	2.618.258.000,00	0,00	2.618.258.000,00
	Jumlah	0,00	16.664.381.587,00	0,00	16.664.381.587,00

5.3.6.1. Properti Investasi - Tanah

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

14.046.123.587,00

0,00

Saldo Properti Investasi tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.046.123.587,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.112 Rincian Properti Investasi Tanah

Jenis Barang	Alamat	Luas (m2)	Penggunaan	Nilai	SKPD
TANAH.TANAH BANGUNAN PERTOKOAN/RUMAH TOKO/KOPERASI	Jl. A Yani Muntilan, Ds. Pucungrejo, Muntilan	6540	Sewa	8.822.500.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN PERTOKOAN/RUMAH TOKO/KOPERASI	lokasi sebelah kantor Pramuka	450		2.118.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN PASAR	Jl. Raya Mgl- Kopeng (dibelakang pasar Tegalrejo)	2299	Sewa	473.919.460,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	NGROTO DEYANGAN MERTOYUDAN	174		820.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	KEL SUMBEREJO KEC MERTOYUDAN	510	Sewa	51.000.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	DESA BUMIHARJO KEC BOROBUDUR	4750		345.132.500,00	BPPKAD
TANAH.TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	DESA GULON, KEC. SALAM, MAGELANG	2935	Sewa	187.840.000,00	BPPKAD



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Barang	Alamat	Luas (m2)	Penggunaan	Nilai	SKPD
TANAH.TANAH BANGUNAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	PONGGOL, TAMANAGUNG, MUNTILAN	9591		10.360.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA / JASA.TANAH BANGUNAN TAMAN / WISATA / REKREASI	KEL MENDUT KEC MUNGKID	455	Sewa	2.140.000,00	BPPKAD
TANAH.LAIN-LAIN	Jl MT Haryono No.3 kemirirejo Magelang Selatan	651	Sewa	201.700.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	DESA SALAM KEC SALAM JLN MAGEALANG - JOGJA	7950	Sewa	37.500.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	Jl Brigda Khudori, Ds. Deyangan Kec. Mertoyudan	31285		1.563.345.927,00	BPPKAD
TANAH.TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKKAN	DESA DEYANGAN KEC MERTOYUDAN	60535		2.279.079.700,00	BPPKAD
TANAH.TANAH LAPANGAN SEPAK BOLA	dusun Kujon ds. Borobudur	6600	Sewa	31.068.000,00	BPPKAD
TANAH.TANAH KEBUN PERCOBAAN	Komplek perumahan Mujen Dusun Glagah, Desa Banjarnegoro	1880		37.600.000,00	DISTANPANGAN
Jumlah				14.046.123.587,00	

5.3.6.2. Properti Investasi - Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
(Rp)

31 Desember 2022
(Rp)

2.618.258.000,00

0,00

Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.618.258.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.113 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Jenis Barang	Alamat	Luas (m2)	penggunaan	Nilai	SKPD
BANGUNAN GEDUNG.BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	Jl. MT Haryono, Kemirirejo, Magelang selatan, Kota Magelang	410	Sewa	61.500.000,00	BPPKAD
BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	Komplek Pertokoan Plaza Muntilan Jl. A. Yani ds. Pucungrejo, Muntilan	3.076	Sewa	2.019.358.000,00	BPPKAD
BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	Komplek Pertokoan Plaza Muntilan Jl. A. Yani ds. Pucungrejo, Muntilan	3.600	Sewa	218.700.000,00	BPPKAD
BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	Komplek Pertokoan Plaza Muntilan Jl. A. Yani ds. Pucungrejo, Muntilan	365	Sewa	221.500.000,00	BPPKAD
BANGUNAN GEDUNG.GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR PERMANEN	Komplek Pertokoan Plaza Muntilan Jl. A. Yani ds. Pucungrejo, Muntilan	160	Sewa	97.200.000,00	BPPKAD
Jumlah				2.618.258.000,00	



5.3.6.3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Rp) (Rp)

(1.613.980.200,00) **(0,00)**

Metode penyusutan yang digunakan di Kabupaten Magelang adalah metode garis lurus. Metode garis lurus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset dibagi dengan masa manfaat.

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp1.613.980.200,00) dan Rp0,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.613.980.200,00)	(0,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.613.980.200,00)	(0,00)
Jumlah	(1.613.980.200,00)	(0,00)

5.3.7. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 31 Desember 2022
(Rp) (Rp)

Rp16.640.666.924,82 **Rp21.169.133.931,27**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Tabel 5.115 Kewajiban Jangka Pendek

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	219.350.482,00	21.704.956,00	219.350.482,00	21.704.956,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	10.324.100.128,27	1.356.573.167,54	5.146.354.722,99	6.534.318.572,82
3.	Utang Belanja	10.623.810.493,00	10.106.128.591,00	10.645.295.688,00	10.084.643.396,00
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.872.828,00	0,00	1.872.828,00	0,00
	Jumlah	21.169.133.931,27	11.484.406.714,54	16.012.873.720,99	16.640.666.924,82

5.3.7.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2023 31 Desember 2022

Rp21.704.956,00 **Rp219.350.482,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan Utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh 21, PPh 23, PPN, Iuran Wajib Pegawai dan Iuran Jaminan Kesehatan.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian atas Utang PFK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang per 31 Desember 2023 dan mutasi Tahun 2023 berdasarkan SKPD, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116 Utang PFK

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Disdikbud	213.143.275,00	21.704.956,00	213.143.275,00	21.704.956,00
2.	Dinkes	6.207.207,00	0,00	6.207.207,00	0,00
Jumlah		219.350.482,00	21.704.956,00	219.350.482,00	21.704.956,00

Rincian Utang PFK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.117 Rincian Utang PFK

No	Utang PFK	31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		31 Desember 2023 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	3
1.	Disdikbud	213.143.275,00	21.704.956,00	213.143.275,00	21.704.956,00
	Utang Iuran Wajib Pegawai (Gulkin SDN Jeruk Agung 1 UPT Srumbung)	33.516,00	350.000,00	33.516,00	350.000,00
	PPh 21 Dana BOS	19.978.391,00	3.080.450,00	19.978.391,00	3.080.450,00
	PPh 23 Dana BOS	16.223.129,00	6.547.805,00	16.223.129,00	6.547.805,00
	Pajak Daerah Dana BOS	36.733.540,00	0,00	36.733.540,00	0,00
	Utang PPNPusat Dana BOS	140.174.699,00	11.726.701,00	140.174.699,00	11.726.701,00
2.	Dinkes	6.207.207,00	0,00	6.207.207,00	0,00
	Utang PPh 23 BLUD RSUD MP	954.955,00	0,00	954.955,00	0,00
	Pajak PPN BLUD RSUD MP	5.252.252,00	0,00	5.252.252,00	0,00
Jumlah		219.350.482,00	21.704.956,00	219.350.482,00	21.704.956,00

Utang Iuran IWP sebesar Rp350.000,00 merupakan Dana masuk di bank selain dana Bos yang merupakan dana Gulkin SDN Jeruk Agung Kec Srumbung, Utang PPh 21 sebesar Rp3.080.450,00 merupakan utang PPh 21 dari BOS SD dan BOS SMP, Utang PPh 23 sebesar Rp6.547.805,00 merupakan utang PPh 23 dari BOS SD dan BOS SMP dan PPN Pusat Sebesar Rp11.726.701,00 merupakan utang dari BOS SD.

5.3.7.2. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp6.534.318.572,82

Rp10.324.100.128,27

Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah daerah dan sudah disetor ke rekening kas umum daerah, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa /fasilitas dari satuan kerja/pemerintah. Rincian saldo pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.118 Pendapatan Diterima Dimuka

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	940.441.922,83	551.753.601,88	197.410.160,42	1.294.785.364,29



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	a. BPPKAD	940.441.922,83	549.405.366,88	197.410.160,42	1.292.437.129,29
	b. Disdagkop UKM	0,00	720.000	0,00	720.000,00
	c. Diskominfo	0,00	1.628.235,00	0,00	1.628.235,00
2	Pajak Reklame	462.439.000,32	517.144.313,10	462.439.000,32	517.144.313,10
	BPPKAD	462.439.000,32	517.144.313,10	462.439.000,32	517.144.313,10
3	Retribusi Pelayanan Pasar	8.871.803.964,39	272.240.101,24	4.464.365.197,56	4.679.678.868,07
	a. Disdagkop UKM	8.854.250.904,28	261.706.920,60	4.454.098.405,75	4.661.859.419,13
	b. Dispeterikan	17.553.060,11	10.533.180,64	10.266.791,81	17.819.448,94
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.684.007,26	0,00	3.917.565,55	1.766.441,71
	Dishub	5.684.007,26	0,00	3.917.565,55	1.766.441,71
5	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	43.731.233,47	15.435.151,32	18.222.799,14	40.943.585,65
	Dishub	43.731.233,47	15.435.151,32	18.222.799,14	40.943.585,65
	Jumlah	10.324.100.128,27	1.356.573.167,54	5.146.354.722,99	6.534.318.572,82

Jumlah penambahan Pendapatan Diterima Dimuka adalah Rp1.356.573.167,54 terdapat koreksi penambahan Pendapatan Diterima Dimuka pada Dispeterikan sebesar Rp10.533.180,64 dan pada BPPKAD sebesar Rp1.066.549.679,98 yang disebabkan karena adanya penyesuaian atas penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023. Penambahan pendapatan di muka Pada Diskominfo sebesar Rp1.628.235,00 dan penambahan pendapatan di muka dari Disdagkop UKM sebesar Rp262.426.920,60 serta Dishub sebesar Rp15.435.151,32 dan ada pengurangan Pendapatan di terima di muka sebesar Rp5.146.354.722,99 dengan rincian sebagai berikut Dishub Rp22.140.364,69, BPPKAD sebesar Rp659.849.160,74 dan Disdagkop UKM Rp4.454.098.405,75 dan Dispeterikan sebesar Rp10.266.791,81.

Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka lainnya Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2022 (<i>Reff Pendapatan diterima dimuka lainnya-Neraca 2022</i>)	Rp10.324.100.128,27
Mutasi tambah:	
Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka lainnya Tahun 2023	Rp1.356.573.167,54
Mutasi kurang:	
Pengurangan atas Pendapatan diterima dimuka lainnya Tahun 2023	(Rp5.146.354.722,99)
Saldo akhir 31 Des 2023 (<i>Reff Pendapatan diterima dimuka lainnya-Neraca 2023</i>)	Rp6.534.318.572,82

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.72**.

5.3.7.3. Utang Belanja

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp10.084.643.396,00

Rp10.623.810.493,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Utang Belanja Merupakan Utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan. Rincian Utang Belanja pada Pemerintah Kabupaten Magelang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.119 Utang Belanja

No	Uraian Utang Beban	31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	UTANG PEGAWAI				
1	Gaji Pokok PNS	9.130.800,00	0,00	9.130.800,00	0,00
2	Tunjangan Keluarga PNS	913.080,00	0,00	913.080,00	0,00
3	Tunjangan Jabatan PNS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
4	Tunjangan Fungsional PNS	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00
5	Tunjangan Beras PNS	434.520,00	0,00	434.520,00	0,00
6	Pembulatan Gaji	51,00	0,00	51,00	0,00
7	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	452.154,00	134.440.113,00	452.154,00	134.440.113,00
8	Iuran jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.915,00	0,00	21.915,00	0,00
9	Iuran Jaminan Kematian PNS	65.742,00	0,00	65.742,00	0,00
10	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan	52.857.168,00	0,00	52.857.168,00	0,00
11	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.214.092.094,00	4.530.063.096,00	1.214.092.094,00	4.530.063.096,00
12	Belanja Pegawai BLUD	30.360.250,00	0,00	30.360.250,00	0,00
	JUMLAH UTANG PEGAWAI	1.309.587.774,00	4.665.313.209,00	1.309.587.774,00	4.665.313.209,00
B	UTANG BELANJA BARANG DAN JASA				
a	UTANG BELANJA BARANG				
1	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Isi Tabung Gas	3.460.000,00	7.440.000,00	3.460.000,00	7.440.000,00
3	Suku cadang alat laboratorium	0,00	493.834,00	0,00	493.834,00
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.859.990,00	280.050,00	2.859.990,00	280.050,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.660.000,00	0,00	6.660.000,00	0,00
6	Obat-Obatan Lainnya	71.992.035,00	0,00	71.992.035,00	0,00
7	Obat - obatan		427.072.324,00	0,00	427.072.324,00
	JUMLAH UTANG BELANJA	84.972.025,00	435.286.208,00	84.972.025,00	435.286.208,00
b	UTANG JASA				
1	Jasa Tenaga Kesehatan	5.597.674.390,00	0,00	5.597.674.390,00	0,00
2	Tagihan Telepon	50.665.132,00	38.062.653,00	52.858.996,00	35.868.789,00
3	Tagihan Air	85.311.745,00	105.206.125,00	86.785.435,00	103.732.435,00
4	Tagihan Listrik	551.252.113,00	682.722.251,00	554.569.194,00	679.405.170,00
5	Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.473.000,00	2.990.000,00	3.473.000,00	2.990.000,00
6	Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	49.796.152,00	55.248.095,00	58.793.812,00	46.250.435,00
7	Rekening Penerangan Jalan Umum	1.751.632.578,00	1.754.819.727,00	1.751.632.578,00	1.754.819.727,00
8	Pengelolaan Limbah	0,00	43.799.268,00	0,00	43.799.268,00
9	Jasa Ketersediaan layanan (Availability Payment) infrastuktur kesehatan	0,00	82.147.650,00	5.502.900,00	76.644.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian Utang Beban	31-Des-22	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
10	Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	601.518.551,00	1.603.170.114,00	601.518.551,00	1.603.170.114,00
	JUMLAH UTANG JASA	8.691.323.661,00	4.368.165.883,00	8.712.808.856,00	4.346.680.688,00
c	UTANG PEMELIHARAAN				
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	15.906.000,00	0,00	15.906.000,00
2	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	JUMLAH UTANG PEMELIHARAAN	0,00	17.706.000,00	0,00	17.706.000,00
d	UTANG BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DI BERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT				
1	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.731.496,00	184.887.470,00	125.731.496,00	184.887.470,00
2	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	897.860,00	0,00	897.860,00
	JUMLAH UTANG BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA /MASYARAKAT	125.731.496,00	185.785.330,00	125.731.496,00	185.785.330,00
d	UTANG BARANG DAN JASA BOS				
1	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	400.766.812,00	430.876.961,00	400.766.812,00	430.876.961,00
	JUMLAH BARANG DAN JASA BOS	400.766.812,00	430.876.961,00	400.766.812,00	430.876.961,00
e	UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1	Alat Produksi Perikanan	10.108.725,00	0,00	10.108.725,00	0,00
2	Komputer Unit Lainnya	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
3	Peralatan Komputer Lainnya	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
4	utang belanja modal Personal Computer	0,00	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.428.725,00	2.995.000,00	11.428.725,00	2.995.000,00
	Jumlah	10.623.810.493,00	10.106.128.591,00	10.645.295.688,00	10.084.643.396,00

Mutasi Utang Belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo awal 1 Jan 2023 (<i>Reff Utang Belanja-Neraca 2022</i>)		Rp10.623.810.493,00
Mutasi tambah:		
Penambahan Utang Belanja Tahun 2023	Rp10.106.128.591,00	
Mutasi kurang:		
Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	(Rp10.645.295.688,00)	
Saldo akhir 31 Des 2023(<i>Reff Utang Belanja-Neraca 2023</i>)		Rp10.084.643.396,00

Rincian Utang Belanja per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.73 dan 5.74.**

5.3.7.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp0,00

Rp1.872.828,00

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran. Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.120 Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	BPPKAD				
1.	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	1.872.828,00	0,00	1.872.828,00	0,00
	Jumlah	1.872.828,00	0,00	1.872.828,00	0,00

Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per jenis utang dijelaskan sebagai berikut:

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah

Saldo awal 1 Jan 2023(*Reff Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan daerah yang –Neraca 2022*) Rp1.872.828,00

Mutasi tambah:

Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah Tahun 2023 Rp0,00

Mutasi kurang:

Pengurangan Utang Kelebihan (Rp1.872.828,00)

Penghapusan Utang berdasarkan Surat Pernyataan dari PT. United Dico Citas tanggal 18 April 2024 yang menyatakan bahwa PT tersebut sudah tidak mempunyai piutang sebesar Rp18.72.828,00 kepada RSUD Muntilan Saldo akhir 31 Des 2023 (*Reff Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah –Neraca 2023*)

Rp0,00

5.3.8. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp0,00

Rp0,00

Saldo kewajiban jangka panjang Tahun 2023 Rp0,00 dan Tahun 2022 Rp0,00.

5.3.9. Ekuitas

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp3.636.872.103.564,98

Rp3.663.686.788.681,31

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.



5.4. Penjelasan Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam:

1. Pendapatan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
2. Beban – LO adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
3. Kegiatan Non Operasional menyajikan surplus dan defisit kegiatan non operasional;
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan; dan
5. Surplus/defisit-LO.

Berikut Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang pada Tahun 2023:

Tabel 5. 121 Penjelasan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Operasional	2.237.669.071.009,06	2.196.508.465.151,06	41.160.605.858,00	1,87
Beban – LO	2.271.221.351.878,96	2.084.609.426.949,79	186.611.924.929,17	8,95
Kegiatan Non Operasional	(173.006.011,50)	(761.103.875,73)	588.097.864,23	(77,27)
Surplus/ Defisit - LO	(33.725.286.881,40)	111.137.934.325,54	(144.863.221.206,94)	(130,35)

Penjelasan atas Laporan Operasional Kabupaten Magelang disajikan sebagai berikut.

5.4.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 5. 122 Pendapatan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	475.737.080.620,06	403.747.143.329,06	71.989.937.291,00	17,83
Pendapatan Transfer - LO	1.727.500.360.370,00	1.714.587.796.551,00	12.912.563.819,00	0,75
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	34.431.630.019,00	78.173.525.271,00	(43.741.895.252,00)	(55,95)
Pendapatan Operasional	2.237.669.071.009,06	2.196.508.465.151,06	41.160.605.858,00	1,87

Pendapatan Operasional Tahun 2023 Rp2.237.669.071.009,06 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.196.508.465.151,06 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp41.160.605.858,00 atau sebesar 1,87%.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2023 Rp475.737.080.620,06 dan Tahun 2022



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar Rp403.747.143.329,06. Terdapat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp71.989.937.291,00 atau sebesar 17,83% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Daerah - LO	192.543.132.070,22	173.974.355.336,35	18.568.776.733,87	10,67
Retribusi Daerah - LO	22.997.532.707,69	16.306.749.887,55	6.690.782.820,14	41,03
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	32.804.793.280,28	36.487.040.661,94	(3.682.247.381,66)	(10,09)
Lain-lain PAD yang Sah - LO	227.391.622.561,87	176.978.997.443,22	50.412.625.118,65	28,49
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	475.737.080.620,06	403.747.143.329,06	71.989.937.291,00	17,83

5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Magelang yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Daerah - LO disajikan dengan basis akrual. Pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Operasional Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran.

Pajak Daerah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp192.543.132.070,22 dan Tahun 2022 sebesar Rp173.974.355.336,35. Terdapat kenaikan Pajak Daerah - LO sebesar Rp18.568.776.733,87 atau sebesar 10,67% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Hotel-LO	17.885.536.687,00	15.163.493.393,00	2.722.043.294,00	17,95
Pajak Restoran-LO	29.712.085.179,00	24.742.731.247,00	4.969.353.932,00	20,08
Pajak Hiburan-LO	4.731.821.197,00	3.880.378.301,00	851.442.896,00	21,94
Pajak Reklame-LO	1.318.524.332,22	1.194.605.702,35	123.918.629,87	10,37
Pajak Penerangan Jalan-LO	46.059.423.288,00	43.465.563.665,00	2.593.859.623,00	5,97
Pajak Parkir-LO	1.673.444.491,00	1.727.573.770,00	(54.129.279,00)	(3,13)
Pajak Air Tanah-LO	1.046.129.040,00	928.765.000,00	117.364.040,00	12,64
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.797.497.116,00	2.787.112.039,00	1.010.385.077,00	36,25
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	46.101.721.623,00	46.086.465.200,00	15.256.423,00	0,03
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	40.216.949.117,00	33.997.667.019,00	6.219.282.098,00	18,29
Realisasi Pajak Daerah - LO	192.543.132.070,22	173.974.355.336,35	18.568.776.733,87	10,67

Perbandingan Pajak Daerah - LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel. 5.125 Perbandingan Pajak Daerah - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Pajak Hotel - LO	17.885.536.687,00	18.296.496.695,00	(410.960.008,00)
Pajak Restoran – LO	29.712.085.179,00	29.917.335.807,00	(205.250.628,00)
Pajak Hiburan - LO	4.731.821.197,00	4.726.606.197,00	5.215.000,00
Pajak Reklame - LO	1.318.524.332,22	1.324.830.646,00	(6.306.313,78)
Pajak Penerangan Jalan - LO	46.059.423.288,00	45.655.001.705,00	404.421.583,00
Pajak Parkir - LO	1.673.444.491,00	1.672.639.001,00	805.490,00
Pajak Air Tanah - LO	1.046.129.040,00	1.013.976.680,00	32.152.360,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	3.797.497.116,00	3.769.062.835,00	28.434.281,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO	46.101.721.623,00	42.975.578.095,00	3.126.143.528,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	40.216.949.117,00	40.216.949.117,00	0,00
Pajak Daerah - LO	192.543.132.070,22	189.568.476.778,00	2.974.655.292,22

Penjelasan rincian atas Pajak Daerah – LO serta perbandingan antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel - LO

Selisih Pajak Hotel - LO dengan LRA sebesar (Rp410.960.008,00) merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp17.885.536.687,00 pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp17.853.864.491,00 dan pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp442.632.204,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$(Rp410.960.008,00) = Rp17.885.536.687,00 - Rp17.853.864.491,00 - Rp442.632.204,00$$

2. Pajak Restoran - LO

Rincian Pajak Restoran – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 126 Pajak Restoran – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	15.328.316.196,00	14.750.317.258,00	577.998.938,00	3,92
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.813.802.495,00	1.775.642.865,00	1.038.159.630,00	58,47
Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	6.249.332.089,00	3.293.970.936,00	2.955.361.153,00	89,72
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	5.320.634.399,00	4.922.800.188,00	397.834.211,00	8,08
Pajak Restoran–LO	29.712.085.179,00	24.742.731.247,00	4.969.353.932,00	20,08

Selisih Pajak Restoran – LO dengan LRA sebesar (Rp205.250.628,00) merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp29.712.085.179,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp29.232.908.589,00 serta pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp684.427.218,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$(Rp205.250.628,00) = Rp29.712.085.179,00 - Rp29.232.908.589,00 - Rp684.427.218,00.$$



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Pajak Hiburan - LO

Rincian Pajak Hiburan – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 127 Pajak Hiburan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Tontonan Film–LO	1.122.037.694,00	975.687.797,00	146.349.897,00	15,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	2.360.000,00	4.940.000,00	(2.580.000,00)	(52,23)
Pajak Pameran–LO	35.000,00	842.500,00	(807.500,00)	(95,85)
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	68.596.021,00	71.119.743,00	(2.523.722,00)	(3,55)
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO	3.233.548.332,00	2.799.611.410,00	433.936.922,00	15,50
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	304.819.150,00	27.706.851,00	277.112.299,00	1.000,16
Pajak Pertandingan Olahraga-LO	425.000,00	470.000,00	(45.000,00)	(9,57)
Pajak Hiburan–LO	4.731.821.197,00	3.880.378.301,00	851.442.896,00	21,94

Selisih Pajak Hiburan – LO dengan LRA sebesar Rp5.215.000,00 merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp4.731.821.197,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp4.726.606.197,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp5.215.000,00} = \text{Rp4.731.821.197,00} - \text{Rp4.726.606.197,00}$$

4. Pajak Reklame - LO

Rincian Pajak Reklame – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 128 Pajak Reklame – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	1.318.524.332,22	1.194.605.702,35	123.918.629,87	10,37
Pajak Reklame–LO	1.318.524.332,22	1.194.605.702,35	123.918.629,87	10,37

Selisih Pajak Reklame – LO sebesar (Rp6.306.313,78) merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.373.229.645,00 pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.252.579.790,00 pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp72.250.856,00 dan terdapat penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp.517.144.313,10 pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 sebesar Rp462.439.000,32.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp6.306.313,78}) &= \text{Rp1.373.229.645,00} - \text{Rp1.252.579.790,00} - \\ &\quad \text{Rp72.250.856,00} - \text{Rp.517.144.313,10} + \\ &\quad \text{Rp462.439.000,32} \end{aligned}$$

5. Pajak Penerangan Jalan - LO

Selisih Pajak Penerangan Jalan - LO dengan LRA sebesar Rp404.421.583,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp46.059.423.288,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp41.941.940.304,00 serta pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp3.713.061.401,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}404.421.583,00 = \text{Rp}46.059.423.288,00 - \text{Rp}41.941.940.304,00 - \text{Rp}3.713.061.401,00.$$

6. Pajak Parkir - LO

Selisih Pajak Parkir - LO dengan LRA sebesar Rp805.490,00 merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.673.444.491,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.672.094.001,00 serta pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp545.000,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}805.490 = \text{Rp}1.673.444.491,00 - \text{Rp}1.672.094.001,00 - \text{Rp}545.000,00.$$

7. Pajak Air Tanah - LO

Selisih Pajak Air Tanah - LO dengan LRA sebesar Rp32.152.360,00 merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.046.129.040,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp953.817.760,00 serta pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp60.158.920,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}32.152.360,00 = \text{Rp}1.046.129.040,00 - \text{Rp}953.817.760,00 - \text{Rp}60.158.920,00.$$

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

Selisih Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO dengan LRA sebesar Rp28.434.281,00 merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp3.797.497.116,00 dan pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp3.718.678.339,00 serta pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp50.384.496,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}28.434.281,00 = \text{Rp}3.797.497.116,00 - \text{Rp}3.718.678.339,00 - \text{Rp}50.384.496,00.$$

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO

Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO dengan LRA sebesar Rp3.126.143.528,00 merupakan penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp46.101.721.623,00 pelunasan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp41.369.470.025,00, pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp1.606.108.070,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}3.126.143.528,00 = \text{Rp}46.101.721.623,00 - \text{Rp}41.369.470.025,00 - \text{Rp}1.606.108.070,00$$

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah - LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Pemungutan Retribusi Daerah



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kabupaten Magelang didasarkan atas UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda sebagai berikut.

1. Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2023 sebesar Rp22.997.532.707,69 dan Tahun 2022 sebesar Rp16.306.749.887,55. Terdapat kenaikan Rp6.690.782.820,14 atau sebesar 41,03% dengan rincian per obyek sebagai berikut.

Tabel 5. 129 Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Retribusi Jasa Umum - LO	13.204.041.867,32	9.374.610.464,28	3.829.431.403,04	40,85
Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	761.504.209,00	406.238.000,00	355.266.209,00	87,45
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.509.566.981,00	1.252.362.278,00	257.204.703,00	20,54
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.000.338.000,00	955.483.000,00	44.855.000,00	4,69
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	7.514.043.693,32	4.289.643.371,28	3.224.400.322,04	75,17
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	847.240.000,00	1.011.800.000,00	(164.560.000,00)	(16,26)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	1.390.000,00	1.460.000,00	(70.000,00)	(4,79)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	123.489.000,00	151.760.500,00	(28.271.500,00)	(18,63)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.446.469.984,00	1.305.863.315,00	140.606.669,00	10,77
Retribusi Jasa Usaha - LO	8.571.564.365,55	6.295.921.344,74	2.275.643.020,81	36,14
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.359.494.180,00	1.090.871.024,00	268.623.156,00	24,62
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	28.002.000,00	33.242.000,00	(5.240.000,00)	(15,76)
Retribusi Terminal - LO	355.773.765,55	360.567.400,74	(4.793.635,19)	(1,33)
Retribusi Tempat Khusus Parkir -LO	1.265.467.000,00	1.170.569.800,00	94.897.200,00	8,11
Retribusi Rumah Potong Hewan -LO	51.461.000,00	61.624.000,00	(10.163.000,00)	(16,49)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	5.367.226.920,00	3.468.887.120,00	1.898.339.800,00	54,72
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	144.139.500,00	110.160.000,00	33.979.500,00	30,85
Retribusi Perizinan Tertentu -LO	1.221.926.474,82	636.218.078,53	585.708.396,29	92,06
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.090.034.627,00	584.051.640,00	505.982.987,00	86,63
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	40.612.647,82	52.166.438,53	(11.553.790,71)	(22,15)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	91.279.200,00	0,00	91.279.200,00	100,00
Pendapatan Retribusi Daerah -LO	22.997.532.707,69	16.306.749.887,55	6.690.782.820,14	41,03

Perbandingan Retribusi Daerah - LO dengan LRA dapat disajikan sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel. 5. 130 Perbandingan Retribusi Daerah – LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Retribusi Jasa Umum - LO	13.204.041.867,32	9.238.629.556,00	3.965.412.311,32
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	761.504.209,00	761.504.209,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	1.509.566.981,00	1.513.279.731,00	(3.712.750,00)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	1.000.338.000,00	1.000.338.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	7.514.043.693,32	3.413.895.294,00	4.100.148.399,32
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	847.240.000,00	847.240.000,00	0,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta – LO	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	123.489.000,00	123.489.000,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.446.469.984,00	1.577.493.322,00	(131.023.338,00)
Retribusi Jasa Usaha - LO	8.571.564.365,55	8.530.038.200,00	41.526.165,55
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.359.494.180,00	1.360.214.180,00	(720.000,00)
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	28.002.000,00	28.002.000,00	0,00
Retribusi Terminal - LO	355.773.765,55	389.022.600,00	(33.248.834,45)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	1.265.467.000,00	1.189.972.000,00	75.495.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	51.461.000,00	51.461.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	5.367.226.920,00	5.367.226.920,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	144.139.500,00	144.139.500,00	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu - LO	1.221.926.474,82	1.224.213.827,00	(2.287.352,18)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.090.034.627,00	1.090.034.627,00	0,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	40.612.647,82	42.900.000,00	(2.287.352,18)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	91.279.200,00	91.279.200,00	0,00
Retribusi Daerah - LO	22.997.532.707,69	18.992.881.583,00	4.004.651.124,69

Penjelasan rincian atas Retribusi Daerah – LO serta perbandingan antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO

Selisih Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO dengan LRA sebesar (Rp3.712.750,00) karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp45.035.000,00 pelunasan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp44.610.000,00 dan pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp4.137.750,00 di DLH.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$(Rp3.712.750,00) = Rp45.035.000,00 - Rp44.610.000,00 - Rp4.137.750,00.$$

2. Retribusi Pelayanan Pasar - LO

Selisih Retribusi Pelayanan Pasar - LO dengan LRA sebesar Rp4.100.148.399,32 karena terdapat penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp899.949.993,00 pelunasan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp897.186.993,00 dan pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp95.850.497,00 penambahan Pendapatan Diterima



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp4.454.098.405,75 dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp261.706.920,60 di Disdagkop UKM. Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp34.674.400,00 dan pelunasan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp32.480.600,00 pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp1.468.000,00 terdapat penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp10.266.791,81 dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp10.148.180,64 di Dispeterikan.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rp4.100.148.399,32} &= \text{Rp899.949.993,00} - \text{Rp897.186.993,00} - \text{Rp95.850.497,00} + \\ &\quad \text{Rp4.454.098.405,75} - \text{Rp261.706.920,60} + \\ &\quad \text{Rp34.674.400,00} - \text{Rp32.480.600,00} - \text{Rp1.468.000,00} + \\ &\quad \text{Rp10.266.791,81} - \text{Rp 10.148.180,64.} \end{aligned}$$

3. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO

Selisih Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO dengan LRA sebesar (Rp131.023.338,00) karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp1.446.469.984,00 pelunasan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp1.446.469.984,00 pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp129.395.098,00 reklas ke rekening Lain Lain PAD yang sah dikarenakan ada kelebihan pembayaran piutang sebesar Rp5,00 dan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp1.628.235,00 di Diskominfo.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp131.023.338,00}) &= \text{Rp1.446.469.984,00} - \text{Rp1.446.469.984,00} - \\ &\quad \text{Rp129.395.098,00} - \text{Rp5,00} - \text{Rp1.628.235,00} \end{aligned}$$

4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO

Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO sebesar (Rp720.000,00) karena terdapat penambahan piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp28.440.000,00 pelunasan piutang Tahun 2023 sebesar Rp28.440.000,00 penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp720.00,00 di Disdagkop UKM.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp720.000,00}) &= \text{Rp28.440.000,00} - \text{Rp28.440.000,00} - \text{Rp720.000,00} \end{aligned}$$

5. Retribusi Terminal - LO

Selisih Retribusi Terminal – LO dengan LRA sebesar (Rp33.248.834,45) karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp218.356.200,00 pelunasan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp214.446.200,00 pelunasan Piutang atas ketetapan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp41.076.400,00 dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp3.917.566,00 di Dishub.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp33.248.834,00}) &= \text{Rp218.356.200,00} - \text{Rp214.446.200,00} - \\ &\quad \text{Rp41.076.400,00} + \text{Rp3.917.566,00.} \end{aligned}$$

6. Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO

Selisih Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO dengan LRA sebesar Rp75.495.000,00 karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp765.978.250,00 pelunasan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp687.278.250,00 pelunasan Piutang atas ketetapan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 di Disdagkop UKM.

Penambahan Piutang sebesar Rp88.560.000,00 pelunasan Piutang atas ketetapan



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tahun 2023 sebesar Rp88.560.000,00 pelunasan Piutang atas ketetapan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp320.000,00 dan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp385.000,00 di Dispeterikan.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rp}75.495.000,00 &= \text{Rp}765.978.250,00 - \text{Rp}687.278.250,00 - \text{Rp}2.500.000,00 \\ &+ \text{Rp}88.560.000,00 - \text{Rp}88.560.000,00 - \text{Rp}320.000,00 - \\ &\text{Rp}385.000,00 \end{aligned}$$

7. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO
Selisih Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO dengan LRA sebesar (Rp2.287.352,18) karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp37.825.000,00 pelunasan Piutang atas ketetapan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp37.825.000,00 pelunasan Piutang atas ketetapan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp5.075.000,00 penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp15.435.151,32 dan pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Tahun 2023 sebesar Rp18.222.799,14 di Dishub.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp}2.287.352,18) &= \text{Rp}37.825.000,00 - \text{Rp}37.825.000,00 - \text{Rp}5.075.000,00 \\ &- \text{Rp}15.435.151,32 + \text{Rp}18.222.799,14. \end{aligned}$$

Rincian per obyek dan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.75**.

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang pada Perusahaan Daerah atau BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 sebesar Rp32.804.793.280,28 dan Tahun 2022 sebesar Rp36.487.040.661,94 sehingga terdapat penurunan Rp3.682.247.381,66 atau sebesar 10,09% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 131 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	27.184.608.899,28	30.695.750.328,96	(3.511.141.429,68)	(11,44)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	204.653.186,00	179.765.469,33	24.887.716,67	13,84
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	5.415.531.195,00	5.611.524.863,65	(195.993.668,65)	(3,49)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	32.804.793.280,28	36.487.040.661,94	(3.682.247.381,66)	(10,09)

Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.



Tabel 5. 132 Perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - LO	27.184.608.899,28	26.247.645.316,00	936.963.583,28
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) - LO	204.653.186,00	109.627.944,00	95.025.242,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) - LO	5.415.531.195,00	4.240.942.536,00	1.174.588.659,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	32.804.793.280,28	30.598.215.796,00	2.206.577.484,28

Selisih perbandingan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO dengan LRA karena adanya kenaikan nilai Investasi Permanen pada BUMD yang dihitung menggunakan metode ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp2.206.577.484,28

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO Tahun 2023 berdasarkan BUMD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 133 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Berdasarkan BUMD

Nama BUMD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA (Rp)	Penyesuaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO (Rp)
1	2	3	4
Bapas 69	15.307.790.112,00	574.542.386,00	15.882.332.498,00
PDAU	109.627.944,00	95.025.242,00	204.653.186,00
PDAM	4.240.942.536,00	1.174.588.659,00	5.415.531.195,00
Bank Jateng	10.275.387.698,00	0,00	10.275.387.698,00
BKK Muntilan	664.467.506,00	362.421.197,28	1.026.888.703,28
Jumlah	30.598.215.796,00	2.206.577.484,28	32.804.793.280,28

Rincian perhitungan per BUMD terdapat dalam **Lampiran 5.76**.

5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah -LO

Lain - lain PAD yang Sah - LO tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan Pajak Daerah - LO, Retribusi – Daerah – LO, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.

Lain – lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2023 sebesar Rp227.391.622.561,87 dan Tahun 2022 sebesar Rp176.978.997.443,22. Terdapat kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah - LO Rp50.412.625.118,65 atau sebesar 28,49%, dengan rincian per obyek sebagai berikut.

Tabel 5. 134 Lain – lain PAD yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Penjualan BMD yang TidakDipisahkan-LO	194.829.050,00	441.322.054,00	(246.493.004,00)	(55,85)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.237.892.588,54	1.461.475.077,25	(223.582.488,71)	(15,30)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Hasil Kerja Sama Daerah-LO	874.006.080,00	899.048.415,00	(25.042.335,00)	(2,79)
Jasa Giro-LO	2.368.742.396,00	2.760.337.397,62	(391.595.001,62)	(14,19)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	2.820.000,00	(2.820.000,00)	(100,00)
Pendapatan Bunga-LO	9.982.207.261,38	11.434.862.967,00	(1.452.655.705,62)	(12,70)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	727.755.766,05	601.092.932,95	126.662.833,10	21,07
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	231.002.578,00	293.465.850,00	(62.463.272,00)	(21,28)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	376.450.979,00	169.026.428,00	207.424.551,00	122,72
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	695.696.814,00	585.627.964,00	110.068.850,00	18,80
Pendapatan dari Pengembalian-LO	754.713.842,00	1.975.453.717,00	(1.220.739.875,00)	(61,80)
Pendapatan dari BLUD-LO	209.927.143.706,90	156.354.464.640,40	53.572.679.066,50	34,26
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	21.181.500,00	0,00	21.181.500,00	100,00
Lain - lain PAD yang Sah - LO	227.391.622.561,87	176.978.997.443,22	50.412.625.118,65	28,49

Perbandingan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dengan LRA dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 135 Perbandingan Lain - lain PAD yang Sah - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	194.829.050,00	29.642.000,00	165.187.050,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.237.892.588,54	1.589.887.795,00	(351.995.206,46)
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	874.006.080,00	874.006.080,00	0,00
Jasa Giro – LO	2.368.742.396,00	2.368.742.396,00	0,00
Pendapatan Bunga - LO	9.982.207.261,38	9.983.421.017,00	(1.213.755,62)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	727.755.766,05	133.096.426,00	594.659.340,05
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	231.002.578,00	231.002.578,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	376.450.979,00	376.450.979,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	695.696.814,00	695.696.814,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian – LO	754.713.842,00	754.713.837,00	5,00
Pendapatan dari BLUD – LO	209.927.143.706,90	209.268.637.938,00	658.505.768,90
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	21.181.500,00	21.181.500,00	0,00
Realisasi Lain - Lain PAD yang Sah	227.391.622.561,87	226.326.479.360,00	1.065.143.201,87

Penjelasan rincian atas Lain – lain PAD yang Sah – LO serta perbandingan antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5. 136 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	334.183.454,00	(334.183.454,00)	(100,00)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	29.642.000,00	69.250.000,00	(39.608.000,00)	(57,20)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	165.187.050,00	4.264.000,00	160.923.050,00	3.773,99
Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	33.624.600,00	(33.624.600,00)	(100,00)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	194.829.050,00	441.322.054,00	(246.493.004,00)	(55,85)

Selisih Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan LO dengan LRA sebesar Rp 165.187.050,00 dikarenakan adanya hasil perkembangbiakan bibit ikan di Dispeterikan sebesar Rp110.055.000 dan hasil perkembangbiakan bibit anggrek di Distanpangan sebesar Rp55.132.050,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}165.187.050,00 = \text{Rp}110.055.000,00 + \text{Rp}55.132.050,00$$

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 137 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Hasil Sewa BMD-LO	995.642.574,54	1.356.304.911,25	(360.662.336,71)	(26,59)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO	242.250.014,00	105.170.166,00	137.079.848,00	130,34
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.237.892.588,54	1.461.475.077,25	(223.582.488,71)	(15,30)

Selisih Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO dengan LRA sebesar (Rp351.995.206,46) karena terdapat pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp145.455.067,95 koreksi pencatatan atas pengakuan PDM yang terlalu tinggi a.n Umar Said sebesar Rp51.955.092,47 dan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp549.245.540,97 koreksi pencatatan atas pengakuan PDM yang terlalu tinggi a.n Umar Said sebesar Rp159.825,91 di BPPKAD.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$(\text{Rp}351.995.206,46) = \text{Rp}145.455.067,95 + \text{Rp}51.955.092,47 - \text{Rp}549.245.540,97 - \text{Rp}159.825,91$$

3. Jasa Giro - LO

Rincian Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.138 Jasa Giro – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.253.196.705,00	2.759.123.642,00	(505.926.937,00)	(18,34)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	115.545.691,00	0,00	115.545.691,00	100,00
Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)-LO	0,00	1.213.755,62	(1.213.755,62)	(100,00)
Jasa Giro - LO	2.368.742.396,00	2.760.337.397,62	(391.595.001,62)	(14,19)

4. Pendapatan Bunga – LO

Selisih Pendapatan Bunga – LO dengan LRA sebesar (Rp1.213.755,62) karena adanya penyesuaian piutang atas pembayaran Bunga TDF Tahun 2022 yang dibayarkan Tahun 2023 sebesar Rp1.213.755,62 di BPPKAD.

5. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO

Selisih Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO dengan LRA sebesar Rp594.659.340,05 dikarenakan adanya Penyisihan Piutang Pajak di beberapa SKPD berikut :

Tabel 5.139 Penjelasan selisih Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO

Nama SKPD	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Jumlah
1	2	3	4
Dishub	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal yang sudah disisihkan	328.800,00	
	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang sudah disisihkan	19.873.560,00	20.202.360,00
Disdagkop dan UKM	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los yang sudah disisihkan	16.902.008,35	
	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios yang sudah disisihkan	71.679.558,50	88.581.566,85
Dispeterikan	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	1.044.780,00	1.044.780,00
BPPKAD	Pelunasan Piutang Pajak Hotel yang sudah disisihkan	75.000,00	
	Pelunasan Piutang Pajak Restoran yang sudah disisihkan	49.600,00	
	Pelunasan Piutang PBB yang sudah disisihkan	484.032.825,70	
	Pelunasan Piutang Pajak Reklame yang sudah disisihkan	673.207,50	484.830.633,20
Jumlah Total			594.659.340,05

6. Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO

Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 140 Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Denda Pajak Hotel- LO	1.543.722,00	657.754,00	885.968,00	134,70
Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	40.218.409,00	20.444.675,00	19.773.734,00	96,72
Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO	362.200,00	1.417.800,00	(1.055.600,00)	(74,45)
Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO	6.194.496,00	3.882.302,00	2.312.194,00	59,56
Pendapatan Denda Pajak Parkir- LO	23.792,00	85.769,00	(61.977,00)	(72,26)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	1.174.550,00	1.483.943,00	(309.393,00)	(20,85)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.731.210,00	1.935.364,00	(204.154,00)	(10,55)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	325.202.600,00	139.118.821,00	186.083.779,00	133,76
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	376.450.979,00	169.026.428,00	207.424.551,00	122,72

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 141 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO	691.035.616,00	579.848.664,00	111.186.952,00	19,18
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO	81.198,00	225.300,00	(144.102,00)	(63,96)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	4.580.000,00	5.554.000,00	(974.000,00)	(17,54)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	695.696.814,00	585.627.964,00	110.068.850,00	18,80

8. Pendapatan dari Pengembalian - LO

Rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 142 Pendapatan dari Pengembalian – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	235.740.525,00	(235.740.525,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	125.116.882,00	1.654.162.490,00	(1.529.045.608,00)	(92,44)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO	233.487.901,00	0,00	233.487.901,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO	1.139.658,00	0,00	1.139.658,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	24.345.124,00	0,00	24.345.124,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO	21.196.850,00	0,00	21.196.850,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO	35.113.000,00	0,00	35.113.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO	162.931,00	0,00	162.931,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO	99.291.966,00	0,00	99.291.966,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-LO	24.839.000,00	0,00	24.839.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi-Instalasi-LO	29.659.000,00	0,00	29.659.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	78.761.530,00	85.550.702,00	(6.789.172,00)	(7,94)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	754.713.842,00	1.975.453.717,00	(1.220.739.875,00)	(61,80)

Selisih Pendapatan dari Pengembalian – LO dengan LRA sebesar Rp5,00 dikarenakan adanya reklas dari rekening Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika.

9. Pendapatan BLUD - LO

Selisih Pendapatan dari BLUD - LO sebesar Rp658.505.768,90 karena terdapat penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp62.359.044.890,00 pelunasan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp62.180.879.305,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp56.421.500,00 penambahan piutang BLUD Puskesmas atas pendapatan kapitasi Jampersal/KB Tahun 2023 yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp205.401.287,00 pembayaran Piutang BLUD Puskesmas atas pendapatan kapitasi dan Jampersal/KB Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp187.487.969,00 di Dinkes.

Penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp59.838.453.636,00 koreksi pencatatan kelebihan pembayaran piutang sebesar Rp8,00 penambahan pendapatan atas penyisihan piutang yang dilunasi sebesar Rp1.624.500,00 penambahan piutang atas pendapatan Klaim BPJS 2023 yang diterima di Tahun 2024 sebesar Rp6.643.916.920,00 dan pelunasan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp58.234.115.501,00 pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp3.635.678.451,00 pengurangan Piutang karena adanya keringanan piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp117.104.469,00 pengurangan piutang atas keringanan pasien an. Nur Azizah sebesar Rp1.125.000,00 pembayaran piutang atas pendapatan klaim BPJS Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023 sebesar Rp4.189.854.598,00 di RSUD Merah Putih.

Terdapat penambahan Hibah tidak terikat dari UMM sebesar Rp12.450.000,00 penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023 sebesar Rp67.071.507.510,00 penambahan Piutang JKN atas klaim susulan bulan November dan bulan Desember 2023 sebesar Rp426.122.800,00 penambahan pendapatan atas penyisihan piutang yang dilunasi sebesar Rp7.919.970,90 dan pelunasan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp58.810.430.277,00 pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023 sebesar Rp8.494.838.683,00 di RSUD Muntilan.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned}
 (\text{Rp}658.505.768,90) &= \text{Rp}62.359.044.890,00 + \text{Rp}205.401.287,00 - \\
 &\text{Rp}62.180.879.305,00 - \text{Rp}56.421.500,00 - \\
 &\text{Rp}187.487.969,00 + \text{Rp}59.838.453.636,00 + \text{Rp}8 + \\
 &\text{Rp}1.624.500,00 + \text{Rp}6.643.916.920,00 - \\
 &\text{Rp}58.234.115.501,00 - \text{Rp}3.635.678.451,00 - \\
 &\text{Rp}117.104.469,00 - \text{Rp}1.125.000,00 - \\
 &\text{Rp}4.189.854.598,00 + \text{Rp}12.450.000,00 + \\
 &\text{Rp}67.071.507.510,00 + \text{Rp}426.122.800,00 + \\
 &\text{Rp}7.919.970,90 - \text{Rp}58.810.430.277,00 - \\
 &\text{Rp}8.494.838.683,00
 \end{aligned}$$

Tabel 5. 143 Perhitungan Selisih Pendapatan BLUD – LO

Nama SKPD	Keterangan		Jumlah (Rp)	Pendapatan BLUD - LO
1	2		3	4
Dinkes	Penambahan	Penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023	62.359.044.890,00	
		Penambahan piutang BLUD Puskesmas atas pendapatan kapitasi Jampersal/KB Tahun 2023 yang diterima Tahun 2024	205.401.287,00	
	Pengurangan	Pelunasan Piutang atas ketetapan Tahun 2023	62.180.879.305,00	
		Pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023	56.421.500,00	
		Pembayaran Piutang BLUD Puskesmas atas pendapatan kapitasi dan Jampersal/KB Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023	187.487.969,00	139.657.403,00
RSUD Merah Putih	Penambahan	Penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023	59.838.453.636,00	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nama SKPD	Keterangan		Jumlah (Rp)	Pendapatan BLUD - LO
1	2		3	4
RSUD Muntilan		Koreksi pencatatan kelebihan pembayaran piutang	8,00	
		Penambahan pendapatan atas penyisihan piutang yang dilunasi	1.624.500,00	
		Penambahan piutang atas pendapatan Klaim BPJS 2023 yang diterima di Tahun 2024	6.643.916.920,00	
	Pengurangan	Pelunasan Piutang Tahun 2023	58.234.115.501,00	
		Pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023	3.635.678.451,00	
		Pengurangan Piutang karena adanya keringanan piutang atas ketetapan Tahun 2023	117.104.469,00	
		Pengurangan piutang atas keringanan pasien an. Nur Azizah	1.125.000,00	
		Pembayaran piutang atas pendapatan klaim BPJS Tahun 2022 yang diterima Tahun 2023	4.189.854.598,00	306.117.045,00
	Penambahan	Penambahan Hibah tidak terikat dari UMM	12.450.000,00	
		Penambahan Piutang atas ketetapan Tahun 2023	67.071.507.510,00	
		Penambahan Piutang JKN atas klaim Susulan Nov dan Des 2023	426.122.800,00	
Penambahan pendapatan atas penyisihan piutang yang dilunasi		7.919.970,90		
Pelunasan Piutang Tahun 2023		58.810.430.277,00		
Pelunasan Piutang sebelum Tahun 2023		8.494.838.683,00	212.731.320,90	
Jumlah Total				658.505.768,90

Rincian Lain - lain PAD yang Sah – LO per obyek per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.77**.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.727.500.360.370,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.714.587.796.551,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp12.912.563.819,00 atau 0,75% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 144 Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.511.890.327.654,00	1.487.627.394.201,00	24.262.933.453,00	1,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	14.367.981.000,00	(14.367.981.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya - LO	201.980.771.716,00	193.430.585.350,00	8.550.186.366,00	4,42
Bantuan Keuangan - LO	13.629.261.000,00	19.161.836.000,00	(5.532.575.000,00)	(28,87)
Realisasi Pendapatan Transfer-LO	1.727.500.360.370,00	1.714.587.796.551,00	12.912.563.819,00	0,75



5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang Tahun 2023 sebesar Rp1.511.890.327.654,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.487.627.394.201,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp24.262.933.453,00 atau sebesar 1,63%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 145 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	42.974.145.000,00	46.969.580.507,00	(3.995.435.507,00)	(8,51)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.022.451.050.283,00	975.296.878.000,00	47.154.172.283,00	4,83
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	102.749.475.887,00	142.757.134.389,00	(40.007.658.502,00)	(28,02)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	343.715.656.484,00	322.603.801.305,00	21.111.855.179,00	6,54
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.511.890.327.654,00	1.487.627.394.201,00	24.262.933.453,00	1,63

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 146 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	42.974.145.000,00	45.162.178.236,00	(2.188.033.236,00)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.022.451.050.283,00	1.022.451.050.283,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO	102.749.475.887,00	102.749.475.887,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik - LO	343.715.656.484,00	343.715.656.484,00	0,00
Pendapatan Transfer PemerintahPusat - LO	1.511.890.327.654,00	1.514.078.360.890,00	(2.188.033.236,00)

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

Dana Bagi Hasil (DBH) – LO Tahun 2023 sebesar Rp42.974.145.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp46.969.580.507,00. Terdapat penurunan sebesar Rp3.995.435.507,00 atau sebesar 8,51%.

Selisih Dana Bagi Hasil (DBH) – LO drngan LRA sebesar (Rp2.188.033.236,00) karena adanya penyesuaian Pokok *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2022 dibayarkan Tahun 2023 sebesar Rp5.004.550.236,00 dan penambahan Transfer di Tahun 2023 sebesar Rp2.816.517.000,00 di BPPKAD.

$$(Rp2.188.033.236,00) = Rp2.816.517.000,00 - Rp5.004.550.236,00$$

5.4.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Dana Alokasi Umum (DAU) – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.022.451.050.283,00 dan untuk Tahun 2022 sebesar Rp975.296.878.000,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp47.154.172.283,00 atau sebesar 4,83%.

5.4.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Tahun 2023 sebesar Rp102.749.475.887,00 dan



Tahun 2022 sebesar Rp142.757.134.389,00. Terdapat penurunan sebesar Rp40.007.658.502,00 atau sebesar 28,02%.

5.4.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik – LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2023 sebesar Rp343.715.656.484,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp322.603.801.305,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp21.111.855.179,00 atau sebesar 6,54%.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp14.367.981.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp14.367.981.000,00 atau sebesar 100,00%.

Tabel 5. 147 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Dana Insentif Daerah (DID) – LO	0,00	14.367.981.000,00	(14.367.981.000,00)	(100,00)
Dana Desa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	14.367.981.000,00	(14.367.981.000,00)	(100,00)

Perbandingan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LO dan LRA dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 148 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Dana Insentif Daerah (DID) – LO	0,00	0,00	0,00
Dana Desa - LO	0,00	363.989.464.000,00	(363.989.464.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	363.989.464.000,00	(363.989.464.000,00)

5.4.1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Dana Insentif Daerah (DID) – LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp14.367.981.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp14.367.981.000,00 atau sebesar 100,00%.

5.4.1.2.2.2. Dana Desa - LO

Dana Desa untuk Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun 2022 sebesar Rp0,00 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan untuk rekening Dana Desa karena sesuai Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer, pendapatan tersebut merupakan kinerja Pemerintah Desa bukan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sehingga tidak diakui sebagai Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Selisih perbandingan Dana Desa – LO dengan LRA sebesar (Rp363.989.464.000,00) karena sesuai Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer, pendapatan tersebut merupakan kinerja Pemerintah Desa bukan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sehingga tidak diakui sebagai Pendapatan – LO.



5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO Tahun 2023 sebesar Rp215.610.032.716,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp212.592.421.350,00. terdapat kenaikan sebesar Rp3.017.611.366,00 atau sebesar 1,42%.

Tabel 5. 149 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah – Lainnya – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Bagi Hasil - LO	201.980.771.716,00	193.430.585.350,00	8.550.186.366,00	4,42
Bantuan Keuangan	13.629.261.000,00	19.161.836.000,00	(5.532.575.000,00)	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – Lainnya - LO	215.610.032.716,00	212.592.421.350,00	3.017.611.366,00	1,42

Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah - Lainnya - LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 150 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah – Lainnya - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Bagi Hasil - LO	201.980.771.716,00	197.843.915.918,00	4.136.855.798,00
Bantuan Keuangan	13.629.261.000,00	13.629.261.000,00	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah – Lainnya - LO	215.610.032.716,00	211.473.176.918,00	4.136.855.798,00

5.4.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2023 sebesar Rp201.980.771.716,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp193.430.585.350,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp8.550.186.366,00 atau sebesar 4,42%.

Pendapatan Bagi Hasil – LO merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 151 Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	50.675.568.220,00	49.265.833.520,00	1.409.734.700,00	2,86
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	24.899.975.619,00	24.475.947.863,00	424.027.756,00	1,73
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	59.332.063.907,00	50.635.417.208,00	8.696.646.699,00	17,18
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	399.630.149,00	357.211.098,00	42.419.051,00	11,88
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	66.673.533.821,00	68.696.175.661,00	(2.022.641.840,00)	(2,94)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	201.980.771.716,00	193.430.585.350,00	8.550.186.366,00	4,42



Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 152 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	50.675.568.220,00	50.358.962.010,00	316.606.210,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	24.899.975.619,00	25.243.192.213,00	(343.216.594,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	59.332.063.907,00	55.177.177.469,00	4.154.886.438,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	399.630.149,00	391.050.405,00	8.579.744,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	66.673.533.821,00	66.673.533.821,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	201.980.771.716,00	197.843.915.918,00	4.136.855.798,00

Penjelasan selisih perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO dengan LRA sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO dengan LRA sebesar Rp316.606.210,00 karena penambahan piutang Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp1.631.869.921,00 dan pelunasan piutang Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp1.315.263.711,00.
Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
 $Rp316.606.210,00 = Rp1.631.869.921,00 - Rp1.315.263.711,00$
2. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO dengan LRA sebesar (Rp343.216.594,00) karena penambahan piutang Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp384.532.910,00 dan pelunasan piutang Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp727.749.504.
Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
 $(Rp343.216.594,00) = Rp384.532.910,00 - Rp727.749.504.$
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO dengan LRA sebesar Rp4.154.886.438,00 karena penambahan piutang Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp4.796.176.546,00 dan pelunasan piutang Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp641.290.108,00.
Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
 $Rp4.154.886.438,00 = Rp4.796.176.546,00 - Rp641.290.108,00.$
4. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO
Selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - LO dengan LRA sebesar Rp8.579.744,00 karena penambahan piutang Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp17.204.966,00 dan pelunasan piutang Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp8.625.222,00.
Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
 $Rp8.579.744,00 = Rp17.204.966,00 - Rp8.625.222,00.$



5.4.1.2.3.2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan - LO Tahun 2023 sebesar Rp13.629.261.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.161.836.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp5.532.575.000,00 atau sebesar 28,87%.

Tabel 5. 153 Bantuan Keuangan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	13.629.261.000,00	0,00	13.629.261.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	19.161.836.000,00	(19.161.836.000,00)	(100,00)
Bantuan Keuangan - LO	13.629.261.000,00	19.161.836.000,00	(5.532.575.000,00)	(28,87)

1. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO

Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO Tahun 2023 sebesar Rp13.629.261.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp13.629.261.000,00 atau sebesar 100,00%.

2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.161.836.000,00. Terdapat penurunan sebesar Rp19.161.836.000,00 atau sebesar 100,00%.

5.4.1.3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp34.431.630.019,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp78.173.525.271,00. Terdapat penurunan sebesar Rp43.741.895.252,00 atau sebesar 55,95%.

Tabel 5. 154 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	33.220.476.878,00	77.598.045.755,00	(44.377.568.877,00)	(57,19)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	24.499.811,00	212.564.598,00	(188.064.787,00)	(88,47)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	1.006.653.330,00	362.914.918,00	643.738.412,00	177,38
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	34.431.630.019,00	78.173.525.271,00	(43.741.895.252,00)	(55,95)

5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp34.431.630.019,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp78.173.525.271,00. Terdapat penurunan sebesar Rp43.741.895.252,00 atau sebesar 55,95%.. Perbandingan Pendapatan Hibah pada LO dengan LRA disajikan sebagai berikut.



Tabel 5. 155 Perbandingan Pendapatan Hibah pada LO dan LRA

Uraian	LO TA 2023 (Rp)	LRA TA 2023 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	33.220.476.878,00	18.454.635.298,00	14.765.841.580,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	24.499.811,00	0,00	24.499.811,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO	1.006.653.330,00	0,00	1.006.653.330,00
Pendapatan Hibah - LO	34.431.630.019,00	18.454.635.298,00	15.976.994.721,00

Penjelasan perbandingan Pendapatan Hibah pada LO dengan LRA sebagai berikut.

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO
Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO dengan LRA sebesar Rp14.765.841.580,00 dikarenakan terdapat penerimaan Hibah yang diterima oleh SKPD yang tidak melalui Kas Daerah, yaitu sebagai berikut.
 - a. DPUPR sebesar Rp14.691.431.580,00 merupakan Hibah Barang sebesar Rp13.629.807.580,00 dan Hibah Persediaan sebesar Rp1.061.624.000,00
 - b. BPBD sebesar Rp48.110.000,00 merupakan Hibah Barang sebesar Rp35.900.000,00 dan Hibah Persediaan Rp12.210.000,00.
 - c. Distanpangan sebesar Rp26.300.000,00 berupa Hibah BarangSehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
$$\text{Rp14.765.841.580,00} = \text{Rp14.691.431.580,00} + \text{Rp48.110.000,00} + \text{Rp26.300.000,00}$$
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO dengan LRA sebesar Rp24.499.811,00 karena terdapat penerimaan Hibah di BPBD yang tidak melalui Kas Daerah berupa Hibah Persediaan.
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
Selisih Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri – LO dengan LRA sebesar Rp180.000.000,00 karena terdapat penerimaan Hibah di Disdikbud yang tidak dicatat melalui Kas Daerah, merupakan Hibah Barang berupa Gedung di SD N Danurejo 1.
4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO
Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri - LO sebesar Rp1.006.653.330,00 karena terdapat penerimaan Hibah yang diterima SKPD tidak melalui Kas Daerah, yaitu sebagai berikut.
 - a. Dinkes sebesar Rp350.633.330,00 berupa Hibah Barang
 - b. BPBD sebesar Rp431.975.000,00 berupa Hibah Persediaan sebesar Rp394.125.000,00 Hibah Barang sebesar Rp2.850.000,00 dan Hibah Uang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN sebesar Rp35.000.000,00.
 - c. DLH sebesar Rp168.650.000,00 berupa Hibah Barang
 - d. Dinsos PPKB PPPA sebesar Rp55.395.000,00 berupa Hibah Uang CSR dari BUMN



Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}1.006.653.330,00 = \text{Rp}350.633.330,00 + \text{Rp}431.975.000,00 + \text{Rp}168.650.000,00 + \text{Rp}55.395.000,00$$

Rincian Pendapatan Hibah dapat dilihat pada **Lampiran 5.78**.

5.4.2. Beban LO

Beban - LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.271.221.351.878,96 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.084.609.426.949,79. Terdapat kenaikan sebesar sebesar Rp186.611.924.929,17 atau sebesar 8,95% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.156 Beban – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Operasi – LO	1.725.340.156.404,94	1.551.292.213.974,40	174.047.942.430,54	11,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	251.841.529.633,02	239.959.608.176,39	11.881.921.456,63	4,95
Beban Transfer – LO	288.932.750.101,00	290.011.682.999,00	(1.078.932.898,00)	(0,37)
Beban Tak terduga – LO	5.106.915.740,00	3.345.921.800,00	1.760.993.940,00	52,63
Beban – LO	2.271.221.351.878,96	2.084.609.426.949,79	186.611.924.929,17	8,95

5.4.2.1. Beban Operasi - LO

Beban Operasi - LO Tahun 2023 sebesar Rp1.725.340.156.404,94 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.551.292.213.974,40. Terdapat kenaikan Beban Operasi – LO sebesar Rp174.047.942.430,54 atau 11,22% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.157 Beban Operasi – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pegawai - LO	978.812.092.911,00	902.388.893.548,59	76.423.199.362,41	8,47
Beban Barang dan Jasa – LO	566.085.787.784,85	498.116.663.767,36	67.969.124.017,49	13,65
Beban Hibah	171.924.053.108,00	132.691.580.779,00	39.232.472.329,00	29,57
Beban Bantuan Sosial	5.184.904.500,00	14.779.952.040,00	(9.595.047.540,00)	(64,92)
Beban Penyisihan Piutang	3.333.318.101,09	3.315.123.839,45	18.194.261,64	0,55
Beban Operasi - LO	1.725.340.156.404,94	1.551.292.213.974,40	174.047.942.430,54	11,22

Adapun rincian Beban Operasi – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 terdapat pada **Lampiran 5.79**.

5.4.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai - LO merupakan beban pegawai periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023. Beban Pegawai – LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai - LO terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai - LO sebesar Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2023 dan tidak termasuk



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan Belanja Pegawai yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan ditambah dengan utang Belanja Pegawai yang terjadi pada Tahun 2023.

Beban Pegawai – LO pada Tahun 2023 sebesar Rp978.812.092.911,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp902.388.893.548,59. Terdapat kenaikan Beban Pegawai – LO sebesar Rp76.423.199.362,41 atau 8,47% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Beban Pegawai – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	618.515.158.144,00	584.549.560.950,59	33.965.597.193,41	5,81
Beban Gaji Pokok ASN	465.025.859.194,00	444.207.145.322,00	20.818.713.872,00	4,69
Beban Tunjangan Keluarga ASN	40.430.611.038,00	38.456.531.189,00	1.974.079.849,00	5,13
Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.147.923.000,00	6.425.558.500,00	(1.277.635.500,00)	(19,88)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	38.721.144.900,00	31.476.239.230,00	7.244.905.670,00	23,02
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.377.810.400,00	5.438.171.500,00	(1.060.361.100,00)	(19,50)
Beban Tunjangan Beras ASN	25.565.779.470,00	23.762.539.683,00	1.803.239.787,00	7,59
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.793.474.155,00	4.362.107.058,00	431.367.097,00	9,89
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.306.761,00	5.737.915,00	568.846,00	9,91
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	30.604.332.058,00	26.837.381.916,59	3.766.950.141,41	14,04
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	960.485.507,00	1.174.982.953,00	(214.497.446,00)	(18,26)
Beban luran Jaminan Kematian ASN	2.881.431.661,00	2.403.165.684,00	478.265.977,00	19,90
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.574.686.567,00	60.131.230.874,00	5.443.455.693,00	9,05
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	263.535.814.581,00	176.712.698.811,00	86.823.115.770,00	49,13
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.002.322.991,00	5.569.533.364,00	2.432.789.627,00	43,68
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	694.702.372,00	2.906.178.203,00	(2.211.475.831,00)	(76,10)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.393.903.750,00	159.959.378.200,00	11.434.525.550,00	7,15
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	245.478.500,00	229.251.600,00	16.226.900,00	7,08
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.766.437.375,00	3.718.928.500,00	1.047.508.875,00	28,17
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	75.045.265.696,00	909.607.955,00	74.135.657.741,00	8.150,29
Beban Honorarium	2.489.700.000,00	3.009.885.000,00	(520.185.000,00)	(17,28)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	898.003.897,00	409.935.989,00	488.067.908,00	119,06
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.039.229.722,00	29.052.757.332,00	(13.527.610,00)	(0,05)
Beban Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	129.603.600,00	129.698.100,00	(94.500,00)	(0,07)
Beban Tunjangan Beras DPRD	132.528.600,00	157.513.500,00	(24.984.900,00)	(15,86)
Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.350.500,00	157.500,00	0,17
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.726.700,00	131.635.350,00	91.350,00	0,07



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.529.500,00	15.529.500,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.297.142,00	489.162,00	807.980,00	165,18
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.982.099.180,00	8.982.104.220,00	(5.040,00)	(0,00)
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.785.500.000,00	10.500.000,00	0,18
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.088.733.897,00	1.197.491.377,00	(108.757.480,00)	(9,08)
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	6.083.280,00	1.013.880,00	16,67
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.616.998,00	800.126,00	816.872,00	102,09
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00	1.920,00	120,00	6,25
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.897.023,00	7.448.400,00	448.623,00	6,02
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	839.965.305,00	935.892.636,00	(95.927.331,00)	(10,25)
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	71.686.091,00	86.795.735,00	(15.109.644,00)	(17,41)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.058.470.000,00	997.255.000,00	61.215.000,00	6,14
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	665.350.000,00	604.135.000,00	61.215.000,00	10,13
Beban Pegawai BLUD	0,00	49.747.899.204,00	(49.747.899.204,00)	(100,00)
Jumlah Beban Pegawai - LO	978.812.092.911,00	902.388.893.548,59	76.423.199.362,41	8,47

Adapun perbandingan antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 159 Perbandingan Beban Pegawai – LO dengan LRA

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	618.515.158.144,00	616.013.791.393,00	2.501.366.751,00
Beban Gaji Pokok ASN	465.025.859.194,00	465.034.989.994,00	(9.130.800,00)
Beban Tunjangan Keluarga ASN	40.430.611.038,00	40.431.524.118,00	(913.080,00)
Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.147.923.000,00	5.147.113.000,00	810.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	38.721.144.900,00	38.722.404.900,00	(1.260.000,00)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.377.810.400,00	4.377.810.400,00	0,00
Beban Tunjangan Beras ASN	25.565.779.470,00	25.566.213.990,00	(434.520,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.793.474.155,00	4.793.474.155,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	6.306.761,00	6.306.812,00	(51,00)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.604.332.058,00	28.091.949.199,00	2.512.382.859,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	960.485.507,00	960.507.422,00	(21.915,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.881.431.661,00	2.881.497.403,00	(65.742,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	65.574.686.567,00	65.574.686.567,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	263.535.814.581,00	188.178.548.885,00	75.357.265.696,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.002.322.991,00	8.002.322.991,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	694.702.372,00	694.702.372,00	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	171.393.903.750,00	171.393.903.750,00	0,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	245.478.500,00	245.478.500,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.766.437.375,00	4.766.437.375,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	75.045.265.696,00	0,00	75.045.265.696,00
Beban Honorarium	2.489.700.000,00	2.177.700.000,00	312.000.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	898.003.897,00	898.003.897,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.039.229.722,00	29.039.229.722,00	0,00
Beban Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	129.603.600,00	129.603.600,00	0,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	132.528.600,00	132.528.600,00	0,00
Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00	0,00
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	131.726.700,00	131.726.700,00	0,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.529.500,00	15.529.500,00	0,00
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	0,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.297.142,00	1.297.142,00	0,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.982.099.180,00	8.982.099.180,00	0,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.796.000.000,00	5.796.000.000,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.088.733.897,00	1.088.733.897,00	0,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	7.097.160,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.616.998,00	1.616.998,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00	2.040,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	7.897.023,00	7.897.023,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	839.965.305,00	839.965.305,00	0,00
Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	71.686.091,00	71.686.091,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.058.470.000,00	1.058.470.000,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	665.350.000,00	665.350.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	78.855.157.015,00	(78.855.157.015,00)
Jumlah Beban Pegawai - LO	978.812.092.911,00	979.808.617.479,00	(996.524.568,00)

Selisih antara Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA sebesar (Rp996.524.568,00) merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp4.665.313.209,00 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp5.661.837.777,00. Penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 160 Mutasi Beban Pegawai – LO

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai - LRA		979.808.617.479,00
Mutasi Tambah		
1	Utang Belanja Pegawai 2023	
	Utang Belanja Pegawai 2023 - Dinkes	1.913.828.080,00
	Utang Belanja Pegawai 2023 - RSUD Muntilan	2.750.642.729,00
	Utang Belanja Pegawai 2023 - Kec. Candimulyo	842.400,00
	Jumlah	4.665.313.209,00
Jumlah Mutasi Tambah		4.665.313.209,00
Mutasi Kurang		
1	Utang Belanja Jasa 2022 - RSUD Muntilan	4.404.707.171,00
2	Utang Belanja Pegawai 2022	
	Utang Belanja Pegawai 2022 - Dinkes	1.244.452.344,00
	Utang Belanja Pegawai 2022 - Satpol PP	12.278.262,00
	Jumlah	1.256.730.606,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
3	Reklas Beban Honorarium ke Aset Tetap - BPBD	400.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		5.661.837.777,00
Beban Pegawai – LO 2023		978.812.092.911,00

Penjelasan rincian Beban Pegawai – LO serta perbandingan antara LO dengan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Beban Gaji Pokok ASN
Selisih Beban Gaji Pokok ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp9.130.800,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
2. Beban Tunjangan Keluarga ASN
Selisih Beban Tunjangan Keluarga ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp913.080,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
3. Beban Tunjangan Jabatan ASN
Selisih Beban Tunjangan Jabatan ASN - LO dengan LRA sebesar Rp810.000,00 merupakan utang TA 2023 pada SKPD Kec. Candimulyo.
4. Beban Tunjangan Fungsional ASN
Selisih Beban Tunjangan Fungsional ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp1.260.000,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
5. Beban Tunjangan Beras ASN
Selisih Beban Tunjangan Beras ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp434.520,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
6. Beban Pembulatan Gaji ASN
Selisih Beban Pembulatan Gaji ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp51,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
7. Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Selisih Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN – LO dengan LRA sebesar Rp2.512.382.859,00 merupakan penambahan utang TA 2023 pada Dinkes (RSD Merah Putih) sebesar Rp42.098.785,00, RSUD Muntilan sebesar Rp92.308.928,00 dan Kec. Candimulyo sebesar Rp32.400,00 serta reklas dari Belanja Pegawai BLUD pada Dinkes (RSD Merah Putih) sebesar Rp1.895.948.716,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp512.806.434,00. Pengurangan dari pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP sebesar Rp452.154,00 dan Dinkes (RSD Merah Putih) sebesar Rp30.360.250,00.
Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:
$$\text{Rp2.512.382.859,00} = \text{Rp42.098.785,00} + \text{Rp92.308.928,00} + \text{Rp32.400,00} + \text{Rp1.895.948.716,00} + \text{Rp512.806.434,00} - \text{Rp452.154,00} - \text{Rp30.360.250,00}$$
8. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
Selisih Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp21.915,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
9. Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
Selisih Beban Iuran Jaminan Kematian ASN – LO dengan LRA sebesar (Rp65.742,00) merupakan pembayaran utang TA 2022 pada SKPD Satpol PP.
10. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
Selisih Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN – LO dengan LRA sebesar Rp75.045.265.696,00 merupakan penambahan utang TA 2023 pada Dinkes (RSD Merah Putih) sebesar Rp1.871.729.295,00, RSUD Muntilan sebesar Rp2.658.333.801,00 reklas dari Belanja Pegawai BLUD pada Dinkes sebesar Rp53.217.447.586,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp22.916.554.279,00. Pengurangan dari pembayaran utang TA 2022 pada Dinkes (RSD Merah Putih) sebesar Rp1.214.092.094,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp4.404.707.171,00.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Rp}75.045.265.696,00 &= \text{Rp}1.871.729.295,00 &+& \text{Rp}2.658.333.801,00 &+ \\ &\text{Rp}53.217.447.586,00 &+& \text{Rp}22.916.554.279,00 &- \\ &\text{Rp}1.214.092.094,00 &-& \text{Rp}4.404.707.171,00 & \end{aligned}$$

11. Beban Honorarium

Selisih Beban Honorarium – LO dengan LRA sebesar Rp312.000.000,00 merupakan reklas dari Belanja Pegawai BLUD pada Dinkes sebesar Rp175.400.000,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp137.000.000,00. Pengurangan karena reklas ke Aset Tetap pada BPBD sebesar Rp400.000,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\text{Rp}312.000.000,00 = \text{Rp}175.400.000,00 + \text{Rp}137.000.000,00 - \text{Rp}400.000,00$$

12. Beban Pegawai BLUD

Selisih Beban Pegawai BLUD – LO dengan LRA sebesar (Rp78.855.157.015,00) merupakan reklas ke Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada Dinkes sebesar Rp1.895.948.716,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp512.806.434,00. Reklas ke Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada Dinkes sebesar Rp53.217.447.586,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp22.916.554.279,00. Reklas ke rekening Beban Honorarium pada Dinkes sebesar Rp175.400.000,00 dan RSUD Muntilan sebesar Rp137.000.000,00.

Sehingga total selisih LRA dan LO sebesar:

$$\begin{aligned} (\text{Rp}78.855.157.015,00) &= 0 &-& \text{Rp}1.895.948.716,00 &-& \text{Rp}512.806.434,00 &- \\ &&& \text{Rp}53.217.447.586,00 &-& \text{Rp}22.916.554.279,00 &- \\ &&& \text{Rp}175.400.000,00 &-& \text{Rp}137.000.000,00 & \end{aligned}$$

Rincian Beban Pegawai - LO per SPKD terdapat dalam **Lampiran 5.80**.

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa - LO

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp566.085.787.784,85 dan Tahun 2022 sebesar Rp498.116.663.767,36. Terdapat kenaikan Beban Barang dan Jasa – LO sebesar Rp67.969.124.017,49 atau 13,65% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 161 Beban Barang dan Jasa – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Barang	143.077.598.170,10	114.434.082.056,36	28.643.516.113,74	25,03
Beban Jasa	245.291.760.381,75	232.129.539.837,00	13.162.220.544,75	5,67
Beban Pemeliharaan	41.508.601.571,00	30.935.799.982,00	10.572.801.589,00	34,18
Beban Perjalanan Dinas	46.280.580.031,00	32.283.038.569,00	13.997.541.462,00	43,36
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.900.804.982,00	19.135.022.547,00	2.765.782.435,00	14,45
Beban Barang dan Jasa BOS	68.026.442.649,00	69.199.180.776,00	(1.172.738.127,00)	(1,69)
Beban Barang dan Jasa - LO	566.085.787.784,85	498.116.663.767,36	67.969.124.017,49	13,65

1. Beban Barang

Beban Barang yaitu beban yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor. Barang *extracomptable* adalah barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Beban Barang Tahun 2023 sebesar Rp143.077.598.170,10 dan Tahun 2022 sebesar Rp114.434.082.056,36. Terdapat kenaikan sebesar Rp28.643.516.113,74 atau sebesar 25,03% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 162 Beban Barang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Barang Pakai Habis	142.952.045.951,10	114.162.449.384,36	28.789.596.566,74	25,22
Beban Barang Tak Habis Pakai	125.552.219,00	271.632.672,00	(146.080.453,00)	(53,78)
Beban Barang - LO	143.077.598.170,10	114.434.082.056,36	28.643.516.113,74	25,03

Adapun perbandingan antara Beban Barang – LO dengan Belanja Barang – LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 163 Perbandingan Beban Barang – LO dengan Belanja
Barang – LRA**

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Barang Pakai Habis	142.952.045.951,10	73.354.500.351,00	69.597.545.600,10
Beban Barang Tak Habis Pakai	125.552.219,00	0,00	125.552.219,00
Beban Barang - LO	143.077.598.170,10	73.354.500.351,00	69.723.097.819,10

Selisih antara Beban Barang – LO dengan Belanja Barang – LRA sebesar Rp69.723.097.819,10 merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp119.638.884.284,64 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp49.915.786.465,54. Adapun penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 164 Mutasi Beban Barang

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja Barang – LRA		73.354.500.351,00
Mutasi Tambah		
1	Persediaan Awal 2023 (Reff: Persediaan – Neraca 2022)	53.193.828.961,64
2	Belanja Barang dari Dana BOS - Disdikbud	506.659.766,00
3	Belanja Barang dari BLUD	
	Belanja Barang Pakai Habis BLUD - Dinkes	28.108.437.998,00
	Belanja Barang Tak Habis Pakai BLUD - Dinkes	49.545.800,00
	Belanja Barang BLUD - RSUD Muntilan	31.246.710.946,00
	Jumlah	59.404.694.744,00
4	Reklas dari Beban Pemeliharaan	
	Reklas dari Beban Pemeliharaan - DLH	34.106.800,00
	Reklas dari Beban Pemeliharaan - DPU PR	1.738.687.500,00
	Jumlah	1.772.794.300,00
5	Pendapatan dari hasil perkembangbiakan bibit	
	Penambahan Nilai Persediaan Bibit Ikan – Dispeterikan	110.055.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	
	Penambahan Persediaan Bibit Anggrek – Distanpangan	55.132.050,00	
	Jumlah		165.187.050,00
6	Reklas dari Beban Hibah - Bakesbangpol		1.330.436.600,00
7	Reklas dari Aset Tetap		
	Reklas dari Aset Tetap - Dinkes	8.243.925,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Satpol PP	228.900.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - BPBD	660.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Distan Pangan	4.930.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - DLH	9.120.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Dishub	923.290.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - DPMPSTP	1.841.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Dispeterikan	1.725.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Setda	200.000,00	
	Reklas dari Aset Tetap - Set DPRD	32.621.500,00	
	Jumlah		1.211.531.425,00
8	Barang <i>Extracomptable</i> (Beban Barang Tak Habis Pakai)		
	Barang <i>Extracomptable</i> - Disdikbud	38.018.081,00	
	Barang <i>Extracomptable</i> - Dinkes	35.598.338,00	
	Barang <i>Extracomptable</i> - BPBD	200.000,00	
	Barang <i>Extracomptable</i> - Diskominfo	2.190.000,00	
	Jumlah		76.006.419,00
9	Pendapatan Hibah		
	Pendapatan Hibah - DPU PR	1.061.624.000,00	
	Pendapatan Hibah - BPBD	465.834.811,00	
	Pendapatan Hibah - Dinsos	15.000.000,00	
	Jumlah		1.542.458.811,00
10	Utang Belanja Barang 2023 (<i>Reff:</i> Utang Belanja Barang – Neraca 2023)		435.286.208,00
Jumlah Mutasi Tambah			119.638.884.284,64
Mutasi Kurang			
1	Persediaan Akhir 2023 (<i>Reff:</i> Persediaan – Neraca 2023)		49.145.680.749,54
2	Reklas ke Beban Jasa - Dinkes		748.400,00
3	Reklas ke Aset Tetap		
	Reklas ke Aset Tetap - DLH	5.000.000,00	
	Reklas ke Aset Tetap - Disdikbud	100.070.525,00	
	Jumlah		105.070.525,00
4	Reklas ke Beban Barang dan Jasa BOS atas persediaan BOS 2022 - Disdikbud		579.314.766,00
5	Utang Belanja Barang 2022 (<i>Reff:</i> Utang Belanja Barang – Neraca 2022)		84.972.025,00
Jumlah Mutasi Kurang			49.915.786.465,54
Beban Barang – LO 2023			143.077.598.170,10



Rincian Beban Barang Pakai Habis terdapat dalam **Lampiran 5.81**.

Sedangkan rincian Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

No	Nama SKPD	Beban Barang Tak Habis Pakai - LO		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
1	Disdikbud	38.018.081,00	77.003.500,00	(38.985.419,00)	(50,63)
2	Dinkes	85.144.138,00	137.284.172,00	(52.140.034,00)	(37,98)
3	Satpol PP	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
4	BPBD	200.000,00	249.000,00	(49.000,00)	(19,68)
5	Diskominfo	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	100,00
6	DPMPTSP	0,00	3.996.000,00	(3.996.000,00)	(100,00)
7	Disparpora	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
8	Setda	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
9	Kec. Grabag	0,00	18.600.000,00	(18.600.000,00)	(100,00)
10	Kec. Secang	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Jumlah Beban Barang Tak Habis Pakai		125.552.219,00	271.632.672,00	(146.080.453,00)	(53,78)

Beban barang tak habis pakai Tahun 2023 di SKPD Dinkes sebesar Rp85.144.138,00 merupakan beban barang tak habis pakai di RSUD Merah Putih sebesar Rp49.545.800,00 dan barang *extracomptable* di Dinkes senilai Rp37.988.338,00. Sedangkan beban barang tak habis pakai yang ada di SKPD Disdikbud sebesar Rp38.018.081,00, SKPD BPBD sebesar Rp200.000,00 dan SKPD Diskominfo sebesar Rp2.190.000,00 merupakan barang *extracomptable*.

Rincian Beban Barang per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.82**.

2. Beban Jasa

Beban Jasa yaitu beban yang terkait baik dengan kebutuhan operasional kantor dan kegiatan pelayanan utama/tusi utama suatu instansi.

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp245.291.760.381,75 dan Tahun 2022 sebesar Rp232.129.539.837,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp13.162.220.544,75 atau sebesar 5,67% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 166 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Jasa Kantor	173.202.391.173,00	184.683.133.715,00	(11.480.742.542,00)	(6,22)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.681.145.051,00	26.351.538.097,00	15.329.606.954,00	58,17
Beban Sewa Tanah	534.798.718,75	224.013.100,00	310.785.618,75	138,74
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.552.484.565,00	1.540.356.384,00	1.012.128.181,00	65,71
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	430.581.000,00	190.011.250,00	240.569.750,00	126,61
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	180.590.000,00	103.763.000,00	76.827.000,00	74,04



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.237.930.342,00	1.190.790.359,00	47.139.983,00	3,96
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.434.079.477,00	3.264.105.784,00	1.169.973.693,00	35,84
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.573.627.050,00	1.301.592.650,00	272.034.400,00	20,90
Beban Ketersediaan layanan	116.800.000,00	81.600.000,00	35.200.000,00	43,14
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.198.024.095,00	13.132.162.094,00	6.065.862.001,00	46,19
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	149.308.910,00	66.473.404,00	82.835.506,00	124,61
Beban Jasa - LO	245.291.760.381,75	232.129.539.837,00	13.162.220.544,75	5,67

Adapun perbandingan antara Beban Jasa – LO dengan Belanja Jasa – LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 167 Perbandingan Beban Jasa – LO dengan Belanja
Jasa – LRA**

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Jasa Kantor	173.202.391.173,00	140.949.822.100,00	32.252.569.073,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.681.145.051,00	36.917.315.173,00	4.763.829.878,00
Beban Sewa Tanah	534.798.718,75	503.300.000,00	31.498.718,75
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.552.484.565,00	2.157.370.293,00	395.114.272,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	430.581.000,00	429.081.000,00	1.500.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	180.590.000,00	180.590.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.237.930.342,00	991.624.424,00	246.305.918,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.434.079.477,00	3.696.718.950,00	737.360.527,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	1.573.627.050,00	300.000,00	1.573.327.050,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	116.800.000,00	116.800.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.198.024.095,00	16.343.343.816,00	2.854.680.279,00
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	149.308.910,00	149.308.910,00	0,00
Beban Jasa - LO	245.291.760.381,75	202.435.574.666,00	42.856.185.715,75

Selisih antara Beban Jasa – LO dengan Belanja Jasa – LRA sebesar Rp42.856.185.715,75 merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp47.650.974.855,00 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp4.794.789.139,25.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 168 Mutasi Beban Jasa

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	
Belanja Jasa - LRA			202.435.574.666,00
Mutasi Tambah			
1	Utang Belanja Jasa 2023 (Neraca)		4.346.680.688,00
2	Reklas dari Beban Barang - Dinkes		748.400,00
3	Reklas dari Aset Tak Berwujud - DPU PR		198.024.000,00
4	Pengurangan Beban Dibayar Dimuka 2022		
	Beban Dibayar Dimuka 2022 - Dinkes	4.026.151.478,00	
	Beban Dibayar Dimuka 2022 - DPU PR	36.855.000,00	
	Beban Dibayar Dimuka 2022 - Disdagkop UKM	5.300.000,00	
	Jumlah		4.068.306.478,00
5	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD		
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - Dinkes	22.526.176.296,00	
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - RSUD Munttilan	16.511.038.993,00	
	Jumlah		39.037.215.289,00
Jumlah Mutasi Tambah			47.650.974.855,00
Mutasi Kurang			
1	Utang Belanja Jasa 2022 (Neraca)		4.286.059.031,25
2	Utang Belanja Pegawai 2022 - RSUD Munttilan		52.857.168,00
3	Penambahan Beban Dibayar Dimuka 2023 - DLH		10.045.500,00
4	Reklas ke Aset Tetap - BPPKAD		371.335.000,00
5	Reklas ke KDP		
	Reklas ke KDP - BPPKAD	18.492.440,00	
	Reklas ke KDP - DPU PR	56.000.000,00	
	Jumlah		74.492.440,00
Jumlah Mutasi Kurang			4.794.789.139,25
Beban Jasa - LO 2023			245.291.760.381,75

Rincian Beban Jasa per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.83**.

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yaitu beban yang digunakan untuk pemeliharaan Aset Tetap atau Aset Lainnya milik suatu instansi atau yang dipergunakan oleh suatu instansi. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp41.508.601.571,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp30.935.799.982,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp10.572.801.589,00 atau sebesar 34,18% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 169 Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pemeliharaan Tanah	-	146.300.000,00	(146.300.000,00)	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.349.304.341,00	9.442.558.572,00	7.906.745.769,00	83,74
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.890.473.602,00	8.340.567.182,00	(450.093.580,00)	(5,40)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.777.006.242,00	13.006.374.228,00	2.770.632.014,00	21,30
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	491.817.386,00	0,00	491.817.386,00	100,00
Beban Pemeliharaan - LO	41.508.601.571,00	30.935.799.982,00	10.572.801.589,00	34,18

Adapun perbandingan antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 170 Perbandingan Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.349.304.341,00	12.260.633.013,00	5.088.671.328,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.890.473.602,00	4.111.555.416,00	3.778.918.186,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.777.006.242,00	16.244.809.078,00	(467.802.836,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	491.817.386,00	483.492.386,00	8.325.000,00
Beban Pemeliharaan - LO	41.508.601.571,00	33.100.489.893,00	8.408.111.678,00

Selisih antara Beban Pemeliharaan – LO dengan Belanja Pemeliharaan – LRA sebesar Rp8.408.111.678,00 merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp10.550.004.634,00 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp2.141.892.956,00. Adapun penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 171 Mutasi Beban Pemeliharaan

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja Pemeliharaan - LRA		33.100.489.893,00
Mutasi Tambah		
1	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - Dinkes	5.804.734.185,00
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - RSUD Muntilan	4.442.832.856,00
	Jumlah	10.247.567.041,00
2	Reklas dari Aset Tetap	
	Reklas dari Aset Tetap - Disdikbud	43.201.500,00
	Reklas dari Aset Tetap - Dinkes	15.505.500,00
	Reklas dari Aset Tetap - DPU PR	107.742.000,00
	Reklas dari Aset Tetap - Dishub	72.301.734,00
	Reklas dari Aset Tetap - Disparpora	37.595.859,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	
	Reklas dari Aset Tetap - Kec. Secang	8.385.000,00	
	Jumlah		284.731.593,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan 2023 - RSUD Munttilan		17.706.000,00
Jumlah Mutasi Tambah			10.550.004.634,00
Mutasi Kurang			
1	Reklas ke Beban Barang		
	Reklas ke Beban Barang - DPU PR	1.738.687.500,00	
	Reklas ke Beban Barang - DLH	34.106.800,00	
	Jumlah		1.772.794.300,00
2	Reklas ke Aset Tetap		
	Reklas ke Aset Tetap - DLH	87.200.000,00	
	Reklas ke Aset Tetap - Disdukcapil	100.898.656,00	
	Reklas ke Aset Tetap - DPMPSTSP	181.000.000,00	
	Jumlah		369.098.656,00
Jumlah Mutasi Kurang			2.141.892.956,00
Beban Pemeliharaan 2023			41.508.601.571,00

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.84**.

4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional instansi maupun yang berhubungan dengan tugas dan fungsi utama suatu instansi.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp46.280.580.031,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp32.283.038.569,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp13.997.541.462,00 sebesar 43,36% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 172 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Perjalanan Dinas dalam Negeri	46.280.580.031,00	32.283.038.569,00	13.997.541.462,00	43,36
Beban Perjalanan Dinas	46.280.580.031,00	32.283.038.569,00	13.997.541.462,00	43,36

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas – LRA tahun 2023 sebesar Rp45.146.545.982,00. Selisih sebesar Rp1.134.034.049,00 dengan Beban Perjalanan Dinas – LO yang merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD pada SKPD Dinkes sebesar Rp992.117.330,00 dan RSUD Munttilan sebesar Rp141.916.719,00.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD pada **Lampiran 5.85**.

5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan /Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp21.900.804.982,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp19.135.022.547,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp2.765.782.435,00 atau 14,45% dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 173 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.456.623.959,00	15.881.634.105,00	(1.425.010.146,00)	(8,97)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.444.181.023,00	3.253.388.442,00	4.190.792.581,00	128,81
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.900.804.982,00	19.135.022.547,00	2.765.782.435,00	14,45

Adapun perbandingan antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 174 Perbandingan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=2-3
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.456.623.959,00	14.412.612.250,00	44.011.709,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.444.181.023,00	2.805.146.046,00	4.639.034.977,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	21.900.804.982,00	17.217.758.296,00	4.683.046.686,00

Selisih antara Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LRA sebesar Rp4.683.046.686,00 merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp4.809.946.422,00 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp126.899.736,00. Adapun penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 175 Mutasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	17.217.758.296,00
	Mutasi Tambah	
1	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD	
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - Dinkes	2.744.022.660,00
	Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD - RSUD Munttilan	1.880.138.432,00
	Jumlah	4.624.161.092,00
2	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2023	



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)	
	Utang 2023 - Dinkes	184.887.470,00	
	Utang 2023 - RSUD Muntilan	897.860,00	
	Jumlah		185.785.330,00
Jumlah Mutasi Tambah			4.809.946.422,00
Mutasi Kurang			
1	Utang Belanja Jasa 2022 - RSUD Muntilan		1.168.240,00
2	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2022 - Dinkes		125.731.496,00
Jumlah Mutasi Kurang			126.899.736,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2023			21.900.804.982,00

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD pada **Lampiran 5.86**.

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebesar Rp68.026.442.649,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp69.199.180.776,00. Terdapat penurunan sebesar Rp1.172.738.127,00 atau 1,69%. Beban Barang dan Jasa BOS ada di SKPD Disdiskbud.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS – LRA tahun 2023 sebesar Rp67.884.590.800,00. Selisih sebesar Rp141.851.849,00 dengan Beban Barang dan Jasa BOS – LO, merupakan jumlah mutasi tambah sebesar Rp1.050.458.427,00 dikurangi jumlah mutasi kurang sebesar Rp908.606.578,00. Adapun penjelasan rinci mengenai mutasi tambah dan mutasi kurang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 176 Mutasi Beban Barang dan Jasa BOS

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS - LRA		67.884.590.800,00
Mutasi Tambah		
1	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS 2023	430.876.961,00
2	Reklas dari Aset Tetap	40.266.700,00
3	Reklas dari beban barang atas Persediaan Barang Habis Pakai BOS 2022	579.314.766,00
Jumlah Mutasi Tambah		1.050.458.427,00
Mutasi Kurang		
1	Persediaan Barang Pakai Habis BOS 2023	506.659.766,00
2	Reklas ke Aset Tetap	1.180.000,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS 2022	400.766.812,00
Jumlah Mutasi Kurang		908.606.578,00
Beban Barang dan Jasa BOS – LO 2023		68.026.442.649,00

5.4.2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp171.924.053.108,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp132.691.580.779,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp39.232.472.329,00 atau 29,57% dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.177 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.579.000.000,00	6.479.000.000,00	100.000.000,00	1,54
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	198.640.000,00	784.000.000,00	(585.360.000,00)	(74,66)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.294.630.864,00	39.768.188.500,00	35.526.442.364,00	89,33
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.088.545.800,00	5.927.939.500,00	160.606.300,00	2,71
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.836.859.903,00	51.616.484.067,00	3.220.375.836,00	6,24
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	100,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.426.645.541,00	25.816.237.712,00	610.407.829,00	2,36
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah - LO	171.924.053.108,00	132.691.580.779,00	39.232.472.329,00	29,57

Adapun perbandingan antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Perbandingan Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=3-2
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	6.579.000.000,00	6.579.000.000,00	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	198.640.000,00	1.529.076.600,00	1.330.436.600,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.294.630.864,00	75.294.630.864,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.088.545.800,00	6.088.545.800,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	54.836.859.903,00	54.836.859.903,00	0,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.426.645.541,00	26.426.645.541,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.299.731.000,00	2.299.731.000,00	0,00
Beban Hibah	171.924.053.108,00	173.254.489.708,00	1.330.436.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Selisih antara Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah – LRA sebesar Rp1.330.436.600,00 merupakan hibah tanah di SKPD Bakesbangpol yang belum diserahkan, sehingga menjadi Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya. Rincian Beban Hibah per SKPD terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 179 Beban Hibah per SKPD

No	Nama SKPD	Beban Hibah - LO		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	Disdikbud	70.946.396.405,00	64.697.766.212,00	6.248.630.193,00	9,66
2	Dinkes	200.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	33,33
3	DPU PR	21.497.300.000,00	18.753.536.300,00	2.743.763.700,00	14,63
4	Satpol PP	225.000.000,00	135.000.000,00	90.000.000,00	66,67
5	BPBD	32.100.000,00	32.500.000,00	(400.000,00)	(1,23)
6	Dinsos	20.000.000,00	40.217.500,00	(20.217.500,00)	(50,27)
7	Disperinnaker	431.559.440,00	651.300.000,00	(219.740.560,00)	(33,74)
8	Distanpangan	18.671.429.263,00	26.095.169.767,00	(7.423.740.504,00)	(28,45)
9	DLH	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	100,00
10	Dispermades	1.960.500.000,00	868.500.000,00	1.092.000.000,00	125,73
11	Dishub	199.488.000,00	129.500.000,00	69.988.000,00	54,04
12	Disparpora	4.680.065.000,00	2.303.960.000,00	2.376.105.000,00	103,13
13	Dispeterikan	1.447.900.000,00	744.550.000,00	703.350.000,00	94,47
14	Setda	19.708.380.000,00	15.739.850.000,00	3.968.530.000,00	25,21
15	BKPPD	128.900.000,00	0,00	128.900.000,00	100,00
16	Bakesbangpol	31.681.035.000,00	2.349.731.000,00	29.331.304.000,00	1.248,28
Jumlah Beban Hibah - LO		171.924.053.108,00	132.691.580.779,00	39.232.472.329,00	29,57

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp5.184.904.500,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp14.779.952.040,00. Terdapat penurunan Rp9.595.047.540,00 atau 64,92% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 180 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.175.895.000,00	3.708.200.000,00	(2.532.305.000,00)	(68,29)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	468.925.000,00	93.070.440,00	375.854.560,00	403,84
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.916.175.000,00	10.737.146.600,00	(7.820.971.600,00)	(72,84)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	623.909.500,00	241.535.000,00	382.374.500,00	158,31
Beban Bantuan Sosial - LO	5.184.904.500,00	14.779.952.040,00	(9.595.047.540,00)	(64,92)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun perbandingan antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Perbandingan Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=3-2
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.175.895.000,00	1.135.500.000,00	(40.395.000,00)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	468.925.000,00	468.925.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.916.175.000,00	2.916.175.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	623.909.500,00	623.909.500,00	0,00
Beban Bantuan Sosial - LO	5.184.904.500,00	5.144.509.500,00	(40.395.000,00)

Selisih antara Beban Bantuan Sosial – LO dengan Belanja Bantuan Sosial – LRA sebesar (Rp40.395.000,00) merupakan penambahan beban bantuan sosial yang berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) di SKPD Dinsos. Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 182 Beban Bantuan Sosial per SKPD

No	Nama SKPD	Beban Bantuan Sosial - LO		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	Disdikbud	487.675.000,00	688.350.000,00	(200.675.000,00)	(29,15)
2	Dinkes	2.322.000.000,00	367.000.000,00	1.955.000.000,00	532,70
3	DPRKP	0,00	8.955.796.600,00	(8.955.796.600,00)	(100,00)
4	Dinsos	2.301.229.500,00	1.544.405.440,00	756.824.060,00	49,00
5	Dishub	0,00	245.700.000,00	(245.700.000,00)	(100,00)
6	Disdagkop UKM	0,00	2.066.850.000,00	(2.066.850.000,00)	(100,00)
7	Dispeterikan	74.000.000,00	911.850.000,00	(837.850.000,00)	(91,88)
Jumlah Beban Bantuan Sosial - LO		5.184.904.500,00	14.779.952.040,00	(9.595.047.540,00)	(64,92)

5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih *Net Realizable Value* (NRV)

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.333.318.101,09 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.315.123.839,45. Terdapat kenaikan sebesar Rp18.194.261,64 atau 0,55% dengan rincian sebagai berikut.



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5. 183 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.873.988.850,19	3.058.077.075,10	(184.088.224,91)	(6,02)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	57.325.167,60	30.681.775,25	26.643.392,35	86,84
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	402.004.083,30	226.364.989,10	175.639.094,20	77,59
Beban Penyisihan Piutang - LO	3.333.318.101,09	3.315.123.839,45	18.194.261,64	0,55

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5. 184 Beban Penyisihan Piutang per SKPD

No	Nama SKPD	Beban Penyisihan Piutang - LO		Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4*100
1	Dinkes	119.923.968,90	12.071.222,70	107.852.746,20	893,47
2	RSUD Muntilan	282.080.114,40	214.293.766,40	67.786.348,00	31,63
3	Dishub	4.300.500,00	3.575.850,00	724.650,00	20,27
4	Diskominfo	0,00	2.599.002,00	(2.599.002,00)	(100,00)
5	Disdagkop UKM	50.408.242,00	23.524.465,25	26.883.776,75	114,28
6	Dispeterikan	2.616.425,60	982.458,00	1.633.967,60	166,31
7	BPPKAD	2.873.988.850,19	3.058.077.075,10	(184.088.224,91)	(6,02)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang - LO		3.333.318.101,09	3.315.123.839,45	18.194.261,64	0,55

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp251.841.529.633,02 dan Tahun 2022 sebesar Rp239.959.608.176,39. Terdapat kenaikan sebesar Rp11.881.921.456,63 atau 4,95% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 185 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	123.313.989.204,63	117.358.229.068,32	5.955.760.136,31	5,07
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40.787.687.960,75	39.211.908.046,33	1.575.779.914,42	4,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.402.558.638,79	82.008.053.333,74	3.394.505.305,05	4,14
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	65.627.958,50	0,00	65.627.958,50	100,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.271.665.870,35	1.381.417.728,00	890.248.142,35	64,44
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	251.841.529.633,02	239.959.608.176,39	11.881.921.456,63	4,95



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Masing masing akun Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut.

5.4.2.2.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk TA 2023 sebesar Rp123.313.989.204,63 dan TA 2022 sebesar Rp117.358.229.068,32. Terdapat kenaikan sebesar Rp5.955.760.136,31 atau 5,07% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 186 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Alat Besar	3.132.578.261,59	3.210.801.870,01	(78.223.608,42)	(2,44)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	10.000.279.710,82	10.382.068.941,18	(381.789.230,36)	(3,68)
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	886.177.277,39	921.545.003,79	(35.367.726,40)	(3,84)
Beban Penyusutan Alat Pertanian	75.915.143,00	250.574.143,00	(174.659.000,00)	(69,70)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.973.507.327,47	25.357.455.981,47	1.616.051.346,00	6,37
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.092.986.852,89	3.599.605.969,59	493.380.883,30	13,71
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	49.142.481.356,60	43.205.936.994,30	5.936.544.362,30	13,74
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.360.920.994,05	4.154.614.924,97	206.306.069,08	4,97
Beban Penyusutan	7.904.666,67	6.021.150,66	1.883.516,01	31,28
Beban Penyusutan Komputer	23.910.134.945,00	25.218.302.916,25	(1.308.167.971,25)	(5,19)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	550.350,00	550.350,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	117.022.705,00	94.624.770,00	22.397.935,00	23,67
Beban Penyusutan Alat Peraga	5.609.762,40	5.609.762,40	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	15.976.312,50	12.776.812,50	3.199.500,00	25,04
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	358.869.302,68	746.727.607,75	(387.858.305,07)	(51,94)
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	233.074.236,57	191.011.870,45	42.062.366,12	22,02
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	123.313.989.204,63	117.358.229.068,32	5.955.760.136,31	5,07

5.4.2.2.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp40.787.687.960,75 Tahun 2022 sebesar Rp39.211.908.056,33. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.575.779.914,42 atau 4,02% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 187 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	40.362.947.911,13	38.835.425.888,45	1.527.522.022,68	3,93
Beban Penyusutan Monumen	69.990.364,30	67.819.013,08	2.171.351,22	3,20
Beban Penyusutan Bangunan Menara	13.098.800,80	13.098.800,80	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	341.650.884,52	295.564.344,00	46.086.540,52	15,59
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	40.787.687.960,75	39.211.908.046,33	1.575.779.914,42	4,02

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terdiri dari Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Aset Tetap sebesar Rp 40.733.229.760,75 dan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan atas Aset Properti Investasi sebesar Rp54.458.200,00.

5.4.2.2.3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp85.402.558.638,79 dan Tahun 2022 sebesar Rp82.008.053.333,74. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.394.505.305,05 atau 4,14 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 188 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.912.367.006,28	56.998.373.387,01	3.913.993.619,27	6,87
Beban Penyusutan Bangunan Air	22.998.428.796,81	23.593.262.211,27	(594.833.414,46)	(2,52)
Beban Penyusutan Instalasi	997.175.833,24	920.853.232,93	76.322.600,31	8,29
Beban Penyusutan Jaringan	494.587.002,46	495.564.502,53	(977.500,07)	(0,20)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi - LO	85.402.558.638,79	82.008.053.333,74	3.394.505.305,05	4,14

5.4.2.2.4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp65.627.958,50 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp65.627.958,50 atau 100%. Beban penyusutan tersebut merupakan beban penyusutan atas Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga berupa alat musik modern yang ada di SKPD Disdikbud.

5.4.2.2.5. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp2.271.665.870,35 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.381.417.728,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp890.248.142,35 atau 64,44% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 189 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	1.022.610.043,75	760.529.728,00	262.080.315,75	34,46
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.249.055.826,60	620.888.000,00	628.167.826,60	101,17
Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - LO	2.271.665.870,35	1.381.417.728,00	890.248.142,35	64,44

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD terdapat dalam **Lampiran 5.87**.



5.4.2.3. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban transfer Tahun 2023 yang diberikan kepada provinsi, pemerintah desa dan partai politik.

Beban Transfer Tahun 2023 sebesar Rp288.932.750.101,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp290.011.682.999,00. Terdapat penurunan sebesar Rp1.078.932.898,00 atau 0,37% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 190 Beban Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bagi Hasil	19.923.238.867,00	18.398.958.004,00	1.524.280.863,00	8,28
Beban Bantuan Keuangan	269.009.511.234,00	271.612.724.995,00	(2.603.213.761,00)	(0,96)
Beban Transfer	288.932.750.101,00	290.011.682.999,00	(1.078.932.898,00)	(0,37)

Adapun perbandingan antara Beban Transfer – LO dengan Belanja Transfer – LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 191 Perbandingan Beban Transfer – LO dengan
Belanja Transfer – LRA**

Uraian	LO TA 2023	LRA TA 2023	Selisih (Rp)
1	2	3	4=3-2
Beban Bagi Hasil	19.923.238.867,00	19.923.238.867,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	269.009.511.234,00	632.998.975.234,00	363.989.464.000,00
Beban Transfer - LO	288.932.750.101,00	652.922.214.101,00	363.989.464.000,00

Selisih antara Beban Transfer – LO dengan Belanja Transfer – LRA sebesar Rp363.989.464.000,00 merupakan Belanja Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2023 yang berasal dari Dana Desa. Sesuai Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer, belanja tersebut merupakan kinerja Pemerintah Desa bukan kinerja Pemerintah Kabupaten sehingga tidak diakui sebagai Beban – LO.

5.4.2.3.1. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp19.923.238.867,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp18.398.958.004,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.524.280.863,00 atau 8,28% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 192 Beban Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.932.290.887,00	15.469.928.759,00	2.462.362.128,00	15,92
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.990.947.980,00	2.929.029.245,00	(938.081.265,00)	(32,03)
Beban Bagi Hasil	19.923.238.867,00	18.398.958.004,00	1.524.280.863,00	8,28



5.4.2.3.2. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp269.009.511.234,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp271.612.724.995,00. Terdapat penurunan sebesar Rp2.603.213.761,00 atau 0,96% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 193 Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	269.009.511.234,00	271.612.724.995,00	(2.603.213.761,00)	(0,96)
Beban Bantuan Keuangan	269.009.511.234,00	271.612.724.995,00	(2.603.213.761,00)	(0,96)

5.4.2.4. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Tak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp5.106.915.740,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp3.345.921.800,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.760.993.940,00 atau 52,63% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 194 Beban Tak Terduga

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
BTT Penanganan Bencana Tanah Longsor	0,00	1.042.734.000,00	(1.042.734.000,00)	(100)
BTT yang digunakan untuk pengembalian sisa Hibah UPLAND Tahun 2022	0,00	88.620.000,00	(88.620.000,00)	(100)
Belanja Bantuan Sosial Tak Terencana	0,00	2.214.567.800,00	(2.214.567.800,00)	(100)
Pengembalian BOP PAUD Th 2022	25.588.000,00	0,00	25.588.000,00	100
Pengembalian Sekolah Penggerak	1,00	0,00	1,00	100
Pengembalian Sisa Dana BOS Reguler	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00	100
Pengembalian Denda Upland 2022	45.259.296,00	0,00	45.259.296,00	100
BTT Penanganan Karhutla TN. Gn. Merbabu	1.151.139.000,00	0,00	1.151.139.000,00	100
Pengembalian Sisa Dana BOSP Sekolah di Regrouping TA 2023	46.202.843,00	0,00	46.202.843,00	100
Bantuan korban petasan Kaliangkrik (2 Orang)	36.480.000,00	0,00	36.480.000,00	100
Bantuan kerusakan rumah akibat bencana (3 Penerima)	40.700.000,00	0,00	40.700.000,00	100
Bantuan kerusakan rumah akibat bencana (30 Penerima)	144.255.000,00	0,00	144.255.000,00	100
Bantuan biaya rs orang terlantar (5 Penerima)	36.786.000,00	0,00	36.786.000,00	100
Bantuan biaya rs orang terlantar (3 Penerima)	10.336.000,00	0,00	10.336.000,00	100
Bantuan bansos Kesehatan (58 Penerima)	185.771.800,00	0,00	185.771.800,00	100



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	2	3	4= 2-3	5=4/3*100
Bantuan bansos Kesehatan (932 Penerima)	3.135.900.000,00	0,00	3.135.900.000,00	100
Bantuan Pendidikan (192 Penerima)	247.208.000,00	0,00	247.208.000,00	100
Beban Tak Terduga	5.106.915.740,00	3.345.921.800,00	1.760.993.940,00	52,63

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi.

Defisit dari Operasi Tahun 2023 sebesar Rp33.552.280.869,90 dan Tahun 2022 Surplus sebesar Rp111.899.038.201,27. Terdapat penurunan sebesar Rp145.451.319.071,17 atau 129,98%.

5.4.4. Defisit Non Operasional - LO

Defisit Non Operasional - LO Tahun 2023 sebesar Rp173.006.011,50 dan Tahun 2022 sebesar Rp761.103.875,73. Terdapat penurunan sebesar Rp588.097.864,23 atau 77,27%.

5.4.4.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp761.103.875,73. Terdapat penurunan sebesar Rp761.103.875,73 atau 100,00%.

5.4.4.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp173.006.011,50 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp173.006.011,50 atau 100,00%.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2023 merupakan penghapusan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp180.234.631,00 yang telah disisihkan sebesar Rp90.117.315,50 sehingga NRV piutang yang menjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp90.117.315,50 dan penghapusan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp165.705.592,00 yang telah disisihkan sebesar Rp82.816.896,00 sehingga NRV piutang yang menjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp82.888.696,00 pada BPPKAD.

5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp173.006.011,50 dan Tahun 2022 sebesar Rp761.103.875,73. Terdapat penurunan sebesar Rp588.097.864,23 atau 77,27%.

Kebijakan akuntansi yang mengatur kegiatan non operasional adalah Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus /defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



5.4.6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp33.725.286.881,40 dan Tahun 2022 Surplus sebesar Rp111.137.934.325,54. Terdapat penurunan sebesar Rp144.863.221.206,94 atau 130.35%.

5.4.7. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran.
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang.
- c. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

5.4.7.1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pendapatan Luar Biasa - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.7.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Beban Luar Biasa - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

Jumlah Pos Luar Biasa - LO Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.8. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada Laporan Operasional Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Magelang mengalami defisit sebesar Rp33.725.286.881,40 dan Tahun 2022 Surplus sebesar Rp111.137.934.325,54. Terdapat penurunan sebesar Rp144.863.221.206,94 atau 130.35%.



5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I Pernyataan No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi paragraf 21 dan diterbitkannya PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, Laporan Arus Kas merupakan konsolidasi Arus Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik pendapatan maupun belanjanya. Demikian pula Pendapatan dan Belanja yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Magelang.

Laporan Arus Kas dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Informasi ini bertujuan untuk:

1. Menilai pengaruh dari masing – masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah; dan
2. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp203. 626.297.064,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp291.259.744.852,00.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Magelang dari aktivitas operasi. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 195 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Penerimaan Pajak Daerah	189.568.476.778,00	169.682.578.756,00	11,72
Penerimaan Retribusi Daerah	18.992.881.583,00	18.953.321.094,00	0,21
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.598.215.796,00	28.082.640.133,00	8,96
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	226.294.964.532,00	215.528.173.304,00	5,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	45.162.178.236,00	45.076.264.055,00	0,19
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.022.451.050.283,00	970.712.969.712,00	5,33
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	102.749.475.887,00	142.757.134.389,00	(28,02)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	343.715.656.484,00	322.603.801.305,00	6,54
Penerimaan Dana Insentif	0,00	14.367.981.000,00	(100,00)



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Penerimaan Dana Desa	363.989.464.000,00	393.231.309.000,00	(7,44)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	197.843.915.918,00	192.799.361.034,00	2,62
Penerimaan Bantuan Keuangan	13.629.261.000,00	19.161.836.000,00	(28,87)
Pendapatan Hibah-LRA	18.454.635.298,00	24.625.485.254,00	(25,06)
Jumlah Arus Kas Masuk	2.573.450.175.795,00	2.557.582.855.036,00	0,62

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.573.450.175.795,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.557.582.855.036,00 atau mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Kenaikan tersebut secara akumulasi karena ada kenaikan pada delapan pos yaitu Penerimaan Pajak Daerah sebesar 11,72 %,Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 0,21%, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 8,96 %, Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah sebesar 5,00%,Penerimaan Dana Bagi Hasil 0,19%, Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 5,33%. Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 6,54%, Pendapatan Bagi Hasil Provinsi sebesar 2,62%. Penurunan terjadi pada empat pos yaitu Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 28,02 %, Penerimaan Dana Insentif sebesar 100,00%, Penerimaan Dana Desa sebesar 7,44 %, Penerimaan Bantuan Keuangan sebesar 28,87 %, serta pendapatan hibah 25,06 %.

Berdasarkan formula, hubungan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA, sebagai berikut.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi = Pendapatan LRA - Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya, atau

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pendapatan LRA + Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya = Rp0,00

Rp2.573.450.175.795,00 - Rp 2.573.481.690.623,00 + Rp 29.642.000 = Rp0,00

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.369.823.878.731,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp 2.266.323.110.184,00. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 196 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Pembayaran Pegawai	979.808.617.479,00	909.490.218.457,00	7,73
Pembayaran Barang dan Jasa	553.587.132.203,00	517.021.760.709,00	7,07
Pembayaran Belanja Hibah	173.254.489.708,00	138.442.265.179,00	25,15
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.144.509.500,00	14.779.952.040,00	(65,19)
Pembayaran Tak Terduga	5.106.915.740,00	3.345.921.800,00	52,63
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.923.238.867,00	18.398.958.004,00	8,28
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	632.998.975.234,00	664.844.033.995,00	(4,79)
Jumlah Arus Kas Keluar	2.369.823.878.731,00	2.266.323.110.184,00	4,57

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp2.369.823.878.731,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp2.266.323.110.184,00 atau mengalami kenaikan sebesar 4,57%. Peningkatan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terjadi pada lima pos, yaitu Pembayaran Pegawai sebesar 7,73%, Pembayaran Barang dan Jasa sebesar 7,07%, Pembayaran Belanja Hibah sebesar 25,15%, Pembayaran tak terduga sebesar 52,63%, Pembayaran Bagi Hasil Pajak 8,28%. Penurunan terjadi pada dua pos yaitu Pembayaran



Belanja Bantuan Sosial sebesar 65,19%, Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa 4,79%.

Berdasarkan formula, hubungan antara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer pada LRA, sebagai berikut.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi = Belanja Operasi + Belanja Tak Terduga + Belanja Transfer

atau Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Operasi - Belanja Tak Terduga - Belanja Transfer = Rp0,00

Rp2.369.823.878.731,00 – Rp1.711.794.748.890,00 – Rp5.106.915.740,00 – Rp652.922.214.101,00 = Rp0,00

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 sebesar (Rp332.996.114.309,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp333.061.569.439,00). Hal ini menggambarkan bahwa pada Tahun 2023. Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Magelang mengalami penurunan dibanding Tahun 2022.

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp 29.160.946.000,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp441.322.054,00. Arus kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang yang berasal dari pencairan dana cadangan dan penjualan aset tetap dan aset lainnya. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5. 197 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Pencairan dana cadangan	29.131.304.000,00	0,00	100,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	334.183.454,00	(100,00)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	29.642.000,00	69.250.000,00	(57,02)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	4.264.000,00	(100,00)
Penjualan Aset Lainnya	0,00	33.624.600,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Masuk	29.160.946.000,00	441.322.054,00	6.507,63

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6.507,63% dari Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Tahun 2022. Kenaikan terjadi pada pos pencairan dana cadangan sebesar 100,00%. Sedangkan penurunan terjadi pada empat pos yaitu Penjualan atas peralatan mesin sebesar 100,00%, Penjualan atas gedung dan bangunan sebesar 57,02% , Penjualan atas aset tetap lainnya sebesar 100,00% dan Penjualan Aset Lainnya sebesar 100,00%.

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar Rp 362.157.060.309,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp333.502.891.493,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang untuk pembentukan dana cadangan, perolehan aset tetap dan aset lain serta penyertaan modal Pemerintah Daerah. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.



Tabel 5. 198 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00	20,00
Perolehan Tanah	837.573.180,00	29.958.753.449,00	(97,20)
Perolehan Peralatan dan Mesin	111.034.686.354,00	125.167.670.997,00	(11,29)
Perolehan Gedung dan Bangunan	121.599.150.695,00	49.618.052.297,00	145,07
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.330.738.100,00	89.144.512.113,00	(24,47)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	14.017.171.980,00	10.113.902.637,00	38,59
Perolehan Aset Lainnya	3.181.740.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.156.000.000,00	4.500.000.000,00	214,58
Jumlah Arus Kas Keluar	362.157.060.309,00	333.502.891.493,00	8,59

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 naik sebesar 8,59% bila dibandingkan dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2022. Kenaikan tersebut terjadi pada empat pos yaitu Pembentukan Dana Cadangan sebesar 20,00%, pos Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar 145,07%, pos Perolehan Aset tetap lainnya sebesar 38,59%, pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar 214,58%. Penurunan terjadi pada tiga pos yaitu pos Perolehan Tanah sebesar 97,20%, pos Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar 11,29% dan pos Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar 24,47%.

Berdasarkan formula hubungan antara Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dengan Belanja Modal, Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal pada LRA sebagai berikut.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi = Belanja Modal + Pembentukan Dana Cadangan + Penyertaan Modal

atau Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Belanja Modal – Pembentukan Dana Cadangan – Penyertaan Modal = Rp0,00

Rp362.157.060.309,00 - (Rp837.573.180,00 + Rp111.034.686.354,00 + Rp121.599.150.695,00 + Rp67.330.738.100,00 + Rp14.017.171.980,00 + Rp3.181.740.000,00) - Rp30.000.000.000,00- Rp14.156.000.000,00 = Rp0,00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi berbeda dengan realisasi belanja modal di tahun 2023 disebabkan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembentukan dana cadangan untuk kebutuhan pendanaan pemilukada dan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang dan PD BPR Bapas 69.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.3.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.



5.5.3.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah atau merupakan aktifitas non anggaran.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar (Rp197.645.526,00) dan Tahun 2022 sebesar Rp107.005.922,00.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga, penerimaan UUDP tahun lalu maupun mutasi pendapatan bunga dana BOS dari kas BOS ke RKUD.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp140.474.080.675,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp131.236.274.610,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 199 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	140.474.080.675,00	131.236.190.896,00	7,04
Mutasi bunga bos ke RKUD	0,00	83.714,00	(100,00)
Jumlah Arus Kas Masuk	140.474.080.675,00	131.236.274.610,00	7,04

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 naik sebesar 7,04% dari tahun 2022 karena adanya kenaikan pada pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar 7,04%

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp140.671.726.201,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp 131.129.268.688,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 200 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	140.671.726.201,00	131.129.268.688,00	7,28
Jumlah Arus Kas Keluar	140.671.726.201,00	131.129.268.688,00	7,28

Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Tahun 2023 naik sebesar 7,28% dari Tahun 2022 karena adanya kenaikan pada pos Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar 7,28%.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Kas

Terdapat penurunan kas selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp129.567.462.771,00 yang merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris yang dikelola oleh BUD, BOS dan BLUD. Saldo awal kas BUD, BLUD dan BOS sebesar Rp286.997.781.032,00 sehingga



saldo akhir kas di BUD, Kas BLUD dan Kas BOS, Kas di bendahara pengeluaran dan Kas di bendahara penerimaan dan Kas Lainnya sebesar Rp157.430.318.261,00

Tabel 5. 201 Kenaikan/Penurunan Kas

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Saldo awal kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	286.997.781.032,00	328.692.599.697,00	(12,69)
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS	157.430.318.261,00	286.997.781.032,00	(45,15)
Kenaikan/penurunan kas	(129.567.462.771,00)	(41.694.818.665,00)	210,75

5.5.5.1. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas Tahun 2023 sebesar Rp286.997.781.032,00 merupakan posisi kas per 31 Desember 2022 yang di kelola oleh BUD, Bendahara SKPD, BLUD dan BOS dengan rician sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp235.054.907.127,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp55.015.709,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp10.803.947,00
Kas di BLUD	Rp51.532.515.089,00
Kas BOS	<u>Rp344.539.160,00</u>
Saldo Akhir Kas Tahun 2022	Rp286.997.781.032,00

5.5.5.2. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp 157.430.318.261,00 merupakan Saldo Awal Kas Tahun 2023 sebesar Rp286.997.781.032,00 dikurangi dengan penurunan kas kas selama periode Tahun 2023 sebesar Rp129.567.462.771,00. Saldo Akhir Kas terdiri dari Saldo Akhir Kas pada BUD, Bendahara SKPD, BLUD dan BOS dengan perincian sebagai berikut.

Kas di Kas Daerah	Rp128.504.791.904,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp144.592.450,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
Kas di BLUD	Rp26.223.856.108,00
Kas BOS	Rp335.699.770,00
Kas Lainnya	<u>Rp2.221.378.029,00</u>
Saldo Akhir Kas Tahun 2023	Rp157.430.318.261,00



5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas dan aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.663.686.788.681,31 merupakan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 pada Laporan Neraca. Apabila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp3.560.364.605.758,53 terdapat peningkatan sebesar 2,90%.

5.6.2. Surplus /Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan – LO dengan Beban pada Laporan Operasional. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat defisit sebesar Rp33.725.286.881,40 dan apabila dibandingkan dengan saldo surplus - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp111.137.934.325,54 terdapat penurunan sebesar 130,35%.

5.6.3. Dampak Kumulatif Kesalahan

Saldo Akun Dampak Kumulatif Kesalahan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.910.601.765,07 Apabila dibandingkan dengan saldo akun Dampak Kumulatif Kesalahan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp7.815.751.402,76) terdapat peningkatan sebesar 188,42%.

Dampak Kumulatif Kesalahan terdiri dari berikut.

Tabel 5.202 Kenaikan Penurunan Dampak Kumulatif Kesalahan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (%)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	6.910.601.765,07	(7.815.751.402,76)	188,42
Saldo Akhir Kas	6.910.601.765,07	(7.815.751.402,76)	188,42

5.6.3.1. Lain-lain

Dampak Kumulatif Kesalahan – Lain-lain Rp6.910.601.765,07 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.203 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
1	Koreksi Piutang Retribusi Daerah	1.999.999,65
1.1	Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar koreksi piutang retribusi atas saldo awal piutang retribusi Los dan piutang retribusi kios atas ketetapan tahun sebelumnya pada SKPD Disdagkop UKM	1.999.999,65
2	Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.646.151.872,00
2.1	Koreksi Piutang Pendapatan BLUD koreksi ekuitas yang di sebabkan adanya pengurangan piutang tahun lalu dari pasien umum dan pasien covid pada SKPD Dinkes dan RSUD Muntian	4.646.151.872,00
3	koreksi Beban dibayar dimuka	0,33
3.1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah Koreksi ekuitas yang dikarenakan koreksi saldo awal beban di bayar dimuka karena kesalahan pencatatan pada Disdagkop UKM	0,33
4	Koreksi Tanah	15.060.355.700,00
4.1	Koreksi Tanah persil Penambahan koreksi ekuitas yang dikarenakan adanya penambahan aset tanah yang belum tercatat pada SKPD Disdagkop UKM	15.060.355.700,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(12.434.433.865,66)
5.1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Koreksi akumulasi penyusutan alat angkutan di karenakan terdapat penambahan pendapatan hibah berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri SKPD BPBD	(5.128.571,43)
5.2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga pengurangan koreksi ekuitas yang dikarenakan adanya pendapatan hibah dari BUMN berupa (RSCU&RSBM) pada SKPD Dinkes	(24.800.000,00)
5.3	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan pengurangan koreksi ekuitas yang dikarenakan adanya pendapatan hibah dari BUMN berupa (RSCU&RSBM) pada SKPD Dinkes	(105.453.332,00)
5.4	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja Pengurangan koreksi ekuitas yang dikarenakan adanya pendapatan hibah dari BUMN berupa (RSCU&RSBM) pada SKPD Dinkes	(25.000.000,00)
5.5	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Koreksi akumulasi penyusutan jalan dan jembatan yang dikarenakan pendatan Hibah dari DIRJEN OTDA KEMENDAGRI pada SKPD DPU PR	(12.210.298.110,73)
5.6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Koreksi ekuitas yang disebabkan adanya Jurnal Akumulasi penyusutan TA 2022 atas reklas KDP ke JIJ atas bangunan irigasi yang telah selesai tahun lalu yang terlambat diakui sebagai aset tetap JIJ pada Kec. Secang	(5.731.500,00)
	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Koreksi ekuitas yang disebabkan adanya akumulasi aset tetap lainnya atas alat musik modern perolehan TA 2022 pada Disdikbud	(58.022.351,50)
6	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(362.861.160,00)
6.1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Nilai bersih koreksi ekuitas yang disebabkan ATB yang sudah tidak memiliki umur ekonomis sebesar 99.190.000 pada SKPD BPPKAD dan SKPD Dinkes sebesar 263.671.160	(362.861.160,00)
7	Koreksi Utang Belanja	(610.781,25)
7.1	Koreksi Utang Belanja Jasa koreksi ekuitas yang disebabkan adanya kesalahn pencatatan beban di bayar di muka yang seharusnya di akui pada Tahun 2022 tapi baru di catat tahun ini, SKPD DLH	(610.781,25)
	Jumlah	6.910.601.765,07

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023 terdapat dalam **Lampiran 5.88**.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan Saldo Ekuitas Awal ditambah Surplus /Defisit LO, dan Dampak Kumulatif Kesalahan. Saldo Ekuitas Akhir akan dicatat dan disajikan pada Laporan Neraca. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.636.872.103.564,98 dibandingkan saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.663.686.788.681,31 terdapat penurunan sebesar 0,73%.



5.7. Informasi Penting Lainnya

5.7.1. Dana Bencana Alam

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang memiliki rekening untuk menampung dana bantuan dari masyarakat yang berada di rekening Bank Jateng Cabang Magelang dengan Nomor Rekening 1.005.00829.4 Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp410.320.267,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp414.442.350,00.

Tabel 5. 204 Mutasi Rekening Dana Bencana Alam

MUTASI REKENING DANA BENCANA KAB. MAGELANG			
No. REK : 1-005-00829-4			
	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Tahun 2022			410.320.267,00
Mutasi Dana COVID-19			
- Masuk			
- Keluar			
- Disetorkan ke RKUD			
<i>Dana Covid Murni</i>			
<i>Bunga Jagir</i>			
Mutasi Dana Merapi			
- Masuk			
- Keluar			
Bunga Jagir :			
- Bunga Jagir Keseluruhan		4.122.083,00	414.442.350,00
Saldo per 31 Desember 2023		4.122.083,00	414.442.350,00

5.7.2. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 367 desa. Selama Tahun 2023, total penerimaan dan pengeluaran Desa adalah Rp491.800.606.826,00 dan Rp489.414.581.776,00

Sesuai Permendagri Nomor 50 Tahun 2018, Pemda diwajibkan menyusun ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat dilihat pada **Lampiran 5.89**.

5.7.3. Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Pada Tahun 2023 Kabupaten Magelang tidak melaksanakan Tugas Pembantuan Mandiri. Kabupaten Magelang hanya melaksanakan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah anggaran sebesar Rp5.811.306.000,00. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menjalankan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah melalui Program Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Adapun kegiatan dalam program tersebut meliputi: Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dalam bentuk Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND) yang dilaksanakan pada 3 Kawasan di 5 Kecamatan, yaitu Bandongan, Grabag, Sawangan, Kaliangkrik, dan Tempuran; kegiatan Pengawasan Alat Mesin Pertanian berupa Bintek Monev dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian di 21 kecamatan; kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida berupa Bimtek, monitoring, dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida di 21 kecamatan; serta kegiatan



Fasilitasi Pembiayaan Pertanian berupa asuransi pertanian untuk 19 kecamatan.

2) Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk Layanan Manajemen Kerja Internal.

Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp5.811.306.000,00. dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.561.369.750,00 atau sebesar 95,70% dan realisasi fisik sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada **Lampiran 5.90**.

5.7.4. Dana Dekonsentrasi

Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp696.200.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp669.320.000,00 atau sebesar 96,14% dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 5. 205 Laporan Realisasi Dana Dekonsentrasi

No	Instansi Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Ket
			Keuangan		Fisik	
			Rp	%	%	
1	Distanpangan	691.200.000,00	664.320.000,00	96,11	100,00	
2	Dinas Kesehatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00	
Jumlah		696.200.000,00	669.320.000,00	96,14	100,00	

5.7.5. Dana APBN

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBN dan KSPN Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.238.007.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp50.187.033.137,00 atau sebesar 99,90% dan realisasi fisik 99,90% dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5. 206 Anggaran Pembangunan dari Dana APBN dan KSPN

No	SKPD	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	% Realisasi Fisik
1	DPR KP	16.400.000.000,00	16.400.000.000,00	100,00	95,00
2	Disperinnaker	878.713.000,00	827.738.337,00	94,20	100,00
3	Disdikbud	31.943.310.000,00	31.943.310.000,00	100,00	100,00
4	Dinkes	566.984.800,00	566.984.800,00	100,00	100,00
5	Dishub	449.000.000,00	449.000.000,00	100,00	100,00
Jumlah		50.238.007.800,00	50.187.033.137,00	99,90	99,90

5.7.6. Dana APBD Provinsi

Anggaran Pembangunan di Kabupaten Magelang yang berasal dari Dana APBD Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Rp84.030.766.450,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp83.567.565.500,00 atau sebesar 99,45% dan realisasi fisik 88,82% sebagai berikut:

Tabel 5.207 Anggaran Pembangunan dari Provinsi

No	SKPD	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	% Realisasi Fisik
1	Dinsos PPKB PPPA	1.142.666.450,00	1.004.465.500,00	87,91	100,00
2	DPRKP	9.200.000.000,00	9.200.000.000,00	100,00	59,00
3	DISPARPORA	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	83,33	85,83
4	DISPERMADES	72.149.100.000,00	72.024.100.000,00	99,83	99,27
5	DISPETERIKAN	339.000.000,00	339.000.000,00	100,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPD	Anggaran	Realisasi Keuangan	%	% Realisasi Fisik
	Jumlah	84.030.766.450,00	83.567.565.500,00	99,45	88,82

5.7.7. Informasi terkait Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Nomor 20/LHPt/XVIII.SMG/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 diketahui :

Posisi sisa Tuntutan Perbendaharaan (TP), Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Pihak Ketiga (P. III) dan Force Majeure (FM) adalah sebagai berikut:

1. Kasus kerugian daerah berupa Tuntutan Perbendaharaan (TP) nihil;
2. Kasus kerugian daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) nihil;
3. Kasus kerugian daerah oleh Pihak Ketiga Pihak Ketiga nihil; dan
4. Kasus kerugian daerah yang berupa Informasi sisa semester II adalah 111 kasus senilai Rp3.041.550.065,66.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili Entitas

Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kec. Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).

6.2. Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Memenuhi amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan terjadi perubahan struktur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Tabel 6.1 Perubahan Struktur SKPD

No.	Perda Nomor 19 Tahun 2016	Perda Nomor 10 Tahun 2020
1	Disdikbud	Disdikbud
2	Dinkes	Dinkes
3	RSUD Muntilan	
4	DPU PR	DPU PR
5	DPR KP	DPR KP
6	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Prajadan Penanggulangan Kebakaran
7	BPBD	BPBD
8	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	Distanpangan	Distanpangan
11	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12	Disdukcapil	Disdukcapil
13	Dispermades	Dispermades
14	Dishub	Dishub
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Disdagkop UKM	Disdagkop UKM
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
19	Dispuspa	Dispuspa
20	Dispeterikan	Dispeterikan
21	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23	Bappelitbangda	Bappelitbangda
24	BPPKAD	BPPKAD
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
26	Inspektorat	Inspektorat
27	Kec. Salaman	Kec. Salaman
28	Kec. Borobudur	Kec. Borobudur
29	Kec. Ngluwar	Kec. Ngluwar



Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Perda Nomor 19 Tahun 2016	Perda Nomor 10 Tahun 2020
30	Kec. Salam	Kec. Salam
31	Kec. Srumbung	Kec. Srumbung
32	Kec. Dukun	Kec. Dukun
33	Kec. Sawangan	Kec. Sawangan
34	Kec. Muntilan	Kec. Muntilan
35	Kec. Mungkid	Kec. Mungkid
36	Kec. Mertoyudan	Kec. Mertoyudan
37	Kec. Tempuran	Kec. Tempuran
38	Kec. Kajoran	Kec. Kajoran
39	Kec. Kaliangkrik	Kec. Kaliangkrik
40	Kec. Bandongan	Kec. Bandongan
41	Kec. Candimulyo	Kec. Candimulyo
42	Kec. Pakis	Kec. Pakis
43	Kec. Ngablak	Kec. Ngablak
44	Kec. Grabag	Kec. Grabag
45	Kec. Tegalrejo	Kec. Tegalrejo
46	Kec. Secang	Kec. Secang
47	Kec. Windusari	Kec. Windusari
48	Kantor Kesbangpol	Badan Kesbangpol

Beberapa hal terkait perubahan perangkat daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan berbentuk rumah sakit daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. UPT yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru.
3. Pada Tahun 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang membagi Sekretariat Daerah menjadi 9 (sembilan) bagian, yaitu:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Hukum
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - e. Bagian Administrasi Pembangunan
 - f. Bagian Pengadaan Barang Jasa
 - g. Bagian Umum
 - h. Bagian Organisasi
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



4. UPT Dinas Daerah terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional
5. Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian

6.3. Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Magelang berencana mengadakan kegiatan penegasan batas dengan Kabupaten Magelang, namun kegiatan tersebut baru terlaksana pada Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sebagai tindak lanjut dari rencana penegasan tersebut pada tanggal 23 Januari 2007 dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Bupati Magelang dengan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang.

Kegiatan tersebut berhasil menegaskan batas antara Kota Magelang dengan Kec. Bandongan, Kec. Secang dan Kec. Tegalrejo di Kabupaten Magelang dengan telah ditandatanganinya Berita Acara pada Tahun 2009. Sedangkan perbatasan antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang di sisi Selatan yang berbatasan dengan Kec. Mertoyudan yang meliputi sebagian dari 3 (tiga) desa yaitu Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan di Kabupaten Magelang dengan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Jurangombo, Kelurahan Magersari dan Kelurahan Tidar di Kota Magelang belum dapat disepakati karena pihak Kota Magelang tidak bersedia menerima penggunaan dokumen berupa peta desa (menitplan) dari Desa Bulurejo, Desa Banyurojo dan Desa Mertoyudan yang telah dengan jelas menunjukkan batas kedua wilayah.

Pada Tahun 2008 telah disepakati batas-batas antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang di sisi Utara, Barat dan Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Magelang. Di mana salah satu dokumen yang digunakan untuk penegasan batas di sisi Utara Barat dan Timur tersebut adalah peta desa dan buku C desa.

Sesuai dengan ketentuan dan Permendagri bahwa apabila terdapat permasalahan batas antara dua daerah dalam satu wilayah provinsi maka Gubernur memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Berdasarkan hal tersebut Gubernur Jateng telah berkali-kali mengadakan pertemuan untuk mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, namun tetap tidak dapat menghasilkan keputusan. Hasil mediasi oleh Gubernur tersebut kemudian disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat untuk dimintakan keputusan.

Pada tanggal 10 Februari 2016, Bupati Magelang beserta tim diundang oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri untuk bertemu dengan Walikota Magelang dan Tim. Hasil pertemuan diberikan 4 alternatif batas dan dimohon kepada masing-masing daerah untuk memilih salah satu dari keempat alternatif tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memilih alternatif ketiga dengan catatan tambahan yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pada tanggal 15 Juni 2020 telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Penentuan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Nomor: 100/124/01.01/2020



dan Nomor:130/250/111. Berita Acara tersebut menyepakati penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Secara umum penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang sudah ada kesesuaian dan tidak ada permasalahan.
2. Penentuan batas wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa tengah.
3. Berita Acara mengikat kedua belah pihak sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.



BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Lampiran 3.1
Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kab. Magelang Urusan Pemerintahan Daerah - Pendapatan

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	198.104.231.731,00
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	165.550.702,00
1.01.1	Disdikbud	0,00	0,00	0,00	165.550.702,00
1.02	Kesehatan	0,00	0,00	0,00	196.528.169.099,00
1.02.1	Dinkes	0,00	0,00	0,00	99.999.736.266,00
1.02.2	RSUD Muntian	0,00	0,00	0,00	96.528.432.833,00
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	1.410.511.930,00
1.03.1	DPU PR	0,00	0,00	0,00	1.410.511.930,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	17.040.402.828,00
2.07	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	14.734.000,00
2.07.1	Disperinnaker	0,00	0,00	0,00	14.734.000,00
2.08	Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.09	Pangan	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
2.09.1	Distanpangan	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
2.10	Pertanahan				
2.11	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.311.894.528,00
2.11.1	DLH	0,00	0,00	0,00	1.311.894.528,00
2.12	Administrasi Kependudukan Dan Cakil	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.12.1	Disdukcapil	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.15	Perhubungan	0,00	0,00	0,00	2.939.615.900,00
2.09.1	Dishub	0,00	0,00	0,00	2.939.615.900,00
2.16	Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	1.423.002.313,00
2.16.1	Diskominfo	0,00	0,00	0,00	1.423.002.313,00
2.17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	0,00	0,00	0,00	7.483.085.167,00
2.17.1	Disdagkop UKM	0,00	0,00	0,00	7.483.085.167,00
2.19	Kepemudaan Dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	3.832.570.920,00
2.19.1	Disparpora	0,00	0,00	0,00	3.832.570.920,00
3	Urusan Pilihan	0,00	0,00	0,00	633.737.900,00
3.25	Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	633.737.900,00
3.25.1	Dispeterikan	0,00	0,00	0,00	633.737.900,00
4	Unsur Pendukung	0,00	0,00	0,00	13.970.000,00
4.01.	Setda	0,00	0,00	0,00	13.970.000,00
5	Unsur Penunjang	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00	85,85	2.342.156.735.631,00
5.02	Keuangan	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00	85,85	2.342.156.735.631,00
5.02.01	BPPKAD	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00	85,85	2.342.156.735.631,00
7	Unsur Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	75.099.000,00
7.01	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	75.099.000,00
7.01.08	Kec. Muntian	0,00	0,00	0,00	33.306.000,00
7.01.09	Kec. Mungkid	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.10	Kec. Mertoyudan	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00
7.01.20	Kec. Secang	0,00	0,00	0,00	32.883.000,00
	Jumlah	21.497.000.000,00	18.454.635.298,00	85,85	2.558.024.177.090,00

Lampiran 3.2

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kab. Magelang Urusan Pemerintahan Daerah - Belanja

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0,00	0,00	0,00	1.329.696.946.739,00
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	678.260.639.451,00
1.01.1.01.01	Disdikbud	-	-	-	678.260.639.451,00
1.02	Kesehatan	0,00	0,00	0,00	445.422.229.976,00
1.02.1.02.01	Dinkes	0,00	0,00	-	311.546.428.057,00
1.02.1.02.02	RSUD Muntilan	0,00	0,00	-	133.875.801.919,00
1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan R	0,00	0,00	0,00	138.676.146.910,00
1.03.1.03.01	DPU PR	0,00	0,00	-	138.676.146.910,00
1.04	Perumahan Rakyat Dan Kawasan	0,00	0,00	0,00	13.163.940.862,00
1.04.1.04.01	DPRKP	0,00	0,00	-	13.163.940.862,00
1.05	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	26.309.513.972,00
1.05.1.05.01	Satpol PP	0,00	0,00	-	19.892.352.030,00
1.05.1.06.02	BPBD	0,00	0,00	0,00	6.417.161.942,00
1.06	Sosial	0,00	0,00	0,00	27.864.475.568,00
1.06.1.06.01	Dinsos	0,00	0,00	-	27.864.475.568,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan D	0,00	0,00	0,00	253.093.312.437,00
2.01	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	11.224.608.327,00
2.01.2.01.01	Diperinnaker	0,00	0,00	-	11.224.608.327,00
2.03	Pangan	0,00	0,00	0,00	56.663.502.764,00
2.03.2.03.01	Distanpangan	0,00	0,00	-	56.663.502.764,00
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	47.870.210.355,00
2.05.2.05.01	DLH	0,00	0,00	-	47.870.210.355,00
2.06	Administrasi Kependudukan Dan	0,00	0,00	0,00	8.201.174.415,00
2.06.2.06.01	Disdukcapil	0,00	0,00	-	8.201.174.415,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	14.045.020.045,00
2.07.2.07.01	Dispermades	0,00	0,00	-	14.045.020.045,00
2.09	Perhubungan	0,00	0,00	0,00	34.829.357.921,00
2.09.2.09.01	Dishub	0,00	0,00	-	34.829.357.921,00
2.10	Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	15.110.509.745,00
2.10.2.10.01	Diskominfo	0,00	0,00	-	15.110.509.745,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menen	0,00	0,00	0,00	21.713.150.887,00
2.11.2.11.01	Disdagkop UKM	0,00	0,00	-	21.713.150.887,00
2.12	Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	6.608.976.118,00
2.12.2.12.01	DPMPPTSP	0,00	0,00	-	6.608.976.118,00
2.13	Kepemudaan Dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	31.846.352.104,00
2.13.2.13.01	Disparpora	0,00	0,00	-	31.846.352.104,00
2.17	Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	4.980.449.756,00
2.17.2.17.01	Dispuspa	0,00	0,00	-	4.980.449.756,00
3	Urusan Pilihan	0,00	0,00	0,00	11.880.983.520,00
3.01	Kelautan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	11.880.983.520,00
3.01.3.01.01	Dispeterikan	0,00	0,00	-	11.880.983.520,00
4	Unsur Pendukung	0,00	0,00	0,00	96.944.481.629,00
4.01	Sekretarian Daerah	0,00	0,00	0,00	47.980.690.411,00
4.01.1	Setda	0,00	0,00	0,00	47.980.690.411,00
4.02	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	48.963.791.218,00
4.02.1	Set DPRD	0,00	0,00	0,00	48.963.791.218,00
5	Unsur Penunjang	0,00	0,00	0,00	820.187.117.082,00
5.01	Perencanaan	0,00	0,00	0,00	7.656.764.398,00
5.01.01	Bappelitbangda	0,00	0,00	0,00	7.656.764.398,00
5.02	Keuangan	0,00	0,00	0,00	723.582.326.384,00
5.02.01	BPPKAD	0,00	0,00	0,00	723.582.326.384,00
5.03	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	88.948.026.300,00
5.03.1	BKPPD	0,00	0,00	-	88.948.026.300,00
6	Unsur Pengawas	0,00	0,00	0,00	5.946.230.111,00
6.01	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	5.946.230.111,00
6.01.01	Inspektorat	0,00	0,00	-	5.946.230.111,00
7	Unsur Kewilayahan	0,00	0,00	0,00	46.001.385.052,00
7.01	Kecamatan	0,00	0,00	0,00	46.001.385.052,00
7.01.01	Kec. Salaman	0,00	0,00	-	2.150.262.822,00
7.01.02	Kec. Borobudur	0,00	0,00	-	1.613.912.017,00
7.01.03	Kec. Ngluwar	0,00	0,00	-	1.649.346.510,00
7.01.04	Kec. Salam	0,00	0,00	-	1.916.747.257,00
7.01.05	Kec. Srumbung	0,00	0,00	-	1.529.125.754,00
7.01.06	Kec. Dukun	0,00	0,00	-	1.459.577.585,00
7.01.07	Kec. Sawangan	0,00	0,00	-	1.963.039.531,00
7.01.08	Kec. Muntilan	0,00	0,00	-	3.642.782.218,00
7.01.09	Kec. Mungkid	0,00	0,00	-	5.050.027.050,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
7.01.10	Kec. Mertoyudan	0,00	0,00	-	3.948.654.626,00
7.01.11	Kec. Tempuran	0,00	0,00	-	1.523.734.675,00
7.01.12	Kec. Kajoran	0,00	0,00	-	1.813.949.163,00
7.01.13	Kec. Kaliangkrik	0,00	0,00	-	1.885.697.329,00
7.01.14	Kec. Bandongan	0,00	0,00	-	2.154.175.993,00
7.01.15	Kec. Candimulyo	0,00	0,00	-	1.783.921.051,00
7.01.16	Kec. Pakis	0,00	0,00	-	1.433.110.180,00
7.01.17	Kec. Ngablak	0,00	0,00	-	1.438.404.755,00
7.01.18	Kec. Grabag	0,00	0,00	-	1.748.722.487,00
7.01.19	Kec. Tegalrejo	0,00	0,00	-	1.640.697.235,00
7.01.20	Kec. Secang	0,00	0,00	-	3.699.625.545,00
7.01.21	Kec. Windusari	0,00	0,00	-	1.955.871.269,00
8	Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00	6.575.545.107,00
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	6.575.545.107,00
8.01.01	Bakesbangpol	0,00	0,00	0,00	6.575.545.107,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.570.326.001.677,00

Lampiran 5.1
Rincian Retribusi Daerah Per Jenis Retribusi Per SKPD Tahun 2023 dan 2022

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
a.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LRA	450.000.000,00	761.504.209,00	169,22	406.238.000,00
	Dinkes	450.000.000,00	761.504.209,00	169,22	406.238.000,00
b.	Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah- LRA	1.347.500.000,00	1.513.279.731,00	112,30	1.248.224.528,00
	DLH	1.347.500.000,00	1.513.279.731,00	112,30	1.248.224.528,00
c.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum- LRA	1.000.000.000,00	1.000.338.000,00	100,03	955.483.000,00
	Dishub	1.000.000.000,00	1.000.338.000,00	100,03	955.483.000,00
d.	Pengujian Kendaraan Bermotor	1.255.990.000,00	847.240.000,00	67,46	1.011.800.000,00
	Dishub	1.255.990.000,00	847.240.000,00	67,46	1.011.800.000,00
e.	Retribusi Pelayanan Pasar-kios-LRA	5.290.050.802,00	3.413.895.294,00	64,53	6.845.162.267,00
	Disdagkop UKM	4.921.380.000,00	3.075.635.694,00	62,50	6.526.966.667,00
	Dispeterikan	368.670.802,00	338.259.600,00	91,75	318.195.600,00
f.	Penyediaan Peta Dasar (Garis)- LRA	750.000,00	1.390.000,00	185,33	1.460.000,00
	BPPKAD	750.000,00	1.390.000,00	185,33	1.460.000,00
g.	Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya- LRA	150.000.000,00	123.489.000,00	82,33	151.760.500,00
	Disdagkop UKM	150.000.000,00	123.489.000,00	82,33	151.760.500,00
h.	R. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.423.000.000,00	1.577.493.322,00	110,86	1.399.856.649,00
	Diskominfo	1.423.000.000,00	1.577.493.322,00	110,86	1.399.856.649,00
i.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.238.634.580,00	1.360.214.180,00	109,82	1.072.787.690,00
	DPU PR	933.775.580,00	1.076.235.000,00	115,26	815.071.690,00
	Disperinnaker	12.107.000,00	20.398.000,00	168,48	14.734.000,00
	Distanpangan	591.000,00	591.000,00	100,00	
	DLH	0	0,00	#DIV/0!	57.070.000,00
	Disdagkop UKM	28.620.000,00	29.160.000,00	101,89	
	Diskominfo	0	0,00	#DIV/0!	21.735.000,00
	Disparpora	128.000.000,00	97.205.000,00	75,94	74.730.000,00
	Dispeterikan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Setda	12.800.000,00	11.545.000,00	90,20	13.970.000,00
	Kec. Muntilan	44.330.000,00	44.330.000,00	100,00	33.306.000,00
	Kec. Mungkid	15.058.000,00	15.060.000,00	100,01	0,00
	Kec. Mertoyudan	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	8.910.000,00
	Kec. Secang	32.883.000,00	32.883.000,00	100,00	32.883.000,00
	BPPKAD	21.270.000,00	23.607.180,00	110,99	378.000,00
j.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/ Diselenggarakan oleh	36.488.000,00	28.002.000,00	76,74	33.242.000,00
	Dispeterikan	36.488.000,00	28.002.000,00	76,74	33.242.000,00
k.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum- LRA	449.590.000,00	389.022.600,00	86,53	381.683.900,00
	Dishub	449.590.000,00	389.022.600,00	86,53	381.683.900,00
l.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir- LRA	1.151.660.000,00	1.189.972.000,00	103,33	1.162.749.800,00
	DLH	7.500.000,00	8.800.000,00	117,33	6.600.000,00
	Disdukcapil	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
	Disdagkop UKM	720.000.000,00	689.778.250,00	95,80	747.905.000,00
	Disparpora	326.600.000,00	393.128.750,00	120,37	315.024.800,00
	Dispeterikan	88.560.000,00	89.265.000,00	100,80	84.220.000,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
m	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum dipotong- LRA	53.000.000,00	51.461.000,00	97,10	61.624.000,00
	Dispeterikan	53.000.000,00	51.461.000,00	97,10	61.624.000,00
n	Pelayanan Tempat Rekreasi- LRA	4.577.900.000,00	5.367.226.920,00	117,24	3.468.887.120,00
	Disparpora	4.545.400.000,00	5.339.096.920,00	117,46	3.442.816.120,00
	Dispeterikan	32.500.000,00	28.130.000,00	86,55	26.071.000,00
o	Penjualan Hasil Produksi Usaha- LRA	158.109.000,00	144.139.500,00	91,16	110.160.000,00
	Distanpangan	37.409.000,00	34.084.500,00	91,11	
	Dispeterikan	120.700.000,00	110.055.000,00	91,18	110.160.000,00
p	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.164.232.420,00	1.090.034.627,00	93,63	584.051.640,00
	DPU PR	1.164.232.420,00	1.090.034.627,00	93,63	584.051.640,00
q	Pemberian Izin Trayek Kepada Badan-	92.775.000,00	42.900.000,00	46,24	58.150.000,00
	Dishub	92.775.000,00	42.900.000,00	46,24	58.150.000,00
r	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	34.800.000,00	91.279.200,00	262,30	0,00
	Disperinaker	34.800.000,00	91.279.200,00	262,30	0,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi	19.874.479.802,00	18.992.881.583,00	95,56	18.953.321.094,00

Lampiran 5.2
Rincian Pendapatan BLUD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
A	Dinkes				
1	PKM Salaman I	2.929.739.656,00	2.958.455.426,00	100,98	2.694.925.863,00
2	PKM Salaman II	1.373.663.800,00	1.289.518.476,00	93,87	1.176.087.438,00
3	PKM Borobudur	3.351.548.337,00	3.285.927.647,00	98,04	2.864.474.389,00
4	PKM Ngluwar	1.344.343.081,00	1.405.006.508,00	104,51	1.139.061.157,00
5	PKM Salam	1.850.874.738,00	1.890.029.547,00	102,12	1.618.174.759,00
6	PKM Srumbung	1.560.141.324,00	1.663.792.071,00	106,64	1.536.750.312,00
7	PKM Dukun	2.265.000.000,00	2.329.468.723,00	102,85	1.990.710.157,00
8	PKM Sawangan I	1.684.297.397,00	1.600.886.029,00	95,05	1.317.134.027,00
9	PKM Sawangan II	1.507.965.064,00	1.521.173.962,00	100,88	1.246.554.105,00
10	PKM Muntilan I	1.430.689.514,00	1.480.578.317,00	103,49	1.225.024.991,00
11	PKM Muntilan II	1.759.219.261,00	1.581.946.218,00	89,92	1.443.638.998,00
12	PKM Mungkid	2.670.575.901,00	2.507.212.698,00	93,88	2.253.624.891,00
13	PKM Mertoyudan I	1.597.099.723,00	1.649.973.600,00	103,31	1.411.953.234,00
14	PKM Mertoyudan II	1.919.962.512,00	1.735.261.340,00	90,38	1.389.858.504,00
15	PKM Tempuran	2.699.625.352,00	2.489.842.112,00	92,23	2.186.749.981,00
16	PKM Kajoran I	2.046.347.759,00	2.157.705.808,00	105,44	1.931.868.130,00
17	PKM Kajoran II	1.534.250.616,00	1.499.394.046,00	97,73	1.268.370.031,00
18	PKM Kaliangkrik	3.526.317.441,00	3.616.101.719,00	102,55	3.108.331.452,00
19	PKM Bandongan	3.429.847.451,00	3.065.760.906,00	89,38	2.979.799.829,00
20	PKM Candimulyo	2.690.556.854,00	2.418.788.766,00	89,90	2.293.622.916,00
21	PKM Pakis	2.828.735.458,00	2.927.045.168,00	103,48	2.513.247.273,00
22	PKM Ngablak	1.939.000.000,00	2.000.191.899,00	103,16	1.697.810.469,00
23	PKM Grabag I	4.319.943.953,00	4.172.434.504,00	96,59	4.050.630.894,00
24	PKM Grabag II	1.204.500.000,00	1.209.273.629,00	100,40	1.108.511.384,00
25	PKM Tegalrejo	2.118.662.392,00	2.235.408.327,00	105,51	1.922.905.771,00
26	PKM Secang I	2.233.932.972,00	2.248.965.435,00	100,67	1.991.836.103,00
27	PKM Secang II	1.662.685.008,00	1.703.448.954,00	102,45	1.445.296.429,00
28	PKM Windusari	2.527.510.400,00	2.618.962.996,00	103,62	2.305.702.766,00
29	PKM Kota Mungkid	992.964.036,00	974.745.974,00	98,17	781.277.802,00
30	RSUD Merah putih	65.000.000.000,00	70.534.126.761,00	108,51	44.699.564.211,00
Jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD Merah Putih		128.000.000.000,00	132.771.427.566,00	103,73	99.593.498.266,00
B	BLUD RSUD Muntilan	73.502.205.430,00	76.497.210.372,00	104,07	96.528.432.833,00
Jumlah Pendapatan BLUD RSU		73.502.205.430,00	76.497.210.372,00	104,07	96.528.432.833,00
Total Pendapatan BLUD		201.502.205.430,00	209.268.637.938,00	103,85	196.121.931.099,00

Lampiran 5.3
Data Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Bagi Hasil Pajak - LRA				
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	0,00	21.181.500,00	0,00	7.573.850.777,00
b	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	16.104.339.794,00	16.104.339.794,00	100,00	14.914.547.821,00
c	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	1.116.773.019,00	1.116.773.019,00	100,00	19.386.155.389,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak	17.221.112.813,00	17.242.294.313,00	100,12	41.874.553.987,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA				
a	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	25.896.741.338,00	25.896.741.338,00	100,00	68.880.379,00
b	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	182.693.341,00	24.191.996,00		394.616.382,00
c	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	158.501.345,00	0,00	317.559.762,00
d	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	135.953.550,00	135.953.550,00	100,00	6.426.057,00
e	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.136.786,00	1.136.786,00	100,00	455.916.488,00
f	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	252.846.197,00	252.846.197,00	100,00	1.958.311.000,00
	Jumlah DBH Bukan Pajak/SDA	26.469.371.212,00	26.469.371.212,00	100,00	3.201.710.068,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)				
a	Dana Alokasi Umum - LRA	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	100,00	970.712.969.712,00
	Jumlah DAU	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	100,00	970.712.969.712,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA				
	DAK Fisik	1.095.828.062.953,00	1.106.360.321.975,00	100,96	142.757.134.389,00
a	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.009.264.603.253,00	1.022.451.050.283,00	101,31	1.507.148.359,00
b	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	781.552.000,00	758.309.643,00	97,03	24.165.808.748,00
c	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	37.821.789.000,00	35.805.983.750,00	94,67	8.718.807.197,00
d	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	398.713.110,00
e	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	398.713.110,00
f	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	13.116.307.700,00	13.116.307.700,00	100,00	0,00
g	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	5.449.949.780,00
h	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	1.080.736.625,00
i	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0	0,00	0,00	1.080.736.625,00
j	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan	0,00	0,00	0,00	651.300.000,00
k	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan	0,00	0,00	0,00	7.296.757.700,00
l	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.821.182.198,00
m	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.456.931.000,00	10.180.003.800,00	97,35	22.323.110.000,00
n	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	16.070.542.000,00
o	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	10.683.141.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
p	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
q	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11.217.202.000,00	11.170.401.999,00	99,58	5.181.166.000,00
r	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
s	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	10.289.573.000,00	10.250.573.000,00	99,62	1.988.895.000,00
t	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	3.544.226.734,00
u	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	678.053.000,00	638.220.000,00	94,13	20.589.918.387,00
v	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	350.403.000,00	349.025.000,00	99,61	0,00
w	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	1.851.649.000,00	1.640.446.800,00	88,59	3.819.351.551,00
x	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan	0,00	0,00	0,00	2.697.000.000,00
y	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	2.769.380.000,00
	DAK Non Fisik	356.998.536.425,00	343.289.120.804,00	96,16	322.603.801.305,00
a	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	114.404.471.076,00
b	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	113.133.811.481,00	113.123.399.954,00	99,99	3.300.000.000,00
c	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.460.000.000,00	5.490.000.000,00	123,09	152.579.121.966,00
d	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	177.292.028.250,00	163.296.814.593,00	92,11	3.081.955.195,00
e	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.880.125.000,00	5.386.678.500,00	91,61	275.901.232,00
f	DAK Non Fisik-BOP PAUD	217.457.000,00	196.491.063,00	90,36	16.183.465.000,00
g	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	17.583.000.000,00	17.367.822.000,00	98,78	4.974.700.000,00
h	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.751.300.000,00	5.747.100.000,00	99,93	2.434.343.065,00
i	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	18.009.470.279,00	18.009.470.279,00	100,00	179.731.680,00
j	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	385.466.000,00	385.466.000,00	100,00	9.717.032.500,00
k	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	16.383.423,00
l	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	12.068.575.643,00
m	DAK Non Fisik-PK2UKM	11.130.315.005,00	11.130.315.005,00	100,00	403.950.800,00
n	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	784.020.530,00
o	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	941.696.870,00	941.696.870,00	100,00	215.174.345,00
p	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	272.283.990,00	272.283.990,00	100,00	351.637.850,00
q	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	359.100.000,00
r	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	613.745.340,00	613.745.340,00	100,00	1.274.237.000,00
s	DAK Non Fisik-PK2UMK	1.327.837.210,00	1.327.837.210,00	100,00	
	Total DAK	1.452.826.599.378,00	1.449.649.442.779,00	99,78	465.360.935.694,00
	Jumlah	1.497.988.777.614,00	1.494.832.802.515,00	99,79	1.481.150.169.461,00

Lampiran 5.4
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	575.096.258.157,00	548.092.719.824,00	95,30	452.389.190.340,00
2	Dinkes	158.257.913.853,00	153.450.339.880,00	96,96	137.970.441.632,00
3	RSUD Muntilan	53.049.581.984,00	50.344.972.019,00	94,90	32.638.318.263,00
4	DPU PR	13.349.334.900,00	12.980.408.743,00	97,24	13.782.462.850,00
5	DPRKP	2.605.298.771,00	2.455.658.718,00	94,26	2.436.518.499,00
6	Satpol PP	4.651.618.000,00	4.362.862.357,00	93,79	4.703.335.140,00
7	BPBD	2.965.318.000,00	2.586.678.356,00	87,23	2.401.479.594,00
8	Dinsos	4.436.282.241,00	4.312.639.146,00	97,21	4.506.314.407,00
9	Disperinnaker	6.249.716.100,00	5.834.992.613,00	93,36	5.943.348.835,00
10	Distanpangan	19.132.484.000,00	18.589.828.547,00	97,16	19.751.072.901,00
11	DLH	7.758.883.000,00	7.467.182.263,00	96,24	7.499.187.953,00
12	Disdukcapil	2.985.200.000,00	2.894.056.874,00	96,95	2.629.304.214,00
13	Dispermades	3.206.576.473,00	3.101.243.288,00	96,72	3.491.307.808,00
14	Dishub	4.136.950.500,00	4.026.604.141,00	97,33	4.584.862.771,00
15	Diskominfo	4.568.718.560,00	4.097.751.133,00	89,69	3.678.324.873,00
16	Disdagkop UKM	7.199.370.287,00	7.001.028.206,00	97,25	7.461.537.509,00
17	DPMPTSP	2.709.876.266,00	2.621.907.743,00	96,75	2.372.721.810,00
18	Disparpora	4.440.351.614,00	4.197.995.678,00	94,54	4.282.882.035,00
19	Dispuspa	2.646.041.955,00	2.568.626.322,00	97,07	2.786.449.254,00
20	Dispeterikan	5.392.616.136,00	5.286.167.715,00	98,03	5.479.240.423,00
21	Setda	15.962.535.536,00	15.572.076.188,00	97,55	15.063.861.093,00
22	Set DPRD	32.799.620.012,00	32.713.154.773,00	99,74	32.489.774.124,00
23	Bappelitbangda	4.701.596.600,00	4.595.257.873,00	97,74	4.534.200.242,00
24	BPPKAD	18.498.654.503,00	17.679.421.717,00	95,57	15.683.063.289,00
25	BKPPD	61.597.280.049,00	26.453.856.133,00	42,95	82.369.428.658,00
26	Inspektorat	6.044.015.063,00	5.999.100.505,00	99,26	4.883.609.915,00
27	Kec. Salaman	1.711.325.000,00	1.470.093.493,00	85,90	1.623.510.677,00
28	Kec. Borobudur	981.836.716,00	916.413.628,00	93,34	1.146.486.547,00
29	Kec. Ngluwar	1.437.906.000,00	1.248.987.899,00	86,86	1.346.197.292,00
30	Kec. Salam	1.649.188.846,00	1.368.301.578,00	82,97	1.583.089.113,00
31	Kec. Srumbung	1.307.657.451,00	1.232.320.279,00	94,24	1.280.615.132,00
32	Kec. Dukun	1.056.094.000,00	895.614.350,00	84,80	1.190.107.942,00
33	Kec. Sawangan	1.659.001.571,00	1.614.510.612,00	97,32	1.573.172.518,00
34	Kec. Muntilan	1.782.409.000,00	1.743.139.576,00	97,80	1.861.625.518,00
35	Kec. Mungkid	2.881.419.000,00	2.511.908.268,00	87,18	2.492.658.701,00
36	Kec. Mertoyudan	2.446.552.000,00	1.885.450.276,00	77,07	2.359.190.254,00
37	Kec. Tempuran	1.342.445.000,00	1.021.513.689,00	76,09	1.213.212.965,00
38	Kec. Kajoran	1.441.868.000,00	1.189.418.650,00	82,49	1.484.676.392,00
39	Kec. Kaliangkrik	1.604.001.100,00	1.518.316.930,00	94,66	1.571.625.372,00
40	Kec. Bandongan	1.498.687.401,00	1.217.082.897,00	81,21	1.606.863.160,00
41	Kec. Candimulyo	1.465.481.197,00	1.410.867.729,00	96,27	1.478.653.192,00
42	Kec. Pakis	1.271.142.630,00	1.171.466.171,00	92,16	1.067.275.604,00
43	Kec. Ngablak	1.245.200.000,00	1.123.779.870,00	90,25	1.162.837.109,00
44	Kec. Grabag	1.581.670.000,00	1.241.318.288,00	78,48	1.349.822.074,00
45	Kec. Tegalrejo	1.231.557.680,00	1.043.655.007,00	84,74	1.239.610.097,00
46	Kec. Secang	1.892.058.367,00	1.637.161.540,00	86,53	1.753.516.813,00
47	Kec. Windusari	1.693.568.000,00	1.484.316.543,00	87,64	1.552.133.806,00
48	Bakesbangpol	1.635.640.000,00	1.576.449.451,00	96,38	1.741.099.747,00
JUMLAH		1.059.258.801.519,00	979.808.617.479,00	92,50	909.490.218.457,00

Lampiran 5.5
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	100.955.115.714,00	98.992.727.631,00	98,06	104.493.484.628,00
2	Dinkes	156.881.090.407,00	142.338.665.947,00	90,73	119.410.285.728,00
3	RSUD Muntilan	58.021.481.689,00	54.298.887.983,00	93,58	72.741.343.750,00
4	DPU PR	22.686.660.045,00	21.693.989.482,00	95,62	16.824.644.609,00
5	DPRKP	1.745.926.666,00	1.565.002.155,00	89,64	892.344.178,00
6	Satpol PP	13.990.825.991,00	13.245.867.213,00	94,68	12.054.949.640,00
7	BPBD	2.969.099.235,00	2.906.564.962,00	97,89	2.987.593.348,00
8	Dinsos	29.077.205.890,00	27.904.185.319,00	95,97	20.161.213.596,00
9	Disperinnaker	7.863.887.818,00	6.372.814.036,00	81,04	4.433.010.492,00
10	Distanpangan	5.484.999.339,00	5.256.310.322,00	95,83	8.326.802.974,00
11	DLH	17.806.164.659,00	17.065.866.480,00	95,84	12.138.263.499,00
12	Disdukcapil	4.407.871.896,00	4.307.140.105,00	97,71	4.947.618.201,00
13	Dispermades	11.526.323.425,00	11.089.364.887,00	96,21	9.472.812.237,00
14	Dishub	28.516.769.671,00	28.341.606.421,00	99,39	26.088.603.830,00
15	Diskominfo	10.248.114.737,00	10.104.645.109,00	98,60	9.533.556.152,00
16	Disdagkop UKM	12.287.825.238,00	11.709.961.467,00	95,30	8.937.576.428,00
17	DPMPTSP	2.309.459.491,00	2.126.730.660,00	92,09	2.384.626.308,00
18	Disparpora	12.872.238.073,00	12.239.073.818,00	95,08	11.459.484.673,00
19	Dispuspa	1.533.831.091,00	1.505.387.917,00	98,15	2.044.901.622,00
20	Dispeterikan	2.914.774.308,00	2.762.813.849,00	94,79	3.146.062.647,00
21	Setda	17.021.437.059,00	16.366.560.607,00	96,15	13.582.471.885,00
22	Set DPRD	25.121.334.301,00	19.537.912.814,00	77,77	16.286.644.544,00
23	Bappelitbangda	4.794.851.627,00	4.439.144.647,00	92,58	2.824.894.706,00
24	BPPKAD	15.771.645.663,00	14.135.956.159,00	89,63	13.809.473.016,00
25	BKPPD	6.165.871.428,00	6.030.299.184,00	97,80	6.213.097.642,00
26	Inspektorat	4.705.487.839,00	3.910.161.011,00	83,10	1.062.620.196,00
27	Kec. Salaman	334.587.520,00	333.401.943,00	99,65	459.612.145,00
28	Kec. Borobudur	389.571.300,00	373.221.991,00	95,80	312.585.470,00
29	Kec. Ngluwar	339.870.521,00	328.146.183,00	96,55	253.149.218,00
30	Kec. Salam	358.041.472,00	354.661.794,00	99,06	318.108.144,00
31	Kec. Srumbung	359.994.005,00	338.658.738,00	94,07	224.890.622,00
32	Kec. Dukun	328.593.420,00	314.311.665,00	95,65	260.969.643,00
33	Kec. Sawangan	422.077.047,00	406.677.307,00	96,35	310.447.013,00
34	Kec. Muntilan	986.488.949,00	973.187.353,00	98,65	827.513.700,00
35	Kec. Mungkid	1.039.339.889,00	1.003.455.065,00	96,55	937.837.904,00
36	Kec. Mertoyudan	737.517.242,00	714.388.579,00	96,86	708.919.372,00
37	Kec. Tempuran	336.824.870,00	334.894.818,00	99,43	249.185.710,00
38	Kec. Kajoran	382.105.300,00	376.524.834,00	98,54	329.272.771,00
39	Kec. Kaliangkrik	393.078.880,00	380.751.058,00	96,86	314.071.957,00
40	Kec. Bandongan	357.572.126,00	340.589.364,00	95,25	508.912.833,00
41	Kec. Candimulyo	372.296.601,00	363.080.869,00	97,52	299.267.859,00
42	Kec. Pakis	380.832.930,00	370.940.607,00	97,40	328.203.576,00
43	Kec. Ngablak	351.651.874,00	351.088.915,00	99,84	259.443.646,00
44	Kec. Grabag	476.817.800,00	465.008.377,00	97,52	338.921.413,00
45	Kec. Tegalrejo	431.487.732,00	430.292.164,00	99,72	353.223.738,00
46	Kec. Secang	708.069.939,00	688.538.303,00	97,24	721.094.332,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
47	Kec. Windusari	337.778.000,00	307.512.911,00	91,04	369.807.463,00
48	Bakesbangpol	4.534.938.130,00	3.790.159.180,00	83,58	2.077.941.650,00
JUMLAH		592.039.828.847,00	553.587.132.203,00	93,51	517.021.760.708,00



Lampiran 5.6
Rincian Belanja Uang untuk Diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat Tahun 2023
dan 2022 per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	2.431.071.403,00	2.195.996.046,00	90,33	66.059.800,00
2	BPBD	188.538.474,00	179.929.082,00	95,43	1.058.800,00
3	Dinsos	1.100.302.263,00	990.051.349,00	89,98	6.199.400.000,00
4	Distanpangan	755.502.000,00	711.911.868,00	94,23	4.189.821.000,00
5	DLH	629.200.729,00	623.843.179,00	99,15	31.200.000,00
6	Dispermades	1.639.076.331,00	1.491.230.004,00	90,98	93.362.125,00
7	Dishub	553.370.372,00	546.892.460,00	98,83	0,00
8	Diskominfo	402.253.901,00	386.235.922,00	96,02	0,00
9	Disparpora	1.768.183.428,00	1.733.137.228,00	98,02	319.108.980,00
10	Dispeterikan	364.587.178,00	336.520.271,00	92,30	430.000.000,00
11	Setda	3.720.556.485,00	3.347.318.277,00	89,97	114.300.000,00
12	Bappelitbangda	1.212.494.077,00	1.126.784.062,00	92,93	113.079.650,00
13	BPPKAD	1.702.504.965,00	1.361.213.165,00	79,95	4.323.242.750,00
14	Kec. Borobudur	6.203.330,00	6.168.330,00	99,44	0,00
15	Kec. Mertoyudan	15.165.657,00	14.780.748,00	97,46	2.059.800,00
JUMLAH		16.489.010.593,00	15.052.011.991,00	91,29	15.882.692.905,00

Lampiran 5.7
Belanja Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/Masyarakat Tahun 2023 dan
2022 per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Dinkes	0,00	0,00	0,00	2.315.816.298,00
2	DPRKP	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Distanpangan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	74.525.000,00
5	DLH	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	59.410.298,00
6	Dishub	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
7	Disdagkop UKM	0,00	0,00	0,00	28.122.500,00
8	Disparpora	644.000.000,00	644.000.000,00	100,00	86.480.000,00
9	Setda	185.500.000,00	183.500.000,00	98,92	21.620.000,00
10	Set DPRD	0,00	0,00	0,00	440.033.750,00
11	BKPPD	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
12	Kec. Mungkid	0,00	0,00	0,00	4.240.000,00
13	Kec. Bandongan	0,00	0,00	0,00	40.640.000,00
JUMLAH		1.262.500.000,00	1.260.500.000,00	99,84	3.165.087.846,00

Lampiran 5.8
RINCIAN BELANJA BARANG DAN JASA BOS

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA BARANG DAN JASA BOS SEKOLAH DASAR (SD)						
1	SDN Pucanganom 1	42.788.600,00	18.426.500,00	550.000,00	-	61.765.100,00
2	SDN Srumbung 2	71.211.640,00	15.770.839,00	-	-	86.982.479,00
3	SDN Kradenan 2	39.514.200,00	20.341.100,00	1.080.000,00	-	60.935.300,00
4	SDN Kamongan	16.952.500,00	24.852.000,00	-	-	41.804.500,00
5	SDN Kradenan 1	21.981.850,00	26.598.850,00	550.000,00	-	49.130.700,00
6	SDN Sikepan 2	19.246.000,00	16.524.000,00	350.000,00	-	36.120.000,00
7	SDN Banyuadem	37.931.250,00	11.568.650,00	3.000.000,00	-	52.499.900,00
8	SDN Jerukagung 1	31.482.674,00	22.496.600,00	-	-	53.979.274,00
9	SDN Polengan 1	43.191.361,00	21.498.000,00	-	-	64.689.361,00
10	SDN Mranggen 1	39.667.384,00	60.869.156,00	1.660.000,00	-	102.196.540,00
11	SDN Sudimoro 2	57.153.587,00	22.644.000,00	1.750.000,00	-	81.547.587,00
12	SDN Jerukagung 2	24.204.900,00	20.745.100,00	1.250.000,00	-	46.200.000,00
13	SDN Mranggen 2	92.306.400,00	10.836.700,00	-	-	103.143.100,00
14	SDN Soka 1	55.440.453,00	19.755.150,00	-	-	75.195.603,00
15	SDN Kaliurang 2	45.597.900,00	5.932.700,00	1.800.000,00	-	53.330.600,00
16	SDN Jamblangan	27.962.293,00	11.719.440,00	-	-	39.681.733,00
17	SDN Soka 2	6.934.900,00	2.827.200,00	-	-	9.762.100,00
18	SDN Tegalarandu	71.058.900,00	10.219.900,00	-	-	81.278.800,00
19	SDN Ngablak	39.237.801,00	15.750.000,00	1.012.000,00	-	55.999.801,00
20	SDN Kemiren	46.803.550,00	5.960.650,00	7.000.000,00	-	59.764.200,00
21	SDN Srumbung 1	62.101.149,00	16.292.851,00	175.000,00	-	78.569.000,00
22	SDN Pandanretno	32.282.875,00	15.174.000,00	-	-	47.456.875,00
23	SDN Bringin 1	14.668.400,00	5.962.900,00	-	-	20.631.300,00
24	SDN Kradenan 3	59.652.232,00	4.915.868,00	4.500.000,00	-	69.068.100,00
25	SDN Sikepan 1	27.561.900,00	20.807.000,00	-	-	48.368.900,00
26	SDN Kaliurang 1	30.190.220,00	14.055.000,00	-	-	44.245.220,00
27	SDN Sudimoro 1	23.248.700,00	12.951.000,00	600.000,00	-	36.799.700,00
28	SDN Kartoharjo	58.451.000,00	50.340.000,00	2.741.500,00	240.000,00	111.772.500,00
29	SDN Tlogorejo	19.479.000,00	21.021.000,00	-	100.000,00	40.600.000,00
30	SDN Salam	35.890.242,00	41.400.458,00	1.770.000,00	2.475.000,00	81.535.700,00
31	SDN Lebak	50.852.000,00	54.748.000,00	400.000,00	400.000,00	106.400.000,00
32	SDN Baleagung	19.832.385,00	49.751.840,00	5.413.775,00	100.000,00	75.098.000,00
33	SDN Grabag 3	43.702.652,00	65.267.348,00	2.500.000,00	1.230.000,00	112.700.000,00
34	SDN Tirta	40.724.800,00	35.739.600,00	5.175.000,00	530.000,00	82.169.400,00
35	SDN Sambungrejo	34.033.974,00	20.881.026,00	1.050.000,00	1.135.000,00	57.100.000,00
36	SDN Pucungsari	39.344.400,00	53.268.600,00	29.575.000,00	2.420.000,00	124.608.000,00
37	SDN Kleteran 1	52.515.995,00	80.801.505,00	6.330.000,00	1.872.000,00	141.519.500,00
38	SDN Kalipucang	50.230.642,00	59.727.358,00	4.230.000,00	1.612.000,00	115.800.000,00
39	SDN Ngrancah	49.073.940,00	42.501.660,00	2.514.400,00	160.000,00	94.250.000,00
40	SDN Sugihmas 2	29.426.180,00	51.831.820,00	2.235.000,00	450.000,00	83.943.000,00
41	SDN Citrosoho	48.186.240,00	26.981.760,00	5.012.000,00	320.000,00	80.500.000,00
42	SDN Losari	20.262.900,00	32.216.100,00	5.371.000,00	-	57.850.000,00
43	SDN Sumurarum	56.798.962,00	106.682.338,00	615.000,00	860.000,00	164.956.300,00
44	SDN Cokro	58.593.890,00	62.923.110,00	3.083.000,00	800.000,00	125.400.000,00
45	SDN Grabag 1	192.154.319,00	292.190.481,00	11.713.200,00	2.910.000,00	498.968.000,00
46	SDN Kayupuring	44.572.769,00	59.479.231,00	1.200.000,00	548.000,00	105.800.000,00
47	SDN Klegen	36.646.500,00	27.886.500,00	-	945.000,00	65.478.000,00
48	SDN Pesidi	53.197.148,00	57.508.852,00	3.515.000,00	1.585.000,00	115.806.000,00
49	SDN Banyusari	45.032.815,00	40.870.085,00	8.000.000,00	835.000,00	94.737.900,00
50	SDN Banjarsari	18.243.600,00	41.927.500,00	8.555.000,00	600.000,00	69.326.100,00
51	SDN Ketawang 1	16.765.300,00	50.136.000,00	500.000,00	100.000,00	67.501.300,00
52	SDN Ketawang 2	42.905.921,00	53.498.279,00	10.830.000,00	980.000,00	108.214.200,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
53	SDN Kalikuto	21.185.384,00	53.052.616,00	5.140.000,00	-	79.378.000,00
54	SDN Sugihmas 1	73.288.700,00	34.994.500,00	16.300.000,00	500.000,00	125.083.200,00
55	SDN Bono	36.665.355,00	23.931.945,00	402.000,00	-	60.999.300,00
56	SDN Banaran 1	91.390.543,00	91.617.457,00	15.732.000,00	3.760.000,00	202.500.000,00
57	SDN Pagonan	39.223.485,00	25.444.015,00	1.812.000,00	864.000,00	67.343.500,00
58	SDN Ngasinan 2	37.376.870,00	43.026.330,00	6.165.000,00	2.075.000,00	88.643.200,00
59	SDN Kleteran 3	38.153.575,00	49.946.425,00	-	-	88.100.000,00
60	SDN Ngasinan 1	33.914.500,00	41.786.000,00	1.325.000,00	-	77.025.500,00
61	SDN Giriwetan	56.628.028,00	44.321.972,00	17.650.000,00	1.200.000,00	119.800.000,00
62	SDN Salaman 1	96.665.018,00	88.359.982,00	18.900.000,00	1.375.000,00	205.300.000,00
63	SDN Salaman 2	14.327.807,00	22.541.093,00	2.925.000,00	-	39.793.900,00
64	SDN Salaman 3	54.951.982,00	58.998.018,00	150.000,00	-	114.100.000,00
65	SDN Salaman 4	32.199.736,00	12.957.664,00	7.000.000,00	-	52.157.400,00
66	SDN Jebengsari	47.346.157,00	42.453.843,00	2.300.000,00	-	92.100.000,00
67	SDN Sidomulyo 1	32.184.650,00	38.967.750,00	620.000,00	1.825.000,00	73.597.400,00
68	SDN Sidomulyo 2	28.996.029,00	30.988.971,00	1.240.000,00	2.925.000,00	64.150.000,00
69	SDN Kebonrejo 1	34.214.429,00	68.294.771,00	925.000,00	-	103.434.200,00
70	SDN Kebonrejo 2	38.528.163,00	52.663.837,00	6.277.000,00	231.000,00	97.700.000,00
71	SDN Banjarharjo	37.498.142,00	53.509.358,00	895.000,00	875.000,00	92.777.500,00
72	SDN Tanjunganom	39.594.135,00	27.044.865,00	686.000,00	-	67.325.000,00
73	SDN Pancar	38.962.684,00	46.439.370,00	2.856.796,00	2.200.000,00	90.458.850,00
74	SDN Purwosari	33.434.334,00	29.526.466,00	1.755.000,00	1.400.000,00	66.115.800,00
75	SDN Ngarogretno 1	67.056.249,00	52.396.551,00	2.930.000,00	3.250.000,00	125.632.800,00
76	SDN Ngarogretno 2	41.941.637,00	25.517.513,00	7.310.850,00	1.830.000,00	76.600.000,00
77	SDN Paripurno	112.894.067,00	89.446.933,00	1.800.000,00	2.425.000,00	206.566.000,00
78	SDN Kalirejo 1	83.358.664,00	36.132.636,00	9.410.000,00	110.000,00	129.011.300,00
79	SDN Kalirejo 3	41.728.394,00	23.293.606,00	125.000,00	600.000,00	65.747.000,00
80	SDN Beteng	33.346.241,00	72.015.059,00	2.030.000,00	50.000,00	107.441.300,00
81	SDN Menoreh	40.678.210,00	32.922.190,00	4.699.600,00	100.000,00	78.400.000,00
82	SDN Ngadirejo	86.394.968,00	66.930.032,00	1.675.000,00	-	155.000.000,00
83	SDN Kalisalak	46.764.641,00	44.644.859,00	-	4.485.000,00	95.894.500,00
84	SDN Sriwedari 1	37.994.118,00	37.180.882,00	825.000,00	2.300.000,00	78.300.000,00
85	SDN Sriwedari 2	44.565.076,00	36.815.924,00	-	-	81.381.000,00
86	SDN Krasak 1	43.347.811,00	24.207.189,00	650.000,00	1.595.000,00	69.800.000,00
87	SDN Krasak 2	21.931.415,00	20.260.485,00	-	50.000,00	42.241.900,00
88	SDN Margoyoso	66.646.315,00	36.393.685,00	2.800.000,00	80.000,00	105.920.000,00
89	SDN Kaliabu	39.560.070,00	36.926.830,00	1.350.000,00	-	77.836.900,00
90	SDN Sawangargo	63.189.441,00	34.311.559,00	-	-	97.501.000,00
91	SDN Sidosari	17.070.439,00	29.287.561,00	-	442.000,00	46.800.000,00
92	SDN Saratan	24.036.277,00	28.955.723,00	300.000,00	-	53.292.000,00
93	SDN Panca Arga 1	52.335.044,00	61.008.331,00	3.456.625,00	-	116.800.000,00
94	SDN Kalinegoro 1	34.164.194,00	30.672.706,00	-	320.000,00	65.156.900,00
95	SDN Soroyudan	64.890.452,00	81.817.348,00	150.000,00	2.510.000,00	149.367.800,00
96	SDN Danurejo 1	108.063.464,00	91.192.036,00	-	5.900.000,00	205.155.500,00
97	SDN Sukorejo 3	41.666.961,00	48.298.839,00	1.625.000,00	440.000,00	92.030.800,00
98	SDN Sukorejo 1	58.834.080,00	50.826.320,00	-	-	109.660.400,00
99	SDN Banyak	43.129.702,00	51.298.298,00	3.212.000,00	660.000,00	98.300.000,00
100	SDN Pasuruhan 1	24.795.798,00	75.204.202,00	1.600.000,00	-	101.600.000,00
101	SDN Banjarnegoro 3	43.671.702,00	33.526.398,00	-	-	77.198.100,00
102	SDN Sumberrejo	36.865.400,00	32.934.650,00	4.287.950,00	-	74.088.000,00
103	SDN Deyangan 1	35.343.258,00	48.161.442,00	400.000,00	-	83.904.700,00
104	SDN Sukorejo 2	-	-	-	-	-
105	SDN Mertoyudan 1	68.402.370,00	91.236.830,00	650.000,00	-	160.289.200,00
106	SDN Banyurojo 3	22.801.975,00	44.587.425,00	-	-	67.389.400,00
107	SDN Permitan 2	24.181.056,00	41.474.144,00	-	-	65.655.200,00
108	SDN Kalinegoro 2	35.558.214,00	54.269.086,00	5.000.000,00	-	94.827.300,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
109	SDN Mertoyudan 3	60.008.510,00	50.701.490,00	-	890.000,00	111.600.000,00
110	SDN Kalinegoro 5	60.341.751,00	89.720.749,00	-	79.500,00	150.142.000,00
111	SDN Kalinegoro 6	49.198.500,00	46.943.600,00	500.000,00	260.000,00	96.902.100,00
112	SDN Bulurejo 1	10.711.718,00	27.057.910,00	672.072,00	-	38.441.700,00
113	SDN Banjarnegoro 1	49.469.193,00	45.925.707,00	5.657.000,00	-	101.051.900,00
114	SDN Kalinegoro 3	49.563.750,00	103.861.250,00	38.575.000,00	-	192.000.000,00
115	SDN Jogonegoro 1	40.122.488,00	41.278.512,00	-	-	81.401.000,00
116	SDN Pirikan	50.713.277,00	52.781.923,00	3.800.000,00	1.204.800,00	108.500.000,00
117	SDN Deyangan 2	23.441.835,00	36.010.165,00	444.000,00	104.000,00	60.000.000,00
118	SDN Pasuruhan 2	59.309.281,00	57.805.319,00	960.000,00	442.000,00	118.516.600,00
119	SDN Pasuruhan 4	27.448.592,00	58.937.908,00	1.186.800,00	900.000,00	88.473.300,00
120	SDN Soka	23.440.190,00	12.926.310,00	1.356.000,00	-	37.722.500,00
121	SDN Kalisari	21.999.622,00	42.037.378,00	13.000.000,00	-	77.037.000,00
122	SDN Banyurojo 2	32.988.367,00	45.287.633,00	1.394.000,00	-	79.670.000,00
123	SDN Banjarnegoro 2	16.401.150,00	6.998.850,00	-	-	23.400.000,00
124	SDN Permitan 1	45.966.813,00	71.963.187,00	-	150.000,00	118.080.000,00
125	SDN Tanjunganom	31.258.432,00	29.541.568,00	-	-	60.800.000,00
126	SDN Donorojo	32.667.716,00	60.724.984,00	2.000.000,00	-	95.392.700,00
127	SDN Banyurojo 1	60.169.397,00	66.030.603,00	-	-	126.200.000,00
128	SDN Treko 2	22.910.568,00	41.249.832,00	12.220.000,00	1.066.000,00	77.446.400,00
129	SDN Bumirejo 1	48.820.005,00	50.105.495,00	-	550.000,00	99.475.500,00
130	SDN Ngrajak 1	25.884.464,00	70.187.936,00	7.689.000,00	900.000,00	104.661.400,00
131	SDN Rambeanak 2	51.885.455,00	54.414.545,00	1.500.000,00	-	107.800.000,00
132	SDN Pabelan 3	63.537.504,00	48.782.496,00	11.600.000,00	1.380.000,00	125.300.000,00
133	SDN Blondo	80.116.033,00	86.149.277,00	3.125.000,00	-	169.390.310,00
134	SDN Bojong 1	51.937.927,00	49.500.473,00	5.400.000,00	22.000,00	106.860.400,00
135	SDN Gondang	10.945.870,00	22.782.330,00	400.000,00	500.000,00	34.628.200,00
136	SDN Mendut	40.011.365,00	75.073.635,00	11.415.000,00	-	126.500.000,00
137	SDN Mungkid 1	23.277.799,00	40.888.701,00	-	-	64.166.500,00
138	SDN Senden 2	30.391.494,00	49.127.406,00	830.000,00	2.030.000,00	82.378.900,00
139	SDN Pagersari	24.305.205,00	31.546.795,00	8.668.000,00	280.000,00	64.800.000,00
140	SDN Bumirejo 2	14.286.289,00	27.981.511,00	-	600.000,00	42.867.800,00
141	SDN Treko 1	18.666.140,00	26.656.760,00	2.739.000,00	1.025.000,00	49.086.900,00
142	SDN Paremono 3	25.205.546,00	33.690.158,00	2.122.000,00	500.000,00	61.517.704,00
143	SDN Progowati 1	48.142.299,00	85.282.701,00	825.000,00	3.150.000,00	137.400.000,00
144	SDN Mungkid 2	44.320.841,00	51.699.159,00	2.150.000,00	-	98.170.000,00
145	SDN Pabelan 2	37.758.013,00	54.637.987,00	129.000,00	725.000,00	93.250.000,00
146	SDN Rambeanak 1	34.690.989,00	37.909.011,00	2.600.000,00	600.000,00	75.800.000,00
147	SDN Ambartawang	34.513.620,00	61.845.580,00	3.510.000,00	3.000.000,00	102.869.200,00
148	SDN Paremono 1	30.086.926,00	36.085.674,00	873.000,00	-	67.045.600,00
149	SDN Sawitan	46.699.839,00	71.989.861,00	3.999.000,00	-	122.688.700,00
150	SDN Paremono 4	50.745.698,00	53.829.002,00	130.000,00	-	104.704.700,00
151	SDN Banyuwangi 3	41.474.331,00	33.116.869,00	9.944.000,00	120.000,00	84.655.200,00
152	SDN Sukodadi 2	31.538.108,00	15.426.892,00	2.910.000,00	950.000,00	50.825.000,00
153	SDN Kebonagung 2	24.155.152,00	21.795.400,00	200.000,00	1.055.000,00	47.205.552,00
154	SDN Sukodadi 1	32.402.184,00	22.304.816,00	5.913.000,00	420.000,00	61.040.000,00
155	SDN Tonobojo 2	14.632.792,00	25.382.208,00	650.000,00	835.000,00	41.500.000,00
156	SDN Rejosari 1	77.017.881,00	17.990.152,00	-	-	95.008.033,00
157	SDN Trasan 1	40.488.600,00	28.440.800,00	6.953.000,00	-	75.882.400,00
158	SDN Banyuwangi 2	22.825.900,00	20.368.650,00	2.348.250,00	324.000,00	45.866.800,00
159	SDN Kalegen 1	59.176.150,00	24.781.550,00	1.690.000,00	-	85.647.700,00
160	SDN Salamkanci 1	18.618.092,00	32.059.408,00	2.616.500,00	-	53.294.000,00
161	SDN Gandusari 1	34.253.316,00	25.007.684,00	3.282.000,00	-	62.543.000,00
162	SDN Sukosari	76.797.188,00	4.460.000,00	1.140.000,00	-	82.397.188,00
163	SDN Bandongan 3	142.713.819,00	153.866.181,00	10.000.000,00	920.000,00	307.500.000,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
164	SDN Sidorejo	27.357.754,00	23.893.150,00	4.017.000,00	-	55.267.904,00
165	SDN Salamkanci 2	36.994.000,00	18.256.000,00	-	-	55.250.000,00
166	SDN Bandongan 4	39.742.126,00	21.957.874,00	-	200.000,00	61.900.000,00
167	SDN Rejosari 2	29.199.050,00	45.512.950,00	3.745.500,00	160.000,00	78.617.500,00
168	SDN Tonoboyo 1	23.277.108,00	25.952.600,00	210.000,00	260.000,00	49.699.708,00
169	SDN Trasan 4	11.395.608,00	16.005.330,00	600.000,00	900.000,00	28.900.938,00
170	SDN Kebonagung 1	35.129.103,00	32.797.068,00	390.629,00	207.500,00	68.524.300,00
171	SDN Banyuwangi 1	61.347.100,00	19.206.900,00	2.820.000,00	-	83.374.000,00
172	SDN Gandusari 2	56.507.416,00	8.104.784,00	2.455.000,00	-	67.067.200,00
173	SDN Bandongan 1	51.815.109,00	71.729.301,00	5.452.985,00	1.430.000,00	130.427.395,00
174	SDN Kalegen 2	42.378.816,00	30.692.384,00	-	600.000,00	73.671.200,00
175	SDN Trasan 2	33.492.350,00	41.916.750,00	1.392.000,00	160.000,00	76.961.100,00
176	SDN Ngepanrejo	71.533.200,00	59.218.900,00	1.671.000,00	1.491.000,00	133.914.100,00
177	SDN Kedungsari	24.751.025,00	35.589.375,00	8.218.000,00	-	68.558.400,00
178	SDN Dukun 4	14.560.450,00	12.445.050,00	-	-	27.005.500,00
179	SDN Banyubiru 2	74.407.351,00	49.540.949,00	18.544.000,00	1.600.000,00	144.092.300,00
180	SDN Banyudono 1	53.337.044,00	15.462.956,00	700.000,00	-	69.500.000,00
181	SDN Mangunsoka	12.572.475,00	12.377.825,00	-	-	24.950.300,00
182	SDN Dukun 1	36.305.300,00	12.247.600,00	232.000,00	-	48.784.900,00
183	SDN Keningar 1	23.494.700,00	17.565.000,00	-	-	41.059.700,00
184	SDN Sewukan 1	54.018.300,00	43.931.700,00	2.550.000,00	-	100.500.000,00
185	SDN Sengi 1	15.965.701,00	44.474.299,00	6.060.000,00	-	66.500.000,00
186	SDN Dukun 3	14.174.960,00	14.627.540,00	-	-	28.802.500,00
187	SDN Sumber	10.060.775,00	10.134.225,00	-	-	20.195.000,00
188	SDN Ketunggeng 1	9.800.450,00	24.499.550,00	-	-	34.300.000,00
189	SDN Banyubiru 1	53.205.336,00	55.031.664,00	7.285.000,00	-	115.522.000,00
190	SDN Banyudono 2	38.815.119,00	28.211.081,00	125.000,00	3.762.000,00	70.913.200,00
191	SDN Krinjing 1	25.100.400,00	31.074.500,00	-	-	56.174.900,00
192	SDN Banyudono 4	37.788.901,00	18.761.099,00	250.000,00	-	56.800.000,00
193	SDN Dukun 2	23.421.925,00	25.320.625,00	-	-	48.742.550,00
194	SDN Paten 2	47.682.656,00	18.942.044,00	626.500,00	-	67.251.200,00
195	SDN Paten 1	14.353.360,00	11.080.540,00	696.000,00	-	26.129.900,00
196	SDN Ngargomulyo	18.856.000,00	24.068.000,00	1.376.000,00	1.900.000,00	46.200.000,00
197	SDN Krinjing 2	20.944.000,00	14.894.760,00	1.668.000,00	-	37.506.760,00
198	SDN Kalibening	22.735.050,00	18.485.650,00	-	-	41.220.700,00
199	SDN Ngadipuro	19.599.930,00	15.650.670,00	2.330.000,00	325.000,00	37.905.600,00
200	SDN Keningar 2	22.235.825,00	15.017.075,00	55.000,00	-	37.307.900,00
201	SDN Wates	25.741.120,00	17.671.880,00	725.000,00	-	44.138.000,00
202	SDN Sengi 2	51.838.000,00	33.762.000,00	3.500.000,00	-	89.100.000,00
203	SDN Sedayu 1	58.048.869,00	70.516.331,00	2.595.000,00	-	131.160.200,00
204	SDN Sedayu 2	34.064.662,00	46.125.738,00	-	-	80.190.400,00
205	SDN Tamanagung 1	37.563.920,00	22.769.680,00	1.623.000,00	-	61.956.600,00
206	SDN Ngawen 1	24.927.540,00	27.273.260,00	3.650.000,00	-	55.850.800,00
207	SDN Adikarto 2	25.025.763,00	45.528.237,00	224.000,00	-	70.778.000,00
208	SDN Adikarto 1	27.628.600,00	40.464.000,00	-	1.456.000,00	69.548.600,00
209	SDN Tamanagung 2	38.473.213,00	83.537.787,00	-	-	122.011.000,00
210	SDN Keji 1	35.597.585,00	45.273.215,00	2.744.000,00	-	83.614.800,00
211	SDN Keji 2	40.383.039,00	63.651.561,00	24.200.000,00	-	128.234.600,00
212	SDN Tamanagung 4	51.547.292,00	48.420.308,00	1.180.000,00	-	101.147.600,00
213	SDN Sokorini 1	43.094.264,00	49.636.879,00	9.528.657,00	-	102.259.800,00
214	SDN Gondosuli 1	14.668.600,00	27.236.000,00	-	-	41.904.600,00
215	SDN Gunungpring 1	27.642.178,00	72.549.822,00	-	-	100.192.000,00
216	SDN Sriwedari 1	48.031.800,00	58.940.200,00	3.823.000,00	50.000,00	110.845.000,00
217	SDN Gondosuli 2	20.265.696,00	70.751.604,00	-	-	91.017.300,00
218	SDN Muntilan 3	22.666.636,00	32.533.064,00	1.512.500,00	-	56.712.200,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
219	SDN Congkrang 1	45.573.098,00	48.081.802,00	-	-	93.654.900,00
220	SDN Pucungrejo 1	43.661.688,00	54.803.312,00	-	-	98.465.000,00
221	SDN Pucungrejo 2	57.487.715,00	34.882.685,00	420.000,00	-	92.790.400,00
222	SDN Gunungpring 3	34.614.389,00	45.171.911,00	2.404.000,00	-	82.190.300,00
223	SDN Gunungpring 4	47.513.189,00	58.631.311,00	-	-	106.144.500,00
224	SDN Sedayu 4	18.721.700,00	36.634.000,00	-	-	55.355.700,00
225	SDN Muntilan	92.561.368,00	161.039.032,00	10.475.000,00	300.000,00	264.375.400,00
226	SDN Tanjung	32.093.200,00	36.048.000,00	-	-	68.141.200,00
227	SDN Menayu 1	45.462.956,00	34.656.844,00	-	2.496.000,00	82.615.800,00
228	SDN Congkrang 2	25.556.760,00	44.158.340,00	-	-	69.715.100,00
229	SDN Menayu 2	59.379.289,00	29.974.711,00	-	154.000,00	89.508.000,00
230	SDN Tamanagung 3	2.808.731,00	7.934.450,00	-	-	10.743.181,00
231	SDN Sokorini 2	13.906.950,00	21.594.850,00	-	-	35.501.800,00
232	SDN Gunungpring 2	84.845.850,00	101.198.250,00	-	-	186.044.100,00
233	SDN Selomoyo	82.950.370,00	20.445.930,00	2.748.000,00	-	106.144.300,00
234	SDN Munggangsari	85.653.200,00	21.167.100,00	2.825.000,00	-	109.645.300,00
235	SDN Beseran	40.801.094,00	22.998.906,00	-	-	63.800.000,00
236	SDN Ketangi	42.681.165,00	38.521.915,00	7.060.000,00	-	88.263.080,00
237	SDN Prampelan 2	41.385.400,00	15.801.300,00	5.326.000,00	-	62.512.700,00
238	Sd-Smpn Satu Atap Prampelan	49.814.625,00	23.198.375,00	2.887.000,00	-	75.900.000,00
239	SDN Bumirejo	57.457.247,00	18.193.953,00	5.156.000,00	425.000,00	81.232.200,00
240	SDN Girirejo	11.966.950,00	3.759.650,00	1.170.000,00	-	16.896.600,00
241	SDN Balerejo	70.613.900,00	14.201.300,00	1.700.000,00	-	86.515.200,00
242	SDN Ngawonggo 1	83.420.936,00	26.811.800,00	710.000,00	4.650.000,00	115.592.736,00
243	SDN Banjarejo	13.525.910,00	18.437.090,00	-	-	31.963.000,00
244	SDN Mangli	60.540.575,00	34.546.025,00	1.817.000,00	362.000,00	97.265.600,00
245	SDN Temanggung 1	78.349.600,00	7.604.200,00	11.160.000,00	-	97.113.800,00
246	SDN Ngendrokilo	42.627.350,00	9.175.350,00	10.150.000,00	150.000,00	62.102.700,00
247	SDN Pengarengan 1	78.288.000,00	19.808.000,00	3.600.000,00	-	101.696.000,00
248	SDN Balekerto	51.752.200,00	28.701.100,00	15.301.700,00	360.000,00	96.115.000,00
249	SDN Ngargosoko	42.025.900,00	39.198.000,00	6.950.000,00	-	88.173.900,00
250	SDN Butuh 1	71.071.550,00	12.858.450,00	8.370.000,00	-	92.300.000,00
251	SDN Kaliangkrik 1	71.516.480,00	30.344.301,00	2.305.000,00	-	104.165.781,00
252	SDN Ngawonggo 2	79.493.650,00	71.997.850,00	300.000,00	600.000,00	152.391.500,00
253	SDN Kebonlegi	56.818.100,00	20.248.600,00	977.000,00	270.000,00	78.313.700,00
254	SDN Maduretno	10.122.800,00	9.185.370,00	-	-	19.308.170,00
255	SDN Giriwarno	42.092.574,00	6.399.926,00	367.500,00	-	48.860.000,00
256	SDN Petung 1	80.250.000,00	21.945.000,00	2.165.000,00	2.620.000,00	106.980.000,00
257	SDN Warangan 1	28.666.900,00	29.295.600,00	435.000,00	2.555.000,00	60.952.500,00
258	SDN Bawang 1	61.727.100,00	59.057.405,00	1.620.495,00	8.025.000,00	130.430.000,00
259	SDN Kaponan	48.092.300,00	21.977.980,00	1.340.000,00	3.512.000,00	74.922.280,00
260	SDN Warangan 2	28.429.600,00	16.113.000,00	-	2.210.000,00	46.752.600,00
261	SDN Pogalan 3	60.693.200,00	21.332.500,00	2.070.000,00	3.200.000,00	87.295.700,00
262	SDN Ketundan 2	59.727.975,00	32.568.025,00	100.000,00	3.440.000,00	95.836.000,00
263	SDN Ketundan 1	15.183.999,00	32.997.701,00	320.000,00	1.000.000,00	49.501.700,00
264	SDN Gumelem 1	84.992.900,00	43.421.500,00	-	12.533.000,00	140.947.400,00
265	SDN Jambewangi	13.136.000,00	13.659.000,00	325.000,00	1.480.000,00	28.600.000,00
266	SDN Daseh	6.886.900,00	10.368.000,00	-	-	17.254.900,00
267	SDN Gejagan	47.341.840,00	32.809.960,00	-	9.697.000,00	89.848.800,00
268	SDN Wiropati	60.896.890,00	23.294.210,00	3.125.000,00	3.400.000,00	90.716.100,00
269	SDN Banyusidi	39.240.800,00	35.978.000,00	2.400.000,00	3.370.000,00	80.988.800,00
270	SDN Sobowono	62.268.336,00	50.844.264,00	800.000,00	4.581.800,00	118.494.400,00
271	SDN Kajangkoso	17.305.700,00	13.927.000,00	-	480.000,00	31.712.700,00
272	SDN Daleman Kidul 2	73.513.000,00	12.063.500,00	-	2.950.000,00	88.526.500,00
273	SDN Gondangsari 1	61.325.048,00	52.220.452,00	-	-	113.545.500,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
274	SDN Rejosari	37.036.996,00	42.720.504,00	-	7.200.000,00	86.957.500,00
275	SDN Gejayan	32.549.550,00	36.250.450,00	3.000.000,00	-	71.800.000,00
276	SDN Kenalan	25.000.300,00	21.978.800,00	3.990.000,00	4.255.000,00	55.224.100,00
277	SDN Pogalan 1	60.455.012,00	49.416.988,00	8.636.000,00	4.092.000,00	122.600.000,00
278	SDN Sekayu	28.159.400,00	22.180.500,00	-	2.640.000,00	52.979.900,00
279	SDN Losari	16.987.400,00	16.891.500,00	-	-	33.878.900,00
280	SDN Dalem Kidul 1	33.829.106,00	33.965.000,00	425.000,00	2.850.000,00	71.069.106,00
281	SDN Krasak	27.461.700,00	44.202.000,00	2.668.000,00	8.465.000,00	82.796.700,00
282	SDN Kragilan	110.659.080,00	28.640.920,00	8.450.000,00	4.420.000,00	152.170.000,00
283	SDN Muneng 1	21.320.400,00	40.657.000,00	6.750.000,00	3.390.000,00	72.117.400,00
284	SDN Petung 2	62.792.500,00	36.604.500,00	-	3.665.000,00	103.062.000,00
285	SDN Pakis 1	75.133.950,00	94.254.250,00	1.650.000,00	6.025.000,00	177.063.200,00
286	SDN Kangkungan	19.994.297,00	24.655.703,00	2.200.000,00	2.750.000,00	49.600.000,00
287	SDN Jumoyo 4	45.508.800,00	36.941.200,00	35.650.000,00	-	118.100.000,00
288	SDN Mantingan	14.209.900,00	15.492.700,00	2.197.400,00	-	31.900.000,00
289	SDN Kadiluwih	36.788.100,00	27.591.800,00	8.265.000,00	-	72.644.900,00
290	SDN Somoketro	25.451.461,00	30.844.739,00	1.780.000,00	-	58.076.200,00
291	SDN Sirahan 1	33.346.000,00	20.999.000,00	1.740.000,00	-	56.085.000,00
292	SDN Tersan Gede 1	63.758.098,00	46.541.902,00	1.100.000,00	-	111.400.000,00
293	SDN Jumoyo 2	71.218.176,00	89.734.024,00	4.050.000,00	210.000,00	165.212.200,00
294	SDN Baturono	25.028.415,00	10.954.585,00	6.981.000,00	-	42.964.000,00
295	SDN Gulon 4	40.523.654,00	42.471.346,00	14.705.000,00	-	97.700.000,00
296	SDN Gulon 1	46.282.545,00	40.828.155,00	11.050.000,00	1.350.000,00	99.510.700,00
297	SDN Sirahan 2	20.138.441,00	17.008.159,00	970.000,00	-	38.116.600,00
298	SDN Sucen	47.371.696,00	62.613.104,00	1.490.000,00	-	111.474.800,00
299	SDN Gulon 2	22.153.816,00	24.782.484,00	9.835.000,00	750.000,00	57.521.300,00
300	SDN Seloboro	36.308.141,00	40.574.459,00	1.500.000,00	750.000,00	79.132.600,00
301	SDN Tirto	19.412.270,00	18.151.840,00	-	-	37.564.110,00
302	SDN Gulon 5	36.381.400,00	46.518.600,00	14.500.000,00	-	97.400.000,00
303	SDN Tersan Gede 2	17.372.014,00	47.977.986,00	450.000,00	-	65.800.000,00
304	SDN Salam 1	70.820.678,00	53.052.522,00	6.850.000,00	-	130.723.200,00
305	SDN Jambu	52.086.700,00	61.156.300,00	1.210.000,00	3.525.000,00	117.978.000,00
306	SDN Sidoagung 1	35.462.112,00	49.675.688,00	-	2.832.000,00	87.969.800,00
307	SDN Sidoagung 3	52.071.700,00	61.284.300,00	-	-	113.356.000,00
308	SDN Sidoagung 2	26.801.300,00	34.362.200,00	-	-	61.163.500,00
309	SDN Tugurejo	20.529.500,00	19.814.500,00	-	156.000,00	40.500.000,00
310	SDN Ringinanom 2	45.633.950,00	56.971.350,00	-	4.624.000,00	107.229.300,00
311	SDN Tempurejo 2	40.846.000,00	54.098.000,00	406.000,00	1.750.000,00	97.100.000,00
312	SDN Prajagsari 1	32.163.425,00	49.390.309,00	131.066,00	-	81.684.800,00
313	SDN Kalisari 1	19.524.899,00	35.123.101,00	1.285.000,00	300.000,00	56.233.000,00
314	SDN Tanggurejo 1	82.175.168,00	64.940.832,00	19.393.000,00	5.938.000,00	172.447.000,00
315	SDN Ringinanom 1	78.140.400,00	111.500.000,00	11.767.500,00	-	201.407.900,00
316	SDN Kemutuk	20.836.015,00	27.265.985,00	-	8.675.000,00	56.777.000,00
317	SDN Girirejo 2	44.562.104,00	38.901.196,00	2.550.000,00	3.042.000,00	89.055.300,00
318	SDN Prajagsari 2	54.534.230,00	29.702.770,00	-	1.968.000,00	86.205.000,00
319	SDN Bawang	21.302.800,00	14.019.500,00	-	-	35.322.300,00
320	SDN Sumberarum 1	97.188.510,00	78.788.690,00	-	-	175.977.200,00
321	SDN Jogomulyo	39.503.936,00	60.859.664,00	1.000.000,00	2.014.000,00	103.377.600,00
322	SDN Sumberarum 2	33.614.775,00	59.882.525,00	14.162.000,00	1.846.000,00	109.505.300,00
323	SDN Temanggal	28.538.255,00	4.423.445,00	-	-	32.961.700,00
324	SDN Kalisari 2	27.819.000,00	27.399.500,00	-	-	55.218.500,00
325	SDN Girirejo 1	12.874.000,00	36.878.500,00	4.300.000,00	2.891.000,00	56.943.500,00
326	SDN Tempurejo 1	30.588.116,00	61.377.084,00	3.670.000,00	10.565.000,00	106.200.200,00
327	SDN Growong	38.906.900,00	22.541.400,00	975.000,00	-	62.423.300,00
328	SDN Kebonagung	9.977.000,00	33.565.200,00	130.000,00	-	43.672.200,00
329	SDN Banyuurip 2	38.555.300,00	23.136.800,00	2.560.000,00	240.000,00	64.492.100,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
330	SDN Klopo 2	17.175.500,00	17.084.000,00	-	480.000,00	34.739.500,00
331	SDN Donorojo	21.279.580,00	18.432.720,00	-	240.000,00	39.952.300,00
332	SDN Dlimas	40.266.241,00	61.093.259,00	200.000,00	156.000,00	101.715.500,00
333	SDN Tampingan 2	20.564.588,00	32.848.712,00	-	650.000,00	54.063.300,00
334	SDN Wonosuko	45.905.080,00	37.181.830,00	10.078.090,00	4.155.000,00	97.320.000,00
335	SDN Sukorejo	83.437.220,00	35.899.480,00	280.000,00	2.770.000,00	122.386.700,00
336	SDN Sidorejo 1	51.084.900,00	56.168.100,00	4.500.000,00	-	111.753.000,00
337	SDN Dawung	27.640.797,00	20.878.203,00	-	1.937.000,00	50.456.000,00
338	SDN Purwosari	30.195.092,00	40.951.708,00	-	496.000,00	71.642.800,00
339	SDN Girirejo	17.417.995,00	28.303.905,00	3.000.000,00	715.000,00	49.436.900,00
340	SDN Tampingan 1	62.077.252,00	50.530.048,00	7.840.000,00	290.000,00	120.737.300,00
341	SDN Glagahombo	52.740.071,00	33.002.029,00	4.005.000,00	1.920.000,00	91.667.100,00
342	SDN Ngasem	30.247.900,00	31.712.000,00	350.000,00	174.000,00	62.483.900,00
343	SDN Soroyudan	65.416.700,00	47.140.300,00	6.060.000,00	1.000.000,00	119.617.000,00
344	SDN Banyuurip 1	36.530.315,00	31.869.685,00	400.000,00	300.000,00	69.100.000,00
345	SDN Mangunrejo	46.177.935,00	41.455.265,00	1.694.000,00	1.050.000,00	90.377.200,00
346	SDN Purwodadi	19.047.987,00	26.556.613,00	320.000,00	1.816.000,00	47.740.600,00
347	SDN Klopo 1	24.428.780,00	28.858.220,00	300.000,00	696.000,00	54.283.000,00
348	SDN Japan	39.971.863,00	18.907.037,00	230.000,00	1.260.000,00	60.368.900,00
349	SDN Wonokerto	31.580.721,00	26.068.280,00	-	620.000,00	58.269.001,00
350	SDN Geger	23.216.200,00	41.713.800,00	5.925.000,00	687.500,00	71.542.500,00
351	SDN Tegalrejo	87.073.781,00	94.435.819,00	1.950.000,00	1.275.000,00	184.734.600,00
352	SDN Banyusari	37.193.707,00	36.736.493,00	750.000,00	3.160.000,00	77.840.200,00
353	SDN Ngadirejo	34.084.655,00	29.376.690,00	-	-	63.461.345,00
354	SDN Butuh 1	37.385.943,00	23.892.057,00	700.000,00	1.966.000,00	63.944.000,00
355	SDN Podosoko 1	54.458.700,00	17.080.000,00	3.101.300,00	460.000,00	75.100.000,00
356	SDN Sawangan 3	48.879.300,00	21.627.300,00	-	1.150.000,00	71.656.600,00
357	SDN Butuh 2	16.833.790,00	15.052.210,00	-	-	31.886.000,00
358	SDN Soronalan 2	15.693.600,00	23.717.200,00	3.000.000,00	4.122.000,00	46.532.800,00
359	SDN Banyuroto 1	117.174.600,00	67.308.000,00	1.355.000,00	5.458.000,00	191.295.600,00
360	SDN Ketep 1	95.870.152,00	33.596.648,00	6.826.000,00	6.020.000,00	142.312.800,00
361	SDN Podosoko 2	77.139.999,00	35.717.001,00	9.000.000,00	11.585.000,00	133.442.000,00
362	SDN Jati 3	14.055.344,00	15.771.656,00	3.228.000,00	1.020.000,00	34.075.000,00
363	SDN Soronalan 1	53.364.380,00	9.424.020,00	2.570.000,00	1.394.000,00	66.752.400,00
364	SDN Krogowanan	73.205.578,00	38.584.422,00	705.000,00	1.405.000,00	113.900.000,00
365	SDN Jati 1	36.408.010,00	13.216.240,00	1.182.500,00	850.000,00	51.656.750,00
366	SDN Wonolelo 3	56.095.267,00	93.955.833,00	19.300.000,00	4.819.000,00	174.170.100,00
367	SDN Podosoko 4	23.885.130,00	11.375.470,00	-	917.000,00	36.177.600,00
368	SDN Mangunsari 1	27.179.400,00	21.635.100,00	4.390.000,00	450.000,00	53.654.500,00
369	SDN Sawangan 4	13.994.850,00	11.782.650,00	750.000,00	120.000,00	26.647.500,00
370	SDN Sawangan 1	54.804.992,00	44.741.208,00	10.228.000,00	4.181.600,00	113.955.800,00
371	SDN Mangunsari 3	38.208.890,00	31.362.110,00	274.000,00	4.655.000,00	74.500.000,00
372	SDN Wonolelo 4	20.907.909,00	6.833.391,00	460.000,00	1.580.000,00	29.781.300,00
373	SDN Wulunggunung 1	60.995.240,00	21.239.360,00	200.000,00	6.340.000,00	88.774.600,00
374	SDN Tirtosari 1	24.315.800,00	25.778.200,00	-	1.538.000,00	51.632.000,00
375	SDN Gantang 2	20.456.696,00	13.865.604,00	1.650.000,00	2.820.000,00	38.792.300,00
376	SDN Kapuhan 2	44.988.740,00	16.906.260,00	500.000,00	1.975.000,00	64.370.000,00
377	SDN Wonolelo 1	85.558.574,00	51.340.226,00	377.000,00	4.665.000,00	141.940.800,00
378	SDN Kapuhan 1	58.197.200,00	8.453.200,00	9.450.000,00	240.000,00	76.340.400,00
379	SDN Gondowangi 1	48.022.525,00	40.799.275,00	400.000,00	400.000,00	89.621.800,00
380	SDN Jati 2	53.223.200,00	38.790.000,00	6.920.000,00	2.725.000,00	101.658.200,00
381	SDN Gantang 1	45.038.906,00	23.494.694,00	3.208.000,00	2.286.000,00	74.027.600,00
382	SDN Pandanretno	10.457.700,00	26.496.300,00	3.786.000,00	-	40.740.000,00
383	SDN Sutopati 1	37.132.500,00	52.250.000,00	18.647.500,00	-	108.030.000,00
384	SDN Wonogiri	37.926.000,00	27.440.000,00	13.461.000,00	-	78.827.000,00
385	SDN Kajoran 2	45.607.000,00	52.759.000,00	2.640.000,00	-	101.006.000,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
386	SDN Bangsri	30.764.200,00	35.686.800,00	-	-	66.451.000,00
387	SDN Kuwaderan 1	8.035.200,00	13.997.000,00	-	-	22.032.200,00
388	SDN Sambak	13.562.078,00	33.046.575,00	2.400.000,00	-	49.008.653,00
389	SDN Bambusari	7.839.191,00	29.073.350,00	2.425.600,00	-	39.338.141,00
390	SDN Wuwuharjo 2	40.327.700,00	32.315.000,00	6.490.000,00	-	79.132.700,00
391	SDN Banjaretno	22.983.275,00	37.798.225,00	-	-	60.781.500,00
392	SDN Kajoran 1	57.426.900,00	75.157.600,00	28.415.500,00	-	161.000.000,00
393	SDN Ngendrosari	16.900.000,00	19.536.000,00	264.000,00	-	36.700.000,00
394	SDN Sutopati 3	29.312.500,00	63.872.500,00	19.365.000,00	-	112.550.000,00
395	SDN Wuwuharjo 1	39.944.500,00	20.307.000,00	2.500.000,00	570.000,00	63.321.500,00
396	SDN Kuwaderan 2	30.340.075,00	63.921.925,00	3.403.000,00	-	97.665.000,00
397	SDN Ngargosari	12.088.802,00	18.847.998,00	1.415.000,00	-	32.351.800,00
398	SDN Sutopati 2	54.061.100,00	122.568.900,00	13.107.000,00	905.000,00	190.642.000,00
399	SDN Sidowangi	24.616.550,00	38.625.450,00	1.258.000,00	-	64.500.000,00
400	SDN Krinjing	23.123.800,00	34.446.820,00	14.595.000,00	-	72.165.620,00
401	SDN Mangunrejo	15.431.000,00	25.769.000,00	600.000,00	-	41.800.000,00
402	SDN Sutopati 4	45.744.000,00	65.033.500,00	20.722.500,00	600.000,00	132.100.000,00
403	SDN Lesanpuro	14.644.100,00	27.235.900,00	1.620.000,00	-	43.500.000,00
404	SDN Sidorejo	44.704.000,00	21.542.000,00	3.854.000,00	-	70.100.000,00
405	SDN Sutopati 5	30.467.400,00	70.632.000,00	4.800.600,00	-	105.900.000,00
406	SDN Sukomulyo	21.925.000,00	40.415.000,00	-	2.750.000,00	65.090.000,00
407	SDN Bumiayu	27.198.400,00	28.074.000,00	1.500.000,00	-	56.772.400,00
408	SDN Pandansari	38.874.500,00	47.260.000,00	2.080.000,00	-	88.214.500,00
409	SDN Pucungroto	72.333.250,00	67.857.600,00	14.594.850,00	-	154.785.700,00
410	SDN Banjaragung	11.305.900,00	9.681.100,00	3.113.000,00	-	24.100.000,00
411	SDN Somokaton 1	27.321.075,00	16.031.425,00	4.500.000,00	1.040.000,00	48.892.500,00
412	SDN Pakunden 1	6.259.584,00	1.570.723,00	-	-	7.830.307,00
413	SDN Druju 2	42.587.230,00	28.206.570,00	1.500.000,00	800.000,00	73.093.800,00
414	SDN Ngluwar 1	68.515.334,00	47.784.666,00	-	-	116.300.000,00
415	SDN Pakunden 3	22.515.192,00	20.726.308,00	8.459.000,00	1.025.000,00	52.725.500,00
416	SDN Ngluwar 3	29.130.421,00	23.925.579,00	2.060.000,00	-	55.116.000,00
417	SDN Blongkeng 1	19.904.825,00	26.153.675,00	1.824.000,00	-	47.882.500,00
418	SDN Blongkeng 3	14.175.645,00	3.024.455,00	-	-	17.200.100,00
419	SDN Karangtalun 1	78.132.940,00	31.616.060,00	-	-	109.749.000,00
420	SDN Bligo 1	32.048.262,00	17.769.538,00	-	1.024.000,00	50.841.800,00
421	SDN Somokaton 2	31.677.325,00	24.907.675,00	-	1.715.000,00	58.300.000,00
422	SDN Jamus 1	44.301.667,00	11.098.333,00	4.850.000,00	1.350.000,00	61.600.000,00
423	SDN Ngluwar 2	52.290.170,00	31.633.030,00	-	-	83.923.200,00
424	SDN Plosogede 1	21.108.061,00	21.863.489,00	2.000.000,00	-	44.971.550,00
425	SDN Karangtalun 2	52.461.689,00	13.272.511,00	6.270.000,00	4.625.000,00	76.629.200,00
426	SDN Jamus 2	24.893.675,00	17.176.825,00	100.000,00	1.660.000,00	43.830.500,00
427	SDN Bligo 3	12.261.950,00	2.593.850,00	-	-	14.855.800,00
428	SDN Pakunden 2	83.861.781,00	33.410.219,00	375.000,00	5.453.000,00	123.100.000,00
429	SDN Bligo 2	38.596.344,00	33.423.656,00	4.740.000,00	4.040.000,00	80.800.000,00
430	SDN Kanigoro 1	25.040.005,00	26.218.200,00	-	312.000,00	51.570.205,00
431	SDN Seloprojo	34.879.650,00	14.873.150,00	350.000,00	-	50.102.800,00
432	SDN Jogoyasan	53.349.300,00	41.426.200,00	16.820.000,00	-	111.595.500,00
433	SDN Madyogondo 3	91.079.600,00	26.840.100,00	5.025.000,00	-	122.944.700,00
434	SDN Kanigoro 2	12.850.318,00	13.879.682,00	-	-	26.730.000,00
435	SDN Girirejo 2	39.126.200,00	38.978.200,00	3.000.000,00	-	81.104.400,00
436	SDN Magersari	40.397.410,00	23.256.700,00	-	-	63.654.110,00
437	SDN Bandungrejo	61.463.150,00	22.388.050,00	2.100.500,00	-	85.951.700,00
438	SDN Pagergunung	63.402.900,00	21.097.200,00	7.827.500,00	312.000,00	92.639.600,00
439	SDN Pandean 1	55.385.050,00	19.171.450,00	17.011.500,00	-	91.568.000,00
440	SDN Ngablak 2	59.578.388,00	35.922.912,00	-	-	95.501.300,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
441	SDN Tejosari	44.604.850,00	66.674.150,00	927.000,00	-	112.206.000,00
442	SDN Selomirah	61.027.800,00	41.261.200,00	400.000,00	-	102.689.000,00
443	SDN Genikan	49.555.500,00	28.392.000,00	3.500.000,00	-	81.447.500,00
444	SDN Pandean 2	42.925.850,00	37.263.600,00	1.000.000,00	412.000,00	81.601.450,00
445	SDN Jagonayan	24.315.800,00	24.126.200,00	-	-	48.442.000,00
446	SDN Ngablak 1	67.729.700,00	44.361.600,00	2.714.500,00	-	114.805.800,00
447	SDN Girirejo 3	98.437.044,00	30.549.428,00	23.500.000,00	-	152.486.472,00
448	SDN Sumberejo 1	43.130.316,00	14.095.284,00	-	-	57.225.600,00
449	SDN Sumberejo 2	2.958.800,00	7.288.700,00	150.000,00	-	10.397.500,00
450	SDN Keditan	13.402.600,00	29.429.300,00	-	-	42.831.900,00
451	SDN Ngablak 5	17.231.100,00	16.598.700,00	1.470.200,00	-	35.300.000,00
452	SDN Madyogondo 2	22.198.300,00	20.929.700,00	-	-	43.128.000,00
453	SDN Secang 1	37.930.304,00	39.063.442,00	25.064.954,00	-	102.058.700,00
454	SDN Kalijoso	76.302.610,00	65.623.090,00	1.142.000,00	-	143.067.700,00
455	SDN Candisari	31.100.728,00	50.572.572,00	1.900.000,00	350.000,00	83.923.300,00
456	SDN Krincing	55.064.080,00	45.555.920,00	780.000,00	-	101.400.000,00
457	SDN Purwosari	17.624.710,00	35.778.040,00	22.250.000,00	-	75.652.750,00
458	SDN Sidomulyo	28.395.915,00	38.509.085,00	300.000,00	-	67.205.000,00
459	SDN Ngadirojo	79.243.250,00	61.115.950,00	-	-	140.359.200,00
460	SDN Payaman 2	9.768.140,00	17.231.860,00	-	-	27.000.000,00
461	SDN Pancuranmas	58.487.963,00	77.714.512,00	2.143.425,00	-	138.345.900,00
462	SDN Madyocondro	86.655.500,00	71.166.600,00	4.122.000,00	-	161.944.100,00
463	SDN Karangajen	8.517.376,00	30.332.624,00	250.000,00	-	39.100.000,00
464	SDN Kuwaluhan	54.329.679,00	24.966.421,00	-	-	79.296.100,00
465	SDN Pucang	114.829.078,00	105.034.622,00	13.512.000,00	998.000,00	234.373.700,00
466	SDN Girikulon	27.685.418,00	36.506.782,00	2.170.500,00	-	66.362.700,00
467	SDN Payaman 1	86.922.880,00	95.257.120,00	12.420.000,00	-	194.600.000,00
468	SDN Jambewangi	15.582.200,00	35.617.800,00	-	-	51.200.000,00
469	SDN Setan	33.196.462,00	22.329.738,00	865.000,00	-	56.391.200,00
470	SDN Ngabean	25.214.275,00	77.327.725,00	-	-	102.542.000,00
471	SDN Secang 3	64.984.625,00	93.515.375,00	-	-	158.500.000,00
472	SDN Pirikan	30.413.459,00	46.044.041,00	1.500.000,00	-	77.957.500,00
473	SDN Donomulyo	31.782.020,00	35.422.480,00	385.000,00	-	67.589.500,00
474	SDN Madusari	20.224.200,00	41.375.800,00	-	-	61.600.000,00
475	SDN Secang 2	99.329.551,00	65.682.594,00	3.887.855,00	-	168.900.000,00
476	SDN Tanjungsari	60.128.784,00	11.071.216,00	-	-	71.200.000,00
477	SDN Candirejo 1	73.904.132,00	67.359.868,00	2.336.000,00	-	143.600.000,00
478	SDN Ngadiharjo 1	44.688.771,00	37.900.829,00	4.350.000,00	-	86.939.600,00
479	SDN Satu Atap Kerugmunggang	22.455.900,00	25.751.500,00	1.050.000,00	-	49.257.400,00
480	SDN Giripurno 1	70.710.000,00	8.040.000,00	5.450.000,00	-	84.200.000,00
481	SDN Bumiharjo	42.059.000,00	19.180.000,00	5.361.000,00	-	66.600.000,00
482	SDN Bigaran	26.934.675,00	15.239.025,00	-	-	42.173.700,00
483	SDN Kebonsari	30.608.600,00	10.591.400,00	-	-	41.200.000,00
484	SDN Ngadiharjo 2	29.511.300,00	6.723.900,00	220.000,00	-	36.455.200,00
485	SDN Ngargogondo	27.717.225,00	23.946.475,00	-	-	51.663.700,00
486	SDN Ringinputih 2	59.908.256,00	80.017.444,00	-	-	139.925.700,00
487	SDN Giripurno 2	81.978.925,00	12.359.075,00	-	-	94.338.000,00
488	SDN Giritengah 2	70.175.700,00	12.888.000,00	-	-	83.063.700,00
489	SDN Ringinputih 1	38.915.275,00	10.106.725,00	175.000,00	100.000,00	49.297.000,00
490	SDN Candirejo 4	15.032.500,00	7.967.500,00	-	-	23.000.000,00
491	SDN Sambeng	25.990.700,00	10.143.800,00	-	520.000,00	36.654.500,00
492	SDN Tuksongo 1	50.949.500,00	25.930.500,00	4.820.000,00	-	81.700.000,00
493	SDN Kembanglimus	39.269.425,00	36.264.125,00	17.189.000,00	-	92.722.550,00
494	SDN Giritengah 1	37.248.900,00	14.010.100,00	1.799.000,00	90.000,00	53.148.000,00
495	SDN Ringinputih 3	106.981.219,00	22.521.881,00	-	-	129.503.100,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
496	SDN Tegalarum	14.947.150,00	27.700.050,00	700.000,00	-	43.347.200,00
497	SDN Borobudur 1	93.144.024,00	87.111.176,00	7.835.000,00	-	188.090.200,00
498	SDN Karanganyar	14.211.200,00	9.088.800,00	-	-	23.300.000,00
499	SDN Borobudur 2	67.325.850,00	137.278.150,00	-	-	204.604.000,00
500	SDN Majaksingi	89.763.700,00	27.966.300,00	-	-	117.730.000,00
501	SDN Wanurejo	79.356.750,00	60.495.000,00	502.650,00	-	140.354.400,00
502	SDN Karangrejo	72.172.800,00	25.018.900,00	-	-	97.191.700,00
503	SDN Tanjungsari 2	64.349.694,00	48.950.300,00	-	-	113.299.994,00
504	SDN Gondangrejo	93.031.500,00	70.768.500,00	-	-	163.800.000,00
505	SDN Tanjungsari 1	54.334.100,00	44.168.000,00	-	-	98.502.100,00
506	SDN Dampit	48.164.000,00	7.836.000,00	-	-	56.000.000,00
507	SDN Wonoroto	50.353.909,00	87.809.191,00	4.162.000,00	-	142.325.100,00
508	SDN Tinjumoyo	33.157.000,00	29.487.800,00	-	-	62.644.800,00
509	SDN Pasangsari	22.488.580,00	47.573.750,00	4.398.870,00	-	74.461.200,00
510	SDN Semen	37.692.700,00	7.836.000,00	-	-	45.528.700,00
511	SDN Windusari 2	54.622.300,00	22.627.700,00	-	-	77.250.000,00
512	SDN Kalijoso	38.502.300,00	12.897.700,00	-	-	51.400.000,00
513	SDN Genito	86.420.000,00	58.980.000,00	-	-	145.400.000,00
514	SDN Ngemplak	60.595.000,00	38.630.000,00	125.000,00	-	99.350.000,00
515	SDN Mangunsari	34.475.000,00	3.000.000,00	-	-	37.475.000,00
516	SDN Kembangkuning 2	36.826.380,00	7.664.060,00	-	-	44.490.440,00
517	SDN Bandarsedayu	38.181.500,00	5.068.000,00	-	-	43.249.500,00
518	SDN Gunungsari	70.378.500,00	4.236.000,00	-	-	74.614.500,00
519	SDN Banjarsari 2	47.223.000,00	31.052.000,00	8.310.000,00	-	86.585.000,00
520	SDN Windusari 1	73.115.900,00	11.434.100,00	-	-	84.550.000,00
521	SDN Candisari	58.647.600,00	53.402.400,00	9.700.000,00	-	121.750.000,00
522	SDN Kembangkuning 1	39.247.800,00	16.029.200,00	375.000,00	-	55.652.000,00
523	SDN Girimulyo	101.392.342,00	22.449.300,00	12.420.000,00	-	136.261.642,00
524	SDN Trenten 1	62.751.248,00	45.669.652,00	2.320.000,00	2.956.000,00	113.696.900,00
525	SDN Tampirkulon 1	21.533.590,00	19.385.810,00	5.927.000,00	2.170.000,00	49.016.400,00
526	SDN Mejing 2	34.540.350,00	43.741.750,00	3.630.000,00	3.522.000,00	85.434.100,00
527	SDN Geneng 2	40.297.080,00	33.302.020,00	240.000,00	3.838.000,00	77.677.100,00
528	SDN Surodadi 1	69.063.120,00	68.600.880,00	-	5.050.000,00	142.714.000,00
529	SDN Geneng 1	36.824.343,00	50.244.257,00	-	3.402.000,00	90.470.600,00
530	SDN Tempursari	20.693.700,00	19.841.000,00	5.980.000,00	1.786.000,00	48.300.700,00
531	SDN Podosoko	22.308.823,00	20.832.177,00	14.746.000,00	1.860.000,00	59.747.000,00
532	SDN Giyanti	36.400.310,00	35.800.990,00	1.150.000,00	3.196.000,00	76.547.300,00
533	SDN Candimulyo 1	33.095.751,00	49.281.349,00	-	2.466.000,00	84.843.100,00
534	SDN Surodadi 3	32.247.795,00	34.830.405,00	-	3.527.000,00	70.605.200,00
535	SDN Pager	74.429.010,00	43.492.390,00	480.000,00	4.678.000,00	123.079.400,00
536	SDN Sonorejo	37.175.850,00	40.453.050,00	-	3.658.000,00	81.286.900,00
537	SDN Tembelang	37.228.935,00	19.994.165,00	950.000,00	3.224.000,00	61.397.100,00
538	SDN Tegalsari 2	51.047.829,00	50.763.371,00	200.000,00	4.511.000,00	106.522.200,00
539	SDN Tampirkulon 2	12.973.525,00	12.229.475,00	-	-	25.203.000,00
540	SDN Kebonrejo	33.571.400,00	25.341.300,00	-	2.549.000,00	61.461.700,00
541	SDN Surojoyo	17.999.015,00	21.084.035,00	-	1.798.000,00	40.881.050,00
542	SDN Candimulyo 2	78.919.468,00	48.111.832,00	11.025.000,00	6.394.000,00	144.450.300,00
543	SDN Tempak 1	87.108.680,00	68.002.320,00	4.110.000,00	4.042.000,00	163.263.000,00
544	SDN Mejing 1	34.461.175,00	27.383.025,00	1.260.000,00	-	63.104.200,00
545	SDN Purworejo	36.035.057,00	17.781.793,00	-	-	53.816.850,00
546	SDN Beningan	38.993.945,00	16.562.255,00	3.110.000,00	4.208.000,00	62.874.200,00
547	SDN Trenten 2	57.862.048,00	41.423.652,00	-	7.388.000,00	106.673.700,00
548	SDN Kembaran	21.773.700,00	38.551.900,00	7.179.000,00	3.568.000,00	71.072.600,00
549	SDN Tampir Wetan	31.677.105,00	22.948.195,00	875.000,00	3.294.000,00	58.794.300,00
JUMLAH		23.319.945.112,00	20.398.573.433,00	1.680.482.644,00	501.791.700,00	45.900.792.889,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7

BELANJA BARANG DAN JASA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	NAMA SEKOLAH	PERSEDIaan	JASA	PEMELIHARAAN	PERJALANAN DINAS	JUMLAH
1	SMPN 1 Muntilan	223.086.463,00	272.379.537,00	12.110.000,00	28.054.000,00	535.630.000,00
2	SMPN 2 Muntilan	228.498.005,00	259.237.495,00	3.868.000,00	17.846.000,00	509.449.500,00
3	SMPN 3 Muntilan	194.895.354,00	300.483.946,00	8.368.000,00	5.695.000,00	509.442.300,00
4	SMPN 1 Salaman	215.984.497,00	257.248.803,00	98.980.000,00	9.240.000,00	581.453.300,00
5	SMPN 2 Salaman	130.806.955,00	112.155.945,00	5.390.000,00	7.945.000,00	256.297.900,00
6	SMPN 3 Salaman	234.857.087,00	194.486.414,00	11.096.500,00	-	440.440.001,00
7	SMPN 1 Borobudur	253.639.810,00	291.615.890,00	5.445.000,00	7.831.000,00	558.531.700,00
8	SMPN 2 Borobudur	120.408.090,00	156.480.810,00	3.060.000,00	1.970.000,00	281.918.900,00
9	SMPN 1 Srumbung	277.689.762,00	282.549.238,00	57.755.000,00	4.750.000,00	622.744.000,00
10	SMPN 2 Srumbung	199.954.720,00	148.802.980,00	3.676.000,00	13.086.000,00	365.519.700,00
11	SMPN 1 Dukun	261.359.575,00	186.897.425,00	14.742.000,00	16.201.000,00	479.200.000,00
12	SMPN 2 Dukun	105.416.600,00	72.498.400,00	24.010.000,00	2.350.000,00	204.275.000,00
13	SMPN 1 Mungkid	332.300.871,00	320.566.267,00	34.737.762,00	3.255.000,00	690.859.900,00
14	SMPN 2 Mungkid	185.359.700,00	188.212.500,00	28.003.000,00	1.570.000,00	403.145.200,00
15	SMPN 1 Kota Mungkid	225.433.120,00	219.854.880,00	-	2.752.000,00	448.040.000,00
16	SMPN 1 Mertoyudan	196.027.597,00	155.504.753,00	44.536.250,00	895.000,00	396.963.600,00
17	SMPN 2 Mertoyudan	235.135.336,00	286.347.349,00	38.459.315,00	20.758.000,00	580.700.000,00
18	SMPN 3 Mertoyudan	261.264.940,00	219.940.060,00	15.430.000,00	8.365.000,00	505.000.000,00
19	SMPN 1 Tegaltrejo	191.297.354,00	319.367.446,00	13.488.000,00	-	524.152.800,00
20	SMPN 2 Tegaltrejo	115.046.665,00	98.600.000,00	17.435.435,00	4.850.000,00	235.932.100,00
21	SMPN 1 Bandongan	220.698.274,00	227.661.726,00	21.965.000,00	14.275.000,00	484.600.000,00
22	SMPN 2 Bandongan	183.935.149,00	206.059.750,00	2.185.000,00	4.078.000,00	396.257.899,00
23	SMPN 1 Grabag	209.708.936,00	266.406.064,00	13.150.000,00	14.340.000,00	503.605.000,00
24	SMPN 2 Grabag	263.235.498,00	174.614.402,00	-	22.650.000,00	460.499.900,00
25	SMPN 3 Grabag	189.033.574,00	149.300.076,00	4.957.750,00	13.400.000,00	356.691.400,00
26	Smp N 1 Ngluwar	224.151.025,00	283.115.800,00	12.365.675,00	9.355.000,00	528.987.500,00
27	SMPN 1 Tempuran	247.744.927,00	257.786.373,00	24.450.000,00	17.445.000,00	547.426.300,00
28	SMPN 2 Tempuran	201.389.150,00	219.590.250,00	150.000,00	-	421.129.400,00
29	SMPN 3 Tempuran	53.458.440,00	51.354.360,00	1.850.000,00	3.170.000,00	109.832.800,00
30	SMPN 1 Secang	270.038.150,00	225.032.350,00	10.970.000,00	13.615.000,00	519.655.500,00
31	SMPN 2 Secang	323.107.825,00	276.617.875,00	10.504.000,00	19.136.000,00	629.365.700,00
32	SMPN 3 Secang	109.600.650,00	133.814.950,00	-	1.850.000,00	245.265.600,00
33	SMPN 1 Sawangan	201.855.821,00	212.676.179,00	34.884.200,00	9.885.000,00	459.301.200,00
34	SMPN 2 Sawangan	192.073.312,00	123.386.688,00	1.060.000,00	11.330.000,00	327.850.000,00
35	SMPN 3 Sawangan	181.786.297,00	91.853.703,00	12.725.000,00	7.110.000,00	293.475.000,00
36	SMPN 1 Candimulyo	274.437.348,00	156.743.166,00	24.739.986,00	12.940.000,00	468.860.500,00
37	SMPN 2 Candimulyo	230.607.412,00	213.968.038,00	12.920.000,00	18.018.000,00	475.513.450,00
38	SMPN 3 Candimulyo	98.960.575,00	102.823.025,00	1.550.000,00	8.733.000,00	212.066.600,00
39	SMPN 1 Salam	181.902.641,00	243.887.359,00	16.400.000,00	200.000,00	442.390.000,00
40	SMPN 2 Salam	224.176.495,00	224.568.194,00	43.946.111,00	8.795.000,00	501.485.800,00
41	SMPN 3 Salam	236.172.980,00	186.354.920,00	20.507.000,00	7.810.000,00	450.844.900,00
42	SMPN 1 Kajoran	260.705.680,00	286.197.290,00	63.102.930,00	26.608.000,00	636.613.900,00
43	SMPN 2 Kajoran	159.384.000,00	131.821.500,00	17.560.000,00	19.334.000,00	328.099.500,00
44	SMPN 1 Kaliangkrik	106.178.103,00	99.329.897,00	26.847.000,00	8.245.000,00	240.600.000,00
45	SMPN 2 Kaliangkrik	110.892.380,00	107.317.620,00	-	2.590.000,00	220.800.000,00
46	SMPN 1 Pakis	113.699.200,00	100.249.800,00	6.746.000,00	7.175.000,00	227.870.000,00
47	SMPN 2 Pakis	129.027.530,00	168.365.870,00	13.765.000,00	8.695.000,00	319.853.400,00
48	SMPN 3 Pakis	198.623.400,00	117.521.600,00	-	7.855.000,00	324.000.000,00
49	SMPN 1 Ngablak	115.740.922,00	170.925.685,00	15.445.043,00	20.301.800,00	322.413.450,00
50	SMPN 2 Ngablak	57.049.907,00	56.184.093,00	50.000,00	4.500.000,00	117.784.000,00
51	SMPN 1 Windusari	142.721.296,00	145.848.704,00	4.025.000,00	10.405.000,00	303.000.000,00
52	SMPN 2 Windusari	163.962.262,00	118.202.738,00	8.110.000,00	21.625.000,00	311.900.000,00

No	Nama Sekolah	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan Dinas	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
53	SMPN 3 Satu Atap Borobudur	19.704.700,00	40.684.703,00	8.859.097,00	1.030.000,00	70.278.500,00
54	SMPN 4 Satu Atap Pakis	50.621.311,00	38.171.500,00	15.810.000,00	3.662.000,00	108.264.811,00
55	SMPN 5 Pakis Pogalan	28.717.000,00	42.928.000,00	2.475.000,00	1.880.000,00	76.000.000,00
56	SMPN 3 Satu Atap Ngablak	27.559.000,00	40.444.000,00	11.975.000,00	3.482.000,00	83.460.000,00
57	SMPN 4 Satap Sawangan	45.420.000,00	30.275.000,00	3.320.000,00	3.350.000,00	82.365.000,00
58	SMPN 3 Satu Atap Kaliangkrik	91.684.500,00	101.640.500,00	-	-	193.325.000,00
59	SMPN 4 Satap Salaman	28.029.000,00	24.061.000,00	-	280.000,00	52.370.000,00
Jumlah		10.356.257.171,00	10.191.014.886,00	909.960.054,00	526.565.800,00	21.983.797.911,00

Lampiran 5.9
Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Puskesmas	Persediaan	Jasa	Pemeliharaan	Perjalanan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Salaman 1	414.436.776,00	368.808.795,00	99.376.750,00	13.086.178,00	895.708.499,00
2	Salaman 2	136.593.554,00	315.638.214,00	68.983.291,00	11.996.178,00	533.211.237,00
3	Borobudur	472.620.927,00	562.931.177,00	115.456.861,00	16.185.744,00	1.167.194.709,00
4	Ngluwar	118.587.350,00	248.958.573,00	47.009.818,00	12.320.708,00	426.876.449,00
5	Salam	216.589.042,00	371.534.887,00	76.139.956,00	21.566.406,00	685.830.291,00
6	Srumbung	124.610.341,00	330.027.262,00	36.993.400,00	15.518.644,00	507.149.647,00
7	Dukun	228.236.446,00	380.157.189,00	96.980.770,00	16.938.203,00	722.312.608,00
8	Sawangan 1	154.180.488,00	293.833.738,00	119.090.323,00	12.735.132,00	579.839.681,00
9	Sawangan 2	239.235.435,00	222.099.382,00	92.604.468,00	15.308.708,00	569.247.993,00
10	Muntilan 1	148.443.180,00	312.085.189,00	86.621.500,00	13.122.844,00	560.272.713,00
11	Muntilan 2	238.019.114,00	295.909.761,00	37.104.464,00	11.660.708,00	582.694.047,00
12	Mungkid	485.633.373,00	442.476.285,00	125.297.788,00	33.290.868,00	1.086.698.314,00
13	Mertoyudan 1	167.385.467,00	421.639.826,00	76.926.615,00	14.767.844,00	680.719.752,00
14	Mertoyudan 2	229.654.473,00	273.775.697,00	122.165.499,00	29.960.981,00	655.556.650,00
15	Tempuran	210.696.711,00	452.966.121,00	120.771.913,00	18.960.708,00	803.395.453,00
16	Kajoran 1	257.961.931,00	343.396.833,00	118.104.209,00	22.553.923,00	742.016.896,00
17	Kajoran 2	183.021.827,00	274.668.017,00	59.105.751,00	5.590.000,00	522.385.595,00
18	Kaliangkrik	379.756.958,00	572.524.178,00	260.294.269,00	51.275.102,00	1.263.850.507,00
19	Bandongan	490.739.204,00	483.585.599,00	146.811.534,00	62.551.886,00	1.183.688.223,00
20	Candimulyo	261.761.786,00	397.464.958,00	106.268.050,00	23.062.356,00	788.557.150,00
21	Pakis	456.721.282,00	416.357.156,00	101.383.288,00	15.590.708,00	990.052.434,00
22	Ngablak	319.581.431,00	258.153.890,00	217.331.715,00	13.030.708,00	808.097.744,00
23	Grabag 1	501.076.533,00	528.231.168,00	51.568.879,00	39.827.356,00	1.120.703.936,00
24	Grabag 2	142.202.653,00	182.573.907,00	67.946.915,00	12.827.374,00	405.550.849,00
25	Tegalrejo	194.303.831,00	259.740.896,00	42.109.657,00	9.036.178,00	505.190.562,00
26	Secang 1	163.404.159,00	578.617.948,00	150.779.287,00	17.097.508,00	909.898.902,00
27	Secang 2	219.756.831,00	304.462.872,00	71.530.067,00	12.426.178,00	608.175.948,00
28	Windusari	265.972.452,00	442.264.194,00	283.332.230,00	16.260.708,00	1.007.829.584,00
29	Kota Mungkid	100.580.564,00	168.510.164,00	67.422.382,00	18.493.608,00	355.006.718,00
30	RSUD Merah putih	20.636.219.679,00	14.766.805.080,00	2.739.222.536,00	415.073.883,00	38.557.321.178,00
JUMLAH BLUD PUSKEMAS dan RSUD MERAH PUTIH		28.157.983.798,00	25.270.198.956,00	5.804.734.185,00	992.117.330,00	60.225.034.269,00
31	RSUD Muntilan	31.246.710.946,00	18.391.177.425,00	4.442.832.856,00	141.916.719,00	54.222.637.946,00
JUMLAH BLUD		59.404.694.744,00	43.661.376.381,00	10.247.567.041,00	1.134.034.049,00	114.447.672.215,00

Lampiran 5.10
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum Indonesia per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	46.650.749.205,00	44.519.750.864,00	95,43	38.881.528.500,00
2	Dinkes	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	DPU PR	21.298.660.000,00	21.298.660.000,00	100,00	20.292.261.000,00
4	Satpol PP	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5	BPBD	32.100.000,00	32.100.000,00	100,00	32.500.000,00
6	Dinsos	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	40.217.500,00
7	Disperinnaker	572.100.000,00	431.559.440,00	75,43	651.300.000,00
8	Distanpangan	19.770.578.000,00	18.671.429.263,00	94,44	26.095.169.767,00
9	DLH	94.000.000,00	94.000.000,00	100,00	0,00
10	Dispermades	2.065.000.000,00	1.960.500.000,00	94,94	868.500.000,00
11	Dishub	209.488.000,00	199.488.000,00	95,23	129.500.000,00
12	Disdagkop UKM	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Disparpora	4.810.065.000,00	4.680.065.000,00	97,30	2.303.960.000,00
14	Dispeterikan	1.489.000.000,00	1.447.900.000,00	97,24	744.550.000,00
15	Setda	13.438.880.000,00	13.354.380.000,00	99,37	9.385.850.000,00
16	BKPPD	150.000.000,00	128.900.000,00	85,93	0,00
17	Bakesbangpol	29.381.304.000,00	29.381.304.000,00	100,00	50.000.000,00
JUMLAH		140.181.924.205,00	136.420.036.567,00	97,32	99.635.336.767,00

Lampiran 5.11
Rincian Belanja Modal per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	78.930.372.902,00	75.680.901.305,00	95,88	55.991.848.270,00
2	Dinkes	61.305.450.092,00	59.570.501.016,00	97,17	53.648.700.697,00
3	RSUD Muntilan	29.028.641.611,00	21.911.608.966,00	75,48	28.496.139.906,00
4	DPU PR	83.944.213.244,00	82.536.334.543,00	98,32	86.992.778.451,00
5	DPRKP	1.528.697.379,00	1.510.263.725,00	98,79	879.281.585,00
6	Satpol PP	3.715.123.609,00	3.628.413.200,00	97,67	735.650.850,00
7	BPBD	342.606.500,00	338.826.500,00	98,90	995.589.000,00
8	Dinsos	1.907.688.875,00	1.692.986.675,00	88,75	1.612.324.625,00
9	Disperinnaker	1.080.434.145,00	1.051.797.890,00	97,35	196.949.000,00
10	Distanpangan	959.166.100,00	930.684.180,00	97,03	2.490.457.122,00
11	DLH	901.698.800,00	858.958.500,00	95,26	28.232.758.903,00
12	Disdukcapil	487.350.000,00	463.580.000,00	95,12	624.252.000,00
13	Dispermades	0,00	0,00		212.400.000,00
14	Dishub	3.211.946.400,00	3.206.398.767,00	99,83	3.780.691.320,00
15	Diskominfo	1.882.629.500,00	1.880.379.450,00	99,88	1.898.628.720,00
16	Disdagkop UKM	2.279.046.890,00	2.224.848.580,00	97,62	3.247.186.950,00
17	DPMPPTSP	4.327.379.250,00	4.309.871.790,00	99,60	1.851.628.000,00
18	Disparpora	44.989.657.558,00	43.371.638.005,00	96,40	13.800.025.396,00
19	Dispuspa	32.500.000,00	29.854.000,00	91,86	149.098.880,00
20	Dispeterikan	157.253.715,00	154.946.725,00	98,53	1.599.280.450,00
21	Setda	617.217.603,00	609.528.550,00	98,75	3.594.507.433,00
22	Set DPRD	272.543.687,00	270.131.500,00	99,11	187.372.550,00
23	Bappelitbangda	305.000.000,00	304.042.900,00	99,69	297.669.450,00
24	BPPKAD	5.362.619.618,00	5.219.265.605,00	97,33	6.336.332.980,00
25	BKPPD	418.624.180,00	418.445.000,00	99,96	365.500.000,00
26	Inspektorat	1.345.739.843,00	1.285.119.250,00	95,50	0,00
27	Kec. Salaman	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00	67.140.000,00
28	Kec. Borobudur	0,00	0,00		154.840.000,00
29	Kec. Ngluwar	29.017.659,00	27.970.000,00	96,39	50.000.000,00
30	Kec. Salam	0,00	0,00		15.550.000,00
31	Kec. Srumbung	26.000.000,00	25.400.000,00	97,69	23.620.000,00
32	Kec. Dukun	0,00	0,00		8.500.000,00
33	Kec. Sawangan	0,00	0,00		79.420.000,00
34	Kec. Muntilan	742.985.736,00	742.985.736,00	100,00	953.643.000,00
35	Kec. Mungkid	1.507.816.372,00	1.500.086.320,00	99,49	1.619.530.445,00
36	Kec. Mertoyudan	936.051.222,00	923.607.751,00	98,67	880.545.000,00
37	Kec. Tempuran	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	61.336.000,00
38	Kec. Kajoran	0,00	0,00		0,00
39	Kec. Kaliangkrik	0,00	0,00		0,00
40	Kec. Bandongan	0,00	0,00		38.400.000,00
41	Kec. Candimulyo	0,00	0,00		6.000.000,00
42	Kec. Pakis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	37.631.000,00
43	Kec. Ngablak	0,00	0,00		16.124.000,00
44	Kec. Grabag	0,00	0,00		59.979.000,00
45	Kec. Tegalrejo	44.000.000,00	43.500.000,00	98,86	47.863.400,00
46	Kec. Secang	1.132.350.119,00	1.114.308.880,00	98,41	1.225.014.400,00
47	Kec. Windusari	15.200.000,00	14.150.000,00	93,092105	33.930.000,00
48	Bakesbangpol	72.400.000,00	71.025.000,00	98,100829	406.772.710,00
	Jumlah	333.918.122.609,00	318.001.060.309,00	95,23	304.002.891.493,00

Lampiran 5.12
Rincian Belanja Modal Tanah per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	RSUD Muntilan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
2	DPU PR	0,00	0,00		5.114.414.559,00
3	DLH	0,00	0,00		18.449.695.554,00
4	Distanpangan	865.059.500,00	837.573.180,00	96,82	
5	Disparpora	0,00	0,00		6.394.643.336,00
JUMLAH		2.865.059.500,00	837.573.180,00	29,23	29.958.753.449,00

Lampiran 5.13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	29.831.746.509,00	27.905.426.787,00	93,54	33.574.566.418,00
2	Dinkes	51.437.060.540,00	49.997.649.302,00	97,20	45.366.379.566,00
3	RSUD Muntilan	16.843.102.500,00	15.991.090.336,00	94,94	21.303.158.245,00
4	DPU PR	425.982.440,00	411.701.460,00	96,65	253.200.000,00
5	DPRKP	7.640.000,00	7.640.000,00	100,00	92.506.000,00
6	Satpol PP	3.602.623.700,00	3.516.013.200,00	97,60	724.750.850,00
7	BPBD	237.206.500,00	234.475.000,00	98,85	995.589.000,00
8	Dinsos	1.381.249.000,00	1.235.188.800,00	89,43	1.320.209.625,00
9	Disperinnaker	587.369.521,00	563.752.850,00	95,98	4.850.000,00
10	Distanpangan	44.106.600,00	43.490.000,00	98,60	498.841.000,00
11	DLH	901.698.800,00	858.958.500,00	95,26	549.194.970,00
12	Disdukcapil	487.350.000,00	463.580.000,00	95,12	615.302.000,00
13	Dispermades	0	0,00		184.050.000,00
14	Dishub	2.416.196.400,00	2.414.425.712,00	99,93	3.627.109.955,00
15	Diskominfo	1.882.629.500,00	1.880.379.450,00	99,88	1.898.628.720,00
16	Disdagkop UKM	384.544.500,00	363.122.150,00	94,43	378.123.970,00
17	DPMPPTSP	266.010.000,00	260.200.750,00	97,82	1.532.554.000,00
18	Disparpora	436.948.880,00	432.184.000,00	98,91	998.912.180,00
19	Dispuspa	0	0,00		77.850.000,00
20	Dispeterikan	79.963.675,00	78.453.725,00	98,11	407.392.450,00
21	Setda	293.313.550,00	287.317.550,00	97,96	2.494.478.433,00
22	Set DPRD	235.700.000,00	233.461.500,00	99,05	187.372.550,00
23	Bappeliitbangda	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	218.165.700,00
24	BPPKAD	2.193.428.075,00	2.065.752.032,00	94,18	5.985.405.355,00
25	BKPPD	418.624.180,00	418.445.000,00	99,96	365.500.000,00
26	Inspektorat	1.144.814.845,00	1.085.583.250,00	94,83	0,00
27	Kec. Salaman	0	0,00		67.140.000,00
28	Kec. Borobudur	0	0,00		145.840.000,00
29	Kec. Ngluwar	29.017.659,00	27.970.000,00	96,39	50.000.000,00
30	Kec. Salam	0	0,00		15.550.000,00
31	Kec. Srumbung	26.000.000,00	25.400.000,00	97,69	23.620.000,00
32	Kec. Dukun	0	0,00		8.500.000,00
33	Kec. Sawangan	0	0,00		75.920.000,00
34	Kec. Muntilan	0	0,00		183.175.000,00
35	Kec. Mungkid	34.850.000,00	34.800.000,00	99,86	88.700.000,00
36	Kec. Mertoyudan	8.550.000,00	8.550.000,00	100,00	87.613.000,00
37	Kec. Tempuran	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	61.336.000,00
38	Kec. Kajoran	0,00	0,00		0,00
39	Kec. Kaliangkrik	0,00	0,00		0,00
40	Kec. Bandongan	0	0,00		38.400.000,00
41	Kec. Candimulyo	0	0,00		6.000.000,00
42	Kec. Pakis	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	37.631.000,00
43	Kec. Ngablak	0	0,00		16.124.000,00
44	Kec. Grabag	0	0,00		59.979.000,00
45	Kec. Tegalrejo	44.000.000,00	43.500.000,00	98,86	47.863.400,00
46	Kec. Secang	0	0,00		122.009.000,00
47	Kec. Windusari	15.200.000,00	14.150.000,00	93,09	33.930.000,00
48	Bakesbangpol	72.400.000,00	71.025.000,00	98,10	344.249.610,00
	JUMLAH	115.830.327.374,00	111.034.686.354,00	95,86	125.167.670.997,00

Lampiran 5.14
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	39.587.034.746,00	38.303.890.271,00	96,76	14.040.774.779,00
2	Dinkes	4.941.838.937,00	4.814.910.714,00	97,43	8.117.328.831,00
3	RSUD Muntilan	10.185.539.111,00	5.920.518.630,00	58,13	7.192.981.661,00
4	DPU PR	20.294.219.264,00	19.586.363.851,00	96,51	2.669.383.555,00
5	DPRKP	1.063.057.379,00	1.048.883.725,00	98,67	667.792.255,00
6	Satpol PP	112.499.909,00	112.400.000,00	99,91	0,00
7	Dinsos	526.439.875,00	457.797.875,00	86,96	292.115.000,00
8	Disperinnaker	448.064.624,00	443.108.350,00	98,89	192.099.000,00
9	Distanpangan	50.000.000,00	49.621.000,00	99,24	1.991.616.122,00
10	DLH	0,00	0,00		2.666.586.244,00
11	Dispermades	0,00	0,00		0,00
12	Dishub	795.750.000,00	791.973.055,00	99,53	153.581.365,00
13	Disdagkop UKM	1.894.502.390,00	1.861.726.430,00	98,27	2.844.087.980,00
14	DPMPTSP	4.061.369.250,00	4.049.671.040,00	99,71	302.124.000,00
15	Disparpora	44.552.708.678,00	42.939.454.005,00	96,38	6.238.526.880,00
16	Dispeterikan	77.290.040,00	76.493.000,00	98,97	1.161.888.000,00
17	Setda	124.054.053,00	122.361.000,00	98,64	876.509.000,00
18	Set DPRD	36.843.687,00	36.670.000,00	99,53	0,00
19	BPPKAD	699.241.544,00	687.878.625,00	98,37	151.577.625,00
20	Inspektorat	191.204.998,00	189.879.000,00	99,31	0,00
21	Kec Salaman	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00	0,00
22	Kec. Borobudur	0,00	0,00	#DIV/0!	9.000.000,00
23	Kec Mertoyudan	25.365.124,00	25.365.124,00	100,00	0,00
24	Kec. Secang	38.002.922,00	37.485.000,00	98,64	0,00
25	Bakesbangpol	0,00	0,00	#DIV/0!	50.080.000,00
JUMLAH		129.747.726.531,00	121.599.150.695,00	93,72	49.618.052.297,00

Lampiran 5.15
Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Dinkes	1.880.680.615,00	1.784.641.000,00	94,89	0,00
2	RSUD Muntilan	0,00	0,00		0,00
3	DPU PR	61.841.637.690,00	61.175.058.537,00	98,92	78.393.063.133,00
4	DLH	0,00	0,00		6.399.672.135,00
5	Setda	196.250.000,00	196.250.000,00	100,00	177.217.000,00
6	Kec. Muntilan	742.985.736,00	742.985.736,00	100,00	756.638.000,00
7	Kec. Mungkid	1.472.966.372,00	1.465.286.320,00	99,48	1.530.830.445,00
8	Kec. Mertoyudan	902.136.098,00	889.692.627,00	98,62	792.932.000,00
9	Kec. Secang	1.094.347.197,00	1.076.823.880,00	98,40	1.094.159.400,00
	JUMLAH	68.131.003.708,00	67.330.738.100,00	98,83	89.144.512.113,00

Lampiran 5.16
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Disdikbud	9.511.591.647,00	9.471.584.247,00	99,58	8.376.507.073,00
2	Dinkes	245.870.000,00	245.300.000,00	99,77	164.992.300,00
3	DPU PR	1.382.373.850,00	1.363.210.695,00	98,61	562.717.204,00
4	DPRKP	0,00	0,00		118.983.330,00
5	Satpol PP	0,00	0,00		10.900.000,00
6	BPBD	105.400.000,00	104.351.500,00	99,01	0,00
7	Disperinaker	45.000.000,00	44.936.690,00	99,86	0,00
8	DLH	0,00	0,00		167.610.000,00
9	Disdukcapil	0,00	0,00		8.950.000,00
10	Dispermades	0,00	0,00		28.350.000,00
11	Disdagkop UKM	0,00	0,00		24.975.000,00
12	DPMPPTSP	0,00	0,00		16.950.000,00
13	Disparpora	0,00	0,00		167.943.000,00
14	Dispuspa	32.500.000,00	29.854.000,00	91,86	71.248.880,00
15	Dispeterikan	0,00	0,00		30.000.000,00
16	Setda	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	46.303.000,00
17	Bappelitbangda	280.000.000,00	279.042.900,00	99,66	79.503.750,00
18	BPPKAD	2.469.949.999,00	2.465.634.948,00	99,83	199.350.000,00
19	Inspektorat	9.720.000,00	9.657.000,00	99,35	0,00
20	Kec. Sawangan	0,00	0,00		3.500.000,00
21	Kec. Muntilan	0,00	0,00		13.830.000,00
22	Kec. Secang	0,00	0,00		8.846.000,00
23	Bakesbangpol	0,00	0,00		12.443.100,00
JUMLAH		14.086.005.496,00	14.017.171.980,00	99,51	10.113.902.637,00

Lampiran 5.17
Rincian Belanja Modal Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Dinkes	2.800.000.000,00	2.728.000.000,00	97,43	0,00
2	DPRKP	458.000.000,00	453.740.000,00	99,07	0,00
JUMLAH		3.258.000.000,00	3.181.740.000,00	97,66	0,00



Lampiran 5.18
Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
Tahun 2023 dan Tahun 2022

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Salaman	779.807.965,00	779.807.965,00	100,00	612.830.161,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargoretno	33.458.125,00	33.458.125,00	100,00	30.730.571,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Paripurno	32.581.725,00	32.581.725,00	100,00	31.283.536,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalirejo	38.367.694,00	38.367.694,00	100,00	32.902.209,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Menoreh	43.453.252,00	43.453.252,00	100,00	41.075.648,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejo	40.460.883,00	40.460.883,00	100,00	28.119.926,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	39.400.254,00	39.400.254,00	100,00	42.298.742,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonrejo	41.958.317,00	41.958.317,00	100,00	36.086.241,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Salaman	40.560.668,00	40.560.668,00	100,00	55.113.691,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalisalak	53.422.431,00	53.422.431,00	100,00	36.167.575,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sriwedari	37.302.228,00	37.302.228,00	100,00	25.187.549,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jebengsari	35.843.269,00	35.843.269,00	100,00	17.288.993,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjunganom	37.951.335,00	37.951.335,00	100,00	23.482.663,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarharjo	38.296.104,00	38.296.104,00	100,00	18.568.838,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwosari	32.919.019,00	32.919.019,00	100,00	20.344.758,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngampeldento	54.841.230,00	54.841.230,00	100,00	26.940.386,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidosari	34.240.623,00	34.240.623,00	100,00	22.806.078,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawangargo	40.959.482,00	40.959.482,00	100,00	22.374.284,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krasak	34.562.000,00	34.562.000,00	100,00	33.165.292,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Margoyoso	35.747.028,00	35.747.028,00	100,00	35.457.787,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaliabu	33.482.298,00	33.482.298,00	100,00	33.435.394,00
2		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Borobudur	2.253.709.271,00	2.253.709.271,00	100,00	2.565.532.691,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Giripurno	31.490.526,00	31.490.526,00	100,00	17.917.830,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Giritengah	550.850.264,00	550.850.264,00	100,00	21.662.000,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tuksongo	39.176.365,00	39.176.365,00	100,00	36.369.900,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Majaksingi	127.674.593,00	127.674.593,00	100,00	898.822.683,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kenalan	33.358.309,00	33.358.309,00	100,00	16.262.645,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bigaran	35.786.947,00	35.786.947,00	100,00	16.302.644,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambeng	43.080.576,00	43.080.576,00	100,00	17.094.845,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candirejo	391.702.366,00	391.702.366,00	100,00	43.839.062,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargogondo	33.576.662,00	33.576.662,00	100,00	36.250.103,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wanurejo	37.401.738,00	37.401.738,00	100,00	55.485.528,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Borobudur	31.529.188,00	31.529.188,00	100,00	641.856.269,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	509.452.384,00	509.452.384,00	100,00	17.182.648,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karanganyar	40.648.752,00	40.648.752,00	100,00	34.054.572,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangrejo	36.152.820,00	36.152.820,00	100,00	542.902.805,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadiharjo	33.790.689,00	33.790.689,00	100,00	29.977.641,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonsari	34.139.611,00	34.139.611,00	100,00	16.296.401,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalarum	38.373.561,00	38.373.561,00	100,00	21.661.369,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembanglimus	83.621.354,00	83.621.354,00	100,00	30.182.182,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wringinputih	72.957.125,00	72.957.125,00	100,00	49.256.889,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bumiharjo	48.945.441,00	48.945.441,00	100,00	22.154.675,00
3		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Ngluwar	347.950.123,00	347.950.123,00	100,00	304.155.803,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bligo	49.450.656,00	49.450.656,00	100,00	49.533.756,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakunden	36.878.759,00	36.878.759,00	100,00	33.405.263,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Somokaton	46.068.327,00	46.068.327,00	100,00	28.843.119,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngluwar	39.972.681,00	39.972.681,00	100,00	42.158.170,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangtalun	50.180.112,00	50.180.112,00	100,00	36.451.823,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jamuskauman	42.456.381,00	42.456.381,00	100,00	37.340.363,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Plosogede	45.126.035,00	45.126.035,00	100,00	39.087.484,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Blongkeng	37.817.172,00	37.817.172,00	100,00	37.335.825,00
4		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Salam	594.363.340,00	594.363.340,00	100,00	558.186.240,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mantingan	36.077.039,00	36.077.039,00	100,00	33.547.954,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Salam	76.366.677,00	76.366.677,00	100,00	51.773.193,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sucen	83.317.956,00	83.317.956,00	100,00	63.494.232,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kadiluwih	48.538.358,00	48.538.358,00	100,00	40.038.251,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Somoketro	35.955.260,00	35.955.260,00	100,00	21.032.198,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jumoyo	56.580.904,00	56.580.904,00	100,00	107.609.947,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tirto	36.186.312,00	36.186.312,00	100,00	29.493.005,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Baturono	44.110.821,00	44.110.821,00	100,00	28.858.268,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tersangede	33.383.853,00	33.383.853,00	100,00	38.989.437,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sirahan	61.582.565,00	61.582.565,00	100,00	34.469.451,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Seloboro	43.815.521,00	43.815.521,00	100,00	35.274.239,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gulon	38.448.074,00	38.448.074,00	100,00	73.606.065,00
5		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Srumbung	622.924.866,00	622.924.866,00	100,00	487.020.149,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sudimoro	36.292.694,00	36.292.694,00	100,00	33.384.941,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pandanretno	46.111.329,00	46.111.329,00	100,00	17.574.741,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaliurang	35.787.173,00	35.787.173,00	100,00	32.623.925,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalarandu	38.313.069,00	38.313.069,00	100,00	20.274.302,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kamongan	33.582.552,00	33.582.552,00	100,00	22.532.208,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jerukagung	34.644.147,00	34.644.147,00	100,00	27.530.532,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kradenan	40.792.810,00	40.792.810,00	100,00	37.574.175,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyuadem	41.176.001,00	41.176.001,00	100,00	25.303.318,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngablak	37.519.749,00	37.519.749,00	100,00	25.828.264,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Srumbung	32.841.943,00	32.841.943,00	100,00	38.856.546,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bringin	32.448.896,00	32.448.896,00	100,00	42.609.258,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mranggen	32.564.529,00	32.564.529,00	100,00	39.627.488,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargosoko	32.769.683,00	32.769.683,00	100,00	18.232.735,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Polengan	35.297.212,00	35.297.212,00	100,00	18.596.814,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucanganom	42.346.214,00	42.346.214,00	100,00	29.769.039,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemiren	37.130.639,00	37.130.639,00	100,00	38.340.530,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Nglumut	33.306.226,00	33.306.226,00	100,00	18.361.333,00
6		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Dukun	584.950.940,00	584.950.940,00	100,00	479.429.072,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketunggeng	43.282.459,00	43.282.459,00	100,00	34.553.557,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wates	48.799.228,00	48.799.228,00	100,00	21.358.831,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadipuro	45.708.331,00	45.708.331,00	100,00	28.867.567,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyubiru	35.926.360,00	35.926.360,00	100,00	44.261.530,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dukun	34.806.846,00	34.806.846,00	100,00	37.699.172,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalibening	42.272.346,00	42.272.346,00	100,00	27.054.218,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargomulyo	37.046.089,00	37.046.089,00	100,00	35.424.163,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyudono	34.732.436,00	34.732.436,00	100,00	42.899.239,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumber	36.463.365,00	36.463.365,00	100,00	31.665.204,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunsoko	38.824.372,00	38.824.372,00	100,00	21.517.043,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sewukan	38.350.613,00	38.350.613,00	100,00	27.559.093,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sengi	39.951.289,00	39.951.289,00	100,00	36.511.312,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Paten	36.253.991,00	36.253.991,00	100,00	29.862.285,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krinjing	38.034.205,00	38.034.205,00	100,00	28.085.357,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Keningar	34.499.010,00	34.499.010,00	100,00	32.110.501,00
7		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Sawangan	601.614.203,00	601.614.203,00	100,00	459.212.179,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondowangi	33.975.417,00	33.975.417,00	100,00	44.593.038,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sawangan	38.693.099,00	38.693.099,00	100,00	45.669.288,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krogowanan	36.144.700,00	36.144.700,00	100,00	35.134.132,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kapuhan	65.325.362,00	65.325.362,00	100,00	23.775.282,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketep	39.084.173,00	39.084.173,00	100,00	24.417.901,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonolelo	36.105.824,00	36.105.824,00	100,00	31.103.006,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyuroto	36.541.793,00	36.541.793,00	100,00	20.237.137,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wulunggunung	41.642.106,00	41.642.106,00	100,00	20.035.998,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gantang	39.041.737,00	39.041.737,00	100,00	25.357.385,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jati	38.484.192,00	38.484.192,00	100,00	34.223.723,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Butuh	49.415.086,00	49.415.086,00	100,00	29.769.528,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunsari	36.419.203,00	36.419.203,00	100,00	30.314.493,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tirtosari	38.758.819,00	38.758.819,00	100,00	31.582.965,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Podosoko	38.146.288,00	38.146.288,00	100,00	36.704.945,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Soronalan	33.836.404,00	33.836.404,00	100,00	26.293.358,00
8		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Muntilan	828.348.242,00	828.348.242,00	100,00	741.934.301,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjung	42.781.894,00	42.781.894,00	100,00	29.380.444,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sokorini	43.789.968,00	43.789.968,00	100,00	42.782.614,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sriwedari	53.581.487,00	53.581.487,00	100,00	40.094.300,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Congkrang	79.169.317,00	79.169.317,00	100,00	27.945.780,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Adikarto	58.837.926,00	58.837.926,00	100,00	34.238.166,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Menayu	36.957.170,00	36.957.170,00	100,00	26.413.578,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Keji	46.708.620,00	46.708.620,00	100,00	52.738.908,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngawen	99.364.213,00	99.364.213,00	100,00	40.178.549,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungpring	99.482.208,00	99.482.208,00	100,00	68.943.931,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucungrejo	49.080.378,00	49.080.378,00	100,00	125.842.436,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tamanagung	47.539.333,00	47.539.333,00	100,00	117.191.396,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondosuli	129.195.717,00	129.195.717,00	100,00	44.257.610,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sedayu	41.860.011,00	41.860.011,00	100,00	91.926.589,00
9		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Mungkid	776.396.139,00	776.396.139,00	100,00	681.887.044,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Progowati	36.523.913,00	36.523.913,00	100,00	58.844.009,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngrajek	50.820.557,00	50.820.557,00	100,00	47.173.737,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rambeanak	63.344.587,00	63.344.587,00	100,00	47.574.386,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Paremono	63.725.939,00	63.725.939,00	100,00	64.252.874,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pabelan	36.090.296,00	36.090.296,00	100,00	88.970.450,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bojong	86.255.499,00	86.255.499,00	100,00	53.526.846,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagersari	44.561.199,00	44.561.199,00	100,00	40.430.085,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mungkid	66.602.486,00	66.602.486,00	100,00	36.431.649,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ambartawang	46.296.749,00	46.296.749,00	100,00	25.906.811,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bumirejo	72.236.469,00	72.236.469,00	100,00	63.192.554,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Blondo	76.705.962,00	76.705.962,00	100,00	66.923.230,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Senden	56.488.562,00	56.488.562,00	100,00	26.576.310,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondang	41.234.993,00	41.234.993,00	100,00	40.352.937,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Treko	35.508.928,00	35.508.928,00	100,00	21.731.166,00
10		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Mertoyudan	1.917.351.054,00	1.917.351.054,00	100,00	2.423.463.243,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Deyangan	104.920.979,00	104.920.979,00	100,00	55.573.482,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pasuruhan	181.241.888,00	181.241.888,00	100,00	49.649.309,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donorojo	76.414.534,00	76.414.534,00	100,00	45.760.368,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalinegoro	105.059.623,00	105.059.623,00	100,00	93.066.480,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jogonegoro	92.037.551,00	92.037.551,00	100,00	60.114.002,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	70.955.993,00	70.955.993,00	100,00	42.857.696,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bondowoso	46.517.304,00	46.517.304,00	100,00	88.135.693,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Danurejo	69.782.800,00	69.782.800,00	100,00	142.822.538,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyurojo	85.147.706,00	85.147.706,00	100,00	193.467.201,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarnegoro	968.872.542,00	968.872.542,00	100,00	220.546.897,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bulurejo	71.015.007,00	71.015.007,00	100,00	79.792.876,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mertoyudan	45.385.127,00	45.385.127,00	100,00	1.351.676.701,00
11		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Tempuran	826.261.750,00	826.261.750,00	100,00	799.269.303,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ringinanom	31.875.153,00	31.875.153,00	100,00	69.856.548,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberarum	79.481.474,00	79.481.474,00	100,00	46.940.127,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidoagung	33.173.602,00	33.173.602,00	100,00	87.027.741,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanggulrejo	54.050.744,00	54.050.744,00	100,00	43.946.046,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalisari	36.689.498,00	36.689.498,00	100,00	29.016.781,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girirejo	31.048.400,00	31.048.400,00	100,00	36.961.613,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tempurejo	33.063.108,00	33.063.108,00	100,00	249.315.829,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Prajeksari	31.731.016,00	31.731.016,00	100,00	16.457.331,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jogomulyo	58.080.899,00	58.080.899,00	100,00	117.261.020,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Growong	145.291.114,00	145.291.114,00	100,00	19.262.661,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Temanggal	54.552.036,00	54.552.036,00	100,00	16.101.655,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pringombo	58.597.286,00	58.597.286,00	100,00	15.272.280,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kemutuk	31.805.334,00	31.805.334,00	100,00	13.966.427,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bawang	112.860.766,00	112.860.766,00	100,00	17.220.677,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tugurejo	33.961.320,00	33.961.320,00	100,00	20.662.567,00
12		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Kajoran	979.679.023,00	979.679.023,00	100,00	598.626.834,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonogiri	33.248.155,00	33.248.155,00	100,00	21.749.669,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kwaderan	31.758.078,00	31.758.078,00	100,00	17.687.265,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Madukoro	34.869.696,00	34.869.696,00	100,00	17.138.403,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bumiayu	33.877.544,00	33.877.544,00	100,00	20.622.609,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Madugondo	33.451.389,00	33.451.389,00	100,00	16.728.135,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargosari	40.788.360,00	40.788.360,00	100,00	17.217.466,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngendrosari	32.878.262,00	32.878.262,00	100,00	11.949.897,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Lesanpuro	32.065.141,00	32.065.141,00	100,00	16.508.354,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjaretno	33.860.162,00	33.860.162,00	100,00	21.070.073,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krinjing	31.669.072,00	31.669.072,00	100,00	17.152.207,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bangsri	31.523.389,00	31.523.389,00	100,00	16.111.754,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wadas	32.284.474,00	32.284.474,00	100,00	16.493.571,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kajoran	33.590.833,00	33.590.833,00	100,00	36.191.896,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunrejo	31.904.331,00	31.904.331,00	100,00	18.924.595,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambak	31.102.565,00	31.102.565,00	100,00	28.236.077,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bambusari	34.179.620,00	34.179.620,00	100,00	18.298.268,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wuwuharjo	33.889.004,00	33.889.004,00	100,00	34.039.640,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pandansari	32.347.694,00	32.347.694,00	100,00	19.569.386,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pandanretno	36.098.217,00	36.098.217,00	100,00	23.315.941,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krumpakan	32.042.007,00	32.042.007,00	100,00	16.581.935,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjaragung	34.015.175,00	34.015.175,00	100,00	25.205.415,00
	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sangen	34.060.130,00	34.060.130,00	100,00	17.760.410,00
	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucungroto	34.869.373,00	34.869.373,00	100,00	18.728.694,00
	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	36.905.584,00	36.905.584,00	100,00	19.661.623,00
	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidowangi	32.003.738,00	32.003.738,00	100,00	21.288.233,00
	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukumulyo	36.346.402,00	36.346.402,00	100,00	19.245.195,00
	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	32.483.107,00	32.483.107,00	100,00	16.551.423,00
	28	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sutopati	34.059.248,00	34.059.248,00	100,00	31.019.187,00
	29	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukomakmur	37.508.273,00	37.508.273,00	100,00	23.579.513,00
13		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Kaliangkrik	696.353.361,00	696.353.361,00	100,00	445.245.674,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaliangkrik	31.608.439,00	31.608.439,00	100,00	25.527.327,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngawonggo	37.720.066,00	37.720.066,00	100,00	30.339.020,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Munggangsari	35.770.021,00	35.770.021,00	100,00	23.125.484,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngargosoko	37.475.796,00	37.475.796,00	100,00	25.484.507,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngendrokilo	34.881.974,00	34.881.974,00	100,00	23.567.557,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Maduretno	32.810.825,00	32.810.825,00	100,00	18.625.124,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Temanggung	34.031.934,00	34.031.934,00	100,00	30.528.806,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pengarengan	36.877.037,00	36.877.037,00	100,00	17.736.338,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangli	38.996.708,00	38.996.708,00	100,00	16.289.354,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Selomoyo	31.266.080,00	31.266.080,00	100,00	19.077.299,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarejo	35.104.975,00	35.104.975,00	100,00	24.351.771,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Giriwarno	33.296.236,00	33.296.236,00	100,00	18.063.384,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girirejo	32.287.918,00	32.287.918,00	100,00	21.763.525,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonlegi	35.966.522,00	35.966.522,00	100,00	14.763.440,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Balerejo	34.732.320,00	34.732.320,00	100,00	23.696.102,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Beseran	36.463.754,00	36.463.754,00	100,00	20.021.840,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bumirejo	35.363.244,00	35.363.244,00	100,00	19.521.631,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketangi	32.301.208,00	32.301.208,00	100,00	25.259.592,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Balekerto	33.283.534,00	33.283.534,00	100,00	31.302.824,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Adipuro	36.114.770,00	36.114.770,00	100,00	16.200.749,00
14		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Bandongan	602.540.673,00	602.540.673,00	100,00	502.673.133,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandongan	74.965.340,00	74.965.340,00	100,00	66.556.347,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Salamkanci	46.929.538,00	46.929.538,00	100,00	36.087.649,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukodadi	43.380.848,00	43.380.848,00	100,00	29.097.818,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tonoboyo	35.830.024,00	35.830.024,00	100,00	35.108.990,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gandusari	37.797.162,00	37.797.162,00	100,00	38.379.081,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	38.191.897,00	38.191.897,00	100,00	39.137.336,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Trasan	36.425.980,00	36.425.980,00	100,00	47.950.968,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyuwangi	40.051.256,00	40.051.256,00	100,00	43.268.317,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kedungsari	38.286.059,00	38.286.059,00	100,00	21.755.677,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukosari	42.645.730,00	42.645.730,00	100,00	24.676.021,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung	36.118.581,00	36.118.581,00	100,00	30.394.401,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalegen	34.610.811,00	34.610.811,00	100,00	25.569.138,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngepanrejo	45.635.720,00	45.635.720,00	100,00	28.474.935,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rejosari	51.671.727,00	51.671.727,00	100,00	36.216.455,00
15		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Candimulyo	700.331.110,00	700.331.110,00	100,00	521.253.158,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Surojoyo	40.708.517,00	40.708.517,00	100,00	35.028.122,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tempak	34.955.585,00	34.955.585,00	100,00	30.972.598,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	33.963.242,00	33.963.242,00	100,00	28.553.932,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mejing	38.373.423,00	38.373.423,00	100,00	28.769.957,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purworejo	32.400.422,00	32.400.422,00	100,00	22.981.904,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candimulyo	35.701.063,00	35.701.063,00	100,00	20.782.359,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Giyanti	34.499.729,00	34.499.729,00	100,00	21.400.940,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembaran	35.891.243,00	35.891.243,00	100,00	17.058.233,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalsari	37.999.607,00	37.999.607,00	100,00	28.254.178,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Podosoko	42.105.533,00	42.105.533,00	100,00	21.919.887,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tampir Kulon	37.864.390,00	37.864.390,00	100,00	30.710.056,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tempursari	38.984.645,00	38.984.645,00	100,00	16.368.130,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonrejo	36.665.376,00	36.665.376,00	100,00	31.113.308,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tampir Wetan	37.014.594,00	37.014.594,00	100,00	28.932.735,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tembelang	35.737.873,00	35.737.873,00	100,00	23.186.995,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sonorejo	35.074.414,00	35.074.414,00	100,00	26.776.361,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Trenten	38.348.364,00	38.348.364,00	100,00	37.870.920,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bateh	32.332.124,00	32.332.124,00	100,00	37.810.435,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Surodadi	41.710.966,00	41.710.966,00	100,00	32.762.108,00
16		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Pakis	741.286.156,00	741.286.156,00	100,00	528.949.683,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakis	46.930.086,00	46.930.086,00	100,00	33.284.886,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyusidi	36.348.057,00	36.348.057,00	100,00	43.712.448,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari	36.095.615,00	36.095.615,00	100,00	20.842.997,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Daseh	31.461.348,00	31.461.348,00	100,00	14.941.129,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gumelem	33.154.730,00	33.154.730,00	100,00	20.275.552,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kaponan	57.646.191,00	57.646.191,00	100,00	36.282.268,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kragilan	33.157.515,00	33.157.515,00	100,00	27.061.771,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketundan	33.354.146,00	33.354.146,00	100,00	38.058.601,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Daleman Kidul	32.291.409,00	32.291.409,00	100,00	25.126.560,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Petung	40.190.021,00	40.190.021,00	100,00	36.499.889,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bawang	33.043.472,00	33.043.472,00	100,00	26.889.926,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rejosari	41.301.990,00	41.301.990,00	100,00	18.984.308,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kajangkoso	36.128.675,00	36.128.675,00	100,00	15.270.542,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Muneng Warangan	35.156.032,00	35.156.032,00	100,00	20.630.408,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondangsari	33.570.414,00	33.570.414,00	100,00	47.399.180,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kenalan	33.463.497,00	33.463.497,00	100,00	18.286.460,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pogalan	39.675.409,00	39.675.409,00	100,00	27.744.700,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gejagan	38.251.838,00	38.251.838,00	100,00	17.754.795,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Muneng	36.370.134,00	36.370.134,00	100,00	19.356.689,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jambewangi	33.695.577,00	33.695.577,00	100,00	20.546.574,00
17		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Ngablak	615.822.503,00	615.822.503,00	100,00	440.926.802,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngablak	35.131.186,00	35.131.186,00	100,00	104.254.608,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jagonayan	32.382.459,00	32.382.459,00	100,00	16.572.823,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tejosari	38.694.081,00	38.694.081,00	100,00	31.601.774,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumberejo	34.728.750,00	34.728.750,00	100,00	18.743.962,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girirejo	32.342.103,00	32.342.103,00	100,00	33.529.208,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pandean	32.999.619,00	32.999.619,00	100,00	37.727.455,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Genikan	32.585.858,00	32.585.858,00	100,00	14.754.453,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandungrejo	37.493.607,00	37.493.607,00	100,00	26.569.180,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Madyogondo	31.443.927,00	31.443.927,00	100,00	26.253.653,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jogoyasan	92.334.814,00	92.334.814,00	100,00	16.975.486,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Keditan	34.283.597,00	34.283.597,00	100,00	17.252.841,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Magersari	41.574.540,00	41.574.540,00	100,00	15.233.845,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kanigoro	35.147.358,00	35.147.358,00	100,00	18.966.088,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Selomirah	32.968.449,00	32.968.449,00	100,00	20.837.577,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pagergunung	34.284.722,00	34.284.722,00	100,00	22.682.079,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Seloprojo	37.427.433,00	37.427.433,00	100,00	18.971.770,00
18		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Grabag	1.103.835.243,00	1.103.835.243,00	100,00	745.768.138,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Grabag	38.167.808,00	38.167.808,00	100,00	82.816.661,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumururum	35.634.651,00	35.634.651,00	100,00	38.788.769,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyusari	34.650.193,00	34.650.193,00	100,00	40.608.668,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kartoharjo	42.160.818,00	42.160.818,00	100,00	16.336.394,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidogede	32.177.142,00	32.177.142,00	100,00	25.220.779,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Citrosono	36.367.827,00	36.367.827,00	100,00	26.506.967,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kleteran	33.561.053,00	33.561.053,00	100,00	37.734.420,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngasinan	70.580.888,00	70.580.888,00	100,00	19.790.534,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banaran	32.028.843,00	32.028.843,00	100,00	27.570.578,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Baleagung	37.405.780,00	37.405.780,00	100,00	24.406.316,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klegen	38.612.579,00	38.612.579,00	100,00	17.118.767,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalikuto	33.336.805,00	33.336.805,00	100,00	23.758.308,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalipucang	34.701.706,00	34.701.706,00	100,00	21.384.955,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Seworan	36.284.155,00	36.284.155,00	100,00	23.174.950,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	41.418.474,00	41.418.474,00	100,00	24.788.261,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sambungrejo	99.778.569,00	99.778.569,00	100,00	21.464.031,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tlogorejo	34.992.028,00	34.992.028,00	100,00	13.854.655,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tirto	33.542.566,00	33.542.566,00	100,00	24.072.974,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ketawang	34.157.171,00	34.157.171,00	100,00	23.478.837,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Salam	33.145.932,00	33.145.932,00	100,00	20.689.655,00
	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Cokro	33.605.776,00	33.605.776,00	100,00	16.587.990,00
	22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Losari	33.476.523,00	33.476.523,00	100,00	39.082.563,00
	23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngrancah	34.216.884,00	34.216.884,00	100,00	16.800.001,00
	24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sugihmas	34.735.064,00	34.735.064,00	100,00	28.920.227,00
	25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pesidi	37.037.350,00	37.037.350,00	100,00	21.769.617,00
	26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Giriwetan	47.306.163,00	47.306.163,00	100,00	22.131.050,00
	27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucung Sari	35.026.964,00	35.026.964,00	100,00	17.941.055,00
	28	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Lebak	35.725.531,00	35.725.531,00	100,00	28.970.156,00
19		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Tegalrejo	760.650.255,00	760.650.255,00	100,00	468.126.552,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tegalrejo	33.938.273,00	33.938.273,00	100,00	34.147.782,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Soroyudan	38.153.710,00	38.153.710,00	100,00	17.381.665,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	33.964.208,00	33.964.208,00	100,00	21.353.959,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwosari	36.732.142,00	36.732.142,00	100,00	24.318.570,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dlimas	33.828.663,00	33.828.663,00	100,00	31.848.635,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyusari	40.651.677,00	40.651.677,00	100,00	22.859.582,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	36.469.724,00	36.469.724,00	100,00	16.510.232,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tampingan	31.064.915,00	31.064.915,00	100,00	50.260.903,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banyuurip	32.416.989,00	32.416.989,00	100,00	23.852.931,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Glagahombo	33.147.648,00	33.147.648,00	100,00	25.905.569,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwodadi	33.938.014,00	33.938.014,00	100,00	18.908.801,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonokerto	34.076.910,00	34.076.910,00	100,00	13.264.687,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dawung	33.893.426,00	33.893.426,00	100,00	17.530.549,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Klopo	33.991.131,00	33.991.131,00	100,00	18.326.878,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Japan	35.918.353,00	35.918.353,00	100,00	12.585.329,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kebonagung	37.900.384,00	37.900.384,00	100,00	13.483.342,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngasem	33.259.238,00	33.259.238,00	100,00	18.028.836,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girirejo	32.398.139,00	32.398.139,00	100,00	30.744.872,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirejo	56.013.107,00	56.013.107,00	100,00	24.182.405,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donorejo	46.925.260,00	46.925.260,00	100,00	15.814.088,00
	21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunrejo	31.968.344,00	31.968.344,00	100,00	16.816.937,00
20		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Secang	881.363.324,00	881.363.324,00	100,00	632.113.549,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Madusari	43.800.097,00	43.800.097,00	100,00	25.279.644,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Madyocondro	38.590.337,00	38.590.337,00	100,00	54.849.819,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngabean	33.651.277,00	33.651.277,00	100,00	31.813.075,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Krincing	33.120.502,00	33.120.502,00	100,00	49.783.043,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donorejo	33.122.771,00	33.122.771,00	100,00	20.363.711,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candisari	64.784.377,00	64.784.377,00	100,00	23.575.039,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candiretno	43.521.235,00	43.521.235,00	100,00	31.158.599,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pancuranmas	33.547.969,00	33.547.969,00	100,00	46.722.043,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Jambewangi	82.336.060,00	82.336.060,00	100,00	42.385.305,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Payaman	43.032.973,00	43.032.973,00	100,00	59.442.875,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalijoso	54.272.361,00	54.272.361,00	100,00	41.159.541,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo	42.196.613,00	42.196.613,00	100,00	58.836.458,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Karangajen	62.744.848,00	62.744.848,00	100,00	20.988.556,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	45.750.546,00	45.750.546,00	100,00	23.006.615,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pucang	83.650.411,00	83.650.411,00	100,00	29.590.633,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Purwosari	36.970.307,00	36.970.307,00	100,00	15.958.932,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Donomulyo	37.652.311,00	37.652.311,00	100,00	14.994.702,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girikulon	32.943.130,00	32.943.130,00	100,00	16.277.180,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pirikan	35.675.199,00	35.675.199,00	100,00	25.927.779,00
21		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Windusari	716.751.346,00	716.751.346,00	100,00	473.335.060,00
	1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Windusari	35.311.093,00	35.311.093,00	100,00	25.148.360,00
	2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pasangsari	57.861.174,00	57.861.174,00	100,00	30.653.897,00
	3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Candisari	35.103.126,00	35.103.126,00	100,00	27.136.090,00
	4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bandarsedayu	36.330.355,00	36.330.355,00	100,00	23.912.977,00
	5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	31.250.644,00	31.250.644,00	100,00	53.718.320,00
	6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Balesari	34.516.201,00	34.516.201,00	100,00	24.468.246,00
	7	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kembangkuning	32.415.352,00	32.415.352,00	100,00	14.838.258,00
	8	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	34.915.127,00	34.915.127,00	100,00	28.237.242,00
	9	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Wonoroto	35.612.510,00	35.612.510,00	100,00	23.381.897,00
	10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Genito	31.959.289,00	31.959.289,00	100,00	24.120.873,00
	11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kentengsari	34.845.816,00	34.845.816,00	100,00	17.360.822,00
	12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Umbulsari	33.476.516,00	33.476.516,00	100,00	22.303.023,00
	13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Semen	30.754.608,00	30.754.608,00	100,00	25.547.768,00
	14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Dampit	34.117.247,00	34.117.247,00	100,00	13.680.091,00
	15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Girimulyo	37.339.681,00	37.339.681,00	100,00	17.137.787,00
	16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Ngemplak	36.822.973,00	36.822.973,00	100,00	23.050.054,00
	17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gunungsari	37.458.217,00	37.458.217,00	100,00	24.166.926,00
	18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kalijoso	34.092.924,00	34.092.924,00	100,00	16.713.349,00
	19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Mangunsari	38.041.859,00	38.041.859,00	100,00	13.667.043,00
	20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Gondangrejo	34.526.634,00	34.526.634,00	100,00	24.092.037,00
		Jumlah	17.932.290.887,00	17.932.290.887,00	100,00	15.469.938.769,00

Lampiran 5.19

Rincian Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Salaman	105.572.811,51	105.572.811,51	100,00	160.392.410,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargoretno	3.254.956	3.254.956	100,00	4.857.820,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paripurno	3.547.140	3.547.140	100,00	5.393.130,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalirejo	3.550.725	3.550.725	100,00	5.900.940,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Menoreh	27.582.316	27.582.316	100,00	23.288.440,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirejo	3.408.882	3.408.882	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomulyo	4.913.900	4.913.900	100,00	5.919.000,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonrejo	3.625.024	3.625.024	100,00	4.979.480,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salaman	9.110.819	9.110.819	100,00	39.718.490,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalisalak	3.746.435	3.746.435	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sriwedari	3.445.276	3.445.276	100,00	5.004.300,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jebengsari	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Taniunganom	4.611.116	4.611.116	100,00	7.495.880,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarharjo	3.494.224	3.494.224	100,00	5.347.540,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purwosari	3.389.790	3.389.790	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngampeldento	3.268.615	3.268.615	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidosari	3.303.219	3.303.219	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawangargo	3.309.593	3.309.593	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krasak	5.300.039	5.300.039	100,00	5.347.540,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Margoyoso	4.473.620	4.473.620	100,00	6.567.070,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliabu	4.982.167	4.982.167	100,00	7.069.030,00
2		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Borobudur	109.543.364,18	109.543.364,18	100,00	175.400.760,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giripurno	3.254.956	3.254.956	100,00	4.911.950,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giritengah	3.300.416	3.300.416	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tuksongo	4.087.042	4.087.042	100,00	7.694.690,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Majaksingi	4.102.404	4.102.404	100,00	5.536.560,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kenalan	3.297.465	3.297.465	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bigaran	3.307.834	3.307.834	100,00	4.822.160,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambeng	3.478.843	3.478.843	100,00	5.357.210,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candirejo	3.317.584	3.317.584	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargogondo	3.780.002	3.780.002	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wanurejo	6.547.826	6.547.826	100,00	7.336.520,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Borobudur	37.062.382	37.062.382	100,00	70.055.990,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari	4.126.708	4.126.708	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karanganyar	3.854.622	3.854.622	100,00	5.420.980,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangrejo	3.692.026	3.692.026	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadiharjo	3.886.189	3.886.189	100,00	5.876.420,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonsari	3.263.151	3.263.151	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalarum	4.128.273	4.128.273	100,00	7.558.620,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kembanglimus	3.793.041	3.793.041	100,00	5.752.280,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wringinputih	3.934.794	3.934.794	100,00	6.627.180,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bumiharjo	3.327.806	3.327.806	100,00	4.946.450,00
3		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Ngluwar	30.922.468,28	30.922.468,28	100,00	48.597.230,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bligo	4.842.960	4.842.960	100,00	5.058.690,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakunden	3.517.942	3.517.942	100,00	6.824.670,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Somokaton	3.565.239	3.565.239	100,00	5.353.700,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngluwar	4.526.613	4.526.613	100,00	8.524.890,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangtalun	3.430.360	3.430.360	100,00	5.248.010,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jamuskauman	3.800.393	3.800.393	100,00	6.567.490,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Plosogede	3.676.399	3.676.399	100,00	6.130.920,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blongkeng	3.562.563	3.562.563	100,00	4.888.860,00
4		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Salam	51.475.733,09	51.475.733,09	100,00	77.157.130,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mantingan	3.925.589	3.925.589	100,00	5.401.930,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salam	7.269.150	7.269.150	100,00	8.078.120,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sucen	5.983.594	5.983.594	100,00	10.364.150,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kadiluwih	3.294.113	3.294.113	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Somoketro	3.276.811	3.276.811	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jumoyo	5.807.829	5.807.829	100,00	9.483.450,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tirta	3.548.506	3.548.506	100,00	5.369.910,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baturono	3.300.180	3.300.180	100,00	5.094.090,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tersangede	3.304.129	3.304.129	100,00	5.068.430,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sirahan	3.325.984	3.325.984	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Seloboro	3.565.859	3.565.859	100,00	5.919.970,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gulon	4.873.988	4.873.988	100,00	8.018.330,00
5		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Srumbung	60.505.729,51	60.505.729,51	100,00	86.108.730,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sudimoro	4.453.283	4.453.283	100,00	4.786.250,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandanretno	3.326.895	3.326.895	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliurang	3.339.644	3.339.644	100,00	5.017.130,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalrandu	3.273.168	3.273.168	100,00	4.837.550,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kamongan	3.293.202	3.293.202	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jerukagung	3.317.789	3.317.789	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kradenan	3.630.859	3.630.859	100,00	4.786.250,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuadem	3.353.303	3.353.303	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngablak	3.634.264	3.634.264	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Srumbung	4.052.932	4.052.932	100,00	7.692.750,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bringin	3.551.664	3.551.664	100,00	5.337.860,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mranggen	3.675.282	3.675.282	100,00	5.217.480,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargosoko	3.371.515	3.371.515	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Polengan	3.295.934	3.295.934	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucanganom	4.125.807	4.125.807	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemiren	3.520.629	3.520.629	100,00	5.357.210,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Nglumut	3.289.559	3.289.559	100,00	4.786.250,00
6		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Dukun	74.213.347,33	74.213.347,33	100,00	111.435.700,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketunggeng	3.559.788	3.559.788	100,00	5.337.860,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wates	3.522.903	3.522.903	100,00	5.362.990,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadipuro	3.390.639	3.390.639	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyubiru	4.177.978	4.177.978	100,00	6.030.800,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dukun	20.639.034	20.639.034	100,00	4.865.770,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalibening	7.165.482	7.165.482	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargomulyo	3.388.471	3.388.471	100,00	4.786.250,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyudono	3.322.342	3.322.342	100,00	41.829.310,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumber	4.552.241	4.552.241	100,00	4.927.340,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunsoko	3.294.113	3.294.113	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sewukan	3.909.148	3.909.148	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sengi	3.382.920	3.382.920	100,00	4.791.630,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paten	3.304.129	3.304.129	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krinjing	3.345.563	3.345.563	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keningar	3.258.598	3.258.598	100,00	4.786.250,00
7		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Sawangan	196.928.001,97	196.928.001,97	100,00	289.089.670,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondowangi	4.137.832	4.137.832	100,00	5.886.820,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sawangan	8.512.003	8.512.003	100,00	15.605.660,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krogowan	4.017.030	4.017.030	100,00	6.545.560,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kapuhan	3.754.154	3.754.154	100,00	8.856.930,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketep	140.624.318	140.624.318	100,00	198.214.150,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonolelo	4.623.054	4.623.054	100,00	6.924.890,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuroto	3.569.905	3.569.905	100,00	5.357.210,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wulunggunung	3.304.129	3.304.129	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gantang	3.326.895	3.326.895	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jati	3.315.057	3.315.057	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Butuh	3.319.641	3.319.641	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunsari	4.206.731	4.206.731	100,00	5.958.770,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tirtosari	3.307.670	3.307.670	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Podosoko	3.603.633	3.603.633	100,00	6.893.920,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Soronalan	3.305.951	3.305.951	100,00	4.914.510,00
8		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Muntilan	145.005.634,94	145.005.634,94	100,00	228.716.670,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjung	4.155.216	4.155.216	100,00	6.658.070,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sokorini	3.574.229	3.574.229	100,00	5.404.370,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sriwedari	3.665.549	3.665.549	100,00	5.286.490,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Congkrang	3.602.284	3.602.284	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Adikarto	3.472.071	3.472.071	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Menayu	3.514.386	3.514.386	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keji	5.085.999	5.085.999	100,00	5.641.080,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngawen	3.579.772	3.579.772	100,00	5.180.670,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungpring	9.301.987	9.301.987	100,00	8.369.170,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucungrejo	56.396.501	56.396.501	100,00	49.365.270,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tamanagung	35.025.082	35.025.082	100,00	78.382.890,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondosuli	4.230.324	4.230.324	100,00	7.172.010,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sedayu	9.402.235	9.402.235	100,00	42.897.900,00
9		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Mungkid	76.651.693,22	76.651.693,22	100,00	113.085.120,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Progowati	3.796.325	3.796.325	100,00	5.850.760,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngrajek	4.435.645	4.435.645	100,00	5.956.560,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rambeanak	4.068.677	4.068.677	100,00	5.357.210,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Paremono	6.073.692	6.073.692	100,00	5.814.740,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pabelan	5.729.053	5.729.053	100,00	7.164.630,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bojong	7.551.846	7.551.846	100,00	10.780.670,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pagersari	4.306.946	4.306.946	100,00	5.197.090,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mungkid	14.636.325	14.636.325	100,00	27.936.730,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ambartawang	3.333.269	3.333.269	100,00	4.837.550,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bumirejo	7.882.705	7.882.705	100,00	11.897.170,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Blondo	4.704.447	4.704.447	100,00	6.717.790,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Senden	3.311.603	3.311.603	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondang	3.285.006	3.285.006	100,00	4.813.760,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Treko	3.536.155	3.536.155	100,00	5.974.210,00
10		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Mertoyudan	94.762.126,18	94.762.126,18	100,00	189.770.180,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Deyangan	4.714.978	4.714.978	100,00	60.588.010,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasuruhan	28.123.270	28.123.270	100,00	22.989.860,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Donorojo	4.094.380	4.094.380	100,00	7.328.950,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalinegoro	4.658.694	4.658.694	100,00	9.316.760,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jogonegoro	5.104.007	5.104.007	100,00	5.994.650,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukorejo	3.595.345	3.595.345	100,00	5.424.820,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bondowoso	4.217.994	4.217.994	100,00	10.691.660,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Danurejo	5.786.383	5.786.383	100,00	9.131.160,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyurojo	8.249.581	8.249.581	100,00	10.180.750,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarnegoro	8.374.419	8.374.419	100,00	21.513.140,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bulurejo	4.604.216	4.604.216	100,00	7.063.380,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mertoyudan	13.238.859	13.238.859	100,00	19.547.040,00
11		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Tempuran	64.498.126,97	64.498.126,97	100,00	110.992.560,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ringinanom	4.289.500	4.289.500	100,00	7.698.080,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberarum	4.485.494	4.485.494	100,00	5.687.450,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidoagung	5.613.044	5.613.044	100,00	7.393.130,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanggurejo	5.159.466	5.159.466	100,00	13.643.090,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalisari	3.317.789	3.317.789	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girirejo	4.281.221	4.281.221	100,00	5.328.940,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tempurejo	11.021.284	11.021.284	100,00	25.656.600,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Prajeksari	3.258.598	3.258.598	100,00	5.010.330,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jogomulyo	3.391.795	3.391.795	100,00	6.885.210,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Growong	3.275.347	3.275.347	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Temanggal	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pringombo	3.274.110	3.274.110	100,00	4.933.750,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kemutuk	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bawang	3.349.221	3.349.221	100,00	4.824.730,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tugurejo	3.271.347	3.271.347	100,00	4.786.250,00
12		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Kajoran	101.020.483,57	101.020.483,57	100,00	143.814.500,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonogiri	3.346.929	3.346.929	100,00	4.786.250,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kwaderan	3.334.180	3.334.180	100,00	4.888.860,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Madukoro	3.383.354	3.383.354	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bumiayu	3.338.795	3.338.795	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Madugondo	3.285.917	3.285.917	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargosari	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngendrosari	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lesanpuro	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjaretno	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krinjing	3.373.839	3.373.839	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bangsri	3.316.878	3.316.878	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wadas	3.285.006	3.285.006	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kajoran	5.060.546	5.060.546	100,00	6.714.710,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunrejo	3.345.107	3.345.107	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambak	3.412.493	3.412.493	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bambusari	3.475.105	3.475.105	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wuwuharjo	3.816.558	3.816.558	100,00	5.984.360,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandansari	3.425.645	3.425.645	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandanretno	3.355.626	3.355.626	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krumpakan	3.329.055	3.329.055	100,00	4.818.890,00
	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjaragung	3.317.789	3.317.789	100,00	4.786.250,00
	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sangen	3.341.967	3.341.967	100,00	4.815.110,00
	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucungroto	3.285.006	3.285.006	100,00	4.786.250,00
	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo	3.412.964	3.412.964	100,00	4.786.250,00
	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidowangi	4.173.769	4.173.769	100,00	4.786.250,00
	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukomulyo	3.290.470	3.290.470	100,00	4.786.250,00
	27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukorejo	3.386.085	3.386.085	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sutopati	4.309.470	4.309.470	100,00	5.589.330,00
	29	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukomakmur	3.598.106	3.598.106	100,00	5.705.740,00
13		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Kaliangkrik	220.300.024,47	220.300.024,47	100,00	130.436.900,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaliangkrik	155.511.589	155.511.589	100,00	35.686.790,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngawonggo	3.563.473	3.563.473	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Munggangsari	3.281.364	3.281.364	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngargosoko	3.371.515	3.371.515	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngendrokilo	3.504.466	3.504.466	100,00	4.803.430,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Maduretno	3.306.861	3.306.861	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Temanggung	3.479.093	3.479.093	100,00	4.786.250,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pengarengan	3.277.721	3.277.721	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangli	3.520.732	3.520.732	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Selomoyo	3.279.998	3.279.998	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarejo	3.291.381	3.291.381	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giriwarno	3.303.121	3.303.121	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girirejo	3.576.405	3.576.405	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonlegi	3.310.504	3.310.504	100,00	6.325.450,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balerejo	3.528.927	3.528.927	100,00	5.381.460,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Beseran	3.596.962	3.596.962	100,00	6.446.020,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bumirejo	3.349.692	3.349.692	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketangi	3.304.129	3.304.129	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balekerto	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Adipuro	3.687.135	3.687.135	100,00	4.786.250,00
14		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Bandongan	60.469.534,28	60.469.534,28	100,00	99.859.770,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandongan	13.925.928	13.925.928	100,00	27.430.370,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salangkanci	3.713.156	3.713.156	100,00	5.292.000,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukodadi	3.297.755	3.297.755	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tonoboyo	3.379.711	3.379.711	100,00	4.793.740,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gandusari	3.509.300	3.509.300	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo	3.401.566	3.401.566	100,00	4.928.490,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trasan	3.400.763	3.400.763	100,00	7.158.190,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuwangi	4.432.912	4.432.912	100,00	8.068.650,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kedungsari	3.665.390	3.665.390	100,00	5.137.960,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukosari	3.417.686	3.417.686	100,00	6.325.450,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonagung	3.325.984	3.325.984	100,00	3.991.000,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalegen	4.313.692	4.313.692	100,00	6.562.790,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngepanrejo	3.289.559	3.289.559	100,00	5.812.380,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari	3.396.133	3.396.133	100,00	4.786.250,00
15		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Candimulyo	66.771.015,39	66.771.015,39	100,00	98.726.620,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surojoyo	3.770.529	3.770.529	100,00	7.338.560,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tempak	3.494.324	3.494.324	100,00	5.387.680,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomulyo	4.196.352	4.196.352	100,00	6.040.180,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mejing	4.045.831	4.045.831	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purworejo	3.293.233	3.293.233	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candimulyo	3.620.900	3.620.900	100,00	5.379.660,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giyanti	3.713.330	3.713.330	100,00	5.206.320,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kembaran	3.326.895	3.326.895	100,00	4.786.250,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalsari	3.336.912	3.336.912	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Podosoko	3.367.198	3.367.198	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tampir Kulon	3.288.107	3.288.107	100,00	4.812.540,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tempursari	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonrejo	3.510.841	3.510.841	100,00	4.792.980,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tampir Wetan	3.704.551	3.704.551	100,00	5.928.180,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tembelang	3.271.347	3.271.347	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sonorejo	3.494.324	3.494.324	100,00	5.357.210,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Trenten	3.304.129	3.304.129	100,00	4.786.250,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bateh	3.336.912	3.336.912	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Surodadi	3.440.345	3.440.345	100,00	5.407.060,00
16		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Pakis	68.735.674,63	68.735.674,63	100,00	116.552.220,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pakis	4.435.508	4.435.508	100,00	6.771.590,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyusidi	3.403.387	3.403.387	100,00	4.814.790,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Losari	3.386.085	3.386.085	100,00	6.846.730,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Daseh	3.256.392	3.256.392	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gumelem	3.266.794	3.266.794	100,00	4.786.250,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kaponan	3.573.568	3.573.568	100,00	16.398.840,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kragilan	3.267.705	3.267.705	100,00	4.792.980,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketundan	3.589.939	3.589.939	100,00	5.357.210,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Daleman Kidul	3.282.306	3.282.306	100,00	5.017.130,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Petung	3.497.966	3.497.966	100,00	5.357.210,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bawang	3.340.554	3.340.554	100,00	4.863.210,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rejosari	3.857.830	3.857.830	100,00	6.595.590,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kajangkoso	3.260.420	3.260.420	100,00	4.789.450,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Muneng Warangan	3.254.956	3.254.956	100,00	4.829.340,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondangsari	3.254.956	3.254.956	100,00	5.391.540,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kenalan	3.292.291	3.292.291	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pogalan	3.513.389	3.513.389	100,00	5.926.250,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gejagan	3.271.347	3.271.347	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Muneng	3.334.180	3.334.180	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambewangi	3.396.102	3.396.102	100,00	4.869.110,00
17		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Ngablak	74.229.224,58	74.229.224,58	100,00	113.464.360,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngablak	19.773.733	19.773.733	100,00	32.310.030,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jagonayan	3.320.521	3.320.521	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tejosari	4.372.426	4.372.426	100,00	9.780.300,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumberejo	3.562.746	3.562.746	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girirejo	3.793.008	3.793.008	100,00	4.965.820,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pandean	3.279.998	3.279.998	100,00	4.829.090,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genikan	3.281.364	3.281.364	100,00	4.786.250,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandungrejo	4.148.831	4.148.831	100,00	4.816.710,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Madyogondo	3.464.216	3.464.216	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jogoyasan	3.356.713	3.356.713	100,00	4.914.510,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Keditan	3.497.181	3.497.181	100,00	4.885.650,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Magersari	3.274.079	3.274.079	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kanigoro	3.263.151	3.263.151	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Selomirah	3.316.827	3.316.827	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pagergunung	5.185.584	5.185.584	100,00	8.470.360,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Seloprojo	3.338.846	3.338.846	100,00	4.988.140,00
18		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Grabag	157.785.585,12	157.785.585,12	100,00	242.031.410,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Grabag	54.566.767	54.566.767	100,00	85.373.970,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumururum	4.184.589	4.184.589	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyusari	3.380.622	3.380.622	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kartoharjo	9.103.946	9.103.946	100,00	10.854.750,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidogede	3.316.878	3.316.878	100,00	5.430.920,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Citrosono	3.317.789	3.317.789	100,00	4.863.210,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kleteran	3.324.645	3.324.645	100,00	6.188.050,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngasinan	5.150.762	5.150.762	100,00	8.922.860,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banaran	3.992.096	3.992.096	100,00	7.148.420,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Baleagung	3.337.720	3.337.720	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klegen	3.816.520	3.816.520	100,00	4.866.090,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalikuto	3.657.905	3.657.905	100,00	6.893.670,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalipucang	3.277.721	3.277.721	100,00	4.986.860,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Seworan	3.266.794	3.266.794	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari	3.307.772	3.307.772	100,00	10.754.900,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sambungrejo	3.285.917	3.285.917	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tlogorejo	4.611.229	4.611.229	100,00	5.626.040,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tirto	3.544.379	3.544.379	100,00	5.347.540,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ketawang	3.359.677	3.359.677	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Salam	3.795.711	3.795.711	100,00	4.786.250,00
	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Cokro	3.726.148	3.726.148	100,00	5.362.150,00
	22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Losari	3.453.726	3.453.726	100,00	5.394.100,00
	23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngrancah	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sugihmas	3.505.194	3.505.194	100,00	4.786.250,00
	25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pesidi	3.321.431	3.321.431	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Giriwetan	3.288.358	3.288.358	100,00	4.786.250,00
	27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucungsari	3.467.727	3.467.727	100,00	6.256.830,00
	28	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Lebak	4.168.606	4.168.606	100,00	5.112.300,00
19		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Tegalrejo	79.898.523,93	79.898.523,93	100,00	121.731.230,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tegalrejo	9.681.343	9.681.343	100,00	18.169.210,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Soroyudan	3.461.374	3.461.374	100,00	6.778.110,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidorejo	3.403.387	3.403.387	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purwosari	4.418.032	4.418.032	100,00	6.559.150,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dlimas	3.417.859	3.417.859	100,00	4.856.540,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyusari	3.380.622	3.380.622	100,00	4.786.250,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sukorejo	3.433.971	3.433.971	100,00	5.730.290,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tampingan	3.355.411	3.355.411	100,00	5.183.870,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banyuurip	4.201.212	4.201.212	100,00	6.537.730,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Glagahombo	3.286.828	3.286.828	100,00	4.786.250,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purwodadi	3.287.354	3.287.354	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonokerto	3.310.024	3.310.024	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dawung	3.303.219	3.303.219	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Klopo	3.936.113	3.936.113	100,00	5.695.080,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Japan	3.293.264	3.293.264	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kebonagung	3.325.984	3.325.984	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngasem	3.295.023	3.295.023	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girirejo	3.800.190	3.800.190	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirejo	3.418.459	3.418.459	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Donorejo	3.467.131	3.467.131	100,00	4.786.250,00
	21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunrejo	3.421.724	3.421.724	100,00	4.786.250,00
20		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Secang	79.190.976,49	79.190.976,49	100,00	158.398.280,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Madusari	3.595.512	3.595.512	100,00	6.315.250,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Madyocondro	4.705.203	4.705.203	100,00	6.374.440,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngabean	3.656.283	3.656.283	100,00	6.559.410,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Krincing	4.770.887	4.770.887	100,00	8.729.340,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Donorejo	3.325.984	3.325.984	100,00	3.991.000,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candisari	3.676.390	3.676.390	100,00	5.347.540,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candiretno	3.534.677	3.534.677	100,00	5.021.360,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pancuranmas	3.447.371	3.447.371	100,00	5.710.280,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Jambewangi	4.365.887	4.365.887	100,00	9.796.350,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Payaman	11.205.928	11.205.928	100,00	52.991.530,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalijoso	3.455.293	3.455.293	100,00	3.991.000,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngadirojo	3.594.618	3.594.618	100,00	6.220.910,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Karangajen	3.342.273	3.342.273	100,00	4.786.250,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sidomulyo	3.754.887	3.754.887	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pucang	4.276.289	4.276.289	100,00	5.599.080,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Purwosari	3.567.093	3.567.093	100,00	4.786.250,00
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Donomulyo	3.296.507	3.296.507	100,00	4.786.250,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girikulon	3.687.841	3.687.841	100,00	6.644.960,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pirikan	3.932.052	3.932.052	100,00	5.960.830,00
21		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wilayah Kec. Windusari	72.467.900,55	72.467.900,55	100,00	113.267.795,00
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Windusari	7.678.653	7.678.653	100,00	14.275.230,00
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Pasangsari	3.386.085	3.386.085	100,00	4.786.250,00
	3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Candisari	3.467.131	3.467.131	100,00	4.786.250,00
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Bandarsedayu	3.317.789	3.317.789	100,00	4.786.250,00
	5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Banjarsari	3.307.772	3.307.772	100,00	8.613.682,00
	6	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Balesari	3.326.895	3.326.895	100,00	4.800.740,00
	7	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kembangkuning	3.711.750	3.711.750	100,00	6.449.130,00
	8	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tanjungsari	3.423.421	3.423.421	100,00	5.005.650,00
	9	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Wonoroto	3.521.642	3.521.642	100,00	4.786.250,00
	10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Genito	4.031.752	4.031.752	100,00	6.520.060,00
	11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kentengsari	3.271.347	3.271.347	100,00	4.786.250,00
	12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Umbulsari	3.272.258	3.272.258	100,00	4.786.250,00
	13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Semen	3.290.470	3.290.470	100,00	4.843.970,00
	14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Dampit	3.254.956	3.254.956	100,00	4.786.250,00
	15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Girimulyo	3.266.794	3.266.794	100,00	4.786.250,00
	16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Ngemplak	3.353.523	3.353.523	100,00	4.786.250,00

No. Kec.	No. Desa	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
	17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gunungsari	3.399.932	3.399.932	100,00	4.789.130,00
	18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Kalijoso	3.474.447	3.474.447	100,00	4.786.250,00
	19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Mangunsari	3.369.756	3.369.756	100,00	4.786.250,00
	20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Gondangrejo	3.341.527	3.341.527	100,00	5.321.453,00
Jumlah			1.990.947.980,20	1.990.947.980,20	100,00	2.929.029.245,00



Lampiran 5.20
Rincian Dana Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022 per Desa

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Salaman	19.869.423.000,00	19.869.423.000,00	100,00	21.460.074.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargoretno	1.141.726.000	1.141.726.000	100,00	1.138.909.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Paripurno	1.112.402.000	1.112.402.000	100,00	1.098.899.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalirejo	1.436.112.000	1.436.112.000	100,00	1.741.028.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Menoreh	1.131.457.000	1.131.457.000	100,00	1.250.353.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirejo	1.094.327.000	1.094.327.000	100,00	1.273.743.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	970.966.000	970.966.000	100,00	1.004.937.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonrejo	1.311.101.000	1.311.101.000	100,00	1.239.422.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Salaman	869.123.000	869.123.000	100,00	849.201.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalisalak	946.479.000	946.479.000	100,00	1.094.349.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sriwedari	1.085.131.000	1.085.131.000	100,00	1.080.614.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jebengsari	817.154.000	817.154.000	100,00	833.264.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjunganom	782.710.000	782.710.000	100,00	920.681.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarharjo	875.469.000	875.469.000	100,00	833.150.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwosari	858.333.000	858.333.000	100,00	952.098.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngampeldento	732.815.000	732.815.000	100,00	800.415.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidosari	1.013.104.000	1.013.104.000	100,00	1.096.684.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sawangargo	910.010.000	910.010.000	100,00	994.582.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krasak	888.667.000	888.667.000	100,00	1.040.523.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Margoyoso	966.770.000	966.770.000	100,00	1.203.541.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kaliabu	925.567.000	925.567.000	100,00	1.013.681.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Borobudur	19.895.378.000,00	19.895.378.000,00	100,00	19.177.666.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Giripurno	1.154.009.000	1.154.009.000	100,00	1.074.569.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Giritengah	1.189.113.000	1.189.113.000	100,00	1.296.272.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tuksongo	1.171.527.000	1.171.527.000	100,00	1.118.598.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Majaksingi	943.215.000	943.215.000	100,00	935.116.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kenalan	725.289.000	725.289.000	100,00	711.825.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bigaran	903.189.000	903.189.000	100,00	730.879.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sambeng	833.233.000	833.233.000	100,00	751.772.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candirejo	1.030.644.000	1.030.644.000	100,00	1.022.874.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargogondo	1.124.685.000	1.124.685.000	100,00	879.517.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wanurejo	873.655.000	873.655.000	100,00	931.557.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Borobudur	1.103.015.000	1.103.015.000	100,00	1.191.974.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	807.836.000	807.836.000	100,00	680.367.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karanganyar	884.674.000	884.674.000	100,00	845.612.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangrejo	990.502.000	990.502.000	100,00	861.769.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadiharjo	1.421.108.000	1.421.108.000	100,00	1.330.307.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonsari	876.862.000	876.862.000	100,00	852.179.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalarum	900.636.000	900.636.000	100,00	849.689.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kembanglimus	929.468.000	929.468.000	100,00	1.071.708.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wringinputih	1.253.922.000	1.253.922.000	100,00	1.139.854.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bumiharjo	778.796.000	778.796.000	100,00	901.228.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Ngluwar	7.357.684.000,00	7.357.684.000,00	100,00	8.129.306.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bligo	1.090.228.000	1.090.228.000	100,00	981.221.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pakunden	891.610.000	891.610.000	100,00	963.133.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Somokaton	908.881.000	908.881.000	100,00	832.060.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngluwar	871.924.000	871.924.000	100,00	1.012.778.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangtalun	973.109.000	973.109.000	100,00	1.109.190.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jamuskauman	860.575.000	860.575.000	100,00	1.006.276.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Plosogede	938.420.000	938.420.000	100,00	1.075.549.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Blongkeng	822.937.000	822.937.000	100,00	1.149.099.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Salam	11.238.095.000,00	11.238.095.000,00	100,00	13.211.053.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mantingan	828.954.000	828.954.000	100,00	1.100.922.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Salam	1.118.866.000	1.118.866.000	100,00	1.336.564.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sucen	1.037.467.000	1.037.467.000	100,00	1.151.819.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kadiluwih	982.446.000	982.446.000	100,00	935.327.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Somoketro	879.716.000	879.716.000	100,00	964.623.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jumoyo	1.073.756.000	1.073.756.000	100,00	1.540.124.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tirta	799.225.000	799.225.000	100,00	1.064.826.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Baturono	710.390.000	710.390.000	100,00	963.593.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tersangede	911.433.000	911.433.000	100,00	974.171.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sirahan	875.811.000	875.811.000	100,00	955.602.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Seloboro	776.852.000	776.852.000	100,00	821.620.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gulon	1.243.179.000	1.243.179.000	100,00	1.401.862.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Srumbung	15.502.898.000,00	15.502.898.000,00	100,00	16.091.077.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sudimoro	865.528.000	865.528.000	100,00	930.241.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandanretno	682.176.000	682.176.000	100,00	1.003.027.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kaliurang	1.025.132.000	1.025.132.000	100,00	1.144.854.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalarandu	835.084.000	835.084.000	100,00	838.580.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kamongan	847.890.000	847.890.000	100,00	678.867.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jerukagung	775.932.000	775.932.000	100,00	871.989.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kradenan	1.141.304.000	1.141.304.000	100,00	1.310.779.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyuadem	975.397.000	975.397.000	100,00	872.979.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngablak	867.792.000	867.792.000	100,00	906.438.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Srumbung	821.150.000	821.150.000	100,00	978.194.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bringin	1.200.497.000	1.200.497.000	100,00	1.389.908.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mranggen	963.870.000	963.870.000	100,00	1.193.405.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargosoko	960.099.000	960.099.000	100,00	904.430.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Polengan	976.260.000	976.260.000	100,00	825.122.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucanganom	783.447.000	783.447.000	100,00	812.393.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kemiren	898.757.000	898.757.000	100,00	733.993.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Nglumut	882.583.000	882.583.000	100,00	695.878.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Dukun	14.255.597.000,00	14.255.597.000,00	100,00	15.239.130.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketunggeng	835.790.000,00	835.790.000,00	100,00	1.006.475.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wates	964.550.000,00	964.550.000,00	100,00	923.010.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadipuro	1.000.520.000,00	1.000.520.000,00	100,00	848.376.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyubiru	1.114.921.000,00	1.114.921.000,00	100,00	1.471.439.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dukun	975.392.000,00	975.392.000,00	100,00	1.237.675.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalibening	1.007.509.000,00	1.007.509.000,00	100,00	902.237.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargomulyo	962.520.000,00	962.520.000,00	100,00	887.396.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyudono	835.429.000,00	835.429.000,00	100,00	1.169.145.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumber	1.114.646.000,00	1.114.646.000,00	100,00	1.006.766.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunsoko	932.928.000,00	932.928.000,00	100,00	807.660.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sewukan	971.430.000,00	971.430.000,00	100,00	873.185.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sengi	949.887.000,00	949.887.000,00	100,00	1.155.178.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Paten	890.667.000,00	890.667.000,00	100,00	1.145.142.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krinjing	1.025.095.000,00	1.025.095.000,00	100,00	1.091.985.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Keningar	674.313.000,00	674.313.000,00	100,00	713.461.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Sawangan	15.049.772.000,00	15.049.772.000,00	100,00	17.205.304.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondwangi	945.680.000	945.680.000	100,00	1.118.207.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sawangan	871.825.000	871.825.000	100,00	1.066.623.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krogowanan	800.190.000	800.190.000	100,00	1.036.077.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kapuhan	1.114.799.000	1.114.799.000	100,00	1.284.305.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketep	1.062.696.000	1.062.696.000	100,00	943.735.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonolelo	1.151.691.000	1.151.691.000	100,00	1.694.845.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyuroto	1.015.777.000	1.015.777.000	100,00	1.152.900.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wulunggunung	1.081.362.000	1.081.362.000	100,00	1.150.565.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gantang	1.109.301.000	1.109.301.000	100,00	1.303.237.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jati	1.047.892.000	1.047.892.000	100,00	1.270.671.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Butuh	1.060.758.000	1.060.758.000	100,00	1.211.437.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunsari	879.004.000	879.004.000	100,00	767.323.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tirtosari	858.796.000	858.796.000	100,00	1.197.464.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Podosoko	1.179.143.000	1.179.143.000	100,00	1.023.744.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Soronalan	870.858.000	870.858.000	100,00	984.171.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Muntilan	14.579.870.000,00	14.579.870.000,00	100,00	14.173.426.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjung	794.065.000	794.065.000	100,00	759.801.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sokorini	1.025.661.000	1.025.661.000	100,00	1.034.850.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sriwedari	1.240.085.000	1.240.085.000	100,00	967.766.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Congkrang	988.568.000	988.568.000	100,00	977.565.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Adikarto	985.400.000	985.400.000	100,00	1.108.582.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Menayu	1.203.341.000	1.203.341.000	100,00	902.960.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Keji	1.290.775.000	1.290.775.000	100,00	1.244.706.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngawen	922.177.000	922.177.000	100,00	1.009.394.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungpring	1.367.641.000	1.367.641.000	100,00	1.336.055.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucungrejo	1.006.324.000	1.006.324.000	100,00	1.083.035.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tamanagung	1.547.996.000	1.547.996.000	100,00	1.269.691.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondosuli	1.058.040.000	1.058.040.000	100,00	1.255.134.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sedayu	1.149.797.000	1.149.797.000	100,00	1.223.887.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Mungkid	15.095.783.000,00	15.095.783.000,00	100,00	15.072.832.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Progowati	943.279.000	943.279.000	100,00	1.076.990.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngrajek	905.595.000	905.595.000	100,00	1.013.612.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rambeanak	1.441.886.000	1.441.886.000	100,00	1.213.362.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Paremono	1.092.241.000	1.092.241.000	100,00	1.286.715.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pabelan	1.325.317.000	1.325.317.000	100,00	1.425.587.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bojong	1.097.688.000	1.097.688.000	100,00	1.074.924.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagersari	916.628.000	916.628.000	100,00	1.195.387.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mungkid	981.512.000	981.512.000	100,00	1.024.566.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ambartawang	1.163.761.000	1.163.761.000	100,00	974.661.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bumirejo	1.204.518.000	1.204.518.000	100,00	1.105.756.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Blondo	1.174.101.000	1.174.101.000	100,00	1.009.945.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Senden	935.903.000	935.903.000	100,00	968.150.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondang	798.317.000	798.317.000	100,00	911.596.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Treko	1.115.037.000	1.115.037.000	100,00	791.581.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Mertoyudan	14.704.103.000,00	14.704.103.000,00	100,00	15.086.584.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Deyangan	1.163.744.000	1.163.744.000	100,00	1.037.965.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasuruhan	1.472.838.000	1.472.838.000	100,00	1.265.235.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donorojo	1.089.878.000	1.089.878.000	100,00	1.408.163.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalinegoro	1.557.875.000	1.557.875.000	100,00	1.532.340.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jogonegoro	1.110.688.000	1.110.688.000	100,00	1.187.033.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	1.132.940.000	1.132.940.000	100,00	1.122.516.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bondowoso	1.311.785.000	1.311.785.000	100,00	1.141.728.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Danurejo	1.150.360.000	1.150.360.000	100,00	1.122.551.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyurojo	1.222.121.000	1.222.121.000	100,00	1.428.042.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarnegoro	1.253.632.000	1.253.632.000	100,00	1.498.015.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bulurejo	1.110.928.000	1.110.928.000	100,00	939.960.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mertoyudan	1.127.314.000	1.127.314.000	100,00	1.403.036.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Tempuran	14.682.299.000,00	14.682.299.000,00	100,00	16.109.027.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ringinanom	1.321.180.000	1.321.180.000	100,00	1.582.128.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberarum	1.197.463.000	1.197.463.000	100,00	1.427.428.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidoagung	1.224.600.000	1.224.600.000	100,00	1.221.693.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanggulrejo	1.067.105.000	1.067.105.000	100,00	1.373.476.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalisari	895.890.000	895.890.000	100,00	1.013.752.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girirejo	822.364.000	822.364.000	100,00	1.060.369.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tempurejo	1.022.090.000	1.022.090.000	100,00	1.209.551.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Prajeksari	1.064.934.000	1.064.934.000	100,00	857.357.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jogomulyo	1.190.387.000	1.190.387.000	100,00	1.497.332.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Growong	728.389.000	728.389.000	100,00	772.415.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Temanggal	667.929.000	667.929.000	100,00	713.958.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pringombo	898.469.000	898.469.000	100,00	949.220.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kemutuk	718.727.000	718.727.000	100,00	715.401.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bawang	1.008.941.000	1.008.941.000	100,00	877.375.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tugurejo	853.831.000	853.831.000	100,00	837.572.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Kajoran	25.051.995.000,00	25.051.995.000,00	100,00	29.765.543.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonogiri	1.024.901.000	1.024.901.000	100,00	964.226.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kwaderan	852.161.000	852.161.000	100,00	992.786.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Madukoro	684.574.000	684.574.000	100,00	989.951.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bumiayu	677.425.000	677.425.000	100,00	983.633.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Madugondo	666.969.000	666.969.000	100,00	689.727.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargosari	702.265.000	702.265.000	100,00	748.024.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngendrosari	675.641.000	675.641.000	100,00	731.297.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lesanpuro	795.184.000	795.184.000	100,00	885.822.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjaretno	869.299.000	869.299.000	100,00	1.161.405.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krinjing	1.082.098.000	1.082.098.000	100,00	1.040.378.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bangsri	736.867.000	736.867.000	100,00	1.039.352.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wadas	685.817.000	685.817.000	100,00	973.025.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kajoran	919.761.000	919.761.000	100,00	1.056.647.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunrejo	691.806.000	691.806.000	100,00	723.563.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sambak	765.203.000	765.203.000	100,00	874.769.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bambusari	813.498.000	813.498.000	100,00	1.223.098.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wuwuharjo	1.020.116.000	1.020.116.000	100,00	1.293.695.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandansari	854.976.000	854.976.000	100,00	1.079.082.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandanretno	898.773.000	898.773.000	100,00	1.118.836.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krumpakan	690.674.000	690.674.000	100,00	942.977.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjaragung	787.087.000	787.087.000	100,00	896.798.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sangen	657.264.000	657.264.000	100,00	726.341.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucungroto	954.284.000	954.284.000	100,00	1.013.703.000,00
24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	804.559.000	804.559.000	100,00	886.449.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidowangi	984.854.000	984.854.000	100,00	935.201.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukomulyo	931.013.000	931.013.000	100,00	1.104.150.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	782.270.000	782.270.000	100,00	895.142.000,00
28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sutopati	1.628.264.000	1.628.264.000	100,00	1.935.031.000,00
29	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukomakmur	1.414.392.000	1.414.392.000	100,00	1.860.435.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Kaliangkrik	21.991.734.000,00	21.991.734.000,00	100,00	24.049.597.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kaliangkrik	1.058.954.000	1.058.954.000	100,00	1.010.903.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngawonggo	1.592.474.000	1.592.474.000	100,00	1.581.639.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Munggangsari	1.161.059.000	1.161.059.000	100,00	1.408.054.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngargosoko	1.162.899.000	1.162.899.000	100,00	1.512.454.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngendrokilo	960.163.000	960.163.000	100,00	1.043.495.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Maduretno	743.681.000	743.681.000	100,00	911.074.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Temanggung	1.513.698.000	1.513.698.000	100,00	1.964.456.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pengarengan	1.112.675.000	1.112.675.000	100,00	1.094.827.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangli	1.219.465.000	1.219.465.000	100,00	1.201.167.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Selomoyo	951.253.000	951.253.000	100,00	1.005.490.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarejo	1.342.199.000	1.342.199.000	100,00	1.478.504.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Giriwarno	752.142.000	752.142.000	100,00	838.320.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girirejo	937.932.000	937.932.000	100,00	1.057.320.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonlegi	753.689.000	753.689.000	100,00	1.086.764.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Balerejo	1.369.821.000	1.369.821.000	100,00	1.170.423.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Beseran	774.746.000	774.746.000	100,00	797.613.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bumirejo	896.949.000	896.949.000	100,00	939.239.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketangi	1.033.993.000	1.033.993.000	100,00	1.278.184.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Balekerto	1.276.013.000	1.276.013.000	100,00	1.398.680.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Adipuro	1.377.929.000	1.377.929.000	100,00	1.270.991.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Bandongan	15.579.220.000,00	15.579.220.000,00	100,00	15.783.422.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bandongan	1.144.135.000	1.144.135.000	100,00	998.943.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Salamkanci	1.086.691.000	1.086.691.000	100,00	1.099.205.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukodadi	1.010.181.000	1.010.181.000	100,00	867.949.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tonoboyo	1.080.409.000	1.080.409.000	100,00	971.840.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gandusari	1.050.896.000	1.050.896.000	100,00	1.346.034.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	951.097.000	951.097.000	100,00	996.202.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Trasan	1.172.204.000	1.172.204.000	100,00	1.204.316.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyuwangi	1.246.212.000	1.246.212.000	100,00	1.389.154.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kedungsari	957.491.000	957.491.000	100,00	1.109.498.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukosari	1.086.989.000	1.086.989.000	100,00	872.875.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonagung	1.169.640.000	1.169.640.000	100,00	1.047.630.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalegen	1.051.442.000	1.051.442.000	100,00	1.005.822.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngepanrejo	1.350.980.000	1.350.980.000	100,00	1.392.187.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rejosari	1.220.853.000	1.220.853.000	100,00	1.481.767.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Candimulyo	16.364.105.000,00	16.364.105.000,00	100,00	19.158.370.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Surojoyo	824.333.000	824.333.000	100,00	870.749.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tempak	948.917.000	948.917.000	100,00	1.095.650.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	925.772.000	925.772.000	100,00	1.120.180.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mejing	1.001.393.000	1.001.393.000	100,00	1.096.823.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purworejo	830.752.000	830.752.000	100,00	1.057.513.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candimulyo	753.821.000	753.821.000	100,00	915.360.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Giyanti	748.519.000	748.519.000	100,00	871.602.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kembaran	670.912.000	670.912.000	100,00	1.008.603.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalsari	779.730.000	779.730.000	100,00	886.490.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Podosoko	851.524.000	851.524.000	100,00	878.421.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tampir Kulon	887.909.000	887.909.000	100,00	1.024.836.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tempursari	694.339.000	694.339.000	100,00	738.384.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonrejo	831.648.000	831.648.000	100,00	964.324.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tampir Wetan	799.995.000	799.995.000	100,00	830.832.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tembelang	812.484.000	812.484.000	100,00	854.543.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sonorejo	794.522.000	794.522.000	100,00	922.831.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Trenten	906.649.000	906.649.000	100,00	1.215.735.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bateh	1.079.310.000	1.079.310.000	100,00	1.304.743.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Surodadi	1.221.576.000	1.221.576.000	100,00	1.500.751.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Pakis	19.461.091.000,00	19.461.091.000,00	100,00	22.321.198.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pakis	1.064.666.000	1.064.666.000	100,00	1.286.320.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyusidi	1.548.397.000	1.548.397.000	100,00	2.029.072.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Losari	925.061.000	925.061.000	100,00	970.035.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Daseh	688.261.000	688.261.000	100,00	712.658.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gumelem	873.677.000	873.677.000	100,00	1.006.968.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kaponan	949.698.000	949.698.000	100,00	1.105.758.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kragilan	988.763.000	988.763.000	100,00	985.112.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketundan	1.345.317.000	1.345.317.000	100,00	1.719.639.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Daleman Kidul	1.240.193.000	1.240.193.000	100,00	1.361.788.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Petung	1.059.019.000	1.059.019.000	100,00	1.186.402.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bawang	914.291.000	914.291.000	100,00	1.130.845.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rejosari	776.729.000	776.729.000	100,00	754.961.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kajangkoso	676.056.000	676.056.000	100,00	712.073.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Muneng Warangan	964.365.000	964.365.000	100,00	993.536.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondangsari	914.443.000	914.443.000	100,00	1.078.686.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kenalan	752.705.000	752.705.000	100,00	797.410.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pogalan	1.086.059.000	1.086.059.000	100,00	1.510.730.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gejagan	726.843.000	726.843.000	100,00	804.737.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Muneng	1.032.607.000	1.032.607.000	100,00	1.135.357.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jambewangi	933.941.000	933.941.000	100,00	1.039.111.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Ngablak	14.511.676.000,00	14.511.676.000,00	100,00	16.123.031.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngablak	816.616.000	816.616.000	100,00	866.698.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jagonayan	669.260.000	669.260.000	100,00	740.635.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tejosari	974.178.000	974.178.000	100,00	1.089.697.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumberejo	826.931.000	826.931.000	100,00	927.116.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girrejo	1.141.261.000	1.141.261.000	100,00	1.325.722.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pandean	942.963.000	942.963.000	100,00	1.121.594.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Genikan	938.994.000	938.994.000	100,00	857.165.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bandungrejo	1.018.391.000	1.018.391.000	100,00	1.248.908.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Madyogondo	982.770.000	982.770.000	100,00	1.119.598.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jogoyasan	964.889.000	964.889.000	100,00	964.019.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Keditan	877.544.000	877.544.000	100,00	768.647.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Magersari	1.007.208.000	1.007.208.000	100,00	1.136.231.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kanigoro	903.931.000	903.931.000	100,00	1.133.503.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Selomirah	783.873.000	783.873.000	100,00	912.746.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pagergunung	812.473.000	812.473.000	100,00	882.039.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Seloprojo	850.394.000	850.394.000	100,00	1.028.713.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Grabag	29.021.093.000,00	29.021.093.000,00	100,00	32.363.939.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Grabag	1.677.735.000	1.677.735.000	100,00	1.760.198.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sumurarum	1.059.113.000	1.059.113.000	100,00	1.414.656.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyusari	1.201.057.000	1.201.057.000	100,00	1.301.965.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kartoharjo	995.558.000	995.558.000	100,00	1.251.549.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidogede	878.870.000	878.870.000	100,00	1.027.396.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Citrosono	1.619.762.000	1.619.762.000	100,00	1.837.858.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kleteran	816.426.000	816.426.000	100,00	944.311.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngasinan	1.069.313.000	1.069.313.000	100,00	1.267.001.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banaran	1.374.713.000	1.374.713.000	100,00	1.379.609.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Baleagung	1.185.570.000	1.185.570.000	100,00	1.253.731.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klegan	772.481.000	772.481.000	100,00	718.496.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalikuto	1.134.835.000	1.134.835.000	100,00	1.004.912.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalipucang	959.154.000	959.154.000	100,00	979.328.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Seworan	814.495.000	814.495.000	100,00	751.386.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	1.075.868.000	1.075.868.000	100,00	1.214.808.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sambungrejo	994.064.000	994.064.000	100,00	1.231.171.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tlogorejo	790.807.000	790.807.000	100,00	861.848.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tirta	952.164.000	952.164.000	100,00	1.128.999.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ketawang	1.079.123.000	1.079.123.000	100,00	968.745.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Salan	887.898.000	887.898.000	100,00	909.778.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cokro	911.453.000	911.453.000	100,00	855.155.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Losari	797.614.000	797.614.000	100,00	849.834.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngrancah	761.839.000	761.839.000	100,00	857.110.000,00
24	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sugihmas	1.228.178.000	1.228.178.000	100,00	1.528.127.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pesidi	1.195.705.000	1.195.705.000	100,00	1.610.227.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
26	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Giriwetan	867.204.000	867.204.000	100,00	1.209.186.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucungsari	743.291.000	743.291.000	100,00	914.665.000,00
28	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lebak	1.176.803.000	1.176.803.000	100,00	1.331.890.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Tegalrejo	19.173.944.000,00	19.173.944.000,00	100,00	20.519.737.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tegalrejo	857.153.000	857.153.000	100,00	858.455.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Soroyudan	1.008.408.000	1.008.408.000	100,00	1.203.352.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidorejo	1.278.888.000	1.278.888.000	100,00	1.165.820.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwosari	795.474.000	795.474.000	100,00	858.140.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dilimas	938.053.000	938.053.000	100,00	958.920.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyusari	765.578.000	765.578.000	100,00	1.042.229.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sukorejo	936.332.000	936.332.000	100,00	929.600.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tampingan	1.302.089.000	1.302.089.000	100,00	1.455.213.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banyuwirip	999.688.000	999.688.000	100,00	1.057.397.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Glagahombo	852.030.000	852.030.000	100,00	943.247.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwodadi	943.834.000	943.834.000	100,00	792.043.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonokerto	720.167.000	720.167.000	100,00	937.317.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dawung	921.212.000	921.212.000	100,00	1.164.228.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Klopo	821.126.000	821.126.000	100,00	786.445.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Japan	819.365.000	819.365.000	100,00	878.515.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kebonagung	903.539.000	903.539.000	100,00	890.444.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngasem	688.355.000	688.355.000	100,00	1.014.291.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girirejo	1.123.442.000	1.123.442.000	100,00	999.763.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirejo	896.124.000	896.124.000	100,00	795.868.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donorejo	751.817.000	751.817.000	100,00	781.710.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunrejo	851.270.000	851.270.000	100,00	1.006.740.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Secang	20.039.645.000,00	20.039.645.000,00	100,00	20.346.394.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Madusari	1.038.891.000	1.038.891.000	100,00	1.081.687.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Madyocondro	1.052.052.000	1.052.052.000	100,00	1.093.505.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngabean	860.012.000	860.012.000	100,00	975.583.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Krincing	1.174.952.000	1.174.952.000	100,00	1.120.776.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donorejo	975.264.000	975.264.000	100,00	828.129.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candisari	963.063.000	963.063.000	100,00	1.044.844.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candiretno	1.232.524.000	1.232.524.000	100,00	1.340.155.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pancuranmas	1.326.161.000	1.326.161.000	100,00	921.741.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Jambewangi	1.281.362.000	1.281.362.000	100,00	1.267.997.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Payaman	1.250.277.000	1.250.277.000	100,00	999.532.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalijoso	939.780.000	939.780.000	100,00	1.147.366.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngadirojo	917.243.000	917.243.000	100,00	1.130.195.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Karangakajen	956.302.000	956.302.000	100,00	1.026.696.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sidomulyo	1.361.041.000	1.361.041.000	100,00	1.311.225.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pucang	1.108.997.000	1.108.997.000	100,00	985.734.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Purwosari	859.673.000	859.673.000	100,00	949.617.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Donomulyo	842.226.000	842.226.000	100,00	898.410.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girikulon	803.276.000	803.276.000	100,00	1.133.389.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pirikan	1.096.549.000	1.096.549.000	100,00	1.089.813.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Dana Desa Wilayah Kec. Windusari	20.564.059.000,00	20.564.059.000,00	100,00	21.844.599.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Windusari	931.962.000	931.962.000	100,00	1.245.052.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pasangsari	1.217.490.000	1.217.490.000	100,00	1.365.949.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Candisari	1.367.524.000	1.367.524.000	100,00	1.416.923.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bandarsedayu	979.995.000	979.995.000	100,00	896.470.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Banjarsari	763.816.000	763.816.000	100,00	744.276.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Balesari	987.980.000	987.980.000	100,00	1.021.004.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kembangkuning	928.758.000	928.758.000	100,00	1.040.031.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tanjungsari	1.650.969.000	1.650.969.000	100,00	1.471.248.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Wonoroto	1.414.837.000	1.414.837.000	100,00	1.504.499.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Genito	1.103.830.000	1.103.830.000	100,00	1.242.763.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kentengsari	713.343.000	713.343.000	100,00	762.924.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Umbulsari	742.642.000	742.642.000	100,00	1.031.098.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Semen	919.314.000	919.314.000	100,00	864.438.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dampit	798.665.000	798.665.000	100,00	855.535.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Girimulyo	930.755.000	930.755.000	100,00	921.498.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Ngemplak	1.218.807.000	1.218.807.000	100,00	1.174.598.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gunungsari	1.125.218.000	1.125.218.000	100,00	1.112.801.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kalijoso	895.699.000	895.699.000	100,00	798.959.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Mangunsari	934.106.000	934.106.000	100,00	896.893.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Gondangrejo	938.349.000	938.349.000	100,00	1.477.640.000,00
	Jumlah	363.989.464.000,00	363.989.464.000,00	100,00	393.231.309.000,00

Lampiran 5.21

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Salaman	12.348.787.200,00	12.348.787.200,00	100,00	12.045.806.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargoretno	610.329.760	610.329.760	100,00	586.690.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Paripurno	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalirejo	758.437.760	758.437.760	100,00	760.653.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Menoreh	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngadirejo	690.368.760	690.368.760	100,00	664.113.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidomulyo	617.485.760	617.485.760	100,00	595.154.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonrejo	687.158.760	687.158.760	100,00	696.324.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Salaman	544.604.760	544.604.760	100,00	551.239.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalisalak	756.833.760	756.833.760	100,00	731.886.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sriwedari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jebengsari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tanjunganom	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjarharjo	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Purwosari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngampeldento	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidosari	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sawangargo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krasak	688.764.760	688.764.760	100,00	686.269.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Margoyoso	619.089.760	619.089.760	100,00	595.450.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kaliabu	615.881.760	615.881.760	100,00	617.970.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Borobudur	11.932.414.200,00	11.932.414.200,00	100,00	11.540.630.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Giripurno	634.000.760	634.000.760	100,00	611.669.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Giritengah	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tuksongo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Majaksingi	714.039.760	714.039.760	100,00	689.092.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kenalan	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bigaran	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sambeng	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Candirejo	687.158.760	687.158.760	100,00	688.286.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargogondo	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wanurejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Borobudur	829.715.760	829.715.760	100,00	800.844.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tanjungsari	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Karanganyar	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Karangrejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngadiharjo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonsari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tegalarum	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kembanglimus	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wringinputih	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bumiharjo	467.775.760	467.775.760	100,00	449.368.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Ngluwar	5.123.368.080,00	5.123.368.080,00	100,00	4.947.330.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bligo	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pakunden	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Somokaton	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngluwar	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Karangtalun	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jamuskauman	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Plosogede	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Blongkeng	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Salam	7.375.866.120,00	7.375.866.120,00	100,00	7.161.465.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mantingan	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Salam	760.041.760	760.041.760	100,00	732.478.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sucen	615.881.760	615.881.760	100,00	620.560.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kadiluwih	571.482.760	571.482.760	100,00	567.873.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Somoketro	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jumoyo	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tirto	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Baturono	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tersangede	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sirahan	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Seloboro	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gulon	829.715.760	829.715.760	100,00	800.844.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Srumbung	10.387.537.920,00	10.387.537.920,00	100,00	10.031.442.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sudimoro	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pandanretno	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kaliurang	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tegalarandu	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kamongan	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jerukagung	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kradenan	790.867.760	790.867.760	100,00	765.920.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyuadem	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngablak	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Srumbung	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bringin	858.936.760	858.936.760	100,00	833.989.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mranggen	753.623.760	753.623.760	100,00	731.292.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargosoko	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Polengan	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pucanganom	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kemiren	499.466.760	499.466.760	100,00	475.827.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Nglumut	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Dukun	9.908.404.400,00	9.908.404.400,00	100,00	9.589.106.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ketunggeng	607.121.760,00	607.121.760,00	100,00	586.098.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wates	562.722.760,00	562.722.760,00	100,00	543.007.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngadipuro	607.121.760,00	607.121.760,00	100,00	586.098.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyubiru	758.437.760,00	758.437.760,00	100,00	732.182.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Dukun	865.353.760,00	865.353.760,00	100,00	903.837.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalibening	936.632.760,00	936.632.760,00	100,00	586.098.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargomulyo	607.121.760,00	607.121.760,00	100,00	723.422.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyudono	749.677.760,00	749.677.760,00	100,00	835.174.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sumber	607.121.760,00	607.121.760,00	100,00	586.098.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangunsoko	527.084.760,00	527.084.760,00	100,00	508.677.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sewukan	535.844.760,00	535.844.760,00	100,00	517.437.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sengi	615.881.760,00	615.881.760,00	100,00	619.692.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Paten	615.881.760,00	615.881.760,00	100,00	594.858.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krinjing	678.398.760,00	678.398.760,00	100,00	654.759.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Keningar	634.000.760,00	634.000.760,00	100,00	611.669.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Sawangan	10.487.658.400,00	10.487.658.400,00	100,00	10.116.058.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gondowangi	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sawangan	900.993.760	900.993.760	100,00	869.506.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krogowanan	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kapuhan	644.364.760	644.364.760	100,00	620.725.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ketep	608.725.760	608.725.760	100,00	586.394.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wonolelo	936.632.760	936.632.760	100,00	903.837.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyuroto	585.055.760	585.055.760	100,00	561.416.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wulunggunung	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gantang	714.039.760	714.039.760	100,00	689.092.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jati	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Butuh	714.039.760	714.039.760	100,00	689.092.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangunsari	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tirtosari	678.398.760	678.398.760	100,00	654.759.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Podosoko	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Soronalan	680.004.760	680.004.760	100,00	655.057.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Muntilan	8.590.592.880,00	8.590.592.880,00	100,00	8.297.664.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tanjung	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sokorini	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sriwedari	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Congkrang	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Adikarto	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Menayu	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Keji	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngawen	678.398.760	678.398.760	100,00	654.759.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gunungpring	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pucungrejo	753.623.760	753.623.760	100,00	731.292.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tamanagung	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gondosuli	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sedayu	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Mungkid	9.202.525.640,00	9.202.525.640,00	100,00	8.916.304.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Progowati	685.554.760	685.554.760	100,00	663.223.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngrajek	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Rambeanak	865.353.760	865.353.760	100,00	835.174.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Paremono	794.075.760	794.075.760	100,00	766.512.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pabelan	688.764.760	688.764.760	100,00	663.817.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bojong	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pagersari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mungkid	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ambartawang	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bumirejo	683.950.760	683.950.760	100,00	662.927.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Blondo	617.485.760	617.485.760	100,00	626.809.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Senden	608.725.760	608.725.760	100,00	586.394.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gondang	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Treko	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Mertoyudan	8.224.718.120,00	8.224.718.120,00	100,00	7.983.956.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Deyangan	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pasuruhan	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Donorojo	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalinegoro	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jogonegoro	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukorejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bondowoso	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Danurejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyurojo	591.474.760	591.474.760	100,00	615.982.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjarnegoro	724.403.760	724.403.760	100,00	698.148.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bulurejo	544.604.760	544.604.760	100,00	526.197.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mertoyudan	795.680.760	795.680.760	100,00	766.809.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Tempuran	8.825.792.400,00	8.825.792.400,00	100,00	8.510.436.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ringinanom	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sumberarum	690.368.760	690.368.760	100,00	664.113.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidoagung	690.368.760	690.368.760	100,00	664.113.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tanggulrejo	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalisari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girirejo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tempurejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Prajeksari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jogomulyo	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Growong	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Temanggal	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pringombo	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kemutuk	421.770.760	421.770.760	100,00	405.979.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bawang	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Dana Desa Kepada Pemerintah Desa Tugurejo	530.293.760	530.293.760	100,00	509.270.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Kajoran	15.630.934.040,00	15.630.934.040,00	100,00	15.079.463.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wonogiri	539.053.760	539.053.760	100,00	531.263.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kwaderan	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Madukoro	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bumiayu	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Madugondo	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargosari	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngendrosari	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Lesanpuro	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjaretno	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krinjing	564.327.760	564.327.760	100,00	543.304.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bangsri	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wadas	455.805.760	455.805.760	100,00	445.759.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kajoran	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangunrejo	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sambak	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bambusari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wuwuharjo	690.368.760	690.368.760	100,00	664.113.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pandansari	496.258.760	496.258.760	100,00	475.235.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pandanretno	598.361.760	598.361.760	100,00	577.338.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krumpakan	459.015.760	459.015.760	100,00	440.608.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjaragung	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sangen	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pucungroto	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
24	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidorejo	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidowangi	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukomulyo	565.931.760	565.931.760	100,00	543.600.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukorejo	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
28	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sutopati	865.353.760	865.353.760	100,00	835.174.000,00
29	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukomakmur	661.147.760	661.147.760	100,00	630.968.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Kaliangkrik	11.482.210.200,00	11.482.210.200,00	100,00	11.075.167.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kaliangkrik	580.242.760	580.242.760	100,00	560.527.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngawonggo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Munggangsari	505.018.760	505.018.760	100,00	483.995.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngargosoko	610.329.760	610.329.760	100,00	586.690.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngendrokilo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Maduretno	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Temanggung	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pengarengan	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangli	501.809.760	501.809.760	100,00	483.402.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Selomoyo	527.084.760	527.084.760	100,00	518.185.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjarejo	608.725.760	608.725.760	100,00	586.394.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Giriwarno	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girirejo	678.398.760	678.398.760	100,00	654.759.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonlegi	424.980.760	424.980.760	100,00	406.573.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Balerejo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Beseran	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bumirejo	544.604.760	544.604.760	100,00	526.197.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ketangi	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Balekerto	785.315.760	785.315.760	100,00	757.752.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Adipuro	470.984.760	470.984.760	100,00	449.961.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Bandongan	8.865.860.640,00	8.865.860.640,00	100,00	8.595.294.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bandongan	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Salamkanci	607.121.760	607.121.760	100,00	609.176.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukodadi	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tonoboyo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gandusari	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidorejo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Trasan	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyuwangi	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kedungsari	535.844.760	535.844.760	100,00	531.205.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukosari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonagung	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalegen	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngepanrejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Rejosari	758.437.760	758.437.760	100,00	732.182.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Candimulyo	11.093.341.440,00	11.093.341.440,00	100,00	10.730.008.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Surojoyo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tempak	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidomulyo	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mejing	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Purworejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Candimulyo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Giyanti	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kembaran	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tegalsari	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Podosoko	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tampir Kulon	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tempursari	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonrejo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tampir Wetan	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tembelang	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sonorejo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Trenten	651.520.760	651.520.760	100,00	652.227.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bateh	714.039.760	714.039.760	100,00	689.092.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Surodadi	831.319.760	831.319.760	100,00	801.140.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Pakis	12.482.910.200,00	12.482.910.200,00	100,00	12.067.707.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pakis	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyusidi	829.715.760	829.715.760	100,00	800.844.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Losari	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Daseh	455.805.760	455.805.760	100,00	445.350.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gumelem	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kaponan	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kragilan	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ketundan	865.353.760	865.353.760	100,00	835.174.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Daleman Kidul	678.398.760	678.398.760	100,00	669.083.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Petung	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bawang	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Rejosari	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kajangkoso	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Muneng Warangan	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gondangsari	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kenalan	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pogalan	785.315.760	785.315.760	100,00	757.752.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gejagan	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Muneng	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jambewangi	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Ngablak	9.122.261.160,00	9.122.261.160,00	100,00	8.802.885.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngablak	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jogonayan	459.015.760	459.015.760	100,00	440.608.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tejosari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sumberejo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girirejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pandean	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Genikan	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bandungrejo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Madyogondo	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jogoyasan	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Keditan	491.444.760	491.444.760	100,00	474.345.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Magersari	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kanigoro	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Selomirah	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pagergunung	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Seloprojo	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Grabag	16.750.806.280,00	16.750.806.280,00	100,00	16.215.388.000,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Grabag	865.353.760	865.353.760	100,00	835.174.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sumurarum	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyusari	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kartoharjo	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidogede	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Citrosono	722.799.760	722.799.760	100,00	697.852.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kleteran	544.604.760	544.604.760	100,00	526.197.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngasinan	608.725.760	608.725.760	100,00	586.394.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banaran	687.158.760	687.158.760	100,00	695.916.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Baleagung	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Klengen	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalikuto	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalipucang	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Seworan	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjarsari	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sambungrejo	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tlogorejo	562.722.760	562.722.760	100,00	552.106.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tirto	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ketawang	642.760.760	642.760.760	100,00	620.429.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Salam	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Cokro	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
22	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Losari	527.084.760	527.084.760	100,00	519.120.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngrancah	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
24	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sugihmas	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
25	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pesidi	644.364.760	644.364.760	100,00	620.725.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Giriwetan	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
27	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pucungsari	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
28	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Lebak	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Tegalrejo	11.971.653.960,00	11.971.653.960,00	100,00	11.572.389.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tegalrejo	651.520.760	651.520.760	100,00	629.189.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Soroyudan	537.448.760	537.448.760	100,00	517.733.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidorejo	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Purwosari	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Dlimas	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyusari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sukorejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tampingan	648.311.760	648.311.760	100,00	628.596.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banyuurip	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Glagahombo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Purwodadi	493.049.760	493.049.760	100,00	474.642.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wonokerto	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Dawung	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Klopo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Japan	562.722.760	562.722.760	100,00	543.007.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kebonagung	678.398.760	678.398.760	100,00	666.909.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngasem	523.874.760	523.874.760	100,00	508.083.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girirejo	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngadirejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Donorejo	634.000.760	634.000.760	100,00	611.669.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangunrejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Secang	11.237.903.440,00	11.237.903.440,00	100,00	11.342.457.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Madusari	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Madyocondro	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngabean	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Krincing	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Donorejo	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Candisari	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Candiretno	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pancuranmas	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Jambewangi	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Payaman	615.881.760	615.881.760	100,00	594.858.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalijoso	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngadirojo	617.485.760	617.485.760	100,00	595.154.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Karangajen	493.049.760	493.049.760	100,00	484.728.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Sidomulyo	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pucang	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Purwosari	501.809.760	501.809.760	100,00	483.402.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Donomulyo	527.084.760	527.084.760	100,00	994.748.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girikulon	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pirikan	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wilayah Kec. Windusari	11.923.432.493,00	11.328.574.493,00	95,01	10.928.033.293,00
1	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Windusari	574.691.760	574.691.760	100,00	552.360.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Pasangsari	1.308.897.760	714.039.760	54,55	689.092.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Candisari	687.158.760	687.158.760	100,00	663.519.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Bandarsedayu	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Banjarsari	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Balesari	535.844.760	535.844.760	100,00	517.437.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kembangkuning	571.482.760	571.482.760	100,00	551.767.000,00

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
8	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Tanjungsari	607.121.760	607.121.760	100,00	586.098.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Wonoroto	574.691.760	574.691.760	100,00	552.360.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Genito	678.398.760	678.398.760	100,00	654.759.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kentengsari	455.805.760	455.805.760	100,00	440.014.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Umbulsari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Semen	528.688.760	528.688.760	100,00	508.973.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Dampit	494.653.760	494.653.760	100,00	474.938.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Girimulyo	496.258.760	496.258.760	100,00	484.705.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Ngemplak	539.053.760	539.053.760	100,00	518.030.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gunungsari	573.087.760	573.087.760	100,00	552.064.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Kalijoso	528.688.760	528.688.760	100,00	508.973.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Mangunsari	527.084.760	527.084.760	100,00	508.677.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Pem. Desa Gondangrejo	616.170.053	616.170.053	100,00	595.146.293,00
	Jumlah	222.968.979.213,00	222.374.121.213,00	99,73	215.548.988.293,00

Lampiran 5.22
Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus per Desa Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)	(6)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Wilayah Kec. Salaman	4.857.000.000,00	4.632.000.000,00	95,37	3.780.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Borobudur	5.889.000.000,00	5.819.000.000,00	98,81	5.253.000.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Wilayah Kec. Ngluwar	1.003.000.000,00	886.000.000,00	88,33	1.211.000.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Wilayah Kec. Salam	1.387.000.000,00	1.359.000.000,00	97,98	1.938.846.000,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Wilayah Kec. Srumbung	2.064.000.000,00	2.009.000.000,00	97,34	2.364.000.000,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Dukun	1.888.140.000,00	1.768.140.000,00	93,64	1.921.000.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Sawangan	1.352.000.000,00	1.277.000.000,00	94,45	1.861.000.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Muntilan	1.403.000.000,00	1.293.000.000,00	92,16	1.478.000.000,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Mungkid	2.666.000.000,00	2.611.000.000,00	97,94	1.240.000.000,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Mertoyudan	1.582.000.000,00	1.503.000.000,00	95,01	2.891.340.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Tempuran	3.452.000.000,00	3.432.000.000,00	99,42	4.031.000.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Kajoran	1.921.000.000,00	1.911.000.000,00	99,48	7.999.000.000,00
13	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Kaliangkrik	1.881.000.000,00	1.881.000.000,00	100,00	2.633.240.000,00
14	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Bandongan	1.391.000.000,00	1.301.000.000,00	93,53	2.216.000.000,00
15	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Candimulyo	542.000.000,00	542.000.000,00	100,00	712.000.000,00
16	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Pakis	2.774.000.000,00	2.614.000.000,00	94,23	2.077.000.000,00
17	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Ngablak	1.783.000.000,00	1.723.000.000,00	96,63	1.810.000.000,00
18	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Wilayah Kec. Grabag	1.443.000.000,00	1.443.000.000,00	100,00	3.087.000.000,00
19	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Tegalrejo	1.897.000.000,00	1.677.000.000,00	88,40	1.477.890.000,00
20	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Secang	2.784.000.000,00	2.784.000.000,00	100,00	1.274.000.000,00
21	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Wilayah Kec. Windusari	3.740.000.000,00	3.690.000.000,00	98,66	4.157.000.000,00
	Jumlah	47.699.140.000,00	46.155.140.000,00	96,76	55.412.316.000,00

Lampiran 5.23
Silpa Mengikat Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.016.860,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	116.307.479,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	26.895.007,00
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.004.941.157,00
2	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	6.095.914.407,00
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	476.437.625,00
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.114.500,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.681.025,00
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya	-
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK (Puskesmas)	2.221.378.029,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.343.687.856,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	48.625.116,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	18.597.605,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	6.571.366,00
	DAK Non Fisik-Pelayanan Ketahanan Pangan	33.926.436,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKKB-BOKKB)	847.895.629,00
	DAK Non Fisik-Perlindungan Perempuan dan Anak	-
	DAK Non Fisik-penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	627.339.562,00
3	Setoran 10 % Puskesmas (th 2016-2017)	1.213.822.801,00
4	BLUD Dinas Kesehatan	10.085.853.507,00
5	BLUD RSUD Muntilan	16.138.002.601,00
6	Dana BOS	311.659.771,00
7	DAU earmark	
	gaji PPPK	34.973.518.859,00
	Infrastruktur kelurahan	13.640.000,00
	bidang kesehatan	5.643.426.289,00
	bidang pendidikan	7.587.366.506,00
	bidang pekerjaan umum	109.926.900,00
8	DBHCHT	1.454.531.197,79
9	DBH pajak rokok	6.753.804.286,00
	Jumlah	98.160.882.376,79

Lampiran 5.24

Kas BOS Per Sekolah

A. KAS BOS SD NEGERI PER SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
UPT SRUMBUNG										
1	SD NEGERI PUCANGANOM 1	-								
2	SD NEGERI SRUMBUNG 2	2.173.000								
3	SD NEGERI KRADENAN 2	-								
4	SD NEGERI KAMONGAN	25.874								
5	SD NEGERI KRADENAN 1	364.951								
6	SD NEGERI SIKEPAN 2	40.021								
7	SD NEGERI BANYUADEM	156.389								
8	SD NEGERI JERUKAGUNG 1	461.000			350.000					
9	SD NEGERI POLENGAN 1	100.000								
10	SD NEGERI MRANGGEN 1	20.599								
11	SD NEGERI SUDIMORO 2	50.000								
12	SD NEGERI JERUKAGUNG 2	-					3.500.000			
13	SD NEGERI MRANGGEN 2	158.251								
14	SD NEGERI SOKA 1	930.000								
15	SD NEGERI KALIURANG 2	166.820								
16	SD NEGERI JAMBLANGAN	5.930.500								
17	SD NEGERI SOKA 2	60.784								
18	SD NEGERI TEGALRANDU	188.586								
19	SD NEGERI NGABLAH	42.000								
20	SD NEGERI KEMIREN	33.291								
21	SD NEGERI SRUMBUNG 1	508.227								
22	SD NEGERI PANDANRETN	689.700								
23	SD NEGERI BRINGIN 1	125.549								
24	SD NEGERI KRADENAN 3	374.243								
25	SD NEGERI SIKEPAN 1	32.746								
26	SD NEGERI KALIURANG 1	152.900								
27	SD NEGERI SUDIMORO 1	220.883								
UPT GRABAG										
28	SD NEGERI KARTOHARJO	-								
29	SD NEGERI TLOGOREJO	-								
30	SD NEGERI SALAM	-								
31	SD NEGERI LEBAK	-								
32	SD NEGERI BALEAGUNG	1.095.000								
33	SD NEGERI GRABAG 3	169.794								
34	SD NEGERI TIRTO	-								
35	SD NEGERI SAMBUNGREJO	-								
36	SD NEGERI PUCUNGSARI	-								

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
37	SD NEGERI KLETERAN 1	10.001					-			
38	SD NEGERI KALIPUCANG	-					-			
39	SD NEGERI NGRANCAH	1.323.371					-			
40	SD NEGERI SUGIHMAS 2	1.961.100					-			
41	SD NEGERI CITROSONO	-					-			
42	SD NEGERI LOSARI	-					287.520			
43	SD NEGERI SUMURARUM	-					-			
44	SD NEGERI COKRO	-					318.306			
45	SD NEGERI GRABAG 1	-					-			
46	SD NEGERI KAYUPURING	-					-			
47	SD NEGERI KLEGEN	33.587					-			
48	SD NEGERI PESIDI	5.905					-			
49	SD NEGERI BANYUSARI	36.013					-			
50	SD NEGERI BANJARSARI	-					-			
51	SD NEGERI KETAWANG 1	-					-			
52	SD NEGERI KETAWANG 2	-					-			
53	SD NEGERI KALIKUTO	335.077					-			
54	SD NEGERI SUGIHMAS 1	13.628					-			
55	SD NEGERI BONO	-					94.319			
56	SD NEGERI BANARAN 1	-					-			
57	SD NEGERI PAGONAN	-					35.049			
58	SD NEGERI NGASINAN 2	-					-			
59	SD NEGERI KLETERAN 3	80.811					-			
60	SD NEGERI NGASINAN 1	-					24.300			
61	SD NEGERI GIRIWETAN	-					-			
UPT SALAMAN										
62	SDN Salaman 1						-	-		
63	SDN Salaman 2						-	-		
64	SDN Salaman 3						-	-		
65	SDN Salaman 4						-	-		
66	SDN Jebengsari						-	-		
67	SDN Sidomulyo 1						-	-		
68	SDN Sidomulyo 2						-	-		
69	SDN Kebonrejo 1						-	-		
70	SDN Kebonrejo 2						-	-		
71	SDN Banjarharjo						-	-		
72	SDN Tanjunganom						-	6.750.000		
73	SDN Pancar						-	-		
74	SDN Purwosari						-	-		
75	SDN Ngargoretno 1						-	-		
76	SDN Ngargoretno 2						-	-		
77	SDN Paripurno						-	-		

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
78	SDN Kalirejo 1						200	-		
79	SDN Kalirejo 3						-	-		
80	SDN Beteng						-	-		
81	SDN Menoreh						-	-		
82	SDN Ngadirejo						-	-		
83	SDN Kalisalak						-	-		
84	SDN Sriwedari 1						-	-		
85	SDN Sriwedari 2						-	-		
86	SDN Krasak 1						-	-		
87	SDN Krasak 2						-	-		
88	SDN Margoyoso						-	-		
89	SDN Kaliabu						-	-		
90	SDN Sawangargo						-	-		
91	SDN Sidosari						-	-		
UPT MERTOYUDAN										
92	SD NEGERI SARATAN									
93	SD NEGERI PANCA ARGA 1									
94	SD NEGERI KALINEGORO 1									
95	SDN SOROYUDAN									
96	SD NEGERI DANUREJO 1									
97	SD NEGERI SUKOREJO 3									
98	SD NEGERI SUKOREJO 1									
99	SD NEGERI BANYAKAN									
100	SD NEGERI PASURUHAN 1									
101	SD NEGERI BANJARNEGORO 3									
102	SD NEGERI SUMBERREJO									
103	SD NEGERI DEYANGAN 1									
104	SD NEGERI SUKOREJO 2									
105	SD NEGERI MERTOYUDAN 1									
106	SD NEGERI BANYUROJO 3									
107	SD NEGERI PERMITAN 2									
108	SD NEGERI KALINEGORO 2									
109	SD NEGERI MERTOYUDAN 3									
110	SD NEGERI KALINEGORO 5									
111	SD NEGERI KALINEGORO 6									
112	SD NEGERI BULUREJO 1									
113	SD NEGERI BANJARNEGORO 1									
114	SD NEGERI KALINEGORO 3									
115	SD NEGERI JOGONEGORO 1						8.994.300			
116	SD NEGERI PIRIKAN									
117	SD NEGERI DEYANGAN 2									
118	SD NEGERI PASURUHAN 2									

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
119	SD NEGERI PASURUHAN 4									
120	SD NEGERI SOKA									
121	SD NEGERI KALISARI	10.000								
122	SD NEGERI BANYUROJO 2	-								
123	SD NEGERI BANJARNEGORA	-								
124	SD NEGERI PERMITAN 1	-								
125	SD NEGERI TANJUNGANOM	-								
126	SDN DONOROJO	50.000								
127	SD NEGERI BANYUROJO 1									
UPT MUNGKID										
128	SD NEGERI TREKO 2	-					-			
129	SD NEGERI BUMIREJO 1	-					-			
130	SD NEGERI NGRAJEK 1	-					-			
131	SD NEGERI RAMBEANAK 2	-					-			
132	SD NEGERI PABELAN 3	-					-			
133	SD BLONDO	-					77.414			
134	SD NEGERI BOJONG 1	-					-			
135	SD NEGERI GONDANG	184.849					-			
136	SD NEGERI MENDUT	-					-			
137	SD NEGERI MUNGKID 1	-					2.500.000			
138	SD NEGERI SENDEN 2	-					-			
139	SD NEGERI PAGERSARI	375.543					-			
140	SD NEGERI BUMIREJO 2	-					-			
141	SD NEGERI TREKO 1	-					-			
142	SD NEGERI PAREMONO 3	-					72.087			
143	SD NEGERI PROGOWATI 1	-					-			
144	SD NEGERI MUNGKID 2	-					-			
145	SD NEGERI PABELAN 2	-					-			
146	SD NEGERI RAMBEANAK 1	644.940					-			
147	SD NEGERI AMBARTAWANG	-					8.500.000			
148	SD NEGERI PAREMONO 1	-					-			
149	SD NEGERI SAWITAN	-					-			
150	SD NEGERI PAREMONO 4	1.560.000					-			
UPT BANDONGAN										
151	SD NEGERI BANYUWANGI 3									
152	SD NEGERI SUKODADI 2									
153	SD NEGERI KEBONAGUNG 2	50.000								
154	SD NEGERI SUKODADI 1	-								
155	SD NEGERI TONOBOYO 2	-								
156	SD NEGERI REJOSARI 1	-					116.900			
157	SD NEGERI TRASAN 1	-					-			
158	SD NEGERI BANYUWANGI 2	-					205.033			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
159	SD NEGERI KALEGEN 1	47.959					-			
160	SD NEGERI SALAMKANCI 1	-					246.000			
161	SD NEGERI GANDUSARI 1	-					-			
162	SD NEGERI SUKOSARI	-					60.000			
163	SD NEGERI BANDONGAN 3	-					-			
164	SDN SIDOREJO	-					31.000			
165	SD NEGERI SALAMKANCI 2	-					-			
166	SD NEGERI BANDONGAN 4	-					10.568			
167	SD NEGERI REJOSARI 2	-					-			
168	SD NEGERI TONOBOYO 1	-					15.000			
169	SD NEGERI TRASAN 4	15.262					-			
170	SD NEGERI KEBONAGUNG 1	-					-			
171	SD NEGERI BANYUWANGI 1	-					-		1.398.000	
172	SD NEGERI GANDUSARI 2	-					750.000			
173	SD NEGERI BANDONGAN 1	-								
174	SD NEGERI KALEGEN 2	-								
175	SD NEGERI TRASAN 2	-								
176	SD NEGERI NGEPANREJO	335.300								
177	SD NEGERI KEDUNGSARI									
UPT MUNTILAN										
178	SD NEGERI SEDAYU 1	32.390								
179	SD NEGERI SEDAYU 2	-								
180	SD NEGERI TAMANAGUNG 1	319.881								
181	SD NEGERI NGAWEN 1	238.057								
182	SD NEGERI ADIKARTO 2	-								
183	SD NEGERI ADIKARTO 1	-								
184	SD NEGERI TAMANAGUNG 2	-								
185	SD NEGERI KEJI 1	-								
186	SD NEGERI KEJI 2	11.933								
187	SD NEGERI TAMANAGUNG 4	5.226.224					6.000.000			
188	SD NEGERI SOKORINI 1	10.462					-			
189	SD NEGERI GONDOSULI 1	-					112.500			
190	SD NEGERI GUNUNGPRING 1	-								
191	SD NEGERI SRIWEDARI 1	-								
192	SD NEGERI GONDOSULI 2	-								
193	SD NEGERI MUNTILAN 3	-								
194	SD NEGERI CONGKRANG 1	19.434								
195	SD NEGERI PUCUNGREJO 1	-								
196	SD NEGERI PUCUNGREJO 2	-								
197	SD NEGERI GUNUNGPRING 3	-								
198	SD NEGERI GUNUNGPRING 4	2.737.134								
199	SD NEGERI SEDAYU 4	-								

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
200	SD NEGERI MUNTILAN	178.522								
201	SD NEGERI TANJUNG	44.783		300.000						
202	SD NEGERI MENAYU 1									
203	SD NEGERI CONGKRANG 2									
204	SD NEGERI MENAYU 2									
205	SD NEGERI TAMANAGUNG 3									
206	SD NEGERI SOKORINI 2									
207	SD NEGERI GUNUNGPRING 2									
UPT DUKUN										
208	SD NEGERI DUKUN 4						-			
209	SD NEGERI BANYUBIRU 2						4.715.000			
210	SD NEGERI BANYUDONO 1						-			
211	SD NEGERI MANGUNSOKA						-			
212	SD NEGERI DUKUN 1						-			
213	SD Negeri Keningar 1						-			
214	SD NEGERI SEWUKAN 1						-			
215	SD NEGERI SENGI 1						-			
216	SD NEGERI DUKUN 3						65.600			
217	SD NEGERI SUMBER						-			
218	SD NEGERI KETUNGGENG 1						-			
219	SD NEGERI BANYUBIRU 1						-			
220	SD NEGERI BANYUDONO 2						-			
221	SD NEGERI KRINJING 1						-			
222	SD NEGERI BANYUDONO 4						-			
223	SD NEGERI DUKUN 2						-			
224	SD NEGERI PATEN 2						-			
225	SD NEGERI PATEN 1						-			
226	SD NEGERI NGARGOMULYO						-			
227	SD NEGERI KRINJING 2						2.606.879			
228	SD NEGERI KALIBENING						-			
229	SD NEGERI NGADIPURO						1.000			
230	SD NEGERI KENINGAR 2						-			
231	SD NEGERI WATES						19.257			
232	SD NEGERI SENGI 2						-			
UPT KALIANGKRIK										
233	SD NEGERI SELOMOYO									
234	SD NEGERI MUNGANGSARI									
235	SD NEGERI BESERAN									
236	SD NEGERI KETANGI						350.000			
237	SD NEGERI PRAMPELAN 2						-			
238	SD-SMP NEGERI SATU ATAP PRAMPELAN						-			
239	SD NEGERI BUMIREJO						-			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
240	SD NEGERI GIRIREJO						-			
241	SD NEGERI BALEREJO						-			
242	SD NEGERI NGAWONGGO 1	300.000					30.000			
243	SD NEGERI BANJAREJO	-					130.000			
244	SD NEGERI MANGLI	600.000					-			
245	SD NEGERI TEMANGGUNG 1	-					-			
246	SD NEGERI NGENDROKILO	-					-			
247	SD NEGERI PENGARENGAN	-					-			
248	SD NEGERI BALEKERTO	-					-			
249	SD NEGERI NGARGOSOKO	-					-			
250	SD NEGERI Butuh 1	-					-			
251	SD NEGERI KALIANGKRIK 1	80.000					-			
252	SD NEGERI NGAWONGGO 2	250.000					-			
253	SD NEGERI KEBONLEGI						-			
254	SD NEGERI MADURETNO						100.000			
255	SD Negeri Giriwarno									
UPT PAKIS										
256	SD NEGERI PETUNG 1	-					-			
257	SD NEGERI WARANGAN 1	-					-			
258	SD NEGERI BAWANG 1	-					-			
259	SD NEGERI KAPONAN	-					70.220			
260	SD NEGERI WARANGAN 2	-					-			
261	SD NEGERI POGALAN 3	-					-			
262	SD NEGERI KETUNDAN 2	-					-			
263	SD NEGERI KETUNDAN 1	200.000					278.299			
264	SD NEGERI GUMELEM 1	-					982			
265	SD NEGERI JAMBEWANGI	46.232					-			
266	SD NEGERI DASEH	-					20.000			
267	SD NEGERI GEJAGAN	-					-			
268	SD NEGERI WIROPATI	-					566.000			
269	SD NEGERI BANYUSIDI	-					553.800			
270	SD NEGERI SOBOWONO	-					-			
271	SDN KAJANGKOSO	-					1.750.000			
272	SD NEGERI DALEMAN KIDUL	-					-			
273	SD NEGERI GONDANGSARI 1	-					-			
274	SD NEGERI REJOSARI	-					10.000			
275	SD NEGERI GEJAYAN	-					-			
276	SD NEGERI KENALAN	-					-			
277	SD NEGERI POGALAN 1	-					-			
278	SD NEGERI SEKAYU	-					-			
279	SDN LOSARI	252.234					-			
280	SD NEGERI DALEMAN KIDUL	100.000					763.500			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
281	SD NEGERI KRASAK									
282	SD NEGERI GONDANGSARI 3									
283	SD NEGERI KRAGILAN									
284	SD NEGERI MUNENG 1									
285	SD NEGERI PETUNG 2									
286	SD NEGERI PAKIS 1									
UPT SALAM										
287	SD NEGERI KANGKUNGAN									
288	SD NEGERI JUMOYO 4									
289	SD NEGERI MANTINGAN									
290	SD NEGERI KADILUWIH						30.100			
291	SD NEGERI SOMOKETRO									
292	SD NEGERI SIRAHAN 1	10.371								
293	SD NEGERI TERSAN GEDE 1									
294	SD NEGERI JUMOYO 2									
295	SD NEGERI BATURONO									
296	SD NEGERI GULON 4									
297	SD NEGERI GULON 1									
298	SD NEGERI SIRAHAN 2									
299	SD NEGERI SUCEN									
300	SD NEGERI GULON 2									
301	SD NEGERI SELOBORO									
302	SD NEGERI TIRTO						31			
303	SD NEGERI GULON 5									
304	SD NEGERI TERSAN GEDE 2									
305	SD NEGERI SALAM 1									
UPT TEMPURAN										
306	SD NEGERI JAMBU									
307	SD NEGERI SIDOAGUNG 1									
308	SD NEGERI SIDOAGUNG 3									
309	SD NEGERI SIDOAGUNG 2						820.700			
310	SD NEGERI TUGUREJO						-			
311	SD NEGERI RINGINANOM 2			439.600			-			
312	SD NEGERI TEMPUREJO 2						1.329.200			
313	SD NEGERI PRAJEKSARI 1									
314	SD NEGERI KALISARI 1									
315	SD NEGERI TANGGULREJO 1									
316	SD NEGERI RINGINANOM 1									
317	SD NEGERI KEMUTUK									
318	SDN GIRIREJO 2									
319	SD NEGERI PRAJEKSARI 2									
320	SD NEGERI BAWANG									

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
321	SD NEGERI SUMBERARUM 1									
322	SD NEGERI JOGOMULYO									
323	SD NEGERI SUMBERARUM 2									
324	SD NEGERI TEMANGGAL									
325	SD NEGERI KALISARI 2									
326	SD NEGERI GIRIREJO 1									
327	SD NEGERI TEMPUREJO 1									
328	SD NEGERI GROWONG									
UPT TEGALREJO										
329	SD NEGERI KEBONAGUNG									
330	SD NEGERI BANYUURIP 2									
331	SDN KLOPO 2									
332	SD NEGERI DONOROJO									
333	SDN DLIMAS									
334	SD NEGERI TAMPINGAN 2									
335	SD NEGERI WONOSUKO									
336	SD NEGERI SUKOREJO									
337	SD NEGERI SIDOREJO 1									
338	SD NEGERI DAWUNG									
339	SD NEGERI PURWOSARI	54.921								
340	SDN GIRIREJO	-								
341	SD NEGERI TAMPINGAN 1	-								
342	SD NEGERI GLAGAHOMBO	-								
343	SD NEGERI NGASEM	-								
344	SD NEGERI SOROYUDAN	-								
345	SD NEGERI BANYUURIP 1	7.000.000								
346	SDN MANGUNREJO	10								
347	SD NEGERI PURWODADI	-								
348	SD NEGERI KLOPO 1	-								
349	SD NEGERI JAPAN	-								
350	SD NEGERI WONOKERTO	-								
351	SD NEGERI GEGER	-								
352	SD NEGERI TEGALREJO	-								
353	SDN BANYUSARI	-								
354	SD NEGERI NGADIREJO	200.000								
UPT SAWANGAN										
355	SD NEGERI BUTUH 1									
356	SD NEGERI PODOSOKO 1									
357	SD NEGERI SAWANGAN 3									
358	SD NEGERI BUTUH 2									
359	SD NEGERI SORONALAN 2									
360	SD NEGERI BANYUROTO 1									

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
361	SD NEGERI KETEP 1									
362	SD NEGERI PODOSOKO 2	901.812								
363	SD NEGERI JATI 3	-								
364	SD NEGERI SORONALAN 1	-								
365	SD NEGERI KROGOWANAN	-								
366	SD NEGERI JATI 1	-								
367	SD NEGERI WONOLELO 3	-								
368	SD NEGERI PODOSOKO 4	-								
369	SD NEGERI MANGUNSARI 1	-								
370	SD NEGERI SAWANGAN 4	-								
371	SD NEGERI SAWANGAN 1	-								
372	SD NEGERI MANGUNSARI 3	-								
373	SD NEGERI WONOLELO 4	-								
374	SD NEGERI WULUNGGUNUN	-								
375	SD NEGERI TIRTOSARI 1	110								
376	SD NEGERI GANTANG 2									
377	SD NEGERI KAPUHAN 2									
378	SD NEGERI WONOLELO 1									
379	SD NEGERI KAPUHAN 1									
380	SD NEGERI GONDOWANGI 1									
381	SD NEGERI JATI 2									
382	SD NEGERI GANTANG 1									
UPT KAJORAN										
383	SDN PANDANRETNO						270.000			
384	SD NEGERI SUTOPATI 1						2.575.000			
385	SD NEGERI WONOGIRI						-			
386	SD NEGERI KAJORAN 2						-			
387	SD NEGERI BANGSRI						-			
388	SD NEGERI KUWADERAN 1						-			
389	SD NEGERI SAMBAK						32.327			
390	SD NEGERI BAMBUSARI	104.641					3.859			
391	SD NEGERI WUWUHARJO 2	-					319.000			
392	SD NEGERI BANJARETNO	-					420.000			
393	SD NEGERI KAJORAN 1	-					-			
394	SD NEGERI NGENDROSARI	-					-			
395	SD NEGERI SUTOPATI 3	49					-			
396	SD NEGERI WUWUHARJO 1						-			
397	SD NEGERI KUWADERAN 2						-			
398	SD NEGERI NGARGOSARI						3.500.000			
399	SD NEGERI SUTOPATI 2						-			
400	SD NEGERI SIDOWANGI						-			
401	SD NEGERI KRINJING						1.184.380			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
402	SD NEGERI MANGUNREJO						-			
403	SD NEGERI SUTOPATI 4						-			
404	SD NEGERI LESANPURO						-			
405	SD NEGERI SIDOREJO						-			
406	SD NEGERI SUTOPATI 5						-			
407	SD NEGERI SUKOMULYO						88.000			
408	SD NEGERI BUMIAYU									
409	SD NEGERI PANDANSARI									
410	SD NEGERI PUCUNGROTO									
411	SD NEGERI BANJARAGUNG									
UPT NGLUWAR										
412	SD NEGERI SOMOKATON 1	153.000								
413	SD NEGERI PAKUNDEN 1	-								
414	SD NEGERI DRUJU 2	-								
415	SD NEGERI NGLUWAR 1	157.302								
416	SD NEGERI PAKUNDEN 3	195.462								
417	SD NEGERI NGLUWAR 3	59.128		100.000						
418	SD NEGERI BLONGKENG 1	-		982.000						
419	SD NEGERI BLONGKENG 3	-		-						
420	SD NEGERI KARANGTALUN 1	55.364		2.470.000						
421	SD NEGERI BLIGO 1	543.747		-						
422	SD NEGERI SOMOKATON 2	156.732		-						
423	SD NEGERI JAMUS 1	125.750		430.000						
424	SD NEGERI NGLUWAR 2	23.866		445.000						
425	SD NEGERI PLOSOGUDE 1	206.625								
426	SD NEGERI KARANGTALUN 2	177.926								
427	SD NEGERI JAMUS 2	42.306								
428	SD NEGERI BLIGO 3	-								
429	SD NEGERI PAKUNDEN 2	200.043								
430	SD NEGERI BLIGO 2									
UPT NGABLAK										
431	SD NEGERI KANIGORO 1									
432	SD NEGERI SELOPROJO									
433	SD NEGERI JOGOYASAN									
434	SD NEGERI MADYOGONDO 3									
435	SD NEGERI KANIGORO 2									
436	SD NEGERI GIRIREJO 2	997.846								
437	SD NEGERI MAGERSARI	-								
438	SD NEGERI BANDUNGREJO	-								
439	SD NEGERI PAGERGUNUNG	27.712								
440	SD NEGERI PANDEAN 1	-								
441	SD NEGERI NGABLAK 2	24.000								

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
442	SD NEGERI TEJOSARI	-								
443	SD NEGERI SELOMIRAH	1.077.647								
444	SD NEGERI GENIKAN	-								
445	SD NEGERI PANDEAN 2	-								
446	SD NEGERI JOGONAYAN	-								
447	SD NEGERI NGABLAH 1	-								
448	SD NEGERI GIRIREJO 3	-					83.628			
449	SD NEGERI SUMBEREJO 1	-								
450	SD NEGERI SUMBEREJO 2	-								
451	SD NEGERI KEDITAN	129.971								
452	SD NEGERI NGABLAH 5									
453	SD NEGERI MADYOGONDO 2									
UPT SECANG										
454	SD NEGERI SECANG 1									
455	SD NEGERI KALIJOSO									
456	SD NEGERI CANDISARI									
457	SD NEGERI KRINCING									
458	SDN PURWOSARI						40.800			
459	SD NEGERI SIDOMULYO						-			
460	SD NEGERI NGADIROJO						-			
461	SD NEGERI PAYAMAN 2						-			
462	SD NEGERI PANCURANMAS						-			
463	SD NEGERI MADYOCONDRO						-			
464	SD NEGERI KARANGKAJEN						-			
465	SD NEGERI KUWALUHAN						-			
466	SD NEGERI PUCANG						-			
467	SD NEGERI GIRIKULON						-			
468	SD NEGERI PAYAMAN 1						-			
469	SD NEGERI JAMBEWANGI						-			
470	SD NEGERI SETAN						-			
471	SD NEGERI NGABEAN						-			
472	SD NEGERI SECANG 3						-	4.232.900		
473	SD NEGERI PIRIKAN						1			
474	SD NEGERI DONOMULYO									
475	SD NEGERI MADUSARI									
476	SD NEGERI SECANG 2									
UPT BOROBUKUR										
477	SD NEGERI TANJUNGSARI	-								
478	SD NEGERI CANDIREJO 1	-								
479	SD NEGERI NGADIHARJO 1	-								
480	SD NEGERI SATU ATAP KER	-								
481	SD NEGERI GIRIPURNO 1	-								

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
482	SD NEGERI BUMIHARJO	832.517								
483	SD NEGERI BIGARAN	-								
484	SD NEGERI KEBONSARI	-								
485	SD NEGERI NGADIHARJO 2	-								
486	SD NEGERI NGARGOGONDO	-								
487	SD NEGERI RINGINPUTIH 2	-								
488	SD NEGERI GIRIPURNO 2	27.009								
489	SD NEGERI GIRITENGAH 2	-					11.600.000			
490	SD NEGERI RINGINPUTIH 1	-								
491	SD NEGERI CANDIREJO 4	-								
492	SD NEGERI SAMBENG	-								
493	SD NEGERI TUKSONGO 1	-								
494	SD NEGERI KEMBANGLIMUS	-								
495	SD NEGERI GIRITENGAH 1	-								
496	SD NEGERI RINGINPUTIH 3	-								
497	SD NEGERI TEGALARUM	-								
498	SD NEGERI BOROBUDUR 1	7.146.074								
499	SD NEGERI KARANGANYAR									
500	SD NEGERI BOROBUDUR 2									
501	SD NEGERI MAJAKSINGI									
502	SD NEGERI WANUREJO									
503	SD NEGERI KARANGREJO									
UPT WINDUSARI										
504	SD NEGERI TANJUNGSARI 2			6.216.500			17.100			
505	SD NEGERI GONDANGREJO	129		-			-			
506	SD NEGERI TANJUNGSARI 1	268		-			-			
507	SD NEGERI DAMPIT	-		-			-			
508	SD NEGERI WONOROTO	-		29.349.600			2.430.341			
509	SD NEGERI TINJUMOYO	-		-			-			
510	SD NEGERI PASANGSARI	-		251.580			6.000			
511	SD NEGERI SEMEN	30		-			1			
512	SD NEGERI WINDUSARI 2	10.668		-			-			
513	SDN KALIJOSO	1.050.101		-			-			
514	SD NEGERI GENITO	-		-			-			
515	SD NEGERI NGEMPLAK	-		547.650			-	850.000		
516	SD NEGERI KENTENGSARI									
517	SD NEGERI MANGUNSARI	-		1.642.000			10.604	-		
518	SD NEGERI KEMBANGKUNIN	60.000		-			49.560	-		
519	SD NEGERI BANDARSEDAYU	-		-			-	-		
520	SD NEGERI GUNUNGSARI	-		136.000			-	-		
521	SD NEGERI BANJARSARI 2	-		-			-	9.015.000		
522	SD NEGERI WINDUSARI 1	333		-			-			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
523	SD NEGERI CANDISARI	-		-			3.250.000			
524	SD NEGERI KEMBANGKUNIN	61		85.000			-			
525	SD NEGERI GIRIMULYO			9.890.300			11.000			
UPT CANDIMULYO										
526	SDN TRENTEN 1									
527	SD NEGERI TAMPIRKULON 1									
528	SD NEGERI MEJING 2									
529	SD NEGERI GENENG 2									
530	SD NEGERI SURODADI 1	270.000								
531	SD NEGERI BATEH									
532	SD NEGERI TEMPAK 2									
533	SD NEGERI GENENG 1									
534	SD NEGERI TEMPURSARI									
535	SD NEGERI PODOSOKO									
536	SD NEGERI GIYANTI									
537	SD NEGERI CANDIMULYO 1									
538	SD NEGERI SURODADI 3									
539	SD NEGERI PAGER									
540	SD NEGERI SONOREJO									
541	SD NEGERI TEBELANG									
542	SD NEGERI TEGALSARI 2									
543	SD NEGERI TAMPIRKULON 2	6.004								
544	SD NEGERI KEBONREJO									
545	SD NEGERI SUROJOYO									
546	SD NEGERI CANDIMULYO 2									
547	SD NEGERI TEMPAK 1									
548	SD NEGERI MEJING 1									
549	SD NEGERI PURWOREJO									
550	SD NEGERI BENINGAN									
551	SD NEGERI TRENTEN 2									
552	SD NEGERI KEMBARAN									
553	SD NEGERI TAMPIR WETAN	270.000								
	TOTAL DANA BOS SD	54.291.275		53.285.230	350.000	-	72.052.665		1.398.000	

B. KAS BOS SMP NEGERI PER SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
1	SMP NEGERI 1 MUNTILAN						-			
2	SMP NEGERI 2 MUNTILAN						-			
3	SMP NEGERI 3 MUNTILAN						-			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
4	SMP NEGERI 1 SALAMAN						-			
5	SMP NEGERI 2 SALAMAN						-			
6	SMP NEGERI 3 SALAMAN		80.000.000				-			
7	SMP NEGERI 1 BOROBUDUR						-			
8	SMP NEGERI 2 BOROBUDUR						-			
9	SMP NEGERI 1 SRUMBUNG						-			
10	SMP NEGERI 2 SRUMBUNG						-			
11	SMP NEGERI 1 DUKUN						-			
12	SMP NEGERI 2 DUKUN						-			
13	SMP NEGERI 1 MUNGKID						-			
14	SMP NEGERI 2 MUNGKID						-			
15	SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID						-			
16	SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN						47.493			
17	SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN						-			
18	SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN						-			
19	SMP NEGERI 1 TEGALREJO						-			
20	SMP NEGERI 2 TEGALREJO						-			
21	SMP NEGERI 1 BANDONGAN						-			
22	SMP NEGERI 2 BANDONGAN						-			
23	SMP NEGERI 1 GRABAG						-			
24	SMP NEGERI 2 GRABAG						-			
25	SMP NEGERI 3 GRABAG						-			
26	SMP NEGERI 1 NGLUWAR						-			
27	SMP NEGERI 1 TEMPURAN						-			
28	SMP NEGERI 2 TEMPURAN						-			
29	SMP NEGERI 3 TEMPURAN						-			
30	SMP NEGERI 1 SECANG						-			
31	SMP NEGERI 2 SECANG						-			
32	SMP NEGERI 3 SECANG						-			
33	SMP NEGERI 1 SAWANGAN						-			
34	SMP NEGERI 2 SAWANGAN		10.000.000				287			
35	SMP NEGERI 3 SAWANGAN						-			
36	SMP NEGERI 1 CANDIMULYO						32			
37	SMP NEGERI 2 CANDIMULYO						-			
38	SMP NEGERI 3 CANDIMULYO						-			
39	SMP NEGERI 1 SALAM						-			
40	SMP NEGERI 2 SALAM						-			
41	SMP NEGERI 3 SALAM						-			
42	SMP NEGERI 1 KAJORAN						-			
43	SMP NEGERI 2 KAJORAN						500			
44	SMP NEGERI 1 KALIANGKRIK						-			
45	SMP NEGERI 2 KALIANGKRIK						-			

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DI BANK					SISA TUNAI			
		DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA	UTANG PFK	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	DANA TEMUAN INSPEKTORAT	BUNGA
46	SMP NEGERI 1 PAKIS						-			
47	SMP NEGERI 2 PAKIS						-			
48	SMP NEGERI 3 PAKIS						-			
49	SMP NEGERI 1 NGABLAH						-			
50	SMP NEGERI 2 NGABLAH						-			
51	SMP NEGERI 1 WINDUSARI						-			
52	SMP NEGERI 2 WINDUSARI						-			
53	SMPN 3 SATU ATAP BOROBUDUR						-			
54	SMPN 4 Satu Atap Pakis	3.000					19.733.389			
55	SMPN 5 Pakis Pogalan						-			
56	SMPN 3 SATU ATAP NGABLAH						-			
57	SMPN 4 SATAP SAWANGAN						-			
58	SMPN 3 SATU ATAP KALIANGKRIK						-			
59	SMPN 4 SATAP SALAMAN						-			
	TOTAL DANA BOS SMP	3.000					19.781.701			
	TOTAL DANA BOS SD DAN SMP	54.294.275		53.285.230	350.000		91.834.366		1.398.000	

C. KAS BOS KESETARAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Kas Tunai	1.681.025,00
2	Jasa Giro disetor ke RKUD tanggal 27 Februari 2024	654.018,00
	Jumlah	2.335.043,00

Lampiran 5.24

Kas BOS Per Sekolah

A. KAS BOS SD NEGERI PER SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
UPT SRUMBUNG										
1	SD NEGERI PUCANGANOM 1						-	-	-	-
2	SD NEGERI SRUMBUNG 2						2.173.000	-	-	2.173.000
3	SD NEGERI KRADENAN 2						-	-	-	-
4	SD NEGERI KAMONGAN						25.874	-	-	25.874
5	SD NEGERI KRADENAN 1						364.951	-	-	364.951
6	SD NEGERI SIKEPAN 2						40.021	-	-	40.021
7	SD NEGERI BANYUADEM						156.389	-	-	156.389
8	SD NEGERI JERUKAGUNG 1						461.000	-	350.000	811.000
9	SD NEGERI POLENGAN 1						100.000	-	-	100.000
10	SD NEGERI MRANGGEN 1		348.000	43.200			20.599	-	391.200	411.799
11	SD NEGERI SUDIMORO 2						50.000	-	-	50.000
12	SD NEGERI JERUKAGUNG 2						3.500.000	-	-	3.500.000
13	SD NEGERI MRANGGEN 2						158.251	-	-	158.251
14	SD NEGERI SOKA 1						930.000	-	-	930.000
15	SD NEGERI KALIURANG 2						166.820	-	-	166.820
16	SD NEGERI JAMBLANGAN						5.930.500	-	-	5.930.500
17	SD NEGERI SOKA 2						60.784	-	-	60.784
18	SD NEGERI TEGALRANDU						188.586	-	-	188.586
19	SD NEGERI NGABLAK						42.000	-	-	42.000
20	SD NEGERI KEMIREN						33.291	-	-	33.291
21	SD NEGERI SRUMBUNG 1						508.227	-	-	508.227
22	SD NEGERI PANDANRETNO						689.700	-	-	689.700
23	SD NEGERI BRINGIN 1						125.549	-	-	125.549
24	SD NEGERI KRADENAN 3						374.243	-	-	374.243
25	SD NEGERI SIKEPAN 1						32.746	-	-	32.746
26	SD NEGERI KALIURANG 1						152.900	-	-	152.900
27	SD NEGERI SUDIMORO 1						220.883	-	-	220.883
UPT GRABAG										
28	SD NEGERI KARTOHARJO						-	-	-	-
29	SD NEGERI TLOGOREJO						-	-	-	-
30	SD NEGERI SALAM						-	-	-	-
31	SD NEGERI LEBAK						-	-	-	-
32	SD NEGERI BALEAGUNG						1.095.000	-	-	1.095.000
33	SD NEGERI GRABAG 3						169.794	-	-	169.794
34	SD NEGERI TIRTO			4.000			-	-	4.000	4.000
35	SD NEGERI SAMBUNGREJO						-	-	-	-
36	SD NEGERI PUCUNGSARI						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
37	SD NEGERI KLETERAN 1						10.001	-	-	10.001
38	SD NEGERI KALIPUCANG						-	-	-	-
39	SD NEGERI NGRANCAH						1.323.371	-	-	1.323.371
40	SD NEGERI SUGIHMAS 2						1.961.100	-	-	1.961.100
41	SD NEGERI CITROSONO						-	-	-	-
42	SD NEGERI LOSARI						287.520	-	-	287.520
43	SD NEGERI SUMURARUM						-	-	-	-
44	SD NEGERI COKRO						318.306	-	-	318.306
45	SD NEGERI GRABAG 1						-	-	-	-
46	SD NEGERI KAYUPURING						-	-	-	-
47	SD NEGERI KLEGEN						33.587	-	-	33.587
48	SD NEGERI PESIDI						5.905	-	-	5.905
49	SD NEGERI BANYUSARI	234.234					36.013	-	234.234	270.247
50	SD NEGERI BANJARSARI						-	-	-	-
51	SD NEGERI KETAWANG 1						-	-	-	-
52	SD NEGERI KETAWANG 2						-	-	-	-
53	SD NEGERI KALIKUTO						335.077	-	-	335.077
54	SD NEGERI SUGIHMAS 1						13.628	-	-	13.628
55	SD NEGERI BONO			16.080			94.319	-	16.080	110.399
56	SD NEGERI BANARAN 1						-	-	-	-
57	SD NEGERI PAGONAN						35.049	-	-	35.049
58	SD NEGERI NGASINAN 2						-	-	-	-
59	SD NEGERI KLETERAN 3						80.811	-	-	80.811
60	SD NEGERI NGASINAN 1						24.300	-	-	24.300
61	SD NEGERI GIRIWETAN						-	-	-	-
UPT SALAMAN										
62	SDN Salaman 1						-	-	-	-
63	SDN Salaman 2						-	-	-	-
64	SDN Salaman 3						-	-	-	-
65	SDN Salaman 4						-	-	-	-
66	SDN Jebengsari						-	-	-	-
67	SDN Sidomulyo 1		24.000				-	-	24.000	24.000
68	SDN Sidomulyo 2						-	-	-	-
69	SDN Kebonrejo 1						-	-	-	-
70	SDN Kebonrejo 2						-	-	-	-
71	SDN Banjarharjo						-	-	-	-
72	SDN Tanjunganom						-	6.750.000	-	6.750.000
73	SDN Pancar						-	-	-	-
74	SDN Purwosari						-	-	-	-
75	SDN Ngargoretno 1						-	-	-	-
76	SDN Ngargoretno 2						-	-	-	-
77	SDN Paripurno						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
78	SDN Kalirejo 1						200	-	-	200
79	SDN Kalirejo 3						-	-	-	-
80	SDN Beteng						-	-	-	-
81	SDN Menoreh		21.000				-	-	21.000	21.000
82	SDN Ngadirejo						-	-	-	-
83	SDN Kalisalak						-	-	-	-
84	SDN Sriwedari 1						-	-	-	-
85	SDN Sriwedari 2						-	-	-	-
86	SDN Krasak 1						-	-	-	-
87	SDN Krasak 2						-	-	-	-
88	SDN Margoyoso						-	-	-	-
89	SDN Kaliabu						-	-	-	-
90	SDN Sawangargo						-	-	-	-
91	SDN Sidosari						-	-	-	-
UPT MERTOYUDAN										
92	SD NEGERI SARATAN						-	-	-	-
93	SD NEGERI PANCA ARGAS 1						-	-	-	-
94	SD NEGERI KALINEGORO 1						-	-	-	-
95	SDN SOROYUDAN						-	-	-	-
96	SD NEGERI DANUREJO 1						-	-	-	-
97	SD NEGERI SUKOREJO 3						-	-	-	-
98	SD NEGERI SUKOREJO 1						-	-	-	-
99	SD NEGERI BANYAKAN						-	-	-	-
100	SD NEGERI PASURUHAN 1						-	-	-	-
101	SD NEGERI BANJARNEGORO 1						-	-	-	-
102	SD NEGERI SUMBERREJO						-	-	-	-
103	SD NEGERI DEYANGAN 1						-	-	-	-
104	SD NEGERI SUKOREJO 2						-	-	-	-
105	SD NEGERI MERTOYUDAN 1						-	-	-	-
106	SD NEGERI BANYUROJO 3						-	-	-	-
107	SD NEGERI PERMITAN 2						-	-	-	-
108	SD NEGERI KALINEGORO 2						-	-	-	-
109	SD NEGERI MERTOYUDAN 3						-	-	-	-
110	SD NEGERI KALINEGORO 5						-	-	-	-
111	SD NEGERI KALINEGORO 6						-	-	-	-
112	SD NEGERI BULUREJO 1						-	-	-	-
113	SD NEGERI BANJARNEGORO 2						-	-	-	-
114	SD NEGERI KALINEGORO 3						-	-	-	-
115	SD NEGERI JOGONEGORO 1						8.994.300	-	-	8.994.300
116	SD NEGERI PIRIKAN						-	-	-	-
117	SD NEGERI DEYANGAN 2						-	-	-	-
118	SD NEGERI PASURUHAN 2						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
119	SD NEGERI PASURUHAN 4						-	-	-	-
120	SD NEGERI SOKA						-	-	-	-
121	SD NEGERI KALISARI						10.000	-	-	10.000
122	SD NEGERI BANYUROJO 2						-	-	-	-
123	SD NEGERI BANJARNEGORO						-	-	-	-
124	SD NEGERI PERMITAN 1						-	-	-	-
125	SD NEGERI TANJUNGANOM						-	-	-	-
126	SDN DONOROJO						50.000	-	-	50.000
127	SD NEGERI BANYUROJO 1						-	-	-	-
UPT MUNGKID										
128	SD NEGERI TREKO 2						-	-	-	-
129	SD NEGERI BUMIREJO 1						-	-	-	-
130	SD NEGERI NGRAJEK 1						-	-	-	-
131	SD NEGERI RAMBEANAK 2						-	-	-	-
132	SD NEGERI PABELAN 3						-	-	-	-
133	SD BLONDO						77.414	-	-	77.414
134	SD NEGERI BOJONG 1						-	-	-	-
135	SD NEGERI GONDANG						184.849	-	-	184.849
136	SD NEGERI MENDUT						-	-	-	-
137	SD NEGERI MUNGKID 1						2.500.000	-	-	2.500.000
138	SD NEGERI SENDEN 2						-	-	-	-
139	SD NEGERI PAGERSARI						375.543	-	-	375.543
140	SD NEGERI BUMIREJO 2						-	-	-	-
141	SD NEGERI TREKO 1						-	-	-	-
142	SD NEGERI PAREMONO 3		31.500				72.087	-	31.500	103.587
143	SD NEGERI PROGOWATI 1						-	-	-	-
144	SD NEGERI MUNGKID 2						-	-	-	-
145	SD NEGERI PABELAN 2		96.000	96.000			-	-	192.000	192.000
146	SD NEGERI AMBEANAK 1		50.000				644.940	-	50.000	694.940
147	SD NEGERI AMBARTAWANG						8.500.000	-	-	8.500.000
148	SD NEGERI PAREMONO 1		166.000	15.400			-	-	181.400	181.400
149	SD NEGERI SAWITAN						-	-	-	-
150	SD NEGERI PAREMONO 4						1.560.000	-	-	1.560.000
UPT BANDONGAN										
151	SD NEGERI BANYUWANGI 3						-	-	-	-
152	SD NEGERI SUKODADI 2						-	-	-	-
153	SD NEGERI KEBONAGUNG 2						50.000	-	-	50.000
154	SD NEGERI SUKODADI 1						-	-	-	-
155	SD NEGERI TONOBOYO 2						-	-	-	-
156	SD NEGERI REJOSARI 1						116.900	-	-	116.900
157	SD NEGERI TRASAN 1						-	-	-	-
158	SD NEGERI BANYUWANGI 2						205.033	-	-	205.033

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
159	SD NEGERI KALEGEN 1						47.959	-	-	47.959
160	SD NEGERI SALAMKANCI 1						246.000	-	-	246.000
161	SD NEGERI GANDUSARI 1						-	-	-	-
162	SD NEGERI SUKOSARI						60.000	-	-	60.000
163	SD NEGERI BANDONGAN 3						-	-	-	-
164	SDN SIDOREJO						31.000	-	-	31.000
165	SD NEGERI SALAMKANCI 2						-	-	-	-
166	SD NEGERI BANDONGAN 4						10.568	-	-	10.568
167	SD NEGERI REJOSARI 2	713.513					-	-	713.513	713.513
168	SD NEGERI TONOBOYO 1						15.000	-	-	15.000
169	SD NEGERI TRASAN 4			2.000			15.262	-	2.000	17.262
170	SD NEGERI KEBONAGUNG 1						-	-	-	-
171	SD NEGERI BANYUWANGI 1	526.018		27.600			1.398.000	-	553.618	1.951.618
172	SD NEGERI GANDUSARI 2						750.000	-	-	750.000
173	SD NEGERI BANDONGAN 1						-	-	-	-
174	SD NEGERI KALEGEN 2						-	-	-	-
175	SD NEGERI TRASAN 2						-	-	-	-
176	SD NEGERI NGEPANREJO		9.750	120.000		151.320	335.300	-	281.070	616.370
177	SD NEGERI KEDUNGSARI						-	-	-	-
UPT MUNTILAN										
178	SD NEGERI SEDAYU 1						32.390	-	-	32.390
179	SD NEGERI SEDAYU 2						-	-	-	-
180	SD NEGERI TAMANAGUNG 1						319.881	-	-	319.881
181	SD NEGERI NGAWEN 1						238.057	-	-	238.057
182	SD NEGERI ADIKARTO 2						-	-	-	-
183	SD NEGERI ADIKARTO 1						-	-	-	-
184	SD NEGERI TAMANAGUNG 2						-	-	-	-
185	SD NEGERI KEJI 1						-	-	-	-
186	SD NEGERI KEJI 2			77.720			11.933	-	77.720	89.653
187	SD NEGERI TAMANAGUNG 4	594.594		12.000			11.226.224	-	606.594	11.832.818
188	SD NEGERI SOKORINI 1						10.462	-	-	10.462
189	SD NEGERI GONDOSULI 1						112.500	-	-	112.500
190	SD NEGERI GUNUNGPRING 1						-	-	-	-
191	SD NEGERI SRIWEDARI 1	90					-	-	90	90
192	SD NEGERI GONDOSULI 2						-	-	-	-
193	SD NEGERI MUNTILAN 3						-	-	-	-
194	SD NEGERI CONGKRANG 1						19.434	-	-	19.434
195	SD NEGERI PUCUNGREJO 1						-	-	-	-
196	SD NEGERI PUCUNGREJO 2						-	-	-	-
197	SD NEGERI GUNUNGPRING 3						-	-	-	-
198	SD NEGERI GUNUNGPRING 4						2.737.134	-	-	2.737.134
199	SD NEGERI SEDAYU 4						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
200	SD NEGERI MUNTILAN						178.522	-	-	178.522
201	SD NEGERI TANJUNG						344.783	-	-	344.783
202	SD NEGERI MENAYU 1						-	-	-	-
203	SD NEGERI CONGKRANG 2						-	-	-	-
204	SD NEGERI MENAYU 2						-	-	-	-
205	SD NEGERI TAMANAGUNG 3						-	-	-	-
206	SD NEGERI SOKORINI 2						-	-	-	-
207	SD NEGERI GUNUNGPRING 2						-	-	-	-
UPT DUKUN										
208	SD NEGERI DUKUN 4						-	-	-	-
209	SD NEGERI BANYUBIRU 2		24.000	55.180			4.715.000	-	79.180	4.794.180
210	SD NEGERI BANYUDONO 1						-	-	-	-
211	SD NEGERI MANGUNSOKA						-	-	-	-
212	SD NEGERI DUKUN 1						-	-	-	-
213	SD Negeri Keningar 1						-	-	-	-
214	SD NEGERI SEWUKAN 1		14.400				-	-	14.400	14.400
215	SD NEGERI SENGI 1		5.000				-	-	5.000	5.000
216	SD NEGERI DUKUN 3						65.600	-	-	65.600
217	SD NEGERI SUMBER						-	-	-	-
218	SD NEGERI KETUNGGENG 1						-	-	-	-
219	SD NEGERI BANYUBIRU 1						-	-	-	-
220	SD NEGERI BANYUDONO 2						-	-	-	-
221	SD NEGERI KRINJING 1						-	-	-	-
222	SD NEGERI BANYUDONO 4						-	-	-	-
223	SD NEGERI DUKUN 2						-	-	-	-
224	SD NEGERI PATEN 2						-	-	-	-
225	SD NEGERI PATEN 1		12.000	5.000		25.000	-	-	42.000	42.000
226	SD NEGERI NGARGOMULYO						-	-	-	-
227	SD NEGERI KRINJING 2			20.160		50.400	2.606.879	-	70.560	2.677.439
228	SD NEGERI KALIBENING			10.000			-	-	10.000	10.000
229	SD NEGERI NGADIPURO						1.000	-	-	1.000
230	SD NEGERI KENINGAR 2						-	-	-	-
231	SD NEGERI WATES		12.000				19.257	-	12.000	31.257
232	SD NEGERI SENGI 2						-	-	-	-
UPT KALIANGKRIK										
233	SD NEGERI SELOMOYO						-	-	-	-
234	SD NEGERI MUNGANGSAR						-	-	-	-
235	SD NEGERI BESERAN						-	-	-	-
236	SD NEGERI KETANGI						350.000	-	-	350.000
237	SD NEGERI PRAMPELAN 2						-	-	-	-
238	SD-SMP NEGERI SATU ATAP						-	-	-	-
239	SD NEGERI BUMIREJO						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
240	SD NEGERI GIRIREJO						-	-	-	-
241	SD NEGERI BALEREJO						-	-	-	-
242	SD NEGERI NGAWONGGO 1						330.000	-	-	330.000
243	SD NEGERI BANJAREJO						130.000	-	-	130.000
244	SD NEGERI MANGLI						600.000	-	-	600.000
245	SD NEGERI TEMANGGUNG 1						-	-	-	-
246	SD NEGERI NGENDROKILLO						-	-	-	-
247	SD NEGERI PENGARENGAN						-	-	-	-
248	SD NEGERI BALEKERTO						-	-	-	-
249	SD NEGERI NGARGOSOKO						-	-	-	-
250	SD NEGERI Butuh 1						-	-	-	-
251	SD NEGERI KALIANKRIK 1						80.000	-	-	80.000
252	SD NEGERI NGAWONGGO 2						250.000	-	-	250.000
253	SD NEGERI KEBONLEGI						-	-	-	-
254	SD NEGERI MADURETNO						100.000	-	-	100.000
255	SD Negeri Giriwarno						-	-	-	-
UPT PAKIS										
256	SD NEGERI PETUNG 1						-	-	-	-
257	SD NEGERI WARANGAN 1						-	-	-	-
258	SD NEGERI BAWANG 1						-	-	-	-
259	SD NEGERI KAPONAN						70.220	-	-	70.220
260	SD NEGERI WARANGAN 2						-	-	-	-
261	SD NEGERI POGALAN 3						-	-	-	-
262	SD NEGERI KETUNDAN 2						-	-	-	-
263	SD NEGERI KETUNDAN 1						478.299	-	-	478.299
264	SD NEGERI GUMELEM 1						982	-	-	982
265	SD NEGERI JAMBEWANGI						46.232	-	-	46.232
266	SD NEGERI DASEH						20.000	-	-	20.000
267	SD NEGERI GEJAGAN						-	-	-	-
268	SD NEGERI WIROPATI					120.000	566.000	-	120.000	686.000
269	SD NEGERI BANYUSIDI		54.000	148.400		371.000	553.800	-	573.400	1.127.200
270	SD NEGERI SOBOWONO	297.297	142.500	76.800			-	-	516.597	516.597
271	SDN KAJANGKOSO						1.750.000	-	-	1.750.000
272	SD NEGERI DALEMAN KIDUL						-	-	-	-
273	SD NEGERI GONDANGSARI 1						-	-	-	-
274	SD NEGERI REJOSARI						10.000	-	-	10.000
275	SD NEGERI GEJAYAN						-	-	-	-
276	SD NEGERI KENALAN						-	-	-	-
277	SD NEGERI POGALAN 1						-	-	-	-
278	SD NEGERI SEKAYU						-	-	-	-
279	SDN LOSARI						252.234	-	-	252.234
280	SD NEGERI DALEMAN KIDUL	2.899.985	478.200	121.820		344.500	863.500	-	3.844.505	4.708.005

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
281	SD NEGERI KRASAK		18.000	61.360			-	-	79.360	79.360
282	SD NEGERI GONDANGSARI 3						-	-	-	-
283	SD NEGERI KRAGILAN						-	-	-	-
284	SD NEGERI MUNENG 1						-	-	-	-
285	SD NEGERI PETUNG 2						-	-	-	-
286	SD NEGERI PAKIS 1						-	-	-	-
UPT SALAM										
287	SD NEGERI KANGKUNGAN						-	-	-	-
288	SD NEGERI JUMOYO 4						-	-	-	-
289	SD NEGERI MANTINGAN						-	-	-	-
290	SD NEGERI KADILUWIH						30.100	-	-	30.100
291	SD NEGERI SOMOKETRO						-	-	-	-
292	SD NEGERI SIRAHAN 1						10.371	-	-	10.371
293	SD NEGERI TERSAN GEDE 1						-	-	-	-
294	SD NEGERI JUMOYO 2						-	-	-	-
295	SD NEGERI BATURONO						-	-	-	-
296	SD NEGERI GULON 4	346.500					-	-	346.500	346.500
297	SD NEGERI GULON 1						-	-	-	-
298	SD NEGERI SIRAHAN 2			33.400			-	-	33.400	33.400
299	SD NEGERI SUCEN						-	-	-	-
300	SD NEGERI GULON 2						-	-	-	-
301	SD NEGERI SELOBORO						-	-	-	-
302	SD NEGERI TIRTO						31	-	-	31
303	SD NEGERI GULON 5						-	-	-	-
304	SD NEGERI TERSAN GEDE 2						-	-	-	-
305	SD NEGERI SALAM 1						-	-	-	-
UPT TEMPURAN										
306	SD NEGERI JAMBU						-	-	-	-
307	SD NEGERI SIDOAGUNG 1						-	-	-	-
308	SD NEGERI SIDOAGUNG 3						-	-	-	-
309	SD NEGERI SIDOAGUNG 2						820.700	-	-	820.700
310	SD NEGERI TUGUREJO						-	-	-	-
311	SD NEGERI RINGINANOM 2						439.600	-	-	439.600
312	SD NEGERI TEMPUREJO 2		30.000				1.329.200	-	30.000	1.359.200
313	SD NEGERI PRAJEGSARI 1						-	-	-	-
314	SD NEGERI KALISARI 1						-	-	-	-
315	SD NEGERI TANGGULREJO 1						-	-	-	-
316	SD NEGERI RINGINANOM 1						-	-	-	-
317	SD NEGERI KEMUTUK		9.600	40.000			-	-	49.600	49.600
318	SDN GIRIREJO 2						-	-	-	-
319	SD NEGERI PRAJEGSARI 2						-	-	-	-
320	SD NEGERI BAWANG						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
321	SD NEGERI SUMBERARUM 1						-	-	-	-
322	SD NEGERI JOGOMULYO						-	-	-	-
323	SD NEGERI SUMBERARUM 2						-	-	-	-
324	SD NEGERI TEMANGGAL						-	-	-	-
325	SD NEGERI KALISARI 2						-	-	-	-
326	SD NEGERI GIRIREJO 1						-	-	-	-
327	SD NEGERI TEMPUREJO 1						-	-	-	-
328	SD NEGERI GROWONG						-	-	-	-
UPT TEGALREJO										
329	SD NEGERI KEBONAGUNG						-	-	-	-
330	SD NEGERI BANYUURIP 2						-	-	-	-
331	SDN KLOPO 2						-	-	-	-
332	SD NEGERI DONOROJO						-	-	-	-
333	SDN DLIMAS						-	-	-	-
334	SD NEGERI TAMPINGAN 2						-	-	-	-
335	SD NEGERI WONOSUKO						-	-	-	-
336	SD NEGERI SUKOREJO						-	-	-	-
337	SD NEGERI SIDOREJO 1						-	-	-	-
338	SD NEGERI DAWUNG						-	-	-	-
339	SD NEGERI PURWOSARI						54.921	-	-	54.921
340	SDN GIRIREJO						-	-	-	-
341	SD NEGERI TAMPINGAN 1						-	-	-	-
342	SD NEGERI GLAGAHOMBO						-	-	-	-
343	SD NEGERI NGASEM						-	-	-	-
344	SD NEGERI SOROYUDAN						-	-	-	-
345	SD NEGERI BANYUURIP 1						7.000.000	-	-	7.000.000
346	SDN MANGUNREJO						10	-	-	10
347	SD NEGERI PURWODADI						-	-	-	-
348	SD NEGERI KLOPO 1						-	-	-	-
349	SD NEGERI JAPAN						-	-	-	-
350	SD NEGERI WONOKERTO						-	-	-	-
351	SD NEGERI GEGER						-	-	-	-
352	SD NEGERI TEGALREJO						-	-	-	-
353	SDN BANYUSARI						-	-	-	-
354	SD NEGERI NGADIREJO						200.000	-	-	200.000
UPT SAWANGAN										
355	SD NEGERI BUTUH 1						-	-	-	-
356	SD NEGERI PODOSOKO 1						-	-	-	-
357	SD NEGERI SAWANGAN 3			20.000			-	-	20.000	20.000
358	SD NEGERI BUTUH 2						-	-	-	-
359	SD NEGERI SORONALAN 2						-	-	-	-
360	SD NEGERI BANYUROTO 1						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
361	SD NEGERI KETEP 1						-	-	-	-
362	SD NEGERI PODOSOKO 2						901.812	-	-	901.812
363	SD NEGERI JATI 3						-	-	-	-
364	SD NEGERI SORONALAN 1						-	-	-	-
365	SD NEGERI KROGOWANAN						-	-	-	-
366	SD NEGERI JATI 1						-	-	-	-
367	SD NEGERI WONOLELO 3						-	-	-	-
368	SD NEGERI PODOSOKO 4						-	-	-	-
369	SD NEGERI MANGUNSARI 1						-	-	-	-
370	SD NEGERI SAWANGAN 4						-	-	-	-
371	SD NEGERI SAWANGAN 1						-	-	-	-
372	SD NEGERI MANGUNSARI 3						-	-	-	-
373	SD NEGERI WONOLELO 4						-	-	-	-
374	SD NEGERI WULUNGGUNUN						-	-	-	-
375	SD NEGERI TIRTOSARI 1						110	-	-	110
376	SD NEGERI GANTANG 2						-	-	-	-
377	SD NEGERI KAPUHAN 2						-	-	-	-
378	SD NEGERI WONOLELO 1						-	-	-	-
379	SD NEGERI KAPUHAN 1						-	-	-	-
380	SD NEGERI GONDOWANGI 1						-	-	-	-
381	SD NEGERI JATI 2					242.500	-	-	242.500	242.500
382	SD NEGERI GANTANG 1						-	-	-	-
UPT KAJORAN										
383	SDN PANDANRETNO						270.000	-	-	270.000
384	SD NEGERI SUTOPATI 1			893.963			2.575.000	-	893.963	3.468.963
385	SD NEGERI WONOGIRI						-	-	-	-
386	SD NEGERI KAJORAN 2						-	-	-	-
387	SD NEGERI BANGSRI						-	-	-	-
388	SD NEGERI KUWADERAN 1						-	-	-	-
389	SD NEGERI SAMBAK						32.327	-	-	32.327
390	SD NEGERI BAMBUSARI						108.500	-	-	108.500
391	SD NEGERI WUWUHARJO 2					56.000	319.000	-	56.000	375.000
392	SD NEGERI BANJARETNO						420.000	-	-	420.000
393	SD NEGERI KAJORAN 1						-	-	-	-
394	SD NEGERI NGENDROSARI						-	-	-	-
395	SD NEGERI SUTOPATI 3						49	-	-	49
396	SD NEGERI WUWUHARJO 1						-	-	-	-
397	SD NEGERI KUWADERAN 2						-	-	-	-
398	SD NEGERI NGARGOSARI						3.500.000	-	-	3.500.000
399	SD NEGERI SUTOPATI 2						-	-	-	-
400	SD NEGERI SIDOWANGI						-	-	-	-
401	SD NEGERI KRINJING	260.432	102.000	235.980			1.184.380	-	598.412	1.782.792

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
402	SD NEGERI MANGUNREJO						-	-	-	-
403	SD NEGERI SUTOPATI 4						-	-	-	-
404	SD NEGERI LESANPURO						-	-	-	-
405	SD NEGERI SIDOREJO						-	-	-	-
406	SD NEGERI SUTOPATI 5						-	-	-	-
407	SD NEGERI SUKOMULYO						88.000	-	-	88.000
408	SD NEGERI BUMIAYU						-	-	-	-
409	SD NEGERI PANDANSARI						-	-	-	-
410	SD NEGERI PUCUNGROTO						-	-	-	-
411	SD NEGERI BANJARAGUNG						-	-	-	-
UPT NGLUWAR										
412	SD NEGERI SOMOKATON 1						153.000	-	-	153.000
413	SD NEGERI PAKUNDEN 1						-	-	-	-
414	SD NEGERI DRUJU 2						-	-	-	-
415	SD NEGERI NGLUWAR 1						157.302	-	-	157.302
416	SD NEGERI PAKUNDEN 3						195.462	-	-	195.462
417	SD NEGERI NGLUWAR 3	308.198		300			159.128	-	308.498	467.626
418	SD NEGERI BLONGKENG 1						982.000	-	-	982.000
419	SD NEGERI BLONGKENG 3						-	-	-	-
420	SD NEGERI KARANGTALUN 1						2.525.364	-	-	2.525.364
421	SD NEGERI BLIGO 1						543.747	-	-	543.747
422	SD NEGERI SOMOKATON 2						156.732	-	-	156.732
423	SD NEGERI JAMUS 1	317.117	48.000	51.672			555.750	-	416.789	972.539
424	SD NEGERI NGLUWAR 2						468.866	-	-	468.866
425	SD NEGERI PLOSOGEDE 1						206.625	-	-	206.625
426	SD NEGERI KARANGTALUN 2		8.100				177.926	-	8.100	186.026
427	SD NEGERI JAMUS 2						42.306	-	-	42.306
428	SD NEGERI BLIGO 3						-	-	-	-
429	SD NEGERI PAKUNDEN 2						200.043	-	-	200.043
430	SD NEGERI BLIGO 2						-	-	-	-
UPT NGABLAH										
431	SD NEGERI KANIGORO 1						-	-	-	-
432	SD NEGERI SELOPROJO						-	-	-	-
433	SD NEGERI JOGOYASAN						-	-	-	-
434	SD NEGERI MADYOGONDO 3						-	-	-	-
435	SD NEGERI KANIGORO 2						-	-	-	-
436	SD NEGERI GIRIREJO 2						997.846	-	-	997.846
437	SD NEGERI MAGERSARI						-	-	-	-
438	SD NEGERI BANDUNGREJO						-	-	-	-
439	SD NEGERI PAGERGUNUNG						27.712	-	-	27.712
440	SD NEGERI PANDEAN 1						-	-	-	-
441	SD NEGERI NGABLAH 2						24.000	-	-	24.000

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
442	SD NEGERI TEJOSARI						-	-	-	-
443	SD NEGERI SELOMIRAH						1.077.647	-	-	1.077.647
444	SD NEGERI GENIKAN						-	-	-	-
445	SD NEGERI PANDEAN 2						-	-	-	-
446	SD NEGERI JOGONAYAN						-	-	-	-
447	SD NEGERI NGABLAH 1						-	-	-	-
448	SD NEGERI GIRIREJO 3	268.459		10.000			83.628	-	278.459	362.087
449	SD NEGERI SUMBEREJO 1						-	-	-	-
450	SD NEGERI SUMBEREJO 2						-	-	-	-
451	SD NEGERI KEDITAN						129.971	-	-	129.971
452	SD NEGERI NGABLAH 5						-	-	-	-
453	SD NEGERI MADYOGONDO 2						-	-	-	-
UPT SECANG										
454	SD NEGERI SECANG 1			22.200		60.000	-	-	82.200	82.200
455	SD NEGERI KALIJOSO						-	-	-	-
456	SD NEGERI CANDISARI						-	-	-	-
457	SD NEGERI KRINCING						-	-	-	-
458	SDN PURWOSARI						40.800	-	-	40.800
459	SD NEGERI SIDOMULYO						-	-	-	-
460	SD NEGERI NGADIROJO		30.000	12.000		30.000	-	-	72.000	72.000
461	SD NEGERI PAYAMAN 2						-	-	-	-
462	SD NEGERI PANCURANMAS						-	-	-	-
463	SD NEGERI MADYOCONDRO	1		200			-	-	201	201
464	SD NEGERI KARANGKAJEN						-	-	-	-
465	SD NEGERI KUWALUHAN						-	-	-	-
466	SD NEGERI PUCANG						-	-	-	-
467	SD NEGERI GIRIKULON						-	-	-	-
468	SD NEGERI PAYAMAN 1						-	-	-	-
469	SD NEGERI JAMBEWANGI						-	-	-	-
470	SD NEGERI SETAN						-	-	-	-
471	SD NEGERI NGABEAN						-	-	-	-
472	SD NEGERI SECANG 3						-	4.232.900	-	4.232.900
473	SD NEGERI PIRIKAN						1	-	-	1
474	SD NEGERI DONOMULYO						-	-	-	-
475	SD NEGERI MADUSARI						-	-	-	-
476	SD NEGERI SECANG 2						-	-	-	-
UPT BOROBUKUR										
477	SD NEGERI TANJUNGSARI	1.139.996					-	-	1.139.996	1.139.996
478	SD NEGERI CANDIREJO 1						-	-	-	-
479	SD NEGERI NGADIHARJO 1						-	-	-	-
480	SD NEGERI SATU ATAP KER						-	-	-	-
481	SD NEGERI GIRIPURNO 1						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
482	SD NEGERI BUMIHARJO						832.517	-	-	832.517
483	SD NEGERI BIGARAN						-	-	-	-
484	SD NEGERI KEBONSARI						-	-	-	-
485	SD NEGERI NGADIHARJO 2						-	-	-	-
486	SD NEGERI NGARGOGONDO						-	-	-	-
487	SD NEGERI RINGINPUTIH 2						-	-	-	-
488	SD NEGERI GIRIPURNO 2						27.009	-	-	27.009
489	SD NEGERI GIRITENGAH 2						11.600.000	-	-	11.600.000
490	SD NEGERI RINGINPUTIH 1						-	-	-	-
491	SD NEGERI CANDIREJO 4						-	-	-	-
492	SD NEGERI SAMBENG						-	-	-	-
493	SD NEGERI TUKSONGO 1						-	-	-	-
494	SD NEGERI KEMBANGLIMUS						-	-	-	-
495	SD NEGERI GIRITENGAH 1						-	-	-	-
496	SD NEGERI RINGINPUTIH 3						-	-	-	-
497	SD NEGERI TEGALARUM						-	-	-	-
498	SD NEGERI BOROBUDUR 1						7.146.074	-	-	7.146.074
499	SD NEGERI KARANGANYAR						-	-	-	-
500	SD NEGERI BOROBUDUR 2		827.400				-	-	827.400	827.400
501	SD NEGERI MAJAKSINGI						-	-	-	-
502	SD NEGERI WANUREJO						-	-	-	-
503	SD NEGERI KARANGREJO						-	-	-	-
UPT WINDUSARI										
504	SD NEGERI TANJUNGSARI 2						6.233.600	-	-	6.233.600
505	SD NEGERI GONDANGREJO						129	-	-	129
506	SD NEGERI TANJUNGSARI 1						268	-	-	268
507	SD NEGERI DAMPIT						-	-	-	-
508	SD NEGERI WONOROTO						31.779.941	-	-	31.779.941
509	SD NEGERI TINJUMOYO			40.000			-	-	40.000	40.000
510	SD NEGERI PASANGSARI						257.580	-	-	257.580
511	SD NEGERI SEMEN						31	-	-	31
512	SD NEGERI WINDUSARI 2						10.668	-	-	10.668
513	SDN KALIJOSO						1.050.101	-	-	1.050.101
514	SD NEGERI GENITO						-	-	-	-
515	SD NEGERI NGEMPLAK						547.650	850.000	-	1.397.650
516	SD NEGERI KENTENGSAI						-	-	-	-
517	SD NEGERI MANGUNSARI						1.652.604	-	-	1.652.604
518	SD NEGERI KEMBANGKUNIN						109.560	-	-	109.560
519	SD NEGERI BANDARSEDAYU						-	-	-	-
520	SD NEGERI GUNUNGSARI						136.000	-	-	136.000
521	SD NEGERI BANJARSARI 2						-	9.015.000	-	9.015.000
522	SD NEGERI WINDUSARI 1						333	-	-	333

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
523	SD NEGERI CANDISARI	3.820.267	450.000	228.000			3.250.000	-	4.498.267	7.748.267
524	SD NEGERI KEMBANGKUNIN						85.061	-	-	85.061
525	SD NEGERI GIRIMULYO						9.901.300	-	-	9.901.300
UPT CANDIMULYO										
526	SDN TRENTEN 1						-	-	-	-
527	SD NEGERI TAMPIRKULON 1						-	-	-	-
528	SD NEGERI MEJING 2						-	-	-	-
529	SD NEGERI GENENG 2						-	-	-	-
530	SD NEGERI SURODADI 1						270.000	-	-	270.000
531	SD NEGERI BATEH						-	-	-	-
532	SD NEGERI TEMPAK 2						-	-	-	-
533	SD NEGERI GENENG 1						-	-	-	-
534	SD NEGERI TEMPURSARI						-	-	-	-
535	SD NEGERI PODOSOKO						-	-	-	-
536	SD NEGERI GIYANTI						-	-	-	-
537	SD NEGERI CANDIMULYO 1						-	-	-	-
538	SD NEGERI SURODADI 3						-	-	-	-
539	SD NEGERI PAGER						-	-	-	-
540	SD NEGERI SONOREJO						-	-	-	-
541	SD NEGERI TEMBELANG						-	-	-	-
542	SD NEGERI TEGALSARI 2						-	-	-	-
543	SD NEGERI TAMPIRKULON 2						6.004	-	-	6.004
544	SD NEGERI KEBONREJO						-	-	-	-
545	SD NEGERI SUROJOYO						-	-	-	-
546	SD NEGERI CANDIMULYO 2						-	-	-	-
547	SD NEGERI TEMPAK 1						-	-	-	-
548	SD NEGERI MEJING 1						-	-	-	-
549	SD NEGERI PURWOREJO						-	-	-	-
550	SD NEGERI BENINGAN						-	-	-	-
551	SD NEGERI TRENTEN 2						-	-	-	-
552	SD NEGERI KEMBARAN						-	-	-	-
553	SD NEGERI TAMPIR WETAN						270.000	-	-	270.000
	TOTAL DANA BOS SD	11.726.701	3.011.450	2.500.435	-	1.450.720	181.027.170	20.847.900	19.039.306	220.914.376

B. KAS BOS SMP NEGERI PER SEKC

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DI SETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
1	SMP NEGERI 1 MUNTILAN						-	-	-	-
2	SMP NEGERI 2 MUNTILAN						-	-	-	-
3	SMP NEGERI 3 MUNTILAN						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPh 21	PPh 23	PPh 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
4	SMP NEGERI 1 SALAMAN						-	-	-	-
5	SMP NEGERI 2 SALAMAN						-	-	-	-
6	SMP NEGERI 3 SALAMAN						-	80.000.000	-	80.000.000
7	SMP NEGERI 1 BOROBUDUR						-	-	-	-
8	SMP NEGERI 2 BOROBUDUR						-	-	-	-
9	SMP NEGERI 1 SRUMBUNG						-	-	-	-
10	SMP NEGERI 2 SRUMBUNG						-	-	-	-
11	SMP NEGERI 1 DUKUN						-	-	-	-
12	SMP NEGERI 2 DUKUN						-	-	-	-
13	SMP NEGERI 1 MUNGKID						-	-	-	-
14	SMP NEGERI 2 MUNGKID						-	-	-	-
15	SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID						-	-	-	-
16	SMP NEGERI 1 MERTOYUDA						47.493	-	-	47.493
17	SMP NEGERI 2 MERTOYUDA						-	-	-	-
18	SMP NEGERI 3 MERTOYUDA						-	-	-	-
19	SMP NEGERI 1 TEGALREJO						-	-	-	-
20	SMP NEGERI 2 TEGALREJO			48.000			-	-	48.000	48.000
21	SMP NEGERI 1 BANDONGAN						-	-	-	-
22	SMP NEGERI 2 BANDONGAN						-	-	-	-
23	SMP NEGERI 1 GRABAG						-	-	-	-
24	SMP NEGERI 2 GRABAG						-	-	-	-
25	SMP NEGERI 3 GRABAG						-	-	-	-
26	SMP NEGERI 1 NGLUWAR						-	-	-	-
27	SMP NEGERI 1 TEMPURAN						-	-	-	-
28	SMP NEGERI 2 TEMPURAN						-	-	-	-
29	SMP NEGERI 3 TEMPURAN						-	-	-	-
30	SMP NEGERI 1 SECANG						-	-	-	-
31	SMP NEGERI 2 SECANG						-	-	-	-
32	SMP NEGERI 3 SECANG						-	-	-	-
33	SMP NEGERI 1 SAWANGAN						-	-	-	-
34	SMP NEGERI 2 SAWANGAN						287	10.000.000	-	10.000.287
35	SMP NEGERI 3 SAWANGAN						-	-	-	-
36	SMP NEGERI 1 CANDIMULYO						32	-	-	32
37	SMP NEGERI 2 CANDIMULYO						-	-	-	-
38	SMP NEGERI 3 CANDIMULYO						-	-	-	-
39	SMP NEGERI 1 SALAM						-	-	-	-
40	SMP NEGERI 2 SALAM						-	-	-	-
41	SMP NEGERI 3 SALAM						-	-	-	-
42	SMP NEGERI 1 KAJORAN						-	-	-	-
43	SMP NEGERI 2 KAJORAN		27.000	16.800		1.421.000	500	-	1.464.800	1.465.300
44	SMP NEGERI 1 KALIANGKRIK						-	-	-	-
45	SMP NEGERI 2 KALIANGKRIK						-	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	PAJAK YANG BELUM DISETOR					TOTAL KAS			
		PPN	PPH 21	PPH 23	PPH 4	SSPD	DANA BOS REGULER	DANA BOS KINERJA	SELAIN DANA BOS	JUMLAH KAS
46	SMP NEGERI 1 PAKIS						-	-	-	-
47	SMP NEGERI 2 PAKIS						-	-	-	-
48	SMP NEGERI 3 PAKIS						-	-	-	-
49	SMP NEGERI 1 NGABLAK		42.000	434.021		648.000	-	-	1.124.021	1.124.021
50	SMP NEGERI 2 NGABLAK						-	-	-	-
51	SMP NEGERI 1 WINDUSARI						-	-	-	-
52	SMP NEGERI 2 WINDUSARI						-	-	-	-
53	SMPN 3 SATU ATAP BOROBLO						-	-	-	-
54	SMPN 4 Satu Atap Pakis			8.236		20.593	19.736.389	-	28.829	19.765.218
55	SMPN 5 Pakis Pogalan						-	-	-	-
56	SMPN 3 SATU ATAP NGABLA						-	-	-	-
57	SMPN 4 SATAP SAWANGAN						-	-	-	-
58	SMPN 3 SATU ATAP KALIANG						-	-	-	-
59	SMPN 4 SATAP SALAMAN						-	-	-	-
	TOTAL DANA BOS SMP	-	69.000	507.057	-	2.089.593	19.784.701	90.000.000	2.665.650	112.450.351
	TOTAL DANA BOS SD DAN SMP	11.726.701	3.080.450	3.007.492	-	3.540.313	200.811.871	110.847.900	21.704.956	333.364.727

C. KAS BOS KESETARAAN

No	Uraian
1	Saldo Kas Tunai
2	Jasa Giro disetor ke RKUD tang
	Jumlah

Lampiran 5.25
Rincian Piutang Per Tahun

No	Jenis Piutang / Nama SKPD	PIUTANG TAHUN			TOTAL PIUTANG
		2023	2022	s.d 2021	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	PIUTANG PAJAK				
	BPPKAD				
1	Piutang Pajak Hotel	31.672.196,00	780.000,00	57.969.881,00	90.422.077,00
2	Piutang Pajak Restoran	479.176.590,00	297.650.532,00	615.886.986,00	1.392.714.108,00
3	Piutang Pajak Hiburan	5.215.000,00	650.000,00	30.500.000,00	36.365.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	120.649.855,00	57.086.390,00	344.649.130,48	522.385.375,48
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.117.482.984,00	-	-	4.117.482.984,00
6	Piutang Pajak Parkir	1.350.490,00	86.500,00	22.353.616,00	23.790.606,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	92.311.280,00	1.133.520,00	51.713.869,00	145.158.669,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	78.818.777,00	37.891.996,00	408.580.876,00	525.291.649,00
9	Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	4.732.251.598,00	3.905.075.558,00	22.100.744.391,00	30.738.071.547,00
	TOTAL PIUTANG PAJAK	9.658.928.770,00	4.300.354.496,00	23.632.398.749,48	37.591.682.015,48
B	PIUTANG RETRIBUSI				
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	a. DLH	425.000,00	-	-	425.000,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	-			
	a. Disdagkop UKM	2.763.000,00	600.000,00	3.264.654.851,65	3.268.017.851,65
	b. Dispeterikan	2.193.800,00	4.022.000,00	21.099.396,00	27.315.196,00
	JUMLAH	4.956.800,00	4.622.000,00	3.285.754.247,65	3.295.333.047,65
3	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
	a. Diskominfo	-	-	15.947.605,00	15.947.605,00
4	Piutang Retribusi Terminal				
	a. Dishub	3.910.000,00	6.135.000,00	110.710.000,00	120.755.000,00
5	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir				
	a. Disdagkop UKM	78.700.000,00	5.000.000,00	-	83.700.000,00
	b. Dispeterikan	-	-	-	-
	JUMLAH	78.700.000,00	5.000.000,00	-	83.700.000,00
6	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	a. Dishub	-	1.750.000,00	-	1.750.000,00
	TOTAL PIUTANG RETRIBUSI	87.991.800,00	17.507.000,00	3.412.411.852,65	3.517.910.652,65
C	PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SYAH				
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)				
	a. BPPKAD				-
2	Piutang Pendapatan BLUD				
	a. Dinkes				
	-RSUD Merah Putih				
	Piutang Pasien Umum	1.427.115.166,00	399.746.563,00	34.822.409,00	1.861.684.138,00
	Piutang Pasien Covid	58.993.500,00			58.993.500,00
	Piutang Pasien BPJS	6.643.916.920,00			6.643.916.920,00
	Piutang Pasien Jasa Raharja				-
	Piutang Sewa				-
	Jumlah Piutang BLUD di RSD Merah Putih	8.130.025.586,00	399.746.563,00	34.822.409,00	8.564.594.558,00
	-Puskesmas	383.566.872,00	-	-	383.566.872,00
	Jumlah Piutang BLUD di Dinkes	8.513.592.458,00	399.746.563,00	34.822.409,00	8.948.161.430,00
	b. RSUD Muntilan				
	Pasien Umum	818.198.426,00	550.025.215,00	2.064.487.426,50	3.432.711.067,50

No	Jenis Piutang / Nama SKPD	PIUTANG TAHUN			TOTAL PIUTANG
		2023	2022	s.d 2021	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Pasien BPJS/JKN	7.869.001.607,00	-	-	7.869.001.607,00
	Pasien Jamkes Lainnya - Covid-19	-	-	-	-
	Usaha Lainnya - Sewa Kantin	-	-	750.000,00	750.000,00
	Usaha Lainnya - Pemeriksaan Lab	-	-	-	-
	Jumlah Piutang BLUD di RSUD Muntilan	8.687.200.033,00	550.025.215,00	2.065.237.426,50	11.302.462.674,50
	TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH	17.200.792.491,00	949.771.778,00	2.100.059.835,50	20.250.624.104,50
D	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH				
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.631.869.921,00	-	-	1.631.869.921,00
2.	Piutang Bagi Hasil BBNKB	384.532.910,00	-	-	384.532.910,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB	4.796.176.546,00	-	-	4.796.176.546,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	17.204.966,00	-	-	17.204.966,00
	TOTAL PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	6.829.784.343,00	-	-	6.829.784.343,00
	TOTAL PIUTANG	33.777.497.404,00	5.267.633.274,00	29.144.870.437,63	68.190.001.115,63

Lampiran 5.26
Rincian Penyisihan Piutang per SKPD

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)				
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+7+9+11	13=3-12	
DINKES		383.566.872,00	383.566.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.566.872,00
1	Retribusi Pelayanan Labkesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan BLUD Puskesmas	383.566.872,00	383.566.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.566.872,00
RSUD MERAH PUTIH		8.564.594.558,00	8.130.025.586,00	-	434.568.972,00	130.370.691,60	-	-	-	-	-	130.370.691,60	8.434.223.866,40
1	Piutang Pasien Umum	1.861.684.138,00	1.427.115.166,00	-	434.568.972,00	130.370.691,60	-	-	-	-	-	130.370.691,60	1.731.313.446,40
2	Piutang Pasien Covid	58.993.500,00	58.993.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.993.500,00
3	Piutang BPJS	6.643.916.920,00	6.643.916.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.643.916.920,00
4	Pasien Jasa Rahaarja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BPJS TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jampersal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sewa Kantin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL		8.948.161.430,00	8.513.592.458,00	-	434.568.972,00	130.370.691,60	-	-	-	-	-	130.370.691,60	8.817.790.738,40
No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)				
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%			
RSUD MUNTILAN		11.302.462.674,50	8.687.200.033,00	-	860.512.984,00	258.153.895,20	527.042.703,00	263.521.351,50	1.227.706.954,50	1.227.706.954,50	1.749.382.201,20	9.553.080.473,30	
1	Piutang Pasien Umum	3.432.711.067,50	818.198.426,00	-	859.762.984,00	257.928.895,20	527.042.703,00	263.521.351,50	1.227.706.954,50	1.227.706.954,50	1.749.157.201,20	1.683.553.866,30	
2	Piutang Pasien BPJS/JKN	7.869.001.607,00	7.869.001.607,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.869.001.607,00	
3	Piutang Pasien Jamkes Lainnya - Jasa Rahaarja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Piutang Pasien Jamkes Lainnya - Covid-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Piutang Usaha Lainnya - Sewa Kantin	750.000,00	-	-	750.000,00	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00	525.000,00	
6	Piutang Usaha Lainnya - Pemeriksaan Lab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL		11.302.462.674,50	8.687.200.033,00	-	860.512.984,00	258.153.895,20	527.042.703,00	263.521.351,50	1.227.706.954,50	1.227.706.954,50	1.749.382.201,20	9.553.080.473,30	

No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+7+9+11	13=3-12
			Kategori									
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 75%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
DLH		425.000,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	425.000,00
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	425.000,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	425.000,00
SUBTOTAL		425.000,00	425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	425.000,00
			Kategori									
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 75%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
DISDAKOP		3.351.717.851,65	81.463.000,00	-	5.600.000,00	1.680.000,00	53.758.830,00	40.319.122,50	3.210.896.021,65	3.210.896.021,65	3.252.895.144,15	98.822.707,50
1	Piutang Retribusi Los	203.012.810,65	-	-	-	-	20.285.813,00	15.214.359,75	182.726.997,65	182.726.997,65	197.941.357,40	5.071.453,25
2	Piutang Retribusi Kios	3.065.005.041,00	2.763.000,00	-	600.000,00	180.000,00	33.473.017,00	25.104.762,75	3.028.169.024,00	3.028.169.024,00	3.053.453.786,75	11.551.254,25
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	83.700.000,00	78.700.000,00	-	5.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	82.200.000,00
SUBTOTAL		3.351.717.851,65	81.463.000,00	-	5.600.000,00	1.680.000,00	53.758.830,00	40.319.122,50	3.210.896.021,65	3.210.896.021,65	3.252.895.144,15	98.822.707,50
			Kategori									
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 75%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
TERIK		27.315.196,00	2.193.800,00	-	6.039.000,00	1.811.700,00	2.156.208,00	1.617.156,00	16.926.188,00	16.926.188,00	20.355.044,00	6.960.152,00
1	Piutang Retribusi Kios	27.315.196,00	2.193.800,00	-	6.039.000,00	1.811.700,00	2.156.208,00	1.617.156,00	16.926.188,00	16.926.188,00	20.355.044,00	6.960.152,00
SUBTOTAL		27.315.196,00	2.193.800,00	-	6.039.000,00	1.811.700,00	2.156.208,00	1.617.156,00	16.926.188,00	16.926.188,00	20.355.044,00	6.960.152,00
			Kategori									
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 75%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
DISKO		15.947.605,00	-	-	8.663.340,00	2.599.002,00	-	-	7.284.265,00	7.284.265,00	9.883.267,00	6.064.338,00
1.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	15.947.605,00	-	-	8.663.340,00	2.599.002,00	-	-	7.284.265,00	7.284.265,00	9.883.267,00	6.064.338,00
SUBTOTAL		15.947.605,00	-	-	8.663.340,00	2.599.002,00	-	-	7.284.265,00	7.284.265,00	9.883.267,00	6.064.338,00

No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+7+9+11	13=3-12
No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 75%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
DISHUB		122.505.000,00	3.910.000,00	-	11.608.500,00	3.482.550,00	2.750.000,00	2.062.500,00	104.236.500,00	104.236.500,00	109.781.550,00	12.723.450,00
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	115.446.500,00	3.380.000,00	-	5.310.000,00	1.593.000,00	2.520.000,00	1.890.000,00	104.236.500,00	104.236.500,00	107.719.500,00	7.727.000,00
2.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	5.308.500,00	530.000,00	-	4.548.500,00	1.364.550,00	230.000,00	172.500,00	-	-	1.537.050,00	3.771.450,00
3.	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.750.000,00	-	-	1.750.000,00	525.000,00	-	-	-	-	525.000,00	1.225.000,00
SUBTOTAL		122.505.000,00	3.910.000,00	-	11.608.500,00	3.482.550,00	2.750.000,00	2.062.500,00	104.236.500,00	104.236.500,00	109.781.550,00	12.723.450,00
No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)			
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%		
BPPKAD		37.591.682.015,48	9.658.928.770,00	-	4.300.354.496,00	1.290.106.348,80	10.494.620.255,00	5.247.310.127,50	13.137.778.494,48	13.137.778.494,48	19.675.194.970,78	17.916.487.044,70
1	Piutang Pajak Hotel	90.422.077,00	31.672.196,00	-	780.000,00	234.000,00	14.553.700,00	7.276.850,00	43.416.181,00	43.416.181,00	50.927.031,00	39.495.046,00
2	Piutang Pajak Restoran	1.392.714.108,00	479.176.590,00	-	297.650.532,00	89.295.159,60	507.492.689,00	253.746.344,50	108.394.297,00	108.394.297,00	451.435.801,10	941.278.306,90
3	Piutang Pajak Hiburan	36.365.000,00	5.215.000,00	-	650.000,00	195.000,00	26.350.000,00	13.175.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	17.520.000,00	18.845.000,00
4	Piutang Pajak Reklame	522.385.375,48	120.649.855,00	-	57.086.390,00	17.125.917,00	127.599.161,00	63.799.580,50	217.049.969,48	217.049.969,48	297.975.466,98	224.409.908,50
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	4.117.482.984,00	4.117.482.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.117.482.984,00
6	Piutang Pajak Parkir	23.790.606,00	1.350.490,00	-	86.500,00	25.950,00	18.457.112,00	9.228.556,00	3.896.504,00	3.896.504,00	13.151.010,00	10.639.596,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	145.158.669,00	92.311.280,00	-	1.133.520,00	340.056,00	45.929.400,00	22.964.700,00	5.784.469,00	5.784.469,00	29.089.225,00	116.069.444,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	525.291.649,00	78.818.777,00	-	37.891.996,00	11.367.598,80	271.013.287,00	135.506.643,50	137.567.589,00	137.567.589,00	284.441.831,30	240.849.817,70
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30.738.071.547,00	4.732.251.598,00	-	3.905.075.558,00	1.171.522.667,40	9.483.224.906,00	4.741.612.453,00	12.617.519.485,00	12.617.519.485,00	18.530.654.605,40	12.207.416.941,60
SUBTOTAL		37.591.682.015,48	9.658.928.770,00	-	4.300.354.496,00	1.290.106.348,80	10.494.620.255,00	5.247.310.127,50	13.137.778.494,48	13.137.778.494,48	19.675.194.970,78	17.916.487.044,70

No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)				
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+7+9+11	13=3-12	
No.	Jenis Piutang	Nilai Tagihan per 31 Desember 2023	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (s/d 1 th)		Kurang lancar (1 s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (>2-5 th)		Macet (> 5 th)				
			Nilai	Nilai Penyisihan 0%	Nilai	Nilai Penyisihan 30%	Nilai	Nilai Penyisihan 50%	Nilai	Nilai Penyisihan 100%			
BPPKAD		6.829.784.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.829.784.343,00
1	Piutang Transfer Antar Daerah	6.829.784.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.829.784.343,00
SUBTOTAL		6.829.784.343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.829.784.343,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTAN		68.190.001.115,63	26.947.713.061,00	-	5.627.347.292,00	1.688.204.187,60	11.080.327.996,00	5.554.830.257,50	17.704.828.423,63	17.704.828.423,63	24.947.862.868,73	43.242.138.246,90	

Lampiran 5.27
Rekap Penyisihan Piutang Per Rekening

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Saldo Awal Penyisihan	NRV	Penambahan		Pengurangan	
					Koreksi Saldo Awal	Penetapan	Koreksi Saldo Awal	Pembayaran
PAJAK								
1	Piutang Pajak Hotel	501.382.085,00	50.069.031,00	451.313.054,00	-	17.885.536.687,00	-	18.296.496.695,00
2	Piutang Pajak Restoran	1.763.670.328,00	385.074.983,50	1.378.595.344,50	-	29.712.085.179,00	-	29.917.335.807,00
3	Piutang Pajak Hiburan	31.150.000,00	15.475.000,00	15.675.000,00	-	4.731.821.197,00	-	4.726.606.197,00
4	Piutang Pajak Reklame	473.986.376,48	237.065.341,89	236.921.034,59	-	1.373.229.645,00	-	1.324.830.646,00
5	Piutang PPJ	3.713.061.401,00	-	3.713.061.401,00	-	46.059.423.288,00	-	45.655.001.705,00
6	Piutang Pajak Parkir	22.985.116,00	10.572.558,00	12.412.558,00	-	1.673.444.491,00	-	1.672.639.001,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	113.006.309,00	23.402.821,00	89.603.488,00	-	1.046.129.040,00	-	1.013.976.680,00
8	Piutang Pajak MBLB	677.091.999,00	355.267.584,40	321.824.414,60	-	3.797.497.116,00	-	3.769.062.835,00
9	Piutang PBBP2	27.611.928.019,00	16.382.043.645,50	11.229.884.373,50	-	46.101.721.623,00	-	42.975.578.095,00
10	Piutang BPHTB	-	-	-	-	40.216.949.117,00	-	40.216.949.117,00
SUB JUMLAH		34.908.261.633,48	17.458.970.965,29	17.449.290.668,19	-	192.597.837.383,00	-	189.568.476.778,00
RETRIBUSI								
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.137.750,00	-	4.137.750,00	-	45.035.000,00	-	48.747.750,00
2	Piutang Retribusi Los	220.078.097,00	196.447.600,15	23.630.496,85	55.122,00	323.801.507,00	55.122,35	340.866.793,00
3	Piutang Retribusi Kios	3.165.616.648,00	3.113.404.267,25	52.212.380,75	3.018.200,00	610.822.886,00	1.018.200,00	686.119.297,00
4	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	145.342.703,00	9.883.267,00	135.459.436,00	-	1.446.469.984,00	-	1.575.865.082,00

No	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Saldo Awal Penyisihan	NRV	Penambahan		Pengurangan	
					Koreksi Saldo Awal	Penetapan	Koreksi Saldo Awal	Pembayaran
5	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	150.798.900,00	124.992.060,00	25.806.840,00	-	185.800.200,00	-	221.152.600,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	7.122.500,00	691.350,00	5.183.150,00	-	32.556.000,00	-	34.370.000,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	7.820.000,00	-	7.820.000,00	-	861.138.250,00	-	785.258.250,00
8	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.825.000,00	-	6.825.000,00	-	37.825.000,00	-	42.900.000,00
9	Piutang Retribusi Persewaan Tanah	-	-	-	-	28.440.000,00	-	28.440.000,00
SUB JUMLAH		3.707.741.598,00	3.445.418.544,40	261.075.053,60	3.073.322,00	3.571.888.827,00	1.073.322,35	3.763.719.772,00
LAIN-LAIN PAD								
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	1.213.755,62	-	1.213.755,62	-	-	-	1.213.755,62
2	Piutang Pendapatan BLUD	14.967.960.934,50	1.487.293.280,40	13.480.667.654,10	11.943.190.582,00	189.269.006.036,00	4.517.169.731,00	191.412.363.717,00
SUB JUMLAH		14.969.174.690,12	1.487.293.280,40	13.481.881.409,72	11.943.190.582,00	189.269.006.036,00	4.517.169.731,00	191.413.577.472,62
JUMLAH		53.585.177.921,60	22.391.682.790,09	31.192.247.131,51	11.946.263.904,00	385.438.732.246,00	4.518.243.053,35	384.745.774.022,62

Lampiran 5.27
Rekap Penyisihan Piut:

No	Jenis Piutang	Penghapusan	Saldo Akhir (Nilai Piutang)	Nilai Penyisihan	NRV	Kenaikan/ (Penurunan) Penyisihan (audited)	Kenaikan Beban Penyisihan	(Penurunan) Lain-lain PAD yang Sah - LO	Penyisihan Penghapusan Piutang
PAJAK									
1	Piutang Pajak Hotel	-	90.422.077,00	50.927.031,00	39.495.046,00	858.000,00	933.000,00	75.000,00	
2	Piutang Pajak Restoran	165.705.592,00	1.392.714.108,00	451.435.801,10	941.278.306,90	149.177.713,60	149.227.313,60	49.600,00	82.816.896,00
3	Piutang Pajak Hiburan	-	36.365.000,00	17.520.000,00	18.845.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	-	
4	Piutang Pajak Reklame	-	522.385.375,48	297.975.466,98	224.409.908,50	60.910.125,09	61.583.332,59	673.207,50	
5	Piutang PPJ	-	4.117.482.984,00	-	4.117.482.984,00	-	-	-	
6	Piutang Pajak Parkir	-	23.790.606,00	13.151.010,00	10.639.596,00	2.578.452,00	2.578.452,00	-	
7	Piutang Pajak Air Tanah	-	145.158.669,00	29.089.225,00	116.069.444,00	5.686.404,00	5.686.404,00	-	
8	Piutang Pajak MBLB	180.234.631,00	525.291.649,00	284.441.831,30	240.849.817,70	19.291.562,40	19.291.562,40	-	90.117.315,50
9	Piutang PBBP2	-	30.738.071.547,00	18.530.654.605,40	12.207.416.941,60	2.148.610.959,90	2.632.643.785,60	484.032.825,70	
10	Piutang BPHTB	-	-	-	-	-	-	-	
SUB JUMLAH		345.940.223,00	37.591.682.015,48	19.675.194.970,78	17.916.487.044,70	2.389.158.216,99	2.873.988.850,19	484.830.633,20	172.934.211,50
RETRIBUSI									
1	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	425.000,00	-	425.000,00	-	-	-	
2	Piutang Retribusi Los	-	203.012.810,65	197.941.357,40	5.071.453,25	1.493.757,25	18.395.765,60	16.902.008,35	
3	Piutang Retribusi Kios	-	3.092.320.237,00	3.073.808.830,75	18.511.406,25	(39.595.436,50)	33.128.902,00	72.724.338,50	
4	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	15.947.605,00	9.883.267,00	6.064.338,00	-	-	-	

No	Jenis Piutang	Penghapusan	Saldo Akhir (Nilai Piutang)	Nilai Penyisihan	NRV	Kenaikan/ (Penurunan) Penyisihan (audited)	Kenaikan Beban Penyisihan	(Penurunan) Lain-lain PAD yang Sah - LO	Penyisihan Penghapusan Piutang
5	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	115.446.500,00	107.719.500,00	7.727.000,00	(17.272.560,00)	2.601.000,00	19.873.560,00	
6	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	5.308.500,00	1.537.050,00	3.771.450,00	845.700,00	1.174.500,00	328.800,00	
7	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	-	83.700.000,00	1.500.000,00	82.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
8	Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	1.750.000,00	525.000,00	1.225.000,00	525.000,00	525.000,00	-	
9	Piutang Retribusi Persewaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	
SUB JUMLAH		-	3.517.910.652,65	3.392.915.005,15	124.995.647,50	(52.503.539,25)	57.325.167,60	109.828.706,85	-
LAIN-LAIN PAD									
1	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-	-	
2	Piutang Pendapatan BLUD	-	20.250.624.104,50	1.879.752.892,80	18.370.871.211,70	392.459.612,40	402.004.083,30	9.544.470,90	
SUB JUMLAH		-	20.250.624.104,50	1.879.752.892,80	18.370.871.211,70	392.459.612,40	402.004.083,30	9.544.470,90	-
JUMLAH		345.940.223,00	61.360.216.772,63	24.947.862.868,73	36.412.353.903,90	2.729.114.290,14	3.333.318.101,09	604.203.810,95	172.934.211,50

Lampiran 5.28

Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimuka per SKPD

NO	NAMA SKPD		TANGGAL KONTRAK	MASA BERLAKU				TARIF		2022	
	URAIAN BEBAN	NOMOR KONTRAK		AWAL	AKHIR	TOTAL TAHUN	TOTAL BULAN	TARIF/ TAHUN	TARIF/ BULAN		
DLH											
a	Beban Sewa Tanah	HK.213/XI/2015		01/08/2022	30/11/2023		16	1.760.811,00	122.156,25	5	610.781,25
							ppn	193.689,00			
								1.954.500,00			
				01/12/2023	30/11/2028	5	60	9.050.000,00	167.425,00		
							ppn	995.500,00			
								10.045.500,00			
	JUMLAH							12.000.000,00	289.581,25		610.781,25
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023										
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023										
NO	NAMA SKPD		TANGGAL KONTRAK	MASA BERLAKU				TARIF		2020	
	URAIAN BEBAN	NOMOR KONTRAK		AWAL	AKHIR	TOTAL TAHUN	TOTAL BULAN	TARIF/ TAHUN	TARIF/ BULAN		
DPU PR											
1	Beban Sewa Tanah										
	Nuning Hardiyanti	050/441/06/XI/2020	25/11/2020	21/10/2020	21/10/2025	5	60	22.500.000,00	375.000,00	2	750.000,00
	MM Ponirah	050/441.A/06/XI/2020	25/11/2020	21/10/2020	21/10/2025	5	60	5.025.000,00	83.750,00	2	167.500,00
	Dulbasir	050/441.B/06/XI/2020	25/11/2020	21/10/2020	21/10/2025	5	60	5.775.000,00	96.250,00	2	192.500,00
	Mujiharto	050/441.C/06/XI/2020	25/11/2020	21/10/2020	21/10/2025	5	60	15.300.000,00	255.000,00	2	510.000,00
	Mukadi	050/452/06/XII/2020	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2025	5	60	750.000,00	12.500,00	1	12.500,00
	Sudiyana/Muhdiyono	050/452.A/06/XII/2020	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2025	5	60	5.400.000,00	90.000,00	1	90.000,00
	Ari Wibowo	050/452.B/06/XII/2020	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2025	5	60	19.875.000,00	331.250,00	1	331.250,00
	Gunadi	050/452.C/06/XII/2020	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2025	5	60	7.500.000,00	125.000,00	1	125.000,00
	Supriyanto	050/452.D/06/XII/2020	03/12/2020	15/12/2020	15/12/2025	5	60	26.400.000,00	440.000,00	1	440.000,00
	Ikhsani Puri Indriyati	050/451/06/XII/2020	03/12/2020	16/06/2020	16/06/2025	5	60	13.875.000,00	231.250,00	6	1.387.500,00
	Edi Supriyanto	050/451.A/06/XII/2020	03/12/2020	16/06/2020	16/06/2025	5	60	29.250.000,00	487.500,00	6	2.925.000,00
	Kawit	050/451.B/06/XII/2020	03/12/2020	16/06/2020	16/06/2025	5	60	30.000.000,00	500.000,00	6	3.000.000,00
	Dariyah		03/12/2020	16/06/2020	16/06/2025	5	60	2.625.000,00	43.750,00	6	262.500,00
	JUMLAH							184.275.000			10.193.750
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023										
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023										

NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	MASA BERLAKU				TARIF		2022
	URAIAN BEBAN			AWAL	AKHIR	TOTAL TAHUN	TOTAL BULAN	TARIF/ TAHUN	TARIF/ BULAN	
NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	MASA BERLAKU				TARIF		2019
	URAIAN BEBAN			AWAL	AKHIR	TOTAL TAHUN	TOTAL BULAN	TARIF/ TAHUN	TARIF/ BULAN	
DISDAGKOP UKM										
1	Beban Sewa Tanah									
	PKL Bambu Runcing	KL.701/IX/21/00.6.2019	10/09/2019	01/09/2019	31/08/2024	5	60	26.500.000,00	441.666,67	4 1.766.666,67
	JUMLAH							26.500.000,00	441.666,67	1.766.666,67
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023									
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023									
	TOTAL BEBAN DIBAYAR DI MUKA PEMDA PER 31 DESEMBER 2023									

Lampiran 5.28

Rincian Perhitungan Beban Dibayar Dimu

NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	BEBAN SEWA TANAH										JUMLAH
	URAIAN BEBAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
DLH													
a	Beban Sewa Tanah	HK.213/XI/2015	11	-								610.781,25	
			1	167.425,00	12	2.009.100,00	12	720,00	12	720,00	12	720,00	
	JUMLAH			1.511.143,75		2.009.100,00		2.009.100,00		2.009.100,00		2.009.100,00	
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023			1.511.143,75								1.511.143,75	
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023					2.009.100,00		2.009.100,00		2.009.100,00		2.009.100,00	
												10.045.500,00	
NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	BEBAN SEWA TANAH					JUMLAH					
	URAIAN BEBAN		2021	2022	2023	2024	2025						
DPU PR													
1	Beban Sewa Tanah												
	Nuning Hardiyanti	050/441/06/XI/2020	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	12	4.500.000,00	10	3.750.000,00	22.500.000,00
	MM Ponirah	050/441.A/06/XI/2020	12	1.005.000,00	12	1.005.000,00	12	1.005.000,00	12	1.005.000,00	10	837.500,00	5.025.000,00
	Dulbasir	050/441.B/06/XI/2020	12	1.155.000,00	12	1.155.000,00	12	1.155.000,00	12	1.155.000,00	10	962.500,00	5.775.000,00
	Mujiharto	050/441.C/06/XI/2020	12	3.060.000,00	12	3.060.000,00	12	3.060.000,00	12	3.060.000,00	10	2.550.000,00	15.300.000,00
	Mukadi	050/452/06/XII/2020	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	12	150.000,00	11	137.500,00	750.000,00
	Sudiyana/Muhdiyono	050/452.A/06/XII/2020	12	1.080.000,00	12	1.080.000,00	12	1.080.000,00	12	1.080.000,00	11	990.000,00	5.400.000,00
	Ari Wibowo	050/452.B/06/XII/2020	12	3.975.000,00	12	3.975.000,00	12	3.975.000,00	12	3.975.000,00	11	3.643.750,00	19.875.000,00
	Gunadi	050/452.C/06/XII/2020	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	11	1.375.000,00	7.500.000,00
	Supriyanto	050/452.D/06/XII/2020	12	5.280.000,00	12	5.280.000,00	12	5.280.000,00	12	5.280.000,00	11	4.840.000,00	26.400.000,00
	Ikhsani Puri Indriyati	050/451/06/XII/2020	12	2.775.000,00	12	2.775.000,00	12	2.775.000,00	12	2.775.000,00	6	1.387.500,00	13.875.000,00
	Edi Supriyanto	050/451.A/06/XII/2020	12	5.850.000,00	12	5.850.000,00	12	5.850.000,00	12	5.850.000,00	6	2.925.000,00	29.250.000,00
	Kawit	050/451.B/06/XII/2020	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	6	3.000.000,00	30.000.000,00
	Dariyah		12	525.000,00	12	525.000,00	12	525.000,00	12	525.000,00	6	262.500,00	2.625.000,00
	JUMLAH			36.855.000		36.855.000		36.855.000		36.855.000		26.661.250	184.275.000
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023							36.855.000					36.855.000
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023									36.855.000		26.661.250	63.516.250

NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	BEBAN SEWA TANAH						JUMLAH				
	URAIAN BEBAN		2023	2024	2025	2026	2027	2028					
NO	NAMA SKPD	NOMOR KONTRAK	BEBAN SEWA TANAH						JUMLAH				
	URAIAN BEBAN		2020	2021	2022	2023	2024						
DISDAGKOP UKM													
1	Beban Sewa Tanah												
	PKL Bambu Runcing	KL.701/IX/21/00.6.2019	12	5.300.000,00	12	5.300.000,00	12	5.300.000,00	12	5.300.000,00	8	3.533.333,33	26.500.000,00
	JUMLAH			5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		3.533.333,33	26.500.000,00
	BEBAN SEWA TANAH-LO TAHUN 2023							5.300.000,00					5.300.000,00
	BEBAN DIBAYAR DI MUKA 31 DESEMBER 2023											3.533.333,33	3.533.333,33
	TOTAL BEBAN DIBAYAR DI MUKA PEMDA PER												77.095.083,33

Lampiran 5.29
Rincian Persediaan per SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang	%
1	Disdikbud	604.512.441,00	4.398.524.476,00	4.468.184.576,00	534.852.341,00	(69.660.100,00)	(11,52)
2	Dinkes	27.013.578.730,60	62.220.148.704,00	65.682.163.225,03	23.551.564.209,57	(3.462.014.521,03)	(12,82)
3	RSUD Muntlan	5.363.527.590,04	37.154.815.317,00	36.860.029.985,07	5.658.312.921,97	294.785.331,93	5,50
4	DPU PR	9.874.564.826,00	3.663.438.593,00	2.355.462.203,00	11.182.541.216,00	1.307.976.390,00	13,25
5	DPRKP	5.009.910,00	354.080.045,00	350.725.095,00	8.364.860,00	3.354.950,00	66,97
6	Satpol PP	2.295.393.710,00	1.508.655.767,00	3.769.539.062,00	34.510.415,00	(2.260.883.295,00)	(98,50)
7	BPBD	1.607.436.599,00	1.015.401.604,00	869.615.057,00	1.753.223.146,00	145.786.547,00	9,07
8	Dinsos	808.102.390,00	3.310.207.191,00	3.389.518.771,00	728.790.810,00	(79.311.580,00)	(9,81)
9	Disperinnaker	6.282.315,00	2.148.136.014,00	2.132.934.439,00	21.483.890,00	15.201.575,00	241,97
10	Distanpangan	1.021.039.704,00	1.971.656.720,00	2.044.948.404,00	947.748.020,00	(73.291.684,00)	(7,18)
11	DLH	206.533.945,00	6.699.489.812,00	6.720.927.194,00	185.096.563,00	(21.437.382,00)	(10,38)
12	Disdukcapil	1.957.450.140,00	1.435.641.983,00	1.258.406.823,00	2.134.685.300,00	177.235.160,00	9,05
13	Dispermades	3.404.290,00	3.230.171.545,00	3.228.617.680,00	6.958.155,00	3.553.865,00	104,39
14	Dishub	262.425,00	3.036.385.145,00	2.976.590.741,00	60.056.829,00	59.794.404,00	22.785,33
15	Diskominfo	4.241.835,00	793.951.014,00	785.340.329,00	12.852.520,00	8.610.685,00	202,99
16	Disdagkop UKM	63.660.782,00	2.408.291.460,00	2.427.984.020,00	43.968.222,00	(19.692.560,00)	(30,93)
17	DPMPTSP	2.598.500,00	381.414.135,00	381.587.935,00	2.424.700,00	(173.800,00)	(6,69)
18	Disparpora	39.822.180,00	2.286.303.606,00	2.298.843.226,00	27.282.560,00	(12.539.620,00)	(31,49)
19	Dispuspa	4.349.780,00	243.980.280,00	226.511.515,00	21.818.545,00	17.468.765,00	401,60
20	Dispeterikan	272.757.071,00	965.288.846,00	1.114.866.735,00	123.179.182,00	(149.577.889,00)	(54,84)
21	Setda	68.769.145,00	4.768.469.531,00	4.740.772.056,00	96.466.620,00	27.697.475,00	40,28
22	Set DPRD	4.515.320,00	1.999.788.555,00	1.999.369.935,00	4.933.940,00	418.620,00	9,27
23	Bappelitbangda	1.453.205,00	1.006.402.920,00	1.004.496.924,00	3.359.201,00	1.905.996,00	131,16
24	BPPKAD	1.918.127.323,00	3.828.487.342,00	5.127.787.330,00	618.827.335,00	(1.299.299.988,00)	(67,74)
25	BKPPD	8.982.205,00	903.711.070,00	902.021.785,00	10.671.490,00	1.689.285,00	18,81
26	Inspektorat	897.840,00	392.349.855,00	392.183.885,00	1.063.810,00	165.970,00	18,49
27	Kec. Salaman	499.875,00	135.203.066,00	135.293.466,00	409.475,00	(90.400,00)	(18,08)
28	Kec. Borobudur	659.630,00	146.521.300,00	146.345.660,00	835.270,00	175.640,00	26,63
29	Kec. Ngluwar	112.600,00	117.929.046,00	117.871.646,00	170.000,00	57.400,00	50,98
30	Kec. Salam	159.600,00	111.248.440,00	111.330.790,00	77.250,00	(82.350,00)	(51,60)
31	Kec. Srumbung	1.043.350,00	93.075.680,00	93.686.280,00	432.750,00	(610.600,00)	(58,52)
32	Kec. Dukun	921.575,00	133.552.237,00	133.878.912,00	594.900,00	(326.675,00)	(35,45)
33	Kec. Sawangan	6.849.790,00	182.706.425,00	182.506.975,00	7.049.240,00	199.450,00	2,91
34	Kec. Muntlan	1.685.000,00	488.480.464,00	489.248.809,00	916.655,00	(768.345,00)	(45,60)
35	Kec. Mungkid	2.144.540,00	510.944.720,00	510.713.810,00	2.375.450,00	230.910,00	10,77
36	Kec. Mertoyudan	5.073.515,00	254.635.288,00	253.785.138,00	5.923.665,00	850.150,00	16,76
37	Kec. Tempuran	1.128.000,00	125.848.191,00	125.771.066,00	1.205.125,00	77.125,00	6,84
38	Kec. Kajoran	650.480,00	151.650.075,00	151.778.255,00	522.300,00	(128.180,00)	(19,71)
39	Kec. Kaliangkrik	2.102.275,00	148.697.280,00	146.636.930,00	4.162.625,00	2.060.350,00	98,01
40	Kec. Bandongan	1.899.950,00	135.731.645,00	136.569.105,00	1.062.490,00	(837.460,00)	(44,08)
41	Kec. Candimulyo	339.200,00	141.685.774,00	139.496.711,00	2.528.263,00	2.189.063,00	645,36
42	Kec. Pakis	186.000,00	160.260.780,00	160.115.080,00	331.700,00	145.700,00	78,33
43	Kec. Ngablak	568.500,00	116.997.341,00	117.529.841,00	36.000,00	(532.500,00)	(93,67)
44	Kec. Grabag	4.231.500,00	123.000.925,00	125.247.325,00	1.985.100,00	(2.246.400,00)	(53,09)
45	Kec. Tegalrejo	1.035.150,00	136.506.760,00	136.504.710,00	1.037.200,00	2.050,00	0,20
46	Kec. Secang	3.738.735,00	283.597.513,00	279.759.598,00	7.576.650,00	3.837.915,00	102,65
47	Kec. Windusari	512.400,00	105.955.103,00	105.740.263,00	727.240,00	214.840,00	41,93
48	Bakesbangpol	1.013.095,00	2.863.739.808,00	1.534.068.303,00	1.330.684.600,00	(1.329.671.505,00)	(131.248,45)
	Jumlah Persediaan	53.193.828.961,64	158.793.159.391,00	162.841.307.603,10	49.145.680.749,54	(4.048.148.212,10)	(7,61)

Lampiran 5.30

Rincian Bahan Bangunan dan Kontruksi masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	2.124.913,00	290.000,00	2.124.913,00	290.000,00	(1.834.913,00)	(86,35)
2	Dinkes	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00
3	DPU PR	365.025.200,00	1.741.127.700,00	1.496.413.540,00	609.739.360,00	244.714.160,00	67,04
4	DPRKP	0,00	7.924.690,00	7.924.690,00	0,00	0,00	0,00
5	BPBD	0,00	941.000,00	941.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Distanpangan	586.000,00	2.600.000,00	714.000,00	2.472.000,00	1.886.000,00	321,84
7	DLH	0,00	80.509.400,00	80.509.400,00	0,00	0,00	0,00
8	Dispermades	0,00	1.783.592.085,00	1.783.592.085,00	0,00	0,00	0,00
9	Dispeterikan	0,00	4.914.000,00	4.914.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Setda	0,00	10.674.700,00	10.674.700,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		367.736.113,00	3.642.563.575,00	3.397.798.328,00	612.501.360,00	244.765.247,00	66,56

Lampiran 5.31

Rincian Bahan Kimia pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	1.249.950,00	422000,00	1.249.950,00	422.000,00	(827.950,00)	(66,24)
2	Dinkes	0,00	279.702.569,00	279.702.569,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntian	0,00	176.650.034,00	176.650.034,00	0,00	0,00	0,00
4	Distanpangan	26.528.800,00	57.035.000,00	64.391.100,00	19.172.700,00	(7.356.100,00)	(27,73)
5	DLH	196.849.100,00	110.822.920,00	184.654.167,00	123.017.853,00	(73.831.247,00)	(37,51)
6	Disdagkop UKM	0,00	1.836.100,00	1.836.100,00	0,00	0,00	0,00
7	Disparpora	0,00	69.735.000,00	69.735.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dispeterikan	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Setda	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Kec. Candimulyo	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		224.627.850,00	698.663.623,00	780.678.920,00	142.612.553,00	(82.015.297,00)	(36,51)

Lampiran 5.32

Rincian Bahan Bakar Pelumas pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	323.000,00	807.460,00	1.130.460,00	0,00	(323.000,00)	(100,00)
2	Dinkes	0,00	163.742.368,00	163.742.368,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntilan	0,00	154.983.775,00	154.983.775,00	0,00	0,00	0,00
4	DPU PR	0,00	103.778.550,00	103.778.550,00	0,00	0,00	0,00
5	Satpol PP	0,00	190.518.472,00	190.518.472,00	0,00	0,00	0,00
6	BPBD	0,00	145.267.894,00	145.267.894,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinsos	0,00	38.512.490,00	38.512.490,00	0,00	0,00	0,00
8	Disperinnaker	0,00	1.137.800,00	1.137.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Distanpangan	0,00	335.200,00	335.200,00	0,00	0,00	0,00
10	DLH	0,00	2.667.616.319,00	2.667.616.319,00	0,00	0,00	0,00
11	Disdukcapil	0,00	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Dishub	0,00	267.753.180,00	267.753.180,00	0,00	0,00	0,00
13	Diskominfo	0,00	12.207.500,00	12.207.500,00	0,00	0,00	0,00
14	Disdagkop UKM	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Disparpora	0,00	38.913.150,00	38.913.150,00	0,00	0,00	0,00
16	Dispuspa	0,00	4.221.650,00	4.221.650,00	0,00	0,00	0,00
17	Setda	0,00	76.708.280,00	76.708.280,00	0,00	0,00	0,00
18	Set DPRD	0,00	1.159.090,00	1.159.090,00	0,00	0,00	0,00
19	BPPKAD	0,00	21.201.000,00	21.201.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Kec. Borobudur	0,00	589.580,00	589.580,00	0,00	0,00	0,00
21	Kec. Muntilan	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Kec. Bandongan	0,00	44.114.000,00	44.114.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Kec. Pakis	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00	0,00
24	Kec. Ngablak	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Kec. Secang	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		323.000,00	3.947.320.258,00	3.947.643.258,00	0,00	(323.000,00)	(100,00)

Lampiran 5.33

Rincian Bahan Baku pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	DPRKP	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2	BPBD	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Distanpangan	0,00	212.600.000,00	212.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DLH	0,00	20.312.200,00	20.312.200,00	0,00	0,00	0,00
5	Disdagkop UKM	0,00	1.064.925,00	1.064.925,00	0,00	0,00	0,00
6	Dispeterikan	0,00	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	0,00
7	BPPKAD	0,00	674.000,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	244.463.125,00	244.463.125,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 5.34

Rincian Bahan/Bibit Tanaman pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	BPBD	0,00	43.165.300,00	43.165.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Distanpangan	0,00	26.463.720,00	26.463.720,00	0,00	0,00	0,00
3	DLH	0,00	137.110.001,00	130.660.001,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00
4	DPMPTSP	0,00	1.712.490,00	1.712.490,00	0,00	0,00	0,00
5	Dispeterikan	0,00	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Setda	0,00	27.683.000,00	27.683.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	237.138.511,00	230.688.511,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00

Lampiran 5.35

Rincian Isi Tabung Pemadam pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	68.997.500,00	68.997.500,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD Muntilan	0,00	99.345.000,00	99.345.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4	DLH	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Dishub	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Disdagkop UKM	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	0,00	0,00	0,00
7	Setda	0,00	12.025.000,00	12.025.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	233.505.000,00	233.505.000,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 5.36
Rincian Isi Tabung Gas pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan saldo per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	100,00
2	Dinkes	0,00	182.481.720,00	182.481.720,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntilan	0,00	194.375.460,00	194.375.460,00	0,00	0,00	0,00
4	Satpol PP	0,00	213.600,00	213.600,00	0,00	0,00	0,00
5	BPBD	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Distanpangan	0,00	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Setda	0,00	8.112.000,00	8.112.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Kec. Grabag	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Kec. Secang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	397.939.780,00	397.897.780,00	42.000,00	42.000,00	100,00

Lampiran 5.37

Rincian Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dispeterikan	0,00	63.087.450,00	63.087.450,00	0,00	0,00	0,00
2	Setda	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	65.397.450,00	65.397.450,00	0,00	0,00	0,00



Lampiran 5.38

Rincian Bahan Lainnya pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	225.826.980,00	225.583.980,00	243.000,00	243.000,00	100,00
2	Dinkes	0,00	11.135.820.337,00	11.135.820.337,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntilan	0,00	223.495.328,00	223.495.328,00	0,00	0,00	0,00
4	DPU PR	0,00	9.472.380,00	9.472.380,00	0,00	0,00	0,00
5	DPRKP	0,00	1.394.855,00	1.394.855,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	0,00	47.853.980,00	47.853.980,00	0,00	0,00	0,00
7	BPBD	0,00	4.334.365,00	4.334.365,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinsos	0,00	434.162.485,00	434.162.485,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	0,00	860.098.189,00	859.418.649,00	679.540,00	679.540,00	100,00
10	Distanpangan	0,00	404.318.330,00	404.318.330,00	0,00	0,00	0,00
11	DLH	0,00	452.947.498,00	452.947.498,00	0,00	0,00	0,00
12	Disdukcapil	0,00	26.107.980,00	26.107.980,00	0,00	0,00	0,00
13	Dispermades	0,00	29.079.690,00	29.079.690,00	0,00	0,00	0,00
14	Dishub	0,00	134.437.312,00	134.437.312,00	0,00	0,00	0,00
15	Diskominfo	0,00	3.891.820,00	3.891.820,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	0,00	90.025.575,00	90.025.575,00	0,00	0,00	0,00
17	DPMPSTP	0,00	6.977.080,00	6.977.080,00	0,00	0,00	0,00
18	Disparpora	0,00	44.439.653,00	44.439.653,00	0,00	0,00	0,00
19	Dispuspa	0,00	8.229.110,00	8.229.110,00	0,00	0,00	0,00
20	Dispeterikan	0,00	82.137.450,00	82.137.450,00	0,00	0,00	0,00
21	Setda	0,00	462.125.085,00	462.125.085,00	0,00	0,00	0,00
22	Set DPRD	0,00	138.313.265,00	138.313.265,00	0,00	0,00	0,00
23	BPPKAD	0,00	78.301.443,00	78.301.443,00	0,00	0,00	0,00
24	BKPPD	0,00	1.244.020,00	1.244.020,00	0,00	0,00	0,00
25	Kec. Salaman	0,00	7.400.155,00	7.400.155,00	0,00	0,00	0,00
26	Kec. Borobudur	0,00	17.763.640,00	17.763.640,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Ngluwar	0,00	5.394.225,00	5.394.225,00	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Salam	0,00	8.375.325,00	8.375.325,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Srumbung	0,00	5.862.000,00	5.862.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Dukun	0,00	6.163.000,00	6.163.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec. Sawangan	0,00	5.877.000,00	5.877.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Muntilan	0,00	11.365.960,00	11.365.960,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Mungkid	0,00	5.713.410,00	5.713.410,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec. Mertoyudan	0,00	9.492.725,00	9.492.725,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec. Tempuran	0,00	6.129.795,00	6.129.795,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec. Kajoran	0,00	7.520.860,00	7.520.860,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec. Kaliangkrik	0,00	6.759.360,00	6.759.360,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec. Bandongan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec. Candimulyo	0,00	8.369.492,00	8.369.492,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec. Pakis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec. Ngablak	0,00	5.645.665,00	5.645.665,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec. Grabag	0,00	6.032.500,00	6.032.500,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Tegalrejo	0,00	6.318.750,00	6.318.750,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec. Secang	0,00	12.134.700,00	12.134.700,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec. Windusari	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
46	Bakesbangpol	0,00	78.225.806,00	78.225.806,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	15.146.578.578,00	15.145.656.038,00	922.540,00	922.540,00	100,00

Lampiran 5.39

Rincian Suku Cadang Alat Angkutan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	2.657.000,00	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00
2	BPBD	11.800.000,00	2.850.000,00	0,00	14.650.000,00	2.850.000,00	24,15
3	DLH	0,00	123.595.545,00	123.595.545,00	0,00	0,00	0,00
4	BPPKAD	0,00	21.674.000,00	21.674.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Kec. Bandongan	0,00	5.755.740,00	5.755.740,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		11.800.000,00	156.532.285,00	153.682.285,00	14.650.000,00	2.850.000,00	24,15

Lampiran 5.40

Rincian Suku Cadang Alat Besar pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	DPU PR	0,00	94.966.300,00	94.966.300,00	0,00	0,00	0,00
2	DLH	0,00	434.459.340,00	434.459.340,00	0,00	0,00	0,00
3	Dishub	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	535.425.640,00	535.425.640,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 5.41

Rincian Suku Cadang Alat Kedokteran pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	945.000,00	472.000,00	945.000,00	472.000,00	(473.000,00)	(50,05)
2	Dinkes	0,00	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntilan	84.009.221,00	251.732.400,00	256.598.028,00	79.143.593,00	(4.865.628,00)	(5,79)
JUMLAH PERSEDIAAN		84.954.221,00	255.196.400,00	260.535.028,00	79.615.593,00	(5.338.628,00)	(6,28)

Lampiran 5.42

Rincian Suku Cadang Alat Laboratorium pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,00
2	RSUD Muntilan	257.203.439,00	3.141.873.354,00	2.944.186.716,82	454.890.076,18	197.686.637,18	76,86
3	Dispeterikan	0,00	24.005.650,00	24.005.650,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		257.203.439,00	3.166.209.004,00	2.968.192.366,82	455.220.076,18	198.016.637,18	76,99

Lampiran 5.43

Rincian Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	(1.000,00)	(9,09)
JUMLAH PERSEDIAAN		11.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	(1.000,00)	(9,09)



Lampiran 5.44

Rincian Suku Cadang Alat Pertanian pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	DLH	0,00	34.106.800,00	34.106.800,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	34.106.800,00	34.106.800,00	0,00	0,00	0,00



Lampiran 5.45

Rincian Suku Cadang Alat Bengkel pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	3.626.925,00	3.626.925,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	3.626.925,00	3.626.925,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran 5.46

Rincian Suku Cadang Lainnya pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	2.643.000,00	2.643.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DPU PR	0,00	109.791.000,00	109791000,00	0,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	0,00	57.720.000,00	57.720.000,00	0,00	0,00	0,00
4	BPBD	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Distanpangan	0,00	44.772.996,00	44.772.996,00	0,00	0,00	0,00
6	DLH	0,00	313.695.792,00	313.695.792,00	0,00	0,00	0,00
7	Dishub	0,00	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Diskominfo	0,00	29.925.000,00	17.835.000,00	12.090.000,00	12.090.000,00	100,00
9	Dispuspa	0,00	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dispeterikan	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	573.018.788,00	560.928.788,00	12.090.000,00	12.090.000,00	100,00

Lampiran 5.47
Rincian Alat Tulis Kantor pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	176.209.336,00	382.930.135,00	416.445.501,00	142.693.970,00	(33.515.366,00)	(19,02)
2	Dinkes	566.385.701,50	3.021.134.976,00	3.100.012.518,37	487.508.159,13	(78.877.542,37)	(13,93)
3	RSUD Muntian	17.897.250,00	266.593.414,00	217.433.536,00	67.057.128,00	49.159.878,00	274,68
4	DPU PR	893.220,00	58.341.032,00	58.631.547,00	602.705,00	(290.515,00)	(32,52)
5	DPRKP	2.211.375,00	32.999.355,00	30.276.295,00	4.934.435,00	2.723.060,00	123,14
6	Satpol PP	4.145.635,00	38.183.165,00	38.492.430,00	3.836.370,00	(309.265,00)	(7,46)
7	BPBD	1.873.100,00	24.338.436,00	23.633.871,00	2.577.665,00	704.565,00	37,61
8	Dinsos	2.265.135,00	82.780.611,00	84.445.581,00	600.165,00	(1.664.970,00)	(73,50)
9	Disperinnaker	5.005.015,00	182.437.952,00	176.956.867,00	10.486.100,00	5.481.085,00	109,51
10	Distanpangan	5.530.900,00	34.005.320,00	26.158.900,00	13.377.320,00	7.846.420,00	141,87
11	DLH	2.125.275,00	54.167.630,00	51.573.155,00	4.719.750,00	2.594.475,00	122,08
12	Disdukcapil	1.739.920.440,00	441.914.745,00	295.397.020,00	1.886.438.165,00	146.517.725,00	8,42
13	Dispermades	666.400,00	160.390.850,00	160.143.320,00	913.930,00	247.530,00	37,14
14	Dishub	3.850,00	52.145.576,00	52.149.426,00	0,00	(3.850,00)	(100,00)
15	Diskominfo	1.659.600,00	21.865.690,00	23.234.020,00	291.270,00	(1.368.330,00)	(82,45)
16	Disdagkop UKM	9.113.765,00	129.157.252,00	136.101.892,00	2.169.125,00	(6.944.640,00)	(76,20)
17	DPMPSTP	1.533.150,00	36.336.400,00	36.620.750,00	1.248.800,00	(284.350,00)	(18,55)
18	Disparpora	1.838.000,00	98.553.214,00	97.888.464,00	2.502.750,00	664.750,00	36,17
19	Dispuspa	804.345,00	25.061.355,00	19.079.860,00	6.785.840,00	5.981.495,00	743,65
20	Dispeterikan	17.546.450,00	38.036.676,00	36.248.836,00	19.334.290,00	1.787.840,00	10,19
21	Setda	4.987.480,00	120.109.315,00	113.342.415,00	11.754.380,00	6.766.900,00	135,68
22	Set DPRD	1.159.300,00	69.939.085,00	69.939.055,00	1.159.330,00	30,00	0,00
23	Bappelitbangda	534.705,00	66.525.790,00	65.770.815,00	1.289.680,00	754.975,00	141,19
24	BPPKAD	635.847.323,00	462.587.691,00	972.273.224,00	126.161.790,00	(509.685.533,00)	(80,16)
25	BKPPD	735.105,00	112.177.006,00	112.626.791,00	285.320,00	(449.785,00)	(61,19)
26	Inspektorat	844.840,00	70.713.355,00	70.886.615,00	671.580,00	(173.260,00)	(20,51)
27	Kec. Salaman	144.925,00	9.830.835,00	9.856.985,00	118.775,00	(26.150,00)	(18,04)
28	Kec. Borobudur	388.630,00	17.122.725,00	16.856.210,00	655.145,00	266.515,00	68,58
29	Kec. Ngluwar	6.600,00	10.130.510,00	10.126.110,00	11.000,00	4.400,00	66,67
30	Kec. Salam	159.600,00	9.945.620,00	10.105.220,00	0,00	(159.600,00)	(100,00)
31	Kec. Srumbung	750.350,00	5.941.105,00	6.672.205,00	19.250,00	(731.100,00)	(97,43)
32	Kec. Dukun	216.575,00	5.722.955,00	5.668.630,00	270.900,00	54.325,00	25,08
33	Kec. Sawangan	5.113.790,00	7.654.000,00	8.047.850,00	4.719.940,00	(393.850,00)	(7,70)
34	Kec. Muntian	450.500,00	18.346.110,00	18.474.870,00	321.740,00	(128.760,00)	(28,58)
35	Kec. Mungkid	1.476.990,00	33.825.885,00	34.465.405,00	837.470,00	(639.520,00)	(43,30)
36	Kec. Mertoyudan	1.429.495,00	17.180.120,00	17.985.765,00	623.850,00	(805.645,00)	(56,36)
37	Kec. Tempuran	231.500,00	3.534.615,00	3.175.490,00	590.625,00	359.125,00	155,13
38	Kec. Kajoran	316.745,00	12.702.290,00	12.892.985,00	126.050,00	(190.695,00)	(60,20)
39	Kec. Kaliangkrik	989.875,00	7.396.315,00	6.867.965,00	1.518.225,00	528.350,00	0,00
40	Kec. Bandongan	690.225,00	5.200.530,00	5.715.390,00	175.365,00	(514.860,00)	(74,59)
41	Kec. Candimulyo	69.200,00	11.097.273,00	9.143.690,00	2.022.783,00	1.953.583,00	2.823,10
42	Kec. Pakis	36.000,00	18.634.930,00	18.568.230,00	102.700,00	66.700,00	185,28
43	Kec. Ngablak	525.500,00	5.701.150,00	6.193.650,00	33.000,00	(492.500,00)	(93,72)
44	Kec. Grabag	174.000,00	5.151.600,00	4.928.250,00	397.350,00	223.350,00	128,36
45	Kec. Tegalrejo	328.700,00	12.749.675,00	12.506.175,00	572.200,00	243.500,00	74,08
46	Kec. Secang	1.247.760,00	31.299.250,00	30.702.560,00	1.844.450,00	596.690,00	47,82
47	Kec. Windusari	147.200,00	9.004.005,00	8.916.065,00	235.140,00	87.940,00	59,74
48	Bakesbangpol	219.595,00	107.346.581,00	107.489.926,00	76.250,00	(143.345,00)	(65,28)
JUMLAH PERSEDIAAN		3.216.850.450,50	6.448.944.105,00	6.851.122.330,37	2.814.672.225,13	(402.178.225,37)	(12,50)

Lampiran 5.48
Rincian Kertas dan Cover pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	148.545.625,00	214.082.469,00	222.705.785,00	139.922.309,00	(8.623.316,00)	(5,81)
2	Dinkes	126.179.469,00	934.568.131,00	949.227.797,00	111.519.803,00	(14.659.666,00)	(11,62)
3	RSUD Muntilan	42.786.395,00	590.722.225,00	593.939.280,00	39.569.340,00	(3.217.055,00)	(7,52)
4	DPU PR	271.545,00	42.743.111,00	42.772.656,00	242.000,00	(29.545,00)	(10,88)
5	DPRKP	2.203.720,00	15.932.980,00	15.984.075,00	2.152.625,00	(51.095,00)	(2,32)
6	Satpol PP	1.155.875,00	39.109.325,00	37.414.250,00	2.850.950,00	1.695.075,00	146,65
7	Dinsos	600.195,00	71.202.410,00	71.361.855,00	440.750,00	(159.445,00)	(26,57)
8	BPBD	1.892.900,00	16.055.950,00	15.838.315,00	2.110.535,00	217.635,00	11,50
9	Disperinnaker	534.280,00	104.421.540,00	102.699.790,00	2.256.030,00	1.721.750,00	322,26
10	Distanpangan	5.557.100,00	31.045.170,00	34.642.770,00	1.959.500,00	(3.597.600,00)	(64,74)
11	DLH	817.500,00	30.714.615,00	25.723.110,00	5.809.005,00	4.991.505,00	610,58
12	Disdukcapil	265.000,00	158.945.565,00	157.496.835,00	1.713.730,00	1.448.730,00	546,69
13	Dispermades	400.840,00	22.371.150,00	21.982.960,00	789.030,00	388.190,00	96,84
14	Dishub	53.000,00	30.445.970,00	29.561.045,00	937.925,00	884.925,00	1.669,67
15	Diskominfo	2.474.735,00	27.179.860,00	29.482.845,00	171.750,00	(2.302.985,00)	(93,06)
16	Disdagkop UKM	241.000,00	43.775.000,00	43.349.150,00	666.850,00	425.850,00	176,70
17	DPMPTSP	440.500,00	29.799.600,00	29.703.250,00	536.850,00	96.350,00	21,87
18	Disparpora	812.820,00	35.453.160,00	35.508.915,00	757.065,00	(55.755,00)	(6,86)
19	Dispuspa	1.504.775,00	27.371.280,00	21.723.640,00	7.152.415,00	5.647.640,00	375,31
20	Dispeterikan	2.475.400,00	21.844.250,00	18.989.250,00	5.330.400,00	2.855.000,00	115,33
21	Setda	4.302.365,00	106.072.745,00	103.843.130,00	6.531.980,00	2.229.615,00	51,82
22	Set DPRD	1.153.870,00	37.101.385,00	36.671.105,00	1.584.150,00	430.280,00	37,29
23	Bappelitbangda	918.500,00	49.712.700,00	49.621.200,00	1.010.000,00	91.500,00	9,96
24	BPPKAD	31.099.015,00	182.691.145,00	173.626.530,00	40.163.630,00	9.064.615,00	29,15
25	BKPPD	3.124.450,00	78.870.149,00	72.183.279,00	9.811.320,00	6.686.870,00	214,02
26	Inspektorat	53.000,00	40.226.255,00	39.887.025,00	392.230,00	339.230,00	640,06
27	Kec. Salaman	132.950,00	3.498.000,00	3.630.950,00	0,00	(132.950,00)	(100,00)
28	Kec. Borobudur	271.000,00	9.282.040,00	9.553.040,00	0,00	(271.000,00)	(100,00)
29	Kec. Ngluwar	106.000,00	7.361.375,00	7.308.375,00	159.000,00	53.000,00	50,00
30	Kec. Salam	0,00	4.250.250,00	4.193.000,00	57.250,00	57.250,00	100,00
31	Kec. Srumbung	133.000,00	7.786.000,00	7.575.500,00	343.500,00	210.500,00	158,27
32	Kec. Dukun	159.000,00	4.860.345,00	4.695.345,00	324.000,00	165.000,00	103,77
33	Kec. Sawangan	53.000,00	7.267.700,00	6.733.400,00	587.300,00	534.300,00	100,00
34	Kec. Muntilan	486.000,00	10.409.565,00	10.390.650,00	504.915,00	18.915,00	3,89
35	Kec. Mungkid	512.550,00	16.393.880,00	15.475.180,00	1.431.250,00	918.700,00	179,24
36	Kec. Mertoyudan	2.954.600,00	16.466.395,00	16.786.480,00	2.634.515,00	(320.085,00)	(10,83)
37	Kec. Tempuran	55.000,00	4.665.000,00	4.464.000,00	256.000,00	201.000,00	365,45
38	Kec. Kajoran	131.935,00	7.210.300,00	7.055.985,00	286.250,00	154.315,00	116,96
39	Kec. Kaliangkrik	553.400,00	3.590.500,00	1.915.500,00	2.228.400,00	1.675.000,00	302,67
40	Kec. Bandongan	53.000,00	2.731.200,00	2.684.200,00	100.000,00	47.000,00	88,68
41	Kec. Candimulyo	96.000,00	5.432.795,00	5.357.045,00	171.750,00	75.750,00	78,91
42	Kec. Pakis	150.000,00	11.197.430,00	11.118.430,00	229.000,00	79.000,00	52,67
43	Kec. Ngablak	40.000,00	3.719.610,00	3.759.610,00	0,00	(40.000,00)	(100,00)
44	Kec. Grabag	3.697.500,00	2.582.250,00	5.128.000,00	1.151.750,00	(2.545.750,00)	(68,85)
45	Kec. Tegalrejo	229.000,00	5.656.500,00	5.600.500,00	285.000,00	56.000,00	24,45
46	Kec. Secang	1.120.600,00	10.711.300,00	8.689.700,00	3.142.200,00	2.021.600,00	180,40
47	Kec. Windusari	165.200,00	3.963.100,00	3.636.200,00	492.100,00	326.900,00	197,88
48	Bakesbangpol	475.500,00	11.354.440,00	11.658.190,00	171.750,00	(303.750,00)	(63,88)
JUMLAH KERTAS DAN COVER		391.439.109,00	3.142.848.115,00	3.133.349.122,00	400.938.102,00	9.498.993,00	2,43

Lampiran 5.49
Rincian Bahan Cetak pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	200.000,00	531.983.800,00	526.842.400,00	5.341.400,00	5.141.400,00	2.570,70
2	Dinkes	18.161.047,00	1.454.561.744,00	1.472.617.041,00	105.750,00	(18.055.297,00)	(99,42)
3	RSUD Muntilan	0,00	550.683.600,00	550.683.600,00	0,00	0,00	0,00
4	DPU PR	0,00	111.817.055,00	111.817.055,00	0,00	0,00	0,00
5	DPRKP	0,00	28.351.315,00	28.351.315,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	0,00	82.273.600,00	82.273.600,00	0,00	0,00	0,00
7	BPBD	0,00	33.003.500,00	33.003.500,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinsos	0,00	305.067.750,00	305.067.750,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	0,00	131.089.143,00	131.089.143,00	0,00	0,00	0,00
10	Distanpangan	0,00	42.428.100,00	42.428.100,00	0,00	0,00	0,00
11	DLH	0,00	110.465.075,00	110.465.075,00	0,00	0,00	0,00
12	Disdukcapil	215.196.000,00	534.341.089,00	504.927.089,00	244.610.000,00	29.414.000,00	100,00
13	Dispermades	0,00	52.008.085,00	52.008.085,00	0,00	0,00	0,00
14	Dishub	0,00	139.726.065,00	139.726.065,00	0,00	0,00	0,00
15	Diskominfo	0,00	126.003.576,00	126.003.576,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	0,00	196.367.768,00	196.367.768,00	0,00	0,00	0,00
17	DPMPSTP	0,00	59.286.675,00	59.286.675,00	0,00	0,00	0,00
18	Disparpora	0,00	280.572.987,00	280.572.987,00	0,00	0,00	0,00
19	Dispuspa	0,00	53.728.845,00	53.728.845,00	0,00	0,00	0,00
20	Dispeterikan	0,00	24.676.255,00	24.676.255,00	0,00	0,00	0,00
21	Setda	468.000,00	266.394.076,00	266.862.076,00	0,00	(468.000,00)	(100,00)
22	Set DPRD	0,00	99.336.450,00	99.336.450,00	0,00	0,00	0,00
23	Bappelitbangda	0,00	135.363.250,00	135.363.250,00	0,00	0,00	0,00
24	BPPKAD	0,00	1.417.720.820,00	1.089.530.435,00	328.190.385,00	328.190.385,00	0,00
25	BKPPD	0,00	100.755.350,00	100.755.350,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	0,00	53.197.040,00	53.197.040,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	0,00	10.773.833,00	10.773.833,00	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Borobudur	0,00	19.998.650,00	19.998.650,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Ngluwar	0,00	5.436.416,00	5.436.416,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Salam	0,00	6.654.560,00	6.654.560,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec. Srumbung	0,00	2.797.575,00	2.797.575,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Dukun	0,00	30.472.087,00	30.472.087,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Sawangan	0,00	7.236.225,00	7.236.225,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec. Muntilan	0,00	22.572.254,00	22.572.254,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec. Mungkid	0,00	33.813.700,00	33.813.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec. Mertoyudan	0,00	4.158.693,00	4.158.693,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec. Tempuran	0,00	9.773.491,00	9.773.491,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec. Kajoran	0,00	9.975.605,00	9.975.605,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec. Kaliangkrik	0,00	9.189.275,00	9.189.275,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec. Bandongan	0,00	2.430.175,00	2.430.175,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec. Candimulyo	0,00	8.369.428,00	8.369.428,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec. Pakis	0,00	12.562.260,00	12.562.260,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Ngablak	0,00	2.750.946,00	2.750.946,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec. Grabag	0,00	2.954.675,00	2.954.675,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec. Tegalrejo	0,00	14.559.585,00	14.559.585,00	0,00	0,00	0,00
46	Kec. Secang	0,00	13.482.213,00	13.482.213,00	0,00	0,00	0,00
47	Kec. Windusari	0,00	3.278.125,00	3.278.125,00	0,00	0,00	0,00
48	Bakesbangpol	0,00	46.062.586,00	46.062.586,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BAHAN CETAK		234.025.047,00	7.200.505.370,00	6.856.282.882,00	578.247.535,00	344.222.488,00	147,09

Lampiran 5.50
Rincian Benda Pos pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	7.507.000,00	14.188.405,00	18.563.905,00	3.131.500,00	(4.375.500,00)	(58,29)
2	Dinkes	7.158.000,00	32.327.400,00	34.817.400,00	4.668.000,00	(2.490.000,00)	(34,79)
3	RSUD Muntilan	750.000,00	8.315.500,00	8.325.500,00	740.000,00	(10.000,00)	(1,33)
4	DPU PR	70.000,00	9.490.000,00	9.420.000,00	140.000,00	70.000,00	100,00
5	DPRKP	0,00	2.579.900,00	2.459.900,00	120.000,00	120.000,00	100,00
6	Satpol PP	0,00	2.818.000,00	2.818.000,00	0,00	0,00	0,00
7	BPBD	140.000,00	250.000,00	350.000,00	40.000,00	(100.000,00)	(71,43)
8	Dinsos	0,00	2.416.840,00	2.416.840,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	0,00	2.498.190,00	2.498.190,00	0,00	0,00	0,00
10	Distanpangan	150.000,00	686.430,00	686.430,00	150.000,00	0,00	0,00
11	DLH	100.000,00	5.240.000,00	5.130.000,00	210.000,00	110.000,00	110,00
12	Disdukcapil	0,00	18.147.375,00	18.147.375,00	0,00	0,00	0,00
13	Dispermades	0,00	3.112.655,00	3.112.655,00	0,00	0,00	0,00
14	Dishub	0,00	5.400.000,00	5.300.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
15	Diskominfo	0,00	3.237.665,00	3.237.665,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	300.000,00	2.563.820,00	2.663.820,00	200.000,00	(100.000,00)	100,00
17	DPMPSTP	0,00	1.313.500,00	1.163.500,00	150.000,00	150.000,00	100,00
18	Disparpora	0,00	896.100,00	896.100,00	0,00	0,00	0,00
19	Dispuspa	160.000,00	660.000,00	690.000,00	130.000,00	(30.000,00)	(18,75)
20	Dispeterikan	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Setda	20.000,00	8.623.920,00	8.143.920,00	500.000,00	480.000,00	2.400,00
22	Set DPRD	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Bappelitbangda	0,00	1.183.000,00	1.153.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
24	BPPKAD	540.000,00	35.084.250,00	34.634.250,00	990.000,00	450.000,00	83,33
25	BKPPD	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Borobudur	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Salam	0,00	500.000,00	480.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
30	Kec. Srumbung	50.000,00	350.000,00	330.000,00	70.000,00	20.000,00	40,00
31	Kec. Sawangan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Muntilan	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Mungkid	50.000,00	430.000,00	480.000,00	0,00	(50.000,00)	(100,00)
34	Kec. Mertoyudan	110.000,00	250.000,00	360.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
35	Kec. Tempuran	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec. Kajoran	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec. Kaliangkrik	20.000,00	300.000,00	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
38	Kec. Candimulyo	96.000,00	570.000,00	566.000,00	100.000,00	4.000,00	4,17
39	Kec. Pakis	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec. Ngablak	3.000,00	200.000,00	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00
41	Kec. Grabag	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec. Tegalrejo	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Secang	510.000,00	677.000,00	917.000,00	270.000,00	(240.000,00)	(47,06)
44	Kec. Windusari	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Bakesbangpol	0,00	265.150,00	265.150,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BENDA POS		17.734.000,00	174.396.100,00	180.347.600,00	11.782.500,00	(5.951.500,00)	(33,56)

Lampiran 5.51

Rincian Bahan Komputer pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	60.544.496,00	86.872.875,00	88.549.136,00	58.868.235,00	(1.676.261,00)	(2,77)
2	Dinkes	112.237.174,00	383.094.305,00	376.137.810,00	119.193.669,00	6.956.495,00	6,20
3	RSUD Muntilan	47.298.500,00	52.020.660,00	64.615.160,00	34.704.000,00	(12.594.500,00)	(26,63)
4	DPU PR	1.599.800,00	80.140.625,00	78.345.825,00	3.394.600,00	1.794.800,00	112,19
5	DPRKP	594.815,00	16.030.650,00	15.467.665,00	1.157.800,00	562.985,00	94,65
6	Satpol PP	11.743.000,00	43.619.845,00	42.039.345,00	13.323.500,00	1.580.500,00	13,46
7	BPBD	320.000,00	14.985.918,00	15.305.918,00	0,00	(320.000,00)	(100,00)
8	Dinsos	0,00	62.048.765,00	62.048.765,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	249.000,00	61.190.535,00	53.601.840,00	7.837.695,00	7.588.695,00	3.047,67
10	Distanpangan	349.000,00	24.764.754,00	25.011.754,00	102.000,00	(247.000,00)	(70,77)
11	DLH	5.524.570,00	59.020.262,00	54.903.572,00	9.641.260,00	4.116.690,00	74,52
12	Disdukcapil	0,00	126.113.405,00	125.613.405,00	500.000,00	500.000,00	100,00
13	Dispermadest	1.098.950,00	36.014.320,00	35.321.495,00	1.791.775,00	692.825,00	63,04
14	Dishub	110.000,00	35.209.542,00	34.820.158,00	499.384,00	389.384,00	353,99
15	Diskominfo	0,00	12.203.015,00	12.203.015,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	483.225,00	90.427.145,00	89.489.415,00	1.420.955,00	937.730,00	194,06
17	DPMPSTSP	233.000,00	23.206.650,00	23.052.700,00	386.950,00	153.950,00	66,07
18	Disparpora	0,00	24.309.440,00	23.929.220,00	380.220,00	380.220,00	100,00
19	Dispuspa	653.910,00	19.456.630,00	13.629.470,00	6.481.070,00	5.827.160,00	891,13
20	Disperikanan	3.052.800,00	15.018.040,00	9.371.525,00	8.699.315,00	5.646.515,00	184,96
21	Setda	2.642.800,00	76.932.030,00	62.702.780,00	16.872.050,00	14.229.250,00	538,42
22	Set DPRD	655.000,00	19.649.650,00	19.659.650,00	645.000,00	(10.000,00)	(1,53)
23	Bappelitbangda	0,00	61.535.090,00	60.505.569,00	1.029.521,00	1.029.521,00	100,00
24	BPPKAD	51.121.180,00	248.399.550,00	254.924.765,00	44.595.965,00	(6.525.215,00)	(12,76)
25	BKPPD	1.800.000,00	114.656.445,00	115.881.595,00	574.850,00	(1.225.150,00)	(68,06)
26	Inspektorat	0,00	37.975.920,00	37.975.920,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Borobudur	0,00	7.605.665,00	7.425.540,00	180.125,00	180.125,00	100,00
29	Kec. Ngluwar	0,00	4.688.295,00	4.688.295,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Salam	0,00	2.725.785,00	2.725.785,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec. Srumbung	0,00	4.153.500,00	4.153.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Dukun	546.000,00	2.790.000,00	3.336.000,00	0,00	(546.000,00)	(100,00)
33	Kec. Sawangan	128.000,00	4.761.000,00	4.761.000,00	128.000,00	0,00	0,00
34	Kec. Muntilan	120.000,00	4.489.025,00	4.519.025,00	90.000,00	(30.000,00)	(25,00)
35	Kec. Mungkid	30.000,00	6.054.450,00	6.084.450,00	0,00	(30.000,00)	(100,00)
36	Kec. Mertoyudan	112.500,00	18.582.205,00	16.855.355,00	1.839.350,00	1.726.850,00	1.534,98
37	Kec. Tempuran	678.000,00	2.763.740,00	3.123.740,00	318.000,00	(360.000,00)	(53,10)
38	Kec. Kajoran	0,00	2.960.020,00	2.960.020,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec. Kaliangkrik	0,00	1.014.470,00	1.014.470,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec. Bandongan	817.125,00	1.393.000,00	1.423.000,00	787.125,00	(30.000,00)	(3,67)
41	Kec. Candimulyo	78.000,00	8.664.286,00	8.508.556,00	233.730,00	155.730,00	199,65
42	Kec. Pakis	0,00	4.662.660,00	4.662.660,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Ngablak	0,00	1.081.345,00	1.081.345,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec. Grabag	360.000,00	3.022.000,00	3.068.500,00	313.500,00	(46.500,00)	(12,92)
45	Kec. Tegalrejo	463.950,00	2.773.000,00	3.056.950,00	180.000,00	(283.950,00)	(61,20)
46	Kec. Secang	671.575,00	9.630.000,00	9.135.775,00	1.165.800,00	494.225,00	73,59
47	Kec. Windusari	200.000,00	1.627.000,00	1.827.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)
48	Bakesbangpol	318.000,00	6.382.665,00	6.700.665,00	0,00	(318.000,00)	(100,00)
JUMLAH BAHAN KOMPUTER		306.834.370,00	1.929.420.177,00	1.898.919.103,00	337.335.444,00	30.501.074,00	9,94

Lampiran 5.52

Rincian Perabot Kantor pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	98.846.812,00	104.549.499,00	120.155.562,00	83.240.749,00	(15.606.063,00)	(15,79)
2	Dinkes	195.057.760,00	1.022.963.736,00	1.037.110.755,00	180.910.741,00	(14.147.019,00)	(7,25)
3	RSUD Muntilan	6.185.800,00	6.213.500,00	8.844.100,00	3.555.200,00	(2.630.600,00)	(42,53)
4	DPU PR	3.551.290,00	13.465.040,00	13.735.550,00	3.280.780,00	(270.510,00)	(7,62)
5	DPRKP	0,00	253.950,00	253.950,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	3.982.500,00	16.828.940,00	11.592.845,00	9.218.595,00	5.236.095,00	131,48
7	BPBD	7.873.605,00	4.306.430,00	5.956.570,00	6.223.465,00	(1.650.140,00)	100,00
8	Dinsos	48.960,00	401.450,00	349.615,00	100.795,00	51.835,00	105,87
9	Disperinnaker	494.020,00	4.183.650,00	4.503.145,00	174.525,00	(319.495,00)	(64,67)
10	Distanpangan	510.830,00	17.461.400,00	13.681.230,00	4.291.000,00	3.780.170,00	740,01
11	DLH	258.500,00	368.770.715,00	350.740.020,00	18.289.195,00	18.030.695,00	6.975,12
12	Disdukcapil	2.068.700,00	26.913.730,00	27.559.025,00	1.423.405,00	(645.295,00)	(31,19)
13	Dispermadest	724.875,00	25.268.660,00	24.467.615,00	1.525.920,00	801.045,00	110,51
14	Dishub	36.575,00	926.255.050,00	926.291.625,00	0,00	(36.575,00)	(100,00)
15	Diskominfo	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	0,00	32.250.000,00	31.899.000,00	351.000,00	351.000,00	100,00
17	DPMPSTSP	391.850,00	9.130.080,00	9.419.830,00	102.100,00	(289.750,00)	(100,00)
18	Disparpora	625.160,00	31.106.388,00	31.182.723,00	548.825,00	(76.335,00)	(12,21)
19	Dispuspa	587.225,00	8.845.910,00	8.373.540,00	1.059.595,00	472.370,00	80,44
20	Dispeterikan	0,00	15.121.277,00	8.169.902,00	6.951.375,00	6.951.375,00	0,00
21	Setda	6.470.500,00	54.172.120,00	59.367.910,00	1.274.710,00	(5.195.790,00)	(80,30)
22	Set DPRD	1.069.150,00	33.580.790,00	33.582.980,00	1.066.960,00	(2.190,00)	(0,20)
23	Bappelitbangda	0,00	584.400,00	584.400,00	0,00	0,00	0,00
24	BPPKAD	11.670.435,00	22.315.443,00	30.381.108,00	3.604.770,00	(8.065.665,00)	(69,11)
25	BKPPD	3.147.650,00	0,00	3.147.650,00	0,00	(3.147.650,00)	(100,00)
26	Inspektorat	0,00	995.300,00	995.300,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	222.000,00	2.606.800,00	2.668.100,00	160.700,00	(61.300,00)	(27,61)
28	Kec. Ngluwar	0,00	5.394.225,00	5.394.225,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Salam	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Srumbung	0,00	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec. Dukun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Sawangan	1.555.000,00	398.500,00	779.500,00	1.174.000,00	(381.000,00)	(24,50)
33	Kec. Muntilan	628.500,00	1.995.250,00	2.623.750,00	0,00	(628.500,00)	(100,00)
34	Kec. Mungkid	0,00	573.410,00	466.680,00	106.730,00	106.730,00	0,00
35	Kec. Mertoyudan	466.920,00	348.900,00	7.870,00	807.950,00	341.030,00	100,00
36	Kec. Tempuran	116.500,00	1.066.000,00	1.142.000,00	40.500,00	(76.000,00)	(65,24)
37	Kec. Kajoran	201.800,00	370.050,00	571.850,00	0,00	(201.800,00)	(100,00)
38	Kec. Kaliangkrik	459.000,00	0,00	63.000,00	396.000,00	(63.000,00)	(13,73)
39	Kec. Bandongan	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	(39.600,00)	(100,00)
40	Kec. Ngablak	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec. Grabag	0,00	1.032.500,00	910.000,00	122.500,00	122.500,00	100,00
42	Kec. Tegalrejo	0,00	1.318.750,00	1.318.750,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Secang	155.800,00	7.334.700,00	7.386.300,00	104.200,00	(51.600,00)	(33,12)
44	Kec. Windusari	0,00	114.900,00	114.900,00	0,00	0,00	0,00
45	Bakesbangpol	0,00	1.239.800,00	1.239.800,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERABOT KANTOR		347.447.317,00	2.770.758.543,00	2.788.099.575,00	330.106.285,00	(17.341.032,00)	(4,99)

Lampiran 5.53

Rincian Alat Listrik pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	43.540.197,00	92.226.675,00	104.225.472,00	31.541.400,00	(11.998.797,00)	(27,56)
2	Dinkes	52.091.139,00	443.518.777,00	436.094.896,00	59.515.020,00	7.423.881,00	14,25
3	RSUD Muntilan	90.676.750,00	420.118.000,00	390.018.700,00	120.776.050,00	30.099.300,00	33,19
4	DPU PR	443.000,00	6.717.800,00	6.353.800,00	807.000,00	364.000,00	82,17
5	DPRKP	0,00	1.470.350,00	1.470.350,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	3.374.400,00	10.521.150,00	9.642.550,00	4.253.000,00	878.600,00	26,04
7	BPBD	818.845,00	5.141.000,00	2.964.575,00	2.995.270,00	2.176.425,00	265,79
8	Dinsos	0,00	7.092.500,00	6.792.500,00	300.000,00	300.000,00	100,00
9	Disperinnaker	0,00	6.998.650,00	6.948.650,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10	Distanpangan	447.914,00	2.874.500,00	3.007.514,00	314.900,00	(133.014,00)	(29,70)
11	DLH	859.000,00	158.467.875,00	158.679.875,00	647.000,00	(212.000,00)	(24,68)
12	Disdukcapil	0,00	3.331.750,00	3.331.750,00	0,00	0,00	0,00
13	Dispermades	513.225,00	21.437.800,00	20.013.525,00	1.937.500,00	1.424.275,00	277,51
14	Dishub	59.000,00	714.271.250,00	714.330.250,00	0,00	(59.000,00)	(100,00)
15	Diskominfo	107.500,00	3.934.500,00	3.742.500,00	299.500,00	192.000,00	100,00
16	Disdagkop UKM	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
17	DPMPPTSP	0,00	2.604.760,00	2.604.760,00	0,00	0,00	0,00
18	Disparpora	375.000,00	18.977.660,00	19.130.160,00	222.500,00	(152.500,00)	(40,67)
19	Dispuspa	639.525,00	3.500.500,00	3.930.400,00	209.625,00	(429.900,00)	(67,22)
20	Dispeterikan	497.400,00	6.925.700,00	4.407.750,00	3.015.350,00	2.517.950,00	100,00
21	Setda	4.136.000,00	52.082.250,00	49.545.750,00	6.672.500,00	2.536.500,00	61,33
22	Set DPRD	478.000,00	7.287.500,00	7.287.000,00	478.500,00	500,00	0,10
23	Bappelitbangda	0,00	5.389.300,00	5.389.300,00	0,00	0,00	0,00
24	BPPKAD	23.306.070,00	11.362.500,00	23.067.775,00	11.600.795,00	(11.705.275,00)	(50,22)
25	BKPPD	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)
26	Inspektorat	0,00	9.769.485,00	9.769.485,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	0,00	1.594.243,00	1.464.243,00	130.000,00	130.000,00	100,00
28	Kec. Borobudur	0,00	7.399.000,00	7.399.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Salam	0,00	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Srumbung	110.000,00	2.830.000,00	2.940.000,00	0,00	(110.000,00)	(100,00)
31	Kec. Dukun	0,00	350.350,00	350.350,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Sawangan	0,00	863.000,00	423.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00
33	Kec. Muntilan	0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec. Mungkid	75.000,00	412.485,00	487.485,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)
35	Kec. Mertoyudan	0,00	3.227.250,00	3.209.250,00	18.000,00	18.000,00	0,00
36	Kec. Tempuran	47.000,00	1.044.500,00	1.091.500,00	0,00	(47.000,00)	(100,00)
37	Kec. Kajoran	0,00	1.688.450,00	1.578.450,00	110.000,00	110.000,00	100,00
38	Kec. Kaliangkrik	80.000,00	300.000,00	380.000,00	0,00	(80.000,00)	100,00
39	Kec. Bandongan	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)
40	Kec. Ngablak	0,00	1.713.625,00	1.713.625,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec. Tegalrejo	13.500,00	831.000,00	844.500,00	0,00	(13.500,00)	(100,00)
42	Kec. Secang	33.000,00	5.176.850,00	4.159.850,00	1.050.000,00	1.017.000,00	3.081,82
43	Kec. Windusari	0,00	927.973,00	927.973,00	0,00	0,00	0,00
44	Bakesbangpol	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALAT LISTRIK		223.196.465,00	2.052.419.958,00	2.028.232.513,00	247.383.910,00	24.187.445,00	10,84

Lampiran 5.54

Rincian Perlengkapan Dinas pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	5.449.700,00	83.068.600,00	87.217.800,00	1.300.500,00	(4.149.200,00)	(76,14)
2	Dinkes	0,00	338.158.950,00	338.158.950,00	0,00	0,00	0,00
3	RSUD Muntilan	0,00	214.710.159,00	214.710.159,00	0,00	0,00	0,00
4	DPU PR	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5	DPRKP	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	0,00	618.116.840,00	618.116.840,00	0,00	0,00	0,00
7	BPBD	13867500,00	120.064.500,00	101.376.300,00	32.555.700,00	18.688.200,00	100,00
8	Dinsos	0,00	92.881.200,00	92.881.200,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	0,00	89.375.600,00	89.375.600,00	0,00	0,00	0,00
10	Distanpangan	0,00	182.390.000,00	182.390.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DLH	0,00	567.861.875,00	554.756.875,00	13.105.000,00	13.105.000,00	100,00
12	Dispermades	0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	4,00
13	Dishub	0,00	100.545.000,00	100.545.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Disdagkop UKM	0,00	14.462.300,00	14.462.300,00	0,00	0,00	0,00
15	DPMPSTSP	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Disparpora	0,00	340.882.999,00	340.882.999,00	0,00	0,00	0,00
17	Dispeterikan	0,00	9.643.000,00	9.643.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Setda	38.812.000,00	204.630.610,00	208.830.610,00	34.612.000,00	(4.200.000,00)	(10,82)
19	Set DPRD	0,00	312.160.000,00	312.160.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Bappelitbangda	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
21	BPPKAD	0,00	90.500.000,00	73.100.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00
22	BKPPD	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	5,00
23	Kec. Muntilan	0,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Kec. Mungkid	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Kec. Mertoyudan	0,00	636.500,00	636.500,00	0,00	0,00	2,00
26	Kec. Pakis	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1,00
27	Kec. Grabag	0,00	15.624.900,00	15.624.900,00	0,00	0,00	3,00
28	Bakesbangpol	0,00	326.504.000,00	326.504.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah							
PERLENGKAPAN DINAS		58.129.200,00	3.848.417.033,00	3.807.573.033,00	98.973.200,00	40.844.000,00	70,26

Lampiran 5.55

Rincian Kaporlap dan Perlengkapan Satwa pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dispeterikan	18.725.805,00	0,00	0,00	18.725.805,00	0,00	0,00
JUMLAH KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA		18.725.805,00	0,00	0,00	18.725.805,00	0,00	0,00

Lampiran 5.56
Rincian Perlengkapan Pendukung Olahraga pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	35.585.250,00	51.843.202,00	36.685.250,00	50.743.202,00	15.157.952,00	42,60
2	Disperinnaker	0,00	43.600.000,00	43.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Distanpangan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Disparpora	0,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Kec. Ngablak	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA		35.585.250,00	167.093.202,00	151.935.250,00	50.743.202,00	15.157.952,00	42,60

Lampiran 5.57

Rincian Souvenir/Cendera Mata per SKPD pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	9.623.000,00	9.623.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinkes	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	0,00	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	0,00
4	BPBD	1.481.800,00	1.200.000,00	211.500,00	2.470.300,00	988.500,00	66,71
5	Dinsos	0,00	16.193.000,00	16.193.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Disperinnaker	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dispermades	0,00	12.761.650,00	12.761.650,00	0,00	0,00	0,00
8	Dishub	0,00	122.640.000,00	122.640.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Diskominfo	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Disdagkop UKM	0,00	92.525.575,00	92.525.575,00	0,00	0,00	0,00
11	DPMPPTSP	0,00	68.036.400,00	68.036.400,00	0,00	0,00	0,00
12	Disparpora	0,00	99.740.510,00	99.740.510,00	0,00	0,00	0,00
13	Dispuspa	0,00	5.989.000,00	5.989.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dispeterikan	0,00	3.204.500,00	3.204.500,00	0,00	0,00	0,00
15	Setda	6.930.000,00	239.726.000,00	228.407.000,00	18.249.000,00	11.319.000,00	163,33
16	Set DPRD	0,00	60.390.000,00	60.390.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Bappelitbangda	0,00	15.780.000,00	15.780.000,00	0,00	0,00	0,00
18	BPPKAD	0,00	138.560.000,00	92.440.000,00	46.120.000,00	46.120.000,00	0,00
19	Kec. Muntilan	0,00	10.982.500,00	10.982.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Bakesbangpol	0,00	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SUVENIR/CENDERA MATA		14.301.800,00	1.025.442.135,00	967.014.635,00	72.729.300,00	58.427.500,00	408,53

Lampiran 5.58

Rincian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	139.842.800,00	139.234.800,00	608.000,00	608.000,00	0,00
2	Dinkes	7.516.541.558,70	12.564.131.754,00	12.215.161.677,74	7.865.511.634,96	348.970.076,26	4,64
3	RSUD Muntilan	0,00	2.523.520.298,00	2.523.520.298,00	0,00	-	0,00
4	DPRKP	0,00	7.844.000,00	7.844.000,00	0,00	-	0,00
5	Satpol PP	5.646.700,00	31.298.000,00	36.366.700,00	578.000,00	(5.068.700,00)	(89,76)
6	BPBD	0,00	3.055.500,00	3.055.500,00	0,00	-	0,00
7	Dinsos	0,00	64.531.520,00	64.531.520,00	0,00	-	0,00
8	Disperinnaker	0,00	31.090.865,00	31.090.865,00	0,00	-	0,00
9	Distanpangan	0,00	23.475.000,00	23.475.000,00	0,00	-	0,00
10	DLH	0,00	84.041.500,00	82.804.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00
11	Disdukcapil	0,00	8.657.344,00	8.657.344,00	0,00	-	0,00
12	Dispermades	0,00	26.055.600,00	26.055.600,00	0,00	-	0,00
13	Dishub	0,00	130.844.680,00	130.844.680,00	0,00	-	0,00
14	Diskominfo	0,00	296.860.088,00	296.860.088,00	0,00	-	0,00
15	Disdagkop UKM	12.699.000,00	80.572.000,00	80.572.000,00	12.699.000,00	-	100,00
16	DPMPTSP	0,00	8.654.000,00	8.654.000,00	0,00	-	0,00
17	Disparpora	0,00	158.975.020,00	158.975.020,00	0,00	-	0,00
18	Dispuspa	0,00	6.333.000,00	6.333.000,00	0,00	-	0,00
19	Dispeterikan	0,00	19.486.000,00	18.451.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00
20	Setda	0,00	28.696.500,00	28.696.500,00	0,00	-	0,00
21	Set DPRD	0,00	14.941.000,00	14.941.000,00	0,00	-	0,00
22	Bappelitbangda	0,00	40.482.390,00	40.482.390,00	0,00	-	0,00
23	BPPKAD	0,00	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	-	0,00
24	BKPPD	0,00	2.766.700,00	2.766.700,00	0,00	-	0,00
25	Inspektorat	0,00	16.735.000,00	16.735.000,00	0,00	-	0,00
26	Kec. Salaman	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-	0,00
27	Kec. Borobudur	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	-	0,00
28	Kec. Ngluwar	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-	0,00
29	Kec. Salam	0,00	3.206.000,00	3.206.000,00	0,00	-	0,00
30	Kec. Srumbung	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-	0,00
31	Kec. Dukun	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	-	0,00
32	Kec. Sawangan	0,00	6.430.000,00	6.430.000,00	0,00	-	0,00
33	Kec. Muntilan	0,00	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00	-	0,00
34	Kec. Mungkid	0,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	-	0,00
35	Kec. Mertoyudan	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	-	0,00
36	Kec. Tempuran	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	-	0,00
37	Kec. Kajoran	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	-	0,00
38	Kec. Kaliangkrik	0,00	2.499.360,00	2.499.360,00	0,00	-	0,00
39	Kec. Bandongan	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	-	0,00
40	Kec. Candimulyo	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-	0,00
41	Kec. Pakis	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	-	0,00
42	Kec. Ngablak	0,00	3.367.000,00	3.367.000,00	0,00	-	0,00
43	Kec. Grabag	0,00	4.132.000,00	4.132.000,00	0,00	-	0,00
44	Kec. Tegalrejo	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	-	0,00
45	Kec. Secang	0,00	5.453.000,00	5.453.000,00	0,00	-	0,00
46	Kec. Windusari	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	-	0,00
47	Bakesbangpol	0,00	35.215.000,00	35.215.000,00	0,00	-	0,00
JUMLAH ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA		7.534.887.258,70	16.438.627.919,00	16.091.846.042,74	7.881.669.134,96	346.781.876,26	4,60

Lampiran 5.59
Rincian Obat pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	23.430.162,00	16.992.576,00	24.770.662,00	15.652.076,00	(7.778.086,00)	(33,20)
2	Dinkes	14.081.152.484,27	13.090.881.613,00	15.114.062.317,79	12.057.971.779,48	(2.023.180.704,79)	(14,37)
3	RSUD Muntilan	4.797.867.235,04	23.273.828.021,00	23.248.330.971,25	4.823.364.284,79	25.497.049,75	0,53
4	Satpol PP	0,00	25.735.600,00	25.285.600,00	450.000,00	450.000,00	100,00
5	Dinsos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Distanpangan	149.797.710,00	23.250.000,00	23.250.000,00	149.797.710,00	0,00	0,00
7	DLH	0,00	74.260.000,00	74.260.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Disparpora	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Dispeterikan	202.202.416,00	165.569.908,00	338.908.260,00	28.864.064,00	(173.338.352,00)	(85,73)
10	Kec. Candimulyo	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH OBAT		19.254.450.007,31	36.682.957.718,00	38.861.307.811,04	17.076.099.914,27	(2.178.350.093,04)	(11,31)

Lampiran 5.60

Rincian Obat-Obatan Lainnya pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	1 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	8.251.024.798,00	8.251.024.798,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD Muntilan	0,00	3.468.891.896,00	3.468.891.896,00	0,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	0,00	(1.929.200,00)	(100,00)
4	Distanpangan	0,00	50.783.000,00	43.625.660,00	7.157.340,00	7.157.340,00	100,00
5	DLH	0,00	8.865.000,00	6.895.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	100,00
6	Disparpora	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dispeterikan	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH OBAT-OBATAN LAINNYA		1.929.200,00	11.787.254.694,00	11.780.056.554,00	9.127.340,00	7.198.140,00	373,12

Lampiran 5.61

Rincian Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	4.250.125.786,29	0,00	1.712.679.047,29	2.537.446.739,00	(1.712.679.047,29)	100,00
2	RSUD Muntilan	18.853.000,00	1.536.742.693,00	1.521.082.443,00	34.513.250,00	15.660.250,00	83,07
3	DPU PR	9.502.710.771,00	1.061.624.000,00	0,00	10.564.334.771,00	1.061.624.000,00	11,17
4	DPRKP	0,00	160.160.000,00	160.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Distanpangan	821.401.450,00	201.132.050,00	283.504.950,00	739.028.550,00	(82.372.900,00)	(10,03)
6	Dinsos	-	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-
6	Dishub	0,00	58.519.520,00	0,00	58.519.520,00	0,00	0,00
7	Disdagkop UKM	40.823.792,00	80.572.000,00	94.934.500,00	26.461.292,00	(14.362.500,00)	(35,18)
8	Disparpora	36.171.200,00	17.609.775,00	30.909.775,00	22.871.200,00	(13.300.000,00)	(36,77)
9	Dispeterikan	26.963.500,00	114.303.000,00	114.036.217,00	27.230.283,00	266.783,00	0,99
10	Setda	0,00	347.464.000,00	347.464.000,00	0,00	0,00	0,00
11	BPPKAD	1.164.543.300,00	0,00	1.164.543.300,00	0,00	(1.164.543.300,00)	100,00
12	Kecamatan Muntilan	0,00	36.040.800,00	36.040.800,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT		15.861.592.799,29	3.629.167.838,00	5.480.355.032,29	14.010.405.605,00	(1.851.187.194,29)	(11,67)

Lampiran 5.62
Rincian Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	DPU PR	0,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Disparpora	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Satpol PP	2.263.416.400,00	0,00	2.263.416.400,00	0,00	(2.263.416.400,00)	(100,00)
4	Inspektorat	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Bakesbangpol	0,00	1.330.436.600,00	0,00	1.330.436.600,00	1.330.436.600,00	100,00
JUMLAH PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA		2.263.416.400,00	1.374.086.600,00	2.307.066.400,00	1.330.436.600,00	(932.979.800,00)	(41,22)

Lampiran 5.63

Rincian Persediaan Natura per SKPD pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Disdikbud	0,00	2.442.120.000,00	2.442.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinkes	82.598.610,84	8.765.164.581,00	8.726.440.277,84	121.322.914,00	38.724.303,16	46,88
3	RSUD Muntian	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4	DPU PR	0,00	187.864.000,00	187.864.000,00	0,00	0,00	0,00
5	DPRKP	0,00	78.106.000,00	78.106.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Satpol PP	0,00	222.895.250,00	222.895.250,00	0,00	0,00	0,00
7	BPBD	0,00	112.222.000,00	112.222.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinsos	0,00	2.132.676.170,00	2.132.676.170,00	0,00	0,00	0,00
9	Disperinnaker	0,00	600.013.900,00	600.013.900,00	0,00	0,00	0,00
10	Distanpangan	0,00	538.710.750,00	538.710.750,00	0,00	0,00	0,00
11	DLH	0,00	801.239.450,00	801.239.450,00	0,00	0,00	0,00
12	Disdukcapil	0,00	80.899.000,00	80.899.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Dispermedes	0,00	1.027.729.000,00	1.027.729.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Dishub	0,00	302.237.000,00	302.237.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Diskominfo	0,00	248.038.500,00	248.038.500,00	0,00	0,00	0,00
16	Disdagkop UKM	0,00	1.520.199.500,00	1.520.199.500,00	0,00	0,00	0,00
17	DPMPTSP	0,00	131.156.500,00	131.156.500,00	0,00	0,00	0,00
18	Disparpora	0,00	964.345.650,00	964.345.650,00	0,00	0,00	0,00
19	Dispuspa	0,00	78.882.000,00	78.882.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Dispeterikan	1.293.300,00	223.089.890,00	224.383.190,00	0,00	(1.293.300,00)	(100,00)
21	Setda	0,00	2.631.587.900,00	2.631.587.900,00	0,00	0,00	0,00
22	Set DPRD	0,00	1.204.510.340,00	1.204.510.340,00	0,00	0,00	0,00
23	Bappelitbangda	0,00	628.647.000,00	628.647.000,00	0,00	0,00	0,00
24	BPPKAD	0,00	1.081.135.500,00	1.081.135.500,00	0,00	0,00	0,00
25	BKPPD	0,00	479.741.400,00	479.741.400,00	0,00	0,00	0,00
26	Inspektorat	0,00	150.217.500,00	150.217.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Kec. Salaman	0,00	96.159.200,00	96.159.200,00	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Borobudur	0,00	65.520.000,00	65.520.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Kec. Ngluwar	0,00	79.284.000,00	79.284.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Salam	0,00	72.614.400,00	72.614.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec. Srumbung	0,00	61.474.500,00	61.474.500,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec. Dukun	0,00	82.303.500,00	82.303.500,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec. Sawangan	0,00	141.819.000,00	141.819.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec. Muntian	0,00	330.197.000,00	330.197.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec. Mungkid	0,00	357.017.500,00	357.017.500,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec. Mertoyudan	0,00	162.992.500,00	162.992.500,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec. Tempuran	0,00	93.751.050,00	93.751.050,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec. Kajoran	0,00	108.042.500,00	108.042.500,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec. Kaliangkrik	0,00	117.648.000,00	117.648.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec. Bandongan	0,00	61.392.000,00	61.392.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec. Candimulyo	0,00	96.082.500,00	96.082.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec. Pakis	0,00	101.436.000,00	101.436.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec. Ngablak	0,00	88.539.000,00	88.539.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec. Grabag	0,00	81.962.500,00	81.962.500,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec. Tegarejo	0,00	90.899.500,00	90.899.500,00	0,00	0,00	0,00
46	Kec. Secang	0,00	185.909.500,00	185.909.500,00	0,00	0,00	0,00
47	Kec. Windusari	0,00	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	0,00	0,00
48	Bakesbangpol	0,00	891.247.180,00	891.247.180,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIaan NATURA		83.891.910,84	30.079.970.111,00	30.042.539.107,84	121.322.914,00	37.431.003,16	44,62

Lampiran 5.64

Rincian Persediaan Pakan per SKPD pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dispeterikan	0,00	117.306.800,00	113.313.500,00	3.993.300,00	3.993.300,00	100,00
2	Setda	0,00	32.340.000,00	32.340.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN NATURA		0,00	149.646.800,00	145.653.500,00	3.993.300,00	3.993.300,00	100,00



Lampiran 5.65
Rincian Persediaan Natura dan Pakan Lainnya pada masing - masing SKPD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

No	SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/ Berkurang	%
1	Dinkes	0,00	65.964.520,00	65.964.520,00	0,00	0,00	0,00
2	Dispermades	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Disparpora	0,00	2.442.900,00	2.442.900,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN		0,00	88.407.420,00	88.407.420,00	0,00	0,00	0,00



Lampiran 5.66
Investasi Non Permanen Tahun 2023

No	Jenis Inv Non Permanen	Nilai tagihan per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Distanpangan				
	Penguatan modal petani nilam	45.000.000,00			45.000.000,00
	Penguatan modal Petani Melon	27.000.000,00			27.000.000,00
	Penguatan Modal Petani Jg. Manis	32.000.000,00			32.000.000,00
	Penguatan Modal Penangkar Kentang	2.300.000,00			2.300.000,00
	PIA Putra Bangsa	85.000.000,00			85.000.000,00
	PIA Subur Makmur	140.000.000,00			140.000.000,00
	KT Surya Bumi Makmur	39.000.000,00			39.000.000,00
	PIA Khasanah, Sawangan	51.000.000,00			51.000.000,00
	Bunga Sedap Malam Citrosono	20.000.000,00			20.000.000,00
	Pembibitan Tanaman Hias Giyanti	10.000.000,00			10.000.000,00
	Pengolah Hasil Ketela Grabag	1.800.000,00			1.800.000,00
	Pemberdayaan Petani Tanaman Hias				
	a) Sawangan (Tunas Prima)	13.500.000,00			13.500.000,00
	b) Candimulyo	7.900.000,00			7.900.000,00
	c) Candimulyo	14.100.000,00			14.100.000,00
	Pemberdayaan Petani Strawberi				
	a) Ngudi Makmur	11.000.000,00			11.000.000,00
	b) KT Strawberry Kaliangkrik	12.500.000,00			12.500.000,00
	c) KT Karya Makmur	15.500.000,00			15.500.000,00
	Petani Kopi				
	a) Kusuma Bantara				
	b) Dian Makmur	8.000.000,00			8.000.000,00
	LKM Kajoran Baru kec. Kajoran	6.260.000,00			6.260.000,00
	LKM Lembah Menoreh kec. Borobudur	5.300.000,00			5.300.000,00
	LKM Telomoyo kec. Grabag	6.814.000,00			6.814.000,00
	LKM Berdikari kec. Bandongan	6.500.000,00			6.500.000,00
	LKM Sumbing Indah kec. kaliangkrik	1.550.000,00			1.550.000,00
	UPKG Deyangan Kec. Mertoyudan	3.250.000,00			3.250.000,00
	LKM Gunung Bala Kec. Pakis	2.000.000,00			2.000.000,00
	LKM Guyup Rukun kec. Windusari	3.300.000,00			3.300.000,00
2	Dispeterikan				
	Pemberdayaan Petani Inmindi	8.350.000,00			8.350.000,00
	Pemberdayaan Petani Gurami	7.850.000,00			7.850.000,00
	Penguatan Modal Petani Inmindi	33.525.000,00			33.525.000,00
	Penguatan Modal Petani Gurami	13.550.000,00			13.550.000,00
	Penguatan Modal Petani Ikan Hias	21.950.000,00			21.950.000,00
	Penguatan Ikan Gurami	1.157.500,00			1.157.500,00
	Penguatan Ikan Hias	1.073.500,00			1.073.500,00
	Pemberdayaan Petani Inmindi 2006	437.500,00			437.500,00
	Perguliran Bibit Ikan Kegiatan	13.200.000,00			13.200.000,00
	Pengembangan Kolam Pekarangan				
	Pemberdayaan Petani Inmindi 2007	7.220.000,00			7.220.000,00

No	Jenis Inv Non Permanen	Nilai tagihan per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan Tahun 2023	Pengurangan Tahun 2023	Nilai tagihan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
	Ternak Gaduhan :				
	Investasi Tahun 2006	1.379.265.000,00			1.379.265.000,00
	Investasi Tahun 2007	186.007.000,00			186.007.000,00
	Investasi Tahun 2008	412.937.500,00			412.937.500,00
	3 Disdagkop UKM				
	Penguatan Modal				
	Proyek	153.386.700,00			153.386.700,00
	UPKDB	49.259.400,00			49.259.400,00
	Bantuan Pinjaman Modal	152.207.000,00			152.207.000,00
	PBMK	224.780.000,00			224.780.000,00
	PBMU	15.078.000,00			15.078.000,00
	Penguatan Modal Lainnya	-			-
	a) Penguatan Modal 2004	19.417.550,00			19.417.550,00
	b) Bant. Rice Milling KUD Redjodadi	32.500.000,00			32.500.000,00
	c) Penunjang Coolin Unit Kop Susu	43.735.000,00			43.735.000,00
	Ngudi Rejeki Sawangan	-			-
	d) Bantuan Rice Milling Salam	-			-
	e) Bantuan Modal Kerja	52.447.000,00			52.447.000,00
	f) Bantuan Simpan Pinjam	33.061.160,00			33.061.160,00
	g) Bantuan RMU KUD Lestari	40.837.500,00			40.837.500,00
	h) Bantuan Modal Kerja 2006	100.903.725,00			100.903.725,00
	i) Bantuan Simpan Pinjam 2006	65.647.650,00			65.647.650,00
	Dana bergulir	-			-
	Dana Bergulir tahun 2006	431.300.470,00			431.300.470,00
	Bantuan Modal Kerja Koperasi Tahun 2007	109.400.000,00			109.400.000,00
	Jumlah	4.181.058.155,00		-	4.181.058.155,00

Lampiran 5.67
Aging Schedule Investasi Non Permanen
Dinas Pertanian dan Pangan

No.	Jenis Inv Non Permanen	Nilai tagihan per 31 Desember 2022 (Rp)	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (tidak melampaui J.t)		Kurang Lancar (melampaui J.t s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (melampaui J.t 2 s/d 5 th)		Macet (melampaui J.t lebih dari 5 th)				
			nilai	Penyisihan (0%)	nilai	Penyisihan (50%)	nilai	Penyisihan (75%)	nilai	Penyisihan (100%)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13 (6+8+10+12)	14(3-13)	
1	Penguatan modal petani nilam	45.000.000,00								45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0
2	Penguatan modal Petani Melon	27.000.000,00								27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0
3	Penguatan Modal Petani Jg. Manis	32.000.000,00								32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0
4	Penguatan Modal Penangkar Kentang	2.300.000,00								2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0
5	PIA Putra Bangsa	85.000.000,00								85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0
6	PIA Subur Makmur	140.000.000,00								140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0
7	KT Surya Bumi Makmur	39.000.000,00								39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0
8	PIA Khasanah, Sawangan	51.000.000,00								51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0
9	Bunga Sedap Malam Citrosono	20.000.000,00								20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0
10	Pembibitan Tanaman Hias Giyanti	10.000.000,00								10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0
11	Pengolah Hasil Ketela Grabag	1.800.000,00								1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0
12	Pemberdayaan Petani Tanaman Hias												
	a) Sawangan (Tunas Prima)	13.500.000,00								13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0
	b) Candimulyo	7.900.000,00								7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0
	c) Candimulyo	14.100.000,00								14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0
13	Pemberdayaan Petani Strawberri												
	a) Ngudi Makmur	11.000.000,00								11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0
	b) KT Strawberry Kaliangkrik	12.500.000,00								12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0
	c) KT Karya Makmur	15.500.000,00								15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0
14	Petani Kopi												
	a)Kusuma Bantara												
	b) Dian Makmur	8.000.000,00								8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0
15	LKM Kajoran Baru kec. Kajoran	6.260.000,00								6.260.000,00	6.260.000,00	6.260.000,00	0
16	LKM Lembah Menoreh kec. Borobudur	5.300.000,00								5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0
17	LKM Telomoyo kec. Grabag	6.814.000,00								6.814.000,00	6.814.000,00	6.814.000,00	0
18	LKM Berdikari kec. Bandongan	6.500.000,00								6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0
19	LKM Sumbing Indah kec.kaliangkrik	1.550.000,00								1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0
20	UPKG Deyangan Kec. Mertoyudan	3.250.000,00								3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0
21	LKM Gunung Bala Kec. Pakis	2.000.000,00								2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0
22	LKM Guyup Rukun kec. Windusari	3.300.000,00								3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0
	Jumlah	570.574.000,00	-	-	-	-	-	-	-	570.574.000,00	570.574.000,00	570.574.000,00	0

Aging Schedule Investasi Non Permanen													
Dinas Peternakan & Perikanan													
No.	Jenis Inv Non Permanen	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (tidak melampaui J.t)		Kurang Lancar (melampaui J.t s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (melampaui J.t 2 s/d 5 th)		Macet (melampaui J.t lebih dari 5 th)				
			nilai	Penyisihan (0%)	nilai	Penyisihan (50%)	nilai	Penyisihan (75%)	nilai	Penyisihan (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(5+7+9+11)	14=(3-12)	
1	Pemberdayaan Petani Inmindi	8.350.000,00								8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	0
2	Pemberdayaan Petani Gurami	7.850.000,00								7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	0
3	Penguatan Modal Petani Inmindi	33.525.000,00								33.525.000,00	33.525.000,00	33.525.000,00	0
4	Penguatan Modal Petani Gurami	13.550.000,00								13.550.000,00	13.550.000,00	13.550.000,00	0
5	Penguatan Modal Petani Ikan Hias	21.950.000,00								21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	0
6	Penguatan Ikan Gurami	1.157.500,00								1.157.500,00	1.157.500,00	1.157.500,00	0
7	Penguatan Ikan Hias	1.073.500,00								1.073.500,00	1.073.500,00	1.073.500,00	0
8	Pemberdayaan Petani Inmindi 2006	437.500,00								437.500,00	437.500,00	437.500,00	0
9	Perguliran Bibit Ikan Kegiatan	13.200.000,00								13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0
	Pengembangan Kolam Pekarangan									0	0	0	0
10	Pemberdayaan Petani Inmindi 2007	7.220.000,00								7.220.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0
	Ternak Gaduhan :												
1	Investasi Tahun 2006	1.379.265.000,00								1.379.265.000,00	1.379.265.000,00	1.379.265.000,00	0
2	Investasi Tahun 2007	186.007.000,00								186.007.000,00	186.007.000,00	186.007.000,00	0
3	Investasi Tahun 2008	412.937.500,00								412.937.500,00	412.937.500,00	412.937.500,00	0
	Jumlah	2.086.523.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.086.523.000,00	2.086.523.000,00	2.086.523.000,00	0

Aging Schedule Investasi Non Permanen													
Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM													
No.	Jenis Inv Non Permanen	Nilai tagihan per 31 Desember 2022	Kategori								Total Penyisihan	NRV	
			Lancar (tidak melampaui J.t)		Kurang Lancar (melampaui J.t s/d 2 th)		Diragukan Tertagih (melampaui J.t 2 s/d 5 th)		Macet (melampaui J.t lebih dari 5 th)				
			nilai	Penyisihan (0%)	nilai	Penyisihan (50%)	nilai	Penyisihan (75%)	nilai	Penyisihan (100%)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13 (6+8+10+12)	14(3-13)	
A.	Penguatan Modal												
1	Proyek	153.386.700,00								153.386.700,00	153.386.700,00	153.386.700,00	0
2	UPKDB	49.259.400,00								49.259.400,00	49.259.400,00	49.259.400,00	0
3	Bantuan Pinjaman Modal	152.207.000,00								152.207.000,00	152.207.000,00	152.207.000,00	0
4	PBMK	224.780.000,00								224.780.000,00	224.780.000,00	224.780.000,00	0
5	PBMU	15.078.000,00								15.078.000,00	15.078.000,00	15.078.000,00	0
6	Penguatan Modal Lainnya	-								-	-	-	-
	a) Penguatan Modal 2004	19.417.550,00								19.417.550,00	19.417.550,00	19.417.550,00	0
	b) Bant. Rice Milling KUD Redjodadi	32.500.000,00								32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0
	c) Penunjang Coolin Unit Kop Susu	43.735.000,00								43.735.000,00	43.735.000,00	43.735.000,00	0
	Ngudi Rejeki Sawangan	-								-	-	-	-
	d) Bantuan Rice Milling Salam	-								-	-	-	-
	e) Bantuan Modal Kerja	52.447.000,00								52.447.000,00	52.447.000,00	52.447.000,00	0
	f) Bantuan Simpan Pinjam	33.061.160,00								33.061.160,00	33.061.160,00	33.061.160,00	0
	g) Bantuan RMU KUD Lestari	40.837.500,00								40.837.500,00	40.837.500,00	40.837.500,00	0
	h) Bantuan Modal Kerja 2006	100.903.725,00								100.903.725,00	100.903.725,00	100.903.725,00	0
	i) Bantuan Simpan Pinjam 2006	65.647.650,00								65.647.650,00	65.647.650,00	65.647.650,00	0
B	Dana bergulir										-	-	-
	Dana Bergulir tahun 2006	431.300.470,00								431.300.470,00	431.300.470,00	431.300.470,00	0
	Bantuan Modal Kerja Koperasi Tahun 2007	109.400.000,00								109.400.000,00	109.400.000,00	109.400.000,00	0
	Jumlah	1.523.961.155,00	-	-	-	-	-	-	-	1.523.961.155,00	1.523.961.155,00	1.523.961.155,00	0

LAMPIRAN 5.68
TABEL PERHITUNGAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD
TAHUN 2023

Nama BUMD	Saldo 2022 (Audited)	Prosentase kepemilikan per 31 des 2023	Penyertaan modal 2023	Deviden di bagi 2023	Ekuitas di LK BUMD	saldo inv permanen untuk yang kepemilikan saham diatas 20%	saldo inv permanen untuk yang kepemilikan saham dibawah 20%	Saldo 31 Des 2023	Saldo per 31 des 2023 setelah koreksi	Saldo 2022 audited + penyertaan modal 2023	Penyesuaian
1	2	3	4	5	6	7=6*3	8=2+4	9=7+8	11=9-10	12=2+4	13=11-12
Bapas 69	162.582.723.697,00	100,00%	6.875.000.000,00	15.307.790.112,00	170.032.266.083,00	170.032.266.083,00		170.032.266.083,00	170.032.266.083,00	169.457.723.697,00	574.542.386,00
PDAU	3.566.251.510,00	100,00%		109.627.944,00	3.661.276.752,00	3.661.276.752,00		3.661.276.752,00	3.661.276.752,00	3.566.251.510,00	95.025.242,00
PDAM	78.400.162.315,00	100,00%	7.281.000.000,00	4.240.942.536,00	86.855.750.974,00	86.855.750.974,00		86.855.750.974,00	86.855.750.974,00	85.681.162.315,00	1.174.588.659,00
Bank Jateng	45.000.000.000,00	1,02%		10.275.387.698,00		-	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
BKK Muntlari	14.447.877.684,48	48,00%		664.467.506,00	30.854.789.337,00	14.810.298.881,76		14.810.298.881,76	14.810.298.881,76	14.447.877.684,48	362.421.197,28
BKK Jateng	4.900.000.000,00	1,33%			449.156.514.080,00	-	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	0,00
PRPP	280.000.000,00	0,37%				-	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00
Jumlah	309.177.015.206,48		14.156.000.000,00	30.598.215.796,00	740.560.597.226,00	275.359.592.690,76	50.180.000.000,00	325.539.592.690,76	325.539.592.690,76	323.333.015.206,48	2.206.577.484,28

Lampiran 5.69
Rincian Penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud

No.	Nama	Kegunaan	Tahun Perolehan	Tahun Dibukukan	Pengguna	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Software	SOFTWARE (SLIMS) PERPUSTAKAAN	2023	2023	Disdikbud	12.000.000	
2	Software	SOFTWARE (ADAMEDSPRO BASIC 2YR3 (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) RSD MP)	2023	2023	RSUD Merah Putih	545.000.000,00	
3	Software	SOFTWARE ("ADAMLABS PLATINUM 1YR16 (LABORATORY INFORMATION SYSTEM) " RSUD MP)	2023	2023	RSUD Merah Putih	985.000.000,00	
4	Software	SOFTWARE (SOFTWARE SIM RSD MP MERTOYUDAN)	2023	2023	RSUD Merah Putih	1.198.000.000,00	
5	Upgrade Software	Software Simpus (SIM PUSKESMAS)	2023	2023	Dinkes	190.400.000,00	
6	Upgrade Software	SOFTWARE (APLIKASI SIM OBAT DI IFK)	2023	2023	Dinkes	54.900.000,00	
7	Software	Software MMPJ Kejiwaan	2023	2023	RSUD Muntian	6.500.000,00	
8	Software	Sistem Informasi SI-SPAM	2023	2023	DPU PR	69.347.250,00	
9	Software	APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS OBJEK PBB-P2	2023	2023	BPPKAD	95.000.000,00	
10	Upgrade Software	Aplikasi SIM ASET VERSI 108	2023	2023	BPPKAD	99.190.000,00	
JUMLAH PENAMBAHAN SOFTWARE						3.255.337.250,00	

1	Kajian	PENDATAAN JARINGAN IRIGASI WILAYAH SALAMAN-BANDONGAN	2023	2023	DPU PR	74.092.900,00	
2	Kajian	PEMUTAHIRAN DATA JARINGAN IRIGASI	2023	2023	DPU PR	64.324.900,00	
3	Kajian	PENDATAAN JARINGAN IRIGASI	2023	2023	DPU PR	93.218.200,00	
4	Kajian	KAJIAN LINGKUNGAN	2023	2023	DPU PR	57.383.000,00	
5	Kajian	KAJIAN TENTANG LINGKUNGAN	2023	2023	DPU PR	71.374.145,00	
6	Kajian	PEMUTAHIRAN DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI	2023	2023	DPU PR	59.390.950,00	
7	Kajian	Kajian arahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang nantinya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.	2023	2023	DPRKP	305.000.000,00	
8	Kajian	KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN MAGELANG 2024-2028	2023	2023	BPBD	104.351.500,00	
9	Kajian	KAJIAN PENGUKURAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KAB. MAGELANG	2023	2023	Disperinnaker	39.936.690,00	
10	Kajian	JASKON RENC. PENGEMBANGAN EKO LOKAL & ROADMAP PENGEMBANGAN EKO BERBASIS POT. UNGGULAN	2023	2023	Bappelitbangda	89.765.700,00	
11	Kajian	JASKON PENYUS. KEBIJAKAN & STRAEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KAB. MAGELANG	2023	2023	Bappelitbangda	59.440.500,00	
12	Kajian	JASKON IDENTFKSI AWAL PEMETAAN POT. STRUKTUR SESAR BERDSAR	2023	2023	Bappelitbangda	79.864.500,00	
13	Kajian	JASKON KAJIAN DAMPAK SOS EKO ATAS KEBIJAKAN PEMBATAAN KUNJ. WISATAWAN KE CANDI BOROBUDUR	2023	2023	Bappelitbangda	49.972.200,00	
14	Kajian	PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH	2023	2023	BPPKAD	2.271.444.948,00	
JUMLAH PENAMBAHAN KAJIAN						3.419.560.133,00	
TOTAL TAMBAH KURANG SOFTWARE DAN KAJIAN						6.674.897.383,00	

Lampiran 5.70
Rincian Penambahan Aset Lain-Lain

No	SKPD	Reklas	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Hasil Inv Barang Rusak Berat	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Hasil Inv Barang Tidak Ditemukan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		AT/ATB								
1	Dinsos	-	-	-	2.252.135.967,00	1.322.742.407,97	929.393.559,03			-
2	Disdagkop UKM	-	-	-	426.092.676,00	420.353.619,00	5.739.057,00	26.010.329,00	22.105.329,00	3.905.000,00
3	Set DPRD	-	-	-	144.003.862,00	132.708.862,00	11.295.000,00	10.375.000,00	4.150.000,00	6.225.000,00
4	Bappelitbangda	-	-	-	1.786.603.868,00	1.566.358.868,00	220.245.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
5	Kec. Borobudur	-	-	-	18.795.160,00	18.795.160,00	-			-
6	Kec. Dukun	-	-	-	24.043.017,00	24.043.017,00	-	38.817.750,00	19.325.680,00	19.492.070,00
7	Kec. Sawangan	-	-	-			-	1.433.878,00	1.433.878,00	-
8	Kec. Muntilan	-	-	-	142.655.937,00	142.655.937,00	-			-
9	Kec. Mertoyudan	-	-	-	87.180.559,00	87.180.559,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-
10	Kec. Bandongan	-	-	-	73.043.097,00	73.043.097,00	-	7.039.000,00	7.039.000,00	-
		-	-	-			-			-
Total		-	-	-	4.954.554.143,00	3.787.881.526,97	1.166.672.616,03	87.075.957,00	57.453.887,00	29.622.070,00

Lampiran 5.71
Rincian Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutannya per SKPD

No	SKPD	Nilai Perolehan Aset Lainnya 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (Rp)	Nilai Buku 2022 (Rp)	Nilai Perolehan Aset Lainnya 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Nilai Buku 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang
1	Disdikbud	22.136.302.754,00	9.502.499.229,91	12.633.803.524,09	22.136.302.754,00	9.502.499.229,91	12.633.803.524,09	-
2	Dinkes	8.713.837.041,00	5.255.559.263,03	3.458.277.777,97	8.713.837.041,00	5.255.559.263,03	3.458.277.777,97	-
3	RSUD Muntilan	1.742.303.294,00	-	1.742.303.294,00	1.742.303.294,00	-	1.742.303.294,00	-
4	DPU PR	8.828.463.897,00	2.368.418.361,00	6.460.045.536,00	8.828.463.897,00	2.368.418.361,00	6.460.045.536,00	-
5	DPRKP	140.958.547,00	73.538.747,00	67.419.800,00	140.958.547,00	73.538.747,00	67.419.800,00	-
6	Satpol PP	104.163.781,00	77.036.904,55	27.126.876,45	104.163.781,00	77.036.904,55	27.126.876,45	-
7	BPBD	90.214.760,00	17.899.250,00	72.315.510,00	90.214.760,00	17.899.250,00	72.315.510,00	-
8	Dinsos	18.000.000,00	-	18.000.000,00	2.270.135.967,00	1.322.742.407,97	947.393.559,03	929.393.559,03
9	Disperinnaker	1.019.453.224,00	335.500.510,60	683.952.713,40	1.019.453.224,00	335.500.510,60	683.952.713,40	-
10	Distanpangan	960.722.299,00	104.007.064,00	856.715.235,00	960.722.299,00	104.007.064,00	856.715.235,00	-
11	DLH	2.016.393.563,00	1.277.523.963,54	738.869.599,46	2.016.393.563,00	1.277.523.963,54	738.869.599,46	-
12	Disdukcapil	523.195.464,00	48.400.000,00	474.795.464,00	523.195.464,00	48.400.000,00	474.795.464,00	-
13	Dishub	1.848.871.136,00	1.505.958.608,00	342.912.528,00	1.848.871.136,00	1.505.958.608,00	342.912.528,00	-
14	Diskominfo	728.189.075,00	170.916.357,14	557.272.717,86	728.189.075,00	170.916.357,14	557.272.717,86	-
15	Disdagkop UKM	3.666.818.163,00	576.562.518,70	3.090.255.644,30	4.118.921.168,00	1.019.021.466,70	3.099.899.701,30	9.644.057,00
16	DPMPSTSP	466.258.183,00	396.744.054,20	69.514.128,80	466.258.183,00	396.744.054,20	69.514.128,80	-
17	Disparpora	560.805.880,00	99.747.000,00	461.058.880,00	560.805.880,00	99.747.000,00	461.058.880,00	-
18	Dispuspa	1.201.822.000,00	186.150.944,35	1.015.671.055,65	1.201.822.000,00	186.150.944,35	1.015.671.055,65	-
19	Dispeterikan	74.071.150,00	2.374.000,00	71.697.150,00	74.071.150,00	2.374.000,00	71.697.150,00	-
20	Setda	2.034.521.520,00	837.724.639,00	1.196.796.881,00	2.034.521.520,00	837.724.639,00	1.196.796.881,00	-
21	Set DPRD	1.107.550.060,00	343.482.210,00	764.067.850,00	1.261.928.922,00	480.341.072,00	781.587.850,00	17.520.000,00
22	Bappelitbangda	1.397.752.495,00	1.397.752.495,00	-	3.185.856.363,00	2.965.611.363,00	220.245.000,00	220.245.000,00
23	BPPKAD	12.842.195.457,00	5.136.104.898,43	7.706.090.558,57	12.842.195.457,00	5.136.104.898,43	7.706.090.558,57	-
24	BKPPD	442.192.904,00	441.862.514,40	330.389,60	442.192.904,00	441.862.514,40	330.389,60	-
25	Inspektorat	276.970.207,00	122.864.237,00	154.105.970,00	276.970.207,00	122.864.237,00	154.105.970,00	-
26	Kec. Salaman	327.669.422,00	110.611.352,00	217.058.070,00	327.669.422,00	110.611.352,00	217.058.070,00	-
27	Kec. Borobudur	-	-	-	18.795.160,00	18.795.160,00	-	-
28	Kec. Ngluwar	9.542.363,00	9.167.363,00	375.000,00	9.542.363,00	9.167.363,00	375.000,00	-
29	Kec. Salam	29.712.583,00	28.212.583,00	1.500.000,00	29.712.583,00	28.212.583,00	1.500.000,00	-
30	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Dukun	-	-	-	62.860.767,00	43.368.697,00	19.492.070,00	19.492.070,00
32	Kec. Sawangan	93.569.009,00	83.972.682,00	9.596.327,00	95.002.887,00	85.406.560,00	9.596.327,00	-
33	Kec. Muntilan	-	-	-	142.655.937,00	142.655.937,00	-	-
34	Kec. Mungkid	379.702.786,00	302.100.074,80	77.602.711,20	379.702.786,00	302.100.074,80	77.602.711,20	-
35	Kec. Mertoyudan	106.870.250,00	23.188.522,89	83.681.727,11	195.950.809,00	112.269.081,89	83.681.727,11	-
36	Kec. Tempuran	156.545.165,00	150.920.292,00	5.624.873,00	156.545.165,00	150.920.292,00	5.624.873,00	-

No	SKPD	Nilai Perolehan Aset Lainnya 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 (Rp)	Nilai Buku 2022 (Rp)	Nilai Perolehan Aset Lainnya 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 (Rp)	Nilai Buku 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang
37	Kec. Kajoran	108.526.973,00	108.526.973,00	-	108.526.973,00	108.526.973,00	-	-
38	Kec. Kaliangkrik	26.782.060,00	25.776.910,00	1.005.150,00	26.782.060,00	25.776.910,00	1.005.150,00	-
39	Kec. Bandongan	55.314.926,00	52.384.562,50	2.930.363,50	135.397.023,00	132.466.659,50	2.930.363,50	-
40	Kec. Candimulyo	91.976.872,00	73.450.112,00	18.526.760,00	91.976.872,00	73.450.112,00	18.526.760,00	-
41	Kec. Pakis	32.732.772,00	31.740.172,00	992.600,00	32.732.772,00	31.740.172,00	992.600,00	-
42	Kec. Ngablak	75.546.705,00	75.525.585,00	21.120,00	75.546.705,00	75.525.585,00	21.120,00	-
43	Kec. Grabag	109.566.944,00	106.654.444,00	2.912.500,00	109.566.944,00	106.654.444,00	2.912.500,00	-
44	Kec. Tegalrejo	140.772.746,00	139.652.746,00	1.120.000,00	140.772.746,00	139.652.746,00	1.120.000,00	-
45	Kec. Secang	134.098.105,00	133.373.105,00	725.000,00	134.098.105,00	133.373.105,00	725.000,00	-
46	Kec. Windusari	90.553.389,00	89.625.074,60	928.314,40	90.553.389,00	89.625.074,60	928.314,40	-
47	Bakesbangpol		-	-	-	-	-	-
TOTAL		74.911.509.924,00	31.823.510.323,64	43.087.999.600,36	79.953.140.024,00	35.668.845.737,61	44.284.294.286,39	1.196.294.686,03

Lampiran 5.72
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Nomor SK	Masa Berlaku		Jml Bulan	Tarif/Bulan	Nilai Kontrak
				Awal	Akhir			
1	Sewa Tanah dan Bangunan							2.015.381.581,80
a	RSUD Muntilan	Kantor Kas Bank Jateng		01/02/17	31/01/22	60	1.818.629,65	109.117.779,00
		ATM Bank Jateng		01/02/17	31/01/22	60	1.183.809,38	71.028.563,00
	Jumlah							180.146.342,00
b	BPPKAD	Bank Pasar	019.6/40/23/2017	01/02/17	31/01/22	60	1.087.595,38	65.255.723,00
		Bank Jateng	019.6/11/23/2017	01/10/17	30/09/22	60	124.983,85	7.499.031,00
		Persatuan Wredatama	019.6/37/23/2017	30/12/17	29/12/22	60	12.937,50	776.250,00
		BKK Muntilan	019.5/12/23/2021	01/12/19	30/11/22	36	1.732.873,83	62.383.458,00
		BKK Mungkid	019.5/11/23/2021	30/05/19	29/05/24	60	116.619,17	6.997.150,00
		BKK Sawangan	019.5/11/23/2021	30/05/19	29/05/24	60	179.593,52	10.775.611,00
		Bank Jateng	019.5/14/23/2021	05/01/22	04/09/25	44	1.162.302,70	51.141.318,80
		PT BPR ARTHA MERTOYUDAN (NEW ARMADA GROUP)	593/12//KEP/31/2015	18/12/15	17/12/35	240	1.368.812,28	328.514.946,00
		LINDAWATI WIBAWA	593/ /31/2014	31/12/14	31/12/34	240	735.976,20	176.634.288,00
		BCA Muntilan	593/ /31/2014	31/12/14	31/12/34	240	953.264,41	228.783.459,00
		PT BRI (Persero)Tbk	593/2579/31/2014	23/10/15	23/10/35	240	558.698,89	134.087.733,00
		PD BPR Bapas 69	593/341/31/2015	02/02/15	02/02/35	240	698.373,61	167.609.666,00
		TAN LIEM SENG	593/2665/31/2014	01/12/14	01/12/34	240	374.479,38	89.875.051,00
		Bank Jateng	019.5/18/23/2021	05/10/20	04/10/25	60	309.873,78	18.592.427,00
		Bank Jateng	019.5/18/23/2021	05/10/20	04/10/25	60	309.873,78	18.592.427,00
		Bank Jateng	019.5/14/23/2021	05/09/20	04/09/25	60	1.162.304,35	69.738.261,00
		BKK Muntilan	019.5/13/23/2021	30/05/19	29/05/24	60	408.333,33	24.500.000,00
		BKK Muntilan	019.6/37/23/2019	11/06/19	10/06/24	60	113.333,33	6.800.000,00
		BKK Muntilan		11/06/19	10/06/24	60	84.166,67	5.050.000,00
		Gladiool	019.5/08/23/2021	01/03/21	28/02/26	60	3.464.607,33	207.876.440,00
		Apik Susiana	019.5/04/23/2022	02/01/22	02/01/23	12	939.333,33	11.272.000,00
		Andreas Yoga Agung Sugiarta	019.5/05/23/2022	15/02/22	15/02/23	12	140.000,00	1.680.000,00
		Robertus Kisruh	019.5/06/23/2022	15/02/22	15/02/23	12	280.000,00	3.360.000,00
		Bambang Rahmanta	019.03/23/2022	15/02/22	15/02/23	12	560.000,00	6.720.000,00
		PT BRI (Persero)Tbk	019.5/74/23/2022	1 DESEMBER 2021 -	30 NOVEMBER 2024	36	1.228.988,56	44.243.588,00
		BANK JATENG	019.5/73/23/2022	02 JANUARI 2022	01 JANUARI 2027	61	1.274.526,41	77.746.111,00
		BANK JATENG	019.5/73/23/2022	02 JANUARI 2022	01 JANUARI 2027	61	2.138.473,23	130.446.867,00

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Nomor SK	Masa Berlaku		Jml Bulan	Tarif/Bulan	Nilai Kontrak
				Awal	Akhir			
		BANK JATENG	019.5/69/23/2022	03 OKTOBER 2022	02 OKTOBER 2027	48	2.419.199,81	116.121.591,00
		BKK Muntilan	019.5/ /23/2022	01 Desember 2022	30 nopember 2024	24	1.752.835,00	42.068.040,00
		KOPERASI KARYA HUSADA	019.5/70/23/2023	3 JANUARI 2022	2 JANUARI 2027	60	166.666,67	10.000.000,00
		PD BPR Bapas 69	019.5/56/23/2023	1 FEBRUARI 2023 -	31 JANUARI 2028	60	1.384.991,43	83.099.486,00
		DEBORA	019.5/66/23/2022	1 JUNI 2022	31 MEI 2025	36	153.027,78	5.509.000,00
		HERU IRIYANTA DIRJAYA	019.5/02/23/2021	29 JANUARI 2021	28 JANUARI 2025	60	2.708.333,33	162.500.000,00
		SUKAMTO	019.5/40/23/2021	30 AGUSTUS 2021	29 AGUSTUS 2026	60	782.415,10	46.944.906,00
		SUTIJAH	019.5/05/23/2021	22 MARET 2021	21 MARET 2026	60	2.481.373,65	148.882.419,00
		LPK SAITAMA	019.5/89/23/2023	01 JANUARI 2023	31 DESEMBER 2027	60	583.333,33	35.000.000,00
		GAPESWATI	019.5/90/23/2023	03 JANUARI 2020	02 JANUARI 2025	60	553.333,33	33.200.000,00
		UMAR SAID	019.5/05/23/2024	10 AGUSTUS 2022	09 AGUSTUS 2024	24	2835950	68.062.800
		RUKMINI NINGSIH	019.5/104/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		YUNITA SAFITRIYANI	019.5/91/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		HUSNI MUBAROK	019.5/101/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		RETNO SUPENI	019.5/92/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		SRI WAHYUNI	019.5/93/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		SITI FAIYAH	019.5/96/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		MUHAMMAD ABDUL AZIZ	019.5/94/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		CHOTIMAH	019.5/95/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		MUHRODJI	019.5/98/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		KISMIYATUN	019.5/100/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		ANGGORO MANINGGARJATI	019.5/97/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		RAHAYU NINGSIH	019.5/99/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		DWI HANYAYANINGSIH	019.5/102/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	191.250,00	2.295.000,00
		KARUDI	019.5/103/23/2023	01 MEI 2023	30 APRIL 2024	12	168.750,00	2.025.000,00
		Jumlah						1.704.515.239,80
c	DISPERINAKER	LPK SAITAMA, Jl. Pahlawan No 9 Prajenan, Mertoyudan, Magelang	188,4/4302/10/2017	01/01/18	31/12/22	60	583.333,33	35.000.000,00
		Jumlah						35.000.000,00

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Nomor SK	Masa Berlaku		Jml Bulan	Tarif/Bulan	Nilai Kontrak
				Awal	Akhir			
d	DISTANPANGAN	Umar Said, Magelang	019.6/23/22/2017	10/08/17	09/08/22	60	1.041.666,67	62.500.000,00
		Subiyanto, Magelang	019.6/24/22/2017	11/08/17	10/08/22	60	541.666,67	32.500.000,00
		Jumlah						95.000.000,00
e	DISKOMINFO	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA						-
		Jumlah						
f	DISDAGKOP UKM	Ahmad Baihaki	188.4/29/KEP/PKL/21/2023	01/01/24	31/12/24	12	30.000,00	360.000,00
			188.4/50/KEP/PKL/21/2023	01/01/24	31/12/24	12	30.000,00	360.000,00
		Jumlah						720.000,00
2	Pajak Reklame							
	BPPKAD							
	Jumlah							
3	Retribusi Pelayanan Pasar							-
a	DISDAGKOP UKM	Bandongan						
		Borobudur						
		Kaliangkrik						
		Kaponan						
		KWD Salaman						
		Mekar Muntilan						
		Mungkid						
		Ngablak						
		Pagergunung						
		Pkl Kaliangkrik						
		Plaza Muntilan						
		Salaman						
		Secang						
		STA Kaliangkrik						
		STA Ngablak						
		Talun						
		Tanjunganom						
		Tempuran						
		Umum Grabag						
		Umum Muntilan						
		Windusari						
		Jumlah						-

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Nomor SK	Masa Berlaku		Jml Bulan	Tarif/Bulan	Nilai Kontrak
				Awal	Akhir			
	b	DISPETERIKAN	PSH Muntilan					
			PSH Grabag					
			PSH Kaliangkrik					
			Psi Bojong					
		Jumlah						-
4	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha							
	DISHUB							
		Jumlah						
5	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum							
	DISHUB							
		Jumlah						
TOTAL								

Lampiran 5.72

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 Unaudited	KOREKSI		Saldo Akhir Audited 2023
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1		Sewa Tanah dan Bangunan	940.441.922,83	549.245.540,97	145.455.067,95	1.344.952.395,85	159.825,91	51.955.092,47	1.292.437.129,29
	a	RSUD Muntilan							
		Kantor Kas Bank Jateng	-		-	-			-
		ATM Bank Jateng	-		-	-			-
		Jumlah	-	-	-	-			-
	b	BPPKAD							
		Bank Pasar	(0,00)		-	(0,00)			(0,00)
		Bank Jateng	0,00		-	0,00			0,00
		Persatuan Wredatama	-		-	-			-
		BKK Muntilan	(0,01)		-	(0,01)	0,01		-
		BKK Mungkid	1.976.017,47		1.402.086,47	573.931,00			573.931,00
		BKK Sawangan	3.043.066,91		2.159.213,17	883.853,74			883.853,74
		Bank Jateng	37.350.401,37		13.944.149,85	23.406.251,53			23.406.251,53
		PT BPR ARTHA MERTOYUDAN (NEW ARMADA GROUP)	212.921.342,68		16.416.727,12	196.504.615,56			196.504.615,56
		LINDAWATI WIBAWA	105.980.572,80		8.825.652,83	97.154.919,97			97.154.919,97
		BCA Muntilan	137.270.075,40		11.431.321,77	125.838.753,63			125.838.753,63
		PT BRI (Persero)Tbk	85.882.410,73		6.699.785,15	79.182.625,58			79.182.625,58
		PD BPR Bapas 69	101.302.039,73		8.374.731,42	92.927.308,30			92.927.308,30
		TAN LIEM SENG	53.554.920,58		4.490.668,30	49.064.252,28			49.064.252,28
		Bank Jateng	10.266.697,33	-	3.718.485,40	6.548.211,93			6.548.211,93
		Bank Jateng	10.266.697,33	-	3.718.485,40	6.548.211,93			6.548.211,93
		Bank Jateng	37.359.782,68	-	13.947.652,20	23.412.130,48			23.412.130,48
		BKK Muntilan	6.901.976,94	-	4.897.309,17	2.004.667,76			2.004.667,76
		BKK Muntilan	1.960.461,29	-	1.359.253,16	601.208,13			601.208,13
		BKK Muntilan	1.455.930,81	-	1.009.445,36	446.485,45			446.485,45
		Gladiol	131.464.715,63	-	41.575.288,00	89.889.427,63			89.889.427,63
		Apik Susiana	30.967,03	-	30.967,03	(0,00)			(0,00)
		Andreas Yoga Agung Sugiarta	207.692,31	-	207.692,31	-			-
		Robertus Kisruh	415.384,62	-	415.384,62	-			-
		Bambang Rahmanta	830.769,23	-	830.769,23	-			-
		PT BRI (Persero)Tbk		13.523.359,47		13.523.359,47	3.079.996,65		10.443.362,821
		BANK JATENG		57.163.192,87		57.163.192,87	10.472.808,63		46.690.384,243
		BANK JATENG		95.911.670,98		95.911.670,98	17.571.876,68		78.339.794,303

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 Unaudited	KOREKSI		Saldo Akhir Audited 2023
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
		BANK JATENG		87.138.862,21		87.138.862,21	79.937,18		87.218.799,394
		BKK Muntilan		19.278.787,14		19.278.787,14	21.659,78		19.300.446,923
		KOPERASI KARYA HUSADA		6.013.143,48		6.013.143,48		2.154,47	6.010.989,011
		PD BPR Bapas 69		67.899.470,49		67.899.470,49		4.450,88	67.895.019,605
		DEBORA		2.603.430,53		2.603.430,53		5.321,56	2.598.108,974
		HERU IRIYANTA DIRJAYA		43.852.739,73		43.852.739,73		102.739,73	43.750.000,000
		SUKAMTO		24.987.633,23		24.987.633,23	6.660,13		24.994.293,359
		SUTIJAH		66.124.666,93		66.124.666,93		27.417,17	66.097.249,754
		LPK SAITAMA		28.003.833,52		28.003.833,52	10,53		28.003.844,042
		GAPESWATI		6.690.909,09		6.690.909,09		18.091,96	6.672.817,133
		UMAR SAID		20.670.234,75		20.670.234,75		20.670.234,75	-
		RUKMUNI NINGSIH		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		YUNITA SAFITRIYANI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		HUSNI MUBAROK		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		RETNO SUPENI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		SRI WAHYUNI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		SITI FAIYAH		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		MUHAMMAD ABDUL AZIZ		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		CHOTIMAH		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		MUHRODJI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		KISMIYATUN		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		ANGGORO MANINGGARJATI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		RAHAYU NINGSIH		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		DWI HANYAYANINGSIH		752.459,02		752.459,02	4.134,39		756.593,4066
		KARUDI		663.934,43		663.934,43	3.647,99		667.582,4176
		Jumlah	940.441.922,83	549.245.540,97	145.455.067,95	1.344.232.395,85	159.825,91	51.955.092,47	1.292.437.129,29
c	DISPERINAKER	LPK SAITAMA, Jl. Pahlawan No 9 Prajenan, Mertoyudan, Magelang	-	-	-	-			-
		Jumlah	-	-	-	-			-

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 Unaudited	KOREKSI		Saldo Akhir Audited 2023
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
	d	DISTANPANGAN							
		Umar Said, Magelang	-		-	-			-
		Subiyanto, Magelang	-		-	-			-
		Jumlah	-	-	-	-			-
	e	DISKOMINFO							
		PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	-	1.628.235,00	-	1.628.235,00			1.628.235,00
				1.628.235,00					-
	f	DISDAGKOP UKM							
		Ahmad Baihaki		360.000,00		360.000,00			360.000,00
				360.000,00		360.000,00			360.000,00
		Jumlah	-	720.000,00	-	720.000,00			720.000,00
2	Pajak Reklame		462.439.000,32	517.144.313,10	462.439.000,32	517.144.313,10			517.144.313,10
	BPPKAD		462.439.000,32	517.144.313,10	462.439.000,32	517.144.313,10			517.144.313,10
	Jumlah		462.439.000,32	517.144.313,10	462.439.000,32	517.144.313,10			517.144.313,10
3	Retribusi Pelayanan Pasar		8.871.803.964,39	272.240.101,24	4.464.365.197,56	4.679.678.868,07			4.679.678.868,07
	a	DISDAGKOP UKM							
		Bandongan	29.199.868,37	2.264.587,91	12.312.130,28	19.152.326,01			19.152.326,01
		Borobudur	33.430.642,94	13.659.784,62	20.340.832,38	26.749.595,18			26.749.595,18
		Kaliangkrik	8.600.651.253,52	124.438.886,56	4.295.249.376,10	4.429.840.763,98			4.429.840.763,98
		Kaponan	6.219.832,34	1.659.162,09	3.851.672,78	4.027.321,66			4.027.321,66
		KWD Salaman	3.027.604,04	1.739.491,76	1.799.529,73	2.967.566,07			2.967.566,07
		Mekar Muntilan	22.082.308,29	8.870.128,21	14.612.356,19	16.340.080,31			16.340.080,31
		Mungkid	17.988.344,04	7.616.945,97	12.359.126,70	13.246.163,31			13.246.163,31
		Ngablak	17.496.982,60	6.161.566,95	11.261.402,83	12.397.146,72			12.397.146,72
		Pagergunung	8.998.760,74	94.111,72	6.031.727,77	3.061.144,69			3.061.144,69
		Pki Kaliangkrik	-	-	-	-			-
		Plaza Muntilan	4.512.544,06	797.587,00	2.202.672,27	3.107.458,79			3.107.458,79
		Salaman	28.481.439,77	9.891.771,98	16.828.177,99	21.545.033,76			21.545.033,76
		Secang	3.484.191,90	11.803.342,49	3.179.214,79	12.108.319,60			12.108.319,60
		STA Kaliangkrik	59.489,30	23.575.350,73	59.489,30	23.575.350,73			23.575.350,73
		STA Ngablak	642.098,50	181.135,53	343.224,87	480.009,16			480.009,16
		Talun	29.759.929,47	20.341.528,81	22.117.169,56	27.984.288,72			27.984.288,72
		Tanjunganom	505.604,39	129.748,17	220.315,93	415.036,63			415.036,63
		Tempuran	1.895.080,51	-	1.870.662,45	24.418,07			24.418,07
		Umum Grabag	41.773.559,94	22.187.724,36	26.872.377,40	37.088.906,90			37.088.906,90
		Umum Muntilan	857.834,25	2.004.500,92	286.076,01	2.576.259,16			2.576.259,16
		Windusari	3.183.535,28	4.289.564,84	2.300.870,42	5.172.229,70			5.172.229,70
		Jumlah	8.854.250.904,28	261.706.920,60	4.454.098.405,75	4.661.859.419,13			4.661.859.419,13

No	SKPD	Nama WP/Pasar	Saldo Awal 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2023 Unaudited	KOREKSI		Saldo Akhir Audited 2023
							PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
	b	DISPETERIKAN							
		PSH Muntilan	8.772.176,63	9.933.312,14	4.241.667,23	14.463.821,53			14.463.821,53
		PSH Grabag	1.476.850,29	71.272,89	1.080.517,87	467.605,31			467.605,31
		PSH Kaliangkrik	3.147.498,20	385.000,00	1.505.065,69	2.027.432,51			2.027.432,51
		Psi Bojong	4.156.534,99	143.595,61	3.439.541,02	860.589,58			860.589,58
		Jumlah	17.553.060,11	10.533.180,64	10.266.791,81	17.819.448,94			17.819.448,94
4		Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	5.684.007,26	-	3.917.565,55	1.766.441,71			1.766.441,71
		DISHUB	5.684.007,26	-	3.917.565,55	1.766.441,71			1.766.441,71
		Jumlah	5.684.007,26	-	3.917.565,55	1.766.441,71			1.766.441,71
5		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	43.731.233,47	15.435.151,32	18.222.799,14	40.943.585,65			40.943.585,65
		DISHUB	43.731.233,47	15.435.151,32	18.222.799,14	40.943.585,65			40.943.585,65
		Jumlah	43.731.233,47	15.435.151,32	18.222.799,14	40.943.585,65			40.943.585,65
TOTAL			10.324.100.128,27	839.269.028,53	4.631.960.630,20	6.586.113.839,38	159.825,91	51.955.092,47	6.534.318.572,82

Lampiran 5.73
Utang Belanja per SKPD

NO	KODE REK	SKPD	SALDO 31 DES 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	441.816.086,00	484.872.505,00	457.798.381,00	468.890.210,00
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	2.223.620.433,00	3.463.564.516,00	2.223.620.433,00	3.463.564.516,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	5.835.614.474,00	4.007.515.235,00	5.841.117.374,00	4.002.012.335,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	1.863.415,00	2.130.000,00	1.863.415,00	2.130.000,00
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	2.975.795,00	2.938.795,00	2.975.795,00	2.938.795,00
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	39.094.405,00	8.986.186,00	39.094.405,00	8.986.186,00
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	5.640.405,00	6.089.030,00	5.640.405,00	6.089.030,00
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	3.285.499,00	4.672.812,00	3.285.499,00	4.672.812,00
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	4.804.089,00	4.759.922,00	4.804.089,00	4.759.922,00
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	9.991.793,00	11.443.661,00	9.991.793,00	11.443.661,00
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	20.608.404,00	-	20.608.404,00
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	7.062.945,00	6.825.174,00	7.062.945,00	6.825.174,00
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	4.685.618,00	6.249.812,00	4.685.618,00	6.249.812,00
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	1.765.427.424,00	1.772.741.064,00	1.765.427.424,00	1.772.741.064,00
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	23.847.481,00	-	23.847.481,00
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	58.635.100,00	62.168.138,00	58.635.100,00	62.168.138,00
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMP TSP	4.749.332,00	341.610,00	4.749.332,00	341.610,00
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	36.000.258,00	54.798.920,00	36.000.258,00	54.798.920,00
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	13.574.171,00	17.905.209,00	13.574.171,00	17.905.209,00
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	21.270.157,00	10.534.143,00	21.270.157,00	10.534.143,00
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	91.695.751,00	98.558.749,00	91.695.751,00	98.558.749,00
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	10.738.172,00	-	10.738.172,00	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	5.372.348,00	-	5.372.348,00	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	4.087.827,00	-	4.087.827,00	-
25	5.03.5.04.0.00.01	BKPPD	-	-	-	-
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	3.699.502,00	-	3.699.502,00	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	1.414.584,00	1.719.398,00	1.414.584,00	1.719.398,00
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	3.028.757,00	3.169.990,00	3.028.757,00	3.169.990,00
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	741.827,00	1.063.861,00	741.827,00	1.063.861,00
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	1.642.323,00	-	1.642.323,00
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	997.454,00	-	997.454,00	-
32	7.01.0.00.0.00.06	Kec Dukun	613.000,00	649.275,00	613.000,00	649.275,00
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	496.260,00	604.936,00	496.260,00	604.936,00
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	2.129.769,00	3.289.051,00	2.129.769,00	3.289.051,00
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11	Kec. Tempuran	1.597.399,00	1.930.838,00	1.597.399,00	1.930.838,00
38	7.01.0.00.0.00.12	Kec. Kajoran	817.291,00	542.976,00	817.291,00	542.976,00
39	7.01.0.00.0.00.13	Kec. Kaliangkrik	2.498.645,00	1.431.641,00	2.498.645,00	1.431.641,00
40	7.01.0.00.0.00.14	Kec. Bandongan	2.611.942,00	3.157.760,00	2.611.942,00	3.157.760,00
41	7.01.0.00.0.00.15	Kec. Candimulyo	2.396.401,00	3.779.076,00	2.396.401,00	3.779.076,00
42	7.01.0.00.0.00.16	Kec. Pakis	1.162.486,00	1.422.330,00	1.162.486,00	1.422.330,00

NO	KODE REK	SKPD	SALDO 31 DES 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6
43	7.01.0.00.0.00.17	Kec. Ngablak	1.639.384,00	2.827.681,00	1.639.384,00	2.827.681,00
44	7.01.0.00.0.00.18	Kec. Grabag	2.062.512,00	2.539.541,00	2.062.512,00	2.539.541,00
45	7.01.0.00.0.00.19	Kec. Tegalrejo	1.197.162,00	1.429.236,00	1.197.162,00	1.429.236,00
46	7.01.0.00.0.00.20	Kec. Secang	1.467.318,00	1.849.509,00	1.467.318,00	1.849.509,00
47	7.01.0.00.0.00.21	Kec. Windusari	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	1.233.303,00	1.527.803,00	1.233.303,00	1.527.803,00
	JUMLAH		10.623.810.493,00	10.106.128.591,00	10.645.295.688,00	10.084.643.396,00

Lampiran 5.74
Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA PEGAWAI			JUMLAH UTANG PEGAWAI
			Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	
			2.1.06.01.01.0005	2.1.06.01.01.0017	2.1.06.01.03.0050	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	-	-	-	-
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	-	42.098.785,00	1.871.729.295,00	1.913.828.080,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	-	92.308.928,00	2.658.333.801,00	2.750.642.729,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	-	-	-
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	-	-	-	-
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	-	-	-	-
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	-	-	-	-
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	-	-	-	-
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	-	-	-	-
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	-	-	-	-
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	-	-	-
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	-	-	-	-
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	-	-	-	-
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	-	-	-	-
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	-	-	-
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	-	-	-	-
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMPTSP	-	-	-	-
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	-	-	-	-
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	-	-	-	-
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	-	-	-	-
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	-	-	-	-
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA PEGAWAI			JUMLAH UTANG PEGAWAI
			Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	
			2.1.06.01.01.0005	2.1.06.01.01.0017	2.1.06.01.03.0050	
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	-	-	-	-
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	-	-	-	-
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	-	-	-	-
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	-	-	-
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06.	Kec Dukun	-	-	-	-
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	-	-	-	-
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	-	-	-	-
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11.	Kec. Tempuran	-	-	-	-
38	7.01.0.00.0.00.12.	Kec. Kajoran	-	-	-	-
39	7.01.0.00.0.00.13.	Kec. Kaliangkrik	-	-	-	-
40	7.01.0.00.0.00.14.	Kec. Bandongan	-	-	-	-
41	7.01.0.00.0.00.15.	Kec. Candimulyo	810.000,00	32.400,00	-	842.400,00
42	7.01.0.00.0.00.16.	Kec. Pakis	-	-	-	-
43	7.01.0.00.0.00.17.	Kec. Ngablak	-	-	-	-
44	7.01.0.00.0.00.18.	Kec. Grabag	-	-	-	-
45	7.01.0.00.0.00.19.	Kec. Tegalrejo	-	-	-	-
46	7.01.0.00.0.00.20.	Kec. Secang	-	-	-	-
47	7.01.0.00.0.00.21.	Kec. Windusari	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01.	Bakesbangpol	-	-	-	-
	JUMLAH		810.000,00	134.440.113,00	4.530.063.096,00	4.665.313.209,00

Lampiran 5.74

Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA BARANG				JUMLAH UTANG BARANG
			Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat- Obatan	
			2.1.06.02.01.0010	2.1.06.02.01.0016	2.1.06.02.01.0026	2.1.06.02.01.0037	
1	2	3	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	-	-	-	-	-
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	7.440.000,00	-	280.050,00	-	7.720.050,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	-	493.834,00	-	427.072.324,00	427.566.158,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	-	-	-	-
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	-	-	-	-	-
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	-	-	-	-	-
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	-	-	-	-	-
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	-	-	-	-	-
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	-	-	-	-	-
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	-	-	-	-	-
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	-	-	-	-
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	-	-	-	-	-
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	-	-	-	-	-
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	-	-	-	-	-
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	-	-	-	-
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	-	-	-	-	-
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMPTSP	-	-	-	-	-
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	-	-	-	-	-
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	-	-	-	-	-
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	-	-	-	-	-
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	-	-	-	-	-
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA BARANG				JUMLAH UTANG BARANG
			Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat- Obatan	
			2.1.06.02.01.0010	2.1.06.02.01.0016	2.1.06.02.01.0026	2.1.06.02.01.0037	
1	2	3	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	-	-	-	-	-
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	-	-	-	-	-
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	-	-	-	-	-
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	-	-	-	-
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06	Kec Dukun	-	-	-	-	-
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	-	-	-	-	-
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	-	-	-	-	-
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11	Kec. Tempuran	-	-	-	-	-
38	7.01.0.00.0.00.12	Kec. Kajoran	-	-	-	-	-
39	7.01.0.00.0.00.13	Kec. Kaliangkrik	-	-	-	-	-
40	7.01.0.00.0.00.14	Kec. Bandongan	-	-	-	-	-
41	7.01.0.00.0.00.15	Kec. Candimulyo	-	-	-	-	-
42	7.01.0.00.0.00.16	Kec. Pakis	-	-	-	-	-
43	7.01.0.00.0.00.17	Kec. Ngablak	-	-	-	-	-
44	7.01.0.00.0.00.18	Kec. Grabag	-	-	-	-	-
45	7.01.0.00.0.00.19	Kec. Tegalrejo	-	-	-	-	-
46	7.01.0.00.0.00.20	Kec. Secang	-	-	-	-	-
47	7.01.0.00.0.00.21	Kec. Windusari	-	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	-	-	-	-	-
	JUMLAH		7.440.000,00	493.834,00	280.050,00	427.072.324,00	435.286.208,00

Lampiran 5.74

Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA JASA				
			Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan
			2.1.06.02.02.0059	2.1.06.02.02.0060	2.1.06.02.02.0061	2.1.06.02.02.0062	2.1.06.02.02.0063
1	2	3	13	14	15	16	17
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	894.597,00	1.070.150,00	21.526.322,00	2.080.000,00	12.442.180,00
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	6.173.118,00	11.817.130,00	244.522.237,00	-	19.908.716,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	8.445.313,00	13.826.585,00	131.026.273,00	-	-
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	2.130.000,00	-	-	-
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	32.659,00	132.390,00	1.955.846,00	160.000,00	657.900,00
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	3.613.187,00	1.528.855,00	3.844.144,00	-	-
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	194.757,00	350.440,00	4.785.009,00	-	758.824,00
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	26.145,00	471.410,00	2.797.297,00	-	1.377.960,00
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	173.626,00	258.000,00	3.273.946,00	-	1.054.350,00
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	159.146,00	2.662.905,00	7.781.703,00	-	839.907,00
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	34.357,00	445.215,00	20.128.832,00	-	-
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	663.187,00	90.550,00	6.071.437,00	-	-
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	631.592,00	-	5.518.220,00	100.000,00	-
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	900.320,00	-	13.601.537,00	100.000,00	3.319.480,00
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	575.290,00	225.660,00	23.046.531,00	-	-
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	64.607,00	10.859.635,00	51.243.896,00	-	-
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMPSTP	-	341.610,00	-	-	-
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	872.680,00	30.752.935,00	21.532.165,00	-	1.641.140,00
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	6.300.089,00	1.476.150,00	8.814.170,00	-	1.314.800,00
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	58.186,00	1.677.220,00	7.282.414,00	-	1.516.323,00
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	3.003.384,00	21.090.240,00	74.465.125,00	-	-
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	BELANJA JASA				
			Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/T V Berlangganan
			2.1.06.02.02.0059	2.1.06.02.02.0060	2.1.06.02.02.0061	2.1.06.02.02.0062	2.1.06.02.02.0063
1	2	3	13	14	15	16	17
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	36.299,00	267.790,00	1.415.309,00	-	-
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	41.577,00	98.550,00	3.029.863,00	-	-
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	34.357,00	-	1.029.504,00	-	-
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	318.850,00	-	972.766,00	-	350.707,00
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06	Kec Dukun	649.275,00	-	-	-	-
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	111.280,00	-	493.656,00	-	-
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	130.332,00	181.090,00	2.977.629,00	-	-
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11	Kec. Tempuran	100.957,00	235.865,00	1.594.016,00	-	-
38	7.01.0.00.0.00.12	Kec. Kajoran	91.300,00	-	451.676,00	-	-
39	7.01.0.00.0.00.13	Kec. Kaliangkrik	-	-	1.298.441,00	-	133.200,00
40	7.01.0.00.0.00.14	Kec. Bandongan	36.022,00	619.400,00	2.502.338,00	-	-
41	7.01.0.00.0.00.15	Kec. Candimulyo	843.880,00	141.635,00	1.951.161,00	-	-
42	7.01.0.00.0.00.16	Kec. Pakis	-	91.895,00	1.090.435,00	240.000,00	-
43	7.01.0.00.0.00.17	Kec. Ngablak	200.000,00	-	2.325.481,00	-	302.200,00
44	7.01.0.00.0.00.18	Kec. Grabag	38.686,00	403.395,00	1.957.460,00	140.000,00	-
45	7.01.0.00.0.00.19	Kec. Tegalrejo	58.000,00	86.180,00	790.056,00	170.000,00	325.000,00
46	7.01.0.00.0.00.20	Kec. Secang	78.404,00	288.970,00	1.482.135,00	-	-
47	7.01.0.00.0.00.21	Kec. Windusari	-	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	283.330,00	110.585,00	826.140,00	-	307.748,00
	JUMLAH		35.868.789,00	103.732.435,00	679.405.170,00	2.990.000,00	46.250.435,00

Lampiran 5.74
Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)- Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	JUMLAH UTANG JASA
			2.1.06.02.02.0068	2.1.06.02.02.0069	2.1.06.02.02.0968	2.1.06.02.02.1028	
1	2	3	18	19	20	21	22 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	-	-	-	-	38.013.249,00
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	-	-	-	1.074.707.715,00	1.357.128.916,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	-	43.799.268,00	76.644.750,00	528.462.399,00	802.204.588,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	-	-	-	2.130.000,00
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	-	-	-	-	2.938.795,00
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	-	-	-	-	8.986.186,00
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	-	-	-	-	6.089.030,00
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	-	-	-	-	4.672.812,00
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	-	-	-	-	4.759.922,00
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	-	-	-	-	11.443.661,00
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	-	-	-	20.608.404,00
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	-	-	-	-	6.825.174,00
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	-	-	-	-	6.249.812,00
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	1.754.819.727,00	-	-	-	1.772.741.064,00
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	-	-	-	23.847.481,00
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	-	-	-	-	62.168.138,00
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMPSTSP	-	-	-	-	341.610,00
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	-	-	-	-	54.798.920,00
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispusta	-	-	-	-	17.905.209,00
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	-	-	-	-	10.534.143,00
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	-	-	-	-	98.558.749,00
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)- Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	JUMLAH UTANG JASA
			2.1.06.02.02.0068	2.1.06.02.02.0069	2.1.06.02.02.0968	2.1.06.02.02.1028	
1	2	3	18	19	20	21	22 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	-	-	-	-	1.719.398,00
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	-	-	-	-	3.169.990,00
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	-	-	-	-	1.063.861,00
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	-	-	-	1.642.323,00
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06	Kec Dukun	-	-	-	-	649.275,00
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	-	-	-	-	604.936,00
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	-	-	-	-	3.289.051,00
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11	Kec. Tempuran	-	-	-	-	1.930.838,00
38	7.01.0.00.0.00.12	Kec. Kajoran	-	-	-	-	542.976,00
39	7.01.0.00.0.00.13	Kec. Kaliangkrik	-	-	-	-	1.431.641,00
40	7.01.0.00.0.00.14	Kec. Bandongan	-	-	-	-	3.157.760,00
41	7.01.0.00.0.00.15	Kec. Candimulyo	-	-	-	-	2.936.676,00
42	7.01.0.00.0.00.16	Kec. Pakis	-	-	-	-	1.422.330,00
43	7.01.0.00.0.00.17	Kec. Ngablak	-	-	-	-	2.827.681,00
44	7.01.0.00.0.00.18	Kec. Grabag	-	-	-	-	2.539.541,00
45	7.01.0.00.0.00.19	Kec. Tegalrejo	-	-	-	-	1.429.236,00
46	7.01.0.00.0.00.20	Kec. Secang	-	-	-	-	1.849.509,00
47	7.01.0.00.0.00.21	Kec. Windusari	-	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	-	-	-	-	1.527.803,00
	JUMLAH		1.754.819.727,00	43.799.268,00	76.644.750,00	1.603.170.114,00	4.346.680.688,00

Lampiran 5.74

Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	UTANG PEMELIHARAAN		UMLAH UTANG PEMELIHARAAN	UTANG UANG / JASA DI SERAHKAN MASYARAKAT		JUMLAH UTANG / JASA YG DI SERAHKAN MASYARAKAT
			Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor		Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	
			2.1.06.02.03.0183	2.1.06.02.03.0572		2.1.06.02.05.0004	2.1.06.02.05.0006	
1	2	3	23	24	25 = 23 + 24	26	27	28 = 26 + 27
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	-	-	-	-	-	-
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	-	-	-	-	184.887.470,00	184.887.470,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	15.906.000,00	1.800.000,00	17.706.000,00	897.860,00	-	897.860,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	-	-	-	-	-
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	-	-	-	-	-	-
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	-	-	-	-	-	-
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	-	-	-	-	-	-
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	-	-	-	-	-	-
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	-	-	-	-	-	-
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	-	-	-	-	-	-
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	-	-	-	-	-
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	-	-	-	-	-	-
13	2.13.0.00.0.00.01	Disperdades	-	-	-	-	-	-
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	-	-	-	-	-	-
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	-	-	-	-	-
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	-	-	-	-	-	-
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMPTSP	-	-	-	-	-	-
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	-	-	-	-	-	-
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	-	-	-	-	-	-
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	-	-	-	-	-	-
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	-	-	-	-	-	-
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	UTANG PEMELIHARAAN		UMLAH UTANG PEMELIHARAAN	UTANG UANG / JASA DI SERAHKAN MASYARAKAT		JUMLAH UTANG / JASA YG DI SERAHKAN MASYARAKAT
			Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor		Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	
			2.1.06.02.03.0183	2.1.06.02.03.0572		2.1.06.02.05.0004	2.1.06.02.05.0006	
1	2	3	23	24	25 = 23 + 24	26	27	28 = 26 + 27
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	-	-	-	-	-	-
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	-	-	-	-	-	-
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	-	-	-	-	-	-
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	-	-	-	-	-
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06.	Kec Dukun	-	-	-	-	-	-
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	-	-	-	-	-	-
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	-	-	-	-	-	-
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11.	Kec. Tempuran	-	-	-	-	-	-
38	7.01.0.00.0.00.12.	Kec. Kajoran	-	-	-	-	-	-
39	7.01.0.00.0.00.13.	Kec. Kaliangkrik	-	-	-	-	-	-
40	7.01.0.00.0.00.14.	Kec. Bandongan	-	-	-	-	-	-
41	7.01.0.00.0.00.15.	Kec. Candimulyo	-	-	-	-	-	-
42	7.01.0.00.0.00.16.	Kec. Pakis	-	-	-	-	-	-
43	7.01.0.00.0.00.17.	Kec. Ngablak	-	-	-	-	-	-
44	7.01.0.00.0.00.18.	Kec. Grabag	-	-	-	-	-	-
45	7.01.0.00.0.00.19.	Kec. Tegalrejo	-	-	-	-	-	-
46	7.01.0.00.0.00.20.	Kec. Secang	-	-	-	-	-	-
47	7.01.0.00.0.00.21.	Kec. Windusari	-	-	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH		15.906.000,00	1.800.000,00	17.706.000,00	897.860,00	184.887.470,00	185.785.330,00

Lampiran 5.74
Rincian Utang Belanja per SKPD Tahun 2023

NO	KODE SKPD	SKPD	UTANG BARJAS BOS	JUMLAH UTANG BARJAS BOS	UTANG MODAL	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL	TOTAL UTANG 2023
			Utang Belanja Barang dan Jasa BOS		Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer		
			2.1.06.02.88.8888		2.1.06.07.10.0002		
1	2	3	29	30 = 29	31	32 = 31	33
1	1.01.2.22.0.00.01	Disdikbud	430.876.961,00	430.876.961,00	-	-	468.890.210,00
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinkes	-	-	-	-	3.463.564.516,00
3	1.02.0.00.0.00.02	RSU Muntilan	-	-	2.995.000,00	2.995.000,00	4.002.012.335,00
4	1.03.2.10.0.00.01	DPU PR	-	-	-	-	2.130.000,00
5	1.04.0.00.0.00.01	DPRKP	-	-	-	-	2.938.795,00
6	1.05.0.00.0.00.01	Satpol PP	-	-	-	-	8.986.186,00
7	1.05.0.00.0.00.02	BPBD	-	-	-	-	6.089.030,00
8	1.06.2.14.2.08.01	Dinsos	-	-	-	-	4.672.812,00
9	2.07.3.31.0.00.01	Disperinaker	-	-	-	-	4.759.922,00
10	2.09.3.27.0.00.01	Distanpangan	-	-	-	-	11.443.661,00
11	2.11.0.00.0.00.01	DLH	-	-	-	-	20.608.404,00
12	2.12.0.00.0.00.01	Disdukcapil	-	-	-	-	6.825.174,00
13	2.13.0.00.0.00.01	Dispermades	-	-	-	-	6.249.812,00
14	2.15.0.00.0.00.01	Dishub	-	-	-	-	1.772.741.064,00
15	2.16.2.20.2.21.01	Diskominfo	-	-	-	-	23.847.481,00
16	2.17.3.30.0.00.01	Disdagkop UKM	-	-	-	-	62.168.138,00
17	2.18.0.00.0.00.01	DPMP TSP	-	-	-	-	341.610,00
18	2.19.3.26.0.00.01	Disparpora	-	-	-	-	54.798.920,00
19	2.23.2.24.0.00.01	Dispuspa	-	-	-	-	17.905.209,00
20	3.25.3.27.0.00.01	Dispeterikan	-	-	-	-	10.534.143,00
21	4.01.0.00.0.00.01	Setda	-	-	-	-	98.558.749,00
22	4.02.0.00.0.00.01	Set DPRD	-	-	-	-	-
23	5.01.5.05.0.00.01	Bappelitbangda	-	-	-	-	-
24	5.02.0.00.0.00.01	BPPKAD	-	-	-	-	-
25	5.03.5.04.0.00.01.0000	BKPPD	-	-	-	-	-

NO	KODE SKPD	SKPD	UTANG BARJAS BOS	JUMLAH UTANG BARJAS BOS	UTANG MODAL	JUMLAH UTANG BELANJA MODAL	TOTAL UTANG 2023
			Utang Belanja Barang dan Jasa BOS		Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer		
			2.1.06.02.88.8888		2.1.06.07.10.0002		
1	2	3	29	30 = 29	31	32 = 31	33
26	6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT	-	-	-	-	-
27	7.01.0.00.0.00.01.	Kec. Salaman	-	-	-	-	1.719.398,00
28	7.01.0.00.0.00.02.	Kec. Borobudur	-	-	-	-	3.169.990,00
29	7.01.0.00.0.00.03.	Kec. Ngluwar	-	-	-	-	1.063.861,00
30	7.01.0.00.0.00.04.	Kec. Salam	-	-	-	-	1.642.323,00
31	7.01.0.00.0.00.05.	Kec. Srumbung	-	-	-	-	-
32	7.01.0.00.0.00.06	Kec Dukun	-	-	-	-	649.275,00
33	7.01.0.00.0.00.07.	Kec. Sawangan	-	-	-	-	604.936,00
34	7.01.0.00.0.00.08.	Kec Muntilan	-	-	-	-	-
35	7.01.0.00.0.00.09.	Kec. Mungkid	-	-	-	-	3.289.051,00
36	7.01.0.00.0.00.10.	Kec. Mertoyudan	-	-	-	-	-
37	7.01.0.00.0.00.11	Kec. Tempuran	-	-	-	-	1.930.838,00
38	7.01.0.00.0.00.12	Kec. Kajoran	-	-	-	-	542.976,00
39	7.01.0.00.0.00.13	Kec. Kaliangkrik	-	-	-	-	1.431.641,00
40	7.01.0.00.0.00.14	Kec. Bandongan	-	-	-	-	3.157.760,00
41	7.01.0.00.0.00.15	Kec. Candimulyo	-	-	-	-	3.779.076,00
42	7.01.0.00.0.00.16	Kec. Pakis	-	-	-	-	1.422.330,00
43	7.01.0.00.0.00.17	Kec. Ngablak	-	-	-	-	2.827.681,00
44	7.01.0.00.0.00.18	Kec. Grabag	-	-	-	-	2.539.541,00
45	7.01.0.00.0.00.19	Kec. Tegalrejo	-	-	-	-	1.429.236,00
46	7.01.0.00.0.00.20	Kec. Secang	-	-	-	-	1.849.509,00
47	7.01.0.00.0.00.21	Kec. Windusari	-	-	-	-	-
48	8.01.0.00.0.00.01	Bakesbangpol	-	-	-	-	1.527.803,00
	JUMLAH		430.876.961,00	430.876.961,00	2.995.000,00	2.995.000,00	10.084.643.396,00

Lampiran 5.75
Lampiran Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah -LO
Tahun 2023

No	Kode SKPD	Nama SKPD	8 . 1 . 2		Kenaikan / Penurunan	(%)
			Pendapatan Retribusi Daerah -LO			
			Tahun 2023	Tahun 2022		
1	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinkes	761.504.209,00	406.238.000,00	355.266.209,00	87,45
2	1.03.2.10.0.00.01.0000	DPU PR	2.166.269.627,00	1.399.123.330,00	767.146.297,00	54,83
3	2.07.3.31.0.00.01.0000	Disperinnaker	111.677.200,00	21.734.000,00	89.943.200,00	413,84
4	2.09.3.27.0.00.01.0000	Distanpangan	34.675.500,00	11.083.334,00	23.592.166,00	212,86
5	2.11.0.00.0.00.01.0000	DLH	1.518.366.981,00	1.316.032.278,00	202.334.703,00	15,37
6	2.12.0.00.0.00.01.0000	Disdukcapil	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
7	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dishub	2.243.964.413,37	2.380.016.839,27	(136.052.425,90)	(5,72)
8	2.16.2.20.2.21.01.0000	Diskominfo	1.446.469.984,00	1.327.598.315,00	118.871.669,00	8,95
9	2.17.3.30.0.00.01.0000	Disdagkop UKM	8.092.846.932,15	4.878.326.532,73	3.214.520.399,42	65,89
10	2.19.3.26.0.00.01.0000	Disparpora	5.829.430.670,00	3.832.570.920,00	1.996.859.750,00	52,10
11	3.25.3.27.0.00.01.0000	Disptarikan	645.312.011,17	634.119.338,55	11.192.672,62	1,77
12	4.01.0.00.0.00.01.0000	Setda	11.545.000,00	13.970.000,00	(2.425.000,00)	(17,36)
13	5.02.0.00.0.00.01.0000	BPPKAD	24.997.180,00	1.838.000,00	23.159.180,00	1.260,02
14	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kec. Muntilan	44.330.000,00	33.306.000,00	11.024.000,00	33,10
15	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kec. Mungkid	15.060.000,00	-	15.060.000,00	100,00
16	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kec. Mertoyudan	9.200.000,00	8.910.000,00	290.000,00	3,25
17	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kec. Secang	32.883.000,00	32.883.000,00	-	-
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah -LO			22.997.532.707,69	16.306.749.887,55	6.690.782.820,14	41,03

Lampiran 5.76
Tabel Perhitungan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
Tahun 2023

Nama BUMD	Pendapatan LRA 31 Desember 2023	Metode Ekuitas		Pendapatan LO per 31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5=2+3-4
Bapas 69	15.307.790.112,00	574.542.386,00		15.882.332.498,00
PDAU	109.627.944,00	95.025.242,00		204.653.186,00
PDAM	4.240.942.536,00	1.174.588.659,00		5.415.531.195,00
Bank Jateng	10.275.387.698,00	-		10.275.387.698,00
BKK Muntilan	664.467.506,00	362.421.197,28		1.026.888.703,28
Jumlah	30.598.215.796,00	2.206.577.484,28	-	32.804.793.280,28

Lampiran 5.77
Realisasi Lain -Lain PAD Yang Sah -LO
Tahun 2023

No	Kode SKPD	Nama SKPD	8 . 1 . 4		Kenaikan / Penurunan	(%)
			Lain -Lain PAD Yang Sah -LO			
			Tahun 2023	Tahun 2022		
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	DISDIKBUD	78.761.530,00	85.550.702,00	(6.789.172,00)	(7,94)
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINKES	133.217.202.014,00	90.995.279.943,00	42.221.922.071,00	46,40
3	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD MUNTILAN	76.709.941.692,90	65.359.184.697,40	11.350.756.995,50	17,37
4	1.03.2.10.0.00.01.0000	DPU PR	4.678.500,00	11.388.600,00	(6.710.100,00)	(58,92)
5	2.07.3.31.0.00.01.0000	DISPERINNAKER	35.000.000,00	-	35.000.000,00	100,00
6	2.09.3.27.0.00.01.0000	DISTANPANGAN	55.132.050,00	26.500.000,00	28.632.050,00	108,05
7	2.11.0.00.0.00.01.0000	DLH	46.210.000,00	-	46.210.000,00	100,00
8	2.15.0.00.0.00.01.0000	DISHUB	661.612.360,00	543.309.560,00	118.302.800,00	21,77
9	2.16.2.20.2.21.01.0000	DISKOMINFO	5,00	1.410.664,00	(1.410.659,00)	(100,00)
10	2.17.3.30.0.00.01.0000	DISDAGKOP UKM	272.787.182,85	262.265.673,75	10.521.509,10	4,01
11	3.25.3.27.0.00.01.0000	DISPETERIKAN	111.180.978,00	356.400,00	110.824.578,00	31.095,56
12	5.02.0.00.0.00.01.0000	BPPKAD	16.199.116.249,12	19.693.751.203,07	(3.494.634.953,95)	(17,74)
			227.391.622.561,87	176.978.997.443,22	50.412.625.118,65	28,49

Lampiran 5.78
Rincian Pendapatan Hibah SKPD Tahun 2023

SKPD	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO			TOTAL PENDAPATAN HIBAH
	Tahun 2023			Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023			
	Hibah Uang	Hibah Barang	Hibah Persediaan	Hibah Persediaan	Hibah Barang	Hibah Uang	Hibah Barang	Hibah Persediaan	
DISDIKBUD					180.000.000,00				180.000.000,00
DINKES							350.633.330,00		350.633.330,00
DPU PR		13.629.807.580,00	1.061.624.000,00						14.691.431.580,00
BPBD		35.900.000,00	12.210.000,00	24.499.811,00		35.000.000,00	2.850.000,00	394.125.000,00	504.584.811,00
DINSOS PPKB PPPA						55.395.000,00			55.395.000,00
DISTANPANGAN		26.300.000,00							26.300.000,00
DLH							168.650.000,00		168.650.000,00
BPPKAD	18.454.635.298,00								18.454.635.298,00
TOTAL	18.454.635.298,00	13.692.007.580,00	1.073.834.000,00	24.499.811,00	180.000.000,00	90.395.000,00	522.133.330,00	394.125.000,00	34.431.630.019,00

Lampiran 5.79
Rincian Beban Operasi Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Operasi		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	718.636.488.840,00	622.672.829.639,00	95.963.659.201,00	15,41
2	Dinkes	307.218.387.640,93	240.628.111.944,69	66.590.275.696,24	27,67
3	RSUD Muntilan	102.794.557.645,47	94.120.109.321,36	8.674.448.324,11	9,22
4	DPU PR	56.212.233.420,00	49.178.170.218,00	7.034.063.202,00	14,30
5	DPRKP	4.017.268.923,00	12.284.998.393,00	(8.267.729.470,00)	(67,30)
6	Satpol PP	20.293.404.646,00	17.252.827.736,00	3.040.576.910,00	17,62
7	BPBD	5.846.300.207,00	6.345.913.128,00	(499.612.921,00)	(7,87)
8	Dinsos	34.633.752.858,00	26.251.467.325,00	8.382.285.533,00	31,93
9	Disperinnaker	12.624.120.347,00	11.029.070.785,00	1.595.049.562,00	14,46
10	Distanpangan	42.652.373.734,00	54.044.480.157,00	(11.392.106.423,00)	(21,08)
11	DLH	24.575.358.247,75	19.672.753.950,00	4.902.604.297,75	24,92
12	Disdukcapil	6.922.825.392,00	6.712.244.729,00	210.580.663,00	3,14
13	Dispermades	16.149.118.504,00	13.835.759.757,00	2.313.358.747,00	16,72
14	Dishub	33.515.110.032,00	33.136.255.707,00	378.854.325,00	1,14
15	Diskominfo	14.219.823.038,00	12.750.526.777,00	1.469.296.261,00	11,52
16	Disdagkop UKM	18.789.923.513,00	18.623.533.328,25	166.390.184,75	0,89
17	DPMPTSP	4.565.245.481,00	4.803.128.521,00	(237.883.040,00)	(4,95)
18	Disparpora	21.186.068.637,00	18.167.400.062,00	3.018.668.575,00	16,62
19	Dispuspa	4.060.876.512,00	4.459.751.493,00	(398.874.981,00)	(8,94)
20	Dispeterikan	9.835.548.589,60	10.092.244.074,00	(256.695.484,40)	(2,54)
21	Setda	51.626.382.318,00	44.453.023.525,00	7.173.358.793,00	16,14
22	Set DPRD	52.272.532.295,00	48.780.920.941,00	3.491.611.354,00	7,16
23	Bappelitbangda	9.027.124.176,00	7.260.798.387,00	1.766.325.789,00	24,33
24	BPPKAD	35.594.751.447,19	33.426.906.887,10	2.167.844.560,09	6,49
25	BKPPD	32.611.366.032,00	88.605.567.695,00	(55.994.201.663,00)	(63,19)
26	Inspektorat	9.905.396.044,00	5.947.993.202,00	3.957.402.842,00	66,53
27	Kec. Salaman	1.803.890.650,00	2.083.559.988,00	(279.669.338,00)	(13,42)
28	Kec. Borobudur	1.289.601.212,00	1.485.168.811,00	(195.567.599,00)	(13,17)
29	Kec. Ngluwar	1.577.398.716,00	1.599.552.736,00	(22.154.020,00)	(1,39)
30	Kec. Salam	1.724.688.045,00	1.901.076.157,00	(176.388.112,00)	(9,28)
31	Kec. Srumbung	1.570.592.163,00	1.507.674.475,00	62.917.688,00	4,17
32	Kec. Dukun	1.210.288.965,00	1.451.477.910,00	(241.188.945,00)	(16,62)
33	Kec. Sawangan	2.021.097.145,00	1.882.041.418,00	139.055.727,00	7,39
34	Kec. Muntilan	2.717.095.274,00	2.694.041.793,00	23.053.481,00	0,86
35	Kec. Mungkid	3.516.291.705,00	3.428.666.132,00	87.625.573,00	2,56
36	Kec. Mertoyudan	2.598.988.705,00	3.063.180.172,00	(464.191.467,00)	(15,15)
37	Kec. Tempuran	1.356.664.821,00	1.462.505.160,00	(105.840.339,00)	(7,24)
38	Kec. Kajoran	1.565.797.349,00	1.814.290.944,00	(248.493.595,00)	(13,70)
39	Kec. Kaliangkrik	1.895.940.634,00	1.885.560.856,00	10.379.778,00	0,55
40	Kec. Bandongan	1.559.055.539,00	2.115.846.471,00	(556.790.932,00)	(26,32)
41	Kec. Candimulyo	1.773.142.210,00	1.778.027.698,00	(4.885.488,00)	(0,27)
42	Kec. Pakis	1.542.520.922,00	1.395.871.896,00	146.649.026,00	10,51
43	Kec. Ngablak	1.476.589.582,00	1.421.308.382,00	55.281.200,00	3,89
44	Kec. Grabag	1.709.050.094,00	1.704.551.633,00	4.498.461,00	0,26
45	Kec. Tegalrejo	1.474.177.195,00	1.591.750.550,00	(117.573.355,00)	(7,39)
46	Kec. Secang	2.330.629.119,00	2.504.842.016,00	(174.212.897,00)	(6,96)
47	Kec. Windusari	1.791.614.614,00	1.816.201.488,00	(24.586.874,00)	(1,35)
48	Bakesbangpol	37.048.703.226,00	6.168.229.606,00	30.880.473.620,00	500,64
Jumlah Beban Operasi		1.725.340.156.404,94	1.551.292.213.974,40	174.047.942.430,54	11,22

Lampiran 5.80
Rincian Beban Pegawai Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Pegawai		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	548.092.719.824,00	452.389.190.340,00	95.703.529.484,00	21,16
2	Dinkes	154.119.715.616,00	130.947.042.040,59	23.172.673.575,41	17,70
3	RSUD Muntilan	48.690.907.577,00	32.550.564.684,00	16.140.342.893,00	49,59
4	DPU PR	12.980.408.743,00	13.782.462.850,00	(802.054.107,00)	(5,82)
5	DPRKP	2.455.658.718,00	2.436.518.499,00	19.140.219,00	0,79
6	Satpol PP	4.350.584.095,00	4.715.613.402,00	(365.029.307,00)	(7,74)
7	BPBD	2.586.278.356,00	2.401.479.594,00	184.798.762,00	7,70
8	Dinsos	4.312.639.146,00	4.506.314.407,00	(193.675.261,00)	(4,30)
9	Disperinnaker	5.834.992.613,00	5.943.348.835,00	(108.356.222,00)	(1,82)
10	Distanpangan	18.589.828.547,00	19.751.072.901,00	(1.161.244.354,00)	(5,88)
11	DLH	7.467.182.263,00	7.499.187.953,00	(32.005.690,00)	(0,43)
12	Disdukcapil	2.894.056.874,00	2.629.304.214,00	264.752.660,00	10,07
13	Dispermades	3.101.243.288,00	3.491.307.808,00	(390.064.520,00)	(11,17)
14	Dishub	4.026.604.141,00	4.584.862.771,00	(558.258.630,00)	(12,18)
15	Diskominfo	4.097.751.133,00	3.678.324.873,00	419.426.260,00	11,40
16	Disdagkop UKM	7.001.028.206,00	7.461.537.509,00	(460.509.303,00)	(6,17)
17	DPMPPTSP	2.621.907.743,00	2.372.721.810,00	249.185.933,00	10,50
18	Disparpora	4.197.995.678,00	4.282.882.035,00	(84.886.357,00)	(1,98)
19	Dispuspa	2.568.626.322,00	2.786.449.254,00	(217.822.932,00)	(7,82)
20	Dispeterikan	5.286.167.715,00	5.479.240.423,00	(193.072.708,00)	(3,52)
21	Setda	15.572.076.188,00	15.063.861.093,00	508.215.095,00	3,37
22	Set DPRD	32.713.154.773,00	32.488.124.124,00	225.030.649,00	0,69
23	Bappelitbangda	4.595.257.873,00	4.533.400.242,00	61.857.631,00	1,36
24	BPPKAD	17.679.421.717,00	15.683.063.289,00	1.996.358.428,00	12,73
25	BKPPD	26.453.856.133,00	82.369.428.658,00	(55.915.572.525,00)	(67,88)
26	Inspektorat	5.999.100.505,00	4.883.609.915,00	1.115.490.590,00	22,84
27	Kec. Salaman	1.470.093.493,00	1.623.510.677,00	(153.417.184,00)	(9,45)
28	Kec. Borobudur	916.413.628,00	1.146.486.547,00	(230.072.919,00)	(20,07)
29	Kec. Ngluwar	1.248.987.899,00	1.346.197.292,00	(97.209.393,00)	(7,22)
30	Kec. Salam	1.368.301.578,00	1.583.089.113,00	(214.787.535,00)	(13,57)
31	Kec. Srumbung	1.232.320.279,00	1.280.615.132,00	(48.294.853,00)	(3,77)
32	Kec. Dukun	895.614.350,00	1.190.107.942,00	(294.493.592,00)	(24,75)
33	Kec. Sawangan	1.614.510.612,00	1.573.172.518,00	41.338.094,00	2,63
34	Kec. Muntilan	1.743.139.576,00	1.861.625.518,00	(118.485.942,00)	(6,36)
35	Kec. Mungkid	2.511.908.268,00	2.492.658.701,00	19.249.567,00	0,77
36	Kec. Mertoyudan	1.885.450.276,00	2.359.190.254,00	(473.739.978,00)	(20,08)
37	Kec. Tempuran	1.021.513.689,00	1.213.212.965,00	(191.699.276,00)	(15,80)
38	Kec. Kajoran	1.189.418.650,00	1.484.676.392,00	(295.257.742,00)	(19,89)
39	Kec. Kaliangkrik	1.518.316.930,00	1.571.625.372,00	(53.308.442,00)	(3,39)
40	Kec. Bandongan	1.217.082.897,00	1.606.863.160,00	(389.780.263,00)	(24,26)
41	Kec. Candimulyo	1.411.710.129,00	1.478.653.192,00	(66.943.063,00)	(4,53)
42	Kec. Pakis	1.171.466.171,00	1.067.275.604,00	104.190.567,00	9,76
43	Kec. Ngablak	1.123.779.870,00	1.162.837.109,00	(39.057.239,00)	(3,36)
44	Kec. Grabag	1.241.318.288,00	1.349.822.074,00	(108.503.786,00)	(8,04)
45	Kec. Tegalrejo	1.043.655.007,00	1.239.610.097,00	(195.955.090,00)	(15,81)
46	Kec. Secang	1.637.161.540,00	1.753.516.813,00	(116.355.273,00)	(6,64)
47	Kec. Windusari	1.484.316.543,00	1.552.133.806,00	(67.817.263,00)	(4,37)
48	Bakesbangpol	1.576.449.451,00	1.741.099.747,00	(164.650.296,00)	(9,46)
	Jumlah Beban Pegawai	978.812.092.911,00	902.388.893.548,59	76.423.199.362,41	8,47

Lampiran 5.81
Rincian Beban Barang Pakai Habis Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Uraian	Beban Barang Pakai Habis		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4*100
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.395.673.415,00	929.943.780,00	2.465.729.635,00	265,15
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	707.737.162,00	529.984.723,00	177.752.439,00	33,54
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.947.320.258,00	9.267.641.097,00	(5.320.320.839,00)	(57,41)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	80.876.925,00	33.284.900,00	47.592.025,00	142,98
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	219.363.511,00	310.468.637,00	(91.105.126,00)	(29,34)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	233.505.000,00	201.112.400,00	32.392.600,00	16,11
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	391.892.780,00	329.486.515,00	62.406.265,00	18,94
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	65.397.450,00	63.198.000,00	2.199.450,00	3,48
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.172.616.760,00	9.605.159.141,00	3.567.457.619,00	37,14
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	153.682.285,00	625.385.162,00	(471.702.877,00)	(75,43)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	535.425.640,00	622.829.610,00	(87.403.970,00)	(14,03)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	259.590.028,00	413.900.359,00	(154.310.331,00)	(37,28)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.968.192.366,82	2.759.729.742,00	208.462.624,82	7,55
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	48.000,00	(48.000,00)	(100,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	34.106.800,00	-	34.106.800,00	0,00
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.626.925,00	60.719.401,00	(57.092.476,00)	(94,03)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	560.928.788,00	628.837.252,00	(67.908.464,00)	(10,80)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.765.394.197,37	4.638.397.901,50	1.126.996.295,87	24,30
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.893.478.978,00	2.333.336.692,00	560.142.286,00	24,01
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.553.203.912,00	4.903.668.189,00	(350.464.277,00)	(7,15)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	163.441.550,00	183.828.180,00	(20.386.630,00)	(11,09)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.839.812.067,00	1.967.893.193,00	(128.081.126,00)	(6,51)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.683.369.888,00	1.328.658.334,00	1.354.711.554,00	101,96
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.973.375.816,00	4.216.655.127,00	(2.243.279.311,00)	(53,20)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.545.432.163,00	498.061.500,00	2.047.370.663,00	411,07
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	28.150.000,00	466.559.500,00	(438.409.500,00)	(93,97)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	967.014.635,00	371.003.030,00	596.011.605,00	160,65
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.215.413.524,74	10.802.310.154,30	3.413.103.370,44	31,60
29	Beban Obat-Obatan-Obat	38.765.941.614,04	20.966.877.188,40	17.799.064.425,64	84,89
30	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	161.959.836,00	720.986.275,00	(559.026.439,00)	(77,54)
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.480.355.032,29	2.845.830.949,00	2.634.524.083,29	92,57
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.307.066.400,00	269.812.800,00	2.037.253.600,00	755,06

No	Uraian	Beban Barang Pakai Habis		Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6=5/4*100
33	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	470.962.449,00	1.212.584.945,00	(741.622.496,00)	(61,16)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.604.794.011,84	208.702.367,16	1.396.091.644,68	668,94
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	148.096.400,00	50.287.350,00	97.809.050,00	194,50
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	38.723.217,00	882.388.185,00	(843.664.968,00)	(95,61)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	24.757.214.849,00	23.498.454.898,00	1.258.759.951,00	5,36
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.351.856.900,00	1.223.155.280,00	128.701.620,00	10,52
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	2.300.900,00	(2.300.900,00)	(100,00)
40	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	474.950.549,00	871.301.368,00	(396.350.819,00)	(45,49)
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	97.503.000,00	(97.503.000,00)	(100,00)
42	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.873.722.798,00	1.266.722.558,00	607.000.240,00	47,92
43	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	23.499.700,00	(23.499.700,00)	(100,00)
44	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	103.705.000,00	-	103.705.000,00	0,00
45	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	71.500.000,00	339.012.569,00	(267.512.569,00)	(78,91)
46	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	136.635.000,00	397.426.721,00	(260.791.721,00)	(65,62)
47	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	255.897.000,00	835.819.086,00	(579.922.086,00)	(69,38)
48	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	148.250.000,00	4.000.000,00	144.250.000,00	3.606,25
49	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	9.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
50	Beban Pakaian Penyelamatan	1.888.000,00	52.200.000,00	(50.312.000,00)	(96,38)
51	Beban Pakaian Siaga	-	19.157.925,00	(19.157.925,00)	(100,00)
52	Beban Pakaian KORPRI	5.250.000,00	-	5.250.000,00	0,00
53	Beban Pakaian Adat Daerah	118.900.000,00	-	118.900.000,00	0,00
54	Beban Pakaian Batik Tradisional	121.996.920,00	-	121.996.920,00	0,00
55	Beban Pakaian Olahraga	185.357.150,00	189.982.000,00	(4.624.850,00)	(2,43)
56	Beban Pakaian Paskibraka	-	68.252.800,00	(68.252.800,00)	(100,00)
57	Beban Pakaian Jas/Safari	-	24.090.000,00	(24.090.000,00)	(100,00)
Jumlah Beban Barang Pakai Habis		142.952.045.951,10	114.162.449.384,36	28.789.596.566,74	25,22

Lampiran 5.82
Rincian Beban Barang Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Barang		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	3.798.775.666,00	4.100.649.804,00	(301.874.138,00)	(7,36)
2	Dinkes	54.586.163.137,03	37.863.679.726,40	16.722.483.410,63	44,16
3	RSUD Muntilan	31.307.499.737,07	26.725.459.113,96	4.582.040.623,11	17,14
4	DPU PR	2.335.051.678,00	1.252.177.252,00	1.082.874.426,00	86,48
5	DPRKP	350.725.095,00	349.402.530,00	1.322.565,00	0,38
6	Satpol PP	3.755.512.522,00	1.561.078.237,00	2.194.434.285,00	140,57
7	BPBD	896.786.707,00	1.833.573.273,00	(936.786.566,00)	(51,09)
8	Dinsos	3.403.935.771,00	2.562.991.511,00	840.944.260,00	32,81
9	Disperinnaker	2.064.624.696,00	1.333.717.363,00	730.907.333,00	54,80
10	Distanpangan	1.880.063.004,00	1.577.143.395,00	302.919.609,00	19,21
11	DLH	6.044.802.701,00	4.123.506.271,00	1.921.296.430,00	46,59
12	Disdukcapil	887.493.843,00	1.141.482.535,00	(253.988.692,00)	(22,25)
13	Dispermades	3.201.529.020,00	2.139.556.064,00	1.061.972.956,00	49,64
14	Dishub	2.918.071.221,00	4.682.134.155,00	(1.764.062.934,00)	(37,68)
15	Diskominfo	784.318.269,00	980.064.966,00	(195.746.697,00)	(19,97)
16	Disdagkop UKM	2.244.760.764,00	1.606.030.231,00	638.730.533,00	39,77
17	DPMP TSP	374.610.855,00	618.511.530,00	(243.900.675,00)	(39,43)
18	Disparpora	2.280.503.348,00	2.586.434.795,00	(305.931.447,00)	(11,83)
19	Dispuspa	218.002.405,00	424.068.188,00	(206.065.783,00)	(48,59)
20	Dispeterikan	1.086.858.958,00	1.178.046.204,00	(91.187.246,00)	(7,74)
21	Setda	4.687.528.161,00	4.650.070.012,00	37.458.149,00	0,81
22	Set DPRD	1.999.369.935,00	1.776.322.954,00	223.046.981,00	12,56
23	Bappelitbangda	1.004.496.924,00	866.639.171,00	137.857.753,00	15,91
24	BPPKAD	4.376.402.207,00	2.516.880.285,00	1.859.521.922,00	73,88
25	BKPPD	902.021.785,00	714.735.759,00	187.286.026,00	26,20
26	Inspektorat	392.183.885,00	342.810.426,00	49.373.459,00	14,40
27	Kec. Salaman	132.686.666,00	221.407.642,00	(88.720.976,00)	(40,07)
28	Kec. Borobudur	138.404.070,00	162.373.095,00	(23.969.025,00)	(14,76)
29	Kec. Ngluwar	112.237.421,00	120.717.625,00	(8.480.204,00)	(7,02)
30	Kec. Salam	111.330.790,00	143.856.520,00	(32.525.730,00)	(22,61)
31	Kec. Srumbung	93.686.280,00	119.884.790,00	(26.198.510,00)	(21,85)
32	Kec. Dukun	133.833.912,00	126.150.608,00	7.683.304,00	6,09
33	Kec. Sawangan	182.010.975,00	184.365.090,00	(2.354.115,00)	(1,28)
34	Kec. Muntilan	486.705.059,00	494.919.655,00	(8.214.596,00)	(1,66)
35	Kec. Mungkid	510.140.400,00	572.671.093,00	(62.530.693,00)	(10,92)
36	Kec. Mertoyudan	253.422.638,00	347.190.014,00	(93.767.376,00)	(27,01)
37	Kec. Tempuran	124.537.826,00	153.100.076,00	(28.562.250,00)	(18,66)
38	Kec. Kajoran	151.778.255,00	182.086.285,00	(30.308.030,00)	(16,64)
39	Kec. Kaliangkrik	144.877.570,00	166.797.688,00	(21.920.118,00)	(13,14)
40	Kec. Bandongan	136.569.105,00	213.332.130,00	(76.763.025,00)	(35,98)
41	Kec. Candimulyo	137.020.534,00	163.073.960,00	(26.053.426,00)	(15,98)
42	Kec. Pakis	160.115.080,00	169.932.480,00	(9.817.400,00)	(5,78)
43	Kec. Ngablak	117.529.841,00	87.111.614,00	30.418.227,00	34,92
44	Kec. Grabag	124.214.825,00	168.196.161,00	(43.981.336,00)	(26,15)
45	Kec. Tegalrejo	134.085.960,00	127.342.402,00	6.743.558,00	5,30
46	Kec. Secang	272.624.898,00	436.137.370,00	(163.512.472,00)	(37,49)
47	Kec. Windusari	105.740.263,00	125.348.520,00	(19.608.257,00)	(15,64)
48	Bakesbangpol	1.531.953.508,00	440.921.487,00	1.091.032.021,00	247,44
	Jumlah Beban Barang	143.077.598.170,10	114.434.082.056,36	28.643.516.113,74	25,03

Lampiran 5.83
Rincian Beban Jasa Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Jasa		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	22.810.007.183,00	28.878.074.990,00	(6.068.067.807,00)	(21,01)
2	Dinkes	75.626.111.799,00	59.560.166.331,00	16.065.945.468,00	26,97
3	RSUD Muntilan	16.031.746.590,00	29.955.041.230,00	(13.923.294.640,00)	(46,48)
4	DPU PR	3.479.250.894,00	3.187.654.537,00	291.596.357,00	9,15
5	DPRKP	408.305.130,00	341.876.249,00	66.428.881,00	19,43
6	Satpol PP	9.817.489.000,00	9.633.556.015,00	183.932.985,00	1,91
7	BPBD	1.599.047.627,00	1.679.838.523,00	(80.790.896,00)	(4,81)
8	Dinsos	14.924.089.321,00	10.757.674.512,00	4.166.414.809,00	38,73
9	Disperinnaker	3.245.679.576,00	2.421.938.228,00	823.741.348,00	34,01
10	Distanpangan	1.838.185.114,00	1.831.520.414,00	6.664.700,00	0,36
11	DLH	9.916.743.954,75	7.248.544.894,00	2.668.199.060,75	36,81
12	Disdukcapil	2.155.289.951,00	2.058.656.114,00	96.633.837,00	4,69
13	Dispermades	5.883.829.992,00	5.727.910.754,00	155.919.238,00	2,72
14	Dishub	24.968.322.506,00	22.272.408.752,00	2.695.913.754,00	12,10
15	Diskominfo	8.385.592.933,00	7.464.802.900,00	920.790.033,00	12,34
16	Disdagkop UKM	7.451.949.996,00	5.908.718.499,00	1.543.231.497,00	26,12
17	DPMPSTP	891.301.591,00	1.047.180.331,00	(155.878.740,00)	(14,89)
18	Disparpora	7.288.962.580,00	6.969.524.429,00	319.438.151,00	4,58
19	Dispuspa	891.731.191,00	975.304.473,00	(83.573.282,00)	(8,57)
20	Dispeterikan	1.180.269.220,00	1.075.845.836,00	104.423.384,00	9,71
21	Setda	6.650.649.329,00	4.993.697.665,00	1.656.951.664,00	33,18
22	Set DPRD	4.187.487.058,00	2.873.987.677,00	1.313.499.381,00	45,70
23	Bappelitbangda	1.926.329.040,00	894.029.017,00	1.032.300.023,00	115,47
24	BPPKAD	3.946.948.579,00	5.637.355.501,00	(1.690.406.922,00)	(29,99)
25	BKPPD	3.176.500.780,00	4.240.399.333,00	(1.063.898.553,00)	(25,09)
26	Inspektorat	1.473.066.764,00	321.503.371,00	1.151.563.393,00	358,18
27	Kec. Salaman	123.486.259,00	206.430.879,00	(82.944.620,00)	(40,18)
28	Kec. Borobudur	179.536.284,00	136.936.169,00	42.600.115,00	31,11
29	Kec. Ngluwar	142.832.365,00	123.209.859,00	19.622.506,00	15,93
30	Kec. Salam	182.565.030,00	157.470.384,00	25.094.646,00	15,94
31	Kec. Srumbung	178.391.974,00	90.091.553,00	88.300.421,00	98,01
32	Kec. Dukun	126.941.061,00	121.068.600,00	5.872.461,00	4,85
33	Kec. Sawangan	142.316.652,00	101.727.795,00	40.588.857,00	39,90
34	Kec. Muntilan	314.767.649,00	258.499.620,00	56.268.029,00	21,77
35	Kec. Mungkid	386.885.837,00	337.227.338,00	49.658.499,00	14,73
36	Kec. Mertoyudan	340.415.593,00	321.784.104,00	18.631.489,00	5,79
37	Kec. Tempuran	146.661.963,00	90.646.119,00	56.015.844,00	61,80
38	Kec. Kajoran	140.770.466,00	126.197.267,00	14.573.199,00	11,55
39	Kec. Kaliangkrik	163.360.134,00	133.125.276,00	30.234.858,00	22,71
40	Kec. Bandongan	165.811.115,00	175.943.953,00	(10.132.838,00)	(5,76)
41	Kec. Candimulyo	150.118.009,00	123.950.926,00	26.167.083,00	21,11
42	Kec. Pakis	149.030.862,00	117.573.812,00	31.457.050,00	26,76
43	Kec. Ngablak	139.452.714,00	99.628.019,00	39.824.695,00	39,97
44	Kec. Grabag	166.263.043,00	167.533.408,00	(1.270.365,00)	(0,76)
45	Kec. Tegalrejo	182.061.478,00	178.122.091,00	3.939.387,00	2,21
46	Kec. Secang	309.111.932,00	250.900.933,00	58.210.999,00	23,20
47	Kec. Windusari	138.294.895,00	128.607.162,00	9.687.733,00	7,53
48	Bakesbangpol	1.167.797.368,00	725.653.995,00	442.143.373,00	60,93
	Jumlah Beban Jasa	245.291.760.381,75	232.129.539.837,00	13.162.220.544,75	5,67

Lampiran 5.84
Rincian Beban Pemeliharaan Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Pemeliharaan		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	2.057.776.067,00	1.590.793.529,00	466.982.538,00	29,36
2	Dinkes	7.117.829.521,00	6.167.360.287,00	950.469.234,00	15,41
3	RSUD Muntilan	4.460.538.856,00	4.601.724.847,00	(141.185.991,00)	(3,07)
4	DPU PR	15.248.640.078,00	11.752.364.370,00	3.496.275.708,00	29,75
5	DPRKP	600.611.006,00	5.843.000,00	594.768.006,00	10.179,15
6	Satpol PP	645.775.932,00	268.099.378,00	377.676.554,00	140,87
7	BPBD	552.158.435,00	228.835.515,00	323.322.920,00	141,29
8	Dinsos	303.207.771,00	179.402.399,00	123.805.372,00	69,01
9	Disperinnaker	221.359.660,00	50.956.191,00	170.403.469,00	334,41
10	Distanpangan	523.803.938,00	93.226.700,00	430.577.238,00	461,86
11	DLH	376.786.900,00	246.501.169,00	130.285.731,00	52,85
12	Disdukcapil	442.661.716,00	446.194.500,00	(3.532.784,00)	(0,79)
13	Dispermades	274.236.200,00	87.980.400,00	186.255.800,00	211,70
14	Dishub	844.458.204,00	765.808.227,00	78.649.977,00	10,27
15	Diskominfo	544.924.781,00	351.210.800,00	193.713.981,00	55,16
16	Disdagkop UKM	435.254.427,00	375.292.049,00	59.962.378,00	15,98
17	DPMPTSP	217.893.501,00	137.740.000,00	80.153.501,00	58,19
18	Disparpora	355.404.803,00	515.992.900,00	(160.588.097,00)	(31,12)
19	Dispuspa	120.020.317,00	32.439.383,00	87.580.934,00	269,98
20	Dispeterikan	404.716.000,00	59.580.779,00	345.135.221,00	579,27
21	Setda	1.446.905.863,00	830.904.423,00	616.001.440,00	74,14
22	Set DPRD	513.992.461,00	412.421.060,00	101.571.401,00	24,63
23	Bappelitbangda	263.205.427,00	25.050.000,00	238.155.427,00	950,72
24	BPPKAD	1.201.128.429,00	1.047.857.603,00	153.270.826,00	14,63
25	BKPPD	456.492.472,00	97.380.750,00	359.111.722,00	368,77
26	Inspektorat	264.052.694,00	25.450.000,00	238.602.694,00	937,54
27	Kec. Salaman	58.936.200,00	15.070.790,00	43.865.410,00	291,06
28	Kec. Borobudur	48.049.000,00	37.858.000,00	10.191.000,00	26,92
29	Kec. Ngluwar	58.851.076,00	9.427.960,00	49.423.116,00	524,22
30	Kec. Salam	54.565.288,00	9.212.140,00	45.353.148,00	492,32
31	Kec. Srumbung	60.663.630,00	14.295.000,00	46.368.630,00	324,37
32	Kec. Dukun	44.252.300,00	12.004.760,00	32.247.540,00	268,62
33	Kec. Sawangan	66.178.887,00	15.377.615,00	50.801.272,00	330,36
34	Kec. Muntilan	141.596.800,00	61.797.000,00	79.799.800,00	129,13
35	Kec. Mungkid	99.085.200,00	15.180.000,00	83.905.200,00	552,74
36	Kec. Mertoyudan	100.859.450,00	29.426.000,00	71.433.450,00	242,76
37	Kec. Tempuran	57.372.014,00	4.890.000,00	52.482.014,00	1.073,25
38	Kec. Kajoran	60.186.000,00	13.984.000,00	46.202.000,00	330,39
39	Kec. Kaliangkrik	60.621.000,00	13.792.520,00	46.828.480,00	339,52
40	Kec. Bandongan	16.418.740,00	39.970.228,00	(23.551.488,00)	(58,92)
41	Kec. Candimulyo	54.254.900,00	4.026.620,00	50.228.280,00	1.247,41
42	Kec. Pakis	57.258.809,00	39.930.000,00	17.328.809,00	43,40
43	Kec. Ngablak	75.961.200,00	54.798.640,00	21.162.560,00	38,62
44	Kec. Grabag	160.579.938,00	11.714.990,00	148.864.948,00	1.270,72
45	Kec. Tegalrejo	98.971.600,00	42.575.960,00	56.395.640,00	132,46
46	Kec. Secang	91.069.050,00	53.762.500,00	37.306.550,00	69,39
47	Kec. Windusari	47.627.250,00	2.370.000,00	45.257.250,00	1.909,59
48	Bakesbangpol	101.407.780,00	37.925.000,00	63.482.780,00	167,39
	Jumlah Beban Pemeliharaan	41.508.601.571,00	30.935.799.982,00	10.572.801.589,00	34,18

Lampiran 5.85
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Perjalanan Dinas		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	2.195.996.046,00	1.062.764.188,00	1.133.231.858,00	106,63
2	Dinkes	7.972.603.569,00	3.156.675.443,00	4.815.928.126,00	152,56
3	RSUD Muntilan	141.916.719,00	73.025.680,00	68.891.039,00	94,34
4	DPU PR	671.582.027,00	449.974.909,00	221.607.118,00	49,25
5	DPRKP	177.338.074,00	195.561.515,00	(18.223.441,00)	(9,32)
6	Satpol PP	1.452.543.097,00	939.480.704,00	513.062.393,00	54,61
7	BPBD	179.929.082,00	169.686.223,00	10.242.859,00	6,04
8	Dinsos	990.051.349,00	461.061.556,00	528.989.793,00	114,73
9	Disperinnaker	825.904.362,00	627.810.168,00	198.094.194,00	31,55
10	Distanpangan	711.911.868,00	432.000.980,00	279.910.888,00	64,79
11	DLH	623.843.179,00	464.403.365,00	159.439.814,00	34,33
12	Disdukcapil	543.323.008,00	436.607.366,00	106.715.642,00	24,44
13	Dispermades	1.491.230.004,00	1.427.142.606,00	64.087.398,00	4,49
14	Dishub	546.892.460,00	409.065.952,00	137.826.508,00	33,69
15	Diskominfo	386.235.922,00	273.524.236,00	112.711.686,00	41,21
16	Disdagkop UKM	1.606.521.878,00	1.153.458.075,00	453.063.803,00	39,28
17	DPMPTSP	459.531.791,00	626.974.850,00	(167.443.059,00)	(26,71)
18	Disparpora	1.733.137.228,00	1.103.016.923,00	630.120.305,00	57,13
19	Dispuspa	262.496.277,00	241.490.195,00	21.006.082,00	8,70
20	Dispeterikan	336.520.271,00	212.148.374,00	124.371.897,00	58,62
21	Setda	3.347.318.277,00	3.038.720.332,00	308.597.945,00	10,16
22	Set DPRD	12.567.550.068,00	10.790.031.376,00	1.777.518.692,00	16,47
23	Bappelitbangda	1.126.784.062,00	828.600.307,00	298.183.755,00	35,99
24	BPPKAD	1.361.213.165,00	1.160.430.384,00	200.782.781,00	17,30
25	BKPPD	1.493.594.862,00	1.132.623.195,00	360.971.667,00	31,87
26	Inspektorat	1.776.992.196,00	374.619.490,00	1.402.372.706,00	374,35
27	Kec. Salaman	18.688.032,00	17.140.000,00	1.548.032,00	9,03
28	Kec. Borobudur	6.168.330,00	1.515.000,00	4.653.330,00	307,15
29	Kec. Ngluwar	14.489.955,00	-	14.489.955,00	100,00
30	Kec. Salam	7.925.359,00	7.448.000,00	477.359,00	6,41
31	Kec. Srumbung	5.530.000,00	2.788.000,00	2.742.000,00	98,35
32	Kec. Dukun	9.647.342,00	2.146.000,00	7.501.342,00	349,55
33	Kec. Sawangan	16.080.019,00	7.398.400,00	8.681.619,00	117,34
34	Kec. Muntilan	30.886.190,00	17.200.000,00	13.686.190,00	79,57
35	Kec. Mungkid	8.272.000,00	6.689.000,00	1.583.000,00	23,67
36	Kec. Mertoyudan	14.780.748,00	3.530.000,00	11.250.748,00	318,72
37	Kec. Tempuran	6.579.329,00	656.000,00	5.923.329,00	902,95
38	Kec. Kajoran	23.643.978,00	7.347.000,00	16.296.978,00	221,82
39	Kec. Kaliangkrik	8.765.000,00	220.000,00	8.545.000,00	3.884,09
40	Kec. Bandongan	23.173.682,00	39.097.000,00	(15.923.318,00)	(40,73)
41	Kec. Candimulyo	20.038.638,00	8.323.000,00	11.715.638,00	140,76
42	Kec. Pakis	4.650.000,00	1.160.000,00	3.490.000,00	300,86
43	Kec. Ngablak	19.865.957,00	16.933.000,00	2.932.957,00	17,32
44	Kec. Grabag	16.674.000,00	7.285.000,00	9.389.000,00	128,88
45	Kec. Tegalrejo	15.403.150,00	4.100.000,00	11.303.150,00	275,69
46	Kec. Secang	20.661.699,00	10.524.400,00	10.137.299,00	96,32
47	Kec. Windusari	15.635.663,00	7.742.000,00	7.893.663,00	101,96
48	Bakesbangpol	990.060.119,00	872.898.377,00	117.161.742,00	13,42
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	46.280.580.031,00	32.283.038.569,00	13.997.541.462,00	43,36

Lampiran 5.86
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	220.700.000,00	66.059.800,00	154.640.200,00	234,09
2	Dinkes	5.154.040.030,00	2.404.116.894,00	2.749.923.136,00	114,38
3	RSUD Muntilan	1.879.868.052,00	-	1.879.868.052,00	100,00
4	DPRKP	24.630.900,00	-	24.630.900,00	100,00
5	Satpol PP	46.500.000,00	-	46.500.000,00	100,00
6	Dinsos	8.378.600.000,00	6.199.400.000,00	2.179.200.000,00	35,15
7	Distanpangan	437.152.000,00	4.264.346.000,00	(3.827.194.000,00)	(89,75)
8	DLH	51.999.250,00	90.610.298,00	(38.611.048,00)	(42,61)
9	Dispermades	236.550.000,00	93.362.125,00	143.187.875,00	153,37
10	Dishub	6.973.000,00	43.200.000,00	(36.227.000,00)	(83,86)
11	Diskominfo	21.000.000,00	-	21.000.000,00	100,00
12	Disdagkop UKM	-	28.122.500,00	(28.122.500,00)	(100,00)
13	Disparpora	650.000.000,00	405.588.980,00	244.411.020,00	60,26
14	Dispeterikan	16.500.000,00	430.000.000,00	(413.500.000,00)	(96,16)
15	Setda	213.524.500,00	135.920.000,00	77.604.500,00	57,10
16	Set DPRD	290.978.000,00	440.033.750,00	(149.055.750,00)	(33,87)
17	Bappelitbangda	111.050.850,00	113.079.650,00	(2.028.800,00)	(1,79)
18	BPPKAD	4.155.648.500,00	4.323.242.750,00	(167.594.250,00)	(3,88)
19	BKPPD	-	51.000.000,00	(51.000.000,00)	(100,00)
20	Kec. Borobudur	1.029.900,00	-	1.029.900,00	100,00
21	Kec. Mungkid	-	4.240.000,00	(4.240.000,00)	(100,00)
22	Kec. Mertoyudan	4.060.000,00	2.059.800,00	2.000.200,00	97,11
23	Kec. Bandongan	-	40.640.000,00	(40.640.000,00)	(100,00)
Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		21.900.804.982,00	19.135.022.547,00	2.765.782.435,00	14,45

Lampiran 5.87
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Nama SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi		Kenaikan / Penurunan	(%)
		Tahun 2023	Tahun 2022		
1	Disdikbud	42.395.204.774,92	41.281.159.038,35	1.114.045.736,57	2,70
2	Dinkes	57.798.216.147,50	51.574.963.830,06	6.223.252.317,44	12,07
3	RSUD Muntilan	24.364.817.918,57	22.830.819.718,47	1.533.998.200,10	6,72
4	DPU PR	77.795.562.764,33	74.128.290.154,48	3.667.272.609,85	4,95
5	DPRKP	1.786.900.787,96	1.721.687.592,83	65.213.195,13	3,79
6	Satpol PP	1.504.121.519,46	1.587.661.288,93	(83.539.769,47)	(5,26)
7	BPBD	785.802.996,20	851.400.080,50	(65.597.084,30)	(7,70)
8	Dinsos	1.017.360.181,66	947.860.355,46	69.499.826,20	7,33
9	Disperinnaker	497.797.035,64	418.566.394,58	79.230.641,06	18,93
10	Distanpangan	1.179.867.282,93	1.293.678.382,42	(113.811.099,49)	(8,80)
11	DLH	5.647.110.314,45	5.755.654.243,70	(108.543.929,25)	(1,89)
12	Disdukcapil	573.742.500,75	498.830.183,96	74.912.316,79	15,02
13	Dispermades	165.478.784,36	197.049.119,68	(31.570.335,32)	(16,02)
14	Dishub	2.368.558.249,71	3.215.598.831,03	(847.040.581,32)	(26,34)
15	Diskominfo	2.584.822.705,94	2.838.074.707,46	(253.252.001,52)	(8,92)
16	Disdagkop UKM	9.010.735.548,45	9.007.720.755,47	3.014.792,98	0,03
17	DPMPSTP	812.436.136,84	578.564.987,34	233.871.149,50	40,42
18	Disparpora	3.267.341.714,28	3.228.845.053,19	38.496.661,09	1,19
19	Dispuspa	872.902.371,84	1.018.302.658,12	(145.400.286,28)	(14,28)
20	Dispeterikan	719.329.044,83	733.324.560,29	(13.995.515,46)	(1,91)
21	Setda	2.457.951.321,92	2.293.229.381,97	164.721.939,95	7,18
22	Set DPRD	1.358.051.539,20	1.350.063.813,96	7.987.725,24	0,59
23	Bappelitbangda	653.479.287,20	649.764.901,05	3.714.386,15	0,57
24	BPPKAD	3.431.042.137,64	3.253.744.758,49	177.297.379,15	5,45
25	BKPPD	322.722.270,00	191.685.875,42	131.036.394,58	68,36
26	Inspektorat	395.333.518,50	151.226.213,59	244.107.304,91	161,42
27	Kec. Salaman	104.578.966,65	147.787.067,77	(43.208.101,12)	(29,24)
28	Kec. Borobudur	192.240.021,31	232.180.298,21	(39.940.276,90)	(17,20)
29	Kec. Ngluwar	75.361.526,88	106.513.467,72	(31.151.940,84)	(29,25)
30	Kec. Salam	123.144.109,09	169.068.649,95	(45.924.540,86)	(27,16)
31	Kec. Sumbang	31.221.895,25	59.264.436,11	(28.022.540,86)	(47,28)
32	Kec. Dukun	97.099.930,86	142.289.575,14	(45.189.644,28)	(31,76)
33	Kec. Sawangan	48.460.270,75	87.521.099,89	(39.060.829,14)	(44,63)
34	Kec. Muntilan	1.165.548.286,08	1.196.976.973,44	(31.428.687,36)	(2,63)
35	Kec. Mungkid	2.087.733.226,99	1.997.680.672,44	90.052.554,55	4,51
36	Kec. Mertoyudan	1.525.830.583,49	1.472.075.535,23	53.755.048,26	3,65
37	Kec. Tempuran	152.750.644,58	199.138.248,73	(46.387.604,15)	(23,29)
38	Kec. Kajoran	82.056.130,55	125.104.084,72	(43.047.954,17)	(34,41)
39	Kec. Kaliangkrik	161.120.425,85	212.055.030,11	(50.934.604,26)	(24,02)
40	Kec. Bandongan	148.462.532,61	204.016.558,10	(55.554.025,49)	(27,23)
41	Kec. Candimulyo	145.196.264,83	187.367.165,68	(42.170.900,85)	(22,51)
42	Kec. Pakis	157.270.826,27	198.839.580,56	(41.568.754,29)	(20,91)
43	Kec. Ngablak	192.452.037,12	230.471.791,41	(38.019.754,29)	(16,50)
44	Kec. Grabag	142.567.784,67	178.220.225,53	(35.652.440,86)	(20,00)
45	Kec. Tegalrejo	83.835.757,90	117.027.282,48	(33.191.524,58)	(28,36)
46	Kec. Secang	1.203.335.012,48	930.909.717,79	272.425.294,69	29,26
47	Kec. Windusari	32.050.099,07	62.585.639,92	(30.535.540,85)	(48,79)
48	Bakesbangpol	122.504.444,66	104.748.194,66	17.756.250,00	16,95
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	251.841.529.633,02	239.959.608.176,39	11.881.921.456,63	4,95

Lampiran 5.88
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023

LAIN-LAIN = DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR + EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023

NO.	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR - LAIN-LAIN		6.910.601.765,07
1.	Koreksi Piutang Retribusi Daerah	1.999.999,65
	Koreksi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	1.999.999,65
	Disdagkop UKM	1.999.999,65
	0029/DISDAGKOP UKM/JP/2023-JP koreksi kurang saldo awal piutang retribusi Los	(0,35)
	0028/DISDAGKOP UKM/JP/2023-JP koreksi tambah piutang retribusi kios atas ketetapan tahun sebelumnya	2.000.000,00
2.	Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.646.151.872,00
	Piutang Pendapatan BLUD	4.646.151.872,00
	Dinkes	4.666.483.567,00
	0001/DINKES RSUDMP/JK/2023-JK Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang Pasien Umum 2023	(801.000,00)
	0003/DINKES RSUDMP/JK/2023-JK Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang Covid 2023	289.942.000,00
	0002/DINKES RSUDMP/JK/2023-JK Pencatatan Koreksi Keringanan Piutang atas Ketetapan Tahun 2023	(117.104.469,00)
	PAJE 43/(Pencatatan penambahan piutang BLUD Puskesmas atas pendapatan kapitasi dan Jampersal/KB 2022 yang diterima di 2023 - Dinkes)	187.487.969,00
	PAJE 46 / (Pencatatan penambahan piutang BLUD RS MP atas pendapatan klaim BPJS 2022 yang diterima di 2023 - RS Merah Putih - Dinkes)	4.189.854.598,00
	PAJE 10/(Pembatalan jurnal no 33.08/09.0/005591/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0030/01/2023 atas kesalahan pencatatan keringanan piutang - RS Merah Putih - Dinkes)	117.104.469,00
	RSUD Muntian	(20.331.695,00)
	0011/RSUD-MUNTILAN/JP/2023- JK Koreksi Kurang Pencatatan Piutang Pendapatan BLUD th 2021	(20.331.695,00)
3.	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	0,33
	Disdagkop UKM	0,33
	0061/DISDAGKOP/KABMGL/REVIU/2023- JP Koreksi Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka TA 2023	0,33
4.	Koreksi Tanah	15.060.355.700,00
	Koreksi Tanah persil	15.060.355.700,00
	Disdagkop UKM	15.060.355.700,00
	0008/DISDAGKOP UKM/JP/2023-JP Mutasi Tambah Aset Tanah Belum Tercatat	15.060.355.700,00
	0002A/BPPKAD/JP/MTASET/2022	(269.233.980,00)
5.	Koreksi Akumulasi Penyusutan	(12.434.433.865,66)
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(5.128.571,43)
	BPBD	(5.128.571,43)
	0005/BPBD/JP/2023-JP Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Hibah dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri	(5.128.571,43)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(24.800.000,00)
	Dinkes	(24.800.000,00)
	0002A/DINKES/JP/2023-JP MUTASI MASUK AKM PENYU PERALATAN DAN MESIN (RSCU&RSBM) HIBAH DARI BUMN	(16.800.000,00)
	0002A/DINKES/JP/2023-JP MUTASI MASUK AKM PENYU PERALATAN DAN MESIN (RSCU&RSBM) HIBAH DARI BUMN	(8.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(105.453.332,00)
	Dinkes	(105.453.332,00)
	0002A/DINKES/JP/2023-JP MUTASI MASUK AKM PENYU PERALATAN DAN MESIN (RSCU&RSBM) HIBAH DARI BUMN	(81.120.000,00)
	0002A/DINKES/JP/2023-JP MUTASI MASUK AKM PENYU PERALATAN DAN MESIN (RSCU&RSBM) HIBAH DARI BUMN	(24.333.332,00)
	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(25.000.000,00)
	Dinkes	(25.000.000,00)
	0002A/DINKES/JP/2023-JP MUTASI MASUK AKM PENYU PERALATAN DAN MESIN (RSCU&RSBM) HIBAH DARI BUMN	(25.000.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(12.210.298.110,73)
	DPU PR	(12.210.298.110,73)
	0001/DPUPR/JK/2023- JK AKUMULASI PENYUSUTAN HIBAH dari DIRJEN OTDA KEMENDAGRI	(12.210.298.110,73)
	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(5.731.500,00)
	Kec. Secang	(5.731.500,00)
	PAJE 15/(Jurnal Akumulasi penyusutan TA 2022 atas reklas KDP ke JJJ atas bangunan irigasi yang telah selesai tahun lalu yang terlambat diakui sebagai aset tetap JJJ - Kec. Secang)	(2.333.834,63)
	PAJE 15/(Jurnal Akumulasi penyusutan TA 2022 atas reklas KDP ke JJJ atas bangunan irigasi yang telah selesai tahun lalu yang terlambat diakui sebagai aset tetap JJJ - Kec. Secang)	(1.325.297,50)
	PAJE 15/(Jurnal Akumulasi penyusutan TA 2022 atas reklas KDP ke JJJ atas bangunan irigasi yang telah selesai tahun lalu yang terlambat diakui sebagai aset tetap JJJ - Kec. Secang)	(2.072.367,87)
	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(58.022.351,50)
	Disdikbud	(58.022.351,50)
	PAJE 65 / (Mencatat akumulasi aset tetap lainnya atas alat musik modern perolehan TA 2022 - Disdikbud)	(58.022.351,50)
6.	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(362.861.160,00)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(362.861.160,00)
	Dinkes	(263.671.160,00)
	00033/DINKES/JP/2023-koreksi akumulasi penyusutan software	(263.671.160,00)
	BPPKAD	(99.190.000,00)
	0001/JP/BPPKAD/KOREK/2023-JP KOREKSI AKUMULASI AMORTISASI ATAS ATB YG SUDAH TIDAK MEMILIKI UMUR EKONOMIS	(99.190.000,00)

NO.	KETERANGAN		JUMLAH (Rp)
7.	Koreksi Utang Belanja		(610.781,25)
	Koreksi Utang Belanja Jasa		(610.781,25)
	DLH		(610.781,25)
	0051/DLH/JP/2023- JP Pencatatan Utang Beban Sewa Tanah 2022	(610.781,25)	
	Jumlah		6.910.601.765,07



Lampiran 5.89
Ikhtisar Laporan Pertanggung Jawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kabupaten Magelang Tahun 2023

NO		KODE REK	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
1	KABUPATEN MAGELANG	1	PENDAPATAN				
		1 1	Pendapatan Asli Desa	61.733.498.031	59.923.358.986	1.810.139.045	
		1 2	Pendapatan Transfer	78.280.787.415	363.539.588.066	(285.258.800.651)	
		1 3	Pendapatan Lain-lain	8.136.596.033	68.337.659.774	(60.201.063.741)	
			JUMLAH PENDAPATAN	148.150.881.479	491.800.606.826	(343.649.725.347)	
		2	BELANJA				
		2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	188.485.679.924	182.279.013.016	6.206.666.908	
		2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	206.685.674.871	201.530.016.396	5.155.658.475	
		2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	56.786.529.113	32.778.084.390	24.008.444.723	
		2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	42.561.661.807	39.969.775.450	2.591.886.357	
		2 5	Belanja Tak Terduga	37.801.781.483	32.857.692.524	4.944.088.959	
			JUMLAH BELANJA	532.321.327.198	489.414.581.776	42.906.745.423	
			SURPLUS/DEFISIT	(384.170.445.719)	2.386.025.050	(386.556.470.770)	
		3	PEMBIAYAAN				
		3 1	Penerimaan Pembiayaan	58.470.237.079	12.465.688.132	(46.004.548.947)	
		3 2	Pengeluaran Pembiayaan	3.197.576.975	3.040.571.992	(157.004.983)	
			Pembiayaan Netto				
			PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.272.660.104	9.425.116.140	(45.847.543.964)	
			Silpa Tahun Berjalan	-			
			SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT	(325.700.208.640)	14.851.713.182	(432.561.019.717)	

Lampiran 5.90
Informasi Perkembangan Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi di Kabupaten Magelang

No	Kementerian/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kementerian Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA: 018.08.4.039158/2023 tanggal 30 November 2022	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan					
			1) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	3 Kawasan 5 Kecamatan (Bandongan, Grabag, Sawangan, Kaliangkrik, Tempuran)		5.656.330.000	5.407.645.000	96	97 kelompok tani	100
			Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND)							
			2) Pengawasan Alat Mesin Pertanian	21 kecamatan		15.000.000	14.960.000	99,73	1 paket	100
			Bintek Movev dan Evaluasi Lingkup Alat Mesin Pertanian							
			3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	21 kecamatan		67.753.000	67.433.000	99,53	1 paket	100
			Bimtek, monitoring, dan evaluasi lingkup pupuk dan pestisida							
			4) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	19 kecamatan		16.048.000	15.978.000	99,56	1 paket	100
			Asuransi Pertanian							
			Program Dukungan Managemen	Kabupaten Magelang						
			1) Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			56.175.000	55.353.750	98,54	1 paket	100
			Layanan Managemen Kerja Internal							
Jumlah Total						5.811.306.000	5.561.369.750	95,7		100